

TOWARDS NEW MOMENTUM with INNOVATIVE STRATEGIES

Menuju Momentum Baru Dengan Strategi Inovatif





bankbanten
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN

Sanggahan dan Lingkup Tanggung Jawab Disclaimer

Bank Banten menyajikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021 yang berisi pernyataan tentang kondisi keuangan, hasil operasional, kebijakan strategis, proyeksi, serta tujuan Perseroan yang dijalankan selama satu tahun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian karena informasi yang disajikan bersifat dinamis sesuai perkembangan aktual yang ada.

Pernyataan-pernyataan tersebut dibuat berdasarkan asumsi yang diperoleh setelah melakukan kajian yang rinci terhadap kondisi Perseroan terkini dan di masa yang akan datang. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil tertentu sesuai harapan.

Dalam Laporan Tahunan 2021 ini, kata "Perseroan" dan "Bank Banten" digunakan untuk menyebut PT Bank Pembangunan Daerah Banten selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perbankan. Adapun kata "Kami" juga digunakan atas dasar kemudahan dalam penyebutan PT Bank Pembangunan Daerah Banten secara umum.

Bank Banten presents an Annual Report for the 2021 fiscal year, which contains statements about the financial condition, operational results, strategic policies, projections, and objectives of the Company carried out for one year in the prevailing laws and regulations. This statement has the prospect of risk and uncertainty as the information presented is dynamic in accordance with actual developments.

Such statements are made based on assumptions obtained after conducting a detailed study of the current and future conditions of the Company. The Company does not guarantee that documents whose validity has been confirmed will bring certain results as expected.

In this 2021 Annual Report, the words "Company" and "Bank Banten" are used to refer to PT Bank Pembangunan Daerah Banten as a Company that engages in banking industry. The word "We" is also used to simply refer to PT Bank Pembangunan Daerah in general.



TOWARDS NEW MOMENTUM WITH INNOVATIVE STRATEGIES

Menuju Momentum Baru Dengan Strategi Inovatif

Dalam menyajikan Laporan Tahunan pada tahun buku 2021, Perseroan mengusung **“Towards New Momentum with Innovative Strategies”** sebagai tema Laporan Tahunan ini. Tema ini diusung berdasarkan pertimbangan dari pihak-pihak terkait untuk menggambarkan kinerja, fakta, serta pencapaian terkait performa Perseroan di tahun buku 2021. Tema tersebut juga menggambarkan aktivitas Bank Banten selama tahun buku 2021 ini.

Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan Peraturan OJK No. 16/SEOJK.04/2021 agar adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat serta pihak otoritas terkait.

Penyusunan Laporan Tahunan ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu sarana evaluasi dan juga pembelajaran bagi Perseroan di tahun-tahun mendatang.

In presenting the 2021 Annual Report, the Company presents **“Towards New Momentum with Innovative Strategies”** as the theme of this Annual Report. This theme is presented based on the considerations from related parties to describe the performance, facts, and achievements related to the Company's performance in the 2021 fiscal year. The theme also depicts the performance of Bank Banten throughout this 2021 fiscal year.

This Annual Report is written based on OJK Regulation No. 16/SEOJK.04/2021 so that there is an information transparency for the public and related authorities.

The composition of this Annual Reported is also expected to become a tool for evaluation and study for the Company in the years to come.





Daftar Isi

Table of Contents



Sekilas Laporan Tahunan
Annual Report at a Glance

Daftar Isi Table of Contents	2
Keberlanjutan Tema Sustainability Theme	6



01

Kilas Kinerja

Flashback Performance

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	10
Ikhtisar Saham Share Highlights	12
Aksi Korporasi Corporate Actions	14
Penghentian Sementara Perdagangan Saham/Penghapusan Pencatatan Saham Suspension/Delisting Of Shares	15
Peristiwa Penting Significant Events	16
Penghargaan Awards	21



02



Laporan Manajemen

Management Report

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	25
Laporan Direksi Board of Director Report	39

Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan Company Identity	50
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company	52
Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan Vision, Mission, and Company Value	54
Bidang Usaha Line of Business	56
Produk Layanan Products & Services	58
Makna Logo Logo's Meaning	59
Wilayah Operasional Operational Area	60
Struktur Organisasi Organization Structure	62
Jejak Langkah Milestone	64
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profile	66
Profil Direksi Board of Directors' Profile	69
Daftar Pejabat Senior List of Senior Executives	73



04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Struktur Hubungan Kepemilikan Saham Perseroan Shareholding Structure of the Company	76
Profil SDM HR Profile	77
Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	78
Kronologi Penerbitan Saham Shares Issuance Chronology	80
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Other Shares Listing Chronology	82
Akuntan Publik Public Accountant	82
Alamat Kantor dan/atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Addresses of the Office and/or Branch Offices or Representative Offices	82
Lembaga dan/atau Profesi Pasar Modal Capital Market Institutions and/or Professionals	86
Informasi Pada Website Perseroan Information on Company's Website	87
Pendidikan dan/atau Pelatihan Education and/or Training	88

Tinjauan Makro Ekonomi Macro Economic Review	98
Tinjauan Ekonomi Nasional National Economic Review	100
Tinjauan Perekonomian Banten Banten Economic Overview	105
Tinjauan Industri Perbankan Banking Industry Review	106
Tinjauan Operasional Per Segmen Bisnis Operational Review Per Business Segment	108
Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Review	122
Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Solvency and Collectability	131
Struktur Modal Capital Structure	132
Target serta Realisasi 2021 dan Proyeksi 2022 2021 Targets and Realizations and 2022 Projections	132

Aspek Pemasaran Marketing Aspects	134
Kebijakan Dividen Dividend Policy	135
Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Stock Ownership Program for Employees	135
Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Public Offering Proceeds Utilization	135
Transaksi Dengan Pihak Berelasi Transaction with Related Parties	137
Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	137
Sumber Daya Manusia Human Resources	138
Teknologi Informasi Information Technology	150
Prospek Usaha Business Outlook	168
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	170
Dividen dan Kebijakan Dividen Dividend and Dividend Policy	170
Transaksi dengan Pihak Afiliasi Transactions with Affiliated Parties	172
Perubahan Peraturan Perundang-undangan Changes in Regulations	172
Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity	173



Daftar Isi

Table of Contents



05

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

4



Dasar Penerapan Tata Kelola Basis of Good Corporate Governance Implementation	156	Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners Committees	210	Sanksi Administrasi Administrative Sanction	279
Prinsip-Prinsip Tata Kelola GCG Principles	158	Komite Direksi Board of Directors Committees	225	Kode Etik Code of Conduct	279
Struktur Tata Kelola GCG Structure	158	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	235	Budaya Perusahaan Corporate Culture	281
Penerapan Tata Kelola Tahun 2021 Corporate Governance Practice In 2021	160	Satuan Kerja Audit Intern Internal Audit Unit	242	Pelaporan Keuangan Whistleblowing System	283
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	162	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	246	Kebijakan Policy	273
Dewan Komisaris Board of Commissioners	179	Akuntan Publik Public Accountant	247	Benturan Kepentingan Conflict of Interest	287
Direksi Board of Directors	187	Fungsi Kepatuhan Compliance Function	225	Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan Bank Bank Financial and Non-Financial Condition Transparency	287
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy	199	Fungsi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Anti Money Laundering and Counter Terrorism Funding	259	Penerapan Pedoman GCG GCG Guidelines Application	289
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Meetings	202	Manajemen Risiko Risk Management	265	Tabel Eksposur Risiko Risk Exposure Table	299
		Perkara Penting yang Dihadapi Perseroan Legal Cases Faced by The Company	278		



06

Tanggung Jawab Perusahaan Corporate Social Responsibility

Komitmen Pelaksanaan CSR CSR Implementation Commitment	322
Unit Penanggung Jawab Pelaksanaan Kinerja Keberlanjutan Unit In Charge of Sustainability Performance Implementation	322
Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, dan Unit Penanggung Jawab Pelaksanaan Kinerja Keberlanjutan Competency Development for Board of Commissioners, Board of Directors, and Unit In Charge of Sustainability Performance Implementation	346
Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia Corporate Social Responsibility on Human Rights	326
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil	328

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup Corporate Social Responsibility on The Environment	329
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Corporate Social Responsibility on Manpower, Occupational Health and Safety	349
Tanggung Jawab Sosial Terkait Produk Atau Nasabah Corporate Social Responsibility Towards Products or Customers	339

07

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021

Statement of Board of
Commissioners and Board of
Directors on the Responsibility
for the Annual Report 2021

5



08

Laporan Keuangan Financial Statements

Keberlanjutan Tema

Sustainability Theme



2 0 1 7

GETTING CLOSER TO YOU

Optimalisasi peluang bisnis dilakukan Perseroan dengan mengembangkan pasar pembiayaan melalui segmen konsumen, komersial dan UMKM. Perseroan juga terus meningkatkan kerja sama pelayanan perbankan dengan mitra strategis yang meliputi lembaga/instansi pemerintah, BUMN maupun pihak swasta.

The Company conducted business opportunities optimization by developing market financing through consumer, commercial, and MSME segments. The Company also improves its banking services cooperation with strategic partnership, which includes government agencies/institutions, SOEs, and private sectors.



2 0 1 8

BUILDING TOMORROW EXPANDING SERVICES

Selaras dengan upaya penguatan permodalan, Bank Banten senantiasa meningkatkan kualitas layanan antara lain melalui pengembangan integrated payment system, penambahan jaringan kantor di wilayah Banten dan peningkatan kualitas layanan sebagai bentuk inovasi demi kenyamanan dan kepuasan nasabah

In line with strengthening of capital, Bank Banten strives to improve its customer services quality among others by developing an integrated payment system, expansion of office networks in Banten areas and improvement of service quality, as the innovation for customers convenience and satisfaction.



2 0 1 9

BRIDGING ACCESS TOWARD QUALITY GROWTH

Tahun 2019 menjadi tahun yang penting bagi kelanjutan bisnis Bank Banten dengan memfokuskan perbaikan kualitas kinerja dengan tujuan mencapai pertumbuhan bisnis yang diinginkan. Oleh sebab itulah, tema *Bridging Access Toward Quality Growth* dianggap menjadi tema yang tepat untuk mewakili Laporan Tahunan Bank Banten di tahun buku 2019.

2019 is an important year for Bank Banten's business sustainability by focusing on performance quality improvement with the aim of achieving desired business growth. Therefore, the Bridging Access Toward Quality Growth theme is considered to be the right theme to represent Bank Banten Annual Report in the 2019 fiscal year.



2 0 2 0

REVAMP THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION

Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, Bank Banten telah menyusun beberapa inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi transformasi digital menuju *digital banking* dan *integrated payment system* serta meningkatkan peran unit non-bisnis untuk mempercepat pertumbuhan usaha.

In a world that is increasingly connected digitally, Bank Banten has developed strategic initiatives that aimed at accelerating its digital transformation toward digital banking and an integrated payment system. The Bank also improves non business units' roles to advance business growth.

Sejalan dengan terpenuhinya peningkatan permodalan, transformasi digital yang tengah berlangsung didukung dengan penguatan fundamental, antara lain perbaikan kualitas aset, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko. Perubahan yang terus dilakukan akan memperkuat posisi strategis Bank Banten dalam perkembangan industri yang semakin dinamis.

In harmony with the increase of capital, the ongoing digital transformation is bolstered with fundamental solidification, among others improvement of assets quality, good corporate governance and risk management practices. The ever-going changes will strengthen the Bank Banten's strategic position in the increasingly dynamic industry development.



2 0 2 1

TOWARDS NEW MOMENTUM WITH INNOVATIVE STRATEGIES

Bank Banten menghasilkan ide-ide dan inovasi yang sifatnya dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Dimana setiap Insan Bank Banten dianggap memiliki karir dan pemikiran yang cemerlang karena budaya dan nilai Perusahaan yang sangat baik bagi karyawannya. Bank Banten dianggap mampu meraih momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi dengan membangun sinergitas antar produk dan layanannya sehingga masyarakat dan para stakeholder semakin yakin dan meningkat kepercayaannya terhadap Bank Banten.

Bank Banten generates dynamic ideas and innovations in accordance with the development of the times and current technology where every employee of Bank Banten is considered to have a brilliant career and minds for the excellent culture and values of the Company for its employees. Bank Banten is considered capable of gaining momentum for economic recovery due to the pandemic by building synergy between its products and services so that the public and stakeholders are more confident and have increased trust in Bank Banten.

Bank Banten juga memiliki visi untuk menjadi Bank yang terbaik serta mitra yang terpercaya, hal itu sudah semestinya dibarengi oleh penciptaan dobrakan-dobrakan baru dalam industri perbankan yang dapat menjadikan Bank Banten unggul dibanding para kompetitornya.

Bank Banten also has a vision to become the best bank and a trusted partner, which should be accompanied by the creation of new breakthroughs in the banking industry that can make Bank Banten ahead of its competitors.



Kilas Kinerja

Flashback Performance



“

Bank Banten mencatatkan pertumbuhan bisnis yang signifikan sepanjang tahun 2021. Aset tercatat Rp8,85 triliun, tumbuh Rp3,51 triliun atau 65,81% dari Rp5,34 triliun pada tahun 2020

Bank Banten recorded significant business growth throughout 2021. Assets were recorded at Rp8.85 trillion, which grew by Rp3.51 trillion or 65.81% of Rp5.34 trillion in 2020

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

(dalam juta Rupiah / in millions of Rupiah)

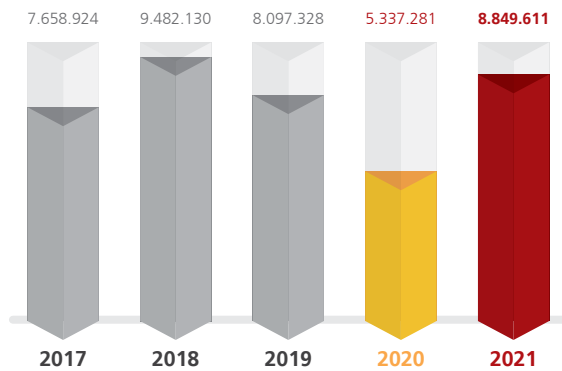
Data Keuangan / Financial Data	2021	2020	2019	2018	2017	YoY (%) 2021
Neraca / Balance Sheet						
Total Aset / Total Assets	8.849.611	5.337.281	8.097.328	9.482.130	7.658.924	
Kredit yang diberikan – Kotor / Total Loans – Gross	3.084.002	3.789.819	5.337.723	5.515.795	5.107.921	
Total Liabilitas / Total Liabilities	6.958.464	3.975.700	7.547.795	8.788.732	6.870.566	
Dana Pihak Ketiga / Third Party Funds	4.639.454	2.582.207	5.584.175	6.656.770	5.554.832	
Total Ekuitas / Total Equity	1.891.147	1.361.581	549.533	693.398	788.358	
Jumlah Investasi pada Entitas Lain / Total Investment in Other Entities		-	-	-	-	
Laba Rugi / Profit or Loss						
Pendapatan Bunga / Interest Income	310.272	372.209	553.871	571.662	528.927	
Beban Bunga / Interest Expense	(251.404)	(338.465)	(481.024)	(436.252)	(344.287)	
Pendapatan Bunga Bersih / Net Interest Income	58.868	33.744	72.847	135.410	184.640	
Pendapatan Operasional Lainnya / Other Operating Income	40.085	25.737	56.500	29.705	59.001	
Beban Operasional Lainnya / Other Operating Expenses	(383.125)	(294.640)	(308.662)	(296.067)	(347.535)	
Laba (Rugi) Operasional / Operating Profit (Loss)	(204.411)	(258.358)	(180.078)	(134.922)	(103.894)	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak / Profit (Loss) Before Tax	(204.268)	(260.720)	(180.700)	(131.076)	(99.853)	
Laba (Rugi) Bersih / Net Profit (Loss)	(265.176)	(308.158)	(137.559)	(100.131)	(76.285)	
Laba (Rugi) Komprehensif / Comprehensive Profit (Loss)	(263.917)	(308.970)	(143.865)	(94.960)	(76.220)	
Laba (Rugi) per Saham / Profit (Loss) per Share	(5,11)	(33,64)	(2,15)	(1,56)	(1,19)	
Jumlah Saham yang Beredar / Total Outstanding Shares	51.870,43	9.160,35	64.109,43	64.109,43	64.109,43	

Rasio Keuangan / Financial Ratios (%)	2021	2020	2019	2018	2017
ROA	(2,94)	(3,80)	(2,09)	(1,57)	(1,43)
ROE	(21,56)	(47,96)	(60,79)	(26,77)	(15,43)
Kredit yang Diberikan terhadap Total Dana Pihak Ketiga / Total Loans to Third Party Funds	66,47	146,77	95,59	82,86	91,95
KPMM-Dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar / CAR – by Calculating Credit Risk, Operational Risk, and Market Risk	41,68	34,75	9,01	10,04	10,22
Rasio Kredit Bermasalah – Gross / Gross – Non-Performing Loans	14,09	22,27	5,01	5,90	5,37
Rasio Kredit Bermasalah – Nett / Net – Non-Performing Loans	4,27	4,51	4,01	4,92	4,67
Marjin Pendapatan Bunga Bersih / Net Interest Income Margin	1,28	0,56	1,14	1,96	3,07
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / Operating Expense to Operating Income	158,33	164,90	129,22	121,97	117,66
Liabilitas terhadap Ekuitas / Debt to Equity	3.679,49	291,99	1.373,49	1.267,49	871,50
Liabilitas terhadap Jumlah Aset / Debt to Total Assets	78,63	74,49	93,21	92,69	89,71

Total Aset

Total Assets

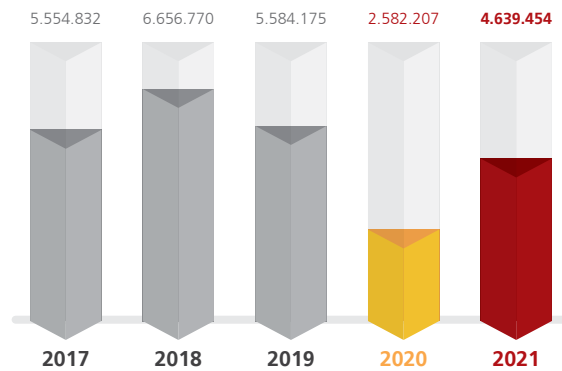
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



Dana Pihak Ketiga

Third Party Funds

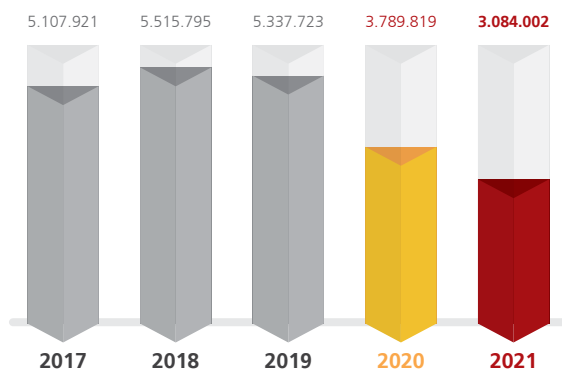
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



Kredit yang Diberikan

Total Loans

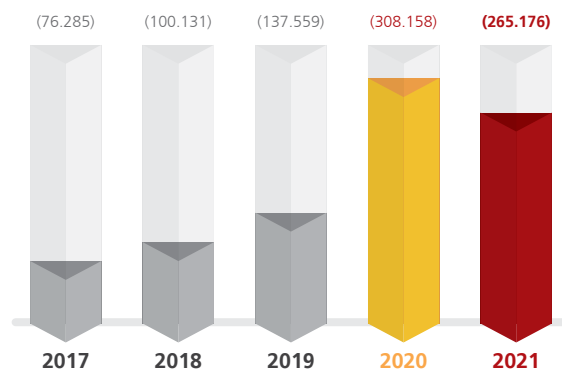
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



Laba (Rugi) Bersih

Net Profit (Loss)

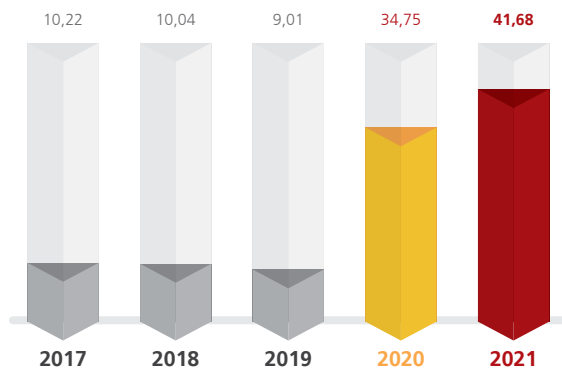
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



Rasio KPMM

KPMM Ratio

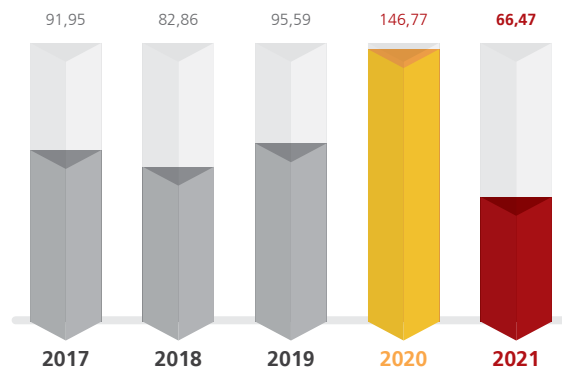
(%)



Rasio LDR

LDR Ratio

(%)

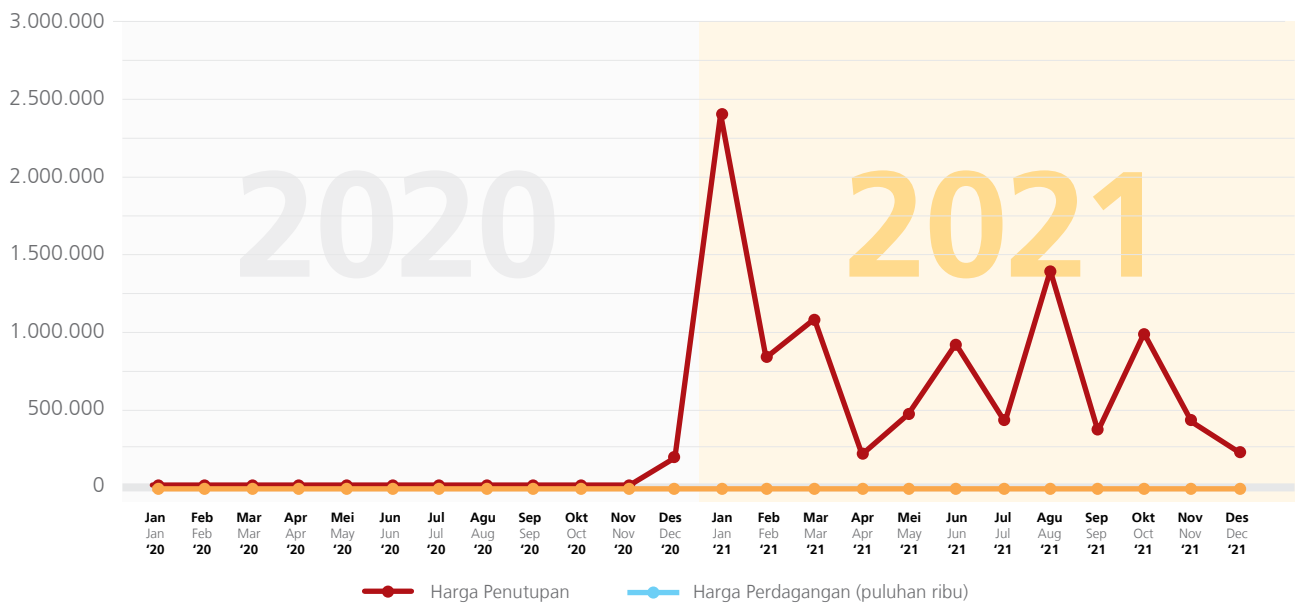


Ikhtisar Saham

Shares Highlights

PERGERAKAN HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN 2021 DAN 2020

PERGERAKAN HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN 2021 DAN 2020

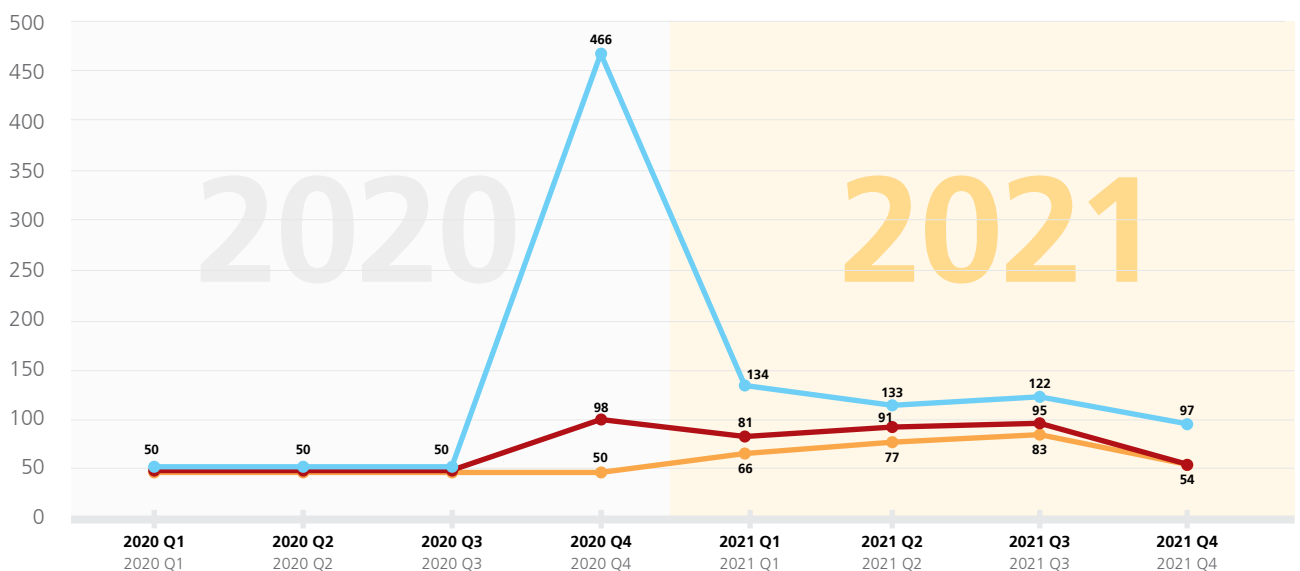


12



PERGERAKAN HARGA SAHAM 2021 DAN 2020

PERGERAKAN HARGA SAHAM 2021 DAN 2020



KINERJA PERGERAKAN SAHAM
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
TBK TAHUN 2021 DAN 2020

KINERJA PERGERAKAN SAHAM
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
TBK TAHUN 2021 DAN 2020

Periode / Period	Pasar Reguler / Regular Market						Jumlah Saham yang Tercatat / Total Outstanding Shares	Kapitalisasi Pasar / Market Capitalization
	Tertinggi / Highest (Rp)	Terendah / Lowest (Rp)	Penutupan / Closing (Rp)	Volume	Nilai / Value (Rp)	Frekuensi / Frequency		
2021								
Januari / January	134	66	74	24.063.198.600	2.404.312.000.000	360.224	43.403.920.512	3.211.890.117.888
Februari / February	106	69	96	8.409.500.000	745.040.000.000	170.798	43.403.920.512	4.166.776.369.152
Maret / March	124	80	81	10.832.300.000	1.154.630.000.000	219.909	43.403.920.512	3.515.717.561.472
April	89	77	80	2.149.400.000	177.770.000.000	58.836	43.403.920.512	3.472.313.640.960
Mei / May	102	77	97	4.706.600.000	416.420.000.000	88.852	43.403.920.512	4.210.180.289.664
Juni / June	113	87	91	9.235.000.000	900.700.000.000	181.896	43.403.920.512	3.949.756.766.592
Juli / July	102	83	92	4.375.000.000	409.510.000.000	100.217	43.403.920.512	3.993.160.687.104
Agustus / August	122	91	101	13.930.800.000	1.484.320.000.000	284.704	43.403.920.512	4.383.795.971.712
September	113	90	95	3.705.600.000	382.590.000.000	91.155	43.403.920.512	4.123.372.448.640
Oktober / October	97	68	73	9.889.900.000	777.260.000.000	156.329	51.351.733.883	3.748.676.573.459
November / November	76	63	64	4.411.900.000	306.030.000.000	78.767	51.351.733.883	3.286.510.968.512
Desember / December	68	54	54	2.314.500.000	144.730.000.000	49.796	51.351.733.883	2.772.993.629.682
Total				98.023.698.600	9.303.312.000.000	1.841.483		
2020								
Januari / January	50	50	50	139.277.977	5.508.595.150	250	63.468.336.053	3.173.416.802.650
Februari / February	50	50	50	60.347.900	1.834.304.900	134	63.468.336.053	3.173.416.802.650
Maret / March	50	50	50	55.133.004	1.785.208.008	106	63.468.336.053	3.173.416.802.650
April	50	50	50	31.536.773	684.317.795	306	63.468.336.053	3.173.416.802.650
Mei / May	50	50	50	64.786.900	952.553.900	141	63.468.336.053	3.173.416.802.650
Juni / June	50	50	50	89.478.125	1.174.492.813	165	63.468.336.053	3.173.416.802.650
Juli / July	50	50	50	9.062.700	453.135.000	388	63.468.336.053	3.173.416.802.650
Agustus / August	50	50	50	2.813.200	140.660.000	223	63.468.336.053	3.173.416.802.650
September	50	50	50	2.392.000	119.600.000	260	63.468.336.053	3.173.416.802.650
Oktober / October	50	50	50	2.737.100	136.855.000	480	63.468.336.053	3.173.416.802.650
November / November	50	50	50	30.023.200	1.501.160.000	743	63.468.336.053	3.173.416.802.650
Desember / December	466	50	98	1.939.273.400	258.035.692.600	55.012	9.096.244.907*	891.432.000.886
Total				2.426.862.279	272.326.575.166	58.208		

Keterangan / Description:

*) Jumlah saham setelah Reverse Stock dan Pelaksanaan HMETD PUT VI / Total Shares after Reverse Stock and the Implementation of HMETD PUT VI



Aksi Korporasi

Corporate Action

Pada tahun buku 2021, Perseroan melakukan kelanjutan aksi korporasi pada saat tahun 2020 yakni Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII dengan menerbitkan saham baru Seri C dalam rangka penambahan modal, dimana untuk pelaksanaan kedua aksi korporasi tersebut telah mendapatkan persetujuan RUPS Luar Biasa pada tanggal 2 Oktober 2020.

Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") sebagai awal dari rangkaian aksi korporasi Perseroan telah selesai dilaksanakan di awal tahun 2021, dimana modal disetor Bank dari hasil penerbitan saham seri C bertambah sebanyak 37.431.400.914 saham atau setara dengan Rp1,87 triliun. Dengan bertambahnya modal disetor hasil penerbitan saham Seri C, maka dengan demikian total modal disetor Perseroan setelah PUT VI menjadi sebanyak 43.842.343.952 saham atau setara dengan Rp3,9 triliun.

Kemudian ditahun yang sama, Perseroan kembali melaksanakan aksi korporasi yaitu Penawaran Umum Terbatas VII ("PUT VII") sebagai kelanjutan dari PUT sebelumnya. Pada tanggal 30 September 2021 Perseroan telah menerima

In the 2021 fiscal year, the Company continued its corporate actions in 2020, namely the Limited Public Offering VI and Limited Public Offering VII by issuing new Series C shares in order to increase capital, where for the implementation of the two corporate actions, the approval of the Extraordinary GMS on October 2, 2020.

The Limited Public Offering VI ("PUT VI") as the beginning of the Company's series of corporate actions was completed in early 2021, where the Bank's paid-up capital from the issuance of series C shares increased by 37,431,400,914 shares or equivalent to Rp1.87 trillion. With the increase in paid-in capital resulting from the issuance of Series C shares, the total paid-up capital of the Company after the PUT VI will be 43,842,343,952 shares or equivalent to Rp3.9 trillion.

Then in the same year, the Company carried out another corporate action, namely Limited Public Offering VII ("PUT VII") as a continuation of the previous PUT. On September 30, 2021, the Company has received the Notification of



“

Dengan berakhirnya pelaksanaan PUT VII diakhir tahun 2021, modal disetor Bank dari hasil penerbitan saham seri C bertambah sebanyak 8.028.094.314 saham atau setara dengan Rp618 miliar

With the end of PUT VII at the end of 2021, the Bank's paidup capital from the issuance of series C shares increased by 8,028,094,314 shares or equivalent to Rp618 billion

”

Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dengan No. S-177/D.04/2021 untuk melaksanakan PUT VII dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”). Pada PUT VII ini Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 23.388.895.089 saham baru Seri C dengan nilai nominal Rp50,- yang ditawarkan dengan harga Rp77,- per lembar saham.

Dengan berakhirnya pelaksanaan PUT VII diakhir tahun 2021, modal disetor Bank dari hasil penerbitan saham seri C bertambah sebanyak 8.028.094.314 saham atau setara dengan Rp618 Miliar. Dengan demikian total modal disetor Perseroan setelah PUT VII menjadi sebanyak 51.870.438.266 saham atau setara dengan Rp4,3 triiun.

the Effectiveness of the Registration Statement from the Financial Services Authority with No. S-177/D.04/2021 to implement PUT VII for the issuance of Pre-emptive Rights (“HMETD”). In this PUT VII, the Company issued a maximum of 23,388,895,089 new Series C shares with a nominal value of Rp50,- which were offered at a price of Rp77,- per share.

With the end of PUT VII at the end of 2021, the Bank's paid-up capital from the issuance of series C shares increased by 8,028,094,314 shares or equivalent to Rp618 billion. Thus, the total paid-up capital of the Company after the PUT VII became as much as 51,870,438,266 shares or equivalent to Rp4.3 trillion.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham/Penghapusan Pencatatan Saham

Suspension/Delisting of Shares

Sampai pada akhir tahun 2021, Bank Banten tidak mengalami atau mendapat penghentian sementara dalam perdagangan saham Perseroan ataupun penghapusan pencatatan saham.

As of the end of 2021, Bank Banten did not experience or receive any suspension or delisting on the Company's shares.



Peristiwa Penting

Significant Events



 **10 Maret 2021**
 March 10, 2021

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2021. / 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders



 **28 Maret 2021**
 March 28, 2021

Rapat Kerja Terbatas Wilayah Banten tahun 2021 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. / 2021 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Limited Working Meeting for the Banten Region



 **15 - 16 April 2021**
 April 15 - 16, 2021

Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi dan Penyusunan Rancang Bangun Master Program Budaya Bank Banten. / Focus Group Discussion (FGD) on the Evaluation and Preparation of the Master Plan for the Bank Banten Culture Program



 **22 April 2021**
 April 22, 2021

Workshop Budaya Perusahaan TRUST Bank Banten. / Bank Banten TRUST Corporate Culture Workshop.



 **29 April 2021**
 April 29, 2021

Tausyiah Buka Puasa Bersama dan Penyerahan Bantuan Sosial. / Tausyiah Breaking Fast Together and Delivering Social Aid.



 **5 Mei 2021**
 May 5, 2021

Pengukuhan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. / Inauguration of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Peristiwa Penting Significant Events



 **19 Mei 2021**
May 19, 2021

Launching Transformasi Budaya Perusahaan TRUST. / Launching TRUST Corporate Culture Transformation.



 **20 Mei 2021**
May 20, 2021

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. / Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders.



 **31 Mei 2021**
May 31, 2021

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dengan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. / The signing of the cooperation agreement between the Regional Revenue Agency of Banten Province and PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.



 **8 Juni 2021**
June 8, 2021

Halal Bi-Halal INTANI DPW Banten - "Membina Petani dan Nelayan untuk Ketahanan Pangan dan Bernilai Ekspor Halal". / Halal Bi-Halal INTANI DPW Banten - "Guiding Farmers and Fishermen for Food Security and Halal Export Value".



 **17 Juni 2021**
June 17, 2021

Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pemisahan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dari PT Banten Global Development / Focus Group Discussion (FGD) Plan for the Separation of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk from PT Banten Global Development



 **23 Juni 2021**
June 23, 2021

Rapat Kerja Terbatas Wilayah Banten tahun 2021 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. / The signing of the Cooperation Agreement between Bank Banten and the Banten Province Samsat Development Team.

Peristiwa Penting

Significant Events



 **29 Juni 2021**
June 29, 2021

Pelaksanaan Program Vaksinasi serentak di Provinsi Banten. / Implementation of the Simultaneous Vaccination Program in Banten Province.



 **16 Juli 2021**
July 16, 2021

Kick Off HUT Ke-5 Bank Banten "Transformasi Bersama Membangun Banten". / Kick Off 5th Anniversary of Bank Banten "Transform Together to Build Banten".



 **19 Juli 2021**
July 19, 2021

Penyerahan Hewan Qurban Bantuan Sosial Bank Banten dalam rangka Hari raya idul Adha 1442 H. / Submission of Sacrificial Animals from Bank Banten for the Social Supports in Celebrating Eid al-Adha 1442 H



 **29 Juli 2021**
July 29, 2021

HUT ke-5 Bank Banten "Transformasi Bersama Membangun Banten". / 5th Anniversary of Bank Banten "Transform Together to Build Banten"



 **17 Agustus 2021**
August 17, 2021

Perayaan HUT RI Ke- 76. / 76th Anniversary of Indonesia's Independence



 **26 Agustus 2021**
August 26, 2021

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dengan Kejaksaan Tinggi Banten . / The signing of the Memorandum of Understanding between PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk and the Banten High Court.

Peristiwa Penting Significant Events



17 September 2021
September 17, 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Bank Banten dan Fortress Data Service. / Signing of Cooperation Agreement between Bank Banten and Fortress Data Service.



28 September 2021
September 28, 2021

Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia "Tindak Pidana Perbankan: Tantangan dan Strategi Pencegahannya" / National Seminar on Communication Forum of the Board of Commissioners of Regional Development Banks throughout Indonesia.



14 Oktober 2021
October 14, 2021

Pembukaan KCP Kramatwatu. / Opening of KCP Kramatwatu.



18 Oktober 2021
October 18, 2021

Kunjungan Wahidin Halim Ke Bank Banten pada hari perdana pelaksanaan PUT VII BEKS. / Wahidin Halim's visit to Bank Banten on the first day of the PUT VII BEKS.



8 November 2021
November 8, 2021

Penandatanganan Kerjasama dengan Asuransi Reliance Indonesia. / Signing of Cooperation with Reliance Indonesia Insurance.



19 November 2021
November 19, 2021

Grand Launching Kanal Pembayaran PKB Melalui Indomaret & Alfamart / Grand Launching of PKB Payment Channels Through Indomaret & Alfamart.

Peristiwa Penting

Significant Events



 **11 Desember 2021**
 December 11, 2021

Peresmian Pembukaan KCP Duta Indah. / Inauguration of the Opening of KCP Duta Indah.



 **21 Desember 2021**
 December 21, 2021

Penandatanganan nota kesepahaman tentang pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan dengan Pemkab Lebak / The signing of a memorandum of understanding on the use of banking products and services with the Lebak Regency Government.



 **24 Desember 2021**
 December 24, 2021

Pelaksanaan Public Expose Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. / Implementation of the Annual Public Expose of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.



 **29 Desember 2021**
 December 29, 2021

Pembukaan Rekening Tabungan Harapan Jaro Baduy. / Launching of Harapan Jaro Baduy Savings Account.



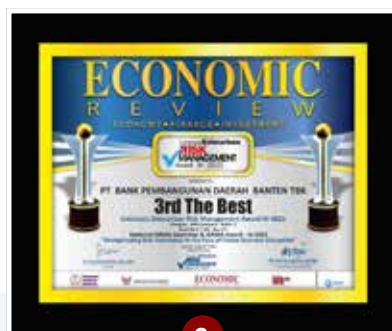
 **30 Desember 2021**
 December 30, 2021

Workshop Kepala Kantor Cabang Area Banten Berperan Aktif Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Banten 2022. / Workshop Head of Banten Area Branch Offices Playing an Active Role in the 2022 Banten Economic Growth.

Penghargaan Awards



1



2



3



4



5

No	Tanggal / Date	Nama Penghargaan / Award Title	Pemberi Penghargaan / Awarded By
1	3 Maret 2021 / March 3, 2021	Indonesia Best BUMD Awards 2021 on Developing a Healthy Banking System Through Limited Public Offering Program (Right Issue/HMETD) at Banten, Java Island	Indonesia Best BUMD Awards 2021
2	9 April 2021 / April 9, 2021	3 rd The Best Kategori BPD - Buku 2 / 3 rd Best, BPD Category – Book 2	Indonesia Enterprises Risk Management Award VI 2021
3	31 Mei 2021 / May 31, 2021	Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company	The 12th IICD Corporate Governance Conference and Award
4	3 Juni 2021 / June 3, 2021	2 nd Category Corporate Brand	Infobank Digital Brand Award 2021
5	11 Juni 2021 / June 11, 2021	3 rd The Best kategori BPD - Public Company (Tbk)	Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award 2021 (ICCA-VI-2021)



Laporan Manajemen

Management Report



“

Pertumbuhan bisnis dan perbaikan kinerja bank sepanjang tahun 2021 merupakan hasil dari beberapa milestone corporate action bank dalam rangka penyehatan, yaitu pergantian kepemimpinan (Direksi dan Dewan Komisaris).

Business growth and improvement in bank performance throughout 2021 were the result of several corporate action milestones for restructuring, namely the change of management (Board of Directors and Board of Commissioners)

“

Hasanuddin

**Komisaris Utama
Independen**

Independent President
Commissioners



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Para Pemegang Saham
dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Respected Shareholders and Stakeholders,



*Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh*

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya Bank Banten dapat melalui tahun 2021 yang penuh dengan tantangan menyusul belum usainya dampak pandemi Covid-19 secara keseluruhan. Mulai positifnya pertumbuhan ekonomi secara nasional merupakan momentum baru bagi Perusahaan untuk berupaya maksimal dalam melakukan pembenahan dan pengembangan produk serta inisiasi layanan digital untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas layanan perbankan yang ditawarkan.

Strategi bisnis yang dijalankan oleh Pengurus dikombinasikan dengan dukungan maksimal dari seluruh Pemegang Saham terutama Pemegang Saham Pengendali Terakhir sangat berarti untuk menjaga keberlangsungan usaha Bank Banten pada masa kini dan yang akan datang. Sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab

Distinguished Shareholders and Stakeholders, we express our utmost gratitude to the God Almighty for His blessings that encouraged Bank Banten to overcome the year 2021 which was rife with challenges, following the ongoing impact of Covid-19 pandemic as a whole. The economic growth that slowly went positive was a new momentum for the Company to maximize its efforts in improving and developing products as well as initiating digital services to increase public trust in the banking services offered by the Company.

The business strategy carried out by the Management, combined with maximum support from all Shareholders, especially the Ultimate Controlling Shareholder, is essential in maintaining the business continuity of Bank Banten in the present and in the future. In accordance with the duties, functions and responsibilities



Dewan Komisaris baik dalam Anggaran Dasar Perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten), Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan peraturan-peraturan lainnya, Dewan Komisaris telah berupaya menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya semaksimal mungkin, namun perlu kami akui bahwa hasil yang dicapai terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank di tahun 2021 belumlah maksimal seperti harapan Pemegang Saham.

Untuk itu atas nama Dewan Komisaris kami mengucapkan permintaan maaf, dan tentunya ke depan kami akan lebih meningkatkan peran dimana capaian tahun 2021 ini kami jadikan tolak ukur untuk lebih baik lagi. Atas nama Dewan Komisaris, izinkan Kami menyampaikan pandangan atas pengelolaan usaha Bank Banten selama tahun 2021.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI TAHUN 2021

Dewan Komisaris menilai Direksi telah berupaya untuk melaksanakan seluruh strategi pengembangan bisnis yang telah digariskan dalam *Action Plan*, *Corporate Plan* dan *Business Plan* (Rencana Bisnis Bank/RBB) yang telah disusun dan disampaikan kepada Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Pengendali Terakhir, maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan, meskipun berhadapan dengan tantangan eksternal terkait masih berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional dan domestik ditengah pandemi, dan juga *concern* internal terkait pembenahan dan perbaikan infrastruktur layanan, inisiatif *digital transformation*, perbaikan kualitas asset, pertumbuhan asset produktif bank, dan masih belum optimalnya pencapaian target-target yang dituangkan dalam RBB dan *Action Plan* penyehatan bank dengan deviasi yang cukup signifikan. Pergantian Pengurus bank dan penambahan modal yang cukup signifikan dalam tahun 2021 melalui PUT VII juga merupakan *milestone* penting untuk Bank dalam mengembangkan usahanya lebih berkesinambungan kedepan, dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas mutu layanan perbankan yang diberikan.

Ekonomi global selama tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif yang mengindikasikan bahwa stimulus ekonomi yang diinisiasi oleh Pemerintah di seluruh dunia sudah tepat, dan cukup mampu menopang ekonomi negara dari keterpurukan tajam akibat pandemi Covid-19 menyusul mulai menggeliatnya aktivitas produksi, konsumsi dan

of the Board of Commissioners based on the Articles of Association of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten), Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, POJK No. 55/POJK.03/2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks and other regulations, the Board of Commissioners has carried out their duties, functions and responsibilities to the maximum extent. However, we must admit that the achievement results of the Bank's Business Plan in 2021 were suboptimal compared to the expectations of the Shareholders.

For this reason, on behalf of the Board of Commissioners, we would like to apologize and we will further enhance our role in the future by setting the 2021 achievements as a comparison. On behalf of the Board of Commissioners, we will deliver our opinions on the business management of Bank Banten during 2021.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2021

The Board of Commissioners views that the Board of Directors has made efforts to implement all business development strategies outlined in the Action Plan, Corporate Plan and Bank Business Plan (RBB) that have been prepared and submitted to the Controlling Shareholder, the Ultimate Controlling Shareholder, and the Financial Services Authority. This was carried out while facing external challenges in the ongoing national and domestic economic recovery amid the pandemic, as well as internal concerns related to revamping and improvement of service infrastructure, digital transformation initiatives, asset quality improvement, bank productive assets growth, and suboptimal achievement of targets set out in the RBB and Action Plan for bank restructuring with a significant deviation. The change in bank management and a significant increase in capital in 2021 through PUT VII were also important milestones for the Bank to develop its business more sustainably in the future and to increase public confidence in the quality of banking services provided.

The global economy during 2021 recorded positive growth which indicated the effectiveness and sufficiency of economic stimulus initiated by the Governments around the world to save national economies from a sharp downturn due to the Covid-19 pandemic, followed by the revival of production, consumption and investment activities as several activity

investasi seiring telah dilonggarkannya beberapa pembatasan aktivitas. Perekonomian global tumbuh sebesar 5,7% pada tahun 2021, naik signifikan dibandingkan kontraksi sebesar -3,1% pada tahun 2020. Meskipun demikian, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan sedikit melambat dengan proyeksi pertumbuhan 4,4% seiring dengan masih ada kekhawatiran terkait ketidakpastian dalam pasar keuangan global yang masih terus berlanjut sejalan dengan risiko yang masih mengemuka, antara lain terkait peningkatan penyebaran Covid-19 varian Delta dan Omicron, antisipasi pasar terhadap kebijakan *tapering* dan kenaikan suku bunga acuan the Fed, serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama akibat gangguan rantai pasokan dan keterbatasan energi.

Economic recovery juga terjadi secara domestik, dimana pada triwulan IV 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% (yoy), meningkat dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 3,51% (yoy). Secara keseluruhan tahun 2021 ekonomi Indonesia tumbuh 3,69%, jauh meningkat dari kinerja tahun sebelumnya yang berkontraksi -2,07% (yoy). Dengan perkembangan itu, perekonomian domestik diperkirakan tumbuh lebih tinggi menjadi 4,7%-5,5% pada 2022, didukung oleh percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin meluas, dan berlanjutnya stimulus kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya.

Sementara itu, Provinsi Banten juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,44% pada tahun 2021, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 3,39%. Perekonomian Banten pada tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp665,92 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp55,21 juta atau US\$3.858,51. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang mencapai 12,76%. Sementara itu dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,28%. Ekonomi Banten triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 tumbuh 5,19% (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,65%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 46,79%. Jika dilihat dari struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2021, PDRB Provinsi Banten masih didominasi oleh Industri pengolahan 31,48%, Perdagangan besar dan eceran 12,90%, dan Konstruksi 12,33%, serta real estate 8,50%. Distribusi PDRB Banten terhadap kelompok Provinsi se-Jawa pada triwulan IV tahun 2021 tercatat sebesar 6,78%.

restrictions were eased. The global economy grew by 5.7% in 2021, a significant increase compared to a contraction of -3.1% in 2020. However, in 2022, global economic growth is expected to weaken slightly with a projected growth of 4.4% in the face of ongoing concerns related to uncertainty in global financial markets and other potential risks, among others related to the rise of the Delta and Omicron variants of Covid-19, market anticipation of tapering policies and the increase in the Fed's benchmark interest rate, as well as concerns over persisting inflation due to supply chain disruptions and energy constraints.

The domestic economy recovered as well, where in the Q4/2021, the Indonesian economy grew 5.02% (yoy), an increase from the previous quarter at 3.51% (yoy). Overall, in 2021, the Indonesian economy grew 3.69%, which was significantly higher than the previous year's contraction of -2.07% (yoy). With these developments, the domestic economy is predicted to grow even higher to 4.7%-5.5% in 2022, supported by accelerated vaccinations, extensive reopening of economy, and continued policy stimulus from Bank Indonesia, the Government, and other relevant authorities.

Meanwhile, the Banten Province also recorded growth of 4.44% in 2021, a significant increase compared the contraction of 3.39% in 2020. Banten's economy in 2021 as measured by Gross Regional Domestic Product (GRDP) at current prices reached Rp665.92 trillion and GRDP per capita at Rp55.21 million or US\$3,858.51. In terms of production, the highest growth occurred in the Electricity and Gas Supply sector which reached 12.76%. Meanwhile, in terms of expenditure, the Total Net Export Component experienced the highest growth of 33.28%. Banten's economy in Q4/2021 compared to Q4/2020 grew 5.19% (y-on-y). In terms of production, the Mining and Excavation sector saw the highest growth of 18.65%. In terms of expenditure, the Total Net Export component experienced the highest growth of 46.79%. Regarding the structure of the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in 2021, the GRDP of Banten Province was still dominated by the manufacturing industry by 31.48%, wholesale and retail trade 12.90%, construction 12.33%, and real estate 8.50%. The distribution of Banten's GRDP to groups of provinces throughout Java in Q4/2021 was recorded at 6.78%.



Seiring dengan momentum pertumbuhan ekonomi, kinerja perbankan nasional juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Data Statistik Perbankan Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per 31 Desember 2021, mencatat asset perbankan tahun 2021 sebesar Rp10.112 triliun, tumbuh Rp934,41 triliun atau 10,18% dari Rp9.178 triliun pada tahun 2020. Kredit perbankan tercatat Rp5.821 triliun, tumbuh Rp273 triliun atau 4,92% dari Rp5.548 triliun tahun 2020.

Dana pihak ketiga tercatat Rp7.479 triliun, tumbuh Rp814 triliun atau 12,21% dari Rp6.665 triliun di tahun 2020. Lebih jauh, pertumbuhan bisnis perbankan telah berdampak kepada meningkatnya perolehan laba. Secara total, bank umum mencatatkan laba bersih Rp140,21 triliun, naik signifikan sebesar Rp35,49 triliun atau 33,89% dari Rp104,72 pada tahun 2020. Bank umum konvensional dalam tahun 2021 mencatatkan rasio KPMM sebesar 25,66%, naik 1,77% dari 23,89% tahun 2020. Demikian juga dengan rasio rentabilitas tahun 2021 juga mencatatkan pertumbuhan, seperti rasio ROA 1,85% naik 0,26% dari 1,59%, rasio BOPO yang lebih efisien yaitu turun dari 86,58% menjadi 83,55%, Rasio NIM naik dari 4,45% menjadi 4,63%, namun LDR perbankan turun dari 82,54% menjadi 77,49% mengindikasikan fungsi intermediasi perbankan yang melemah dalam tahun 2021 akibat turunnya permintaan kredit dimasa pandemi.

Along with the momentum of economic growth, the performance of the national banking sector also showed significant growth. Indonesian Banking Statistics Data by the Financial Services Authority (OJK) as of December 31, 2021 recorded banking assets in 2021 at Rp10,112 trillion, up Rp934.41 trillion or 10.18% from Rp9,178 trillion in 2020. Bank credit was recorded at Rp5,821 trillion, up Rp273 trillion or 4.92% from Rp5,548 trillion in 2020.

Third party funds were recorded at Rp7,479 trillion, up Rp814 trillion or 12.21% from Rp6,665 trillion in 2020. Furthermore, the growth of the banking business had an impact on increasing profit. In total, commercial banks recorded a net profit of Rp140.21 trillion, a significant increase of Rp35.49 trillion or 33.89% from Rp104.72 in 2020. Conventional commercial banks in 2021 recorded a CAR ratio of 25.66%, up 1.77% from 23.89% in 2020. Likewise, the profitability ratios in 2021 also improved, such as the ROA ratio at 1.85%, which increased by 0.26% from 1.59%, more efficient BOPO ratio that decreased from 86.58% to 83.55%, the increase in NIM ratio from 4.45% to 4.63%, despite the decrease in banking LDR from 82.54% to 77.49%, indicating a weaker banking intermediation function in 2021 due to the decline in credit demand during the pandemic.

Secara industri, Bank Pembangunan Daerah (BPD) di tahun 2021 juga menunjukkan pertumbuhan bisnis yang cukup signifikan. Kredit BPD tercatat Rp520,50 triliun, naik Rp27,08 triliun atau 5,49% dari Rp493,42 triliun di tahun 2020. Dana pihak ketiga BPD tercatat Rp681,61 triliun, tumbuh Rp91 triliun atau 15,41% dari Rp590,60 triliun pada tahun 2020. BPD juga mencatatkan pertumbuhan laba tahun 2021 sebesar Rp13,78 triliun, tumbuh Rp774 miliar atau 5,95% dari tahun 2020. Seiring dengan pertumbuhan laba yang hanya 5,95% yoy, maka rasio keuangan BPD juga bertumbuh tipis. Rasio KPMM 22,77%, ROA 2,03%, BOPO 79,38%, NIM 5,72%, dan LDR 75,87%.

With regard to the industry, Regional Development Banks (BPD) in 2021 also showed significant business growth. BPD credit was recorded at Rp520.50 trillion, an increase of Rp27.08 trillion or 5.49% from Rp493.42 trillion in 2020. BPD third party funds were recorded at Rp681.61 trillion, which grew by Rp91 trillion or 15.41% from Rp590.60 trillion in 2020. BPD also recorded profit growth in 2021 to Rp13.78 trillion, up Rp774 billion or 5.95% from 2020. In line with the slight growth in profit by only 5.95% yoy, financial ratios of BPD also grew slightly. The CAR ratio was 22.77%, ROA 2.03%, BOPO 79.38%, NIM 5.72%, and LDR 75.87%.

Seiring dengan hal tersebut diatas, Bank Banten sebagai Bank yang sahamnya dikuasai mayoritas oleh PT Banten Global Development (BGD) sebagai Pemegang saham Pengendali dimana adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang dalam hal ini selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir, Bank Banten juga mencatatkan pertumbuhan bisnis yang signifikan sepanjang tahun 2021. Aset tercatat Rp8,85 triliun, tumbuh Rp3,51 triliun atau 65,81% dari Rp5,34 triliun pada tahun 2020. Kredit tercatat Rp3,08 triliun, turun Rp705,82 miliar, atau turun 18,62% dari Rp3,79 triliun pada tahun 2020.

In line with the description above, as a bank of which the majority of shares are controlled by PT Banten Global Development (BGD) as the Controlling Shareholder, which is a Regional Owned Enterprise (BUMD) of the Banten Provincial Government as the Ultimate Controlling Shareholder, Bank Banten also recorded significant business growth throughout 2021. Assets were recorded at Rp8.85 trillion, which grew by Rp3.51 trillion or 65.81% of Rp5.34 trillion in 2020. Credit was recorded at Rp3.08 trillion, down Rp705.82 billion or 18.62% from Rp3.79 trillion in 2020.

Dana pihak ketiga tercatat Rp4,64 triliun, tumbuh Rp2,06 triliun atau 79,67% dari Rp2,58 triliun pada tahun 2020. Rugi tercatat Rp265,18 miliar, turun Rp42,98 miliar atau 13,95% dari Rp308,16 miliar pada tahun 2020. Sementara itu, rasio rasio keuangan lainnya mencatatkan perbaikan. Rasio KPMM tercatat 41,10%, naik 7,08% dari 34,02% pada tahun 2020, ROA tercatat 41,10%, naik 7,08% dari 34,02% pada tahun 2020, dan NPL gross tercatat 14,09%, turun 8,18% dari 22,27 pada tahun 2020, dan NPL Net tercatat 4,27%, turun 0,24% dari 4,51 tahun 2020.

Meskipun mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan secara *year-on-year*, pertumbuhan tersebut diakui belum maksimal sebagaimana target yang dibuat dan tertuang dalam *Action Plan* dan Rencana Bisnis Bank yang disebabkan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Sehingga hal ini menjadi catatan Dewan Komisaris kepada Direksi dalam proses perencanaan bisnis dan menyelaraskan seluruh sumber daya *eksisting* dan mengerahkan kemampuan optimal dalam mencapai target yang ditetapkan.

Pertumbuhan bisnis dan perbaikan kinerja bank sepanjang tahun 2021 merupakan hasil dari beberapa *milestone corporate action* bank dalam rangka penyehatan, yaitu pergantian kepengurusan (Direksi dan Dewan Komisaris), pencabutan status BDPK oleh OJK, *buy-back asset sales* kredit consumer dan pensiunan, penambahan modal melalui PUT VII sebesar Rp618 miliar, dan penyehatan kualitas asset produktif bank. Sebagai hasilnya, OJK menetapkan peringkat Tingkat Kesehatan Bank (TKB) pada peringkat 3 – CUKUP SEHAT bagi Bank Banten dalam tahun 2021.

Third party funds were recorded at Rp4.64 trillion, which grew by Rp2.06 trillion or 79.67% from Rp2.58 trillion in 2020. Losses amounted to Rp265.18 billion, which decreased by Rp42.98 billion or 13.95% from Rp308.16 billion in 2020. Meanwhile, other financial ratios showed improvements. The CAR ratio was recorded at 41.10%, up 7.08% from 34.02% in 2020, ROA was recorded at 41.10%, up 7.08% from 34.02% in 2020, and gross NPL was recorded at 14.09%, down 8.18% from 22.27% in 2020, and Net NPL was recorded at 4.27%, down 0.24% from 4.51% in 2020.

Despite a significant growth year-on-year, the Bank acknowledged that this growth remained subpar compared to the targets set out and stated in the Bank's Action Plan and Business Plan due to many influential factors both internally and externally. This serves as a note from the Board of Commissioners to the Board of Directors on the process of business planning and aligning all existing resources and exerting optimal capabilities to achieve the set targets.

Business growth and improvement in bank performance throughout 2021 were the result of several corporate action milestones for restructuring, namely the change of management (Board of Directors and Board of Commissioners), revocation of BDPK status by the OJK, buy-back of asset sales for consumer and pensioner loans, additional capital through PUT VII amounting to Rp618 billion, and quality improvement of bank productive assets. As a result, OJK has determined a Bank Soundness Level (TKB) rating of 3 – FAIRLY SOUND for Bank Banten in 2021.

“

**Dana pihak ketiga
tercatat Rp4,64
triliun, tumbuh
Rp2,06 triliun
atau 79,67% dari
Rp2,58 triliun
pada tahun 2020**

Third party funds were recorded at Rp4.64 trillion, which grew by Rp2.06 trillion or 79.67% from Rp2.58 trillion in 2020.



Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan aktifnya dengan baik sebagai salah satu pilar implementasi tata kelola yang baik/GCG, serta tetap memberikan rekomendasi, arahan, saran, dan nasihat kepada Direksi untuk memastikan strategi bisnis dan program kerja yang ditetapkan berjalan dengan baik untuk mencapai target yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2021 dan penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang lebih baik oleh regulator.

Dalam rangka upaya meningkatkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi untuk merealisasikan *action plan* penyehatan bank yang telah dikomitmenkan dengan regulator, yaitu memperkuat permodalan bank melalui *right issue* dan investor strategis, memperbaiki rentabilitas bank melalui perbaikan kualitas asset produktif bank, penyelesaian kredit bermasalah, dan ekspansi kredit baru yang berkualitas, meningkatkan upaya efisiensi di segala lini bisnis, mereposisi struktur pendanaan ke sumber dana murah dan meningkatkan rasio CASA, mengembangkan produk baru berbasis teknologi *digital banking* untuk meningkatkan *fee-based income*, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis bank, serta meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko bank.

The Board of Commissioners has carried out its active supervisory function properly as one of the pillars of good corporate governance/GCG implementation, and continued to provide recommendations, directions, suggestions, and advice to the Board of Directors to ensure that the business strategy and work programs run well to achieve the targets set out in the Bank's 2021 Business Plan and to achieve a better assessment result of the Bank's Soundness Level by the regulator.

In an effort to improve the Bank Soundness Level assessment result, the Board of Commissioners continuously encouraged the Board of Directors to implement the action plan for bank restructuring as a commitment to the regulator, namely by strengthening bank capital through rights issues and strategic investors, improving bank profitability by increasing the quality of bank productive assets, resolving non-performing loans, expanding new loans with high quality, increasing efficiency in all business lines, repositioning the funding structure to low-cost sources of funds and increasing the CASA ratio, developing new products based on digital banking technology to increase fee-based income, and applying the principle of prudence in bank business operations, as well as improving the quality of bank risk management implementation.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI

Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk merealisasikan strategi yang tertuang dalam *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank dengan baik. Pengawasan yang dilakukan mencakup pengawasan atas realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan, pengawasan atas realisasi *action plan* penyehatan secara bulanan, berkomunikasi intensif dengan Direksi dalam hal perbaikan kredit bermasalah, perbaikan struktur keuangan dalam aspek permodalan, rentabilitas, efisiensi, kualitas aset, dan likuiditas menjadi perhatian utama untuk menjaga kelangsungan usaha pada masa mendatang.

Dewan Komisaris juga senantiasa mengingatkan Direksi untuk melaksanakan manajemen risiko usaha dengan baik, meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko untuk memperbaiki profil setiap risiko usaha bank yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi, menerapkan tata kelola yang baik, dan meningkatkan implementasi budaya kepatuhan diseluruh lini operasional bank.

ASSESSMENT ON THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN 2021

The Board of Commissioners encouraged the Board of Directors to properly realize the strategies set out in the Corporate Plan and Bank Business Plan. The supervision carried out includes supervision on the realization of the quarterly Bank Business Plan, supervision on the realization of the restructuring action plan on a monthly basis, intensive communication with the Board of Directors for resolving non-performing loans, improvement of the financial structure in terms of capital, profitability, efficiency, asset quality, and liquidity. These are the main concerns to maintain business continuity in the future.

The Board of Commissioners also constantly reminds the Board of Directors to carry out appropriate business risk management, improve the quality of risk management implementation to improve the profile of each bank business risk, namely credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, strategic risk, legal risk, compliance risk, and reputation risk, implement good corporate governance, and improve the compliance culture in all lines of bank operations.

Lebih jauh, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga menggarisbawahi beberapa temuan penting dan signifikan yang mempengaruhi implementasi strategi dan pencapaian kinerja keuangan bank, dan atas hal ini, teguran dan rekomendasi perbaikan telah disampaikan kepada Direksi.

Temuan tersebut antara lain berupa perubahan struktur organisasi yang dilakukan sampai dengan tiga kali sepanjang tahun 2021, penetapan dan penggantian Pejabat Eksekutif dengan frekuensi yang cukup tinggi, kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyaluran kredit melalui *fronting agent*, adanya inefisiensi dalam pengeluaran biaya umum dan operasional lainnya, dan tidak tercapainya sebagian besar target bisnis yang ditetapkan, baik dalam Rencana Bisnis Bank maupun dalam *Action Plan* penyehatan bank.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Dalam menyusun prospek usaha Perseroan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi, dan ini semua tertuang dalam dokumen *Corporate Plan* bank sebagai rencana strategis jangka menengah bank, dan Rencana Bisnis Bank sebagai rencana jangka pendek. Dengan target menjadi platform utama penggerak ekonomi daerah Banten, Perseroan menetapkan strategi *rightsizing* platform bisnis dan pengembangan *hybrid banking* terspesialisasi melalui tujuh belas inisiatif strategis dalam empat perspektif yaitu perspektif pengembangan individu dan organisasi, perspektif perbaikan proses bisnis internal, perspektif kepuasan customer, dan perspektif pencapaian kinerja keuangan yang sehat.

Dewan Komisaris mendukung upaya Direksi untuk terus memperkuat permodalan melalui serangkaian upaya antara lain mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui PT BGD untuk meningkatkan modalnya, Penawaran Umum Terbatas (PUT) dan mendorong Direksi untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten untuk menjadi pemegang saham di Banten. Namun upaya tersebut belum berhasil yang disebabkan beberapa faktor antara lain Tingkat Kesehatan Bank Banten yang belum dapat dijadikan dasar untuk menginvestasikan modal daerah dalam bentuk saham di Bank Banten. Untuk Penawaran Umum Terbatas, Bank Banten pada tahun 2021 berhasil mendapatkan modal sebesar Rp618 miliar.

Furthermore, in carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners also emphasized several important and significant findings that affect the implementation of strategies and the achievement of the Bank's financial performance. Accordingly, warnings and recommendations for improvement have been delivered to the Board of Directors.

These findings include changes to the organizational structure up to three times throughout 2021, the appointment and replacement of Executive Officers at considerably high frequency, cooperation with third parties in lending through fronting agents, inefficiencies in spending general and other operational costs, and not achieving most of the established business targets, both in the Bank Business Plan and in the Bank Restructuring Action Plan.

OPINION ON BUSINESS OUTLOOK

In developing business outlook, the Company considers its strengths and weaknesses as well as the opportunities and challenges that will be faced. This outlook is set out in the Bank Corporate Plan as a medium-term strategic plan and in the Bank Business Plan as a short-term plan. With the target of becoming the main driver of Banten's regional economy, the Company has established a strategy of rightsizing its business platform and the development of specialized hybrid banking through seventeen strategic initiatives in four perspectives, namely the perspective of individual and organizational development, the perspective of internal business process improvement, the perspective of customer satisfaction, and the perspective of sound financial performance achievement.

The Board of Commissioners supports the efforts of the Board of Directors to continue strengthening capital through a number of efforts, among others by encouraging the Banten Provincial Government to increase its capital through PT BGD, Limited Public Offering (PUT), and encouraging the Board of Directors to establish good communication with regency and city governments in Banten Province to become shareholders of the Company. However, this effort has not yielded results due to several factors, namely the soundness level of Bank Banten which remained subpar for regional capital investment in the form of shares in Bank Banten. From the Limited Public Offering, Bank Banten obtained capital amounting to Rp618 billion in 2021.



Selain itu, Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk meningkatkan upaya penghimpunan dana yang berbiaya murah dan meningkatkan rasio CASA sehingga menghemat biaya bunga yang dibayarkan Perseroan.

Pengembangan platform *digital banking* juga didorong untuk meningkatkan jumlah nasabah dan perolehan fee-based income bank sekaligus juga meningkatkan layanan digital bagi *stakeholder*.

Pemulihan perekonomian global dan nasional yang diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2022 merupakan indikator bagi industri perbankan karena semua aktivitas mulai kembali normal seperti semula. Perseroan tetap berfokus pada peningkatan mutu layanan kepada nasabah melalui berbagai produk penghimpunan dana, kredit dan jasa bank lainnya sembari tetap meningkatkan kualitas asset dan efisiensi perseroan untuk meningkatkan nilai aktivitas Perusahaan.

Peningkatan fungsi intermediasi Perseroan didukung juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan implementasi teknologi informasi dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Dewan Komisaris menilai upaya dalam meraih momentum baru dengan inovasi strategis dengan memperkuat modal dan mengoptimalkan mutu layanan Perusahaan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris memberi arahan kepada Direksi agar aspek-aspek pendukungnya terus ditingkatkan termasuk sumber daya manusia berkualitas.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan memiliki kerangka kerja tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*), sehingga pelaksanaan GCG memiliki pondasi yang kuat dan tujuan yang akuntabel. Kerangka kerja GCG meliputi pelaksanaan aspek GCG, *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Selama tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam operasionalnya yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Dewan Komisaris menilai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG ini dapat menopang pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Dari sisi *governance structure*, Dewan Komisaris menilai Perseroan telah memiliki struktur organisasi yang memadai, berikut dengan infrastruktur pendukung lainnya untuk mendukung pencapaian hasil sesuai dengan harapan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Moreover, the Board of Commissioners also encouraged the Board of Directors to raise low-cost funds and increase CASA ratio so as to save interest costs paid by the Company.

The development of a digital banking platform was also carried out to increase the number of customers and gain fee-based income for the Bank while improving digital services for stakeholders.

The global and national economic recovery which is expected to continue in 2022 is an indicator for the banking industry as all activities are starting to return to its normal condition. The Company remains focused on improving the quality of services to customers through various fund collection products, credit, and other bank services while improving the quality of assets and efficiency of the Company to increase the value of the Company's activities.

The improvement of the Company's intermediation function is also supported by building the quality of human resources and applying information technology to provide the best service for customers. The Board of Commissioners has assessed the efforts to gain new momentum through strategic innovations by strengthening capital and optimizing the quality of the Company's services. Therefore, the Board of Commissioners provided direction to the Board of Directors to continuously improve its supporting aspects, including qualified human resources.

OPINION ON CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company has in place the good corporate governance (GCG) framework, providing a solid foundation and accountable goals to achieve through GCG implementation. GCG framework includes the implementation of GCG principles, governance structure, governance process, and governance outcome. During 2021, Bank Banten has carried out GCG principles in its operations, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The Board of Commissioners assessed that the implementation of GCG principles will foster a sustainable business growth.

In terms of governance structure, the Board of Commissioners views that the Company has an adequate organizational structure along with its supporting infrastructure to encourage the achievement of results according to the expectations of the shareholders and other stakeholders.

Corporate Plan dan *Business Plan* juga telah disusun dan disampaikan kepada Otoritas sebagai panduan dalam menjalankan strategis bisnis. Meskipun demikian, Direksi kedepan harus senantiasa melakukan revitalisasi struktur organisasi untuk lebih menunjang eksekusi strategi, akselerasi bisnis, meraih peluang bisnis baru, sembari tetap meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi melalui peningkatan kompetensi SDM.

Dalam aspek *governance process*, Perseroan telah melaksanakan prinsip GCG dalam pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan antara lain melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun Luar Biasa. Perseroan juga telah melakukan keterbukaan informasi baik melalui *website* Bank Banten, *website* Bursa Efek Indonesia, maupun kanal komunikasi lainnya sesuai ketentuan. Dewan Komisaris juga senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara berkala dan menyampaikan laporannya kepada regulator. Selain itu, pengkinian terhadap ketentuan-ketentuan internal senantiasa dilakukan seiring dengan dinamika model bisnis dan produk baru yang dikembangkan bank.

Sementara dari sisi *governance outcome*, Dewan Komisaris berpandangan bahwa perbaikan kinerja tetap menjadi prioritas untuk dilakukan. Perbaikan kinerja di bidang permodalan, rentabilitas, kualitas asset, likuiditas, dan aspek penerapan GCG lainnya serta perbaikan profil risiko bank dengan target perbaikan Tingkat Kesehatan Bank dimasa mendatang sebagai basis untuk akselerasi pertumbuhan bisnis dimasa depan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perseroan telah memiliki sarana pelaporan yang bersifat independen, rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan Pelapor melalui *Whistleblowing System* (WBS). Pelaksanaan WBS ini bertujuan mencegah serta sebagai alat deteksi dini untuk mendorong seluruh pegawai berani melaporkan apabila terjadinya tindakan pelanggaran; mempermudah pihak-pihak terkait dalam menangani laporan pelanggaran; dan mengurangi kerugian, memperkuat sistem kontrol internal serta meningkatkan reputasi Perseroan di mata Pemangku Kepentingan; serta meningkatkan iklim kerja yang lebih jujur, bersih, dan kondusif.

The *Corporate Plan* and *Business Plan* were also prepared and submitted to the regulators as guidelines in carrying out business strategies. Nevertheless, going forward, the Board of Directors must continuously revitalize the organizational structure to support the execution of strategies, accelerate business, and seize new business opportunities, while enhancing organizational effectiveness and efficiency through HR competency improvement.

In terms of *governance process*, the Company has implemented GCG principles in its responsibility to the Shareholders and Stakeholders, among others through the mechanism of Annual or Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS). The Company has also carried out information disclosure through its website, Indonesia Stock Exchange website, and other communication channels in accordance with the provisions. The Board of Commissioners also performed supervision on the implementation of Bank Business Plan periodically and submitted the report to the regulators. Moreover, internal provisions are continuously updated in accordance with the dynamics of business model and new products developed by the Bank.

Meanwhile, in terms of *governance outcomes*, the Board of Commissioners believes that performance improvement shall remain a priority. Performance improvement in the aspects of capital, profitability, asset quality, liquidity, and other aspects of GCG implementation as well as improvement of bank risk profile and ultimately the Bank Soundness Level will serve as the basis for accelerating business growth in the future.

OPINION ON WHISTLEBLOWING SYSTEM IMPLEMENTATION

The Company has in place an independent Whistleblowing System (WBS) that is confidential and has a mechanism for Whistleblower's protection. The WBS implementation serves as a prevention and an early detection tool to encourage all employees to report frauds; facilitate related parties in handling the fraud reports; reduce losses, strengthen internal control system, and improve the Company's reputation to the Stakeholders; and create an honest, transparent, and favorable working environment.



Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan memiliki Pedoman *Whistleblowing* dan membentuk Pengelola WBS termasuk menerapkan prinsip-prinsip *Whistleblowing* yang meliputi menjaga kerahasiaan; melindungi pelapor; dan menindaklanjuti laporan. Dewan Komisaris berpandangan penerapan WBS telah berjalan cukup baik sepanjang tahun 2021.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris memiliki komite-komite yang berada di bawahnya. Komite-komite tersebut yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan Perseroan. Komite-komite yang ada telah melaksanakan rapat koordinasi secara rutin berkala dengan Dewan Komisaris dan dengan perangkat manajemen serta melakukan analisis, memberikan saran, masukan, dan rekomendasi terhadap perkembangan pengelolaan dan perbaikan kinerja Perseroan serta memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada Dewan Komisaris untuk kemudian ditindaklanjuti dan dikomunikasikan kepada Direksi.

FREKUENSI DAN TATA CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan saran secara konsisten kepada Direksi dalam mengelola usaha Perseroan agar mencapai hasil yang maksimal. Pemberian nasihat dilakukan dalam forum formal seperti Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi maupun Rapat Dewan Komisaris. Hasil-hasil rapat tersebut telah dicatat dalam notulensi rapat dan diberikan kepada Direksi. Selama tahun 2021, Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan sebanyak 20 kali, dan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 26 kali.

Kemudian, Dewan Komisaris juga memberdayakan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris dalam merumuskan nasehat dan saran kepada Direksi. Rapat Komite Audit terlaksana sebanyak 12 kali, dan Rapat Komite Pemantau Risiko terlaksana sebanyak 8 kali. Selain itu, nasihat dan rekomendasi perbaikan kinerja juga didokumentasikan ke dalam surat-surat yang disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.

To that end, the Company has established the Whistleblowing Guidelines, appointed WBS Manager, and applied Whistleblowing principles that includes maintaining confidentiality; protecting the whistleblowers; and following-up the reports. The Board of Commissioners considers the WBS implementation has been sufficiently carried out during 2021.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

To support the implementation of its duties and functions, the Board of Commissioners established supporting committees of the Board of Commissioners. These committees include the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee in accordance with the prevailing rules and with the aim to refine the implementation of GCG principles within the Company's activities. The committees also carried out regular coordination meetings with the Board of Commissioners and management instruments and provided analysis, advice, input, and recommendations on the development of the Company's management and performance improvements and provided constructive recommendations to the Board of Commissioners to be followed up and communicated to the Board of Directors.

FREQUENCY AND PROCEDURES OF ADVICE PROVISION TO THE BOARD OF DIRECTORS

During 2021, the Board of Commissioners has consistently provided advice and suggestions to the Board of Directors on the management of the Company to achieve optimum results. The advice provision was carried out through formal forums such as Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as Board of Commissioners Meetings. The meeting results have been recorded in the meeting minutes and submitted to the Board of Directors. During 2021, the Board of Commissioners has held 20 meetings and 26 joint meetings with the Board of Directors.

Furthermore, the Board of Commissioners also optimized committees under the Board of Commissioners to formulate advice and suggestions to the Board of Directors. Audit Committee Meetings were held 12 times while Risk Monitoring Committee Meetings were held 8 times. In addition, advice and recommendations for performance improvement were also documented in letters submitted by the Board of Commissioners to the Board of Directors.

APRESIASI

Akhir kata dari seluruh Dewan Komisaris, kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran Direksi yang telah menjalankan usaha Perseroan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan yang telah memberikan usaha terbaiknya untuk kemajuan bisnis Perseroan. Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Banten selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir, PT Banten Global Development selaku Pemegang Saham Pengendali, para pemegang saham publik, pemerintah, regulator jasa keuangan, para nasabah, mitra usaha, dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan pengelolaan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris berharap dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus berlanjut untuk bersama-sama mengembangkan Perseroan.

APPRECIATION

In conclusion, on behalf of the Board of Commissioners, we would like to convey our appreciation to the Board of Directors for the management of the Company that met the established plans. We also would like to express our appreciation to all employees for their best efforts for the business progress of the Company. The Board of Commissioners conveys our gratitude to the Banten Provincial Government as the Ultimate Shareholder, PT Banten Global Development as the Controlling Shareholder, public shareholders, the government, financial services regulators, customers, business partners, and all stakeholders for the continued support and trust for the Board of Commissioners in carrying out oversight function on the management of the Company.

The Board of Commissioners hopes of continuous support and good cooperation to work hand-in-hand in developing the Company.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Serang, April 2022



Hasanuddin

Komisaris Utama Independen

Independent President Commissioner



2

1



3

- 1 Hasanuddin**
Komisaris Utama Independen
Independent President Commissioner
- 2 Media Warman**
Komisaris Independen
Independent Commissioner
- 3 M. Yusuf**
Komisaris
Commissioner



“

Agus Syabarrudin

Direktur Utama

President Director



Laporan Direksi

Board of Directors Report

Para Pemegang Saham
dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Respected Shareholders and Stakeholders,



*Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh*

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan pertolongan-Nya, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dapat melalui tahun 2021 dengan lebih baik. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan menghadapi beragam tantangan di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan baik ini, sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tanggung jawab serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik, kami menyampaikan laporan tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laporan ini merupakan wujud dari keterbukaan informasi serta kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga memiliki komitmen untuk melakukan praktik terbaik yang berlaku di industri dalam pengelolaan kegiatan usaha agar dapat memberikan hasil maksimal kepada para pemangku kepentingan. Seluruh informasi dan data dalam laporan tahunan ini telah sejalan

*Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh*

Distinguished Shareholders and Stakeholders, let us praise the Almighty God for His blessings and grace that enabled PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk to pass the year 2021 with better performance. May we all be healthy and strong in addressing the challenges amid the Covid-19 pandemic and may the Almighty God always protect us all. On this occasion, as part of the implementation of our responsibilities and good corporate governance, we deliver the annual report of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk for the fiscal year ending on December 31, 2021.

This report is a manifestation of information disclosure and compliance of the Bank with applicable laws and regulations. The Bank is also committed to implementing the best practices in the industry in managing business activities to provide maximum results to stakeholders. All information and data in this annual report are consistent with the report audited by an independent auditor in accordance with standards



dengan laporan yang diaudit oleh auditor independen, yang sesuai dengan standar sebagaimana yang telah diamanatkan oleh regulasi. Karena itu, laporan ini sesuai dengan yang telah disampaikan kepada regulator.

KINERJA BANK BANTEN 2021

Agar dapat memahami secara komprehensif Kinerja Perseroan tahun 2021 serta prospek ke depannya, perlu diketahui jejak langkah Perseroan selama periode 2016 - 2020. Perjalanan Perseroan dimulai ketika Pemerintah Provinsi Banten (melalui Badan Usaha Milik Daerah, PT Banten Global Development) mengakuisisi PT Bank Pundi pada pertengahan tahun 2016 yang saat itu mengalami kesulitan keuangan dikarenakan beban NPL yang sangat tinggi (48%), sehingga menekan profitabilitas dan menggerus permodalan. Pasca akuisisi tersebut, di akhir 2016 Perseroan harus membukukan kerugian sebesar Rp405 miliar, dan CAR berada di level 13% (hampir menyentuh batas ketentuan minimum 11%).

Selama kurun waktu 2016 - 2020, Perseroan berusaha memperbaiki kinerjanya dengan pertumbuhan Kredit Komersial dan DPK, namun beban NPL peninggalan masa lalu ditambah lagi NPL yang terjadi sesudah menjadi Bank Banten sekitar Rp393 miliar dari kredit komersial terus menekan profitabilitas dan menggerus modal Bank, dan mengakibatkan CAR semakin tertekan ke level 9% di akhir tahun 2019, dibawah batas minimum regulasi. Situasi ini terus berlanjut, sehingga di tahun 2020 sebagian deposan mulai menarik dana simpanannya dari Perseroan. Akibatnya, Perseroan mengalami kesulitan likuiditas. Total DPK turun drastis dan Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat tajam hingga 146%, jauh di atas batas maksimum 110%. Kondisi ini membuat OJK akhirnya menetapkan Perseroan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) di pertengahan 2020. Aktivitas kredit dihentikan sementara, sehingga semakin menekan laba. Perseroan pun menutup tahun 2020 dengan Kerugian Rp308 miliar. Total kerugian kumulatif selama 5 tahun tersebut (2016 - 2020) mencapai Rp1.027 triliun.

Lembar baru sejarah Perseroan diawali dengan penambahan modal bank yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten di Semester II 2020, yang dilanjutkan dengan penunjukan Manajemen Perseroan yang baru (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) di bulan Maret 2021. Manajemen baru segera menyusun dan mengusulkan *Action Plan* Penyehatan Bank kepada OJK, yang akhirnya dapat diterima dan disetujui OJK sehingga Perseroan bisa keluar dari status BDPK pada bulan Mei 2021 sehingga dapat menjalankan aktivitas nya secara normal kembali. Dengan manajemen baru, Perseroan mengambil

set out in regulations.

BANK BANTEN PERFORMANCE 2021

For a comprehensive understanding of the Company's performance in 2021 and its future prospects, it is necessary to know the Company's progress during the 2016 – 2020 period. The Company's journey began when the Banten Provincial Government (through the Regional Owned Enterprise, PT Banten Global Development) acquired PT Bank Pundi in mid-2016, which faced financial difficulties at the time due to extremely high NPL (48%), which suppressed profitability and reduced capital. After the acquisition, at the end of 2016 the Company recorded a loss of Rp405 billion with CAR at 13% (nearing the minimum requirement of 11%).

Between 2016 - 2020, the Company endeavored to improve its performance by growing its Commercial Loans and TPF while carrying the burden of leftover NPL, in addition to the NPL that occurred after becoming Bank Banten amounting to approximately Rp393 billion from commercial loans that continued to suppress profitability and reduced the Bank's capital, resulting in declining CAR to 9% by the end of 2019, which was below the minimum regulatory limit. As this situation continued, in 2020 a number of depositors began to withdraw their deposit funds from the Company, leading to liquidity difficulties for the Company. Total TPF plummeted and the Loan to Deposit Ratio (LDR) sharply increased to 146%, well above the maximum limit of 110%. Consequently, the OJK put the Company as a Bank Under Special Supervision (BDPK) in mid-2020. Credit activities were temporarily suspended, thereby further suppressing profits. The Company also closed 2020 with a loss of Rp308 billion. The total cumulative loss for these 5 years (2016 – 2020) reached Rp1,027 trillion.

The new chapter of the Company's history began with the addition of bank capital provided by the Banten Provincial Government in H2/2020, followed by the appointment of new Company Management (Board of Directors and Board of Commissioners) in March 2021. The new management immediately prepared and proposed an Action Plan for Bank Restructuring to OJK, which was finally accepted and approved by OJK so that the BDPK status could be revoked in May 2021 and the Company could resume normal activities. With the new management, the Company took strategic steps

langkah strategis dalam upaya perbaikan struktur keuangan melalui penguatan pemodal dengan Aksi Korporasi. Selain itu, manajemen baru juga menetapkan 4 *Milestone* peningkatan kinerja perseroan berkesinambungan yaitu:

to improve the financial structure by strengthening capital through Corporate Action. In addition, the new management also set 4 Milestones for continuous improvement of the Company's performance, namely:

Tahap I / Phase I - 2021 Foundation Building	Pada tahap ini, Bank akan fokus kepada People Development yaitu penguatan talenta Bank dengan menanamkan budaya baru, yaitu TRUST yang akan menjadi karakter insan Bank yang berprofesional tinggi. At this stage, the Bank will focus on People Development, namely strengthening the Bank's talents by fostering a new culture, namely TRUST, which represents the character of highly professional Bank personnel.
Tahap II / Phase II - 2022 Growth Acceleration	Dalam pencapaian Growth Acceleration pada tahun II, Bank akan mengembangkan layanan berbasis IT yaitu IT Development. Akselerasi transformasi digital dalam rangka integrasi pengembangan teknologi informasi untuk menunjang terlaksananya ekosistem ekonomi keuangan daerah. In achieving Growth Acceleration in phase II, the Bank will develop IT-based services through IT Development. Acceleration of digital transformation to integrate information technology development to support the creation of the regional financial economic ecosystem.
Tahap III / Phase III - 2023 Sustainable Growth	Pada tahap III untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan, Bank akan melakukan Refocusing Model Bisnis yaitu penetapan model bisnis yang adaptif dan berorientasi kepada pasar. / In phase III to maintain sustainable growth, the Bank will conduct Business Model Refocusing, namely the establishment of an adaptive and market-oriented business model.
Tahap IV / Phase IV - 2024 Market Leader	Tahap terakhir dalam Grand Strategy yaitu sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank akan menjadi Market Leader di Provinsi Banten melalui ekspansi kredit dengan tetap memperhatikan kualitas kredit. Dalam hal ini penyelesaian dan penyelamatan kredit bermasalah dengan lebih cepat sehingga perlu penguatan satuan kerja penyelamatan kredit. / In the final stage in the Grand Strategy as a Regional Development Bank, the Bank will become the Market Leader in Banten Province through credit expansion while considering credit quality. In this case, the settlement and recovery of non-performing loans will be accelerated, so it is necessary to strengthen the credit recovery work unit.

Sejalan dengan upaya peningkatan permodalan, Perseroan terus melakukan penyempurnaan proses bisnis dan pelayanan, pengembangan SDM, dan penyempurnaan tata kelola perusahaan yang baik. Dari aspek kinerja finansial, secara umum Perseroan menunjukkan pertumbuhan yang semakin baik, yang ditunjukkan oleh kenaikan aset sebesar 65% (yoy) menjadi sebesar Rp8,8 triliun dari sebelumnya Rp5,3 triliun. *Fee Base Income* tahun 2021 sebesar Rp40,08 miliar mengalami kenaikan sebesar 55,74% dari sebelumnya Rp25,73 miliar pada tahun 2020. Perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp4,64 triliun, meningkat sebesar 79,7% dari tahun 2020 sebesar Rp2,06 triliun. Jika dilihat dari rasio kredit terhadap DPK (LDR) sebesar 66,47%, jauh lebih baik dibandingkan posisi tahun 2020 sebesar 146,77%. Dari pertumbuhan DPK, menunjukkan bahwa perseroan telah mendapatkan kepercayaan kembali oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan action plan yakni penguatan likuiditas perseroan. AL DPK pada tahun 2021 tercatat 57,21% meningkat jika dibandingkan tahun 2020 tercatat 12,43%. Kemudian untuk AL NCD pada tahun 2021 tercatat 378,93% meningkat dibandingkan tahun 2020 tercatat 85,0%.

In line with efforts to increase capital, the Company continued to improve business processes and services, develop human resources, and improve good corporate governance. In terms of financial performance, the Company demonstrated better growth in general, as indicated by an increase in assets by 65% (yoy) to Rp8.8 trillion from Rp5.3 trillion previously. Fee-Based Income in 2021 amounted to Rp40.08 billion, an increase by 55.74% from Rp25.73 billion in 2020. Third Party Funds (TPF) amounted to Rp4.64 trillion, which increased by 79.7% from 2020 at Rp2.06 trillion. The loan to deposit ratio (LDR) was recorded at 66.47%, significantly better than the ratio in 2020 of 146.77%. The growth in TPF shows that the Company has regained the trust of the public. This was in line with the action plan, namely strengthening the Company's liquidity. LA/TPF in 2021 was recorded at 57.21%, an increase compared to 2020 which was recorded at 12.43%. Meanwhile, LA/NCD in 2021 was recorded at 378.93%, an increase compared to 2020 at 85.0%.



Penyaluran kredit perseroan mencatatkan pertumbuhan positif, yang didominasi oleh penyaluran Kredit Konsumsi yang tumbuh sebesar 48,2% atau sebesar Rp820 miliar. Seiring dengan pandemi global yang masih berlangsung, Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp651 miliar dan Rp875 miliar. Perseroan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan penyelesaian atas kredit-kredit bermasalah, yang mana pada tahun 2021 Perseroan telah melakukan hapus buku untuk segmen Mikro sebesar Rp1,46 Triliun. Rasio NPL gross lebih baik dari tahun 2020 menjadi sebesar 14,1% dan Rasio NPL Net dari yang ditargetkan sebesar 4,34%, tercapai sebesar 4,27%.

Perseroan telah berhasil menekan kerugian lebih baik dibandingkan tahun 2020, dimana Rugi sebelum pajak sebesar 204,2 miliar, lebih baik 21,7% dari tahun 2020 sebesar Rp260,7 miliar. Rugi bersih tercatat 265,1 miliar, lebih baik 13,9% dari tahun 2020 sebesar Rp308,1 miliar. Dalam aspek permodalan Perseroan mencatatkan peningkatan yang signifikan dengan ekuitas sebesar Rp1,9 triliun, meningkat 38,9% dari tahun 2020 sebesar Rp529,5 miliar. Sehingga, permodalan Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada tahun 2021 sebesar 41,68% melebihi yang ditargetkan sebesar 30,02%, jauh lebih baik dari standar ketentuan OJK. Adapun Rasio Net Interest Margin (NIM) dari yang ditargetkan sebesar 3,66% telah terealisasi sebesar 1,28%.

PROSPEK USAHA 2022

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5%. Prospek tersebut didukung oleh peningkatan secara bertahap pada permintaan domestik dan dampak positif dari ekonomi global yang semakin membaik. Kendati demikian, masih ada ketidakpastian yang harus diantisipasi, karena COVID-19 belum seutuhnya berlalu. Begitu juga dengan kondisi pasar, dengan adanya peluang kebijakan tapering atau pengurangan dukungan moneter dan fiskal yang akan dilakukan oleh Bank Sentral di seluruh dunia. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak kenaikan suku bunga.

Selain itu, masih ada gangguan *supply chain* dari sektor riil. Dalam situasi seperti itu, Bank memperkirakan penyaluran kredit industri perbankan tetap tumbuh positif. Dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi dan kredit industri perbankan, Perseroan akan fokus untuk menumbuhkan penyaluran kredit, peningkatan *Fee Based Income* dengan menetapkan *risk appetite* dengan tujuan yang diperlukan dengan mengoptimalkan ekosistem bisnis. Dengan demikian, Perseroan akan mampu menjaga kualitas kredit yang baik, tersedianya DPK yang memadai dan pendapatan *Fee Based Income* tetap terjaga dengan baik.

The Company's lending recorded positive growth, which was dominated by consumer loans which grew by 48.2% or Rp820 billion. With the persisting global pandemic, Working Capital Loans and Investment Loans decreased by Rp651 billion and Rp875 billion, respectively. The Company is committed to improving and settling non-performing loans, which was carried out in 2021 through the write-off in Micro segment amounting to Rp1.46 trillion. The gross NPL ratio improved from 2020 to 14.1% and the net NPL Ratio reached 4.27% from the target of 4.34%.

The Company succeeded in reducing losses better than in 2020, where loss before tax amounted to Rp204.2 billion, an improvement of 21.7% than 2020 at Rp260.7 billion. Net loss was recorded at 265.1 billion, an improvement of 13.9% than 2020 at Rp308.1 billion. In terms of capital, the Company recorded a significant rise with equity of Rp1.9 trillion, an increase of 38.9% from 2020 at Rp529.5 billion. Thus, the Capital Adequacy Ratio (CAR) in 2021 was 41.68%, exceeding the target of 30.02% and better than the standard set out by OJK regulation. The Net Interest Margin (NIM) Ratio was realized at 1.28% from the target of 3.66%.

2022 BUSINESS OUTLOOK

The World Bank projected Indonesia's economic growth in 2022 to reach 5%. This outlook is supported by a gradual increase in domestic demand and the positive impact of an improving global economy. However, there are still uncertainties that must be anticipated as COVID-19 has not been completely resolved. The market condition is marked with the chance for tapering policies or reducing monetary and fiscal support by Central Banks around the world, which has the potential to increase interest rates.

In addition, there are supply chain disruptions from the real sector. In this situation, the Bank estimates that the banking industry's lending will continue to grow positively. By taking advantage of the potential for economic growth and credit in the banking industry, the Company will focus on growing lending, increasing Fee-Based Income by setting risk appetite with the required objectives by optimizing the business ecosystem. This way, the Company will be able to maintain good credit quality, adequate TPF availability, and well-maintained Fee Based Income.

Perseroan juga akan fokus untuk meningkatkan basis pelanggan dan pendapatan melalui peluncuran Mobile Banking guna mengoptimalkan saluran distribusi, kolaborasi lintas LOB (*Line of Business*) dan melakukan kemitraan strategis dengan ekosistem bisnis, khususnya ekosistem ekonomi Provinsi Banten. Strategi lainnya adalah meningkatkan Sumber Dana Murah (*Current Account Saving Account/CASA*) dan pendapatan dari *Fee Based Income*.

Di tahun 2022, Perseroan akan terus menjaga Margin Bunga Bersih (*Net Interest Margin / NIM*), mengelola *yield* dan biaya dana dalam menghadapi kemungkinan situasi peningkatan suku bunga serta meningkatnya kompetisi pendanaan dari simpanan nasabah sebagai dampak dariantisipasi pertumbuhan kredit industri. Perseroan juga akan melanjutkan upaya efisiensi biaya operasional dan memperbaiki rasio *Cost to Income*.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan tetap konsisten untuk menerapkan tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dan berupaya menyempurnakan pelaksanaan GCG untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Perseroan melanjutkan implementasi GCG yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yaitu antara lain meningkatkan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dengan melakukan *review* dan kajian atas peraturan-peraturan terkait yang diterbitkan oleh *regulator* dan pemerintah.

Perseroan telah melaksanakan *self assesment* GCG tiap semester dan mengukur perkembangan perbaikan indikator kunci dengan menggunakan 11 (sebelas) aspek kriteria yang ditetapkan oleh OJK, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern.
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure).
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal.
11. Rencana Strategis Bank

The Company will also focus on increasing its customer base and revenue through the launch of Mobile Banking to optimize distribution channels, cross-LOB (*Line of Business*) collaboration, and establish strategic partnerships with the business ecosystem, particularly the economic ecosystem of Banten Province. Another strategy is to increase the Source of Low-Cost Funds (*Current Account Saving Account/CASA*) and Fee-Based Income.

In 2022, the Company will continue to maintain the Net Interest Margin (NIM), manage the yield and cost of funds in the face of potentially increasing interest rates and competition in funding from customer deposits as a result of the anticipated growth in industrial loans. The Company will also continue its efforts to increase operational cost efficiency and the Cost to Income ratio.

CORPORATE GOVERNANCE

The Company remains consistent in implementing Good Corporate Governance (GCG) and strives to refine GCG implementation to foster sustainable business growth. The Company continues GCG implementation from the previous year, such as improving compliance with the prevailing provisions by reviewing and analyzing relevant regulations issued by the regulators and government.

The Company has conducted GCG self-assessment every semester and measured the improvements of key indicators using 11 (eleven) criteria set out by the OJK as follows:

1. Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors.
2. Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.
3. Completeness and Duty Implementation of Committees.
4. Conflict of Interest Handling.
5. Implementation of the Bank Compliance Function.
6. Implementation of the Internal Audit Function.
7. Implementation of the External Audit Function.
8. Implementation of Risk Management including Internal Control System.
9. Provision of Funds to Related Parties and Large Exposures.
10. Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions, Governance Implementation Report, and Internal Reporting.
11. Bank Strategic Plan



Berdasarkan hasil penilaian sendiri dan OJK, Perseroan berada di Peringkat Komposit 3 (PK-3), yang mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Dengan melaksanakan Tata Kelola yang baik pada seluruh kegiatan Bank, baik dalam struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola yang dilakukan secara transparan, akuntabel, tanggungjawab penuh, independen serta berkewajaran dan berkesetaraan dapat meningkatkan kinerja Bank baik dalam keuangan dan non keuangan Bank. Selain itu, Perseroan telah menyusun Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia atas implementasi Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan berpandangan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan modal penting dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Pada tahun 2021, salah satu faktor penting dari kebijakan di bidang SDM, khususnya berkenaan dengan upaya menarik, mengembangkan dan mempertahankan talenta (*to attract, develop and retain talents*), ialah dengan menjalankan *Banten Leadership Program*, dimana pada program tersebut setiap karyawan diberikan kesempatan utk mengembangkan dirinya untuk mencapai prestasi terbaik dan peningkatan karir. Program tersebut diharapkan bisa membantu akselerasi pencapaian kinerja perseroan.

Hal mendasar dalam pengembangan SDM, perseroan telah meluncurkan Budaya Perusahaan TRUST yang akan terus dijadikan sebagai pendorong peningkatan produktifitas dan kualitas kerja karyawan. Perseroan juga telah merealisasikan sejumlah inisiatif dalam rangka pengembangan SDM, diantaranya, program *job evaluation*, yaitu untuk memahami nilai yang dimiliki setiap pekerjaan dalam rangka membangun struktur grade agar sejalan dengan kebutuhan bisnis. Implementasi manajemen talenta dilaksanakan melalui sistem jenjang karir baik melalui rotasi, mutasi, promosi, dan demosi yang terukur untuk menimbulkan dampak terhadap peningkatan kapabilitas dan kinerja organisasi.

Based on the results of self-assessment and OJK assessment, the Company is at Composite Rating 3 (PK-3), which reflects that the Company's management has implemented good corporate governance fairly, so that it is considered quite capable of addressing significant negative influences from changes in business conditions and other external factors. This is reflected in the adequate compliance with governance principles. In the event of any weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, these weaknesses are generally quite significant and require sufficient attention from the Bank's management.

The implementation of Good Corporate Governance in all Bank activities, including the Governance structure, Governance Process, and Governance Results in a transparent, accountable, responsible, independent, fair and equitable manner will improve the Bank's performance both in financial and non-financial aspects. Moreover, the Company has developed Indonesian Sustainable Finance Initiative for the implementation of OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 dated July 27, 2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

The Company acknowledges the pivotal role of human resources (HR) as a capital in supporting the achievement of the Company's objectives. In 2021, an important HR policy related to efforts to attract, develop and retain talent was the Banten Leadership Program, in which every employee is given the opportunity to develop themselves to achieve the best performance and career advancement. The program is expected to help accelerate the achievement of the Company's performance.

As a foundation for developing human resources, the Company has launched the TRUST Corporate Culture which will serve as the driver to increase productivity and work quality of employees. The Company has also realized several initiatives in HR development, including the job evaluation program, which aims to understand the value of each job to build a grade structure in line with business needs. Talent management is implemented through a career path system, namely through measurable rotations, transfers, promotions and demotions to create impact on organizational capability and performance enhancement.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan secara berkala melakukan sejumlah perbaikan dan peninjauan kembali terkait program remunerasi bagi karyawan. Strategi kebijakan remunerasi dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan perusahaan serta memperhatikan remunerasi yang berlaku secara umum di perbankan, dalam hal ini menyesuaikan *peer group* Perseroan, sehingga remunerasi yang diterapkan diharapkan kompetitif dan sesuai dengan pola merit sistem.

APRESIASI

Akhir kata, atas nama Direksi, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemegang Saham Pengendali Terakhir; Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten beserta unsur Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, PT Banten Global Development selaku Pemegang Saham Pengendali, para pemegang saham publik, pemangku kepentingan, serta mitra usaha Perseroan. Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan arahan dan nasihat serta mengawasi jalannya usaha Perseroan. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pegawai yang telah bekerja keras untuk merealisasikan target Perseroan.

Dengan dukungan tersebut akan menjadi pendorong semangat kami untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola Perseroan agar menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi Banten, umumnya untuk pemulihan ekonomi nasional, mampu memberikan PAD di Provinsi Banten, meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat Banten serta memberikan keuntungan bagi para pemegang saham Perseroan. Semoga upaya ini diberikan kemudahan dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

In improving employee's welfare, the Company periodically improves and re-analyzes the remuneration program for the employees. The remuneration policy strategy is carried out by adjusting to the Company's financial capability and taking into account the generally applicable remuneration in the banking industry, namely by adjusting to the Company's peer group, in order to implement a competitive remuneration in accordance with the merit system.

APPRECIATION

In conclusion, on behalf of the Board of Directors, we would like to convey our appreciation for the support of our Ultimate Shareholders; Governor of Banten, Vice Governor of Banten as well as all Leaders within the Banten Provincial Government, PT Banten Global Development as the Controlling Shareholder, public shareholders, stakeholders, as well as the Company's business partners. We would like to express our gratitude and appreciation to the Board of Commissioners for the directives and advice as well as oversight in the management of the Company. Our appreciation extends to all employees for their hard work in realizing the Company's targets.

This support will encourage us to improve performance in managing the Company to be at the forefront of Banten economic advancement and national economic recovery, provide PAD in the Banten Province, improve the welfare of Banten people, and contribute profits for the shareholders of the Company. May God the Almighty help us and bless our efforts.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Serang, April 2022



Agus Syabarrudin

Direktur Utama

President Director





1 Agus Syabarrudin
Direktur Utama
President Director

4 Denny Sorimulia Karim
Direktur Operasional & Transformasi
Operational and Transformation Director





Profil Perusahaan

Company Profile



“

Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat Non Operasional (KPNO), 1 Kantor Cabang Khusus (KCK) , 25 Kantor Cabang (KC), 17 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Kas (KK), 59 Kantor Fungsional (KF) dan 1 Kantor Wilayah (KW), yang tersebar di seluruh Indonesia.

The Company has 1 Non-Operational Head Office (KPNO), 1 Special Branch Office (KCK), 25 Branch Offices (KC), 17 Sub-Branch Offices (KCP), 3 Cash Offices (KK), 59 Functional Offices (KF), and 1 Regional Office (KW), which are located throughout Indonesia.

Identitas Perusahaan

Corporate Identity



Nama Perusahaan

Company's Name

**PT BANK PEMBANGUNAN
DAERAH BANTEN Tbk**



bankbanten
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN



Alamat Perusahaan

Company's Address

Jl. Jenderal Sudirman Kemang Ruko
Sembilan No. 4, 5, dan 6 Kelurahan Sumur
Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang,
Banten



Telepon

Phone

0254 – 7917346

0254 – 7924060



Surat Elektronik

E-mail

corporate.secretary@bankbanten.co.id



Situs

Website

www.bankbanten.co.id



Tanggal Pendirian

Date of Establishment

11 September 1992

September 11, 1992



Bidang Usaha

Line of Business

Perbankan

Banking



Modal Dasar

Authorized Capital

Rp8.000.000.000.040



Modal Ditempatkan

Modal Ditempatkan

Rp2.173.359.918.090 *)

Rp3.907.459.398.840 **)



Kepemilikan Saham

Share Ownership

- PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 66,11%
- Masyarakat / Public 33,89%



Kode Saham

Ticker Code

BEKS



Tanggal Penawaran Saham Umum Perdana

Initial Public Offering

13 Juli 2001 / July 13, 2001



Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

- Akta Bank No.65 tanggal 16 Januari 1996 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H, Notaris di Jakarta, PT Executive International Bank berubah nama menjadi PT Bank Eksekutif International. / Bank Deed No. 65 dated January 16, 1996 made before Frans Elsius Muliawan, S.H, Notary in Jakarta, PT Executive International Bank altered its name to PT Bank Eksekutif International.
- Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.78 tanggal 27 September 1996, Tambahan No.8331 / Published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 78 dated September 27, 1996, Supplement No. 8331.
- Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No.AHU-3740. AH.01.02 tanggal 28 Juli 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. / Approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-3740.AH.01.02 dated July 28, 2010 concerning Approval to the Deed of Amendment to the Company's Articles of Association.
- Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1258-Kep.GBI/2010 tanggal 23 September 2010 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Eksekutif Internasional Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pundi Indonesia Tbk. / Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 12 58-Kep. GBI/2010 dated September 23, 2010 concerning the Change in the Use of Business Licenses under the Name of PT Bank Eksekutif International Tbk to PT Bank Pundi Indonesia Tbk.
- Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No.AHU-0012108. AH.01.02 tanggal 27 Juni 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. / Approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0012108.AH.01.02 dated June 27, 2016 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
- Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/KDK.03/2016 tanggal 29 Juli 2016 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pundi Indonesia Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk / Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. 12/KDK.03/2016 dated July 29, 2016 concerning Determination of the Use of Business Licenses under the Name of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.



Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company



“

Pada 29 Juli 2016 Perseroan resmi beroperasi dengan menggunakan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

On July 29, 2016 the Company officially operated under the name PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

”

52



Sejarah Bank Banten berawal dari adanya Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor 193 tahun 1950 tertanggal 9 Mei 1950, tentang prosedur pengembalian tenaga-tenaga darurat Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke masyarakat semasa agresi militer Belanda kedua. Pada masa itu, Mayor Raden Sjachra Sastrakusumah, petinggi TNI yang pernah menjadi Komandan Sektor XV Pandeglang memberikan gagasan untuk mendirikan sebuah koperasi dan perbankan bagi para veteran.

Modal awal Bank Banten berasal dari dana tunjangan para veteran yang dikumpulkan dan pada saat itu Bank Banten merupakan penggerak roda ekonomi utama di daerah Banten. Perkembangan Bank Banten mencapai puncaknya pada tahun 1957 dengan mendirikan bangunan Gedung di pusat Kabupaten Pandeglang yang diresmikan pada

The history of Bank Banten began from the issuance of the Decree of Minister of Defense of RI No. 193 of 1950 dated 9 May 1950, regarding the procedures to return the emergency personnel of the Indonesian National Army (TNI) to the community during the second Dutch military aggression. At that time Major Raden Sjachra Sastrakusumah, a high-ranking military officer who was the commander of Sector XV Pandeglang, initiated the establishment of a cooperative and banking company owned by veterans.

Bank Banten's initial capital came from the veterans' allowance funds that were collected and, at that time, Bank Banten was the main economic driver in the Banten area. The development of Bank Banten reached its peak in 1957 with the construction of a Building in the center of Pandeglang Regency, which was inaugurated on September 9, 1957 by

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company

tanggal 9 September 1957 oleh Bapak Koperasi Indonesia Dr. Muhammad Hatta dengan didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mayor AH Nasution, dan Gubernur Bank Indonesia Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Bahkan pada saat itu, Bank Banten bahkan melakukan ekspansi dengan membuka cabang di Jakarta dan Bandung.

Dengan sejarah awal tersebut maka didirikan Perseroan pada tahun 1992 dengan nama awal PT Executive International Bank dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum pada tahun 1993, selanjutnya Perseroan mengubah namanya menjadi menjadi PT Bank Eksekutif Internasional pada tahun 1996. Di tahun 2001, Perseroan resmi mencatatkan sahamnya untuk pertama kali di lantai Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2010, PT Bank Eksekutif Internasional diubah menjadi PT Bank Pundi Indonesia Tbk dan seiring berjalannya waktu Pemerintah Provinsi Banten memiliki keinginan untuk membentuk bank daerah yang bisa menunjang perekonomian daerah, sehingga terbit Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 pada tanggal 27 September 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham PT Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten. Pada 29 Juli 2016 Perseroan resmi beroperasi dengan menggunakan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sejalan dengan dilakukannya akuisisi oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/KDK.03/2016 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pundi Indonesia Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Pasca akuisisi tersebut, terjadi perubahan kebijakan strategis yang diterapkan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan nasabah dan mitra Perseroan terkait dengan statusnya sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pada saat ini, Perseroan berfokus dalam pelayanan simpanan, penyaluran Kredit (UMKM, Kredit Konsumer dan Kredit Komersial), serta jasa-jasa perbankan lainnya. Untuk rencana kedepan, Perseroan memiliki misi untuk menjadi mitra utama Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan pengelolaan kas daerah.

the Indonesian Cooperative Founder, Dr. Muhammad Hatta, accompanied by the Chief of Army Staff, General Major AH Nasution, and the Governor of Bank Indonesia Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Even at that time, Bank Banten expanded by opening branches in Jakarta and Bandung.

With this early history, the Company was founded in 1992 with the initial name of PT Executive International Bank and started operating as a Commercial Bank in 1993, then the Company changed its name to PT Bank Eksekutif Internasional in 1996. In 2001, the Company officially listed its shares for the first time in Indonesia Stock Exchange. In 2010, PT Bank Eksekutif Internasional was changed to PT Bank Pundi Indonesia Tbk, and over time, Banten Provincial Government desired to form a regional bank that could support the regional economy, thus Banten Province Regional Regulation Number 5 of 2013 was issued on September 27, 2013 concerning Additional Regional Equity Participation in PT Banten Global Development's Share Capital for the Establishment of the Banten Regional Development Bank. On July 29, 2016 the Company officially operated under the name PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk in line with the acquisition by the Provincial Government of Banten through PT Banten Global Development in accordance with the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number: 12/KDK.03/2016 concerning Determination of Use of Permits Business on behalf of PT Bank Pundi Indonesia Tb into a Business License on behalf of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Post acquisition of the Bank by PT Banten Global Development, changes of strategies and policies occurred to adjust to the customer needs and partners of Company in relation with its status as the Regional Development Bank (RDB). Company currently offers deposits to customer, Lending (MSME Loans, Consumer Loans and Commercial Loans), as well as other services. Going forward, the Bank will become a partner of Banten Provincial Government in carrying out region cash management.



Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

Vision, Mission, and Company Value

VISI

Vision

**Menjadi Bank yang terbaik
dan mitra terpercaya**

To become the best bank and trusted partner



MISI

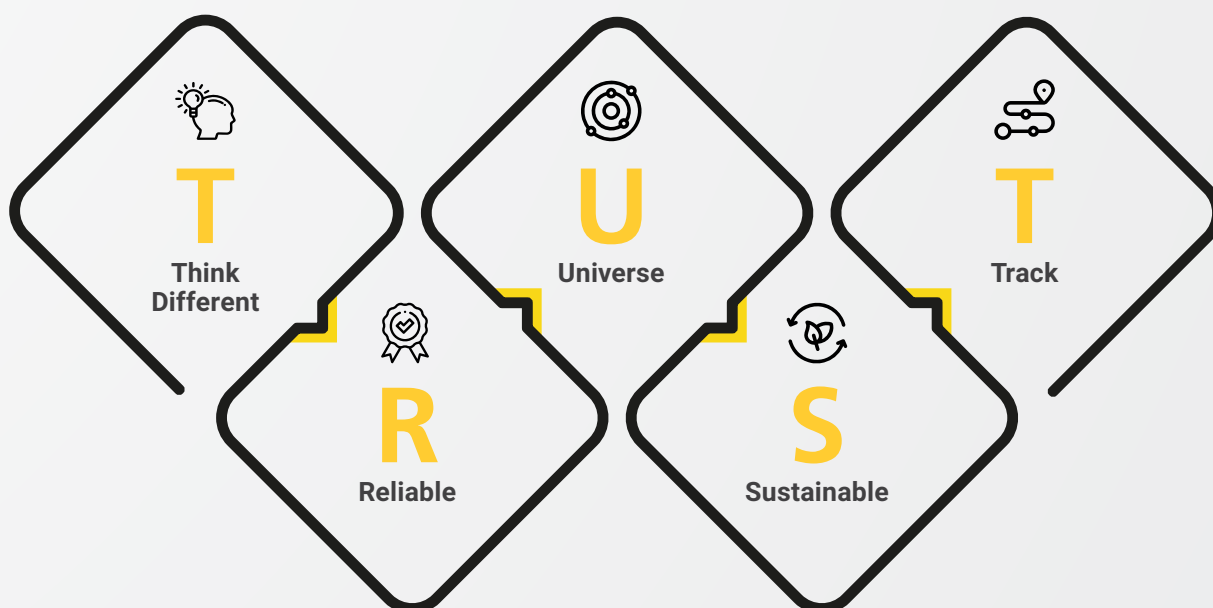
Mission

**Mendukung
program
pembangunan
untuk pertumbuhan
ekonomi dan kemakmuran
masyarakat Banten**

Support development programs
for economic growth and prosperity of Banten people

**Memberikan layanan perbankan
terbaik yang selalu berorientasi
kepada kepuasan nasabah, dan meningkatkan
nilai manfaat secara berkesinambungan bagi
semua pemangku kepentingan**

Provide the best banking services that are consistently focused on customer
satisfaction, and improve continuous beneficial values for all stakeholders



T: Think Different

Memiliki pemikiran dinamis dan adaptif. Berpikir kreatif dan inovatif berbasis risiko / Having dynamic and adaptive thinking. Risk-based creative and innovative thinking

- Berpikir kreatif dan inovatif berbasis risiko / Risk-based creative and innovative thinking
- Membangun karakter intrapreneur / Building intrapreneur character
- Mampu memberikan solusi dalam setiap keadaan / Able to provide solutions in every situation

R: Reliable

Mampu bekerja profesional dalam menghadapi tantangan secara konsisten / Able to work professionally in facing challenges consistently

- Tangguh, kolaboratif dan proaktif / Resilient, collaborative and proactive
- Kompeten dan berintegritas / Competent and with integrity
- Berkomunikasi secara terbuka dan efektif / Communicate openly and effectively

U: Universe

Membangun sinergi positif dengan sesama dan lingkungan sebagai bentuk syukur Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa / Building positive synergy with others and the environment as a form of gratitude for the grace of God Almighty

- Berempati dan saling menghargai / Empathy and mutual respect
- Bersikap positif dan peduli lingkungan / Be positive and care about the environment

S: Sustainable

Memberikan manfaat kepada perusahaan, masyarakat, dan lingkungan secara berkelanjutan / Providing benefits to the company, society, and the environment in a sustainable manner

- Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik / Applying the principles of good governance
- Selalu memberikan layanan terbaik / Always provide the best service
- Berperan aktif dalam aksi keuangan berkelanjutan / Take an active role in sustainable finance actions

T: Track

Menyelesaikan setiap pekerjaan secara tuntas, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan / Complete every job completely, on time and accountable according to the provisions

- Cepat, tepat dan akurat / Fast, precise and accurate
- Berorientasi pada hasil / Result-oriented
- Patuh terhadap ketentuan / Comply with the provisions

Bidang Usaha

Line of Business

Sesuai dengan Anggaran Dasar, bidang usaha Perseroan adalah di bidang perbankan. Adapun kegiatan usaha Perseroan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa.

Kelompok ini mencakup kegiatan Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan kegiatan usaha dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri.

- b. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang setara dengan itu.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diterima oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Surat Berharga Pemerintah dan Surat Jaminan Pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia;
 5. Obligasi;
 6. Surat Dagang berjangka waktu;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu;
- e. Memberikan kredit atau pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) termasuk kredit-kredit PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pensiunan PNS atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menempatkan dana atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- g. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

In according with the Articles of Association, the Company's line of business is banking. The Company's business activities are as follows:

a. Non Foreign Exchange Regional Government Commercial Banks.

This group covers the Bank's activity that all or most part of its capital are owned by the Regional Government as stated in the prevailing laws and regulations, as well as conducts business activity in rupiah and or banking transaction with domestic parties.

- b. Collecting public's fund as deposits in the form of current account, term deposit, deposit certificate, savings account and/or other forms equivalent;
- c. Issuing acknowledgement of indebtedness;
- d. Purchasing, selling or putting encumbrance over its own risk or for the benefit and at the behest of its customers:
 1. Money order including those accepted by bank of which the validity period does not exceed the common practice of trading of such papers;
 2. Acknowledgement of indebtedness and other securities of which the validity period does not exceed the common practice of trading of such papers;
 3. Government Securities and Comfort Letter;
 4. Certificate of Bank Indonesia;
 5. Bonds;
 6. Commercial papers with a validity period
 7. Other securities instrument with terms
- e. Providing long-term, medium-term, or short-term credit/loans to micro, small, and medium enterprises (MSME) including loans to Civil Servants (PNS) or retired Civil Servants or loans in other forms in accordance with banking common practice and the prevailing laws and regulations;
- f. Placing funds with, borrowing funds from, or lending funds to other banks, by letters, telecommunications facilities or by registered money orders, checks, or other means;
- g. Transferring funds for own benefits or for the customers' benefits.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> h. Menjual agunan baik melalui pelelangan atau tanpa pelelangan baik diseluruh maupun sebagian agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan. i. Membeli agunan baik melalui pelelangan atau tanpa pelelangan baik diseluruh maupun sebagian agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan. j. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan maupun di bidang lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. k. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; l. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. n. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. o. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek. p. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat. q. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. r. Menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbagai bentuk dan bank garansi. s. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun. t. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. u. Memberikan jasa penyimpanan dan pengelolaan kas dan keuangan kepada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kotamadya dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Kabupaten Kota di seluruh Banten baik yang berbentuk Perusahaan Daerah maupun yang berbentuk Badan hukum Perseroan Terbatas (PT). | <ul style="list-style-type: none"> h. Selling part or entire collateral with or without auctioning in the event of a debtor's default; i. Purchasing part of or entire collateral with or without auction in the event of a debtor's default; j. Performing equity participation in banks or other companies in the financial sector or in other sectors, as long as it does not contradict with the prevailing laws and regulations; k. Performing temporary equity participation to overcome credit failure including, financing failure pursuant to Sharia principles, provided that the participation shall be eventually withdrawn and subject to rules and regulations; l. Receiving payments from receivables of securities and undertaking settlements with or among third parties; m. Providing safe deposit for goods and securities; n. Providing deposit activities for the interests of other parties based on a contract; o. Placing funds from customers to other customers in the form of securities not listed on the Stock Exchange; p. Factoring, credit card, and trusteeship services; q. Performing activities in foreign currencies in accordance with the terms and conditions of Bank Indonesia; r. Issuing letter of credit in various forms and bank guarantee; s. Acting as the founder and administrator of Pension Fund; t. Providing financing and/or other activities pursuant to Sharia principles and the terms and conditions of Bank Indonesia; u. Providing cash and finances deposit and management services for Provincial, District/Municipality and Regional Owned Enterprises (BUMD) under Banten Provincial Government and Districts/Cities in Banten both incorporated as a Regional Enterprise (Perusahaan Daerah) or as legal entity of Limited Liability Company (PT); |
|--|---|

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang lainnya yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Other than conducting business activities as referred above, the Company may also perform other supporting activities that supplement its business activities as long as they do not contradict with the laws and regulations.



Produk dan Layanan

Products and Services

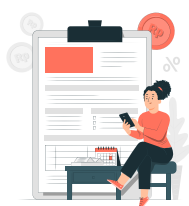
PRODUK / Products

Dana / Funds



Tabungan: / Savings:

- Tabungan Mikro / Mikro Saving
- Tabungan Harapan / Harapan Saving
- Tabungan SimPel / SimPel Saving



Giro: / Current Account:

- Giro Umum / General Current Account
- Giro Kas Daerah (Kasda) / Local Cash Current Account
- Giro Pemerintah Pusat / Central Government Current Account
- Deposito / Deposits

Kredit / Loans



Kredit Konsumer / Consumer Loans

- Kredit Karya Guna / Karya Guna Loan
- Kredit Pra Kinaya / Pre-Kinaya Loan
- Kredit Kinaya / Kinaya Loan
- Kredit THT (Pensiunan) / THT Loan
- Kredit Multiguna / Multipurpose Loan
- Kredit Beragunan Tunai Konsumer / Consumer Cash Collateral Loan



Kredit Komersial: / Commercial Loans

- Kredit Konstruksi / Construction Loans
- Kredit Modal Kerja Umum / General Working Capital Loans
- Kredit Investasi Umum / General Investment Loans



Kredit UMKM / MSME Loans

- Kredit Usaha Bangun Banten (Kredit Bangun Tunas, Kredit Bangun Mandiri, Kredit Bangun Sejahtera) / Bangun Banten Business Loan (Bangun Tunas Loan, Bangun Mandiri Loan, Bangun Sejahtera Loan)
- Kredit Linkage / Linkage Loan
- Kredit Program / Program Loan

LAYANAN / Services

E-Samsat / E-Samsat

SP2D Online

Bank Persepsi

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) / State Treasure and Budget Systems

Mitra Layanan Taspen / Taspen Service Partner

Makna Logo

Logo's Meaning



1. Logo Bank Banten terinspirasi dari sayap Burung Garuda yang mengepakkan ke atas sebagai tanda siap.
1. The logo of Bank Banten is inspired from the fluttering wings of Garuda, a sign of readiness.
2. Sayap adalah anggota tubuh yang bersifat aerodinamis dan sebagai penyeimbang ketika hendak terbang.
2. Wings are aerodynamic limbs and provide balance before taking flight.
3. Fungsi inilah yang ingin dicerminkan dalam logo Bank Banten dengan harapan dapat terbang tinggi menuju capaian yang diinginkan, yakni **Regional Champion**, serta memberikan kontribusi pada seluruh pemangku kepentingan melalui keselarasan fungsi intermediasi untuk menjamin terciptanya keseimbangan perekonomian yang berazaskan kerakyatan.
3. Bank Banten logo is designed to reflect this function which embodies the hope to achieve its desired targets, namely the Regional Champion, and contribute to all stakeholders through the harmonization of the intermediation function to ensure the creation of an economic balance based on democracy.
4. Dua helai bulu yang ditampilkan merupakan dua kalimat syahadat dan dua rukun yang harus dijalankan yaitu rukun iman dan islam, merupakan cerminan Banten sebagai provinsi yang religius, serta melambangkan dua prinsip utama perbankan yakni *Good Corporate Governance and Prudential Banking*.
4. The two feathers represent the crede of Shahada and two sets of Islamic precepts, the Five Pillars of Islam and the Six Articles of Faith, symbolizing Banten as a religious province, and symbolizes two main banking principles, namely Good Corporate Governance and Prudential Banking.
5. Merah adalah warna yang merepresentasikan keberanian hidup, kekuatan dan kepemimpinan yang menggambarkan energi, serta semangat perjuangan yang tiada henti.
5. The color of red represents courage, strength and leadership which signifies energy, and an endless fighting spirit.



Wilayah Operasional

Operational Areas

Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat Non Operasional (KPNO), 1 Kantor Cabang Khusus (KCK) , 25 Kantor Cabang (KC), 17 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Kas (KK), 59 Kantor Fungsional (KF) dan 1 Kantor Wilayah (KW), yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun rincian kantor operasional terlampir pada bagian Alamat Kantor dan/atau Kantor Cabang atau Kantor Wilayah.

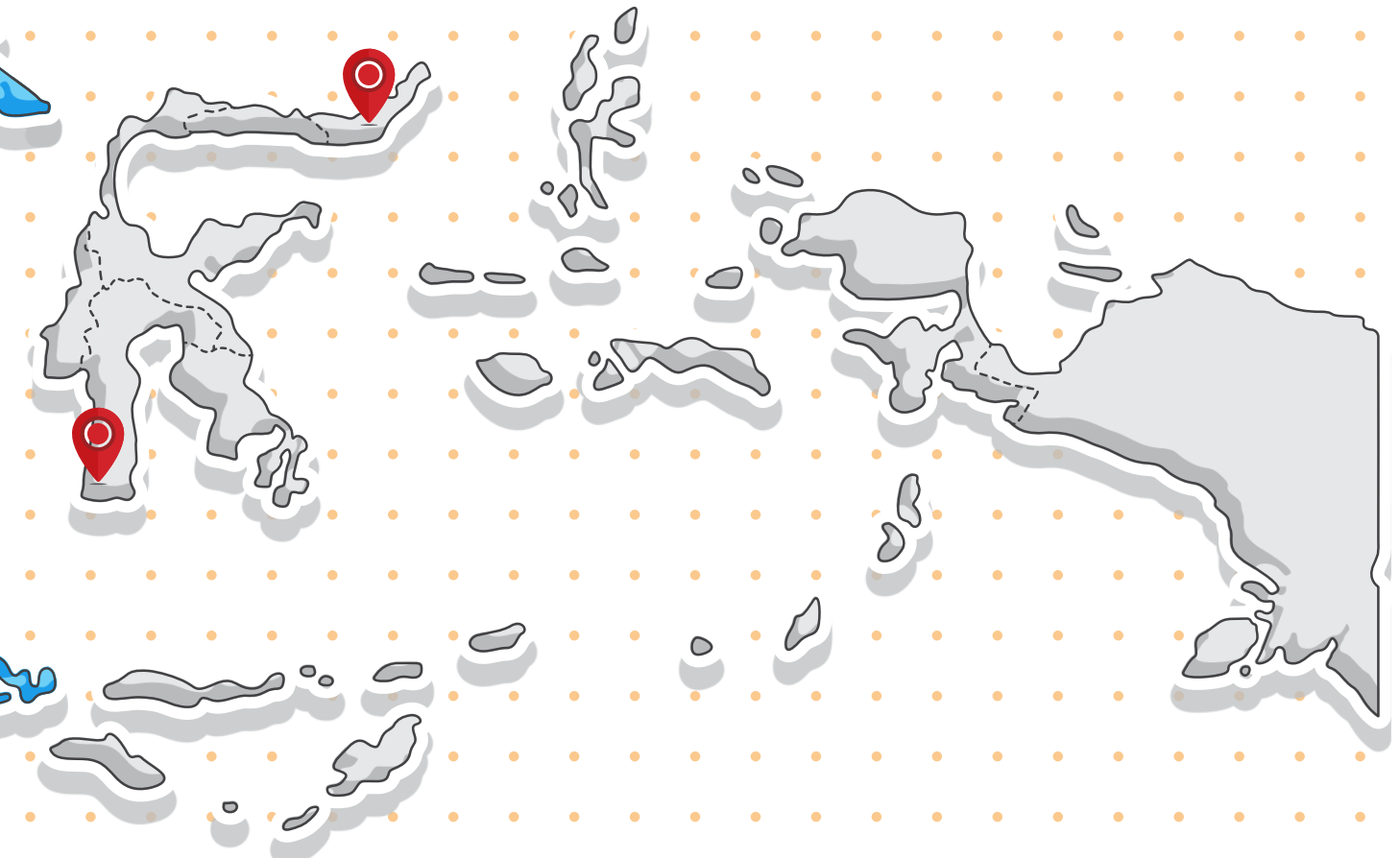
The Company has 1 Non-Operational Head Office (KPNO), 1 Special Branch Office (KCK), 25 Branch Offices (KC), 17 Sub-Branch Offices (KCP), 3 Cash Offices (KK), 59 Functional Offices (KF), and 1 Regional Office (KW), which are located throughout Indonesia. The details of the operational office are attached in the Adresses of Office and/or Branch Office or Regional Office section.



Wilayah Operasional Operational Areas



Profil Perusahaan
Company Profile

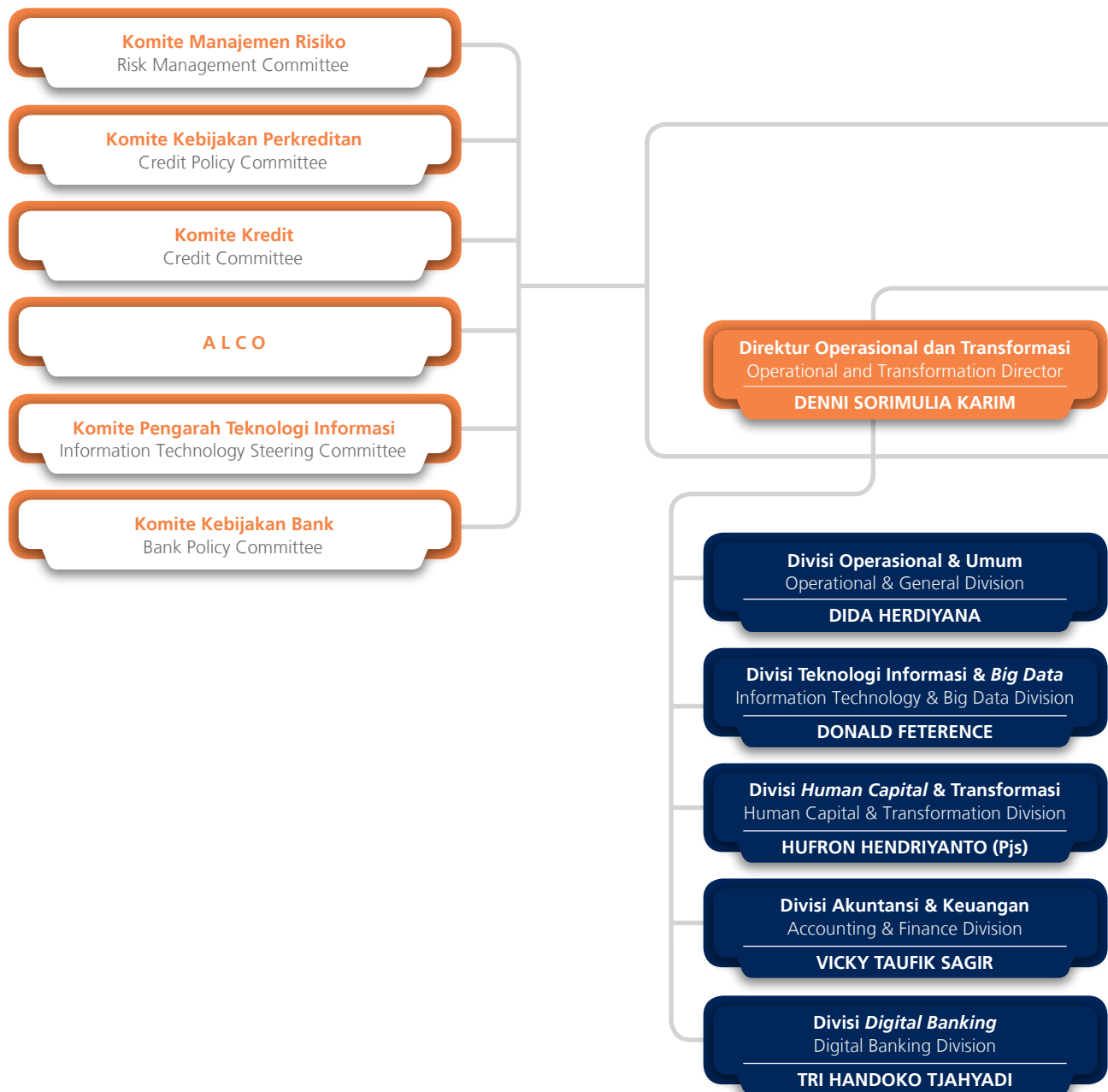


61



Struktur Organisasi

Organization Structure



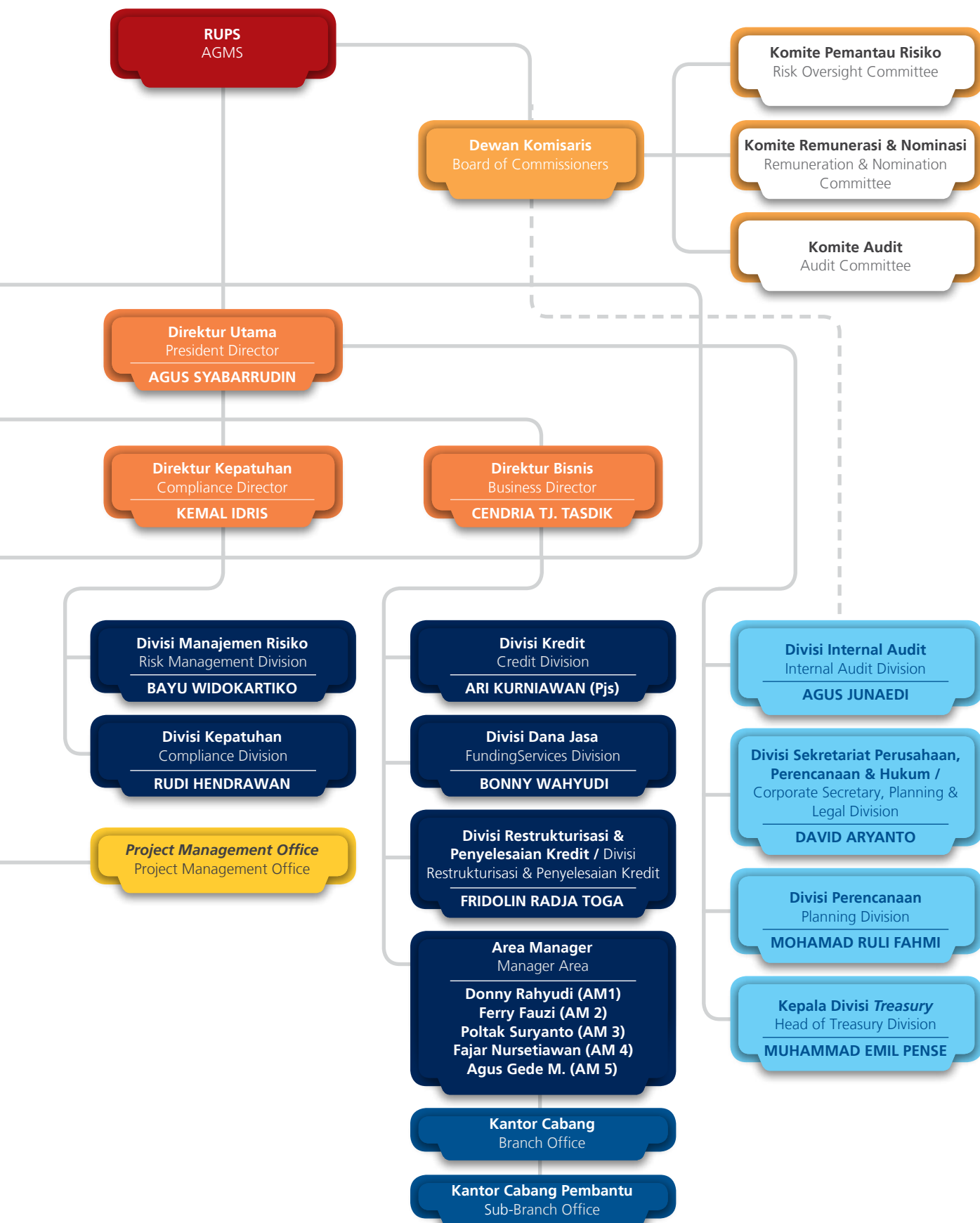
Struktur Organisasi Organization Structure



Profil Perusahaan
Company Profile



63



Jejak Langkah

Milestones



9 Agustus 1993
August 9, 1993

Awal operasional Perseroan sebagai Bank Umum di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 673/KMK.017/1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT Executive International Bank. / The Company's first operation as a Commercial Bank in Jakarta based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 673/KMK.017/1993 concerning Issuance of Business License of PT Executive International Bank.



13 Juli 2001
July 13, 2001

Pencatatan Saham Perdana di Bursa Efek Jakarta. / Initial Share Listing on the Jakarta Stock Exchange.



29 Juli 2016
July 29, 2016

Penetapan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk berdasarkan dengan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 12/KDK.03/2016 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sehingga PT Bank Pundi Indonesia Tbk resmi berganti nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BPD Banten) mulai 29 Juli 2016. / Change of name of the bank coded as the BEKS issuer was approved by the Financial Services Authority (OJK) through Decree No. 12/KDK.03/2016 regarding the Establishment of the Use of Business License Registered Under PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk thus officially changed PT Bank Pundi Indonesia Tbk name to PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BPD Banten) as of July 29, 2016.



23 September 2010
September 23, 2010

Mendapatkan pengesahan dari Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12-58-KEP.GBI/2010 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Eksekutif Internasional Tbk menjadi Izin Usaha atas Bank Pundi Indonesia Tbk. / Approved by Bank Indonesia through Decree of Bank Indonesia Governor No. 12-58-KEP. GBI/2010 concerning Changes in the Use of Business Licenses under PT Bank Executive International Tbk to Business Licenses under PT Bank Pundi Indonesia Tbk.



27 Juni 2016
June 27, 2016

Mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Ham terkait pergantian PT Bank Pundi Indonesia Tbk. Persetujuan Kementerian ini tertuang dalam Surat Keputusan No. AHU0012108.AH.01.02 tentang Persetujuan Akta Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. / Approved by the Minister of Law and Human Rights concerning the change of name, through the Decree No. AHU-0012108.AH.01.02 concerning Approval of the Deed of Articles of Association of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Profile



HASANUDDIN
Komisaris Utama Independen

Independent President Commissioner

Warga Negara Indonesia, berusia 57 Tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Perusahaan di Universitas Pancasila Jakarta (1988), dan gelar Magister Manajemen Sumber Daya di Universitas Sriwijaya Palembang (2017).

Indonesian citizen, 57 years old. He earned a Bachelor's in Corporate Economics degree in Pancasila University Jakarta (1988), and Master's degree in Resources Management in Sriwijaya University Palembang (2017).

Beliau meniti karir perbankan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 2002 sebagai Kepala Bagian Umum di Kantor BRI Wilayah Palembang. Kemudian beliau berturut-turut menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Operasional Akuntansi di Kantor BRI Pusat (2006), Senior Auditor Bidang Audit Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus, Unit Kantor Luar Negeri & PA (2007), Auditor Senior Grup Audit Bisnis Konsumer dan Anak Perusahaan di Satuan Kerja Audit Intern (2009), Kepala Bagian Logistik & Umum di Kantor BRI Wilayah Semarang (2009), Senior Auditor di Kantor BRI Wilayah Yogyakarta (2010). Pada kurun waktu 2011 – 2016 beliau menjabat sebagai Group Head di Audit Intern Kantor Wilayah BRI. Masih di perusahaan yang sama, pada 2018 beliau menjabat sebagai Wakil Inspektur Audit Intern di Kantor BRI Wilayah Banda Aceh. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Wakil Pimpinan Bidang Operasional di Kantor BRI Wilayah Semarang (2019), dan Kepala Audit Intern Kantor BRI Wilayah Banda Aceh (2020).

He started his career in banking in Bank Rakyat Indonesia (BRI) in 2002 as Head of General Affairs Division in BRI Palembang Region Office. Next, he consecutively served as Head of Accounting Operation Monitoring Division in BRI Headquarter (2006), Senior Auditor of Audit Division, Special Branch Office, Foreign & PA Office Unit (2007), Senior Auditor of Business Audit Group of Consumers and Subsidiaries at Internal Audit Unit (2009), Head of Logistics & General Affairs Division in BRI Semarang Region Office (2009), Senior Auditor at BRI Yogyakarta Regional Office (2010). Within 2011 – 2016, he served as Group Head of Internal Audit at BRI Regional Office. In the same company, in 2018, he served as Vice Inspector of Internal Audit at BRI Banda Aceh Regional Office. Next, he served as Vice Head of Operations in BRI Semarang Regional Office (2019), and Head of Internal Audit at BRI Banda Aceh Regional Office (2020).

Kemudian beliau bergabung dengan Perseroan dan diangkat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 10 Maret 2021, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 18 tanggal 18 Maret 2021 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 10 Maret 2021.

Later, he joined the Company and was appointed as President Commissioner/Independent Commissioner based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 10, 2021, as contained in Deed No. 18 dated March 18, 2021 regarding the Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dated March 10, 2021.



MEDIA WARMAN
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga negara Indonesia, berusia 57 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas, Padang, pada tahun 1990 dan memperoleh gelar spesialis Notariat dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2001.

Beliau ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 November 2017, sekaligus merangkap Plt. Komisaris Utama sampai dengan tanggal 10 Maret 2021. Kemudian pada periode berikutnya beliau ditunjuk kembali menjadi Komisaris independen sampai dengan saat ini. Beliau memulai kariernya di CV Rajawali di Bukittinggi (1988-1990), Staf Administrasi dan Analis Kredit PT Bank Windu Kentjana di Jakarta (1990-1994), Koordinator Administrasi Kredit dan Hukum di PT Astria Raya Bank di Jakarta (1994-1997), Koordinator Hukum dan Penyelesaian Kredit Tim Likuidasi di PT Astria Raya Bank di Jakarta (1997-2004), mendirikan sekaligus menjadi pengacara di Kantor Hukum Warman & Partner di Jakarta (1998-2003), Notaris dan PPAT di Wilayah Kerja Kabupaten Tangerang, Banten (2003-2004), Ketua Komisi C dan Ketua Komisi II Bidang Keuangan dan Perekonomian di DPRD Provinsi Banten (2004-2009), serta menjadi Ketua Fraksi Demokrat sekaligus menjadi Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat di DPRD Provinsi Banten (2009-2014).

Selanjutnya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Maret 2021 sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 18 tanggal 18 Maret 2021 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 10 Maret 2021, Beliau ditetapkan sebagai Komisaris Independen Perseroan. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi kekeluargaan maupun hubungan keuangan apapun dengan Dewan Komisaris lainnya atau Pemegang Saham di Perseroan.

Indonesian citizen, 57 years old. He obtained Bachelor's of Law degree from Andalas University, Padang, in 1990 and Notary Specialist degree from University of Indonesia, Jakarta, in 2001.

He was appointed for the first time as Commissioner of the Company based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 20, 2017, and concurrently serves as Act. President Commissioner until March 10, 2021. Then in the following period he was reappointed as an independent Commissioner until present. He started his career at CV Rajawali in Bukittinggi (1988-1990), Administrative Staff and Credit Analyst at PT Bank Windu Kentjana in Jakarta (1990-1994), Coordinator of Credit and Legal Administration at PT Astria Raya Bank in Jakarta (1994-1997), Coordinator Legal and Credit Settlement Liquidation Team at PT Astria Raya Bank in Jakarta (1997-2004), established as well as a lawyer at the Warman & Partner Law Firm in Jakarta (1998-2003), Notary and PPAT in the Tangerang Regency Work Area, Banten (2003-2003). 2004), Chairman of Commission C and Chairman of Commission II for Finance and Economic Affairs at the Banten Provincial DPRD (2004-2009), as well as being the Chair of the Democratic Faction as well as Chairman of Commission V for People's Welfare at the Banten Provincial DPRD (2009-2014).

Furthermore, based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated March 10, 2021 as contained in Deed No. 18 dated March 18, 2021 regarding the Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dated March 10, 2021, he was appointed as Independent Commissioner of the Company. He has no family affiliation nor any financial relations with other Board of Commissioners or Shareholders in the Company.



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



▶ **M. YUSUF**
Komisaris
 Commissioner

Warga Negara Indonesia, berusia 56 Tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Manajemen Pembangunan Kota dan Daerah di STIA – LAN RI, Jakarta (1997), dan meraih gelar Magister Keuangan Daerah di Ekonomika Pembangunan (MEP-UGM) Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta (2001). Selanjutnya beliau mendapatkan gelar Doktor Keuangan dan Investasi di Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (2018).

Beliau mengawali Karir sebagai Widyaiswara Madya di Kementerian Dalam Negeri (2010-2018). Dilanjutkan dengan menjadi Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Provinsi Banten (2018-2021). Pada 2018 beliau ditunjuk sebagai Pjs. (Pejabat Sementara) Walikota Tangerang dan menjadi Plt. (Pelaksana Tugas) Kepala Bappeda Pemerintah Provinsi Banten pada tahun yang sama. Pada 2018 beliau ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten hingga 2019 dan kemudian beliau ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten (2019- 2021). Saat ini beliau menjabat sebagai Asisten Daerah Pembangunan dan Perekonomian Pemerintah Provinsi Banten.

Beliau bergabung dengan Perseroan dan diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 10 Maret 2021, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 18 tanggal 18 Maret 2021 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 10 Maret 2021.

Indonesian citizen, 56 years old. He obtained Bachelor's of Urban and Regional Development Management degree from STIA – LAN RI, Jakarta (1997), and a Master's degree of Regional Finance in Development Economics from University of Gadjah Mada, Yogyakarta (2001). He further obtained a Doctor's degree of Finance and Investment in Business School of Institute of Agricultural Bogor (2018).

Began his career as an Intermediate Lecturer at the Ministry of Home Affairs (2010-2018). He then served as Expert Staff of Governor of Banten for Development, Economy and Finance of Banten Province (2018-2021). In 2018 he was appointed as Temporary Executive Mayor of Tangerang and served as Acting Executive Head of Bappeda Banten Provincial Government in the same year. In 2018 he was appointed as Acting Executive of Banten Provincial Health Office Head until 2019 and then appointed as Acting Executive Banten Provincial Educational Office (2019-2021). He currently serves as Regional Assistant of Development and Economic of Banten Provincial Government.

He joined the Company and appointed as Commissioner pursuant to the Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 10, 2021, as stipulated in the Deed No. 18 of 2021 concerning the Statement of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dated March 10, 2021.

Profil Direksi

Board of Directors' Profile



AGUS SYABARRUDIN
Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Sastra Arab di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada 1990, dan gelar Magister Sains Perbankan Islami di Universitas Indonesia pada 2005. Kemudian mendapatkan gelar Doktor di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan pada 2017.

Mengawali karier di dunia perbankan pada 1991-1994 sebagai Bills and Operations Officer di DBS Buana Tat Lee Bank. Pada 1997 beliau melanjutkan kariernya di ABN-AMRO sebagai Head of Nostro Vostro – Financial Control dan Head of Business Development hingga 2004. Pada 2004-2006 beliau bergabung bersama Bank Mandiri syariah sebagai Kepala Divisi Pengembangan Produk dan Service Quality Management dan sukses membangun branding 'BSM' untuk semua produk dan layanan Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya beliau meneruskan kariernya di Bank Danamon dan berturut-turut menjabat sebagai Head of Syariah Treasury Branch Business Division (2006-2008), Head of Syariah Treasury Business Development Bank Danamon Syariah (2009-2010), Head of Syariah Treasury Funding Sales and Cash Management Service Division (2013) dan Head of Strategic Initiative (2014).

Pada 2014 beliau diangkat sebagai Komisaris merangkap sebagai Anggota Komite Audit di PT AMC hingga 2017. Sukses menjalani berbagai amanah dan berkarier di Bank Asing maupun Nasional, pada 2017 beliau mengibarkan sayapnya dan bergabung dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagai Kepala Eksekutif Syariah hingga 2018. Masih di perusahaan dan tahun yang sama, beliau ditunjuk menjadi Senior Executive Vice President (SEVP), hingga kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Utama yang membawahi Unit Usaha Syariah pada 2019.

Kemudian beliau bergabung dengan perseroan dan diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 10 Maret 2021, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 18 tanggal 18 Maret 2021 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 10 Maret 2021.

Indonesian citizen, 55 years old. He obtained Bachelor's of Arabic Literature degree from University of Syarif Hidayatullah State Islamic (1990), and a Master of Islamic Banking Science from University of Indonesia (2005). He then obtained a Doctorate degree from University of Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Natural Resources & Environmental Management Study Program (2017).

He began his career in banking in 1991-1994 as Bills and Operations Officer at DBS Buana Tat Lee Bank. In 1997 he continued his career with ABN-AMRO as Head of Nostro Vostro – Financial Control and Head of Business Development until 2004. In 2004-2006 he joined Bank Mandiri Syariah as Head of Product Development and Service Quality Management Division and successfully built "BSM" branding for all products and services of Bank Syariah Mandiri. He further continued his career in Bank Danamon and consecutively served as Head of Syariah Treasury Branch Business Division (2006-2008), Head of Syariah Treasury Business Development Bank Danamon Syariah (2009-2010), Head of Syariah Treasury Funding Sales and Cash Management Service Division (2013), and Head of Strategic Initiative (2014).

In 2014 he concurrently served as Commissioner and Member of Audit Committee in PT AMC until 2017. After successfully worked and had a career in both Foreign and National Banks, in 2017, he moved on and joined the Regional Development Bank of South Kalimantan as Sharia Executive Head until 2018. He further served as Senior Executive Vice President (SEVP) in the same company and same year, until he further served as President Director in charge of Sharia Business Unit in 2019.

He joined the Company and appointed as the Company's President Director pursuant to the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 10 March 2021, as contained in Deed No. 18 dated March 18, 2021 regarding the Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dated March 10, 2021.



Profil Direksi

Board of Directors' Profile



▶ **CENDRIA TJ. TASDIK**
Direktur Bisnis
 Business Director

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi STIE YPKP Bandung pada 1993. Memiliki pengalaman lebih kurang selama 25 tahun, beliau meniti karier perbankan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak 1995 dan mengukir berbagai prestasi diantaranya sebagai pemimpin cabang kelas 1 terbaik nasional pada 2017. Di tahun 2000, beliau diangkat sebagai manajer pemasaran Kantor BRI Cabang Surabaya hingga 2005. Masih pada tahun yang sama beliau ditunjuk sebagai Pemimpin Kantor BRI Cabang Pembantu Bogor. Kemudian menjadi Pemimpin Kantor BRI Cabang Sintang (2010), Pemimpin Kantor BRI Cabang Muara Enim (2012), Pemimpin Kantor BRI Cabang Jambi (2013), Pemimpin Kantor BRI Cabang Fatmawati (2014), Pemimpin Kantor BRI Cabang Jakarta Kota (2016), Pemimpin Kantor BRI Cabang Kramat (2017), dan Wakil Pemimpin Kantor BRI Wilayah 2 (2018).

Kemudian beliau bergabung dengan perseroan dan diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 10 Maret 2021, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 18 tanggal 18 Maret 2021 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 10 Maret 2021.

Indonesian citizen, 51 years old. He earned Bachelor's of Economics degree from STIE YPKP Bandung (1993). With approximately more than 25 years of experience, he began his career in banking at Bank Rakyat Indonesia (BRI) since 1995 and performed various accomplishments among others as the Best National Class 1 Branch Manager in 2017. In 2000, he was appointed as Marketing Manager of BRI Surabaya Branch Office until 2005. In the same year, he served as Head of BRI Bogor Sub-Branch Office. He then served as Head of BRI Sintang Branch Office (2010), Head of BRI Muara Enim Branch Office (2012), Head of BRI Jambi Branch Office (2013), Head of BRI Fatmawati Branch Office (2014), Head of BRI Jakarta City Branch Office (2016), Head of BRI Kramat Branch Office (2017), and Deputy Head of BRI Regional Office 2 (2018).

He joined the Company and appointed as the Company's Director pursuant to the Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 10, 2021, as contained in Deed No. 18 dated March 18, 2021 regarding the Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dated March 10, 2021.



KEMAL IDRIS
Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Warga Negara Indonesia, berusia 43 Tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung pada tahun 2000 dan gelar Magister Ekonomi di Universitas Nusa Bangsa tahun 2021, beliau mengawali karir sebagai bankir dengan menjadi Calon Pegawai Bank BJB, kemudian berlanjut menjadi Staf Cabang Serang Bank BJB pada tahun 2002. Pada tahun 2008, beliau bertindak sebagai Analis Divisi Komersial Bank BJB, lalu pada tahun 2010, beliau menjabat sebagai Manajer Komersial Kantor Cabang Khusus Jakarta Bank BJB. Masih di tahun 2010, beliau menjabat sebagai Group Head Supervisi Komersial Divisi Komersial Bank BJB. Masih di tahun yang sama, beliau sempat dipercaya sebagai Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Pemimpin Cabang Pandeglang Bank BJB. Pada tahun 2011, beliau menjabat sebagai Pemimpin Cabang Sumber Bank BJB, Pemimpin Cabang Cikarang Bank BJB pada tahun 2012. Kemudian, pada tahun 2015 beliau menjabat sebagai Assistant Vice President (AVP) Kantor Wilayah 3 Bank BJB. Kemudian pada tahun 2016, beliau menjabat sebagai Pranata Utama Divisi Perencanaan Perum Jamkrindo.

Bergabung dengan perseroan pada tahun 2016 sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial, lalu menjadi Kepala Direktorat Bisnis pada tahun 2017, hingga diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 22 November 2017, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 18 tanggal 18 Maret 2021 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 10 Maret 2021.

Indonesian citizen, 43 years old. He earned Bachelor's of Law degree from Lampung University in 2000 and Master's of Economics degree from Nusa Bangsa University in 2021. He began his career as a banker as Bank BJB Prospective Employee, then as Staff of Bank BJB Serang Branch in 2002. In 2008, he served as Analyst of Bank BJB Commercial Division, then in 2010, he served as Commercial Manager at Bank BJB Jakarta Special Branch. In the same year, he served as Group Head of Commercial Supervision of Bank BJB Commercial Division. In also the same year, he also was trusted as Official Who Performs The Tasks (PYMT) Head of Bank BKB Pandeglang Branch. In 2011, he served as Head of Bank BJB Sumber Branch, Head of Bank BJB Cikarang Branch in 2012. Then, in 2015, he served as Assistant Vice President (AVP) of Bank BJB Regional Office 3. In 2016, he served as the Main Institution of Perum Jamkrindo Planning Division.

He joined the Company in 2016 as Head of Commercial Loan Division, and Head of Business Directorate in 2017, until he was appointed as the Company's Director pursuant to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in November 22, 2017, as contained in Deed No. 18 dated March 18, 2021 regarding the Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dated March 10, 2021.



Profil Direksi

Board of Directors' Profile



DENNY SORIMULIA KARIM
Direktur Operasional dan Transformasi
 Operational and Transformation Director

Warga Negara Indonesia, berusia 50 Tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti pada 1997. Memiliki pengalaman di dunia perbankan selama 23 tahun dengan merangkai karir profesionalnya sebagai Corporate Banking Relationship Manager (1998-2002) di Standard Chartered Bank. Pada 2002, beliau melanjutkan kariernya sebagai Financial Institution di American Express Bank Jakarta hingga 2004, Retail Banking FX Specialist/Relationship Manager di Citibank (2004-2006), Investment Sales Head Lippo Bank (2006-2007), SAVP Branch Network Development Head Bank Danamon (2007-2010), VP Branch Channel Development Head Bank Danamon (2010-2011). Pada 2011, beliau bergabung bersama CIMB Niaga menjadi VP Business Development Retail Banking dan masih pada tahun yang sama, beliau ditunjuk sebagai SVP Branch Network Development Head hingga 2014. Pada 2015 beliau dipercaya memegang kendali di Techcombank, Vietnam sebagai Director Business Development. Kemudian beliau dipercaya menjadi Associate Director Operation, Marketing & Data Analytics di PT Commonwealth Life (2016-2018). Beliau melanjutkan kiprah kariernya sebagai Director and Chief Marketing Officer di Reliance Capital Management (2018-2019), dan menjabat sebagai Direktur Bisnis di Bank Mega Syariah (2019).

Kemudian beliau bergabung dan ditunjuk sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Banten pada 10 Maret 2021, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 18 tanggal 18 Maret 2021 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 10 Maret 2021.

Indonesian citizen, 50 years old. He earned a Bachelor's of Economics degree from Trisakti University (1997). He has a banking experience in 23 years of his professional career as Corporate Banking Relationship Manager (1998-2002) at Standard Chartered Bank. In 2002, he served as Financial Institution at American Express Bank Jakarta until 2004, Retail Banking FX Specialist/Relationship Manager at Citibank (2004-2006), Investment Sales Head Lippo Bank (2006-2007), SAVP Branch Network Development Head Bank Danamon (2007-2010), and VP Branch Channel Development Head Bank Danamon (2010-2011). In 2011, he joined CIMB Niaga as VP Business Development Retail Banking and in the same year, he served as SVP Branch Network Development Head until 2014. In 2015, he worked at Techcombank, Vietnam as Business Development Director. He then served as Associate Director Operation, Marketing & Data Analytics at PT Commonwealth Life (2016-2018). He continued to pursue his career and appointed as Director and Chief Marketing Officer at Reliance Capital Management (2018-2019), and served as Business Director at Bank Mega Syariah (2019).

He joined the Company and appointed as the Company's Director pursuant to the Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 10, 2021, as contained in Deed No. 18 dated March 18, 2021 regarding the Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dated March 10, 2021.

Daftar Pejabat Senior

List of Senior Executives

AGUS JUNAEDI

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STIE Perbanas pada tahun 1992, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 14 Juni 2012. Jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Audit Intern. / Indonesian citizen, 53 years old. Obtained a Bachelor's degree in Accounting from STIE Perbanas in 1992, joined the Company on June 14, 2012. His latest position was as Head of the Internal Audit Division.

DAVID ARYANTO DWI SAPUTRO

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pasundan pada tahun 2000, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 08 Januari 2012. Jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan dan Hukum. / Indonesian citizen, 45 years old. Obtained his Bachelor of Laws degree from Pasundan University in 2000, joined the Company on January 08, 2012. His last position was Head of the Corporate and Legal Secretariat Division.

MOHAMAD RULI FAHMI

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STIE Bandung pada tahun 1999, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 24 Januari 2012. Jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Perencanaan. / Indonesian citizen, 45 years old. Obtained a Bachelor's degree in Accounting from STIE Bandung in 1999, joined the Company on January 24, 2012. His last position was as Head of the Planning Division.

MUHAMMAD EMIL PENSE

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Memperoleh gelar Master Bisnis Administrasi dari European University Belgium pada tahun 1993, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 16 April 2013. Jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi *Treasury*. / Indonesian citizen, 54 years old. Obtained a Master's degree in Business Administration from European University Belgium in 1993, joined the Company on April 16, 2013. His last position was Head of Treasury Division.

ARI KURNIAWAN

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Dr. Moestopo pada tahun 2001, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 27 Maret 2017. Jabatan terakhir sebagai Pjs Kepala Divisi Kredit. / Indonesian citizen, 44 years old. Obtained a Bachelor of Economics from the University of Dr. Moestopo in 2001, joined the Company on 27 March 2017. His last position was Acting Head of the Credit Division.

BONNY WAHYUDI

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Kertanegara pada tahun 2001, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 01 Juli 2021. Jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Dana Jasa. / Indonesian citizen, 49 years old. Obtained a Masters in Management from Kertanegara University in 2001, joined the Company on July 1, 2021. His last position was as Head of the Service Fund Division.



Daftar Pejabat Senior

List of Senior Executives

FRIDOLIN RADJA TOGA

Warga Negara Indonesia, 46 tahun . Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2003, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 04 Oktober 2010. Jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit. / Indonesian citizen, 46 years old. Obtained a Masters in Management from the University of Indonesia in 2003, joined the Company on October 04, 2010. His last position was as Head of Restructuring & Credit

DONNY RAHYUDHIE

Warga Negara Indonesia, 42 tahun . Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2001, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 01 November 2017. Jabatan terakhir sebagai Area Manager 1 Wilayah Sumatera. / Indonesian citizen, 42 years old. Obtained a Bachelor's degree in Economics from the University of Indonesia in 2001, joined the Company on November 01, 2017. His last position was Area Manager 1 Sumatra Region.

FERRY FAUZY

Warga Negara Indonesia, 49 tahun . Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung pada tahun 1995, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 01 Maret 2017. Jabatan terakhir sebagai Area Manager 2 Wilayah Banten / Indonesian citizen, 49 years old. Obtained a Law Degree from Bandung Law College in 1995, joined the Company on 01 March 2017. His last position was Area Manager 2 Banten Region.

POLTAK SURYANTO

Warga Negara Indonesia, 54 tahun . Memperoleh gelar Magister Management Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2004, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 17 April 2017. Jabatan terakhir sebagai Area Manager 3 Wilayah DKI Jakarta & Jawa Barat / Indonesian citizen, 54 years old. He earned a Master' degree from Bogor Institute of Agriculture. He joined the Company on April 17, 2017. His last position was as Area Manager 3 DKI Jakarta & West Java Region.

FAJAR NURSETIAWAN

Warga Negara Indonesia, 48 tahun . Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2004, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 01 Oktober 2017. Jabatan terakhir sebagai Area Manager 4 (Jateng, DIY & Jatim) / Indonesian citizen, 48 years old. He earned a Bachelor's degree from Padjadjaran University. He joined the Company on December 1, 2010. Last position as Area Manager 4 (Central Java, DIY & East Java).

AGUS GEDE MAHENDRA

Warga Negara Indonesia, 46 tahun . Memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2003, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 11 November 2016. Jabatan terakhir sebagai Area Manager 5 Wilayah IBT / Indonesian citizen, 46 years old. Obtained his Master of Law degree from Pelita Harapan University in 2003, joined the Company on November 11, 2016. Last position as Area Manager 5 IBT Regions.

Daftar Pejabat Senior List of Senior Executives

BAYU WIDOKARTIKO

Warga Negara Indonesia, 39 tahun . Memperoleh gelar Magister Manajemen Keuangan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2015, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 05 Desember 2016. Jabatan terakhir sebagai Pjs Kepala Divisi Manajemen Risiko. / Indonesian citizen, 39 years old. Obtained a Masters in Financial Management from Bogor Agricultural University in 2015, joined the Company on December 5, 2016. His last position was Acting Head of the Risk Management Division.

HERLIANA

Warga Negara Indonesia, 45 tahun . Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Nusantara Jakarta pada tahun 1999, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 13 Maret 2000. Jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Kepatuhan. / Indonesian citizen, 45 years old. Obtained a Bachelor's degree in Economics from STIE Nusantara Jakarta in 1999, joined the Company on March 13, 2000. Her last position was Head of the Compliance Division.

RUDI HENDRAWAN

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1995, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 1 Desember 2010. Jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Operasional dan Umum. / Indonesian citizen, 49 years old. He earned a Bachelor's degree in Economics from the Christian University of Indonesia, joined the Company on December 1, 2010 with the latest position of Operations and General Affairs Division Head

DONALD FETRENCE

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Gunadarma pada tahun 2001, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 01 April 2003. Jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi & Big Data. / Indonesian citizen, 45 years old. Obtained a Bachelor of Engineering degree from Gunadarma University in 2001, joined the Company on April 01, 2003. His last position was Head of Information Technology & Big Data Division.

HUFRON HENDRIYANTO

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Pamulang pada tahun 2018, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 03 November 2008. Jabatan terakhir sebagai Pjs. Kepala Divisi Human Capital & Transformasi. / Indonesian citizen, 45 years old. Obtained his Master of Law degree from Pamulang University in 2018, joined the Company on November 03, 2008. Last position as Acting Head of Human Capital & Transformation Division.

VICKY TAUFIK SAGIR

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 01 November 2021. Jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Akuntansi & Keuangan. / Indonesian citizen, 44 years old. Obtained a Bachelor's degree in Economics from the University of Indonesia in 2000, joined the Company on November 1, 2021. His last position was as Head of the Accounting & Finance Division.

TRI HANDOKO TJAHYADI

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Sosial dari Universitas Indonesia pada tahun 2001, mulai bergabung dengan Perseroan pada tanggal 20 Desember 2021. Jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Digital Banking. / Indonesian citizen, 44 years old. Obtained a Bachelor's degree in Social Science from the University of Indonesia in 2001, joined the Company on December 20, 2021. His last position was as Head of the Digital Banking Division.

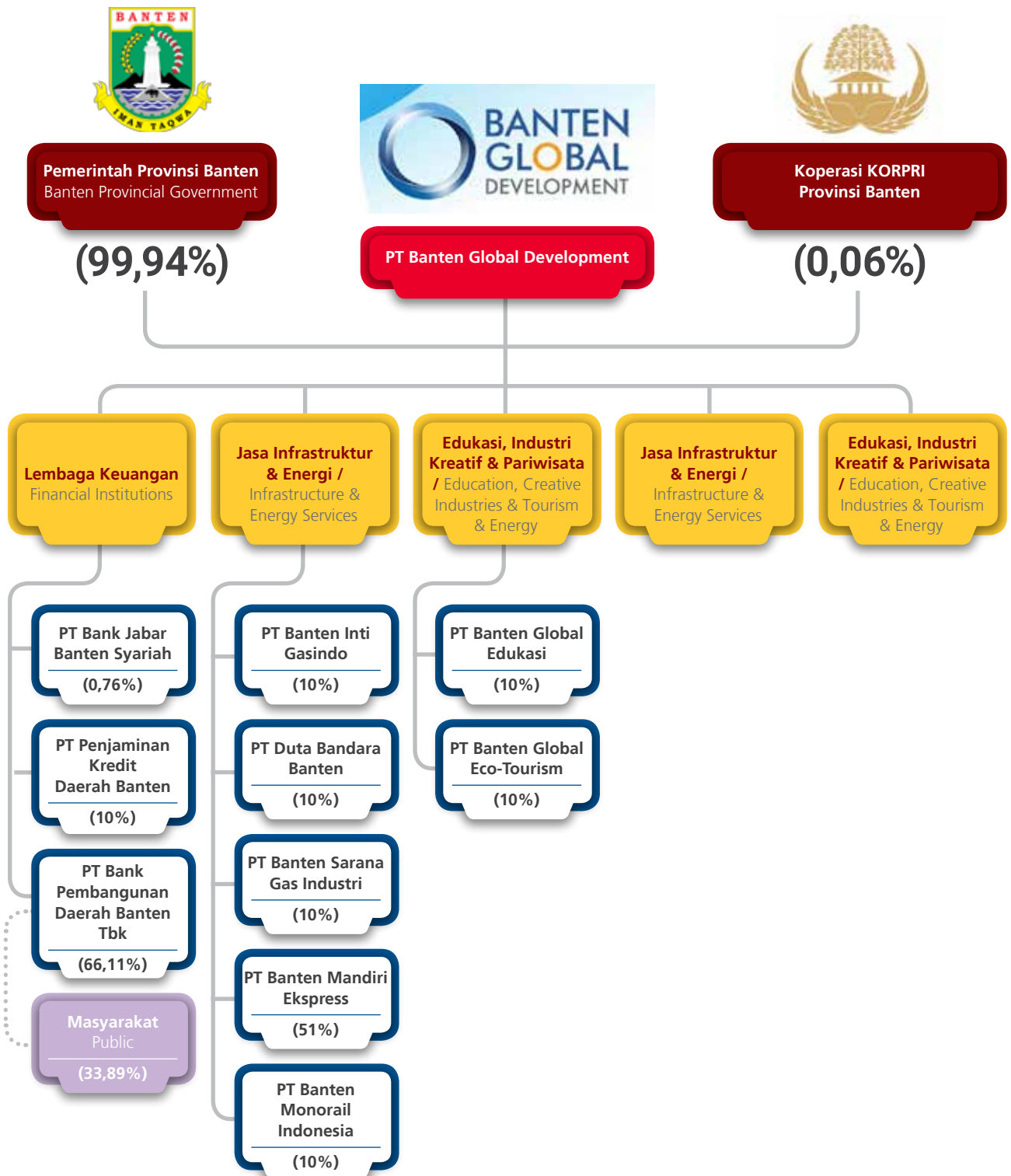


Profil Perusahaan
Company Profile



Struktur Hubungan Kepemilikan Saham Perseroan

Shareholding Structure of the Company



Profil SDM

HR Profile

Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki 978 karyawan. Jumlah tersebut mengalami perubahan naik sebesar 1,03% dibandingkan dengan jumlah karyawan di tahun buku sebelumnya yang tercatat sebesar 950 orang. Berikut merupakan data demografi karyawan Perseroan berdasarkan jenis kelamin, usia, unit bisnis, jenjang pendidikan, level jabatan, dan status kepegawaian.

As of December 31, 2021, the Company had 978 employees. The number increased by 1.03% compared with the number of employees in the previous fiscal year which was recorded at 950 employees. The following is the demographic data of the Company's employees based on gender, age, business unit, education level, position level, and employment status.

Tingkat Pendidikan / Education Level	2020	2021
S3 / Doctorate Degree	0	2
S2 / Postgraduate	27	27
S1 / Undergraduate	779	763
D3 / Associate Degree	115	123
SLTA / Senior High School	29	63
SMP / Junior High School	0	0
Jumlah / Total	950	978

Usia / Age	2020	2021
>55 tahun / >55 years old	3	5
46-55 tahun / 46-55 years old	135	136
41-45 tahun / 41-45 years old	164	169
31-40 tahun / 31-40 years old	376	322
<30 tahun / <30 years old	272	346
Jumlah / Total	950	978

Status Kepegawaian / Employment Status	2020	2021
Tetap / Permanent	887	816
Masa Percobaan / Probation	0	2
Kontrak / Temporary	61	158
Jasa Tenaga Ahli / Expert Services	2	2
Jumlah / Total	950	978

Jenis Kelamin / Gender	2020	2021
Laki-Laki / Male	573	557
Perempuan / Female	377	421
Jumlah / Total	950	978



Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR PERSEROAN

20 MAJORITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

No	Nama Pemegang Saham / Shareholder Name	Persentase (%) / Percentage (%)
1	PT Banten Global Development	66,11
2	Heryanto Salim	2,42
3	UBS AG Singapore S/A Emperor Inv Hldngs Proprt LTD	1,16
4	PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha-Desk 3	0,57
5	PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha - Desk 1	0,56
6	PT Dirga Sukses Sejahtera	0,48
7	Sumadi Rusli	0,47
8	Alexander Sugiman Tjioe	0,44
9	Sugiman Halim	0,40
10	PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha	0,39
11	PT Sam Indonesia	0,37
12	Ridwan Tenudjaja	0,33
13	Sena Alijanto	0,32
14	Suwito Talim	0,31
15	Minna Padi Pasopati Saham	0,29
16	Andre Latidjah	0,29
17	Reksa Dana Terproteksi Pinnacle Protected Fund II	0,29
18	PT Minna Padi Investama Sekuritas	0,28
19	Jerry Hermawan Lo	0,25
20	Budi Hartono	0,23

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI LEBIH DARI 5% SAHAM DI PERSEROAN

SHAREHOLDER WHO HAS MORE THAN 5% OF SHARES IN THE COMPANY

Pemegang Saham / Shareholder	Persentase / Percentage		Jumlah Saham / Total Shares	
	2020	2021	2020	2021
PT Banten Global Development	51,00%	66,11%	32.269.755.661	34.289.755.661

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT YANG MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 5%

SHAREHOLDER WHO HAS LESS THAN 5% OF SHARES

Pemegang Saham / Shareholder	Persentase / Percentage		Jumlah Saham / Total Shares	
	2020	2021	2020	2021
Masyarakat / Public	49,00%	33,89%	5.890.598.676	17.580.682.605

Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition

JUMLAH PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN KLASIFIKASI

NUMBER OF SHAREHOLDERS BASED ON CLASSIFICATION

Status Kepemilikan / Ownership Status	Jumlah Pemegang Saham / Number of Shareholder	Jumlah Saham / Number of Shares	Persentase / Percentage
Perorangan WNI / Indonesian Individual	29.781	4.549.070.256	49,660
Perseroan Terbatas / Limited Liabilities Company	53	3.313.963.413	36,177
Reksadana / Mutual Funds	11	372.164.526	4,063
Asuransi / Insurance	10	901.697.133	9,843
Yayasan / Foundations	6	394.820	0,004
Koperasi / Cooperatives	3	3.065.624	0,033
Lain-Lain / Others	-	-	-
Sub Total 1 / Sub Total 1	29.864	9.140.355.772	99,780
PemodalAsing / Foreign Investors			
PeroranganAsing / Foreign Individual	39	4.110.864	0,045
Badan Usaha Asing / Foreign Entity	16	15.887.701	0,173
Lain-Lain / Others	55	19.998.565	0,218
Sub Total 2 / Sub Total 2	29.919	9.160.354.337	100,00

ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MEMILIKI SAHAM DI PERSEROAN

Hingga akhir tahun 2021, terdapat 2 anggota Direksi yang memiliki saham Perseroan secara langsung maupun tidak langsung.

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS WHO OWN THE SHARES IN THE COMPANY

Up to the end of 2021, there were 2 members of the Board of Directors who directly or indirectly owned shares of the Company.

No	Nama Pemegang Saham / Shareholder Name	Jumlah Saham / Total Shares
1.	Agus Syabarrudin	1.867.004
2.	Cendria TJ Tasdik	110.000

DAFTAR NAMA ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI, DAN PERUSAHAAN VENTURA

Hinggaakhir 2021, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi ataupun Perusahaan Ventura.

NAME OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED COMPANIES, AND VENTURE COMPANIES

Up to the end of 2021, the Company did not have a Subsidiary, Associated Company, or Venture Company.



Kronologi Penerbitan Saham

Shares Issuance Chronology

Aktivitas

22 Juni 2001

June 22, 2001

Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 227.500.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seri A) per saham dan harga penawaran sebesar Rp140 per saham / Initial Public Offering of 227,500,000 shares at a nominal value of Rp100 per share (Series A) and offering price of Rp140 per share.

13 Juli 2001

July 13, 2001

Pencatatan Saham di Bursa Efek Jakarta dengan kode saham BEKS / Listing on the Jakarta Stock Exchange under the BEKS ticker code

20 Juli 2005

July 20, 2005

Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh tanpa HMETD dari sebesar Rp77.500.000.000 menjadi Rp81.375.000.000 / Increase of fully issued and paid-in capital without Preemptive-Rights from Rp77,500,000,000 to Rp81,375,000,000.

2 Desember 2008

December 2, 2008

Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor penuh tanpa HMETD dari sebesar Rp81.375.000.000 menjadi Rp85.375.000.000 / Increase of fully issued and paid-in capital without Preemptive-Rights from Rp81,375,000,000 to Rp85,375,000,000

30 Juni 2010

June 30, 2010

Peningkatan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas (HMETD) I dengan menerbitkan sebanyak 5.122.500.000 lembar saham atas nama Seri A dengan harga penawaran Rp100 per saham / Capital Increase through Limited Public Offering (with Preemptive Rights) I by issuing 5,122,500,000 registered as Series A shares at an offering value of Rp100 per share.

6 Juli 2010

July 6, 2010

Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (HMETD) I di Bursa Efek Indonesia melalui Surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-04207/BEI.PPJ/07-2010 / Approval of Share Listing from a Limited Public Offering (with Preemptive Rights) I on the Indonesia Stock Exchange through the Letter of PT Bursa Efek Indonesia Number S-04207/BEI.PPJ/07-2010

15 September 2011

September 15, 2011

Peningkatan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas (HMETD) II dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.980.208.333 lembar saham atas nama Seri A dengan harga penawaran Rp100 per saham / Capital Increase through Limited Public Offering (with Preemptive Rights) II by issuing maximum 4,980,208,333 registered as Series A shares at an offering value of Rp100 per share.

21 September 2011

September 21, 2011

Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (HMETD) II di Bursa Efek Indonesia melalui Surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-06418/BEI.PPJ/09-2011 / Approval of Share Listing from a Limited Public Offering (with Preemptive Rights) II on the Indonesia Stock Exchange through the Letter of PT Bursa Efek Indonesia Number S-06418/BEI.PPJ/09-2011

30 Agustus 2012

August 30, 2012

Peningkatan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas (HMETD) III dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.499.798.302 lembar saham atas nama Seri A dengan harga penawaran Rp120 per saham. / Capital Increase through Limited Public Offering (with Preemptive Rights) III by issuing maximum 2,499,798,302 registered as Series A shares at an offering value of Rp120 per share.

Kronologi Penerbitan Saham Shares Issuance Chronology

5 September 2012
September 5, 2012

Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (HMETD) III di Bursa Efek Indonesia melalui Surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-06138/BEI.PPJ/09-2012 / Approval of Share Listing from a Limited Public Offering (with Preemptive Rights) III on the Indonesia Stock Exchange through the Letter of PT Bursa Efek Indonesia Number Nomor S-06138/BEI.PPJ/09-2012

29 Juli 2016
July 23, 2016

Peningkatan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas (HMETD) IV dengan menerbitkan saham baru atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp18 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 35.416.600.785 lembar saham dengan harga penawaran Rp18,35 per saham / Capital increase through Limited Public Offering (with Preemptive Rights) IV by issuing maximum 35,416,600,785 of new registered Series B shares at an offering value of Rp18.35 per share

8 Agustus 2016
August 8, 2016

Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (HMETD) IV di Bursa Efek Indonesia melalui Surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-04871/BEI.PP1/08-2016 / Approval of Share Listing from a Limited Public Offering (with Preemptive Rights) IV on the Indonesia Stock Exchange through the Letter of PT Bursa Efek Indonesia Number Nomor S-04871/BEI.PP1/08-2016

24 November 2016
November 24, 2016

Peningkatan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas (HMETD) V dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 lembar saham atas nama Seri B dengan harga penawaran Rp18,35 per saham. / Capital increase through Limited Public Offering (with Preemptive Rights) V by issuing maximum 17,937,712,419 registered as Series B shares at an offering value of Rp18.35 per share

1 Desember 2016
December 1, 2016

Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (HMETD) V di Bursa Efek Indonesia melalui Surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-07472/BEI.PP1/12-2016. / Approval of Share Listing from a Limited Public Offering (with Preemptive Rights) V on the Indonesia Stock Exchange through the Letter of PT Bursa Efek Indonesia Number Nomor S-07472/BEI.PP1/12-2016.

8 Desember 2020
December 8, 2020

Peningkatan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas (HMETD) VI dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 60.820.296.033 lembar saham Seri C dengan harga penawaran Rp50,00,- per saham. / Increased of Capital through Limited Public Offering (HMETD) VI by issuing as much as 60,820,296,033 shares of Series C with offering prices of Rp50.00 per share.

16 Desember 2020
December 16, 2020

Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (HMETD) VI di Bursa Efek Indonesia melalui Surat PT. Bursa Efek Indonesia No. S-07827/BEI.PP/12-2020. / Approval of Shares Listing of Limited Public Offering (HMETD) VI at the Indonesia Stock Exchange through Letter of PT. Bursa Efek Indonesia No. S-07827/BEI.PP/12-2020.

6 Oktober 2021
October 6, 2021

Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (HMETD) VII di Bursa Efek Indonesia melalui Surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-07242/BEI.PP1/10-2021. / Approval of Shares Listing of Limited Public, Offering (HMETD) VII at the Indonesia Stock Exchange through Letter of PT. Bursa Efek Indonesia No. S-07242/BEI.PP1/10-2021.



Profil Perusahaan
Company Profile



81



Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Other Shares Listing Chronology

Perseroan tidak melakukan pencatatan efek lainnya pada tahun 2021

The Company did not perform other shares listing in 2021.

Akuntan Publik

Public Accountant

Penunjukan Akuntan Publik Perseroan dilaksanakan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 20 Mei 2021. Pada tahun 2021, Akuntan Publik Perseroan adalah Kanaka Puradiredja, Suhartono yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

The appointment of the Company's Public Accountant was performed through the General Meeting of Shareholders resolutions dated May 20, 2021. In 2021, the Company's Public Accounting Firm was Kanaka Puradiredja, Suhartono who was appointed by the Board of Commissioners.

Tahun / Year	Akuntan Publik / Public Accountant	Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	Biaya Jasa Audit / Audit Fee	Jasa lain yang diberikan audit / Other Services Fee
2021	Florus Daeli, MM, CPA	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Rp1.542.975.002	Jasa audit Laporan Keuangan untuk periode 31 Maret dan 31 Desember 2021. / Audit on the Financial Statements for the period of March 31 and December 31, 2021
2020	Florus Daeli, MM, CPA	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Rp564.995.000	KAP menerbitkan Comfort Letter Perseroan dalam rangka PUT VI / KAP issued the Company Comfort Letter for Rights Issue PUT VI
2019	Florus Daeli, MM, CPA	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Rp522.500.000	
2018	Tan Siddharta	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Rp522.500.000	
2017	Tan Siddharta	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Rp475.000.000	
2016	Tan Siddharta	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Rp525.000.000	

Alamat Kantor dan/atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan

Addresses of the Office and/or Branch Offices or Representative Offices

No.	Status	Lokasi Kantor / Office Location	Alamat / Address	No. Telp / Telephone Numbers
1	KPNO	KPNO Serang	Jln. Jendral Sudirman No. 4-6, Rt. 04/23, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota Serang	(0254) 7914966
Kantor Cabang Wilayah Banten / Banten Regional Office				
1	KCK	Serang	Jln. Ahmad Yani No. 116 A-B Serang	(0254) 229400 / 229500 / 229600 / 229700
2	KC	Tangerang	Ruko Modern Golf Shope House, Jln. Haryono Raya No. 91 Modernland, Kelapa Indah, Tangerang	(021) 59728755

No.	Status	Lokasi Kantor / Office Location	Alamat / Address	No. Telp / Telephone Numbers
3	KC	Balaraja	Ruko Taman Puspita Blok H1 No. 18-19 Cikupa, Kab. Tangerang 15710	(021) 22597165 / 22596940 / 22597339
4	KC	Rangkasbitung	Jln. Ra Kartini No. 45-47 Desa Muara Ciujung Timur, Rangkasbitung	(0252) 5552042
5	KC	Tangerang Selatan	Jln. Ciater Raya No. 18 A-C Kec. Serpong, Kel. Rawa Mekar Jaya, Tangerang Selatan	(021) 75672245 / 75672355
6	KC	Pandeglang	Jln. Raya Serang Rt. 001 Rw. 011 Kampung Kadu Pundak, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	(0253) 5554257
7	KC	Cilegon	Jln. S A Tirtayasa No. 17 Rt. 003 Rw. 012 Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang Kota, Cilegon	(0254) 7815700 / 7815224
Kantor Cabang (Kc) Luar Banten / Branch Office Outside of Banten				
8	KC	Pondok Indah	Jln. Sultan Iskandar Muda No.79 C Rt.004 Rw.005 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Dki Jakarta	(021) 22772822 / 22772815
9	KC	Sangaji	Jln. Cideng Timur No. 30B Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat	(021) 63862448 / 63862449 / 63862453
10	KC	Kelapa Gading	Jln. Boulevard Raya Blok Fy-1 No. 16-17 Kelapa Gading	(021) 4535888
11	KC	Bekasi	Jln. Cut Mutiah Ruko Pasar Betos Blok A1 No. 1 Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Bekasi	(021) 22120900 / 22120907
12	KC	Karawang	Jln. Otista Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang	0267-8408937
13	KC	Denpasar	Jl. Raya Puputan, Pertokoan Duta Wijaya, No. 2-3, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	(0361) 268899 / 267788
14	KC	Makassar	Jln. Ap. Pettarani Ruko Sardoni 1 – 2 Ramayana Bussiners Center Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar	(0411) 4092491 / 4098597 / 4098979
15	KC	Manado	Kawasan Mega Mas Ruko Blok 1f 1 No 16-17 Jl. Piere Tendean, Kel. Tituwungen Selatan, Kec. Sario, Kota Manado	(0431) 8880777 / 8880480 / 8880477
16	KC	Bandung	Jln. Astana Anyar No. 42-44 Bandung 40241	(022) 6030776
17	KC	Malang	Jl. Letjen Sutoyo No.108 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing Malang- Jawa Timur	(0341) 4382290
18	KC	Semarang	Jln. Ahmad Yani No. 136 A Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	(024) 7616869 / 7618643
19	KC	Solo	Jln. Slamet Riyadi No. 171, Kecamatan Serengan, Kelurahan Kemlayan, Surakarta	(0271) 2933600
20	KC	Surabaya	Jln. Raya Darmo No.130, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	(031) 99537300
21	KC	Tasikmalaya	Jln. Hz Mustofa No. 330 Tasikmalaya	(0265) 312714 / 312176
22	KC	Yogyakarta	Jln. Laksda Adi Sucipto No. 32 Demangan, Yogyakarta	(0274) 554543 / 547217
23	KC	Lampung	Jln. Laksmana Malahayati No. 230 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung	(0721) 487799 / 487003 / 486950
24	KC	Medan	Jln. Insinyur Haji Juanda No. 53, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, Sumatera Utara	(061) 4515586 / 4142269 / 4515826
25	KC	Palembang	Jln. Jendral Sudirman Km 3,5, No.2413, Rt.017, Rw. 004, Kelurahan 20 Ilir Iii, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	(0711) 5733338 / 5733553 / 5733103 / 5733009
26	KC	Pekanbaru	Jln. Tuanku Tambusai, Pertokoan Nangka Raya Permai Blok A No. 16 Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai	(0761) 36998 / 32778
Kantor Cabang Pembantu Wilayah Banten / Supporting Branch Office in the Banten Region				
1	KCP	Palima	Jln. Syech Nawawi Al-Bantani No. 1 Sukawarna, Curug, Serang	(0254) 7823499 / 7823501
2	KCP	Kramatwatu	Jln. Raya Serang - Cilegon Km. 10, Desa Pejaten, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Banten	(0254) 7942919
3	KCP	Ciledug	Jln. Raden Fatah No. 71 C Rt. 001 Rw. 006 Kel. Sudimara Barat, Kec. Ciledug, Tangerang Kota 15151	(021) 73460996 / 73460477 / 73460151 / 73460772 / 73460221 / 73460177



No.	Status	Lokasi Kantor / Office Location	Alamat / Address	No. Telp / Telephone Numbers
4	KCP	DUTA INDAH	Gedung Duta Indah Iconic Jl. M.H. Thamrin Km.2 Kel Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang	(021) 5388714 / 5388729 / 5388726
5	KCP	Ciputat	Jln. Re Martadinata Ruko 2d Rt. 003 Rw. 013, Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan	(021) 22742226
6	KCP	Bintaro	Kavling Rukan, Jln. Bintaro Utama Blok C No. 39 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren, Tangsel	(021) 2273547 / 22735389
7	KCP	Jatiuwung	Ruko Bbc@Jatake Soll Marina Blok A 17 Jln. Gatot Subroto Km 5,3 Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	(021) 55665438 / 55665403 / 55665440
8	KCP	Malingping	Jln. Kampung Lebak Pasar Rt. 009 Rw. 001 Kel. Muaraciujung, Malingping	(0252) 5605081 / 5605059
9	KCP	Maja	Kampung Gubugan No. 31, Rt/Rw. 001/003, Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	(0252) 5554230
10	KCP	Panimbang	Jln. Tanjung Lesung Pasar Kel. Panimbang Jaya, Kab. Pandeglang	(0253) 5808734 / 5808993
11	KCP	Labuan	Jln. Jenderal Sudirman No. 79 Labuan, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten	(0253) 5809930 / 5809972
12	KCP	Tangerang & Tangsel	Jln. Ciater Raya No. 18 A-C Kel. Rawa Mekarjaya, Kec. Serpong, Tangerang	
13	KCP	Balaraja	Ruko Taman Puspita Blok H1 No. 18-19 Cikupa, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang 15710	
14	KCP	Cilegon	Jln. S A Tirtayasa No. 17 Rt. 003 Rw. 012 Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang Kota, Cilegon	
15	KCP	Pandeglang & Rangkasbitung	Jln. Ra Kartini No. 45-47 Desa Muara Ciujung Timur, Rangkasbitung	
16	KCP	Serang	Jln. Ahmad Yani No. 116 A-B Serang	
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Luar Banten / Supporting Branch Office Outside of Banten				
1	KCP	Muara Karang	Jl. Pluit Karang No. 281, Blok A.6 Utara, Kavling No. 11, Jakarta Utara	(021) 6697774 / 6697775
Kantor Kas (KK) / Cash Office				
1	KK	RSUD SERANG	Jln. Syeh Nawawi Al Bantani, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Banjarsari, Serang, Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42123	(0254) 7822279
2	KK	KP3B SERANG	Jln. Syech Nawawi Al-Bantani, Sukawarna, Curug, Serang	0254 - 7823770
3	KK	Bapenda	Jln. Syech Nawawi Al-Bantani, Sukawarna, Curug, Serang	0254 - 7823978
Kantor Fungsional (KF) / Functional Office				
1	KF	Upt Serang Kota	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Km 5, Kota Serang	(0254) 229400
2	KF	Upt Cikande	Jl. Raya Serang Jakarta Km 6, Desa Plawad, Kec. Ciruas, Kabupaten Serang	087708983778
3	KF	Gerai Petir	Jl. Raya Petir Km. 13 Depan Mts Nurul Falah Petir Kab. Serang	(0254) 7914966
4	KF	Gerai Ramayana	Jl. Veteran No.6 Serang Pt. Mandiri Maju Sentosa Lt Basement Kota Serang	(0254) 229400
5	KF	Gerai Kepandean	Jl. Letnan Jidun Rt.002/009 Kel. Lontar Baru Depan Pasar/ Terminal Kepandean, Kota Serang	(0254) 229401
6	KF	Gerai Ahmad Yani	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 36, Cimuncang, Kota Serang	(0254) 229402
7	KF	Gerai Cikande	Jl Raya Jakarta- Serang Km 69, Ruko Raab/Rahab No 1, Pasir Limus Cikande Kab. Serang	(0254) 229403
8	KF	Gerai Kramatwatu	Jl. Raya Cilegon Km. 09 Kramatwatu	(0254) 229404
9	KF	Gerai Padarincang	Jl. Palka Km. 33 Kampung Cisauk	(0254) 229404
10	KF	Upt Ciledug	Jln. Raden Fatah Km. 1, Kel. Sudimara Barat, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15151	(021) 7324481
11	KF	Upt Cikokol	Jln. Perintis Kemerdekaan li B Cikokol Tangerang	'081310765586
12	KF	Gerai Batu Ceper	Batu Ceper Tangerang	(021) 59728755

No.	Status	Lokasi Kantor / Office Location	Alamat / Address	No. Telp / Telephone Numbers
13	KF	Gerai Modernland	The Modern Golf Shop House Jl. Hartono Raya No.9 Kel Kelapa Indah Kec. Tangerang	(021) 59728755
14	KF	Gerai Mall Alam Sutera	Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 16 Mall @ Alam Sutra Tangerang Lantai Lg 1	(021) 59728756
15	KF	Gerai Jatiuwung	Ruko Bbc Blok A No. 17 Jl. Gatot Subroto Km. 5.3 Gandasari Tangerang	(021) 59728757
16	KF	Gerai Tangcity Mall	Jl. Jendral Sudirman No.1 Cikokol Kota Tangerang	(021) 59728758
17	KF	Gerai Sangiang	Ruko Sangiang Square Jl. Moh Toha Km 36 Blok B	(021) 59728759
18	KF	Gerai Mall Pelayanan Publik	Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman No. 1 Kota Tangerang	(021) 59728760
19	KF	Upt Ciputat	Jln. Re Marta Dinata No.10 Cipayang Ciputat Banten 15411	'081808622135
20	KF	Upt Serpong	Jln. Civic Center Blok 405 No. 5 Lengkong Gudang Serpong Bsd Sektor Iv Tangsel 15321	(021) 53152746 / 5386761
21	KF	Gerai Cinere	Jln. Cinere Limo - Depok Jawa Barat	(021) 75672245
22	KF	Gerai Bintaro	Ruko Bintaro Plaza Kelurahan Pondok Karya - Pondok Aren Tangsel	(021) 75672245
23	KF	Gerai Plaza Bintaro Jaya	Jl. Bintaro Utama Sektor 3a Pondok Karya-Pondok Aren	(021) 75672245 / 75672355
24	KF	Gerai Polda Metro Jaya	Gedung Samsat Jakarta Selatan Lantai 1 Jl. Jendral Sudirman No. 55 Rt.5 Rw.3, Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan	(021) 75672245 / 75672356
25	KF	Gerai Giant Kreo	Giant Kreo Ciledug Lt. Gf, Jl. Kh. Wahid Hasyim Kreo Selatan, Petukangan, Larangan, Kota Tangerang	(021) 75672245 / 75672357
26	KF	Gerai Cipondoh	Jl. Kh. Hasyim Ashari No.46 Kel Nerogtog Kec. Pinang Kota Tangerang	(021) 75672245 / 75672358
27	KF	Corner Mall Cbd	Cbd Ciledug Jl. Hos Cokrominoto No. 93 Karang Tengah Tangerang	(021) 75672245 / 75672359
28	KF	Gerai Graha Raya	Ruko Orlin Arcade 2 Bintaro Blok Jb-28 Jl. Graha Raya Bintaro Kel Pakujaya Kec. Serpong Utara-Tangerang Selatan	(021) 75672245 / 75672360
29	KF	Gerai Ciater	Jln. Ciater Raya No. 18 A-C Kec. Serpong, Kel. Rawa Mekar Jaya, Tangerang Selatan	(021) 75672245 / 75672361
30	KF	Uptd Ppd Kelapa Dua	Jl. Raya Civic Center Block 405/5 Bsd (021) 5376031, (021) 5376032	(021) 75672245 / 75672362
31	KF	Gerai Curug	Jl. Raya Plp Curug Kulon No. 16 Kec. Curug Kab. Tangerang	(021) 75672245 / 75672363
32	KF	Gerai Sepatan	Ruko Golden City R2 No 11 Jl Raya Mauk Km.9 Kel. (Belakang Klinik Medika), Tangerang	(021) 75672245 / 75672364
33	KF	Gerai Teluk Naga	Ruko Airport City No. A2-D Jl. Raya Kampung Melayu Timur Teluk Naga	(021) 75672245 / 75672365
34	KF	Gerai Supermall Karawaci	Super Mall Lt Uga8 No2-3 Jl. Raya Muhamad Toha Km.2 No.1 Kec Karawaci Tangerang	(021) 75672245 / 75672366
35	KF	Gerai Kelapa Dua	Sumarecon Gading Serpong Ruko Glaze Blok B31 No.1, Jl. Raya Boelovard. Tangerang	(021) 75672245 / 75672367
35	KF	Upt Balaraja	Jln. Raya Perahu, Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang	(021) 29508286
36	KF	Gerai Pasar Kamis	Jl. Raya Otonom Cikupa - Pasar Kemis No. 99 Desa. Sukaharja Rt02 Rw.02 Kec Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Banten	(021) 22597165
37	KF	Gerai Kronjo	Jl. Raya Kronjo-Mauk Kp Pagedangan Udik Ds. Pagedangan Udik Kec. Kronjo Kab Tangerang	(021) 22597166
38	KF	Gerai Gembong	Jl. Raya Serang Km 34 Gembong Balaraja Kab Tangerang	(021) 22597167
39	KF	Upt Lebak	Jln. Langlang Buana Pasir Ona Rangkasbitung	085214727296
40	KF	Upt Malingping	Jln. Raya Binuangeun - Malingping No. 89 Sukamanah, Malingping, Kab. Lebak, Provinsi Banten - 42391	(0252) 5605213
41	KF	Gerai Cipanas	Jln. Raya Cipanas Km 35 Cipanas Desa Bintang Resmi Kabupaten Lebak	(0252) 5552042



No.	Status	Lokasi Kantor / Office Location	Alamat / Address	No. Telp / Telephone Numbers
42	KF	Gerai Maja	Jln. Raya Maja / Jasinga Kampung Maja Pasar Kecamatan Maja Kabupaten Lebak	(0252) 5552042
43	KF	Gerai Gunung Kencana	Jln. Raya Malingping Kampung Pasar Desa Gunung Kencana Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak	(0252) 5552042
44	KF	Gerai Bayah	Jln. Raya Bayah-Cikotok, Bayah Barat, Kec. Bayah, Kab. Lebak, Provinsi Banten 42393	(0252) 5552042
45	KF	Gerai Sonten	Jl. Sunan Kalijaga No. 4 Rangkasbitung	(0252) 5552043
46	KF	Gerai Rangkasbitung	Jl. Ir. H. Djuanda No. 114. Muara Ciujung Tim Rangkas Bitung Kab Lebak	(0252) 5552044
47	KF	Geraibanjarsari	Jl. Raya Malingping, Jalupang	(0252) 5552045
48	KF	Gerai Ciligrang	Jl. Raya Bayah Cibareno Km 25 Gunung Batu Iii Rt. 001 Rw. 003 Desa Gunung Batu Kec. Ciligrang	(0252) 5552046
49	KF	Upt Pandeglang	Jln. Raya Labuan Maja	(0253) 201206
50	KF	Gerai Saketi	Jln. Raya Labuan Km 18 Kp. Saketi Pasir Rt/Rw 01/01 Kec. Saketi	(0253) 5554257
51	KF	Gerai Kadu Merak	Jln. Raya Serang Km 1 Kadu Merak	(0253) 5554257
52	KF	Gerai Panimbang	Rest Area Ciseukeut (Depan Kantor Desa Mekarsari) Kec Panimbang Kab. Pandeglang	
53	KF	Gerai Pandeglang	Jl Ahmad Satriawijaya No 1 Pandeglang Kab. Pandeglang	
54	KF	Upt Cilegon	Jln. Raya Merak Km.3 No.19, Tegal Wangi, Cilegon, Banten	(0254) 573554
55	KF	Gerai Anyer	Jln. Raya Anyer Sirih No. 60 Anyer Serang Banten	(0254) 7815700
56	KF	Gerai Cibeber	Jln. Raya Cilegon Cibeber Kec. Cibeber Cilegon Banten	(0254) 7815700
57	KF	Gerai Bojonegara	Kp. Gendong Rt.02/01. Serang	(0254) 7815700
58	KF	Gerai Ramanuju	Jln. Letjen Suprpto Ramanuju Kec. Purwakarta Cilegon Banten	(0254) 7815700
Kantor Wilayah (KW) / Regional Office				
1.	KW	Banten	Jln. A. Yani No. 135 D Sukmajaya Cilegon, Kecamatan Jombang, Cilegon, Banten	(0254) 374855

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal Lainnya

Capital Market Institutions and/or Professionals

Nama & Alamat / Name & Address	Jasa / Services
PT RAYA SAHAM REGISTRA	Biro Administrasi Efek / Share Registrar
Plaza Sentral Building Lt.2 Jl. Jenderal Sudirman 47-48, Karet Semanggi Jakarta 12930	

Informasi Pada Website Perseroan

Information on Company's Website



Sebagai bentuk komitmen Perseroan terhadap peraturan yang diberlakukan OJK No. 8/POJK.04/2015 mengenai situs web emiten atau perusahaan publik, Perseroan telah melengkapi website Perusahaan www.bankbanten.co.id dengan beberapa informasi penting sebagai berikut:

- Profil Manajemen
- Informasi Pemegang Saham
- Jaringan Kantor dan ATM
- Produk dan Layanan
- Tata Kelola Perusahaan
- Kode Etik
- Berita dan Siaran Pers
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Laporan Keuangan Tahunan terpisah selama 5 tahun terakhir

As a form of the Company's commitment to the regulations imposed by OJK No. 8/POJK.04/2015 concerning the issuer's website or public company, Company has completed the Company's website www.bankbanten.co.id with the following key information:

- Management Profile
- Shareholders Information
- ATM and Office Network
- Products and Services
- Good Corporate Governance
- Code of Conduct
- News and Press Release
- Corporate Social Responsibility
- Separate Annual Financial Statements in the last 5 years.



Profil Perusahaan
Company Profile



Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors,
Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

1. Direksi

1. Board of Directors

Nama / Name	Jabatan / Position	Program	Tanggal / Dated	
			Mulai / Started	Akhir / Ended
Agus Syabarrudin	Direktur Utama / President Director	1. <i>Executive Coaching</i>	24-Mar-21	25-Mar-21
		2. Rapat Kerja Terbatas Area Banten / Limited Working Meeting for the Banten Area	24-Mar-21	24-Mar-21
		3. Rapat Direksi Bpd Se-Indonesia / Board of Directors Meeting of All Indonesian BPD	1-Apr-21	1-Apr-21
		4. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 2 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 2	16-Apr-21	17-Apr-21
		5. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 3 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 3	22-Apr-21	23-Apr-21
		6. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 4 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 4	29-Apr-21	30-Apr-21
		7. Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 / Refreshment of Risk Management Certification Level 5	25-Aug-21	25-Aug-21
Denny Sorimulia Karim	Direktur Operasional & Transformasi / Director of Operations & Transformation	1. <i>Executive Coaching</i>	24-Mar-21	25-Mar-21
		2. Rapat Kerja Terbatas Area Banten / Limited Working Meeting for the Banten Area	24-Mar-21	24-Mar-21
		3. Rapat Direksi Bpd Se-Indonesia / Board of Directors Meeting of All Indonesian BPD	1-Apr-21	1-Apr-21
		4. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 2 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 2	16-Apr-21	17-Apr-21
		5. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 3 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 3	22-Apr-21	23-Apr-21
		6. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 4 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 4	29-Apr-21	30-Apr-21
		7. <i>Islamic Finance Summit 2021</i>	30-Sep-21	30-Sep-21
Cendria Tj Tasdik	Direktur Bisnis / Director of Business	1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 / Risk Management Certification Level 5	21-Mar-21	22-Mar-21
		2. <i>Executive Coaching</i>	24-Mar-21	25-Mar-21
		3. Rapat Kerja Terbatas Area Banten / Limited Working Meeting for the Banten Area	24-Mar-21	24-Mar-21
		4. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 2 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 2	16-Apr-21	17-Apr-21
		5. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 3 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 3	22-Apr-21	23-Apr-21
		6. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 4 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 4	29-Apr-21	30-Apr-21
		7. Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 / Refreshment of Risk Management Certification Level 5	25-Aug-21	25-Aug-21

**Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi,
Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal**
**Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors,
Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit**



Nama / Name	Jabatan / Position	Program	Tanggal / Dated	
			Mulai / Started	Akhir / Ended
Kemal Idris	Direktur Kepatuhan / Director of Compliance	1. <i>Executive Coaching</i>	24-Mar-21	25-Mar-21
		2. Rapat Kerja Terbatas Area Banten / Limited Working Meeting for the Banten Area	24-Mar-21	24-Mar-21
		3. Rapat Direksi Bpd Se-Indonesia / Board of Directors Meeting of All Indonesian BPD	1-Apr-21	1-Apr-21
		4. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 2 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 2	16-Apr-21	17-Apr-21
		5. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 3 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 3	22-Apr-21	23-Apr-21
		6. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 4 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 4	29-Apr-21	30-Apr-21
		7. Training Interpretasi Regulasi Dan Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Kepatuhan Bank / Training of Regulatory Interpretation and Optimization of Bank Compliance Duties and Functions	24-Aug-21	24-Aug-21

2. Komisaris

2. Board of Commissioners



Nama / Name	Jabatan / Position	Program	Tanggal / Dated	
			Mulai / Started	Akhir / Ended
Hasanuddin, Se.Mm	Komisaris Utama / President Commissioner	1. <i>Executive Coaching</i>	24-Mar-21	25-Mar-21
		2. Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko / Refreshment of Risk Management Certification	30-Mar-21	30-Mar-21
		3. <i>Training Fundamental Macroeconomics</i>	26-Aug-21	27-Aug-21
Media Warman	Komisaris Independen / Independent Commissioner	1. Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko / Refreshment of Risk Management Certification	30-Mar-21	30-Mar-21
		2. <i>Training Fundamental Macroeconomics</i>	26-Aug-21	27-Aug-21
H. M. Yusuf	Komisaris / Commissioner	1. <i>Executive Coaching</i>	24-Mar-21	25-Mar-21
		2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 / Risk Management Certification Level 1	29-Mar-21	31-Mar-21
		3. Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris / Refreshment of Risk Management Certification of Board of Commissioners	30-Mar-21	30-Mar-21
		4. Webinar Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme / Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Financing Webinar	27-May-21	27-May-21
		5. Training Strategy Pengelolaan Likuiditas Bank / Bank Liquidity Management Strategy Training	25-Jun-21	25-Jun-21
		6. <i>Training Fundamental Macroeconomics</i>	26-Aug-21	27-Aug-21
		7. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 / Risk Management Certification Level 2	7-Oct-21	8-Oct-21

3. Komite

3. Committee

Nama / Name	Jabatan / Position	Program	Tanggal / Dated	
			Mulai / Started	Akhir / Ended
Agus Junaedi	Pjs. Kepala Divisi Audit Intern / Acting Head of Internal Audit Division	1. Penandatanganan Pakta Integritas & Pengarahan Direksi / Integrity Pact Signing & Board of Directors Briefing	1-Jun-21	1-Jun-21
		2. <i>Training Be Extraordinary You</i>	29-Jul-21	29-Jul-21
		3. Character Building Budaya Perusahaan Batch 1 / Character of Building Corporate Culture Batch 1	8-Jul-21	9-Jul-21
		4. Training Audit Keuangan, Pemeriksaan Pajak Dan Anti Korupsi / Financial Audit, Tax Audit and Anti-Corruption Training	8-Sep-21	9-Sep-21
		5. Pembekalan & Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 / Guidance & Test of the Risk Management Certification Level 3	22-Sep-21	24-Sep-21
Bernard	Kepala Divisi Operasional & Umum / Head of Operations & General Division	1. Penandatanganan Pakta Integritas & Pengarahan Direksi / Integrity Pact Signing & Board of Directors Briefing	1-Jun-21	1-Jun-21
		2. Character Building Budaya Perusahaan Batch 2 / Character of Building Corporate Culture Batch 2	20-Jul-21	21-Jul-21
Bonny Wahyudi	Kepala Divisi Dana Jasa / Head of Service Fund Division	1. <i>Training Transformasi Digital Banking</i>	10-Sep-21	10-Sep-21
Chandra Dwipayana	Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan / Head of the Corporate Secretariat Division	1. Character Building Budaya Perusahaan Batch 3 / Character of Building Corporate Culture Batch 3	20-Aug-21	21-Aug-21
		2. <i>Webinar The Art Of Strategy</i>	10-Feb-21	10-Feb-21
		3. Rapat Kerja Terbatas Area Banten : Rebuild The Trust, Reach The Glory / Limited Working Meeting for the Banten Area: Rebuild The Trust, Reach The Glory	24-Mar-21	24-Mar-21
		4. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 2 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 2	16-Apr-21	17-Apr-21
		5. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 3 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 3	22-Apr-21	23-Apr-21
		6. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 4 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 4	29-Apr-21	30-Apr-21
		7. Penandatanganan Pakta Integritas & Pengarahan Direksi / Integrity Pact Signing & Board of Directors Briefing	1-Jun-21	1-Jun-21
		8. Character Building Budaya Perusahaan Batch 1 / Character of Building Corporate Culture Batch 1	8-Jul-21	9-Jul-21
David Aryanto Dwi Saputro	Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Merangkap Kepala Bagian Hukum / Head of Corporate Secretariat Division Concurrently Head of Legal Division	1. Penandatanganan Pakta Integritas & Pengarahan Direksi / Integrity Pact Signing & Board of Directors Briefing	1-Jun-21	1-Jun-21
		2. Character Building Budaya Perusahaan Batch 2 / Character of Building Corporate Culture Batch 2	20-Jul-21	21-Jul-21
		3. Pembekalan & Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 / Guidance & Test of the Risk Management Certification Level 3	22-Sep-21	24-Sep-21
Dida Herdiyana	Kepala Divisi Human Capital & Transformasi / Head of Human Capital & Transformation Division	1. Rapat Kerja Terbatas Area Banten : Rebuild The Trust, Reach The Glory / Limited Working Meeting for the Banten Area: Rebuild The Trust, Reach The Glory	24-Mar-21	24-Mar-21
		2. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 2 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 2	16-Apr-21	17-Apr-21
		3. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 3 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 3	22-Apr-21	23-Apr-21

Nama / Name	Jabatan / Position	Program	Tanggal / Dated	
			Mulai / Started	Akhir / Ended
		4. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 4 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 4	29-Apr-21	30-Apr-21
		5. Sosialisasi Pembekalan Masa Persiapan Pensiun (Mpp) & Silaturahmi Managemen Bank Banten / Dissemination of Provision for Retirement Preparation Period (Mpp) & Bank Banten Management Gathering	15-Oct-21	15-Oct-21
Dindin Rusdiana	Pemimpin Divisi Umum & SDM / Head of General Affairs & HC Division	1. Training Reviu Pedoman Perhitungan Remunerasi, Penerapan Malus, Dan Clawback Pada Top Level Management / Training on Review of the Guidelines for Remuneration Calculation, Application of Malus, and Clawback at Top Level Management	25-Feb-21	26-Feb-21
		2. Training Implementasi Psak 73 / PSAK 73 Implementation Training	13-Mar-21	13-Mar-21
		3. Rapat Kerja Terbatas Area Banten : Rebuild The Trust, Reach The Glory / Limited Working Meeting for the Banten Area: Rebuild The Trust, Reach The Glory	24-Mar-21	24-Mar-21
		4. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 2 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 2	16-Apr-21	17-Apr-21
		5. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 3 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 3	22-Apr-21	23-Apr-21
		6. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 4 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 4	29-Apr-21	30-Apr-21
Donald Feterence	Pjs. Kepala Divisi Teknologi Informasi & Big Data / Acting Head of Information Technology & Big Data Division	1. Training Transformasi Digital Banking / Digital Banking Transformation Training	10-Sep-21	10-Sep-21
		2. <i>Training Digital Leadership Batch 1</i>	8-Sep-21	9-Sep-21
		3. Character Building Budaya Perusahaan Batch 6 / Character of Building Corporate Culture Batch 6	9-Oct-21	10-Oct-21
		4. Sosialisasi Pembekalan Masa Persiapan Pensiun (Mpp) & Silaturahmi Managemen Bank Banten / Dissemination of Provision for Retirement Preparation Period (Mpp) & Bank Banten Management Gathering	15-Oct-21	15-Oct-21
Dudung Abdussomad Toha	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi / Head of Information Technology Division	1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 / Risk Management Certification Level 3	10-Feb-21	11-Feb-21
		2. Rapat Kerja Terbatas Area Banten : Rebuild The Trust, Reach The Glory / Limited Working Meeting for the Banten Area: Rebuild The Trust, Reach The Glory	24-Mar-21	24-Mar-21
		3. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 2 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 2	16-Apr-21	17-Apr-21
		4. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 3 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 3	22-Apr-21	23-Apr-21
		5. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 4 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 4	29-Apr-21	30-Apr-21
Donny Rahyudhie	Pemimpin Divisi Reviewer & Administrasi Kredit / Head of Credit Reviewer & Administration Division	1. Rapat Kerja Terbatas Area Banten : Rebuild The Trust, Reach The Glory / Limited Working Meeting for the Banten Area: Rebuild The Trust, Reach The Glory	24-Mar-21	24-Mar-21
		2. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 2 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 2	16-Apr-21	17-Apr-21
		3. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 3 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 3	22-Apr-21	23-Apr-21
		4. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 4 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 4	29-Apr-21	30-Apr-21



Nama / Name	Jabatan / Position	Program	Tanggal / Dated	
			Mulai / Started	Akhir / Ended
Fajar Nursetiawan	Pemimpin Divisi Kredit Komersial & Konsumer / Head of Commercial & Consumer Credit Division	1. Rapat Kerja Terbatas Area Banten : Rebuild The Trust, Reach The Glory / Limited Working Meeting for the Banten Area: Rebuild The Trust, Reach The Glory	24-Mar-21	24-Mar-21
		2. <i>Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten 2021</i>	16-Apr-21	17-Apr-21
		3. <i>Workshop Culture Transformation Bank Banten 2021</i>	22-Apr-21	23-Apr-21
		4. Workshop Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten 2021	29-Apr-21	30-Apr-21
Ferry Fauzy	Kepala Divisi Kredit / Head of Credit Division	1. Character Building Budaya Perusahaan Batch 3 / Character of Building Corporate Culture Batch 3	20-Aug-21	21-Aug-21
		2. Workshop Kepala Kantor Cabang Area Banten, Berperan Aktif Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Banten 2022 / Workshop for Banten Area Branch Office Heads, Playing an Active Role in the 2022 Banten Economic Growth	30-Dec-21	30-Dec-21
Hendrawan Perdana Wiyadi	Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit / Head of Credit Restructuring & Settlement Division	1. Pembekalan & Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 / Guidance & Test of the Risk Management Certification Level 3	22-Sep-21	24-Sep-21
Feddy Febriansyah	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko / Head of Risk Management Division	1. Training Reviu Pedoman Perhitungan Remunerasi, Penerapan Malus, Dan Clawback Pada Top Level Management / Training on Review of the Guidelines for Remuneration Calculation, Application of Malus, and Clawback at Top Level Management	25-Feb-21	26-Feb-21
		2. <i>Training Enterprise Risk Management</i>	6-Mar-21	11-Mar-21
		3. Rapat Kerja Terbatas Area Banten : Rebuild The Trust, Reach The Glory / Limited Working Meeting for the Banten Area: Rebuild The Trust, Reach The Glory	24-Mar-21	24-Mar-21
		4. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 2 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 2	16-Apr-21	17-Apr-21
		5. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 3 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 3	22-Apr-21	23-Apr-21
		6. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 4 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 4	29-Apr-21	30-Apr-21
Herlambang	Pemimpin Divisi Akuntansi / Head of Accounting Division	1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 / Risk Management Certification Level 4	10-Feb-21	11-Feb-21
		2. Training Reviu Pedoman Perhitungan Remunerasi, Penerapan Malus, Dan Clawback Pada Top Level Management / Training on Review of the Guidelines for Remuneration Calculation, Application of Malus, and Clawback at Top Level Management	25-Feb-21	26-Feb-21
		3. Rapat Kerja Terbatas Area Banten : Rebuild The Trust, Reach The Glory / Limited Working Meeting for the Banten Area: Rebuild The Trust, Reach The Glory	24-Mar-21	24-Mar-21
		4. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 2 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 2	16-Apr-21	17-Apr-21
		5. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 3 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 3	22-Apr-21	23-Apr-21
		6. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 4 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 4	29-Apr-21	30-Apr-21

Nama / Name	Jabatan / Position	Program	Tanggal / Dated	
			Mulai / Started	Akhir / Ended
Herliana	Kepala Divisi Manajemen Risiko / Head of Risk Management Division	1. <i>Training Digital Leadership Batch 2</i>	10-Sep-21	10-Sep-21
		2. Character Building Budaya Perusahaan Batch 6 / Character of Building Corporate Culture Batch 6	9-Oct-21	10-Oct-21
		3. Sosialisasi Pembekalan Masa Persiapan Pensiun (MPP) & Silaturahmi Managemen Bank Banten / Dissemination of Provision for Retirement Preparation Period (MPP) & Bank Banten Management Gathering	15-Oct-21	15-Oct-21
		4. Seminar Peran Rco Membangun Tata Kelola, Dan Kepatuhan Menuju Kinerja Berprinsip / Seminar on the Role of Rco in Building Governance and Compliance Towards Principled Performance	25-Nov-21	25-Nov-21
Kalmet Nehru	Pemimpin Divisi Audit Internal / Head of Internal Audit Division;	1. Rapat Kerja Terbatas Area Banten : Rebuild The Trust, Reach The Glory / Limited Working Meeting for the Banten Area: Rebuild The Trust, Reach The Glory	24-Mar-21	24-Mar-21
		2. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 2 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 2	16-Apr-21	17-Apr-21
		3. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 3 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 3	22-Apr-21	23-Apr-21
		4. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 4 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 4	29-Apr-21	30-Apr-21
		5. Pembekalan & Ujian Qia / Qia Guidance & Test	Juni 2021	Juni 2021
		6. Ujian Cia & Member Cia / Cia Test & Cia Member		
		7. Penandatanganan Pakta Integritas & Pengarahan Direksi / Integrity Pact Signing & Board of Directors Briefing	1-Jun-21	1-Jun-21
		8. Character Building Budaya Perusahaan Batch 2 / Character of Building Corporate Culture Batch 2	20-Jul-21	21-Jul-21
		9. Training Interpretasi Regulasi dan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kepatuhan Bank / Training on Regulatory Interpretation and Optimization of Bank Compliance Duties and Functions	24-Aug-21	24-Aug-21
		10. Sertifikasi Kepatuhan Bank Level 1 / Bank Compliance Certification Level 1	8-Sep-21	10-Sep-21
Mohamad Ruli Fahmi	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Jaringan / Head of Strategic Planning & Network Division	1. Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4-5 / Refreshment of Risk Management Certification Level 4-5	25-Aug-21	25-Aug-21
		2. Training Transformasi Digital Banking / Digital Banking Transformation Training	10-Sep-21	10-Sep-21
		3. Sosialisasi Pembekalan Masa Persiapan Pensiun (MPP) & Silaturahmi Managemen Bank Banten / Dissemination of Provision for Retirement Preparation Period (MPP) & Bank Banten Management Gathering	15-Oct-21	15-Oct-21
Muhammad Emil Pense	Kepala Divisi Treasury / Head of Treasury Division	1. Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Treasury Level Advance / Guidance and Test of Treasure Certification in the Advance Level	27-Dec-21	29-Dec-21
		2. Sosialisasi Pembekalan Masa Persiapan Pensiun (MPP) & Silaturahmi Managemen Bank Banten / Dissemination of Provision for Retirement Preparation Period (MPP) & Bank Banten Management Gathering	15-Oct-21	15-Oct-21
Poltak Suryanto	Pemimpin Divisi Dana & Treasury / Head of Funds & Treasury Division	1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 / Risk Management Certification Level 3	10-Feb-21	11-Feb-21
		2. Rapat Kerja Terbatas Area Banten : Rebuild The Trust, Reach The Glory / Limited Working Meeting for the Banten Area: Rebuild The Trust, Reach The Glory	24-Mar-21	24-Mar-21



Nama / Name	Jabatan / Position	Program	Tanggal / Dated	
			Mulai / Started	Akhir / Ended
		3. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 2 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 2	16-Apr-21	17-Apr-21
		4. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 3 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 3	22-Apr-21	23-Apr-21
		5. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Tahap 4 / Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten Phase 4	29-Apr-21	30-Apr-21
		6. Penandatanganan Pakta Integritas & Pengarahan Direksi / Integrity Pact Signing & Board of Directors Briefing	1-Jun-21	1-Jun-21
		7. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 / Risk Management Certification Level 4	10-Feb-21	11-Feb-21
Rudi Hendrawan	Pemimpin Divisi Kepatuhan & Hukum / Head of Legal & Compliance Division	1. Rapat Kerja Terbatas Area Banten : Rebuild The Trust, Reach The Glory / Limited Working Meeting for the Banten Area: Rebuild The Trust, Reach The Glory	24-Mar-21	24-Mar-21
		2. Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten 2021	16-Apr-21	17-Apr-21
		3. Workshop Culture Transformation Bank Banten 2021	22-Apr-21	23-Apr-21
		4. Workshop Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten 2021	29-Apr-21	30-Apr-21
		5. Webinar Cyber Crime Typology & Cross Money Laundering	29-Apr-21	29-Apr-21

4. Divisi Sekretariat Perusahaan

4. Corporate Secretariat Division

Nama / Name	Jabatan / Position	Program	Tanggal / Dated	
			Mulai / Started	Akhir / Ended
Chandra Dwipayana	Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan / Head of Corporate Secretariat Division	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 / Risk Management Certification Level 2	10-Feb-21	10-Feb-21
		Training Offer : Introducing And Principles Of Investor Relations	24-Mar-21	24-Mar-21
		Workshop Culture Transformation Bank Banten 2021	16-Apr-21	17-Apr-21
		Workshop Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten 2021	22-Apr-21	23-Apr-21
		Training Fundamental Corporate Secretary	29-Apr-21	30-Apr-21
		Character Building Budaya Perusahaan Batch 2 / Character Building Corporate Culture Batch 2	01-Jun-21	01-Jun-21
		Character Building Budaya Perusahaan Batch 1 / Character Building Corporate Culture Batch 1	08-Jul-21	09-Jul-21
Para Adhi Dharma	Pemimpin Bagian Kesekretariatan & Protokoler / Head of Secretariat & Protocol Dept.	Rapat Kerja Terbatas Area Banten : Rebuild The Trust, Reach The Glory / Limited Working Meeting for the Banten Area: Rebuild The Trust, Reach The Glory	12-Feb-21	13-Feb-21
		Penandatanganan Pakta Integritas & Pengarahan Direksi / Integrity Pact Signing & Board of Directors Briefing	01-Jun-21	01-Jun-21
		Character Building Budaya Perusahaan Batch 1 / Character Building Corporate Culture Batch 1	08-Jul-21	09-Jul-21

Nama / Name	Jabatan / Position	Program	Tanggal / Dated	
			Mulai / Started	Akhir / Ended
Amalia Rahayuningtyas	Analisis Hubungan Investor / Investor Relations Analyst	<i>Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten 2021</i>	25-Mar-21	25-Mar-21
Cindy Fauzia Sawitri	Pemimpin Bagian Hubungan Investor / Head of Investor Relations	<i>Training Fundamental Corporate Secretary</i>	19-Jun-21	19-Jun-21
Rahmat Hidayat	Pemimpin Bagian Komunikasi Perusahaan / Head of Corporate Communications	<i>Training Fundamental Corporate Secretary</i>	19-Jun-21	19-Jun-21
Woro Sulistyowati	Sekretaris Direksi & Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Directors & Board of Commissioners	<i>Training Fundamental Corporate Secretary</i>	19-Jun-21	19-Jun-21
Ghaisani Fildjah Fitri	Sekretaris Direksi & Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Directors & Board of Commissioners	<i>Training Fundamental Corporate Secretary</i>	19-Jun-21	19-Jun-21
		Character Building Budaya Perusahaan Batch 2 / Character Building Corporate Culture Batch 2	20-Jul-21	21-Jul-21
Mohamad Faisal Islam	Hubungan Kelembagaan & Protokol / Institutional & Protocol Relations	<i>Training Fundamental Corporate Secretary</i>	19-Jun-21	19-Jun-21
		Penandatanganan Pakta Integritas & Pengarahan Direksi / Integrity Pact Signing & Board of Directors Briefing	24-Jun-21	25-Jun-21
		Character Building Budaya Perusahaan Batch 1 / Character Building Corporate Culture Batch 1	20-Jul-21	21-Jul-21
Dedi Wijaya	Staf Komunikasi Pemasaran & Media Sosial / Marketing Communications & Social Media Staff	<i>Training Fundamental Corporate Secretary</i>	19-Jun-21	19-Jun-21
Noor Permata Herlinda	Staf Hubungan Masyarakat & CSR / Public Relations & CSR Staff	<i>Training Fundamental Corporate Secretary</i>	19-Jun-21	19-Jun-21
Faizal Hilgandana	Literasi & Inklusi Keuangan / Financial Literacy & Inclusion	<i>Training Fundamental Corporate Secretary</i>	19-Jun-21	19-Jun-21
		Character Building Budaya Perusahaan Batch 2 / Character Building Corporate Culture Batch 2	20-Jul-21	21-Jul-21
Cindy Prettita	Staf Kesekretariatan Direksi / Secretarial Staff of the Board of Directors	<i>Training Public Relation & Corporate Communication</i>	19-Jun-21	19-Jun-21
Rahmat Hidayat	Pemimpin Bagian Komunikasi Perusahaan / Head of Corporate Communications	Character Building Budaya Perusahaan Batch 1 / Character Building Corporate Culture Batch 1	08-Jul-21	09-Jul-21





Analisis dan Pembahasan Menejemen

Management Discussion and Analysis



“”

Inflasi tahun kalender selama tahun 2021 adalah sebesar 1,30% turun sebesar 0,38% dari tahun 2020. Angka inflasi tersebut merupakan yang terendah sejak BPS merilis data inflasi pada 1960.

Inflation for the calendar year during 2021 was 1.68%, down by 0.38% from 2020. This inflation rate was the lowest since BPS released inflation data in 1960.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Tinjauan Makro Ekonomi

Macro Economic Review

EKONOMI GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi di beberapa belahan dunia terus berlanjut. Pemulihan ekonomi global tetap berjalan meskipun berbagai negara mengalami tren perlambatan di akhir tahun 2021, dampak penyebaran varian Delta serta munculnya Omicron sebagai *variant of concern* (VOC) baru juga menambah tantangan terhadap pengendalian pandemi. Ekonomi dunia tumbuh 5,9% pada 2021, naik dari tahun sebelumnya yang justru berkontraksi 3,1%. Walau demikian, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 4,9% pada 2022. Hal yang sama terjadi untuk negara maju dan berkembang.

Ekonomi negara maju diproyeksi pulih dari -4,5% pada 2020 mencapai angka 5,2% pada 2021. Pertumbuhannya kemudian melambat menjadi 4,5% pada tahun depan. Sementara, ekonomi negara berkembang tumbuh 6,4% pada 2021, lebih baik dari tahun lalu yang berkontraksi 2,1%. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang lalu diproyeksikan melambat menjadi 5,1% pada 2022. Kondisi tersebut terjadi lantaran masih ada ketidakpastian seberapa cepat pandemi virus corona Covid-19 dapat diatasi.

GLOBAL ECONOMY

The economic growth in several parts of the world continued. The global economy progressed despite the slowing trend experienced by various countries experience at the end of 2021, the impact from the spread of the Delta variant, and the emergence of the new Omicron as a variant of concern (VoC) also added to the challenges to pandemic control. The world economy grew by 5.9% in 2021, up from the previous year which contracted by 3.1%. However, the IMF projected the world economic growth to be 4.9% in 2022. Similar projection was true for both developed and developing countries.

The economy of developed countries was projected to recover from -4.5% in 2020 to 5.2% in 2021. Its growth would slow down to 4.5% next year. Meanwhile, the developing countries' economy grew by 6.4% in 2021, better than the last year's contraction by 2.1%. The economic growth of developing countries were then projected to slow down to 5.1% in 2022. This condition occurred because there were lingering uncertainties about how fast the Covid-19 coronavirus pandemic could be overcome.

“

Per 31 Desember 2021, jumlah kas Perseroan sebesar Rp75,59 miliar, meningkat 112,63% dari tahun 2020 sebesar Rp35,55 miliar.

As of December 31, 2021, the Company's total cash amounted to Rp75.59 billion, an increase of 112.63% from 2020 at Rp35.55 billion

”

	2019	2020	2021
Global / Global	2,4%	-3,1%	5,9%
Negara Maju / Developed Countries	1,6%	-4,5%	5,2%
Negara Berkembang / Developing Countries	3,5%	-2,1%	6,4%

Sumber: IMF (International Monetary Fund) / Source: IMF (International Monetary Fund)

Perbedaan kecepatan pertumbuhan ekonomi itu utamanya didorong oleh dua aspek utama. Yang pertama, yakni kemampuan suatu negara dalam mengeluarkan stimulus terhadap perekonomian. Sedangkan aspek penting lainnya ialah, kemampuan suatu negara dalam mendapatkan vaksin Covid-19. Dengan semakin tingginya tingkat vaksinasi Covid-19, suatu negara akan lebih cepat melakukan pembukaan berbagai aktivitas perekonomian.

Pesatnya penyebaran Covid-19 varian Omicron menunjukkan bahwa pandemi kemungkinan akan terus mengganggu aktivitas ekonomi dalam waktu dekat ini. Selain itu, perlambatan yang signifikan terjadi di negara-negara ekonomi utama, termasuk Amerika Serikat dan China, akan membebani permintaan eksternal di negara-negara berkembang. Pada saat pemerintah di banyak negara

The difference in the speed of economic growth was mainly driven by two main aspects. The first was the ability of a country to issue a stimulus to the economy. Meanwhile, another important aspect was the ability of a country to obtain a Covid-19 vaccine. With the higher rate of Covid-19 vaccination, a country would be faster in opening its economic activities.

The rapid spread of the Omicron variant of Covid-19 indicated that the pandemic was likely to continue to disrupt economic activities in the near future. In addition, a significant slowdown in major economies, including the United States and China, would weigh on the external demands in developing countries. At a time when the governments in many developing countries lacked the policy spaces to

berkembang kekurangan ruang kebijakan untuk mendukung perekonomian jika diperlukan, gelombang pandemi Covid-19 baru, terhentinya rantai pasokan, dan tekanan inflasi serta kerentanan sistem keuangan di sebagian besar dunia dapat meningkatkan risiko terhambatnya perkembangan ekonomi.

support the economy in time of needs, the new wave of the Covid-19 pandemic, supply chain disruptions, and inflationary pressures and financial system vulnerabilities in much of the world could increase the risk of hampering the economic development.

Tinjauan Ekonomi Nasional

National Economic Review

PRODUK DOMESTIK BRUTO

Indonesia juga mulai mengalami pertumbuhan ekonomi seiring dengan adanya pemulihan secara bertahap di seluruh dunia. Secara keseluruhan tahun, ekonomi Indonesia naik sebesar 3,69% serta berhasil mencatatkan pertumbuhan di atas 5% pada kuartal IV tahun 2021. Ini membuat Produk Domestik Bruto (PDB) Tanah Air sepanjang 2021 tumbuh positif pada 2021, setelah tahun sebelumnya berkontraksi secara signifikan.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2021 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia. Perekonomian global secara perlahan-lahan mulai bangkit tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV/2021 yang sebesar 5,02% secara tahun ke tahun dan mencatat pertumbuhan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi China yang sebesar 4% atau Korea Selatan sebesar 4,1%. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021 terakhir jika diukur berdasarkan atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun, sementara berdasarkan harga konstan mencapai Rp2.845,9 triliun. PDB per kapita Indonesia sendiri pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp62,2 juta atau naik sebesar 9,3% dari tahun sebelumnya.

GROSS DOMESTIC PRODUCT

Indonesia also started to experience an economic growth along with the gradual recovery around the world. Overall, Indonesia's economy grew by 3.69% and managed to record a growth of above 5% in the fourth quarter of 2021. This made the Gross Domestic Product (GDP) of the country in 2021 grew positively in 2021, after the significant contraction in the previous year.

The economic growth in the fourth quarter of 2021 was recorded to be higher than the economic growth of several of Indonesia's main trading partners. The global economy was slowly starting to increase, as reflected in Indonesia's economic growth in the fourth quarter of 2021 which was 5.02% year-on-year and the recorded growth that was higher than China's 4% economic growth or South Korea's 4.1%. Indonesia's gross domestic product (GDP) in the last 2021 as measured based on current prices reached Rp16,970.8 trillion, while based on the constant prices it reached Rp2,845.9 trillion. Indonesia's own GDP per capita in 2021 was recorded at Rp62.2 million, an increase of 9.3% from the previous year.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2017-2021
 2017-2021 National Economic Growth

Tahun / Year	Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%) / National Economic Growth (%)
2021	3,69
2020	-2,07
2019	5,02
2018	5,17
2017	5,07

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) / Source: Statistics Indonesia

Meskipun ada pertumbuhan pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya, adanya ancaman ketidakpastian ekonomi akibat belum pulihnya Covid-19 secara total dapat membuat proyeksi pertumbuhan di tahun selanjutnya akan menjadi sebuah tantangan. Sepanjang tahun 2021, pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha yang tertinggi berasal dari Sektor Perdagangan & Reparasi sebesar 4,65%. Sementara sektor Pertanian, Konstruksi, serta Pengolahan hanya mampu mencatatkan pertumbuhan di bawah 4% pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, angka pertumbuhan ini sudah sangat baik mengingat pada tahun 2020 hampir semua sektor lapangan usaha berkontraksi pertumbuhannya akibat puncak pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi tidak stabil. Dengan demikian, pemerintah perlu tetap waspada dan dengan cermat memastikan terciptanya iklim usaha yang lebih baik di tengah ketidakpastian pada tahun mendatang dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan.

Despite the growth in 2021 compared to the previous year, the threat of economic uncertainty due to the Covid-19 pandemic that hasn't been completely eradicated could make the projection of growth in the following year challenging. Throughout 2021, the highest GDP growth by business sectors came from the Trade & Repair Sector at 4.65%. Meanwhile, the Agriculture, Construction, and Processing sectors were only able to record growth below 4% in 2021. Compared to 2020, this growth rate was already very good considering that in 2020, almost all business sectors contracted their growth due to the peak of Covid-19 pandemic which destabilized the economy. Thus, the government needed to remain vigilant and carefully ensured the creation of a better business climate amidst uncertainty in the coming year by issuing the necessary policies.

Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2020 & 2021

GDP Growth by Business Sectors in 2020 & 2021

Lapangan Usaha / Business Sector	Pertumbuhan PDB (%) / GDP Growth (%)	
	2021	2020
Pertanian / Agriculture	1,84	1,75
Pertambangan & Penggalan / Mining & Excavation	4	-1,95
Pengolahan / Processing	3,39	-2,93
Konstruksi / Construction	2,81	-3,26
Perdagangan & Reparasi / Trading & Reparation	4,65	-3,72
Lainnya / Others	4,36	-1,97

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) / Source: Statistics Indonesia

Dari sisi pengeluaran, hampir semua sektor sudah menunjukkan hasil positif tanpa adanya kontraksi pertumbuhan. Pemerintah menggenjot pengeluaran terutama sebagai bentuk dukungan untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi terhadap masyarakat serta sebagai salah satu stimulus ekonomi untuk memulihkan kembali keadaan. Pemerintah juga semakin gencar membangun hubungan-hubungan perdagangan dengan secara global terbukti dengan Indonesia yang masuk dalam salah satu negara G20 serta memperkuat mitra dagang dengan negara dengan ekonomi yang kuat seperti Cina, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Sepanjang 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dijadikan sebagai bantuan kepada masyarakat dan juga para pelaku usaha. Sektor ekspor barang dan jasa menjadi sektor dengan pertumbuhan paling tinggi yakni sebesar 24,04% dibanding

From the expenditure side, almost all sectors have shown positive results without any contraction in growth. The government boosted spending mainly as a form of support to reduce the economic impact of the pandemic on the community as well as the economic stimulus to restore the situation. The government also increased its global trade relation building, as evidenced by Indonesia, which was one of the G20 countries and strengthening trade partners with countries with strong economies such as China, the United States, and European countries. Throughout 2021, the government issued policies that were used as assistances to the community and business players. The export of goods and services sector became the sector with the highest growth at 24.04% compared to the previous year which contracted by 7.70%, this was in line with the improvement

dengan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 7,70%, hal tersebut sejalan dengan membaiknya defisit neraca perdagangan di tahun 2021 berdasarkan besaran kontribusi defisit tersebut terhadap nominal PDB. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling sedikit adalah Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) dengan pencatatan pertumbuhan sebesar 1,59%, namun angka ini dianggap lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar 4,29%.

in the trade balance deficit in 2021 based on the contribution of the deficit to nominal GDP. Meanwhile, the sector that experienced the least growth was Household serving Non-profit Institution Consumption (LNPR) with a recorded growth of 1.59%, but this figure was considered better than the previous year which contracted by 4.29%.

Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran 2020 & 2021
 GDP Growth by Expenditure in 2020 & 2021

Jenis Pengeluaran / Expenditure Type	Pertumbuhan (%) / Growth (%)	
	2021	2020
Konsumsi Rumah Tangga / Household Consumption	2,02	-2,63
Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) / Household serving Non-profit Institution Consumption	1,59	-4,29
Konsumsi Pemerintah / Government Consumption	4,17	1,94
Pembentukan Modal Tetap Bruto / Gross Fixed Capital Formation	3,80	-4,95
Ekspor / Export	24,04	-7,70
Impor / Import	23,31	-14,71

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) / Source: Statistics Indonesia

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Indonesia sebagian besar masih ditopang oleh wilayah-wilayah di Pulau Jawa dengan kontribusi dari wilayah tersebut sebesar 57,89% pada tahun 2021, pertumbuhan ini meningkat 3,66% dibanding tahun sebelumnya. Kelompok wilayah-wilayah lainnya juga mengalami pertumbuhan juga dibanding dengan tahun sebelumnya yang mayoritas mengalami kontraksi pertumbuhan. Dengan Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan pertumbuhan paling sedikit yakni sebesar 0,07%.

Overall, Indonesia's economic structure was still largely supported by the regions in Java Island with a contribution from the region of 57.89% in 2021, this growth increased by 3.66% compared to the previous year. Groups of other regions also experienced growth compared to the previous year, the majority of which experienced growth contraction. Meanwhile, Bali and Nusa Tenggara recorded the least growth of 0.07%.

Pertumbuhan PDB Menurut Wilayah 2020 & 2021
 GDP Growth by Region in 2020 & 2021

Wilayah / Region	Kontribusi (%) / Contribution (%)		Pertumbuhan (%) / Growth (%)	
	2021	2020	2021	2020
Jawa / Java	57,89	59	3,66	5,52
Sumatera	21,70	21,32	3,18	4,57
Kalimantan	8,25	8,05	3,18	4,99
Sulawesi	6,89	6,33	5,67	6,65
Bali & Nusa Tenggara	2,78	3,06	0,07	5,07
Maluku & Papua	2,49	2,24	10,09	-7,40

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) / Source: Statistics Indonesia

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun sepanjang 2021. Angka itu tumbuh 21,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang berada pada angka sebesar Rp1.647,8 triliun. Pencapaian tersebut melampaui target Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) 2021 dengan realisasi mencapai 114,9% dari target yang diharapkan. Tercatat, target pendapatan negara dalam APBN tahun ini sebesar Rp1.743,6 triliun.

Secara rinci, realisasi penerimaan negara dari pajak tercatat sebesar Rp1.277,5 triliun pada 2021. Jumlah itu meningkat 19,2% dibandingkan 2020 yang sebesar Rp1.072,1 triliun. Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp452 triliun pada 2021. Jumlahnya meningkat 31,5% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp343,8 triliun. Sementara, realisasi penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp269 triliun sepanjang tahun lalu. Jumlahnya meningkat 26,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp213 triliun.

The Ministry of Finance recorded the realization of state revenues that reached Rp2,003 trillion throughout 2021. This figure grew by 21.6% from the same period the previous year which was at Rp1,647.8 trillion. This achievement exceeded the targets of the 2021 Budget (APBN) with the realization reaching 114.9% of the expected target. It was recorded that the target of state revenue in this year's APBN was Rp1,743.6 trillion.

In details, the realization of state revenues from taxes was recorded at Rp1,277.5 trillion in 2021. This number increased by 19.2% compared to 2020 which was Rp1,072.1 trillion. Realization of non-tax state revenue (PNBP) was recorded at Rp452 trillion in 2021. The amount increased by 31.5% compared to the previous year which was Rp343.8 trillion. Meanwhile, the realization of state revenues from customs and excise was recorded at Rp269 trillion last year. The number increased by 26.3% compared to the same period in the previous year which amounted to Rp213 trillion.

Pendapatan Negara Tahun 2021
2021 State Revenues

Jenis Pendapatan / Revenues Type	Jumlah Pendapatan (Triliun) / Total Revenues (Trillion)		Pertumbuhan (%) / Growth (%)
	2021	2020	
Pajak / Tax	1.277,5	1.072,1	19,2
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) / Non-Tax State Revenue	452	343,8	31,5
Kepabeanan dan Cukai / Customs and Excise	269	213	26,3

Sumber: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) / Source: Ministry of Finance

Realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.786,8 triliun sepanjang 2021. Nilai itu tumbuh 7,4% dari 2020 sebesar Rp2.595,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami defisit anggaran sebesar Rp783,7 triliun. Defisit tersebut setara dengan 4,65% terhadap produk domestik bruto (PDB).

INFLASI

Inflasi tahun kalender selama tahun 2021 adalah sebesar 1,30% turun sebesar 0,38% dari tahun 2020. Angka inflasi tersebut merupakan yang terendah sejak BPS merilis data inflasi pada 1960. Laju inflasi ini jauh di bawah kisaran target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada kisaran $3 \pm 1\%$.

Realization of state expenditure was recorded at Rp2,786.8 trillion throughout 2021. This value grew 7.4% from 2020 of Rp2,595.5 trillion. This number showed that Indonesia was still experiencing a budget deficit of Rp783.7 trillion. The deficit was equivalent to 4.65% of gross domestic product (GDP).

INFLATION

Inflation for the calendar year during 2021 was 1.68%, down by 0.38% from 2020. This inflation rate was the lowest since BPS released inflation data in 1960. This inflation rate was far below the target range set by Bank Indonesia of around $3 \pm 1\%$.



Tabel Perbandingan Inflasi 2017-2021
 Table of Inflation Comparison in 2017-2021

Tahun / Year	Target Inflasi (%) / Inflation Target	Aktual Inflasi (%) / Actual Inflation (%)
2021	3 ± 1	1,30
2020	3 ± 1	1,68
2019	3,5 ± 1	2,72
2018	3,5 ± 1	3,13
2017	4 ± 1	3,61

Sumber: Bank Indonesia (BI) / Source : Bank Indonesia (BI)

Pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,37% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,05. Dari 90 kota IHK, 84 kota mengalami inflasi dan 6 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sintang sebesar 2,01% dengan IHK sebesar 113,80 dan yang terendah terjadi di Bima dan Pontianak masing-masing dengan angka sebesar 0,02% dengan IHK masing-masing sebesar 105,89 dan 107,06. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kotamobagu sebesar 0,53% dengan IHK sebesar 107,95 dan yang terendah terjadi di Tual sebesar 0,16% dengan IHK sebesar 108,77. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

In November 2021, the inflation was 0.37% with a Consumer Price Index (CPI) of 107.05. Of the 90 CPI cities, 84 cities experienced inflation and 6 cities experienced deflation. The highest inflation occurred in Sintang at 2.01% with a CPI of 113.80 and the lowest occurred in Bima and Pontianak at 0.02% each with a CPI of 105.89 and 107.06, respectively. Meanwhile, the highest deflation occurred in Kotamobagu at 0.53% with a CPI of 107.95 and the lowest occurred in Tual at 0.16% with a CPI of 108.77. Inflation occurred due to an increase in prices as indicated by the increase in most indexes of the expenditure group.

NILAI TUKAR MATA UANG

Pada akhir tahun 2021, mata uang Rupiah ditutup pada level Rp14.265 per dollar AS (Amerika Serikat). Pada awal tahun, pergerakan Rupiah cenderung melemah terhadap dollar AS namun ada juga yang menguat terhadap beberapa mata uang lainnya contohnya terhadap Dollar Singapura dan Euro dikarenakan Indonesia dianggap memiliki iklim investasi yang baik. Akan tetapi, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh kepada nilai tukar terhadap dollar AS di mana sepanjang tahun 2021 Rupiah cenderung melemah dari angka Rp14.084 pada Januari 2021.

CURRENCY EXCHANGE RATE

At the end of 2021, tRupiah currency was closed at the level of Rp14,265 per US Dollar (United States). At the beginning of the year, Rupiah's movement leaned to weakened against the US dollar, however, it also strengthened against several other currencies, for example against the Singapore Dollar and the Euro as Indonesia was considered to have a good investment climate. However, this strengthening did not have much effect on the exchange rate against the US dollar, where throughout 2021 Rupiah tend to weaken from the figure of Rp14,084 in January 2021.

Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2021 mencatat surplus sebesar 35,34 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 21,62 miliar dolar AS. Bank Indonesia menyatakan bahwa surplus neraca perdagangan tersebut berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Untuk waktu yang akan datang, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mendukung pemulihan ekonomi.

On the other hand, Indonesia's overall trade balance in 2021 recorded a surplus of USD35.34 billions, much higher than the achievement in 2020 of USD21.62 billions. Bank Indonesia stated that the trade balance surplus contributed positively in maintaining the external resilience of the Indonesian economy. In the future, Bank Indonesia will continue to strengthen policy synergies with the Government and relevant authorities to support economic recovery.

Tinjauan Perekonomian Banten

Banten Economic Overview

Pertumbuhan ekonomi Banten pada tahun 2021 tercatat tumbuh mencapai 4,44%, dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 3,38%. Hal ini didukung oleh besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku pada triwulan IV-2021 yang mencapai Rp665,92 triliun, dan atas dasar harga konstan yakni mencapai Rp460,74 triliun. Sedangkan pada PDRB per kapita, Provinsi Banten mencatatkan angka sebesar Rp55,21 juta pada tahun 2021. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi konstruksi mengalami pertumbuhan paling besar yakni 10,81% dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran mencatatkan pertumbuhan paling sedikit dengan angka 1,84%.

Banten's economic growth in 2021 increased by 4.44%, compared to the previous year, which experienced a contraction of 3.38%. This increase was supported by the amount of Gross Regional Domestic Product (GRDP) at current prices in quarterly IV-2021 which reached Rp665.92 trillion, and at a constant price which reach Rp460.74 trillion. Meanwhile, in per capita GRDP, Banten Province recorded a figure of Rp55.21 million in 2021. In terms of business fields, the construction economy experienced the largest growth of 10.81% with the Wholesale and Retail sectors recorded the least growth at 1.84%.

Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021

GRDP Growth based on Business Sectors in 2021

Jenis Lapangan Usaha / Business Sector Type	Pertumbuhan (%) / Growth (%)
Industri Pengolahan / Processing Industry	4,93
Perdagangan Besar dan Eceran / Wholesale and Retail Trades	1,84
Konstruksi / Construction	10,81
Real Estate	3,00
Lainnya / Others	3,70

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) / Source: Statistics Indonesia

Pada sisi pengeluaran, Provinsi Banten masih mencatatkan kontraksi di satu sektor yakni pada Konsumsi LNPRT sebesar 1,73%. Namun di sisi lain, pertumbuhan pada sektor pengeluaran Total Net Ekspor berada di level 33,28%. Pemerintah Provinsi Banten tentunya mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk kembali membangkitkan ekonomi daerah baik untuk masyarakat maupun para pelaku usaha.

In terms of expenditure, Banten Province still recorded a contraction in one sector, namely LNPRT Consumption of 1.73%. On the other hand, the growth in the total net export expenditure sector was at the level of 33.28%. Banten Provincial Government issued a policy to revive the regional economy for both the community and business actors.

Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2021

GRDP Growth based on Expenditures in 2021

Jenis Pengeluaran / Expenditure Type	Pertumbuhan (%) / Growth (%)
Konsumsi Rumah Tangga / Household Consumption	2,40
Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) / Household Serving Non-profit Institution Consumption	-1,73
Konsumsi Pemerintah / Government Consumption	0,99
Pembentukan Modal Tetap Bruto / Gross Fixed Capital Formation	3,87
Total Net Ekspor / Total Net Exports	33,28

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) / Source: Statistics Indonesia



Pada tahun 2021, Provinsi Banten memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 6,78%. Di saat Pulau Jawa masih didominasi pertumbuhan ekonominya oleh DKI Jakarta sebesar 29,70% dari total keseluruhan. Hal ini dianggap cukup baik mengingat ekonomi Provinsi Banten sempat mengalami resesi akibat terjadinya pandemi Covid-19. PDRB Banten mengalami kontraksi dalam 4 kuartal secara beruntun dari kuartal II-2020 hingga kuartal I-2021. Namun, kembali mencatatkan pertumbuhan sepanjang tahun 2021.

In 2021, Banten Province gave a contribution to Java Island's economy amounting to 6.78%. At that time, Java Island's economy growth was still dominated by DKI Jakarta by 29.70% from the total amount. This contribution was considered as good as Banten Province's economy experienced a brief recession due to the Covid-19 pandemic. Banten's GRDP contracted in 4 quarters in a row from quarterly II-2020 up to quarterly I-2021. However, Banten recorded another growth throughout 2021.

Tinjauan Industri Perbankan

Banking Industry Review

KINERJA PERBANKAN

Kinerja sebagian besar perbankan semakin mengalami perbaikan tahun 2021. Pertumbuhan perolehan laba bersih mayoritas bank hingga November meningkat dari pencapaian hingga kuartal III 2021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat stabilitas sektor jasa keuangan hingga akhir 2021 tetap terjaga, diiringi fungsi intermediasi perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal yang terus membaik serta didorong terkendalinya pandemi Covid-19, pulihnya mobilitas, dan meningkatnya kegiatan perekonomian. Di industri perbankan, mayoritas sektor utama kredit mencatatkan kenaikan terutama pada sektor pengolahan dan rumah tangga masing-masing sebesar Rp24,9 triliun dan Rp9,1 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,48% (yoy) atau 9,98% (ytd). Selain itu, likuiditas industri perbankan pada November 2021 masih berada pada level yang memadai. Hal tersebut terlihat dari rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 154,90% dan 34,24%, di atas ambang batas ketentuan masing-masing pada level 50% dan 10%. Dari sisi permodalan, lembaga jasa keuangan juga mencatatkan peningkatan CAR menjadi sebesar 25,62%.

Kebijakan-kebijakan moneter semakin ditekankan sebagai upaya membantu pemulihan ekonomi nasional. BI dan OJK bekerja sama untuk menguatkan sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya guna mendukung berbagai kebijakan lanjutan yang dapat memulihkan perekonomian nasional.

BANKING PERFORMANCE

The performance of most banks continued to improve in 2021. The growth in net profit of the majority of banks until November increased from the achievement until quarterly III of 2021. The Financial Services Authority (OJK) noted that the stability of the financial services sector until the end of 2021 was maintained, accompanied by the banking intermediation function and fundraising in the capital market which continued to improve and was driven by the control of the Covid-19 pandemic, restoration of mobility, and increased economic activity. In the banking industry, the majority of the main credit sectors recorded an increase, especially in the manufacturing and household sectors by Rp24.9 trillions and Rp9.1 trillions respectively. Meanwhile, Third Party Funds (TPF) recorded a growth of 10.48% (yoy) or 9.98% (ytd). In addition, the liquidity of the banking industry in November 2021 was still at an adequate level. This could be seen from the ratios of Liquid Instruments/Non-Core Deposits (AL/NCD) and Liquid Assets/DPK (AL/DPK) of 154.90% and 34.24%, respectively, above the regulatory thresholds in the respective regulation levels of 50% and 10%. In terms of capital, the financial services institution also recorded an increasingly improved capital. The banking industry recorded an increase in CAR to 25.62%.

More emphasis was placed on monetary policies as an effort to help the national economy recover. BI and OJK worked together to strengthen policy synergies with the Government and other relevant authorities to support various follow-up policies that could restore the national economy.

PROSPEK PERBANKAN

Tahun 2022 diharapkan menjadi periode pemulihan ekonomi secara nasional. Sejalan dengan hal itu, laju penyaluran kredit perbankan diharapkan dapat meningkat lebih pesat. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan mencapai 4,7% hingga 5,5%. Hal ini didorong oleh perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor serta meningkatnya permintaan domestik dari sisi konsumsi dan investasi. Selain itu, berlanjutnya cakupan vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, serta longgarnya kegiatan sosial diharapkan mampu menggeliatkan kembali roda perekonomian. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan.

OJK menyatakan bahwa sektor ekonomi dan keuangan terus dalam proses pemulihan setelah diterpa pandemi Covid-19 dalam kurun dua tahun terakhir. Dari sektor perbankan, indeks stabilitas keuangan cukup terkendali, diiringi dengan profil risiko perbankan tetap terjaga. Hal ini didukung dengan kredit yang sudah mulai bertumbuh 5,2% (yoy) dengan NPL (*Non Performing Loan*) yang terkendali pada level 3% dan cenderung turun dari tahun lalu, di mana tahun lalu mencapai 3,06%.

BANKING PROSPECTS

2022 is expected to be a period of national economic recovery. In line with this, the rate of bank loans are expected to increase rapidly. Bank Indonesia (BI) estimates that Indonesia's economic growth in 2022 will reach 4.7% to 5.5%. This is driven by the improvement in the global economy, which has an impact on export performance as well as increasing domestic demand in terms of consumption and investment. In addition, the continuation of vaccination coverage, the opening of the economic sector, and the relaxation of social activities are expected to be able to revive the wheels of the economy. Strengthening synergy and innovation is aimed at creating mass immunity from the Covid-19 pandemic and reopening priority economic sectors, encouraging economic recovery in the short term through policies to increase demand.

OJK states that the economic and financial sectors are still in the process of recovering after being affected by the Covid-19 pandemic in the last two years. From the banking sector, the financial stability index is moderately controlled, accompanied by a well-maintained banking risk profile. This is supported by loans which start to grow by 5.2% (yoy) with a controlled NPL (*Non Performing Loan*) at 3% and tend to decrease from last year, which reached 3.06%.



Tinjauan Operasional Per Segmen Bisnis

Operational Review Per Business Segment

STRUKTUR BISNIS

BUSINESS STRUCTURE

KREDIT UMKM

MSME Loans



DANA

Funding



KREDIT KOMERSIAL

Commercial Loans



KREDIT KONSUMER

Consumer Loans



TREASURY





KREDIT UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

MSME Loans



Secara umum, kinerja segmen bisnis kredit UMKM Perseroan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terjadi karena Perseroan melakukan ekspansi pada kredit modal ventura dan koperasi

In general, the performance of Company MSME loans business segment in 2021 experienced a significant increase. This was due to the Company's expansion in venture capital loan and cooperation

Salah satu peran UMKM yakni dapat menyediakan jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. UMKM juga berperan dalam membentuk dan menyumbang produk domestik bruto. Selain itu, peranannya juga mampu memperluas penyerapan dan kesempatan kerja serta menciptakan lowongan pekerjaan. Sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mengembangkan UMKM, terutama yang berada di daerah Banten dan sekitarnya, Perseroan menyediakan kredit bagi UMKM.

Pada tahun 2021, jumlah kredit yang disalurkan Perseroan untuk UMKM tercatat sebesar Rp134.062.128.781, meningkat dari Rp44.135.599.186 pada tahun sebelumnya. Adanya perubahan tersebut diakibatkan karena tumbuhnya potensi UMKM di wilayah Banten. Dilihat secara kumulatif dalam dua tahun terakhir, bisnis kredit UMKM Perseroan tumbuh sebesar 203,75%.

One of the roles of MSME is to be able to provide a safety net to carry out economic activities, especially for people with lower middle income. MSME also plays a role in shaping and contributing to gross domestic product. In addition, its role is also able to expand absorption and employment opportunities as well as create job vacancies. As an effort to support the government in developing MSME, especially those in the Banten and surrounding areas, the Company provides loans for MSME.

In 2021, the number of loans disbursed by the Company to MSMEs was recorded at Rp134,062,128,781, increased from Rp44,135,599,186. in the previous year. This change was due to the increased MSME potential in Banten. From the cumulative amount in the last two years, the Company's MSME loans business grew by 203.75%.

Portfolio Kredit UMKM Banten
 Banten MSME Loans Portfolio

(Dalam juta rupiah / In million rupiah)

Keterangan / Description	Tahun / Year	
	2020	2021
UMKM Banten / Banten MSME	134.062.128.781	44.135.599.186

Sesuai dengan komitmen Bank Banten dalam mendukung Pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian masyarakat, Bank Banten menyalurkannya melalui program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten, atau penyaluran kredit UMKM Ritel Bank Banten yang disalurkan khusus di wilayah Banten. Hal ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan UMKM di wilayah Banten dengan tujuan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Sesuai dengan arahan dari Pemerintah secara nasional, pada tahun 2021, Perseroan mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi di tengah pemulihan ekonomi. Kebijakan tersebut diantaranya adalah relaksasi debitur UMKM Banten terdampak pandemi. Kebijakan tersebut dinilai berhasil meningkatkan performa Perseroan.

In accordance with Bank Banten's commitment to support the Government in order to restore the community's economy, Bank Banten channels it through a development program for economic growth and prosperity for the people of Banten, or the distribution of Retail MSME loans to Bank Banten, which are channeled specifically in the Banten area. The program is expected to accelerate the acceleration of MSME growth in the Banten region with the aim of improving the quality of growth and economic equity. In accordance with national directions from the Government, in 2021, the Company issued various policies that could stimulate the economic growth in the midst of economic recovery. These policies included relaxation of debtors of Banten impacted by the pandemic. The policies were considered successful in improving the Company's performance.

Produk dan Target Pasar

Adapun produk dari segmen bisnis adalah sebagai berikut:

Kredit Usaha Bangun Banten

Kredit Usaha Bangun Banten terdiri dari tiga jenis yaitu Kredit Bangun Tuntas, Kredit Bangun Mandiri, dan Kredit Bangun Sejahtera. Penyaluran kredit ini ditujukan khusus bagi pelaku UMKM di wilayah Banten. Plafon kredit mulai dari Rp5 juta hingga Rp500 juta, sedangkan jangka waktu kredit maksimal tiga tahun untuk kredit modal kerja serta lima tahun untuk kredit yang ditujukan sebagai investasi penunjang usaha.

Kredit Linkage

Penyaluran kredit kepada badan perkreditan rakyat (BPR) & lembaga keuangan mikro (LKM) melalui produk pembiayaan *executing* atau *linkage* guna membantu kebutuhan modal kerja BPR ataupun LKM.

Kinerja Bisnis

Secara umum, kinerja segmen bisnis kredit UMKM Perseroan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terjadi karena Perseroan melakukan ekspansi pada kredit modal ventura dan koperasi. Oleh karena itu, pendapatan bunga kredit dari segmen bisnis kredit UMKM cenderung meningkat.

Products and Market Target

The following are MSME loans business segment products:

Banten Development Business Loans

There are three types of loans, the Bangun Tuntas Loans, Bangun Mandiri Loans, and Bangun Sejahtera Loans. The distribution is specifically aimed at MSMEs in the Banten region. The credit limit starts from Rp5 million to Rp500 million, while the maximum credit period is three years for working capital loans and five years for business support investments loans.

Linkage Loans

Lending to rural banks (BPRs) & microfinance institutions (LKM) through executing or linkage financing products to help support the working capital needs of BPRs or MFIs.

Business Performance

In general, the performance of Company MSME loans business segment in 2021 experienced a significant increase. This was due to the Company's expansion in venture capital loan and cooperation. Therefore, loan interest income from the MSME loans business segment tended to increase.



Pendapatan Bunga / Interest Income	2020	2021	CAGR (%)
UMKM Banten / Banten MSME	2.141.321.708	6.739.051.595	214,71%

Strategi dan Prospek Bisnis Tahun 2022

Untuk tahun 2022, Bank Banten berfokus pada pertumbuhan kredit UMKM Banten. Oleh karena itu, Perseroan merencanakan beberapa strategi bisnis/menyasar aspek bisnis diantaranya:

1. Sektor UMKM di wilayah Banten
2. Pembiayaan melalui Lembaga keuangan seperti Bank, Koperasi dan Modal Ventura

2022 Business Strategies and Prospects

For 2022, Bank Banten will focus on the growth of Banten MSME loans. Therefore, the Company plans several business strategies/targets business aspects including:

1. The MSME sector in the Banten region
2. Financing through financial institutions such as banks, cooperatives, and venture capital

DANA Funding



**Hingga akhir 2021,
jumlah DPK (Dana Pihak Ketiga) Perseroan mencapai 4.655,23 miliar.**

As of the end of 2021, the Company's TPF (Third Party Funds) reached 4,655.23 billion

Dalam menjalankan perannya, Perseroan menghimpun dana masyarakat, baik perorangan, kelompok, maupun korporasi untuk kemudian dikelola dan disalurkan kepada debitur. Selain itu, Perseroan juga melayani jasa lalu lintas pembayaran uang guna memperoleh pendapatan berupa komisi, bunga, dan bagi hasil. Jasa lalu lintas yang dimaksud adalah pengiriman uang/transfer, inkaso, dan layanan perbankan lainnya.

In carrying out its roles, Company collects public funds, either individuals, groups and corporations to be managed and disbursed to the borrowers. In addition, the Company also provides cash payment traffic services for income acquisition on fees, interests, and profit sharings. The traffic services include money transfer, collection, and other banking services.

Produk dan Target Pasar

Pada tahun 2021, dunia sedang gencar untuk melakukan pemulihan ekonomi dari wabah Covid-19. Sehingga Perseroan melakukan strategi-strategi yang sekiranya dapat meningkatkan performa perusahaan untuk berjalan dalam momentum baru. Dalam aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga, bisnis segmen Dana Perseroan menawarkan sejumlah produk tabungan, giro dan deposito.

Tabungan

Berikut ragam produk tabungan:

1. Tabungan Mikro adalah produk tabungan untuk nasabah UMKM yang memiliki fasilitas kredit di Perseroan
2. Tabungan Harapan dan Tabungan Banten adalah produk yang dikembangkan untuk nasabah perorangan yang dilengkapi dengan kartu ATM sehingga penarikan atau pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Untuk meningkatkan aksesibilitas kartu ATM ini, Perseroan bekerja sama dengan jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.
3. Tabungan Harapan Non Perorangan adalah produk yang dikembangkan untuk nasabah perorangan, perusahaan, koperasi, yayasan dan badan usaha lainnya
4. Tabungan Harapan Pensiun merupakan tabungan untuk rekening pembayaran manfaat pensiun dari PT Taspen (Persero).
5. Tabungan SimPel: tabungan yang dibuat khusus bagi para pelajar PAUD, SD, SMP, dan SMA yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. Pembuatan simpanan pelajar ini ditujukan sebagai bentuk partisipasi dalam membentuk generasi muda yang gemar menabung, disamping memperluas penetrasi perbankan di kalangan pelajar, serta wadah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Giro

Merupakan produk dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya. Produk giro di Perseroan terdiri dari Giro Umum, Giro Kasda, dan Giro Pemerintah Pusat. Giro Umum ditujukan bagi nasabah perorangan maupun non perorangan, sedangkan Giro Kasda didedikasikan untuk pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten yang bekerja sama dalam rangka pengelolaan kas daerah. Giro Pemerintah Pusat merupakan giro yang digunakan untuk pembayaran payroll ASN pemerintah pusat.

Products and Market Target

In 2021, the world aggressively made an economic recovery from Covid-19 outbreak. As such, the Company implemented several strategies that could improve its performance to run in the new momentum. In raising third party funds, the Company's Funding business segment offered several saving products, current accounts, and time deposits.

Savings

The followings are variants of saving products:

1. Micro Savings is a savings product for MSME customers who have credit facilities at Company.
2. Tabungan Harapan and Tabungan Banten are products developed for individual customers equipped with an ATM card hence withdrawals can be made at any time. To increase the accessibility of ATM card, Company collaborates with the ATM Bersama network and ATM Prima.
3. Harapan Non-Individual Savings is a product developed for individual customers, companies, cooperatives, foundations and other business entities.
4. Harapan Pensiun Savings is a savings account for pension benefit payments from PT Taspen (Persero).
5. SimPel Savings: savings made specifically for Preschool, Elementary School, Junior High School, and High School students who are under 17 years of age and do not have yet an ID. The creation of student savings is intended as a form of participation in creating a young generation that likes to save, in addition to expanding banking penetration among students, as well as a channel for funding of School Operational Assistance (BOS).

Giro

A funding product which withdrawal can be made at any time using checks, transfer forms, and other payment orders. The Company's current accounts products consist of General Current Accounts, Kasda Current Accounts, and Central Government Current Accounts. General Current Accounts is intended for individual and non-individual customers, while Kasda Current Accounts is dedicated to provincial/city/regency regional governments that cooperate in regional cash management. Central Government Current Accounts is a current account used to pay the central government state civilian apparatus payroll.

Deposito

Merupakan produk dana yang merupakan simpanan berjangka untuk nasabah perorangan atau non perorangan dengan pilihan jangka waktu mulai dari 1 (satu) hingga 12 (dua belas) bulan, dan suku bunga yang kompetitif.

Kinerja Bisnis

Hingga akhir 2021, jumlah DPK (Dana Pihak Ketiga) Perseroan mencapai 4.655,23 miliar. Dari perolehan tersebut, kontribusi jumlah dana murah yang berasal dari tabungan dan giro tercatat sebesar 25,48% dengan porsi giro senilai 658,43 miliar dan tabungan 527,86 miliar. Sementara porsi dana mahal yang berasal dari deposito mendominasi, dengan kontribusi sebanyak 74,52% atau senilai 3.468,95 miliar. Berikut data dan komposisi bauran pendanaan di Bank Banten Per 31 Desember 2021:

Deposito

A funding product which is a timed deposit for individual or non-individual customers with a choice of tenors ranging from 1 (one) to 12 (twelve) months, and competitive interest rates.

Business Performance

As of the end of 2021, the Company's TPF (Third Party Funds) reached 4,655.23 billion. Of these acquisitions, the contribution of low-cost funds originating from savings and current accounts was recorded at 25.48% with a current account portion of 658.43 billion and savings 527.86 billion. Meanwhile, the portion of expensive funds originating from deposits dominates with a contribution of 74.52% or 3,468.95 billion. Data and composition of the funding mix at Bank Banten as of December 31, 2021 is as follows:

No	Produk / Products		Total Dana yang Dikelola / Total Managed Funds	
			2021	2020
1	Tabungan / Savings	Bank	17.068.089.251	24.190.148.826
		Non Bank	527.855.390.149	315.947.210.204
		Total	544.923.479.400	340.137.359.030
2	Giro / Current Accounts	Bank	424.152.445.753	59.859.786.778
		Non Bank	658.424.696.756	280.001.566.019
		Total	1.082.577.142.509	339.861.352.797
3	Deposito / Time Deposits	Bank	1.660.845.510.168	271.435.000.000
		Non Bank	3.468.949.590.364	1.986.257.268.646
		Total	5.129.795.100.532	2.257.692.268.646
		Grand Total	6.757.295.722.442	2.937.690.980.472

Strategi dan Prospek Bisnis Tahun 2022

Untuk tahun 2022, Bank Banten berfokus pada Peningkatan sumber dana murah. Oleh karena itu, Perseroan merencanakan beberapa strategi bisnis atau menysasar aspek bisnis diantaranya:

- Pengelolaan Giro Kasda Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Banten;
- Tabungan serta setoran penerimaan Pajak Negara dan Daerah;
- Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Bantuan Desa (Bandes); dan
- Meningkatkan Dana Pihak Ketiga untuk segmen retail.

2022 Strategies and Business Prospects

For 2022, Bank Banten focuses on increasing low-cost sources of funds. Therefore, the Company plans several business strategies or targets business aspects including:

- Management of Giro Kasda of Provincial, Regency, and Municipality Governments in Banten;
- Savings and deposits of State and Local Tax receipts;
- Management of School Operational Assistance (BOS) funds;
- Village Assistance (Bandes); and
- Increase Third Party Funds for the retail segment.



KREDIT KOMERSIAL

Commercial Loans



“ Pada tahun 2021, Perseroan mencatatkan Pendapatan Rp413.205.894.848 turun dari tahun sebelumnya Rp523.646.170.703 sebesar 21,09%.

The Company's Revenue in 2021 amounted to Rp413,205,894,848, down from the previous year at Rp523,646,170,703 by 21.09%.

”

114



Sesuai dengan arahan dari OJK bahwa BPD (Bank Pembangunan Daerah) harus menjadi bank yang kompetitif, kuat, dan kontributif bagi pembangunan di daerahnya masing-masing, Perseroan selama ini terus berupaya menguatkan fundamental perusahaan. Perseroan juga terus meningkatkan pangsa kredit produktif dengan harapan agar dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Karena pada segmen pasar ini, Bank Banten memiliki potensi yang luas dikarenakan Provinsi Banten yang banyak dijadikan investasi oleh para pelaku usaha dalam menjalankan operasional bisnisnya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perseroan terus meningkatkan kredit produktif dengan kepada korporasi-korporasi yang memiliki potensi kerja sama

In accordance with the OJK mandate that RDB must be a competitive and strong bank that contributes to regional development, the Company continues to strengthen its fundamentals. The Bank also continues to increase its productive loans shares with the aim that it will increase economic activity, absorb employment, improve the community welfare, hence able to bring a multiplier impact on the regional and national economy.

Because in this market segment, Bank Banten has many potentials as Banten Province is widely used as an investment by business actors in carrying out their business operations. As part of these efforts, the Company continues to increase productive loans with corporations that have the potentials to cooperate with the Company. In distributing its loans, the

dengan Perseroan. Dalam menyalurkan kreditnya, Perseroan tetap menerapkan prinsip kewaspadaan sebagai bagian dari meminimalisir risiko. Penyaluran kredit pada segmen ini diutamakan pembiayaan terhadap perusahaan yang mengerjakan proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seleksi dalam pemilihan segmentasi ini dimaksudkan untuk mendorong efek yang dapat menghasilkan peningkatan terhadap kemajuan perekonomian serta perbaikan kesejahteraan masyarakat Banten.

Pembiayaan terhadap proyek-proyek yang pembayarannya bersumber dari APBD dilakukan juga agar penyaluran kredit dapat lebih fokus terhadap wilayah yang memiliki potensi untuk pembangunan daerah. Kontraktor dan mitra kerja Pemda (Pemerintah Daerah) yang ditunjuk dalam pengerjaan infrastruktur daerah selanjutnya dapat memanfaatkan fasilitas perbankan melalui Perseroan, dengan tujuan untuk membangun daerah Banten. Di samping itu, penetapan target pasar untuk segmen kredit konstruksi dimaksudkan agar risiko kredit dapat dimitigasi dengan baik melalui upaya pemantauan pekerjaan dan pembayaran.

Produk dan Target Pasar

Berikut beberapa produk dari segmen bisnis ini:

1. Fasilitas yang diberikan dalam pembiayaan proyek APBD dari pemerintah daerah se-Provinsi Banten, atau APBN yang lokasi proyeknya di wilayah Provinsi Banten.
2. Re-akuisisi / *Top Up* nasabah Komersial yang memiliki Kriteria Lancar dan Lunas.
3. Kredit Sindikasi

Kinerja Bisnis

Pada tahun 2021, Perseroan mencatatkan Pendapatan Rp413.205.894.848 turun dari tahun sebelumnya Rp523.646.170.703 sebesar 21,09%.

Strategi dan Prospek Bisnis Tahun 2022

Pertumbuhan kredit untuk segmen korporasi dan komersial pada 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 340,22% atau senilai Rp1,4 triliun.

Company continues to apply the precautionary principle as part of minimizing risk. Loans distribution in this segment is prioritized for financing companies working on projects sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The selection in this segmentation is intended to encourage effects that can produce an increase in economic progress and improve the welfare of Banten communities.

Funding for projects which payments derive from the APBD is also carried out, hence loan disbursement can focus more on areas that have the potential for regional development. Contractors and local government partners who are appointed in the work of regional infrastructure can then take advantage of banking facilities through the Company, thereby achieving the goal of developing the Banten area. In addition, the determination of market target for construction loans segment was aimed to mitigate credit risk properly through monitoring of works and payments.

Products and Market Targets

The followings are the products from this business segment:

1. The facilities provided in the APBD project financing from the regional government of Banten Province, or the APBN with the project location in the Banten Province.
2. Re-acquisition/Top Up of Commercial customers who have Current and Paid Criteria.
3. Syndication loans.

Business Performance

The Company's Revenue in 2021 amounted to Rp413,205.894,848, down from the previous year at Rp523,646,170,703 by 21.09%.

2022 Strategies and Business Prospects

The loans growth from corporate and commercial segments in 2021 was projected to increase by 340.22% or Rp1.4 trillion.



KREDIT KONSUMER

Consumer Loans



“Hingga akhir 2021, penyaluran kredit konsumen pada Perseroan adalah sebesar Rp2.517.492.766.572, naik 47,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp1.703.447.005.499

As of the end of 2021, the distribution of consumer loans to the Company was Rp2,517,492,766,572, an increase of 47.79% compared to the previous year which was Rp1,703,447,005,499

”

Kredit konsumen merupakan segmen penyaluran kredit terbesar bagi Perseroan. Pada segmen ini, Perseroan menyediakan pinjaman untuk keperluan nasabah perorangan yang berkaitan dengan belanja konsumsi seperti pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan, serta belanja barang konsumsi lain.

Setiap tahunnya, konsumsi domestik menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya kredit konsumsi, Perseroan berharap dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya. Akan tetapi, Perseroan tetap selektif dalam menyalurkan kredit dalam segmen ini agar risiko yang ada dapat diminimalisir atau dihindari.

Dalam penetapan segmen pasar, Perseroan memprioritaskan penyaluran kredit hanya kepada nasabah yang memiliki penghasilan tetap. Dengan begitu, probabilitas dalam

Consumer loans is the largest lending segment for the Company. The Company provides loans for individual customers related to consumption spending, such as mortgage or vehicle ownership financing, and other consumer goods expenditures.

Each year, domestic consumption is the biggest contributor to national economic growth. With consumer loans, the Company expects to help the public in meeting their financing needs. Nevertheless, the Company remains selective in disbursing loans to this segment to minimize or prevent the risk of default.

In the selection process, the Bank prioritizes lending only to customers who have fixed income. That way, there are greater certainty of installment payments. Following are the

melakukan pelunasan akan lebih besar kepastiannya. Berikut adalah kriteria yang Perseroan tetapkan bagi calon debitur kredit konsumen:

1. Aparatur sipil negara (ASN) yang pembayaran gaji/penghasilannya disalurkan melalui Perseroan.
2. ASN terutama kepada instansi pemerintahan vertikal yang pembayaran gaji/penghasilannya tidak disalurkan melalui Perseroan, tetapi melalui mekanisme kerja sama dengan bendahara gaji instansi tersebut dalam rangka pemotongan penghasilan untuk pembayaran angsuran tiap bulannya.
3. Pegawai swasta dari perusahaan/instansi bonafide yang bekerja sama dengan Perseroan.
4. ASN yang akan memasuki masa pensiun (pra-pensiun) dan pensiunan ASN yang pembayaran manfaat pensiunnya disalurkan melalui Perseroan

Produk dan Target Pasar

Secara pangsa pasar, Perseroan menyasar nasabah dengan kriteria berikut:

1. Pegawai aktif dengan skema pemotongan gaji melalui *payroll* maupun pemotongan gaji melalui kerja sama dengan bendahara. Pegawai aktif yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - ASN non guru
 - ASN guru
 - Pegawai swasta yang bekerja di perusahaan bonafide
 - Pensiunan
2. Bank Banten bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) sebagai mitra pembayaran manfaat pensiun sejak tahun 2017. Melalui kerja sama ini para pensiunan ASN yang pembayaran pensiunnya melalui Perseroan dapat mengajukan kredit pensiun ke Perseroan. Pembayaran angsuran kemudian dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang disalurkan melalui Perseroan. Kriteria target *market* yang diakuisisi adalah para ASN yang pembayaran pensiunnya dilakukan oleh PT. Taspen (Persero). Untuk kredit pensiun, Perseroan memiliki tiga produk yaitu Kredit Kinaya (kepada pensiunan), Kredit THT (Tunjangan Hari Tua) dan Kredit Pra Kinaya (kepada ASN aktif yang akan memasuki masa pensiun).
3. Lembaga keuangan lain (BPR & Koperasi) yang memiliki target *market* ASN aktif dan pensiunan dengan tujuan kredit untuk keperluan konsumtif atau multiguna.
4. Bank Pembangunan Daerah lainnya

criteria set by the Company for prospective consumer loans borrowers:

1. State civil servants (ASN) whose salary/income payments are disbursed through Company.
2. State Civil Apparatus, especially to vertical government agencies whose salary/ income payments are not disbursed through Company, but through a cooperation mechanism with the agency's salary treasurer in the context of deducting income for monthly installment payments.
3. Private employees from bonafide companies/agencies in collaboration with Company.
4. State Civil Apparatus who are about to enter retirement (pre-retirement) and retired State Civil Apparatus whose pension benefit payments are disbursed through the Company.

Products and Market Target

On market share, the Company targets customers with the following criteria:

1. Active employees with salary deduction schemes through payroll or salary deduction through cooperation with the treasurer. The active employees are as follows:
 - Non-teacher of State Civil Apparatus
 - Teacher of State Civil Apparatus
 - Private employees working in bona fide companies
 - Retirees
2. Bank Banten collaborated with PT Taspen (Persero) as a pension benefit payment partner since 2017. Through this collaboration, State Civil Apparatus retirees whose pension were paid through the Company can apply for pension loans to the Company. Installment payments are then made through direct pension deductions, which are disbursed through the Company. The target market criteria acquired were State Civil Apparatus whose pension payments were made by PT Taspen (Persero). For pension loan, the Company has three products, namely Kinaya Loan (for retirees), THT Loan (Old Age Benefits) and Pra Kinaya Loan (for active State Civil Apparatus who are about to enter retirement).
3. Other financial institutions (Rural Banks & Cooperatives) whose target market are active State Civil Apparatus and pensioners with the aim of loans for consumptive or multipurpose purposes.
4. Other Regional Development Banks



Kinerja Bisnis

Hingga akhir 2021, penyaluran kredit konsumen pada Perseroan adalah sebesar Rp2.517.492.766.572, naik 47,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp1.703.447.005.499. Kondisi ini disebabkan karena ekspansi kredit pegawai dan kredit pensiun. Secara keseluruhan, posisi kredit konsumen total sebesar Rp2.517.492.766.572, Sebagaimana kondisi sektor perbankan pada umumnya.

Strategi dan Prospek Bisnis Tahun 2022

Untuk tahun 2022, Perseroan memproyeksikan pertumbuhan kredit untuk segmen konsumen sebesar 134,76% atau senilai Rp3,39 triliun. Perseroan optimis target ini bisa diraih mengingat jumlah nasabah potensial yang ada di Provinsi Banten dan sekitarnya, serta potensi pemulihan ekonomi yang akan terjadi pada 2022. Perseroan pun telah memetakan sejumlah faktor pendorong pertumbuhan, sebagai berikut:

Adapun fokus strategi pemasaran bisnis kredit konsumen Tahun 2022 akan diprioritaskan pada :

1. Aparatur sipil negara (ASN) yang pembayaran gaji/penghasilannya disalurkan melalui Perseroan.
2. ASN terutama kepada instansi pemerintahan vertikal yang pembayaran gaji/penghasilannya tidak disalurkan melalui Perseroan, tetapi melalui mekanisme kerja sama dengan bendahara gaji instansi tersebut dalam rangka pemotongan penghasilan untuk pembayaran angsuran tiap bulannya.
3. Pegawai swasta dari perusahaan/instansi bonafide yang bekerja sama dengan Perseroan.
4. ASN yang akan memasuki masa pensiun (pra pensiun) dan pensiunan ASN yang pembayaran manfaat pensiunnya disalurkan melalui Perseroan.

Business Performance

As of the end of 2021, the distribution of consumer loans to the Company was Rp2,517,492,766,572, an increase of 47.79% compared to the previous year which was Rp1,703,447,005,499. This condition was caused by expansion of employee credit and pension credit. Overall, the consumer credit position totaled Rp2,517,492,766,572, as was the condition of the banking sector in general.

2022 Strategies and Business Prospects

For 2022, The Company projects loan growth for the consumer segment of 134.76% or Rp3.39 trillion. The Company is optimistic that this target is achievable considering the number of potential customers in Banten Province and its surroundings, and the potential for economic recovery to occur in 2022. The Company has also mapped a number of factors driving growth, as follows:

The focus of the marketing strategy for the consumer loans business in 2022 will prioritize:

1. State civil apparatus (ASN) whose salary/income payments are disbursed through the Company.
2. ASN, especially to vertical government agencies whose salary/income payments are not disbursed through the Company, but through a cooperation mechanism with the agency's salary treasurer in the context of deducting income for monthly installment payments.
3. Private employees from bona fide companies/agencies in collaboration with the Company.
4. ASN who are about to enter retirement (preretirement) and retired ASN whose pension benefit payments are channeled through Company.

TREASURY



“ Pada tahun 2021, Unit Treasury membukukan pendapatan bunga sebesar Rp82,3 miliar, naik 68.85% dibandingkan dengan perolehan tahun 2020 yang sebesar Rp48,7 miliar.

In 2021, the Treasury Unit posted interest income at Rp82.3 billion, an increase of 68.85 % compared to that of 2020 at Rp48.7 billion

”

Segmen bisnis *Treasury* mempunyai peran utama menjaga kecukupan likuiditas bank. Peranan ini mencakup tanggung jawab mengelola aset dan kewajiban bank, serta memberikan kontribusi optimal terhadap laba bank. Bisnis *Treasury* pada dasarnya melengkapi bisnis utama bank di bidang penghimpunan dana dan penyaluran kredit sebagai Lembaga perantara.

Selain mengelola likuiditas harian, kegiatan utama *Treasury* pada tahun 2020 adalah menempatkan kelebihan dana ke berbagai instrumen keuangan pasar uang maupun pasar modal. Ini dilakukan guna memberikan imbal hasil yang optimal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika dibutuhkan dana di luar dana pihak ketiga, maka *treasury* berperan untuk mencari pembiayaan ke pasar baik melalui pinjaman (*interbank call money*) atau pun penerbitan surat hutang.

The Treasury business segment plays a major role in maintaining adequate bank liquidity. This role includes the responsibility of managing the bank assets and liabilities and optimally contributing to the bank profits. The Treasury business basically complements the bank's main business in acquisition of funds and lending as an intermediary institution.

Apart from managing daily liquidity, the main activity of Treasury in 2020 is to place excess funds into various financial instruments on the money market and capital market. This is carried out in order to provide optimal returns while still observing the prudence principle and prevailing regulations. Conversely, if funds are required outside of third party funds, the treasury has a role to seek financing to the market either through loans (*interbank call money*) or issuance of debt securities.



Produk dan Target Pasar

Secara garis besar seluruh aktivitas *treasury* dibagi kedalam dua kategori portofolio yaitu:

- *Trading book*, terkait seluruh posisi perdagangan Bank pada instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan dalam jangka pendek.
- *Banking book*, terkait semua posisi yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan likuiditas dan pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan secara optimal.

Perseroan melalui Unit Treasury terus berkomitmen untuk mengembangkan usaha melalui diversifikasi produk dan layanan. Di tahun 2022, unit treasury memiliki beberapa rencana antara lain melakukan penerbitan NCD (*Negotiable Certificate of Deposit*) untuk mendukung kebutuhan ekspansi kredit.

Kinerja Bisnis

Pada tahun 2021, Unit *Treasury* membukukan pendapatan bunga sebesar Rp82,3 miliar, naik 68.85% dibandingkan dengan perolehan tahun 2020 yang sebesar Rp48,7 miliar. Hal ini disebabkan oleh penempatan pada BI dan Bank Lain, Reksadana dan Obligasi.

Products and Market Target

In general, all treasury activities are divided into two portfolio categories, which are:

- *Trading book*, related to all Bank's trading positions on financial instruments in the balance sheet and off-balance sheet accounts held for the purpose of obtaining short-term profits.
- *Banking book*, related to all positions aimed at fulfilling liquidity and managing the Company's assets and liabilities optimally.

The Company, through its Treasury Unit, continues to be committed in developing its business through product and service diversification. In 2022, the treasury unit has several plans, including issuing the NCD (*Negotiable Certificate Deposit*) to support loan expansion requirements.

Business Performance

In 2021, the Treasury Unit posted interest income at Rp82.3 billion, an increase of 68.85 % compared to that of 2020 at Rp48.7 billion. This was due to placements with BI and Other Banks, Mutual Funds and Bonds.

Dalam juta rupiah / In million rupiah

Deskripsi / Description	2021	2020	Perubahan / Change	
			Nominal	%
Pendapatan Bunga Treasury / Treasury Interest Income				
Efek-Efek / Securities	42.187	46.042,9	(3.855.9)	(8,37%)
Reksadana / Mutual Fund	888	-	888	100%
Obligasi Negara / Government Bonds	38.6452.654	46.042,9	(7.397.9)	(16%)
Obligasi Korporasi / Corporate Bonds	22.813	-	2.654	100%
Penempatan pada BI dan Bank Lain / Placement with BI and Other Banks	16.260	2.261,9	20.551.1	908%
Reverse Repo	869	19.865	(3.605)	18%
Giro pada Bank Indonesia / Current Account in Bank Indonesia	182	282,2	586.8	207%
Giro pada Bank Lain / Current Account in Other Banks	82.311	159	23	14%
Total Pendapatan Bunga / Total Interest Income	42.187	48.747,1	33.563.9	68,85%

Dalam perjalanan bisnisnya, Unit *Treasury* menghadapi sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal. Berikut transaksi yang telah dilaksanakan oleh Unit *Treasury* pada 2020:

1. Transaksi pasar uang

Aktivitas pasar uang dilakukan dalam rangka mengelola likuiditas Perseroan melalui penempatan dana dalam pasar uang antar bank (PUAB) maupun transaksi lelang Operasi Moneter Bank Indonesia. Instrumen penempatan dana yang sudah dilakukan antara lain:

In the course of its business, the Treasury Unit faces a number of challenges, both internal and external. The following transactions have been carried out by the Treasury Unit in 2020:

1. Money market transactions

Money market activities are carried out in the context of managing the Company liquidity through the placement of funds on the interbank money market (PUAB) and Bank Indonesia Monetary Operation auction transactions. Fund placement instruments that have been carried out include:



- Interbank call money*
- Reverse repo* Bank Indonesia
- Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia
- Time Deposit* dan *Deposit Facility* Bank Indonesia
- Reksadana

Adapun sumber dana yang bersumber dari pasar uang dalam mengelola likuiditas diperoleh dari:

- Interbank Borrowing Call Money*
- Term Repo* Bank Indonesia

Sejalan dengan program Bank Indonesia untuk memperdalam pasar keuangan dan menjaga stabilitas tingkat suku bunga pasar uang, Perseroan juga memanfaatkan instrumen GWM (Giro Wajib Minimum) rata-rata dan GWM penyangga likuiditas makroprudensial yang dapat dilakukan repo kepada Bank Indonesia sebagai alternatif pendanaan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menjalin kerja sama bilateral dengan bank lain untuk mendapatkan pinjaman berjangka sebagai dana siaga guna menjaga jumlah likuiditas.

- Transaksi pendapatan tetap
Instrumen pendapatan tetap dilakukan melalui penempatan dana pada surat berharga. Adapun total pendapatan yang diperoleh dari transaksi surat berharga pada 2021 mencapai Rp41.299.

Strategi dan Prospek Bisnis Tahun 2022

Bilamana pemulihan ekonomi terjadi sesuai proyeksi para ahli, maka pertumbuhan kredit perbankan akan terdongkrak hingga mendorong peningkatan kebutuhan likuiditas. Mengantisipasi kondisi tersebut, Unit *Treasury* menetapkan prioritas utama dan target tahun 2022 yaitu memastikan ketersediaan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan usaha. Perseroan memiliki target untuk menjaga rekam jejak pendapatan Bunga bersih selalu positif dan terus meningkat. Dalam mencapai target tersebut, Unit *Treasury* pun mengimplementasikan berbagai strategi sebagai berikut:

- Menjaga rasio likuiditas sesuai ketentuan.
- Mengatur portofolio dengan terus memonitor pergerakan suku bunga di pasar.
- Melakukan transaksi dalam koridor *risk appetite* dan *risk tolerance* Perseroan.
- Optimalisasi penempatan di Instrumen BI dengan strategi *averaging*.
- Melakukan penempatan pada tenor jangka pendek dan menengah untuk menjaga posisi dan memberikan fleksibilitas dalam perubahan komposisi portofolio.

- Interbank call Money
- Reverse repo of Bank Indonesia
- Bank Indonesia Certificates and Bank Indonesia Certificates of Deposit
- Time Deposit and Deposit Facility of Bank Indonesia
- Mutual Fund

The sources of funds that come from the money market in managing liquidity are obtained from:

- Interbank Borrowing Call Money
- Term Repo Bank Indonesia

In line with Bank Indonesia's program to deepen financial markets and maintain stability in money market interest rates, Company also utilizes the average reserve requirement and macro prudential liquidity buffer that can be repoed at Bank Indonesia as an alternative to Company funding. In addition, Company also established bilateral cooperation with other banks to obtain term loans as a standby fund in order to maintain the amount of liquidity.

- Fixed income transactions
Fixed income instruments are implemented by placing funds in marketable securities. The total revenue obtained from securities transactions in 2021 amounted to Rp42,299

2022 Strategies and Business Prospects

If the economic recovery occurs in accordance with the projection of experts, the banking loan growth will be bolstered, thus encouraging increased liquidity needs. To anticipate these conditions, the Treasury Unit sets the main priority and targets for 2022, ensuring the availability of liquidity to support business growth. The Company has a target to maintain a track record of positive and increasing net interest income. In achieving this target, the Treasury Unit also implements the following strategies:

- Maintain liquidity ratios in accordance with the provisions.
- Manage the portfolio by continuously monitoring the movement of interest rates on the market.
- Carry out transactions within the corridor of the Company's risk appetite and risk tolerance.
- Optimizing placement in BI Instruments with averaging strategy.
- Placing short and medium term tenors to maintain position and provide flexibility in changing portfolio composition.



Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Review

Pembahasan mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan kinerja keuangan Perseroan, disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini

The financial performance discussion refers to the Financial Statements of the Company presented in accordance with Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) generally applicable in Indonesia for the years ended on 31 December 2021 and 2020. The financial statements has been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, which has been presented fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dated 31 December 2021, including the financial performance and cash flows for the years ended on such date, in accordance with the Financial Accounting Standard in Indonesia. The discussion of Company financial performance is presented by taking into account the elaboration on the notes of Financial Statements from external auditor as an integral part of this Annual Report.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Dalam juta rupiah / In million rupiah

Uraian / Description	2021	2020	Pertumbuhan (%) / Growth (%)
Total Aset / Total Assets	8.849.611	5.337.281	65,81%
Total Liabilitas / Total Liabilities	6.958.464	3.975.700	75,03%
Total Ekuitas / Total Equity	1.891.145	1.361.581	38,89%
Total Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	8.849.611	5.337.281	65,81%

Aset

Jumlah aset Perseroan pada tahun 2021 sebesar Rp8,85 triliun, meningkat sebesar 66% dari tahun 2020 sebesar Rp5,37 triliun. Kenaikan aset karena dilakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII di tahun 2021 yang menyebabkan kenaikan kas dan setara kas.

Assets

The Company's total assets in 2021 amounted to Rp8.85 trillion, an increase of 66% from 2020 of Rp5.37 trillion. The increase in assets was due to a Limited Public Offering (PUT) VII in 2021 which led to an increase in cash and cash equivalents.

(dalam juta Rupiah / in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2021	2020	Perubahan / Change	
			Nominal	(%)
Kas / Cash	75.595	35.545	40.050	112,67%
Giro pada Bank Indonesia / Current Accounts in Bank Indonesia	158.888	102.188	56.700	55,49%
Giro pada Bank Lain / Current Accounts in Other Banks	32.831	2.580	30.251	1172,56%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain / Placement with Bank Indonesia and Other Banks	1.566.833	304.924	1.261.909	413,84%
Efek-efek / Securities	817.926	617.099	200.827	32,54%
Efek-Efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali / Securities purchased under resell agreement	1.321.583	-	1.321.583	100%
Kredit Pihak Ketiga / Third Party Loans	2.709.189	2.968.242	(259.054)	-8,73%

(dalam juta Rupiah / in millions of Rupiah)

Uraian / Description	2021	2020	Perubahan / Change	
			Nominal	(%)
Pendapatan Bunga yang Masih akan Diterima / Accrued Interest Receivables	17.072	88.503	(71.431)	-80,71%
Biaya Dibayar di Muka / Prepaid Expenses	738.914	57.993	680.922	1.174,17%
Aset Tetap / Fixed Assets	60.833	65.323	(4.491)	-6,87%
Agunan yang Diambil Alih / Foreclosed Assets	16.072	16.072	-	-
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	360.028	421.291	(61.263)	-14,54%
Aset Lain-Lain / Other Assets	973.847	657.521	316.326	48,11%
Jumlah Aset / Total Assets	8.849.611	5.337.281	3.512.329	65,81%

Kas

Per 31 Desember 2021, jumlah kas Perseroan sebesar Rp75,59 miliar, meningkat 112,63% dari tahun 2020 sebesar Rp35,55 miliar. Hal ini disebabkan karena bank melakukan penawaran umum terbatas VII yang memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 September 2021.

Giro Pada Bank Indonesia

Pada tahun 2021, Giro pada Bank Indonesia sebesar Rp158,88 miliar, meningkat sebesar 55,47% dari tahun 2020 sebesar Rp102,19 miliar. Giro ini terdiri dari Giro Wajib Minimum (GWM) primer, GWM sekunder, dan GWM rasio pinjaman terhadap pendanaan (*loan to funding ratio*).

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain ini berupa penempatan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), *call money*, deposito berjangka dan tabungan. Pada tahun 2021, nilai penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain sebesar Rp1,56 triliun, meningkat 413,84% dari tahun 2020 sebesar Rp304,92 miliar. Jumlah FASBI sebesar Rp167 miliar, menurun dibanding tahun 2020 sebesar Rp305 miliar.

Efek-Efek

Akun Efek-efek terdiri dari obligasi Pemerintah yang dikelompokkan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Nilai efek yang dapat dijual dan diperdagangkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp817,92 miliar, meningkat sebesar 32,54% dari tahun 2020 sebesar Rp617,10 miliar.

Kredit

Per 31 Desember 2021, penyaluran kredit Perseroan adalah sebesar Rp3,08 triliun, menurun 23,05% dari tahun 2020 sebesar Rp3,79 triliun. Hal ini dikarenakan karena adanya transaksi Hapus buku Kredit pada bulan Maret dan Desember 2021.

Cash

As of December 31, 2021, the Company's total cash amounted to Rp75.59 billion, an increase of 112.63% from 2020 at Rp35.55 billion. This was because the bank conducted a limited public offering VII which obtained an effective statement from the Financial Services Authority (OJK) on September 30, 2021.

Current Accounts in Bank Indonesia

In 2021, Current Accounts in Bank Indonesia amounted to Rp158.88 billion, increased by 55.47% from Rp102.19 billion in 2020. The Current Accounts consisted of primary Statutory Reserves (GWM), secondary GWM, and loan to funding ratio.

Placements in Bank Indonesia and Other Banks

Placements in Bank Indonesia and other banks are placements in Bank Indonesia Deposit Facility, call money, term deposits and savings. In 2021, the value of placements in Bank Indonesia and Other Banks was Rp1.56 trillion, an increase of 413.84% from 2020 at Rp304.92 billion. The number of FASBI was Rp167 billion, a decrease compared to 2020 at Rp305 billion.

Securities

Securities represents mutual funds and government bonds classified as financial assets held to maturity and available for sale. Securities sold under repurchase agreement in 2021 was Rp817.92 billion, increased by 32.54% from Rp617.10 billion in 2020.

Loans

As of 31 December 2021, Company's loans was Rp3.08 trillion, decreased by 23.05% from 2020 at Rp3.79 trillion. This was due to the write-off transactions in March and December 2021.

Kredit konsumsi sebagian besar adalah kredit yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara Provinsi Banten yang dipergunakan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor dan kebutuhan konsumtif lainnya. Kredit modal kerja terdiri dari kredit berjangka, kredit rekening koran, kredit akseptasi dan cerukan yang diberikan kepada debitur untuk keperluan modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk pembelian barang modal.

Most consumer loans are loans that are granted to Banten Provincial State Civil Apparatus which are used for the purchase of houses, vehicles and other consumptive needs. Working capital loans consist of term loans, overdraft loans, acceptances loans and overdrafts granted to borrowers for working capital purposes. Investment loans is a medium or long-term loan granted to borrowers for the purchase of capital assets.

Dalam juta rupiah / In million rupiah

Jenis Kredit / Loans Type	2021	2020	Pertumbuhan (%) / Growth (%)
Investasi / Investment	71.195	946.321	-92,16%
Modal Kerja / Working Capital	488.914	1.140.051	-57,11%
Konsumsi / Consumption	2.523.893	1.703.447	48,16%
Jumlah / Total	3.084.002	3.789.819	-18,62%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses	(374.813)	(821.557)	-53,28%
Jumlah / Total	2.709.189	2.968.242	-8,73%

Dalam juta rupiah / In million rupiah

Jenis Konsumen / Consumer Type	2021	2020	Pertumbuhan (%) / Growth (%)
Individu / Individual	2.550.344	3.212.262	-20,61%
Korporasi / Corporate	533.658	577.557	-7,60%
Jumlah / Total	3.084.002	3.789.819	-18,62%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses	(374.813)	(821.557)	-53,28%
Bersih / Net	2.709.189	2.968.242	-8,73%

Ditinjau dari jenis konsumen pada tahun 2021, kredit masih didominasi individu dengan nilai Rp2,5 triliun.

From consumer types in 2021, the loans remained dominated by individuals with a value of Rp2.5 trillion.

Pendapatan Bunga yang Masih akan Diterima

Akun Pendapatan Bunga yang Masih akan Diterima terdiri dari Pendapatan Bunga Kredit dan Pendapatan Bunga dari Efek-efek. Jumlah Pendapatan Bunga yang Masih akan Diterima pada tahun 2021 sebesar Rp17,07 miliar, menurun 80,71% dari tahun 2020 sebesar Rp88,50 miliar. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pertumbuhan bisnis Bank serta adanya koreksi dari Kantor Akuntan Publik.

Accrued Interest Receivable

Accrued Interest Receivable consists of Loans Interest and Securities Interest. Total accrued interest receivable in 2021 reached Rp17.07 billion, decreased by 80.71% from 2020 at Rp88.50 billion. This was due to the growth of the Bank's business which was not optimal yet and the correction from the Public Accounting Firm.

Biaya Dibayar di Muka

Akun Biaya Dibayar di Muka terdiri dari biaya sewa, asuransi, promosi, dan hadiah, serta biaya lain-lain. Pada tahun 2021, nilai biaya dibayar di muka sebesar Rp738,91 miliar, meningkat 1.174,17% dari tahun 2020 sebesar Rp57,99 miliar. Hal ini dikarenakan adanya penangguhan biaya restrukturisasi penyehatan Bank Banten.

Prepaid Expenses

Prepaid expenses consist of lease, insurance, promotions and gifts, as well as other expenses. In 2021, prepaid expenses reached Rp738.91 billion, an increase of 1,174.17% from 2020 at Rp57.99 billion. This was due to the deferred restructuring costs for Bank Banten's restructuring.

Aset Tetap

Komponen Aset Tetap terdiri dari biaya perolehan renovasi bangunan yang disewa, kendaraan perlengkapan, mesin dan peralatan kantor, serta aset dalam penyelesaian. Pada tahun 2021, aset tetap sebesar Rp60,83 miliar, turun dari tahun 2020 yang sebesar Rp65,32 miliar. Hal ini karena pembebanan biaya penyusutan aset tetap.

Liabilitas

Jumlah liabilitas pada tahun 2021 sebesar Rp6.958 miliar, meningkat 75,03% dari tahun 2020 sebesar Rp3.975 miliar. Kenaikan Liabilitas sebesar Rp2.983 miliar atau sebesar 75.03% pada posisi 31 Desember 2021. Kenaikan liabilitas yang signifikan dikarenakan kenaikan simpanan dari nasabah yang didominasi Deposito pada Pihak Ketiga. Kenaikan juga terjadi pada Giro sebesar Rp743,71 miliar atau 218.54%, Giro pada posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp1,082 triliun jika dibandingkan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp339,86 miliar. Kenaikan pada rekening giro disebabkan kenaikan Giro Kas Daerah sebesar sebesar Rp382,17 miliar (107.46%) pada posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp556,38 miliar jika dibandingkan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp184,21 miliar. Hal tersebut merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah Daerah Provinsi Banten kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk yang dianggap mampu untuk menangani dan mengelola Kas Daerah.

Fixed Assets

Fixed assets consist of costs for leasehold improvement, vehicles, office equipment, machines and furniture, as well as construction in progress. In 2021, fixed assets reached Rp60.83 billion, down from 2020 which was Rp65.32 billion. This was due to the imposition of fixed asset depreciation costs.

Liabilities

Total liabilities in 2021 amounted to Rp6,958 billion, an increase of 75.03% from 2020 at Rp3,975 billion. Increase in Liabilities was Rp2,983 billion or 75.03% as of December 31, 2021. The significant increase in liabilities was due to an increase in deposits from customers, which were dominated by Deposits with Third Parties. An increase also occurred in Current Accounts by Rp743.71 billion or 218.54%, Current Accounts at the position of December 31, 2021 amounting to Rp1.082 trillion compared to December 31, 2020 at Rp339.86 billion. The increase in current accounts was due to an increase in Regional Cash Accounts by Rp382.17 billion (107.46%) at the position of December 31, 2021 of Rp556.38 billion compared to December 31, 2020 at Rp184.21 billion. This is a form of trust from the Banten Provincial Government to PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk which is considered capable of handling and managing the Local Treasury.

Dalam juta rupiah / In million rupiah

Uraian / Description	2021	2020	Pertumbuhan (%) / Growth (%)
Liabilitas Segera / Liabilities Due Immediately	116.264	221.036	-47,40%
Simpanan Dari Nasabah / Deposits From Customers			
- Pihak Ketiga / Third Party	4.172.208	2.425.102	72,04%
- Pihak Berelasi / Related Party	467.246	157.105	197,41%
Simpanan dari Bank Lain / Deposits From Other Bank			
- Pihak Ketiga / Third Party	2.107.640	674.878	212,30%
- Pihak Berelasi / Related Party	10.202	604	1.589,07%
Liabilitas Atas Efek-Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali / Securities Sold Under Repurchase Agreement	-	436.384	-100%
Utang Pajak / Taxes Payable	4.347	2.587	68,03%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja / Post-Employment Benefit Liability	24.895	32.455	-23,29%
Liabilitas Lain-Lain / Other Liabilities	55.662	25.549	117,86%
Jumlah / Total	6.958.464	3.975.700	75,03

Liabilitas Segera

Komponen liabilitas segera terdiri dari utang bunga dan lain-lain yang pada tahun 2021 nilainya adalah Rp116,26 miliar, menurun 47,40% dari tahun 2020 sebesar Rp221,04 miliar.

Liabilities Due Immediately

Liabilities due immediately consists of interest payable and others, which in 2021 was Rp116.26 billion, decreased by 47.40% from 2020 at Rp221.04 billion.

Simpanan Dari Nasabah

Simpanan dari nasabah terdiri dari dana pihak ketiga (DPK) dan simpanan pihak berelasi. Pada tahun 2021, simpanan dari nasabah sebesar Rp4,64 triliun, meningkat 79,67% dibanding tahun 2020 sebesar Rp2,58 triliun. Struktur DPK masih didominasi Deposito dengan pangsa sebesar 74,48%, Tabungan sebesar 11,32%, dan Giro 14,19%. Perolehan dana murah (*Current Account Saving Account/CASA*) sebesar Rp1,183 triliun, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar Rp595,95 miliar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank Banten.

Deposits from Customers

Deposits from customers consist of third-party funds (TPF) and related party deposits. Total deposits from customers in 2021 reached Rp4.64 trillion, an increase of 79.67% compared to 2020 at Rp2.58 trillion. The structure of deposits is still dominated by deposits with a share of 74.48%, savings accounts at 11.32% and current accounts at 14.19%. The acquisition of low-cost funds (*Current Account Saving Account/CASA*) amounted to Rp1.183 trillion, an increase compared to 2020 at Rp595.95 billion. This was due to the increasing public trust to save their funds in Bank Banten.

Dalam juta rupiah / In million rupiah

Komponen / Component	2021	2020	Pertumbuhan (%) / Growth (%)
Giro / Demand Deposits	658.425	280.004	135,15%
Tabungan / Savings	525.355	315.945	66,28%
Deposito Berjangka / Timed Deposits	3.455.674	1.986.258	73,98%
Total / Total	4.639.454	2.582.207	79,67%

Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari kewajiban terhadap bank lain, tersedia dalam bentuk deposito berjangka, giro, tabungan dan deposit on call bank. Pada tahun 2021, Simpanan dari Bank Lain tercatat sebesar sebesar Rp2,12 triliun, meningkat sebesar 213,53% dari tahun 2020 sebesar Rp675,48 miliar.

Deposits from Other Banks

Deposits from other banks consist of liabilities to other banks, available in the forms of time deposits, demand deposits, savings and deposit on call bank. In 2021, Deposits from Other Banks stood at Rp2.12 trillion, an increase of 213.53% from 2020 at Rp675.48 billion.

Utang Pajak

Utang pajak merupakan utang dari pajak penghasilan pasal 4 (2), pasal 21 dan pasal 23. Pada tahun 2021, utang pajak Bank Banten sebesar sebesar Rp4,35 miliar, meningkat 68,03% dari tahun 2020 sebesar Rp2,59 miliar. Hal ini dikarenakan meningkatnya utang pajak dana simpanan masyarakat.

Taxes Payable

Taxes payable is the payable from income tax article 4 (2), article 21 and article 23. In 2021, Bank Banten's taxes payable reached Rp4.35 billion, an increase of 68.03% from 2020 at Rp2.59 billion. This is due to the increased tax debt of public savings funds.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perseroan menghitung dan mencatat imbalan pasca kerja tanpa pendanaan khusus untuk pegawai yang berhak menurut Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 berdasarkan perhitungan aktuarial independen. Pada tahun 2021, liabilitas ini memiliki angka sebesar Rp24,89 miliar, menurun 23,29% dari tahun 2020 sebesar Rp32,45 miliar. Hal ini dikarenakan Perseroan menghitung dan mencatat imbalan kerja berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020.

Post-Employment Benefits Liability

The Company calculated and recorded unfunded defined post-employment benefits to its qualified employees in accordance with Labor Law No. 13 Year 2003 based on independent actuaries' calculations. In 2021, total post-employment benefits liability was Rp24.89 billion, decreased by 23.29% from Rp32.45 billion in 2020. This was because the Company calculates and records employee benefits based on the Job Creation Law No. 11 of 2020.

Liabilitas Lain-Lain

Akun Liabilitas lain-lain meliputi setoran jaminan, kewajiban transaksi ATM, asuransi, dan lain-lain. Pada tahun 2021, liabilitas lain-lain memiliki angka sebesar Rp55,66 miliar, meningkat 117,86% dibanding tahun 2020 sebesar Rp25,55 miliar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kewajiban transaksi ATM.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2021 sebesar Rp1,89 triliun meningkat sebesar 38,89% dari tahun 2020 sebesar Rp1,36 triliun, terdapat peningkatan pada Modal disetor sebesar Rp2,135,504 juta atau sebesar 98.26% pada posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp4,308,864 juta jika dibandingkan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2,173,360 yang merupakan hasil PUT VI dan PUT VII.

Other Liabilities

Other liabilities consist of guaranteed deposits, liability of ATM transactions, insurance and others. In 2021, other liabilities reached Rp55.66 billion, an increase of 117.86% compared to 2020 at Rp25.55 billion. This was due to an increase in ATM transaction obligations.

Equity

The Company's total equity in 2021 was Rp1.89 trillion, an increase of 38.89% from Rp1.36 trillion in 2020, there was an increase in Paid-in Capital by Rp2,135.504 million or 98.26% at the position of December 31, 2021, which was Rp4,308,864 million compared to December 31, 2020 at Rp2,173,360 which is the result of PUT VI and PUT VII.

Dalam juta rupiah / In million rupiah

Uraian / Description	2021	2020	Pertumbuhan (%) / Growth (%)
Modal Saham / Share Capital	4.308.864	2.173.360	98,26%
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid In Capital	241.475	1.583.496	-84,75%
Laba Sebelum Direalisasi Atas Efek Tersedia Untuk Dijual / Unrealized Gain On Available For Sale Securities	712	-	100%
Kerugian Aktuaria Setelah Pajak / Actuarial Loss Net Off Taxes	(2.500)	(3.047)	-17,95%
Saldo Rugi / Net Loss	(2.657.404)	(2.392.228)	11,08%
Jumlah / Total	1.891.147	1.361.581	38,89%

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dalam juta rupiah / In million rupiah

Uraian / Description	2021	2020	Pertumbuhan (%) / Growth (%)
Pendapatan (Beban) Operasional / Operating Income (Expenses)			
Pendapatan Bunga / Interest Income	310.272	372.209	-16,64%
Beban Bunga / Interest Expense	(251.404)	(338.465)	-25,72%
Pendapatan Bunga –Bersih / Interest Income - Net	58.868	33.744	74,45%
Administrasi / Administrative	29.297	21.961	33,40%
Keuntungan (Kerugian) Penjualan Efek / Gain (Loss) on Sales Securities	508	-	100%
Keuntungan dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi bersih / Gain from changes in fair value of financial assets at fair value through profit and loss-net	227	-	100%
Lain-Lain –Bersih / Others - Net	10.053	3.776	166,23%
Jumlah Pendapatan Operasional / Total Operating Income	98.953	59.481	66,36%



Dalam juta rupiah / In million rupiah

Uraian / Description	2021	2020	Pertumbuhan (%) / Growth (%)
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan –Bersih / Provision of impairment losses on financial assets - Net	79.761	(23.199)	444,67%
Umum dan Administrasi / General and Administrative	(250.640)	(175.635)	43,70%
Tenaga Kerja dan Tunjangan / Personnel	(132.485)	(119.005)	11,33%
Jumlah Beban Operasional Lainnya / Total Other Operating Expenses	(383.125)	(294.640)	30,03%
Rugi Operasional –Bersih / Net Operating Loss	(204.411)	(258.358)	-20,88%
Pendapatan (Beban) Non Operasional Bersih / Non-Operating Income (Expenses) - Net	143	2.362	106,04%
Rugi Sebelum Pajak / Loss Before Income Tax	(204.268)	(260.720)	-21,65%
Manfaat Pajak Penghasilan / Income Tax Benefit			
Pajak Tangguhan / Deferred Tax	(60.908)	(47.438)	28,40%
Rugi Bersih / Net Loss	(265.176)	(308.158)	-13,95%
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income			
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi / Items that would never be reclassified to profit loss	-	-	-
Keuntungan (kerugian) Aktuarial / Actuarial gain (loss)	701	(1.041)	-167,34%
Pajak Tangguhan / Deferred Tax	(154)	229	-167,34%
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi / Items that would be reclassified to profit loss	-	-	-
Keuntungan atas perubahan nilai wajar dari efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual – Bersih / Net gain (loss) from changes in fair value of available for sale securities	913	-	100%
Pajak Tangguhan / Deferred Tax	(201)	-	100%
Jumlah Rugi Komprehensif / Total Comprehensive Loss	(263.917)	(308.970)	-14,58%
Rugi per Saham Dasar dan Dilusian / Basic Loss Per Share and Diluted	(5,11)	(33,64)	-84,85%

Pendapatan Bunga

Perseroan membukukan pendapatan bunga sebesar Rp310,27 miliar di tahun 2021, menurun sebesar 16,64% dari tahun 2020 sebesar Rp372,21 miliar. Sementara beban bunga sebesar Rp251,40 miliar, menurun 25,72% dari tahun 2020 sebesar Rp338,46 miliar. Sehingga pendapatan bunga bersih sebesar Rp58,86 miliar, meningkat 74,46% dari tahun 2020 sebesar Rp33,74 miliar. Hal ini disebabkan oleh kredit yang diberikan yang menurun dibandingkan dengan tahun lalu serta belum optimalnya pertumbuhan bisnis Bank.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pada tahun 2021, pendapatan operasional lainnya yang didapatkan sebesar Rp40,08 miliar, menurun 55,74% dari tahun 2020 sebesar Rp25,74 miliar. Hal ini dikarenakan meningkatnya pendapatan administrasi dari DPK (Dana Pihak Ketiga) dan administrasi kredit.

Interest Income

The Company booked interest income of Rp310.27 billion in 2021, decreased by 16.64% from 2020 at Rp372.21 billion. Meanwhile, interest expense was Rp251.40 billion, a decrease of 25.72% from 2020 at Rp338.46 billion. Therefore, net interest income amounted to Rp58.86 billion, an increase of 74.46% from 2020 at Rp33.74 billion. This was due to a decrease in loan compared to last year and the Bank's business growth that was not yet optimal.

Other Operating Income

In 2021, other operating income reached IDR 40.08 billion, decreased by 55.74% from 2020 of IDR 25.74 billion. This was due to the increase in administrative income from TPF (Third Party Funds) and loan administration.

Pendapatan Operasional

Pada tahun 2021, pendapatan operasional yang didapatkan sebesar Rp40,08 miliar, meningkat 55,71% dari tahun 2020 sebesar Rp25,74 miliar

Beban Operasional

Pada tahun 2021, beban operasional tercatat sebesar Rp383,125 miliar, meningkat 30% dari tahun 2020 yang sebesar Rp294,64 miliar. Hal ini dikarenakan amortisasi biaya restrukturisasi dan penyehatan bank.

Rugi Operasional

Perseroan mencatat kerugian operasional sebesar Rp204,411 miliar, menurun sebanyak 20,88% dari tahun sebelumnya yakni Rp258,357. Hal ini dikarenakan kenaikan pendapatan bersih sebanyak 74,46% dibandingkan dengan tahun lalu.

Rugi Sebelum Pajak

Pada tahun 2021, Perseroan mencatatkan rugi sebelum pajak sebesar Rp204,268 miliar, menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 21% yakni dari Rp260,720 miliar. Hal ini dikarenakan menurunnya beban bunga sebanyak 25,72%.

Rugi Bersih

Perseroan mencatatkan rugi bersih sebesar Rp265,176 miliar, menurun 13,95% dari tahun 2020 sebesar Rp308,16 miliar. Hal ini karena adanya pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai kredit diberikan.

Penghasilan Komprehensif

Pada tahun 2021, *surplus* Penghasilan Komprehensif meningkat sebesar 55,04% dari minus Rp812 juta di tahun 2020 menjadi plus Rp1,259 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya keuntungan dari akturia dan keuntungan dari perubahan nilai wajar dari efek-efek dalam kategori tersedia untuk dijual.

Rugi Komprehensif

Perseroan membukukan rugi sebesar Rp263,917 miliar. Hal ini karena adanya pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai kredit diberikan.

Rugi per Saham

Per 31 Desember 2020, rugi per saham dasar adalah sebesar 5,11. Hal ini dikarenakan meningkat 85% karena penurunan rugi tahun berjalan.

Operating Income

In 2021, operating income reached Rp40.08 billion, an increase of 55.71% from 2020 at Rp25.74 billion.

Operating Expenses

In 2021, operating expenses stood at Rp383.125 billion, an increase of 30% from 2020 at Rp294.64 billion. This was due to amortization of bank restructuring and restructuring costs.

Operating Loss

The Company recorded operating loss at Rp204,411 billion, decreased by 20.88% from the previous year at Rp258,357. This was due to an increase in net income by 74.46% compared to the last year.

Loss Before Tax

In 2021, the Company recorded a loss before tax at Rp204,268 billion, decreased from the previous year by 21%, namely from Rp260.720 billion. This was due to a decrease in interest expense by 25.72%.

Net Loss

The Company posted a net loss of Rp265.176 billion, decreased by 13.95% from 2020 at Rp308.16 billion. This was because the recovery of allowance for impairment losses on loan.

Comprehensive Income

In 2021, Comprehensive Income surplus increased by 55.04% from minus Rp812 million in 2020 to plus Rp1,259 billion. This was due to gains from actuarial gains and gains from changes in the fair value of securities in the available-for-sale category.

Comprehensive Loss

The Company booked loss of Rp263.917 billion. This was due to the recovery of allowance for impairment losses on loans.

Loss per Share

As of 31 December 2020, basic loss per share was 5.11. This was due to an increase by 85% due to a decrease in loss for the year.



LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASH FLOWS

Dalam juta rupiah / In million rupiah

Uraian / Description	2021	2020	Pertumbuhan (%) / Growth (%)
Arus Kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi / Cash Flows provided from (used in) Operating Activities	727.749	(1.786.650)	140,73%
Arus Kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi / Cash Flows provided from (used in) Investing Activities	(35.099)	(34.975)	0,35%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Cash Flows from Funding Activities	793.483	1.688.471	-53,01%
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas / Increased (Decrease) of Cash and Cash Equivalent	1.388.911	(313.968)	-542,27%
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun / Cash and Cash Equivalent at the Beginning of the Year	445.236	759.205	-41,35%
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalent at the End of Year	1.834.147	445.237	311,95%

Arus Kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Pada tahun 2021, posisi saldo kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp727 miliar, meningkat 140,73% dari tahun 2020 sebesar Rp1,79 triliun. Hal ini karena kenaikan penerimaan dari simpanan dari nasabah dan bank lain yang sangat signifikan.

Cash Flows from (used in) Operating Activities

In 2021, net cash balance position used in operating activities reached Rp727 billion, an increase of 140.73% from 2020 at Rp1.79 trillion. This was due to a very significant increase in receipts from deposits from customers and other banks.

Arus Kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp35,09 miliar, menurun/meningkat 0.35% dari tahun 2020 sebesar Rp34,97 miliar.

Cash Flows provided from (used in) Investing Activities

Net cash used in investing activities was Rp35.09 billion, increased by 0.35% from 2020 at Rp34.97 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp793 miliar yang berasal dari penerbitan saham baru.

Cash Flows from Funding Activities

Net cash provided from funding activities amounted to Rp793 billion from the issuance of new shares.

Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas

Posisi saldo kas dan setara kas Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1,83 triliun, menurun/meningkat 311,95% dari tahun 2020 sebesar Rp445,24 miliar. Hal ini disebabkan oleh penerbitan saham baru di 2021 dan kenaikan signifikan terdapat dari penerimaan simpanan nasabah dan bank lain.

Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalents

The Company's cash and cash equivalents balance position amounted to Rp1.83 trillion, an increase of 311.95% from 2020 at Rp445.24 billion. This was due to the issuance of new shares in 2021 and a significant increase in the receipt of deposits from customers and other banks.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS

Kemampuan membayar utang terhadap pihak lain dapat diukur dengan menggunakan tiga rasio, yakni rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Bank Banten juga mengelola kemampuan membayar utang dengan menakar risiko likuiditas, yakni risiko di mana Bank tidak dapat memenuhi liabilitasnya kepada nasabah dan pihak lawan pada saat jatuh tempo.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu ukuran untuk mengukur rasio likuiditas yang sehat adalah perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga (*loan to deposit ratio* atau LDR). Pada tahun 2021, LDR Bank Banten sebesar 66,47%.

Rasio Solvabilitas

Perseroan menggunakan rasio permodalan untuk mengukur tingkat solvabilitas. Bank memiliki Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 41,68% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya hasil dari PUT VI dan VII, dimana Total modal mengalami peningkatan sebesar Rp716,77 miliar dari Rp808,01 miliar menjadi Rp1.524,79 miliar.

Rasio Rentabilitas

Perseroan menggunakan rasio rentabilitas untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja dengan menggunakan lima komponen yaitu laba terhadap aset (ROA), laba terhadap ekuitas (ROE), margin bunga bersih (NIM), dan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), dan rasio liabilitas terhadap aset. Pada 2021, rasio ROA Bank sebesar -2,94%, ROE sebesar -21,94, NIM sebesar 1,28%, BOPO sebesar 158,33 dan liabilitas terhadap aset sebesar 78,63%.

Perseroan terus mengembangkan strategi sekaligus memantau kolektibilitas kredit dan kredit atau pembiayaan yang disalurkan. Perseroan meyakini memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mempertahankan eksposur risiko kredit pada tingkat minimal. Pada tahun 2021, rasio kredit macet bersih berada di level 3,88.

SOLVENCY AND COLLECTABILITY LEVEL

Solvency toward other parties can be measured by using three ratios, namely liquidity ratio, solvability ratio and earnings ratio. Bank Banten also manages solvency by measuring liquidity risk, namely risk where the Bank cannot fulfil its liabilities to the customers and counterparties upon maturity.

Liquidity Ratio

Liquidity ratio is used to measure the Company's capability in fulfilling its obligation. One of the methods to measure sound liquidity ratio is through a comparison of loans to deposit ratio or LDR. In 2021, Bank Banten's LDR was at 66.47% level.

Solvability Ratio

The Company uses capital ratio to measure solvability level. The Bank recorded a Capital Adequacy Ratio (CAR) at 41.68%, increased compared to the previous year. This was due to the results of the PUT VI and VII, in which the total capital increased by Rp716.77 billion from Rp808.01 billion to Rp1,524.79 billion.

Earnings Ratio

The Company used earnings ratio to measure its performance efficiency level by using five components, which are return on assets (ROA), return on equity (ROE), net interest margin (NIM), and operating expense to operating income (BOPO), and debt to assets ratio. In 2021, the Bank's ROA stood at -2.94%, ROE at -21.94, NIM at 1.28%, BOPO at 158.33 and liabilities to assets at 78.63%.

The Company strives to monitor loan collectability and lending or financing. The Company believes to have the capability in controlling and maintaining credit risk exposure at a minimum level. In 2021, net non-performing loan reached the level of 3.88.



Rasio / Ratio		2021	2020
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) / Capital Adequacy Ratio (CAR)	41,68%	34,75%
2	Return on Asset (ROA)	-2,94%	-4,88%
3	Return on Equity (ROE)	-21,56%	-47,96%
4	NPL Gross	14,09%	22,27%
5	NPL Net	4,27%	4,51%
6	Net Interest Margin (NIM)	1,28%	0,56%
7	Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) / Operating Expense to Operating Income (BOPO)	158,33%	164,90%
8	Loan to Deposit Ratio	66,47%	146,77%
9	a. Persentase Pelanggaran BMPK / Percentage of LLL Violations		
	• Pihak Terkait / Related Party	0,00%	0,00%
	• Pihak Tidak Terkait / Non-Related Party	0,00%	0,00%
	b. Persentase Pelampauan BMPK / Percentage of LLL Excess		
	• Pihak Terkait / Related Party	0,00%	0,00%
	• Pihak Tidak Terkait / Non-Related Party	0,00%	0,00%
10	Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan / Overall Net Open Position (NOP)	0,00%	0,00%

STRUKTUR MODAL

Perseroan selalu senantiasa memperhatikan struktur permodalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak otoritas perbankan di Indonesia. Komitmen Perseroan dalam menjaga tingkat kesehatan Bank ini seiring dengan regulasi serta didukung oleh Pemerintah Provinsi Banten. Dalam hal struktur permodalan, sepanjang tahun 2021 tidak terdapat utang berbasis bunga atau sukuk. Komposisi kepemilikan saham Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE

The Company takes into account its capital structure in accordance with the set provisions by the banking authorities in Indonesia. The Company's commitment in maintaining its rating is in line with the regulations and supported by Banten Provincial Government. On capital structure, throughout 2021 there was no record of interest-based debt or sukuk. The composition of the Company's share ownership as of 31 December 2020 is as follows:



Dalam juta rupiah / In million rupiah

Pemegang Saham / Shareholder	Jumlah Saham / Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage
PT Banten Global Development	34.289.755.661	66,11%
Publik / Public	17.580.682.605	33,89%
Jumlah / Total	9.160.354.337	100,00%

Per 31 Desember 2021, modal inti Perseroan tercatat sebesar 1.503.369 miliar (auditee), meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp791,09 miliar. Peningkatan modal inti merupakan bentuk komitmen Perseroan untuk menjaga pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan mematuhi ketentuan permodalan dari Otoritas Jasa Keuangan.

As of 31 December 2021, the Company's core capital stood at 1,503,369 billion, increased from 2020 of Rp791.09 billion. The increase of core capital is a commitment of Company to maintain sustainable business growth and in compliance with the capital provisions from the Financial Services Authority.

Dalam juta rupiah / In million rupiah

Uraian / Description	2021	2020
Modal / Capital		
Modal Inti (Tier 1) / Core Capital (Tier 1)	1.503.369	791.094
Modal Pelengkap (Tier 2) / Supplementary Capital (Tier 2)	21.421	16.922
Total Modal / Total Capital	1.524.790	808.016
ATMR Risiko Kredit / RWA Credit Risk	3.421.127	1.972.624
ATMR Risiko Operasional / RWA Operational Risk	236.884	352.683
ATMR Risiko Pasar / RWA Market Risk	-	-
Total ATMR / Total RWA	3.658.011	2.325.307
Rasio KPMM dengan Memperhitungkan: / CAR Ratio by Calculating:		
Risiko kredit dan Risiko Operasional / Credit Risk and Operational Risk	41,68%	34,75%
Risiko Kredit, Operasional, dan Pasar / Credit Risk, Operational Risk, and Market Risk	41,68%	34,75%
Rasio Modal Inti Terhadap ATMR / Core Capital to RWA Ratio	41,10%	34,02%

Kebijakan Struktur Modal

Perseroan memastikan struktur modal telah memenuhi aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Perbankan dan mengoptimalkan untuk mendukung tujuan jangka panjang Perseroan.

Arah kebijakan permodalan:

- Mengelola permodalan Perseroan sesuai dengan profil risiko Perseroan;
- Mengantisipasi dan mendukung kesempatan bisnis;
- Mengoptimalkan efisiensi struktur modal;
- Mengantisipasi setiap perubahan peraturan yang dapat memengaruhi rasio permodalan.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Per 31 Desember 2021, Perseroan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL PELAPORAN AKUNTAN

Per 31 Desember 2021, tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal pelaporan akuntan.

Capital Structure Policy

The Company ensures its capital structure has met the provisions set by the Banking Regulators and optimizes it to support the Company's long term objectives.

Capital policy directives:

- Manage the Company's capital in accordance with the Company's risk profile;
- Anticipate and foster existing business opportunities;
- Optimize an efficient capital structure;
- Anticipate change of regulations that may influence capital ratio.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENTS

As of 31 December 2021, the Company did not have material commitments for capital investments.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE DATE OF ACCOUNTANT REPORT

As of December 31, 2021, there was no material information and facts subsequent to the accountant's reporting date.

TARGET SERTA REALISASI 2021 DAN PROYEKSI 2022

2021 TARGETS AND REALIZATIONS AND 2022 PROJECTIONS

Dalam juta rupiah / In million rupiah

Indikator / Indicators	Target 2021 / 2021 Targets	Realisasi 2021 / 2021 Realizations	Proyeksi 2022 / 2022 Projections
Rasio KPMM / CAR Ratio	33,20%	41,68%	29,58%
ROE	1,62%	-21,56%	1,30%
ROA	0,34%	-2,94%	0,22%
NIM	2,36%	1,28%	3,87%
BOPO	95,49%	158,33%	97,11%
NPL Gross	5,86%	14,14%	1,52%
NPL Net	3,73%	1,38%	1,46%
LDR	90,00%	66,47%	92,00%

Dari tabel tersebut di atas, pada tahun 2021 ada beberapa indikator yang memang telah terealisasi melebihi target seperti Rasio KPMM namun ada juga yang belum mencapai target seperti ROE, ROA, NIM, BOPO, NPL Gross, NPL Nett, dan LDR.

Based on the table above, in 2021, there were some indicators that exceeded the targets in their realization such as KPMM ratio, however there are also those that have not reached the target such as ROE, ROA, NIM, BOPO, Gross NPL, Nett NPL, and LDR.

ASPEK PEMASARAN

Optimalisasi peluang pertumbuhan usaha didukung dengan strategi pemasaran yang efektif sesuai dengan target pasar yang dituju. Strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Memperluas pangsa pasar kredit berpenghasilan tetap dan pangsa pasar kredit pensiunan serta pra pensiun sebagai *champion product*.
2. Meningkatkan pertumbuhan portofolio kredit konsumen melalui *review pricing* dan fitur produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, wilayah dan kantor cabang.
3. Melakukan inovasi percepatan proses bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
4. Meningkatkan portofolio kredit modal kerja konstruksi yang dibiayai melalui APBD Pemerintah Provinsi Banten.
5. Meningkatkan penyaluran kredit pasar segmen UMKM khususnya di Provinsi Banten
6. Mengembangkan Kredit Program yang sejalan dengan program PemProv Banten.
7. Mengembangkan kemitraan dengan BPR/Koperasi melalui berbagai pola kerjasama.

MARKETING ASPECTS

Optimization of business growth opportunities supported with effective marketing strategies in accordance with the aimed target markets. The following are marketing strategies conducted by the Company:

1. Expansion of loan market share for fixed income customers and loan market share for pensioners as well as pre-pensioners as champion product.
2. Improvement of consumer loans portfolio through pricing review and product features adjusted with the needs of market, regional and branch offices.
3. Acceleration of business process innovation by taking into account prudential principles.
4. Increasing working capital loans portfolio of construction financed through the Regional Budget of Banten Provincial Government.
5. Improvement of lending for MSMEs segment specifically in Banten Province.
6. Develop Program Loans that are in line with the Banten Provincial Government program.
7. Develop partnerships with BPR/Cooperatives through various cooperation patterns.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan membayarkan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat Kesehatan Perseroan, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Perseroan memastikan bahwa pembagian dividen tidak akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Pada tahun 2021, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN

Pada tahun 2021, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham untuk pegawai Perseroan.

REALISASI PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum

No.	Jenis Penawaran Umum / Type of Public Offering	Tanggal Efektif / Effective Date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran / Realization of Proceeds from Public Offering		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum / Total Proceeds from Public Offering	Biaya Penawaran Umum / Public Offering Cost	Hasil Bersih / Net Proceeds
1	Penawaran Umum dengan HMETD VI / Public Offering with HMETD VI	8 Desember 2020 / December 8, 2020	1.871.570.045.700	4.213.577.800	1.867.356.467.900
2	Penawaran Umum dengan HMETD VII / Public Offering with HMETD VII	30 September 2021 / September 30, 2021	618.163.262.178	3.566.606.770	614.596.655.408

Rencana Penggunaan Dana

No.	Jenis Penawaran Umum / Type of Public Offering	Tanggal Efektif / Effective Date	Plan of The Use of Proceeds		
			Realisasi Penggunaan Dana / Realization of the Use of Proceeds		
			Penyaluran Kredit / Loan	Perbaikan Struktur Keuangan/ Pengembangan Teknologi / Financial Structure Improvement/ Technology Development	Total
1	Penawaran Umum dengan HMETD VI / Public Offering with HMETD VI	8 Desember 2020 / December 8, 2020	1.213.781.704.135	653.574.763.765	1.867.356.467.900
2	Penawaran Umum dengan HMETD VII / Public Offering with HMETD VII	30 September 2021 / September 30, 2021	399.487.826.015	215.108.829.393	614.596.655.408

DIVIDEND POLICY

The Company exercises dividend payout in cash to all Shareholders at least once in a year, by taking into account the Company's financial position and rating, without eliminating the rights of the Company's General Meeting of Shareholders. The Company ensures that the dividend payout will not render violation on the prevailing laws and regulations and the Company's obligations based on the established agreements. In 2020/21, the Company did not carry out any dividend payout due to the losses.

STOCK OWNERSHIP PROGRAM FOR EMPLOYEES

In 2021, the Company did not have a stock ownership program for the employees.

PUBLIC OFFERING PROCEEDS UTILIZATION

Public Offering



Rincian Penggunaan Dana

Details of The Use of Proceeds

Realisasi Penggunaan Dana / Realization of the Use of Proceeds					
No.	Jenis Penawaran Umum / Type of Public Offering	Tanggal Efektif / Effective Date	Penyaluran Kredit / Loan	Perbaikan Struktur Keuangan/ Pengembangan Teknologi / Financial Structure Improvement/ Technology Development	Total
1	Penawaran Umum dengan HMETD VI / Public Offering with HMETD VI	8 Desember 2020 / December 8. 2020	1.213.781.704.135	0	1.213.781.704.135
2	Penawaran Umum dengan HMETD VII / Public Offering with HMETD VII	30 September 2021 / September 30. 2021	379.446.185.574	0	379.446.185.574

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum dengan HMETD

Remaining Proceeds From Public Offering with HMETD

No.	Jenis Penawaran Umum / Type of Public Offering	Tanggal Efektif / Effective Date	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum / Remaining Proceeds from Public Offering
1	Penawaran Umum dengan HMETD VI / Public Offering with HMETD VI	8 Desember 2020 / December 8. 2020	653.574.763.765
2	Penawaran Umum dengan HMETD VII / Public Offering with HMETD VII	30 September 2021 / September 30. 2021	235.150.469.834

Persentase Realisasi Penggunaan Dana

Percentage of Realized Use of Proceeds

% Realisasi Penggunaan Dana / % Realization of the Use of Proceeds					
No.	Jenis Penawaran Umum / Type of Public Offering	Tanggal Efektif / Effective Date	Penyaluran Kredit / Loan	Perbaikan Struktur Keuangan/Pengembangan Teknologi / Financial Structure Improvement/Technology Development	
1	Penawaran Umum dengan HMETD VI / Public Offering with HMETD VI	8 Desember 2020 / December 8. 2020	65%	0%	
2	Penawaran Umum dengan HMETD VII / Public Offering with HMETD VII	30 September 2021 / September 30. 2021	62%	0%	

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2021, pada Perseroan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

MATERIAL TRANSACTIONS WITH CONFLICTS OF INTEREST

In 2021, the Company did not have a transaction with conflicts of interest.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Perseroan melakukan beberapa transaksi dengan pihak yang memiliki relasi secara wajar dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

In conducting business activities, the Company did conduct transactions with related parties fairly and in accordance with the prevailing rules and regulations.

Pihak Relasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Transaksi / Transaction
Pemerintah Provinsi Banten / Government of Banten Province	Pemegang Saham Pengendali Terakhir / Ultimate Shareholder	Giro (Catatan 19 dalam LK) / Demand Deposits (Notes 19 in FS)
PT Banten Global Development	Pemegang Saham / Shareholder	Deposito Berjangka (Catatan 19 dalam LK) / Timed Deposits (Notes 19 in FS)
PT Jamkrida Banten	Perusahaan Terafiliasi / Affiliated Company	Deposito Berjangka (Catatan 19 dalam LK) / Timed Deposits (Notes 19 in FS)
Direksi, Komisaris, dan Pejabat Eksekutif / Board of Directors, Board of Commissioners, and Executives	Pengurus / Management	- Giro / Demand Deposits - Tabungan / Savings - Deposito Berjangka / Timed Deposits - Modal Saham / Share Capital

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 2021, tidak terdapat perubahan kebijakan yang memengaruhi kebijakan akuntansi.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

In 2021, there was no change in the accounting policy.



Sumber Daya Manusia

Human Resources

Dalam rangka untuk meningkatkan performa kualitas Perseroan, Bank Banten mengembangkan program Model Manajemen Talenta yang tertuang dalam *roadmap* SDM, Unit SDM ini merupakan penggabungan nilai kerja dan kompetensi yang bertujuan untuk mengembangkan bakat demi mencapai kinerja yang baik.

Oleh karena itu, Unit SDM pada tahun 2021 telah menyelaraskan seluruh program kerja SDM Perseroan dengan strategi Perseroan. Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal Perseroan saat ini menuntut pola manajemen talenta yang lebih spesifik, responsif, inovatif, adaptif, tangkas, dan terintegrasi terhadap segala perubahan tersebut. Hal ini penting dalam mendukung Perseroan untuk dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

PENGELOLAAN SDM TAHUN 2021

Dalam kerangka pengembangan Model Manajemen Talenta, sebagaimana tertuang dalam *roadmap* SDM, unit SDM menggabungkan nilai kerja dan kompetensi guna mengembangkan pangkalan bakat demi mencapai kinerja yang unggul.

PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN SDM

Berikut sejumlah program kerja pengembangan SDM yang dilaksanakan pada tahun 2021:

- Melaksanakan Rekrutmen SDM secara efektif dan efisien, dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhannya.
- Menyesuaikan Struktur Organisasi guna menyelaraskan dengan Rencana Strategis Bank.
- Melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Pendidikan baik *soft skills* maupun *hard skills*, khususnya pada bidang-bidang tertentu untuk mendukung kegiatan operasional dan akselerasi bisnis.
- Melaksanakan Transformasi Budaya Perusahaan "PANDAI" menjadi "TRUST"
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi *Character Building* & Internalisasi Budaya Perusahaan "TRUST" (*Think Different, Reliable, Universe, Sustainable and Track*)
- Melaksanakan *Workload Analysis* (WLA), pada setiap jabatan dalam struktur organisasi untuk mengetahui beban kerja atau GAP pada setiap jabatan.
- Melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi, khususnya sertifikasi yang bersifat *Mandatory* pada jabatan-jabatan tertentu.

Within the framework of Talent Management Model development, as stated in the HR roadmap, the HR Unit combines work values and competencies to develop a talent base in order to achieve excellent performance.

Therefore, in 2021, the HR Unit aligned all of the Company's HR work programs with the Company's strategy. The changes that occurred in the Company's external and internal environment currently required a talent management pattern that was more specific, responsive, innovative, adaptive, agile, and integrated to all these changes. This was important in supporting the Company to be able to continue to grow and develop in a sustainable manner.

HR MANAGEMENT IN 2021

Within the framework of Talent Management Model development, as stated in the HR roadmap, the HR unit combines work values and competencies to develop a talent base in order to achieve excellent performance.

HR DEVELOPMENT WORK PROGRAM

HR development work programs carried out in 2021 are as follows:

- Implementing HR Recruitment effectively and efficiently by adjusting to the conditions and needs.
- Adjusting the Organization Structure to be in line with the Bank's Strategic Plan.
- Carrying out training and education activities, both soft skills and hard skills, especially in certain fields to support operational activities and business acceleration.
- Implementing the Transformation of Corporate Culture from "PANDAI" to "TRUST"
- Conducting Character Building Socialization & Internalization of Corporate Culture "TRUST" (*Think Different, Reliable, Universe, Sustainable and Track*)
- Carrying out Workload Analysis (WLA) at each position in the organizational structure to determine the workload or GAP for each position.
- Carrying out training and certification activities, especially mandatory certification in certain positions.

- h. Melaksanakan Assessment bagi karyawan pada Level Jabatan (L1), (L2) dan (L3), guna mengukur dan mengetahui kompetensi karyawan termasuk bakat, minat dan motivasi kerja karyawan.
- i. Melakukan pengembangan sistem aplikasi penilaian kinerja secara digital (*Performance Evaluation Digital/ PEDIG*), untuk dapat digunakan pada Penilaian Kinerja di tahun 2021.
- j. Melaksanakan Program Mutasi, Rotasi dan Promosi Jabatan sebagai bagian dari peningkatan fungsi internal control dan pengembangan karir karyawan.
- k. Mengembangkan *Talent Management* dengan melaksanakan Banten *Leadership Program* bagi Calon Kepala Bagian/Kepala Cabang maupun Kepala Divisi.
- l. Menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Program Pensiun Dini Sukarela (PPDS), dalam upaya mendukung transformasi perusahaan, mendukung rencana strategis Bank seiring dengan Program Transformasi Digital, khususnya pada Produk & Layanan Digital Banking dan Digital Marketing, memberikan kesempatan bagi karyawan yang akan mengembangkan karir di luar perusahaan, serta untuk meningkatkan efisiensi Biaya Tenaga Kerja (BTK).
- m. Melakukan pengembangan pada *Human Capital Information System* (HCIS).
- n. Mengembangkan dan melaksanakan *reward & punishment*.
- o. Meningkatkan fungsi *three lines of defence* sehingga dapat mencegah upaya penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- p. Pengembangan Materi Silabus Pendidikan dan Pelatihan sesuai standar SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).
- q. Pembentukan pengurus *Inside Banteners* dalam mendukung kegiatan di bidang Olahraga, Kesenian & Kebudayaan dan Sosial Keagamaan.
- r. Mengelola seluruh tenaga alih daya untuk menunjang operasional perusahaan secara efektif dan efisien.
- s. Membentuk Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Banten (YKPBB).
- t. Membentuk Koperasi Karyawan.
- u. Memperluas kerjasama Alih Daya untuk mendukung kegiatan pemasaran *Funding* dan *Lending*.
- v. Memberikan pelatihan bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun.
- w. Meningkatkan peran semua Pimpinan Unit Kerja dalam mendukung penerapan Prinsip *Know Your Employee* (KYE).
- h. Carrying out assessments for employees at the Position Level (L1), (L2) and (L3), in order to measure and determine employee competencies including talents, interests and work motivation of employees.
- i. Developing a digital performance appraisal application system (*Performance Evaluation Digital/ PEDIG*), to be used in Performance Assessment in 2021.
- j. Implementing the Transfer, Rotation and Promotion Program as part of improving the internal control function and employee career development.
- k. Developing Talent Management by implementing the Banten Leadership Program for Candidates for Section Heads/Branch Heads and Division Heads.
- l. Establishing and implementing the Voluntary Early Retirement Program (PPDS) Policy, in an effort to support the company's transformation, support the Bank's strategic plan in line with the Digital Transformation Program, particularly in Digital Banking and Digital Marketing Products & Services, providing opportunities for employees who will develop careers outside the Company, as well as to improve the efficiency of Labor Costs (BTK).
- m. Developing the Human Capital Information System (HCIS).
- n. Developing and implementing reward & punishment.
- o. Improving the function of the three lines of defense so as to prevent attempts to deviate from applicable policies and procedures.
- p. Development of Education and Training Syllabus Materials according to SKKNI standards (Indonesian National Work Competency Standards).
- q. The formation of the Inside Banteners board to support activities in the fields of Sports, Arts & Culture and Religious Social Affairs.
- r. Managing all outsourced personnel to support the company's operations effectively and efficiently.
- s. Establishing Bank Banten Employee Welfare Foundation (YKPBB).
- t. Establishing an Employee Cooperative.
- u. Expanding Outsourcing cooperation to support Funding and Lending marketing activities.
- v. Providing training for employees who will enter the retirement preparation period.
- w. Increasing the role of all Work Unit Leaders in supporting the implementation of Know Your Employee (KYE) Principles.



- x. Bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Banten (YKPBB) menyelenggarakan penghimpunan Dana Sosial, Dana Keagamaan dan Dana Kemanusiaan sebagai bagian dalam pelaksanaan Budaya TRUST, yang diharapkan dapat mendekatkan Bank Banten dengan lingkungan dan masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perubahan-perubahan dari masalah operasional menjadi strategis, kuantitatif menjadi kualitatif, mengatur menjadi kerja sama, jangka pendek menjadi jangka panjang, administratif menjadi konsultatif, orientasi fungsi menjadi orientasi bisnis, fokus internal menjadi fokus pelanggan, reaktif menjadi proaktif, fokus aktivitas menjadi fokus pemecahan, merupakan peran SDM saat ini.

KEBIJAKAN SDM

Secara garis besar kebijakan SDM terbagi ke dalam empat kunci pokok peran SDM, yaitu:

1. Manajemen SDM yang strategis (mitra strategis)
Mengubah strategi bisnis ke dalam praktik SDM membantu bisnis dalam tiga hal:
 - a. Bisnis mampu beradaptasi terhadap perubahan karena waktu dari konsepsi ke eksekusi menjadi lebih singkat.
 - b. Bisnis dapat lebih memenuhi permintaan pelanggan karena strategi layanan SDM dapat diterjemahkan kedalam kebijakan dan praktik yang spesifik
 - c. Bisnis dapat mencapai performa finansial melalui eksekusi strategi yang efektif
2. Manajemen infrastruktur perusahaan (ahli administrasi)

Menciptakan infrastruktur organisasi adalah peran tradisional dari SDM. Peran dari SDM harus meyakinkan bahwa proses-proses dalam organisasi berjalan sesuai dengan desain yang efektif seperti penempatan staf, pelatihan, ganjaran & hukuman, maupun hal lain yang berhubungan dengan karyawan dalam organisasi. Manajemen infrastuktur perusahaan tidak bisa dipandang sebelah mata karena fungsi ini merupakan praktik sehari-hari bagian SDM yang karenanya juga disebut peran operasional SDM.

3. Manajemen kontribusi perusahaan (karyawan juara)

Karyawan merupakan elemen kunci dalam implementasi strategi perusahaan. Oleh karena itu, keberhasilan SDM dalam memainkan peran strategisnya bagi perusahaan dapat dilihat dari perilaku karyawannya. SDM harus menjadi pendorong karyawan dengan menjalankan

- x. In collaboration with the Bank Banten Employee Welfare Foundation (YKPBB) to organize a collection of Social Funds, Religious Funds and Humanitarian Funds as part of the implementation of the TRUST Culture, which is expected to bring Bank Banten closer to the environment and the surrounding community in particular and the Indonesian people in general.

Changes from operational problems to strategic, quantitative to qualitative, organizing into cooperation, short term to long term, administrative to consultative, function orientation to business orientation, internal focus to customer focus, reactive to proactive, focus of activities to focus on solving, are the current role of HR.

HR POLICY

In general, HR policies are divided into four main key roles of HR, which are:

1. Strategic HR management (strategic partners)
Turning business strategy into HR practices helps businesses in three ways:
 - a. Businesses are able to adapt to change because the time from conception to execution is shorter.
 - b. Businesses can better meet customer demands because HR service strategies can be translated into specific policies and practices.
 - c. Businesses can achieve financial performance through effective strategy execution
2. Company infrastructure management (administrative expert)
Creating an organizational infrastructure is the traditional role of HR. The role of HR must ensure that the processes in the organization performed according to an effective design such as staffing, training, rewards & punishments, as well as other matters relating to employees in the organization. The Company's infrastructure management should not be underestimated as this function is a daily practice for the HR department, hence why it is also called as HR operational role.
3. Management of company contributions (champion employees)
Employees are a key element in the implementation of company strategy. To that end, the success of HR in its strategic role for the company can be seen from employee behavior. HR must be the driver of employees by carrying out the role of contribution management,

peran manajemen kontribusi, dengan terlibat langsung dalam masalah-masalah harian serta sangat peduli dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan karyawan dalam upayanya mencapai kesuksesan organisasi.

4. Manajemen transformasi dan perubahan (agen perubahan)

Transformasi meliputi perubahan budaya dasar yang terjadi dalam perusahaan. Perubahan yang dirancang haruslah mengarah pada kemampuan perusahaan untuk mendesain dan menerapkan ide-ide atau inisiatif serta mengurangi perputaran waktu dalam semua aktivitas organisasi. Terkait hal ini, sumber daya manusia membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan menerapkan proses-proses perubahan yang diperlukan.

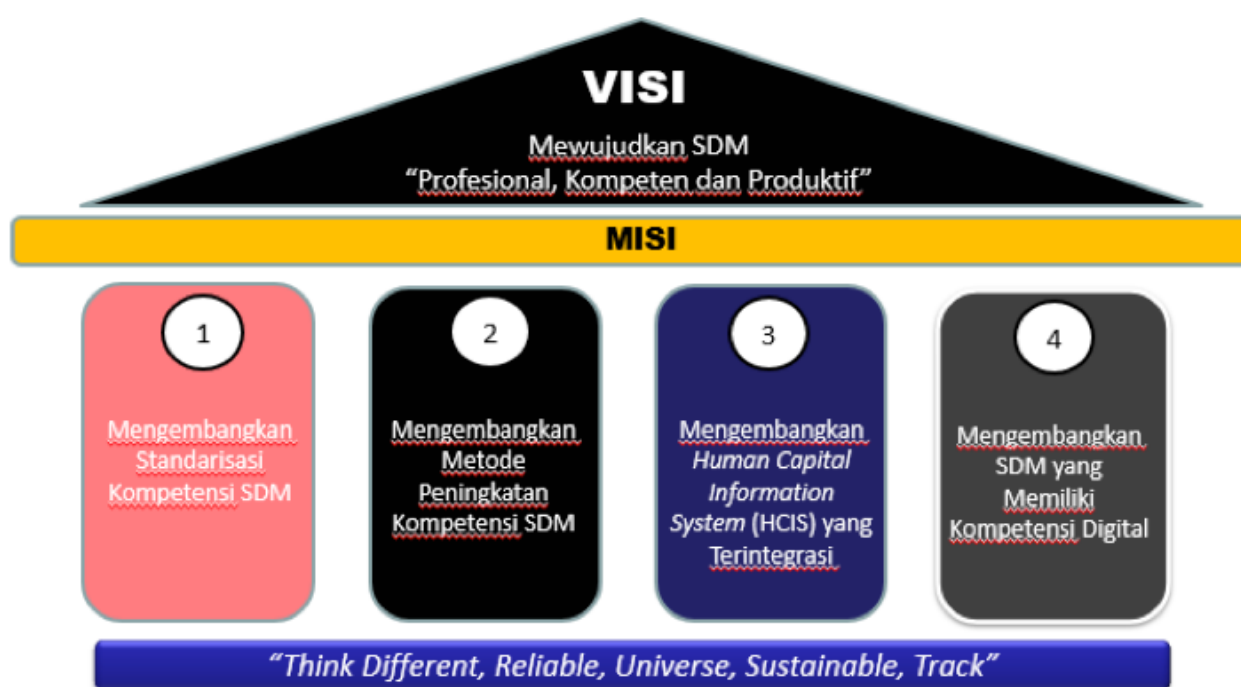
by being directly involved in daily problems and being very concerned about and paying attention to the needs of employees in their efforts to achieve organizational success.

4. Management of transformation and change (change agents)

Transformation includes changes in the basic culture that occur within the company. The changes that are designed must lead to the company's ability to design and implement ideas or initiatives and reduce the turnaround time in all organizational activities. In this regard, human resources assist organizations in identifying and implementing the necessary change processes.

Dalam upaya mendukung terwujudnya pusat sumber daya manusia unggul, maka Perseroan wajib Menyusun kebijakan yang meliputi delapan pilar SDM sebagaimana kerangka berikut:

In an effort to support the creation of a center for excellent human resources, the Company is obliged to formulate a policy covering eight pillars of HR as follows:



Misi: / Mission:

1. Mengembangkan Standarisasi Kompetensi SDM / Develop HR Competency Standards

- Menyusun Kamus Kompetensi SDM / Develop HR Competency Dictionary
- Menyusun Standar Kompetensi / Develop Competency Standards
- Memetakan kebutuhan Sertifikasi Kompetensi SDM / Map HR Competency Certification needs

2. Mengembangkan Metode Peningkatan Kompetensi SDM / Develop Methods to Improve HR Competence

- Menyusun Program Pengembangan Kompetensi SDM / Develop HR Competency Development Program
- Mengembangkan metode pembelajaran Pengembangan SDM / Develop learning methods for HR Development
- Melaksanakan Pengembangan SDM secara berkelanjutan / Implement HR Development in a sustainable manner

Misi: / Mission:

3. Mengembangkan Human Capital Information System (HCIS) yang Terintegrasi / Develop an Integrated Human Capital Information System (HCIS)

- Menyusun Program Pengembangan HCIS / Develop HCIS Development Program
- Mensosialisasikan Fungsi HCIS / Disseminate the HCIS Function
- Memastikan Management Self Services (MSS) dan Employee Self Services (ESS) berjalan efektif /
Ensure that Management Self Services (MSS) and Employee Self Services (ESS) are running effectively

4. Mengembangkan SDM yang Memiliki Kompetensi Digital / Develop Human Resources with Digital Competence

- Mengidentifikasi Kebutuhan Digital Talent / Identify Digital Talent Needs
- Mendorong Penyelarasan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dengan Kompetensi terkait Digital. /
Encourage Alignment of Education and Training Curriculum with Competencies related to Digital.
- Melaksanakan Pengembangan Kemampuan Digital. / Implement Digital Capability Development.

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM PADA 2021

Pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan SDM merupakan prioritas utama Perseroan. Hal ini pula yang menjadi salah satu langkah strategis Perseroan dalam meningkatkan kompetensi SDM guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kualitas dan produktivitas kinerja meningkat.

Menuju pemulihan ekonomi akibat pandemic Covid-19, Unit SDM melakukan strategi pengembangan Human Capital sebagai berikut :

1. *Enhancing current capabilities* ditujukan untuk *current position* melalui peningkatan kapabilitas pegawai untuk dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal.
2. *Job shifting* yaitu pergeseran kapabilitas pegawai, perubahan *job*, sebagai dampak perubahan strategi, arah bisnis perusahaan (fungsi berkurang/hilang).
3. *Building new capabilities* yaitu pembentukan kapabilitas masa depan bagi karyawan untuk mendukung strategi Bank dan mengubah ketidakpastian menjadi peluang.
4. *Digital mindset* merupakan perubahan *mindset* & pola kerja berbasis *learning agility, innovation, data driven, collaborative & human centric*.

ROADMAP PENGEMBANGAN SDM PADA 2021

Sesuai *Roadmap* SDM 2021, Unit SDM telah melaksanakan uji coba pengembangan Model Manajemen Talenta dengan menggabungkan nilai kinerja dan kompetensi yang terintegrasi dalam rangka penciptaan pangkalan bakat. Hal ini diharapkan akan mendorong daya saing, tata kelola Perseroan yang lebih baik, serta kinerja bisnis yang unggul.

HR DEVELOPMENT STRATEGY IN 2021

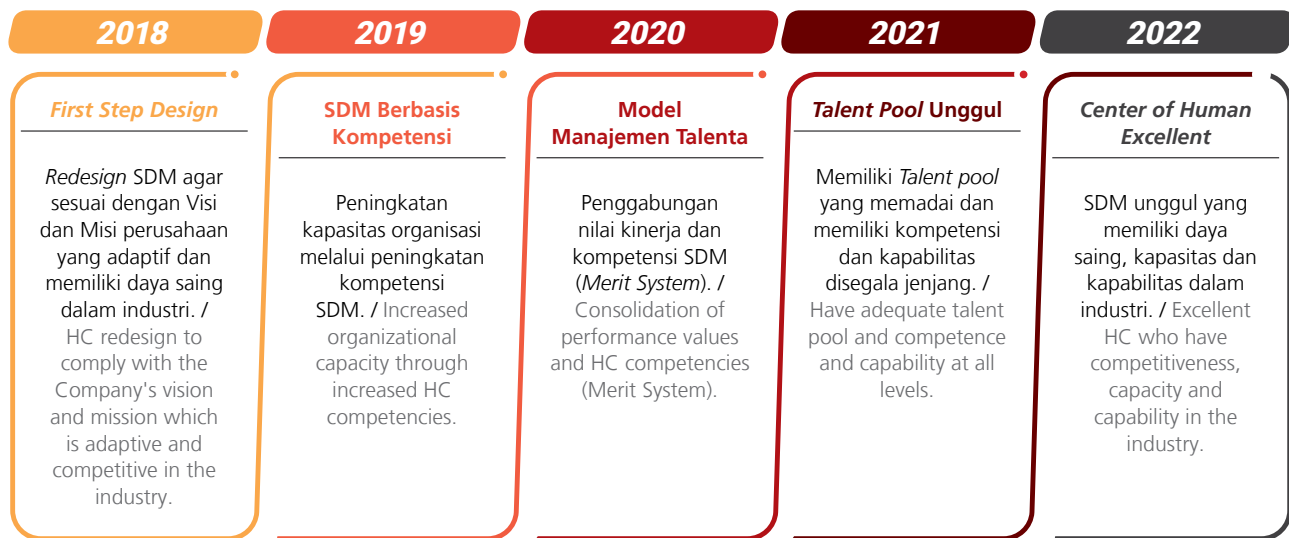
The HR management and development programs are the Company's top priority. This is also one of the Company's strategic steps in increasing the competence of human resources to support the implementation of duties and responsibilities of the job, hence increases the work quality and productivity.

In moving towards the economic recovery after Covid-19 pandemic, HR Unit conducted the following Human Capital development strategies:

1. Enhancing current capabilities is intended for current position by increasing employee capabilities to be able to carry out their functions more optimally.
2. Job shifting, namely shifting employee capabilities, job changes, as a result of changes in strategy, company business direction (reduced/lost functions).
3. Building new capabilities, namely the formation of future capabilities for employees to support the Bank's strategy and turn uncertainty into opportunities.
4. Digital mindset is a change in mindset & work patterns based on learning agility, innovation, data driven, collaborative & human centric.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ROADMAP IN 2021

In accordance with the 2021 HR Roadmap, the HR Unit carried out trials of developing a Talent Management Model by combining integrated performance and competency values in the context of creating a talent base. This action was expected to encourage competitiveness, better corporate governance, and superior business performance.



Berikut adalah sejumlah kebijakan yang dibuat untuk mendukung perencanaan *roadmap* SDM pada 2021:

The following are provisions and/or policies made to support the HR Roadmap in 2020:

No	HC Transformation	No SK / Decree	Keterangan / Description
1	Kebijakan Human Capital & Transformasi / Human Capital & Transformation Policy	578/SK/DIR-BB/XII/21	On Process
2	Kebijakan Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain (Alih Daya) / Policy on Delegation of Work Implementation to Other Parties (Outsourcing)	586/SK/DIR-BB/XII/21	On Process
3	SOP Penerapan Know Your Employee (KYE) / SOP for the Implementation of Know Your Employee (KYE)	580/SK/DIR-BB/XII/21	On Process
4	Remunerasi Bagi Karyawan / Remuneration for Employees	584/SK/DIR-BB/XII/21	On Process
5	Promosi, Mutasi Dan Rotasi Karyawan / Employee Promotion, Transfer and Rotation	579/SK/DIR-BB/XII/21	Done
6	Pendidikan dan Pelatihan / Education and Training	582/SK/DIR-BB/XII/21	On Process
7	Pemilihan, Pengangkatan, Penggantian, Penunjukan Sementara dan Pemberhentian Pejabat Eksekutif / Election, Appointment, Replacement, Temporary Appointment and Dismissal of Executive Officers	581/SK/DIR-BB/XII/21	Done
8	SOP Penunjukan Pejabat Sementara / SOP for Appointment of Acting Officials	583/SK/DIR-BB/XII/21	Done
9	SOP Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain (Alih Daya) / SOP for Submission of Work Implementation to Other Parties (Outsourcing)	590/SK/DIR-BB/XII/21	On Process
10	SOP Rekrutmen dan Penerimaan Karyawan / SOP for Recruitment and Recruitment of Employees	020/SK/DIR-BB/I/22	On Process
11	Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk / Organizational Structure of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	523/SK/DIR-BB/X/21	Done
12	Nilai-Nilai Budaya Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk / Corporate Culture of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	491/SK/DIR-BB/VIII/21	Done

Secara berkesinambungan, Unit SDM juga melakukan hal berikut:

1. Rekrutmen
Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memadai dan berkompetensi unggul, Perseroan mengembangkan strategi rekrutmen secara efektif dan efisien. Metode dan Teknik rekrutmen yang digunakan untuk mencapai hal tersebut antara lain dengan metode wawancara perilaku dan penilaian kepribadian sesuai

On an ongoing basis, the HR Division also does the following:

1. Recruitment
The Company has developed an effective and efficient recruitment strategy to fulfill the needs of adequate and competent human resources. Recruitment methods and techniques used to achieve this include the behavioral interview method and personality assessment according to the level of the position. In recruiting candidates,

dengan level jabatannya. Sementara untuk menjangkau kandidat, Perseroan menggunakan pendekatan seperti membuat pengumuman internal perihal posisi lowongan, perekrutan kampus, wawancara langsung, referensi, bursa kerja, dan jasa portal rekrutmen.

Dalam pemenuhan kebutuhan jumlah SDM, Perseroan merujuk pada perencanaan tenaga kerja berdasarkan estimasi perhitungan jumlah karyawan pensiun, pergantian karyawan, dan ekspansi jaringan usaha. Pada tahun 2021, Perseroan merekrut sebanyak 162 karyawan baru. Secara rinci, berikut data mengenai rekrutmen yang dilakukan sepanjang 2021:

Kategori / Category	2021	2020
Masa Percobaan/Tetap / Probation Period/Permanent	21	0
Kontrak / Contracted	141	40
Tenaga Ahli / Expert Services	0	2
Total / Total	162	42

2. Pengembangan SDM Bertalenta & Karir

Untuk memenuhi kebutuhan struktur organisasi, Unit SDM telah melakukan upaya identifikasi profil kompetensi dan kinerja karyawan. Pembuatan profil karyawan tersebut bertujuan untuk memetakan penempatan SDM sesuai dengan pekerjaannya, serta sesuai dengan organisasi.

Lebih jauh, pengelolaan manajemen talenta dilaksanakan melalui sistem jenjang karir baik melalui rotasi, mutasi, promosi, dan demosi yang terukur untuk menimbulkan dampak terhadap peningkatan kapabilitas dan kinerja organisasi. Berikut rekam jejak terkait perubahan jenjang karier karyawan selama tahun 2021:

No	Kategori / Category	Jumlah / Total
1	Mutasi / Mutation	485
2	Promosi Grade / Grade Promotion	77
3	Promosi Jabatan / Position Promotion	20
4	Rotasi / Rotation	133
Total / Total		715

3. Pengembangan Kompetensi SDM

Seperti yang telah diuraikan pada kebijakan SDM, program kerja Unit SDM pada tahun buku 2020 akan berfokus pada peran pokok SDM sebagai mitra strategis dalam mendukung kinerja Perseroan, serta menerapkan manajemen kontribusi dari karyawan.

the Company uses approaches such as making internal announcements regarding vacant positions, campus recruitment, direct interviews, references, job fairs, and recruitment portal services.

In meeting the needs for the number of human resources, the Company refers to the workforce planning based on the estimated calculation of the number of retired employees, employee turnover, and business network expansion. In 2021, the Company recruited 162 new employees. The followings are details of the data on recruitments conducted in 2021:

2. Talent Management & Career Development

To meet the needs of the organizational structure, the HR Unit has made efforts to identify employee competency and performance profiles. Making employee profiles aims to map the placement of human resources according to their jobs, as well as in accordance with the organization.

Furthermore, talent management is carried out through a career path system through measurable rotations, transfers, promotions, and demotions to improve organizational capabilities and performance. The followings are the records on the changes in employee career paths during 2021:

3. HR Competency Development

As described in the HR policy, the HR Unit work program for the 2020 financial year will focus on the main role of HR as a strategic partner in supporting the Company's performance, as well as implementing employee contribution management.



Beberapa program kerja yang terkait dengan program pengembangan kompetensi SDM, yaitu:

- Melaksanakan sistem pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi sesuai cetak biru pendidikan dan pelatihan.
- Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan melalui pemerataan Pendidikan dan pelatihan bagi seluruh karyawan.

Several work programs related to HR competency development program were:

- Implement a competency-based education and training system in accordance with the education and training blueprint.
- Improving education and training governance through equitable education and training for all employees.

Dengan program-program yang telah direncanakan tersebut, sepanjang 2021 Perseroan menggelar sejumlah pelatihan dan/atau pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

With these planned programs, throughout 2021, the Company held several trainings and/or educations with the following details:

Pendidikan Umum General Education

No	Jenis Pendidikan / Education Types	Jumlah Peserta / Participants
1	Training Pembinaan Kerohanian Karyawan Bank Banten / Spiritual Development Training for Bank Banten Employee	Semua Karyawan / All Employees
2	<i>Executive Coaching</i>	7
3	Focus Group Discussion Terbatas Area Banten: <i>Rebuild The Trust, Reach The Glory</i>	30
4	<i>Focus Group Discussion Culture Transformation</i> Bank Banten 2021	30
5	Webinar <i>Cyber Crime Typology & Cross Money Laundering</i>	2
6	<i>Training Employee Engagement Strategy</i>	26
7	Webinar Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme / Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Financing Webinar	1
8	Penandatanganan Pakta Integritas & Pengarahan Direksi / Integrity Pact Signing & Directors Briefing	68
9	<i>Training Fundamental Corporate Secretary</i>	26
10	<i>Training Public Relation & Corporate Communication</i>	1
11	Character Building Budaya Perusahaan / Corporate Culture Character Building	937
12	<i>Training Be Extraordinary You</i>	1
13	Sosialisasi Pedoman Program Pengunduran Diri Sukarela (PPDS) / Socialization of Voluntary Resignation Program Guidelines (PPDS)	Semua Karyawan / All Employees
14	Sharing Knowledge Kantor Cabang Rangkasbitung / Sharing Knowledge of Rangkasbitung Branch Office	26
15	Seminar Implementasi Nilai Kemerdekaan Indonesia Untuk Banteners / Seminar on Implementation of Indonesian Independence Values for Banteners	Semua Karyawan / All Employees
16	Sosialisasi Budaya Manajemen Risiko / Socialization of Risk Management Culture	237
17	Sosialisasi Budaya Kepatuhan & APU-PPT / Socialization of Compliance Culture & APU-PPT	308
18	Sosialisasi Audit Anti Fraud / Anti-Fraud Audit Socialization	305
19	<i>Training Digital Leadership</i>	50
20	<i>Training Building Smart Team Work</i>	8
21	<i>Webinar Corporate Restructuring - Enhancing Economic and Social Value</i>	3
22	Training Reviu Pedoman Perhitungan Remunerasi, Penerapan Malus, dan Clawback pada Top Level Management / Training on Review Guidelines for Remuneration Calculation, Application of Malus, and Clawback at Top Level Management	3
23	Training Best Practice Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Efektif / Best Practice Training for the Implementation of Effective Procurement of Goods and Services	12
24	Training Dasar-Dasar Perpajakan Pegawai BPD / Basics Tax Training for BPD Employee	1
25	Training Strategi Bisnis Kantor Cabang Balaraja / Balaraja Branch Office Business Strategy Training	16
26	Training Implementasi PP No. 35 Tahun 2021 / Training on Implementation of PP No. 35 of 2021	10



Pendidikan Umum
General Education

No	Jenis Pendidikan / Education Types	Jumlah Peserta / Participants
27	Rapat Tindak Lanjut Persiapan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) / Follow-up Meeting on Regional Government Information System Implementation (SIPD)	2
28	Training Enterprise Risk Management / Enterprise Risk Management Training	1
29	Training Implementasi PSAK 73 / PSAK 73 Implementation Training	22
30	Training Account Officer Development Program – Konsumer / Training on Account Officer Development Program - Consumer	106
31	Efektifitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank Menuju Era Pengaturan Principle Based / The Effectiveness of Supervision of the Board of Commissioners in Maintaining Bank Compliance Towards the Era of Principle Based Regulation	1
32	<i>Training Introducing and Principles of Investor Relations</i>	2
33	Training Account Officer Development Program - Komersial & UMKM / Account Officer Development Program Training - Commercial & MSME	28
34	Training Stress Testing: Teknik Melakukan Stress Testing For Banking Market & Liquidity Risk Management / Stress Testing Training: Techniques for Stress Testing For Banking Market & Liquidity Risk Management	3
35	Training Deteksi Operasional Dan Stress Test Modal Dalam Menguji Akurasi Manajemen Risiko Operasional / Operational Detection and Capital Stress Test Training in Testing Operational Risk Management Accuracy	2
36	Training Funding Officer Development Program - Pemasaran Dana Jasa / Training on Funding Officer Development Program - Fund Marketing	22
37	Training Titik Risiko Verifikasi Dokumen Kredit / Loan Document Verification Risk Point Training	29
38	Pembekalan Calon Teller Payment Point / Provision of Prospective Payment Point Tellers	53
39	Workshop Audit Internal & Audit Forensik / Internal Audit & Forensic Audit Workshop	1
40	Webinar Manajemen Risiko / Risk Management Webinar	285
41	Sosialisasi dan Refreshment ketentuan Kliring Bank Indonesia / Socialization and Refreshment of Bank Indonesia Clearing Regulations	6
42	Training Strategy Pengelolaan Likuiditas Bank / Bank Liquidity Management Strategy Training	5
43	<i>Training Fundamental Development Program Credit Analysis</i>	31
44	Webinar Transformasi Perbankan Digital dengan Pemanfaatan Open Application Programming Interface (API) / Webinar on Digital Banking Transformation by Utilizing Open Application Programming Interface (API)	3
45	Training Interpretasi Regulasi Dan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kepatuhan Bank / Training on Regulatory Interpretation and Optimization of Bank Compliance Duties and Functions	2
46	<i>Training Fundamental Macroeconomics</i>	3
47	Training Sertifikasi Microsoft Excel / Microsoft Excel Certification Training	20
48	Training Pemeriksaan Single Customer View (SCV) / Single Customer View (SCV) Examination Training	1
49	<i>Training Need Analysis</i>	3
50	Training Transformasi Digital Banking / Digital Banking Transformaiton Training	29
51	<i>Training Fundamental HR Basic Management</i>	1
52	Training Treasury, Risiko Dan Penyelesaian Transaksi / Training on Treasury, Risk and Transaction Settlement	15
53	Training Manajemen Penyelesaian Kredit Bermasalah / Non-performing Loans Management Training	20
54	Sosialisasi Produk Taspen dan Office Channeling / Socialization of Taspen Product and Office Channeling	27
55	<i>Training Enterprise Risk Management</i>	2
56	Workshop Kepala Cabang Area Banten: Berperan Aktif Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Banten Tahun 2022 / Workshop for Banten Area Branch Heads: Playing an Active Role in Economic Growth in Banten in 2022	10

Pendidikan Khusus Special Education

No	Jenis Pendidikan / Education Types	Jumlah Peserta / Participants
1	Sertifikasi Manajemen Risiko / Risk Management Certification	71
2	Sertifikasi Audit Internal Bank / Bank Internal Audit Certification	14
3	Sertifikasi Kepatuhan / Compliance Certification	4
4	Treasury	1

Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2021 Perseroan telah menyelenggarakan 57 pelatihan umum yang menjangkau serta 4 pelatihan khusus yang menjangkau karyawan untuk mendukung program peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, selain program perekrutan karyawan baru dan pembinaan karyawan yang ada, Unit SDM juga telah memberhentikan sebanyak 134 karyawan pada tahun 2021. Berikut datanya:

Overall, throughout 2021, the Company held 57 general training that reached out and 4 special trainings that reached out to employees to support HR quality improvement programs. Meanwhile, in addition to the program for recruiting new employees and coaching existing employees, HR Unit also laid off 134 employees in 2021. The following is the data:

Keterangan / Description	Jumlah / Total
Pensiun / Retired	2
Mengundurkan diri / Resigned	126
PHK / Terminated	4
Meninggal Dunia / Passed Away	2
Total / Total	134

RENCANA PENGEMBANGAN SDM 2022

Program pengembangan SDM pada 2022 diselaraskan dengan perkembangan strategi perusahaan dalam menghadapi momentum baru pemulihan ekonomi. Program pendidikan dan pelatihan akan mengadopsi kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan baru, selain kompetensi inti yang telah ditetapkan.

Berikut strategi pengembangan SDM Perseroan:

- Enhancing current capabilities**, ditujukan untuk *current position* melalui peningkatan kapabilitas pegawai untuk dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal.
- Job shifting**, yaitu pergeseran kapabilitas pegawai, perubahan job, sebagai dampak perubahan strategi, arah bisnis perusahaan (fungsi berkurang/hilang).
- Building new capabilities**, yaitu pembentukan kapabilitas masa depan bagi karyawan untuk mendukung strategi Bank dan mengubah ketidakpastian menjadi peluang.
- Digital mindset**, merupakan perubahan *mindset* & pola kerja berbasis *learning agility, innovation, data driven, collaborative & human centric*.

HR DEVELOPMENT PLAN IN 2022

The HR development program in 2022 is aligned with the development of the company's strategy in welcoming the digital banking era. The education and training program will adopt the competencies needed in encountering digital banking, in addition to the predetermined core competencies.

The followings are the Company's HR development strategies:

- Enhancing current capabilities**, aimed at current positions by increasing employee capabilities to be able to carry out their functions more optimally.
- Job shifting**, namely shifting employee capabilities, job changes, as a result of changes in strategy, company business direction (reduced/lost functions).
- Building new capabilities**, namely the formation of future capabilities for employees to support the Bank's strategy and turn uncertainty into opportunities.
- Digital mindset**, a change in mindset & work patterns based on *learning agility, innovation, data driven, collaborative & human centric*.



Adapun rencana pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan dalam cetak biru perusahaan adalah sebagai berikut:

The plans for implementing education and training programs in 2022, as stipulated in the company's blueprint, are as follows:

I. Pengenalan Perbankan

I. Introduction to Banking

No	Program / Program	Durasi Waktu / Duration	Target Peserta / Participant Target
1	Pengenalan Perbankan Batch 1 / Introduction on Banking Batch 1	3 Hari / 3 days	60 Peserta / 60 participants
2	Pengenalan Perbankan Batch 2 / Introduction on Banking Batch 2	3 Hari / 3 days	60 Peserta / 60 participants
3	Pengenalan Perbankan Batch 3 / Introduction on Banking Batch 3	3 Hari / 3 days	60 Peserta / 60 participants

II. Pelatihan Bidang Bisnis dan Supporting

II. Business and Supporting Training

No	Program / Program	Durasi Waktu / Duration	Target Peserta / Participant Target
1	Brevet Tax	Sesuai Kebutuhan / As needed	10
2	Pajak & Sengketa Pajak / Taxes and Tax Disputes	Sesuai Kebutuhan / As needed	10
3	Sistem Akuntansi & Pelaporan Bank / Bank Accounting & Reporting System	Sesuai Kebutuhan / As needed	10
4	Corporate Financial Analysis	Sesuai Kebutuhan / As needed	8
5	Anti Fraud	Sesuai Kebutuhan / As needed	13
6	Audit It	Sesuai Kebutuhan / As needed	13
7	Audit Treasury	Sesuai Kebutuhan / As needed	13
8	Dasar Audit Perbankan / Basic Banking Audit	Sesuai Kebutuhan / As needed	40
9	Teknik Pengendalian Kecurangan Dan Whistleblower System (Wbs) / Fraud Control Techniques And Whistleblower System (Wbs)	Sesuai Kebutuhan / As needed	30
10	Kontrol Internal Cabang (Advance) / Branch Internal Control (Advanced)	Sesuai Kebutuhan / As needed	27
11	Kontrol Internal Cabang (Basic) / Branch Internal Control (Basic)	Sesuai Kebutuhan / As needed	27
12	Marketing Funding Officer Dasar / Basic Marketing Funding Officer	Sesuai Kebutuhan / As needed	60
13	Marketing Funding Officer Lanjutan / Advanced Marketing Funding Officer	Sesuai Kebutuhan / As needed	60
14	Marketing Sales Planning	Sesuai Kebutuhan / As needed	60
15	Pengembangan Produk Dana & Jasa / Funds & Services Product Development	Sesuai Kebutuhan / As needed	5
16	Pengembangan Digital Banking, Security & Qa / Development of Digital Banking, Security & Qa	Sesuai Kebutuhan / As needed	5
17	Career Management	Sesuai Kebutuhan / As needed	3
18	Human Resources Basic	Sesuai Kebutuhan / As needed	17
19	Talent Management	Sesuai Kebutuhan / As needed	3
20	Training Need Analysis (Tna)	Sesuai Kebutuhan / As needed	4
21	Apu-Ppt	Sesuai Kebutuhan / As needed	4
22	Fungsi Kepatuhan & Pengawasan Internal Bank / Bank's Internal Compliance and Audit Function	Sesuai Kebutuhan / As needed	5
23	Hukum Perbankan Dan Apu-Ppt / Banking Law and AML-CFT	Sesuai Kebutuhan / As needed	10
24	Penyusunan Ketentuan Internal Bank / Preparation of Bank Internal Provisions	Sesuai Kebutuhan / As needed	11
25	Analisa Kredit Komersial Dasar / Basic Commercial Credit Analysis	Sesuai Kebutuhan / As needed	10
26	Analisa Kredit Komersial Lanjutan / Advanced Commercial Credit Analysis	Sesuai Kebutuhan / As needed	5
27	Analisa Kredit Korporasi/Bpr / Corporate/Bpr Credit Analysis	Sesuai Kebutuhan / As needed	3
28	Analisa Kredit Sindikasi / Syndicated Credit Analysis	Sesuai Kebutuhan / As needed	5



No	Program / Program	Durasi Waktu / Duration	Target Peserta / Participant Target
29	Manajemen Kredit (<i>Credit Management</i>)	Sesuai Kebutuhan / As needed	15
30	<i>Office Channeling</i> PT Taspen	Sesuai Kebutuhan / As needed	35
31	Analisis Risiko Kredit / <i>Credit Risk Analysis</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	4
32	<i>Credit Risk Modelling</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	6
33	Manajemen Risiko Operasional / <i>Operational Risk Management</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	4
34	<i>It Risk Management</i> (ITRM)	Sesuai Kebutuhan / As needed	15
35	<i>Credit Risk Reviewer</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	5
36	Operasional Bank / <i>Bank Operation</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	60
37	Penilaian Agunan (<i>Appraisal</i>)	Sesuai Kebutuhan / As needed	4
38	Administrasi Kredit & Bisnis Legal Dasar / <i>Basic Legal Business & Credit Administration</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	25
39	Administrasi Kredit & Bisnis Legal Lanjutan / <i>Advanced Legal Credit & Business Administration</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	10
40	SKNBI/Kliring / <i>SKNBI/Clearing</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	4
41	<i>Corporate Plan</i> Transformasi BPD	Sesuai Kebutuhan / As needed	4
42	<i>Strategic Planning & Effective Corporate Budgeting</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	4
43	Analisa Restrukturisasi Kredit / <i>Credit Restructuring Analysis</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	25
44	Lelang Asset Jaminan Kredit / <i>Credit Guarantee Asset Auction</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	25
45	Penyelesaian Kredit Bermasalah NPL / <i>Settlement of Non-Performing Loans</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	25
46	Teknik Penagihan Kredit & Hapus Buku / <i>Credit Collection Techniques & Write-off</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	40
47	Aspek Hukum & Kasus Hukum Dalam Kredit Proyek Konstruksi / <i>Legal Aspects & Legal Cases in Construction Project Loans</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	5
48	Aspek Hukum Perkreditan & Sindikasi / <i>Legal Aspects of Credit and Syndication</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	5
49	<i>Corporate Secretary</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	18
50	Dasar Hukum Perkreditan / <i>Basic Credit Law</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	5
51	<i>Legal Drafting</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	5
52	Mekanisme Protokoler, Upacara & MC / <i>Protocol, Ceremonial & Mc Mechanisms</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	6
53	Kesekretariatan (Kantor Pusat & Kantor Cabang) / <i>Secretariat (Head Office & Branch Office)</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	50
54	<i>IT Development & Service Help Desk TI</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	16
55	<i>IT Security</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	16
56	<i>Asset dan Liabilities Management</i> (ALMA) / <i>Asset and Liabilities Management</i> (ALMA)	Sesuai Kebutuhan / As needed	10
57	Pasar Modal dan Pasar Uang / <i>Capital Market And Money Market</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	10
58	<i>Treasury & Trade Finance</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	10
59	<i>Treasury Advance</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	4
60	<i>Treasury Basic</i>	Sesuai Kebutuhan / As needed	8

III. Program Pengembangan Kompetensi Manajerial

III. Managerial Competence Development Program

No	Program / Program	Durasi Waktu / Duration	Target Peserta / Participant Target
1	<i>Banteners Leadership Program</i>	14 Hari / 14 days	25 Peserta / 25 participants
2	<i>Banteners Supporting Program</i>	14 Hari / 14 days	25 Peserta / 25 participants
3	<i>Support Development Program</i>	14 Hari / 14 days	25 Peserta / 25 participants

IV. Program Sertifikasi Keahlian Profesi

IV. Profession Skills Certification Program

No	Program / Program	Durasi Waktu / Duration	Target Peserta / Participant Target
1	Sertifikat Audit / Audit Certificate	3 Hari / 3 days	27 Peserta / 27 participants
2	Sertifikat Kepatuhan / Compliance Certificate	3 Hari / 3 days	6 Peserta / 6 participants
3	Sertifikat <i>Treasury</i> / Treasury Certificate	3 Hari / 3 days	5 Peserta / 5 participants
4	Sertifikat Manajemen Risiko / Risk Management Certificate	3 Hari / 3 days	176 Peserta / 176 participants
5	Sertifikasi Human Resource / Human Resources Certificate	3 Hari / 3 days	4 Peserta / 4 participants

DEMOGRAFI KARYAWAN PADA 2021

Sub-Bab ini telah diuraikan pada bab Profil.

EMPLOYEE DEMOGRAPHIC IN 2021

This sub-chapter has been described in the Profile chapter.

Teknologi Informasi

Information Technology

Untuk dapat bertahan dan bertumbuh dalam lingkungan pasar yang dinamis, Perseroan perlu menggunakan teknologi yang terbaru, agar dapat mendukung pengembangan struktur yang lebih fleksibel, dan juga untuk merespons dengan cepat kebutuhan nasabah.

To survive and grow in a rapidly changing market environment and to respond quickly to customers' banking needs, a Company needs to apply the latest technology, which can help develop a more flexible structure.

Industri perbankan saat ini telah menjadi sangat kompetitif. Untuk dapat bertahan dan tumbuh dalam lingkungan pasar yang dinamis, Perseroan perlu menggunakan teknologi paling terbaru, yang dapat mendukung perkembangan struktur yang lebih fleksibel, agar dapat merespons dengan cepat kebutuhan pelayanan nasabah. Keberadaan teknologi juga penting karena di satu sisi dapat mengurangi biaya dan menghadirkan komunikasi yang efektif dengan nasabah, baik perorangan maupun non-perorangan.

Today's banking industry has become very competitive. To survive and grow in a rapidly changing market environment, a bank needs to apply the latest technology to help it develop a more flexible structure, in order to respond quickly to customers' banking needs. Technology is also important because it can reduce costs and provide effective communication with customers, individuals and non-individuals.

Teknologi informasi (TI) bisa menjadi sebuah ancaman disruptif atau juga sebagai peluang yang dapat memungkinkan Perseroan melakukan pengembangan produk yang canggih, membangun infrastruktur pasar yang lebih baik, melakukan penerapan teknik yang andal untuk mengendalikan risiko dan membantu perantara keuangan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Internet telah memengaruhi saluran pengiriman bank secara signifikan. Internet kini juga menjadi media penting dalam penyampaian produk dan layanan perbankan.

Information Technology (IT) enables the development of sophisticated products, improved market infrastructure, and the application of reliable techniques to control risk and assists financial intermediaries in reaching markets that are remote and geographically diverse. The internet has significantly affected the bank transfer channels. It is now also an important medium in the delivery of banking products and services.

PENGEMBANGAN TI PADA 2021

Mengingat mulainya pemulihan ekonomi secara bertahap sedangkan perkembangan TI yang terus bergerak cepat, Unit TI Perseroan memiliki rencana-rencana yang mampu membuat Perseroan unggul dibanding kompetitornya dan agar tetap mencapai target perusahaan setiap tahunnya.

IT DEVELOPMENT IN 2021

Considering the gradual onset of economic recovery while IT development continues to move rapidly, the Company's IT Unit has plans that are able to make the Company superior to its competitors and to continue to achieve its targets every year.

Pada tahun 2021, fokus Perseroan di bidang TI adalah penguatan teknologi informasi menuju perbankan digital dan sistem pembayaran yang terintegrasi Berikut sejumlah panduan bagi divisi TI untuk melakukan pekerjaannya:

1. Pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung peningkatan transaksional perbankan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
2. Melengkapi kebijakan dan prosedur untuk mendukung peningkatan kualitas tata Kelola perusahaan yang baik, khususnya di bidang teknologi informasi.
3. Mengembangkan dan mendukung penguatan sistem pembayaran, baik dari segi keamanan dan kelancaran, serta proses pelaporan dan administrasi jasanya.
4. Meningkatkan kemampuan dan kehandalan TI guna mendorong terwujudnya layanan digital bank sebagai tindakan antisipasi kebutuhan layanan nasabah yang berbasis elektronik.

Dalam pelaksanaannya, unit TI telah mengembangkan sejumlah aplikasi sebagai berikut:

1. Mobile Banking
2. CMS
3. SIPENDAR
4. Monitoring Kinerja Keuangan Bank Banten

TATA KELOLA TI

Tata kelola TI merupakan kerangka kerja formal yang menyediakan struktur bagi perusahaan untuk menyelaraskan strategi TI dengan strategi bisnis, memastikan investasinya di bidang TI mendukung tujuan bisnis. Dengan mengikuti kerangka formal ini, perusahaan dapat mengukur keberhasilan pencapaian strategi dan tujuan bisnis. Kerangka formal ini juga mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, kebutuhan staf dan proses yang akan mereka kerjakan. Secara gambaran besar, tata kelola TI merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penerapan tata kelola TI formal penting untuk menyediakan kerangka kerja praktik dan kontrol terbaik.

Berikut adalah pelaksanaan pengembangan tata kelola TI pada Perseroan:

1. Struktur Organisasi dengan peran, tanggung jawab akuntabilitas yang sepenuhnya ditentukan dan ditegakkan di seluruh organisasi
2. Menyempurnakan TI *Steering Committee* dan mengaktifkan perannya dalam strategi Bank.
3. Melakukan rencana strategi teknologi informasi

In 2021, the Company's focus in IT were strengthening information technology towards digital banking and integrated payment system . The followings are guidelines for the IT division to perform their duties:

1. Development of information technology applications and infrastructure to support overall and sustainable banking transactional improvement.
2. Complete the policies and procedures to support the improvement of good corporate governance quality, particularly in information technology.
3. Develop and support the strengthening of the payment system, both in terms of security and efficiency, as well as the reporting process and service administration.
4. Improve IT capabilities and reliability to encourage the realization of bank digital services as an action to anticipate the need for electronic-based customer service.

In its implementation, the IT division has developed the following applications:

1. Mobile Banking
2. CMS
3. SIPENDAR
4. Monitoring on Financial Performance of Bank Banten

IT GOVERNANCE

IT governance is a formal framework that provides a structure for companies to align IT strategy with business strategy, ensuring that its investment in IT supports business goals. By following this formal framework, companies can measure the success of achieving their business strategies and goals. This formal framework also considers stakeholders expectations, staff needs and the processes they will work on. In the big picture, IT governance is an integral part of overall corporate governance.

As such, implementing formal IT governance is essential to provide a framework for best practice and controls.

The following is the implementation of IT governance development at Company:

1. Organizational structure with roles, responsibilities, accountability which are fully defined and enforced throughout the organization.
2. Improve the IT Steering Committee and activate its role in the Bank's strategy.
3. Planning an information technology strategy



4. Penerapan praktik manajemen nilai, perencanaan realisasi manfaat, serta pemantauan dan respons kinerja
5. Pelatihan staf dan program pengembangan
6. Menyempurnakan dan melengkapi kebijakan dan prosedur tata kelola TI melalui: pengelolaan portofolio investasi TI, pengelolaan anggaran dan biaya TI, pengelolaan sumber daya manusia untuk TI, pengelolaan pengetahuan, dan pengelolaan inovasi

PENGEMBANGAN SDM TI

Dalam perkembangannya, teknologi tidak mengenal waktu dan ruang. Maka Perseroan harus sering melakukan kegiatan pendidikan terhadap teknologi paling terbaru agar SDM TI tidak tertinggal dari perkembangan.

Karena SDM di bidang TI harus menguasai ilmu perbankan dan TI sekaligus untuk menghasilkan kinerja yang baik. SDM TI yang direkrut perseroan adalah yang memahami TI secara mumpuni, serta memiliki karakter yang sesuai dengan bidang perbankan antara lain dapat dipercaya, memiliki integritas tinggi, adaptif terhadap perubahan. Secara terus menerus, Perseroan menggelar berbagai pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi dan informasi. Pelatihan dan pendidikan ini diikuti oleh seluruh staf dari divisi TI.

Berikut adalah daftar pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021:

1. Digital Banking
2. Pengenalan Produk Bank Banten.

RENCANA PENGEMBANGAN TI PADA 2022

Agar selaras dengan program-program yang telah berjalan, Perseroan pun membuat perencanaan pengembangan TI pada tahun 2022. Rencana ini dibuat dan disepakati bersama berdasarkan keperluan, evaluasi, serta target yang ingin dicapai oleh Perseroan.

Pengembangan yang dilakukan juga senantiasa berfokus pada kebutuhan nasabah sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam mengutamakan kepuasan nasabah.

Berikut adalah rencana pengembangan TI Perseroan pada tahun 2022:

- Kerjasama dengan PJP/PIP untuk pembayaran Biller Pemprov / Pemda;
- Pengadaan EDC PINPad;

4. Implement value management practices, benefit realization planning, and performance monitoring and response
5. Staff training and development program
6. Refining and completing IT governance policies and procedures through: IT investment portfolio management, IT budget and cost management, IT human resource management, knowledge management, and innovation management.

IT HR DEVELOPMENT

In its development, technology does not know time and space. Therefore, the Company must carry out educational activities every so often on the latest technology to prevent IT HR development from being left behind.

This is because an HR in the IT field must master banking and IT knowledge at the same time to produce good performance. The IT HR recruited by the company are those who understand IT well, and have characters that are in line with the banking sector, including being trustworthy, having high integrity, and being adaptive to changes. The Company continuously organizes various training and education in the field of technology and information. This training and education is attended by all staff from the IT division.

The following is the list of trainings and educations conducted in 2021:

1. Digital Bannking
2. Introduction of Bank Banten's products.

IT DEVELOPMENT PLAN IN 2022

In order to stay in line with the current ongoing programs, the Company also makes an IT development plan in 2022. This plan is made and mutually agreed upon based on the needs, evaluations, and the targets to be achieved by the Company.

The development being carried out also constantly focuses on customer needs as a form of the Company's commitment to prioritizing customer satisfaction.

The followings are the Company's IT development plans in 2022:

- Cooperation with PJP/PIP for payment of Provincial/Local Government Billers;
- PINPad EDC procurement;

- Penyesuaian dan Pengembangan Struktur Organisasi TI;
- Pengembangan dan Implementasi aplikasi *Asset Management* TI;
- Pengembangan *Call Center* dan IT *Helpdesk* berbasis aplikasi;
- Pengembangan dan Implementasi Sistem Antrian Cabang;
- Pengembangan dan implementasi aplikasi Manajemen Dokumen;
- Pengembangan dan Implementasi BI-FAST;
- Pengadaan dan Implementasi *Core Banking System, Switching & Surrounding*;
- Pelaksanaan *Vulnerability Assesment* dan *Penetration Test*;
- Analisa dan Update profil risiko TI termasuk PBI PJP;
- Pengadaan aplikasi dan perangkat pendukung IT *Command Center*;
- Relokasi DC & DRC aplikasi *Non-Core*;
- Penambahan *Link Bandwidth* Internet dan Data Komunikasi Cabang;
- Penambahan *Firewall Security*;
- Pengembangan Sistem *Fraud* Manajemen;
- Jasa Konsultan untuk *Review / Assessment*, Penyusunan dan Pembaharuan Kebijakan dan SOP keamanan TI berbasis ISO 27001 dalam memenuhi Standar Mutu Keamanan Informasi (SMKI);
- Persiapan dan sertifikasi ISO 27001 untuk sistem pembayaran utama;
- Implementasi Layanan Transaksi Keuangan Digital;
- Pelaksanaan *Drill Test* DC – DRC tahunan;
- Pengembangan *Business Continuity Management* mencakup pengelolaan BCP dan *DRP Assessment*, dan pengembangan / update dokumen B;
- Audit TI oleh pihak Independen (Konsultan Audit);
- Pengadaan dan Implementasi *Workflow Management*;
- Pengembangan fitur aplikasi RCSA;
- Pengadaan dan Implementasi ERP System untuk kebutuhan pendukung Akunting;
- Pengadaan dan Implentasi *Whatsapp* Bisnis;
- Pengadaan dan Implentasi Mesin *Card Reader* E-KTP.
- Adjustment and Development of IT Organizational Structure;
- Development and Implementation of IT Asset Management applications;
- Development of Application-based Call Center and IT Helpdesk;
- Development and Implementation of Branch Queue System;
- Development and implementation of Document Management application;
- BI-FAST Development and Implementation;
- Procurement and Implementation of Core Banking System, Switching & Surrounding;
- Implementation of Vulnerability Assessment and Penetration Test;
- Analysis and Update of IT risk profile including PBI PJP;
- Procurement of applications and tools supporting IT Command Center;
- Relocation of DC & DRC Non-Core apps;
- Adding Link Bandwidth Internet and Data Communication Branch;
- Added Firewall Security;
- Fraud Management System Development;
- Consultant services for Review/ Assessment, Formulation and Update of IT security policies and SOPs based on ISO 27001 in compliance with Information Security Quality Standards (SMKI);
- Preparation and certification of ISO 27001 for the main payment system;
- Implementation of Digital Financial Transaction Services;
- Implementation of annual DC – DRC Drill Test;
- Business Continuity Management development including BCP and *DRP Assessment* management, and development/update of B document;
- Independent IT audit (Audit Consultant);
- Procurement and Implementation of Workflow Management;
- RCSA application feature development;
- ERP System procurement and implementation for accounting support needs;
- Procurement and Implementation of Whatsapp Business;
- Procurement and Implementation of E-KTP Card Reader Machines.





Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



“

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan, Bank Banten senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia

In implementing Good Corporate Governance, Bank Banten complies with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi Perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang beretika. Kelengkapan struktur perangkat organisasi dengan Tata Kelola dan pengawasan yang baik atas kegiatan, aktivitas maupun kinerja Bank akan memberikan efek yang sangat baik bagi pencapaian visi, misi dan tujuan yang merupakan kepentingan Bank dan pemegang saham.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan, Bank Banten senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Adapun dasar penerapan GCG Bank Banten adalah sebagai berikut:

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a must in order to build a strong and sustainable Company condition. GCG are the principles that underlie the Company's management processes and mechanisms based on compliance with laws and regulations as well as a reflection of the ethical business world. The completeness of the organizational structure with good governance and supervision over the activities, activities and performance of the Bank will have a very good effect on the achievement of the vision, mission and objectives that are in the interest of the Bank and shareholders.

BASIS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

In implementing Good Corporate Governance, Bank Banten complies with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia. The basis for Bank Banten's GCG implementation are as follows:

“

Selama tahun 2021, realisasi pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi ialah sebanyak 26 (dua puluh enam) kali rapat

Throughout 2021, the convention realization of Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings were 26 (twenty six) meetings

”

1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Undang Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998;
 - b. Undang Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;

1. Laws of the Republic of Indonesia
 - a. Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 1998;
 - b. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Financial Services Authority Regulations and Circular Letters
 - a. Financial Services Authority Regulation (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;
 - b. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 concerning the Implementation of the Guidelines for the Governance of Public Companies;
 - c. Financial Services Authority Regulation No.45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks;

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- f. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

- d. Financial Services Authority Regulation No.37/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.
- e. Circular Letter of Financial Services Authority (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 on Governance Implementation for Commercial Bank;
- f. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 concerning Guidelines for the Governance of Public Companies;
- g. Financial Services Authority Circular Letter No.40/SEOJK.03/2016 dated September 26, 2016 concerning Implementation of Good Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks;
- h. Financial Services Authority Circular Letter No.43/SEOJK.03/2016 dated September 28, 2016 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports.

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Bank Banten berpedoman sepenuhnya pada 5 (lima) prinsip utama GCG, yaitu:

1. Keterbukaan (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*)
5. Kewajaran (*fairness*)

GCG PRINCIPLES

Implementation of Good Corporate Governance. Bank Banten fully refers to 5 (five) GCG main principles, namely:

1. Transparency
2. Accountability
3. Responsibility
4. Independency
5. Fairness

Bank Banten meyakini penerapan 5 (lima) pilar tersebut merupakan elemen yang dapat diandalkan dalam menjalankan aktivitas bisnis Bank, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi maupun seluruh karyawan Perseroan sehingga tercipta keseimbangan dalam operasional usaha Perseroan secara menyeluruh.

Bank Banten believes that the implementation of the 5 (five) pillars is a reliable element in carrying out the Company's business activities, both by the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees of the Company so as to create a balance in the overall business operations of the Company.

STRUKTUR TATA KELOLA

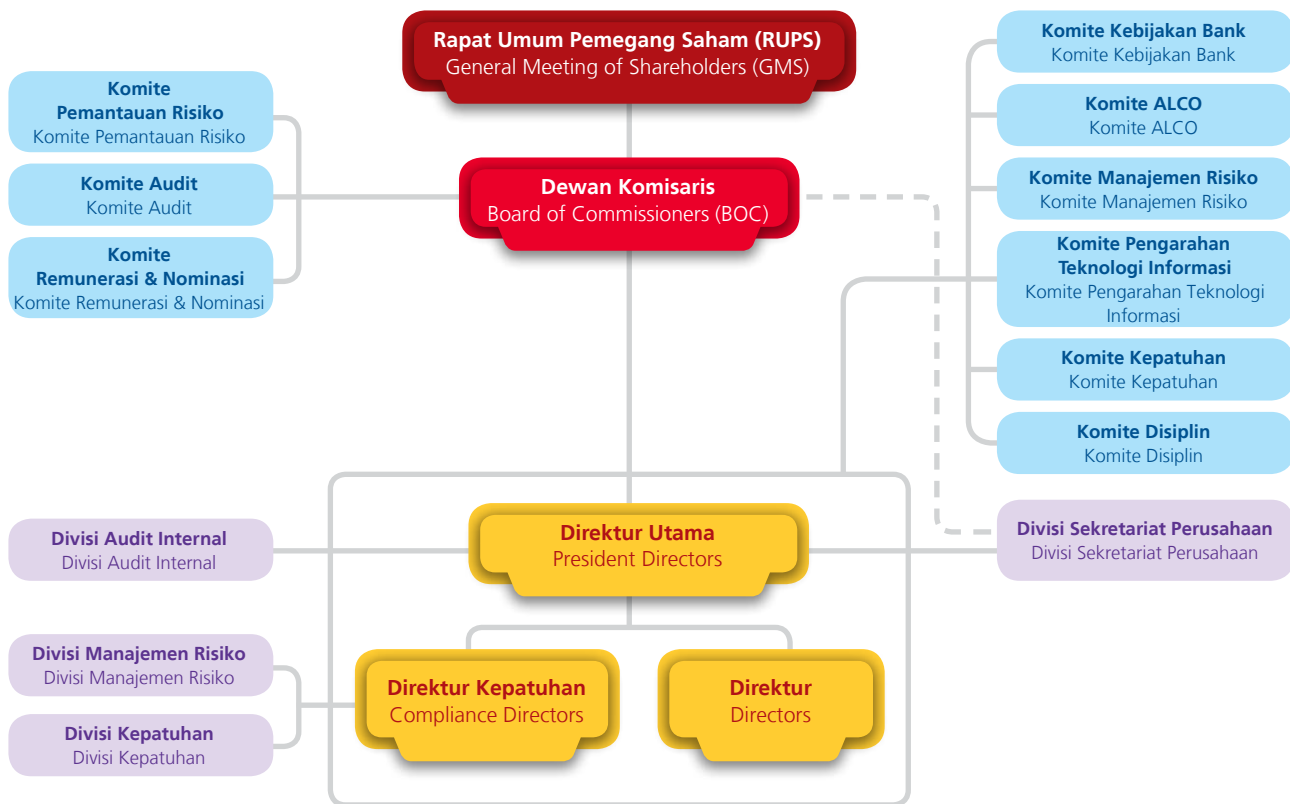
Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank Banten melakukan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang didukung oleh komite-komite dan seluruh karyawan pada setiap kegiatan operasional dengan berpedoman pada struktur Tata Kelola Perseroan.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Bank Banten implements Good Corporate Governance by the Board of Commissioners and Directors, which is supported by committees and all employees in every operational activity guided by the Corporate Governance structure.

Bagan berikut merupakan struktur dan hubungan skema Tata Kelola Bank Banten.

The following chart is the structure and relationship of the Bank Banten Governance scheme.



Penerapan Tata Kelola dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan berpegang pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang menjadi acuan dalam kegiatan usaha di Bank Banten. Tata Kelola Perusahaan yang Baik terwujud melalui interaksi seluruh organ Perseroan Bank, dimana dalam struktur Tata Kelola Bank Banten organ utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris; dan Direksi.

The implementation of Good Corporate Governance is carried out systematically and continuously by adhering to the principles of Good Corporate Governance which are the reference in business activities at Bank Banten. Good Corporate Governance is realized through the interaction of all organs of the Bank's Company, where in the Governance structure of Bank Banten the main organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

Dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama Bank Banten dibantu oleh:

In carrying out their functions, duties and responsibilities, the Board of Commissioners and the Board of Directors as the main organs of the Bank are assisted by:

1. Komite di bawah Dewan Komisaris
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi & Nominasi
 dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite di bawah Direksi
 - a. Komite Manajemen Risiko
 - b. Komite Kebijakan Perkreditan
 - c. Komite Kredit

1. Committees under the Board of Commissioners
 - a. Audit Committee
 - b. Risk Monitoring Committee
 - c. Remuneration and Nomination Committee
 which are formed to support and improve the monitoring function implemented by the Board of Commissioners.
2. Committees under the Board of Directors
 - a. Risk Management Committee
 - b. Credit Policy Committee
 - c. Credit Committee



- d. Komite Asset & Liability Management (ALCO)
 - e. Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - f. Komite Kebijakan Bank
3. Satuan kerja pendukung tugas dan tanggung jawab Direksi
- a. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
 - b. Satuan Kerja Kepatuhan dan
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko
 - d. Sekretariat Perusahaan
- Direksi bersama jajaran manajemen Bank bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas implementasi Tata Kelola di Bank Banten.

Dalam menjalankan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik, seluruh organ tersebut juga telah didukung dengan pedoman, kebijakan dan prosedur yang memadai sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

Penerapan aspek struktur Tata Kelola Perusahaan di Bank Banten hingga 31 Desember 2021, adalah untuk memastikan bahwa:

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
2. Seluruh pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui uji kemampuan dan kepatutan;
3. Keanggotaan komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan perubahan anggota Komisaris Perseroan;
4. Perseroan telah melakukan perubahan struktur organisasi sesuai dengan visi, misi dan model bisnis sebagai Bank Pembangunan Daerah;
5. Perseroan telah memiliki ketentuan internal yang memadai dan terus diperbaharui yang disesuaikan dengan perubahan bisnis model dan ketentuan otoritas;

PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2021

1. Penerapan GCG secara optimal selama tahun 2021 yang dilakukan secara transparan, akuntabel, tanggung jawab penuh, independen serta berkewajaran dan berkesetaraan telah memberikan pencapaian perbaikan kinerja Bank dalam keuangan dan non keuangan.

- d. Asset & Liability Management (ALCO) Committee
 - e. Information Technology Steering Committee
 - f. Bank Policy Committee
3. Work units that support the Board of Directors' duties and responsibilities
- a. Internal Audit Unit (SKAI)
 - b. Compliance Unit
 - c. Risk Management Unit
 - d. Corporate Secretariat
- The Board of Directors together with the Bank's management are tasked with managing, controlling, and being responsible for the implementation of Good Corporate Governance at Bank Banten.

In carrying out the implementation of good governance principles, all of these organs have also been supported by adequate guidelines, policies and procedures so as to obtain the expected results.

The implementation of aspects of the Corporate Governance structure at Bank Banten until December 31, 2021, is to ensure that:

1. All members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company do not have financial, management, ownership and family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and Board of Directors and/or Controlling Shareholders;
2. All appointments of incumbent members of the Board of Commissioners and Directors have obtained the approval of the Financial Services Authority through fit and proper test;
3. The membership of the committees under the Board of Commissioners has been adjusted to the changes in the members of the Company's Commissioners;
4. The Company has made changes to the organizational structure in accordance with the vision, mission and business model as a Regional Development Bank;
5. The Company has adequate and continuously updated internal regulations that are adapted to changes in the business model and regulatory requirements;

CORPORATE GOVERNANCE PRACTICE IN 2021

1. Optimal implementation of GCG during 2021 which was carried out in a transparent, accountable, fully responsible, independent, fair and equitable manner has provided the achievement of improving the Bank's financial and non-financial performance.

2. Pelaksanaan penilaian sendiri (self-assessment) Penerapan Tata Kelola Posisi Juni dan Desember 2021.
 - a. Berdasarkan hasil penilaian sendiri tersebut, Bank Banten berada di peringkat 3 (tiga).
 - b. Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik.
 - c. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. Dengan melaksanakan Tata Kelola yang baik pada seluruh kegiatan Bank, baik dalam struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola yang dilakukan secara transparan, akuntabel, tanggung jawab penuh, independen serta berkewajaran dan berkesetaraan dapat meningkatkan kinerja Bank baik dalam keuangan dan non keuangan Bank.
 3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 4. Hingga 30 Desember 2021, Kebijakan yang telah dimiliki oleh Bank Banten guna meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi Tata Kelola secara berkelanjutan, antara lain:
2. Implementation of self-assessment for the Implementation of Position Governance in June and December 2021.
 - a. Based on the results of the self-assessment, Bank Banten is ranked 3 (three).
 - b. This reflects that the Bank's management has implemented good governance in general.
 - c. This is reflected in the adequate compliance with the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the application of Good Corporate Governance principles, in general these weaknesses are quite significant and require sufficient attention from the Bank's management. By implementing Good Governance in all Bank activities, both in the Governance structure, Governance Process and Governance Results which are carried out in a transparent, accountable, fully responsible, independent and fair and equitable manner, it can improve the Bank's financial and non-financial performance.
 3. The holding of General Meeting of Shareholders (GMS)
 4. Until December 30, 2021, the policies that have been owned by Bank Banten to improve the quality and scope of the implementation of Good Corporate Governance in a sustainable manner, including:

No.	Kebijakan / Policies	Terakhir Diperbahui / Latest Amendment
1	Pedoman Penerapan Tata Kelola Bank / Bank's Good Corporate Governance Implementation Guideline	31 Juli 2017 / July 31, 2017
2	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris / Board of Commissioners Charter	29 Juli 2021 / July 29, 2021
3	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi / Board of Directors Charter	29 Juli 2021 / July 29, 2021
4	Piagam, Kode Etik, Pedoman, dan Tata Tertib Kerja Komite Audit / Audit Committee Charter, Codes of Conduct, Guidelines and Work Rules	27 Maret 2019 / March 27, 2019
5	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko / Risk Monitoring Committee Charter	18 Desember 2017 / December 18, 2017
6	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi / Remuneration and Nomination Committee Charter	16 Oktober 2017 / October 16, 2017
7	Penanganan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan / Handling of Transactions With Conflicts of Interest	29 September 2021 / September 29, 2021
8	Pedoman Tatacara Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan. / Guidelines for Transparency of Financial & Non-Financial Conditions.	07 Mei 2018 / May 7, 2018
9	Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi / Performance Self-Assessment Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors	20 Maret 2018 / March 20, 2018
10	Pedoman Pengendalian Gratifikasi / Gratification Controlling Guideline	27 Maret 2018 / March 27, 2018
11	Pedoman Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioners and Board of Directors Nomination Guideline	29 Juni 2020 / June 29, 2020
12	Pedoman Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Guideline	3 Januari 2022 / January 3, 2022



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) merupakan organ tertinggi Perseroan sekaligus forum pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan investasi para pemegang saham yang akan mempengaruhi kebijakan operasional Perseroan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan RUPS juga merupakan forum bagi para pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Para pemegang saham juga dapat menggunakan haknya untuk mengemukakan pendapat dan mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang diputuskan dalam setiap mata acara RUPS, yang secara garis besar mempengaruhi kinerja Perseroan agar lebih berkembang di masa depan.

Sebagai Perusahaan perbankan, Penyelenggaraan RUPS Bank Banten mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang kemudian diubah menjadi POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E : Kep-00015/BEJ/01-2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
4. Anggaran Dasar Perseroan :
 - a) Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c) Pasal 13 tentang Pimpinan dan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d) Pasal 14 tentang Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

Hak Pemegang Saham

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS, Bank Banten senantiasa menjunjung tinggi hak dan wewenang yang dimiliki oleh para pemegang saham, yang terdiri dari:

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ of the Company as well as the important decision-making forum related to the investment of shareholders that will influences the Company's operational policies. The GMS has an authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners in accordance with the Articles of Association, the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association. The GMS is also a forum for shareholders to evaluate the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Shareholders can also exercise their right to express opinions and cast votes in the decision-making process regarding matters decided in each GMS agenda, which broadly affects the Company's performance for further development.

As a banking Company, Bank Banten's GMS Implementation refers to the following stipulations:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. OJK Regulation Number: 32/POJK.04/2014 dated December 18, 2014 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company which was later changed to POJK Number: 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders Public Company Shares.
3. Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E : Kep-00015/BEJ/01-2021 regarding Obligation to Submit Information.
4. The Company's Articles of Association:
 - a) Article 11 concerning the General Meeting of Shareholders;
 - b) Article 12 concerning the Place, Notification, Announcement, Invitation, and Time for the General Meeting of Shareholders;
 - c) Article 13 concerning the Chairperson and Rules of the General Meeting of Shareholders;
 - d) Article 14 concerning Decisions, Quorum of Attendance, Quorum of Decisions at the General Meeting of Shareholders, and Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Rights of Shareholders

In relations to the GMS convention, Bank Banten upholds the rights and authorities of shareholders, as follows:

1. Meminta secara tertulis kepada Perseroan agar diselenggarakan RUPS apabila memegang saham minimum 10% (sepuluh per seratus).
2. Mengusulkan acara/agenda RUPS apabila memegang saham minimal 10% (sepuluh per seratus).
3. Ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan di dalam RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib RUPS.
4. Menerima informasi mengenai Tata Tertib RUPS dan prosedur voting di dalam RUPS.
5. Menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan RUPS.

Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham

Dalam pelaksanaan RUPS, seluruh pemegang saham Bank Banten memiliki kesetaraan hak dalam memperoleh informasi, baik melalui situs web Perseroan maupun Perseroan. Kesetaraan hak juga diterapkan pada saat penghitungan suara, di mana dalam RUPS, setiap pemegang saham dapat menyampaikan persetujuannya sesuai dengan proporsi saham yang dimilikinya.

Ketentuan Kuorum

Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

1. Request in writing to the Company to hold a GMS if it holds a minimum of 10% (ten percent) shares.
2. Propose the agenda of the GMS if it holds a minimum of 10% (ten percent) shares.
3. Participate in taking decisions in the GMS based on the applicable terms and conditions and the RUPS Code of Conduct.
4. Receive information on the RUPS Code of Conduct and voting procedures in the GMS.
5. Receive stock dividends with terms and conditions in accordance with the resolution of the GMS.

Equal Treatment to Shareholders

In the GMS implementation, all shareholders have equality to obtain the GMS materials either through the Company's website or at the Company's Office. The equality is also implemented during voting, whereby in the GMS every shareholder can vote their approval in accordance with their owned share proportioned.

Quorum Stipulations

The attendance quorum stipulations and the GMS resolution on matters that must be decided at the Meeting shall be carried out with the following stipulations:

1. Attended by shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with legitimate voting rights and the decision is valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights that attending the Meeting unless the Law and/or Articles of Association of the Company stipulate a larger quorum;
2. In the event that the quorum of attendance as referred to is not achieved, the second GMS is valid and has the right to take binding decisions if attended by shareholders representing at least $\frac{1}{3}$ (one third) of the total shares with legitimate voting rights and the decision is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with voting rights that attending the meeting unless the law and/or the Company's Articles of Association stipulate a larger quorum; and
3. In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to is not achieved, the third GMS may be held provided that the third GMS is legitimate and has the right to make decisions if it is attended by shareholders with legitimate voting rights in the attendance quorum and decision-making requirements stipulated by OJK at the request of the Company.



Mekanisme Pengambilan Keputusan

Bank Banten menerapkan mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

Pelaksanaan RUPS 2021

Sepanjang tahun 2021, Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 20 Mei 2021 dan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu pada tanggal 10 Maret 2021 dan 20 Mei 2021.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TANGGAL 10 MARET 2021

Risalah RUPS Luar Biasa (RUPSLB) 10 Maret 2021

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Maret 2021
 Waktu : 11.15 WIB – 12.55 WIB
 Tempat : Ruang Horison 1 & 2, Hotel Horison Ultima Ratu, Jl. K.H. Abdul Hadi No.66, Serang, Banten

Kehadiran

Dewan Komisaris

1. Media Warman sebagai Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama.
2. Titi Khoirah sebagai Komisaris Independen.

Direksi

1. Fahmi Bagus Mahesa sebagai Direktur Utama.
2. Jaja Jarkasih sebagai Direktur.
3. Kemal Idris sebagai Direktur.

Pemegang Saham

34.320.996.103 saham (78,283 %) dari total 43.842.343.952

Pimpinan Rapat

Media Warman selaku Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama

Pemenuhan Prosedur Hukum untuk

Penyelenggaraan RUPSLB Tanggal 10 Maret 2021

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 149/DIR-BB/I/21 tanggal 25 Januari 2021.

Decision Making Mechanism

Bank Banten applies the decision-making mechanism in the Meeting by deliberation to reach a consensus. However, if deliberation to reach a consensus is not reached, then the decision is made at the Meeting through voting and taking into account the attendance quorum and decision quorum.

2021 GMS Implementation

Throughout 2021, the Company held 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders on May 20, 2021 and 2 (two) Extraordinary General Meetings of Shareholders, namely on March 10, 2021 and May 20, 2021.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 10 MARCH 2021

Extraordinary GMS (EGMS) Minutes 10 March 2021

Day/Date : Wednesday, 10 March 2021
 Time : 11.15 WIB – 12.55 WIB
 Location : Horison 1 & 2 Hall, Horison Ultima Ratu Hotel, Jl.K.H. Abdul Hadi No.66, Serang, Banten

Attendance

Board of Commissioners

1. Media Warman as Independent Commissioner concurrently as Acting President Commissioner
2. Titi Khoirah as Independent Commissioner

Board of Directors

1. Fahmi Bagus Mahesa as President Director.
2. Jaja Jakarsih as Director.
3. Kemal Idris as Director.

Shareholders

34,320,996,103 shares (78.283%) from a total of 43,842,343,952.

Meeting Chairman

Media Warman as Independent Commissioner concurrently as Acting President Commissioner.

Fulfillment of Legal Procedures

for EGMS Convention on 10 March 2021

1. Notification Meeting convention plan to the Chief Executive of the Capital Market Supervisory Financial Services Authority, with the Company's letter Number: 149/DIR-BB/I/21 dated 25 January 2021.

2. Pengumuman Rapat Perseroan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2021 dan dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI
3. Pemberitahuan penyesuaian mata acara Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, melalui surat Perseroan Nomor: 245/DIR-BB/II/21 tanggal 16 Februari 2021.
4. Pemanggilan Rapat Perseroan dilakukan pada tanggal 16 Februari 2021 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI.

Kesempatan Tanya Jawab pada RUPSLB 10 Maret 2021

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Pada Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) orang peserta rapat yang mengajukan pertanyaan, dan pada Mata Acara Kedua terdapat 3 (tiga) orang peserta rapat yang mengajukan pertanyaan.

Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara. Sesuai dengan POJK No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Adapun yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanya Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Februari 2021, pukul 16.00 WIB.

Hasil Penghitungan Suara dalam RUPSLB Tanggal 10 Maret 2021

1. Mata Acara Pertama Rapat

Suara / Vote	Jumlah Suara / Total Votes	Persen / Percent
Setuju / Agree	34.320.995.799	99,999%
Tidak Setuju / Disagree	4	0,000%
Abstain / Abstain	300	0,000%

2. Mata Acara Rapat Kedua

Suara / Vote	Jumlah Suara / Total Votes	Persen / Percent
Setuju / Agree	34.320.995.799	99,999%
Tidak Setuju / Disagree	4	0,000%
Abstain / Abstain	3300	0,000%

2. Announcement of the Company's Meeting was made on 1 February 2021 and published through the Company's website, Indonesia Stock Exchange website and eASY.KSEI
3. Notification of adjustment of the Meeting agenda to the Chief Executive of the Capital Market Supervisory Financial Services Authority, through the Company's letter Number: 245/DIR-BB/II/21 dated 16 February 2021.
4. The summons for the Company's Meeting was held on 16 February 2021, which was published through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange's website and eASY.KSEI.

Question and Answer Opportunity at EGMS 10 March 2021

Prior to making a decision, the Chairman of the Meeting provides an opportunity for the shareholders to ask questions and/or provide opinions on each agenda item of the Meeting. In the First Agenda there was 1 (one) meeting participant who asked questions, and in the Second Agenda there were 3 (three) meeting participants who asked questions.

After that, the Notary will count the votes. In accordance with POJK No.15/POJK.04/2020, Shareholders with voting rights who attend the Meeting but do not cast a vote or abstain are considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who did. Those who are entitled to cast votes at the Meeting are only legitimate shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on February 15, 2021, at 16.00 WIB.

Vote Count Results in the EGMS 10 March 2021

1. First Meeting Agenda

Suara / Vote	Jumlah Suara / Total Votes	Persen / Percent
Setuju / Agree	34.320.995.799	99,999%
Tidak Setuju / Disagree	4	0,000%
Abstain / Abstain	300	0,000%

2. Second Meeting Agenda

Suara / Vote	Jumlah Suara / Total Votes	Persen / Percent
Setuju / Agree	34.320.995.799	99,999%
Tidak Setuju / Disagree	4	0,000%
Abstain / Abstain	3300	0,000%



Mata Acara Rapat Pertama / First Meeting Agenda

Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan / Change in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners Members

Keputusan / Resolutions

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Utama Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini; / Respectfully dismiss Mr. Fahmi Bagus Mahesa as the Company's President Director since this Meeting's closing;
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Jaja Jarkasih selaku Direktur Bisnis Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini; / Respectfully dismiss Mr. Jaja Jarkasih as the Company's Business Director since this Meeting's closing;
3. Mengusulkan dan menetapkan Bapak Agus Syabarrudin menjadi Direktur Utama, Bapak Cendria Tj. Tasdik dan Bapak Denny Sorimulia Karim menjadi Direktur. / Propose and stipulate Mr. Agus Syabarrudin as the President Director, Mr. Cendria Tj. Tasdik and Mr. Denny Sorimulia Karim as Directors.

Sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: / Thus, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Direktur Utama / President Director	: Bapak Agus Syabarrudin* / Mr. Agus Syabarrudin*
Direktur / Director	: Bapak Cendria Tj. Tasdik* / Mr. Cendria Tj. Tasdik*
Direktur / Director	: Bapak Denny Sorimulia Karim* / Mr. Denny Sorimulia Karim*
Direktur / Director	: Bapak Kemal Idris / Mr. Kemal Idris

Untuk selanjutnya pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. / Henceforth, the division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined based on the decision of the Board of Directors Meeting.

Selanjutnya: / Next:

1. Memberhentikan dengan hormat Ibu Titi Khoiriah selaku Komisaris Independen Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini; / Respectfully dismiss Mrs. Titi Khoiriah as the Company's Independent Commissioner since this Meeting's closing;
2. Mengusulkan dan menetapkan Bapak Hasanuddin, S.E., MM menjadi Komisaris Utama; / Propose and stipulate Mr. Hasanuddin, S.E., MM as President Commissioner;
3. Mengusulkan Ibu Rina Dewiyanti menjadi Komisaris Perseroan; / Propose and stipulate Mrs. Rina Dewiyanti as the Company's Commissioner;
4. Mengusulkan dan menetapkan Bapak M. Yusuf, S.Sos., M.Si menjadi Komisaris Perseroan menggantikan usulan pengangkatan Ibu Rina Dewiyanti. / Propose and stipulate Mr. M. Yusuf, S.Sos., M.Si as the Company's Commissioner to replace the proposal to appoint Mrs. Rina Dewiyanti.

Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: / Thus, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Komisaris Utama/Komisaris Independen /	
President Commissioner/Independent Commissioner	: Bapak Hasanuddin, S.E., MM* / Mr. Hasanuddin, S.E., MM*
Komisaris / Commissioner	: Bapak M. Yusuf, S.Sos., M.Si* / Mr. M. Yusuf, S.Sos., M.Si*
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Bapak Media Warman / Mr. Media Warman

Adapun anggota Dewan Komisaris dan Direksi terpilih tersebut di atas dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup di antaranya penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*). / The elected members of the Board of Commissioners and Board of Directors mentioned above are capable in carrying out their duties and functions in their positions if they have obtained approval from the Financial Services Authority in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, including the Fit and Proper Test.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terpilih yang belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan akan dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup di antaranya penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*). / Thus, the implementation of duties and functions in the positions of elected members of the Board of Commissioners and Board of Directors who have not received an approval from the Financial Services Authority will be carried out by members of the Board of Commissioners and Board of Directors who have obtained an approval from the Financial Services Authority in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, including the Fit and Proper Test.

Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini di hadapan Notaris dan selanjutnya memintakan memberitahukan perubahan Pengurus tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / The meeting grants a power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights, to restate the decision of this Meeting before a Notary and subsequently request to notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, register it in the Company Register and announce it in the State Gazette of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations.



Realisasi / Realization

Telah terealisasi, pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah mendapatkan persetujuan OJK sesuai hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi : / The appointment of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners has been realized and has obtained OJK approval according to the results of the Fit and Proper Test Assessment. Thus, the composition of the members of the Board of Directors and Commissioners of the Company becomes:

Direksi: / Board of Directors

Bpk. Agus Syabarrudin : Direktur Utama / President Director
Bpk. Cendria Tj Tasdik : Direktur Bisnis / Business Director
Bpk. Denny Sorimulia : Direktur Operasional dan Transformasi / Operations and Transformation Director
Bpk. Kemal Idris : Direktur Kepatuhan / Compliance Director

Dewan Komisaris: / Board of Commissioners

Bpk. Hasanuddin : Komisaris Utama Independen / Independent President Commissioner
Bpk. Media Warman : Komisaris Independen / Independent Commissioner
Bpk. M. Yusuf : Komisaris / Commissioner

Mata Acara Rapat Kedua / Second Meeting Agenda

Persetujuan penghapusbukuan kredit yang tidak produktif / Approval of unproductive debt write-off

Keputusan / Resolution

Memberikan kewenangan kepada pengurus sesuai Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 9 huruf H untuk penghapusbukuan kredit yang tidak produktif. / authority to the management in accordance with the Articles of Association Article 16 paragraph 9 letter H for write-off of unproductive loans.

Realisasi / Realization

Telah direalisasikan. / Realized

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TANGGAL 20 MEI 2021

Risalah RUPS Tahunan (RUPST) 20 Mei 2021

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Mei 2021.
Waktu : 10.06 - 11.51 WIB
Tempat : Ballrom, Hotel Horison Ultima Ratu, Jl. K.H. Abdul Hadi No.66 Serang, Banten

Kehadiran

Dewan Komisaris

1. Hasanuddin sebagai Komisaris Utama Independen
2. Media Warman sebagai Komisaris Independen
3. M. Yusuf sebagai Komisaris

Direksi

1. Agus Syabarrudin selaku Direktur Utama
2. Cendria Tj. Tasdik sebagai Direktur Bisnis
3. Kemal Idris sebagai Direktur Kepatuhan
4. Denny Sorimulia Karim sebagai Direktur Operasional dan Transformasi

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 20 MAY 2021

Minutes of the Annual GMS (AGM) May 20, 2021

Day/Date : Thursday, 20 May 2021.
Time : 10.06 WIB – 11.51 WIB
Place : Ballroom, Horison Ultima Ratu Hotel, Jl. K.H. Abdul Hadi No. 66 Serang, Banten

Attendance

Board of Commissioners

1. Hasanuddin as President Commissioner concurrently as Independent Commissioner
2. Media Warman as Independent Commissioner
3. M. Yusuf as Commissioner

Board of Directors

1. Agus Syabarrudin as President Director
2. Cendria Tj. Tasdik as Business Director
3. Kemal Idris as Compliance Director
4. Denny Sorimulia Karim as Operational and Transformation Director

Pemegang Saham

Pemegang Saham Rapat Tahunan: 34.318.753.216 saham (78,278 %) dari total 43.842.343.952

Pimpinan Rapat

Hasanuddin selaku Komisaris Utama Independen.

Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB Tanggal 20 Mei 2021

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan 582/DIR-BB/IV/21 tanggal 6 April 2021;
2. Pengumuman Rapat Perseroan dilakukan pada tanggal 13 April 2021 dan dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI;
3. Pemberitahuan penyesuaian mata acara Rapat Tahunan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 728/DIR-BB/IV/21 tanggal 28 April 2021;
4. Pemanggilan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 28 April 2021 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI.

Kesempatan Tanya Jawab pada:

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat.

- Pada Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) orang peserta Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pada Mata Acara Kedua tidak terdapat pertanyaan.
- Pada Mata Acara ketiga tidak terdapat pertanyaan.
- Pada Mata Acara Keempat tidak terdapat pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST Tanggal 20 Mei 2021

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi formulir voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan setuju. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Shareholders

Annual Meeting Shareholders: 34,318,753,216 shares (78.278%) from a total of 43,842,343,952

Meeting Chairman

Hasanuddin as Independent President Commissioner.

Fulfillment of Legal Procedures for AGMS and EGMS Convention on 20 May 2021

1. Notification Meeting convention plan to the Chief Executive of the Capital Market Supervisory Financial Services Authority, with the Company's letter Number: 582/DIR-BB/IV/21 dated 6 April 2021.
2. Announcement of the Company's Meeting was made on 13 April 2021 and published through the Company's website, Indonesia Stock Exchange website and eASY.KSEI
3. Notification of adjustment of the Meeting agenda to the Chief Executive of the Capital Market Supervisory Financial Services Authority, through the Company's letter Number: 728/DIR-BB/IV/21 dated 28 April 2021.
4. The summons for PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Meeting on 28 April 2021, which was published through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange's website and eASY.KSEI.

Question and Answer Opportunity on:

Prior to making a decision, the Chairman of the Meeting provides the opportunity for the shareholders to ask questions and/or provide opinions on each Meeting agenda.

- In the First Agenda there was 1 (one) Meeting participant who asked questions
- In the Second Agenda there were no questions.
- In the third Agenda had no questions
- In the Fourth Agenda there were no questions.

Decision Making Mechanism AGMS 20 May 2021

The Meeting decisions are made through deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus is not reached, then voting is carried out, by counting the number of shares that do not agree, abstain, and agree.

The Shareholders who disagree and abstain are welcome to raise the hands and fill out the voting form that was previously distributed, while the rest who do not raise the hands are deemed to agree. Following the session, the Notary will count the votes.

Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanya Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2021 pukul 16.00 WIB.

Hasil Penghitungan Suara dalam RUPS Tahunan 20 Mei 2021

1. Mata Acara Pertama Rapat

Suara / Vote	Jumlah Suara / Total Votes	Persen / Percent
Setuju / Agree	34.318.732.296	99,999%
Tidak Setuju / Disagree	10.610	0,000%
Abstain / Abstain	10.310	0,000%

2. Mata Acara Rapat Kedua

Suara / Vote	Jumlah Suara / Total Votes	Persen / Percent
Setuju / Agree	34.318.727.105	99,999%
Tidak Setuju / Disagree	10.600	0,000%
Abstain / Abstain	15.511	0,000%

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Suara / Vote	Jumlah Suara / Total Votes	Persen / Percent
Setuju / Agree	34.318.727.095	99,999%
Tidak Setuju / Disagree	15.811	0,000%
Abstain / Abstain	10.310	0,000%

4. Mata Acara Rapat Keempat

Suara / Vote	Jumlah Suara / Total Votes	Persen / Percent
Setuju / Agree	34.318.727.095	99,999%
Tidak Setuju / Disagree	10.610	0,000%
Abstain / Abstain	15.511	0,000%

Keputusan RUPS Tahunan Tanggal 20 Mei 2021

Mata Acara Rapat Pertama / First Meeting Agenda

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020; / Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year 2020 as well as granting the acquisition and discharge (*acquit et decharge*) to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the actions of the management and supervision conducted in the fiscal year 2020;.

Pursuant to POJK No.15/POJK.04/2020, the Shareholders with voting rights who attend the Meeting but do not cast a vote or abstain are deemed to cast the same vote as the majority vote of shareholders who cast the votes.

Those who have the rights to cast the votes at the Meeting are only legitimate Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Registry on 27 April 2021 Western Indonesian Time.

Vote Count Results in the Annual GMS 20 May 2021

1. First Meeting Agenda

Suara / Vote	Jumlah Suara / Total Votes	Persen / Percent
Setuju / Agree	34.318.732.296	99,999%
Tidak Setuju / Disagree	10.610	0,000%
Abstain / Abstain	10.310	0,000%

2. Second Meeting Agenda

Suara / Vote	Jumlah Suara / Total Votes	Persen / Percent
Setuju / Agree	34.318.727.105	99,999%
Tidak Setuju / Disagree	10.600	0,000%
Abstain / Abstain	15.511	0,000%

3. Third Meeting Agenda

Suara / Vote	Jumlah Suara / Total Votes	Persen / Percent
Setuju / Agree	34.318.727.095	99,999%
Tidak Setuju / Disagree	15.811	0,000%
Abstain / Abstain	10.310	0,000%

4. Fourth Meeting Agenda

Suara / Vote	Jumlah Suara / Total Votes	Persen / Percent
Setuju / Agree	34.318.727.095	99,999%
Tidak Setuju / Disagree	10.610	0,000%
Abstain / Abstain	15.511	0,000%

Resolutions of AGMS 20 May 2021



Keputusan / Resolutions

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat "*wajar dalam semua hal yang material*" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00200/3.0409/AU.1/07/ 0126-2/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021; / Approved the Annual Report of the Company including the Board of Directors' Report and ratified the Supervisory Report that has been carried out by the Board of Commissioners for the Fiscal Year ended on 31 December 2020, and ratified the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2020, which has been audited by Public Accountant Firm of Kanaka Puradiredja, Suhartono with opinion "*fair in all material respects*" as stated in its report No. 00200/3.0409/AU.1/07/ 0126-2/1/III/2021 dated 30 March 2020.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquiet et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. / Approved the release and discharge (*acquiet et de charge*) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the actions of management and supervision carried out during the fiscal year ended on 31 December 2020, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2020.

Realisasi / Realization

Telah terealisasi dengan disetujui dan diterimanya Laporan Tahunan 2020 pada saat RUPS. / Realized with the approval and receipt of the 2020 Annual Report at the GMS.

Mata Acara Rapat Kedua / Second Meeting Agenda

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021. / Appointment of a Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the Year Ended 31 December 2021.

Keputusan / Resolution

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan POJK No.13/POJK.03/2017 terkait kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, serta untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya sebagaimana telah dikemukakan di atas. / The meeting granted an authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year by taking into account the recommendations from the Audit Committee and OJK Regulation No.13/POJK.03/2017 on the criteria for Public Accountant and Public Accounting Firm, and determined the honorarium amount for the Public Accountant and other appointment requirements as described above.

Realisasi / Realization

Telah terealisasi dengan penunjukan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021. / This has been realized with the appointment of KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono to audit the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year.

Mata Acara Rapat Ketiga / Third Meeting Agenda

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan. / Determination of the salary or honorarium and allowances for the Board of Commissioners of the Company.

Keputusan / Resolutions

Memberikan persetujuannya bahwa kebijakan Remunerasi tetap sesuai RUPS tahun 2018 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, nomor 004/SK/KOM-BB/VI/2020, Nomor 073A/SK/DIR-BB/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020. / The meeting granted an approval that the remuneration policy remained in accordance with the 2018 GMS as outlined in the Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Number 004/SK/KOM-BB/VI/2020, Number 073A/SK/DIR-BB/VI/2020 29 June 2020.

Realisasi / Realization

Telah direalisasikan. / Realized

Mata Acara Rapat Keempat / Fourth Meeting Agenda

Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI Perseroan. / Submission of the realization of the Company's Limited Public Offering VI funds.

Keputusan / Resolutions

Memberikan persetujuan untuk menerima penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI Perseroan. / The meeting granted an approval to accept the submission of realization of the Company's Limited Public Offering VI funds.

Realisasi / Realization

Realisasi penggunaan dana hasil PUT VI Perseroan periode Januari 2021 – Juni 2021 dan periode Juli 2021 – Desember 2021 telah dilaporkan dan akan dilaporkan sampai dengan seluruh dana hasil PUT VI telah direalisasikan. / The realization of the use of the proceeds from the Company's PUT VI for the period January 2021 – June 2021 and the period July 2021 – December 2021 has been reported and will be reported until all the proceeds from the PUT VI have been realized.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (20 MEI 2021)

Risalah RUPS Tahunan (RUPSLB) 20 Mei 2021

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Mei 2021.

Waktu : 11.58 - 12.15 WIB

Tempat : Ballroom, Hotel Horison Ultima Ratu, Jl. K.H. Abdul Hadi No.66 Serang, Banten

Kehadiran

Dewan Komisaris

1. Hasanuddin sebagai Komisaris Utama Independen
2. Media Warman sebagai Komisaris Independen
3. M. Yusuf sebagai Komisaris

Direksi

1. Agus Syabarrudin selaku Direktur Utama
2. Cendria Tj. Tasdik sebagai Direktur Bisnis
3. Kemal Idris sebagai Direktur Kepatuhan
4. Denny Sorimulia Karim sebagai Direktur Operasional dan Transformasi

Pemegang Saham

Pemegang Saham Rapat Luar Biasa 34.318.742.906 saham (78,278%) dari Total 43.842.343.952

Pimpinan Rapat

Hasanuddin selaku Komisaris Utama Independen.

Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 20 Mei 2021

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan 582/DIR-BB/IV/21 tanggal 6 April 2021;

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (20 MAY 2021)

Minutes of Annual GMS (AGMS) 20 May 2021

Day/Date : Thursday, 20 May 2021.

Time : 11.58 - 12.15 WIB

Place : Ballroom, Horison Ultima Ratu Hotel, Jl. K.H. Abdul Hadi No. 66 Serang, Banten

Attendance

Board of Commissioners

1. Hasanuddin as President Commissioner concurrently as Independent Commissioner
2. Media Warman as Independent Commissioner
3. M. Yusuf as Commissioner

Board of Directors

1. Agus Syabarrudin as President Director
2. Cendria Tj. Tasdik as Business Director
3. Kemal Idris as Compliance Director
4. Denny Sorimulia Karim as Operational and Transformation Director

Shareholders

Extraordinary Shareholders with 34,318,742,906 shares (78.278%) from the Total of 43,842,343,952.

Meeting Chairman

Hasanuddin as Independent President Commissioner.

Fulfillment of Legal Procedures for Extraordinary GMS Convention on 20 May 2021

1. Notification of the plan to hold a Meeting to the Chief Executive of the Capital Market Supervisory Financial Services Authority, with the Company's letter 582/DIR-BB/IV/21 dated April 6, 2021;



2. Pengumuman Rapat Perseroan dilakukan pada tanggal 13 April 2021 dan dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia, dan eASY.KSEI;
3. Pemanggilan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 28 April 2021 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI.

Kesempatan Tanya Jawab RUPS Luar Biasa 20 Mei 2021

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat Luar Biasa memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat Luar Biasa. Pada Mata Acara Rapat terdapat 1 (satu) orang peserta Rapat yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS Luar Biasa 20 Mei 2021

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan serta mengisi formulir voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan setuju. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanya Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2021, pukul 16.00 WIB.

Hasil Penghitungan Suara dalam RUPS Luar Biasa 20 Mei 2021

Suara / Vote	Jumlah Suara / Total Votes	Persen / Percent
Setuju / Agree	34.318.726.805	99,999%
Tidak Setuju / Disagree	10.600	0,000%
Abstain / Abstain	5.501	0,000%

2. Announcement of the Company's Meeting was made on April 13, 2021 and published through the Company's website, Indonesia Stock Exchange website, and eASY.KSEI;
3. Invitation to the Meeting of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk on April 28, 2021, published through the Company's website, Indonesia Stock Exchange website and eASY.KSEI.

Question and Answer Opportunity at Extraordinary GMS 20 May 2021

Before making a decision, the Chairperson of the Extraordinary Meeting provided the opportunity for shareholders to ask questions and/or provide opinions on each Extraordinary Meeting agenda. In the Meeting Agenda there was 1 (one) meeting participant who asks a question.

Decision Making Mechanism in Extraordinary GMS 20 May 2021

The Meeting decisions are made through deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus is not reached, then voting is carried out, by counting the number of shares that do not agree, abstain, and agree.

The Shareholders who disagree and abstain are welcome to raise the hands and fill out the voting form that was previously distributed, while the rest who do not raise the hands are deemed to agree. Following the session, the notary will count the votes.

Pursuant to POJK No.15/POJK.04/2020, the Shareholders with voting rights who attend the Meeting but do not cast a vote or abstain are deemed to cast the same vote as the majority vote of shareholders who cast the votes.

Those who have the rights to cast the votes at the Meeting are only legitimate Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Registry on April 27, 2021 at 16.00 Western Indonesian Time.

Hasil Penghitungan Suara dalam RUPS Luar Biasa 20 Mei 2021

**Mata Acara Rapat Pertama / First Meeting Agenda**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk untuk penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan POJK No.15/POJK.04/2020. / Changes to the Company's Articles of Association, including adjustments to the Articles of Association in accordance with the OJK Resolution No.15/POJK.04/2020.

Keputusan / Resolutions

- A. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan : / Approve the Changes in the Company's Articles of Association
- Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Utama; / Article 3 on the Purposes, Objectives, and Main Business Activities;
 - Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; / Article 11 on General Meeting of Shareholders;
 - Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; / Article 12 on Place, Notification, Announcement, Summon and Convention Time of the General Meeting of Shareholders;
 - Pasal 13 tentang Pimpinan dan tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham; / Article 13 on Chairman and the codes of conduct of the General Meeting of Shareholders;
 - Pasal 14 tentang Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. / Article 14 on the Resolutions, Attendance Quorum, Resolution Quorum in the General Meeting of Shareholders and Minutes of the General Meeting of Shareholders.
- B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan serta menyatakan kembali keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris dan selanjutnya memintakan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the resolutions of the Meeting regarding amendments to Article 3, Article 11, Article 12, Article 13 and Article 14 of the Company's Articles of Association and restated the entire Articles of Association of the Company before a Notary and subsequently requested an approval of amendments of the Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, registered it in the Company Register and announced it in the State Gazette of the Republic of Indonesia in accordance with the applicable laws and regulations.

Realisasi / Realization

Telah terealisasi dengan dikeluarkannya akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 06 tanggal 17 Juli 2021 yang dibuat oleh Syarifudin, SH. Notaris di Kota Tangerang. dengan Kemenkumham RI Nomor AHU-0044288.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0437759 tanggal 16 Agustus 2021. / Realized with the issuance of the Decree of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company Number 06 17 July 17, 2021 made by Syarifudin, SH. Notary in Tangerang City with the Indonesian Ministry of Law and Human Rights Number AHU-0044288.AH.01.02 Year 2021 dated August 16, 2021 and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System according to the Ministry of Law and Human Rights Number AHU-AH.01.03-0437759 dated August 16, 2021..

HASIL DAN REALISASI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN SEBELUMNYA**RESULTS AND REALIZATIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN THE PREVIOUS YEAR****Keputusan RUPS Luar Biasa Tanggal 26 Februari 2020****Resolutions of Extraordinary GMS February 26, 2020****Mata Acara Rapat Pertama / First Meeting Agenda**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru dan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku. / Amendments to the Company's Articles of Association in connection with the issuance of the Company's shares with new share classifications and with different nominal values in accordance with applicable regulations.

Keputusan / Resolution

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru dan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda. / Approved to make changes to the Company's Articles of Association in connection with the issuance of the Company's shares with a new classification of shares and with a different nominal value in accordance with applicable regulations, including Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2017 concerning Issuance of Shares with Different Nominal Values.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun perubahan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. / Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution to take all necessary actions related to the decision on the agenda of this meeting, including drafting amendments to the Articles of Association in a Notary Deed and submitting it to the competent authority for approval and/or receipt of notification amendments to the Articles of Association, do everything that is deemed necessary and useful for that purpose with nothing being excluded, including making additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association if this is required by the competent authority.

Realisasi / Realization

Ditindaklanjuti dan ditegaskan kembali melalui penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 2 Oktober 2020. / Followed up and reaffirmed through the holding of the Company's Extraordinary GMS on October 2, 2020.

Mata Acara Rapat Kedua / Second Meeting Agenda

Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui 2 tahapan Penawaran Umum Terbatas, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan demikian akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan. / Approval to increase the authorized capital, issued capital and paid-up capital of the Company by granting Pre-emptive Rights through 2 (two) stages of Limited Public Offering, namely Limited Public Offering VI and Limited Public Offering VII, thereby changing the Articles of Association of the Company in relation to the capital structure.

Keputusan / Resolution

1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 400.000.000.000 (empat ratus miliar) saham melalui 2 (dua) tahap, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan penjelasan sebagaimana telah dikemukakan, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan. / Give approval to the Company to issue shares by granting Pre-emptive Rights (HMETD), namely increasing the issued and paid-up capital of the Company to a maximum of 400,000,000,000 (four hundred billion) shares through 2 (two) stages, namely Limited Public Offering VI and Limited Public Offering VII, with the explanation as stated above, which will be implemented after the effectiveness of the Registration Statement from the Financial Services Authority.
2. Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan, mencakup namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019, antara lain meliputi: / Give approval to authorize the Company's Board of Directors to take all necessary actions in relation to the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by granting the Company's Pre-emptive Rights (HMETD), including but not limited to meet the requirements specified in the applicable laws and regulations including POJK No. 32/2015 in conjunction with POJK No. 14/2019, among others include:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD); / Determine the certainty of the number of shares issued in the context of the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by granting Pre-emptive Rights (HMETD);
 - b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD); / Determine the ratios of Shareholders entitled to the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by granting Pre-emptive Rights (HMETD);
 - c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan persetujuan Dewan Komisaris; / Determine the implementation price for the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by granting Pre-emptive Rights (HMETD) with the approval of the Board of Commissioners;
 - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD); / Determine the certainty of the date of the Register of Shareholders (DPS) entitled to Pre-emptive Rights (HMETD);
 - e. Menentukan kepastian penggunaan dana; / Determine the certainty of the use of funds;
 - f. Menentukan kepastian jadwal Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD); / Determine the certainty of the schedule for the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by granting Pre-emptive Rights (HMETD);
 - g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya. / Signing the documents required for the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) including Notary deeds and their amendments and/or additions.

- Memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan modal dasar dan penambahan modal disetor/ditempatkan dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) selesai dilaksanakan. / Approved the amendment of the Company's Articles of Association in relation to the increase in authorized capital and additional paid-in/issued capital in the Company after the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by granting Pre-emptive Rights (HMETD) were completed
- Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) setelah selesai dilaksanakan, selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / Give approval to grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to declare the realization of the number of shares that have been issued in the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by granting the Pre-emptive Rights (HMETD), implement resolutions of the Meeting and determine the certainty of the amount of issued and paid-up capital and declare changes to the Company's Articles of Association before a Notary, in connection with the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by granting Pre-emptive Rights (HMETD) after completed, then notify the amendments to the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and take all necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

Realisasi / Realization

Ditindaklanjuti dan ditegaskan kembali melalui penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 2 Oktober 2020. / Followed up and reaffirmed through the holding of the Company's Extraordinary GMS on October 2, 2020.

Mata Acara Rapat Ketiga / Third Meeting Agenda

Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. / Amendment to Article 3 of the Articles of Association to be adjusted to the 2017 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI).

Keputusan / Resolution

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. / Approved the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted to the 2017 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI).
- Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas. / Approved to rearrange the Articles of Association in connection with the changes as referred to in point 1 above.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. / Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take all necessary actions related to the decision on the agenda of this meeting, including compiling and restating the entire Articles of Association in a Notary Deed and submitting it to the competent authority for approval and/or approval. receiving notification of changes to the Articles of Association, doing everything that is deemed necessary and useful for that purpose with nothing being excluded, including making additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association if this is required by the competent authority.

Realisasi / Realization

Telah terealisasi dengan dikeluarkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disusun kembali dengan Nomor: 25 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dengan Kepmenkumkam RI Nomor AHU-0024924.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 dan telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0437759 tanggal 16 Agustus 2021. / It has been realized with the issuance of the Deed of Amendment to the Articles of Association which has been rearranged with Number: 25 dated March 20, 2020 made by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notary in Jakarta by Decree of the Indonesian Ministry of Law and Human Rights Number AHU-0024924.AH.01.02 of 2020 dated March 20, 2020 and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System in accordance with the Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0437759 dated August 16, 2021.



Mata Acara Rapat Pertama / First Meeting Agenda

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019. / Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Report on the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the 2019 financial year as well as providing discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions carried out in the 2019 fiscal year.

Keputusan / Resolution

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00057/3.0409 /AU.1/07/0126-1/1/III/2020 tanggal 18 Maret 2020. / Accepting and approving the Company's Annual Report including the Board of Directors' Report and ratifying the Supervisory Task Report that has been carried out by the Board of Commissioners for the fiscal year ending on December 31, 2019, and ratifying the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2019, which has been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono with the opinion "fair in all material respects" as stated in its report No. 00057/3.0409/AU.1/07/0126-1/1/III/2020 dated March 18, 2020.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. / Approved to provide full discharge and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the fiscal year ended December 31, 2019, as long as these actions are reflected in the Annual Report and the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2019.

Realisasi / Realization

Telah terealisasi. / Realized.

Mata Acara Rapat Kedua / Second Meeting Agenda

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. / Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2020.

Keputusan / Resolution

Melimpahkan dan menguasakan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik Perseroan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. Hal ini dilakukan untuk penelaahan lebih lanjut terkait Penunjukkan Akuntan Publik agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. / Delegating and authorizing the Company's Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority as the Company's Public Accountant, to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020. This is done for further study regarding the Appointment of Public Accountants to comply with regulations applicable.

Realisasi / Realization

Telah terealisasi dengan penunjukkan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. / This has been realized with the appointment of KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020.

Mata Acara Rapat Ketiga / Third Meeting Agenda

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi. / Determination of salary or honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners and delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors.

Keputusan / Resolution

Memutuskan untuk gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari Anggota Direksi dan Dewan Komisaris merujuk hasil keputusan RUPS Tahunan 2019. / Decide on the salary or honorarium and other allowances of the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners referring to the results of the 2019 Annual GMS resolutions.

Realisasi / Realization

Telah direalisasikan. / Realized.

Keputusan RUPS Luar Biasa Tanggal 2 Oktober 2020

Resolutions of Extraordinary GMS dated 2 October 2020

Mata Acara Rapat Pertama / First Meeting Agenda

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Seri A dan Seri B Perseroan melalui Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock*). / Approval of amendments to the Company's Articles of Association in relation to changes in the nominal value of the Company's Series A and Series B shares through Reverse Stock Merger.

Keputusan / Resolution

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Seri A dan Seri B Perseroan melalui Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock*), sehingga masing-masing menjadi Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk Saham seri A dan Rp180,00 (seratus delapan puluh Rupiah) untuk saham Seri B. / Approved to make changes to the Company's Articles of Association in relation to changes in the nominal value of the Company's Series A and Series B shares through the Merger of the Nominal Value of Shares (*Reverse Stock*), so that each becomes Rp1,000.00 (one thousand Rupiah) for Series A Shares and Rp180,00 (one hundred and eighty Rupiah) for Series B shares.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun perubahan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang. / Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution to take all necessary actions related to the decision on the agenda of this meeting, including preparing amendments to the Articles of Association in a Notary Deed and submitting it to the competent authority for approval and/or receipt of notification amendments to the Articles of Association, do everything that is deemed necessary and useful to make additions and/or changes in the amendments to the Articles of Association if this is required by the competent authority.

Realisasi / Realization

Telah terealisasi dengan dikeluarkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disusun kembali dengan Nomor : 02 tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat oleh Syarifudin SH., Notaris di Kota Tangerang. / This has been realized with the issuance of the Deed of Amendment to the Articles of Association which has been rearranged with Number: 02 dated October 2, 2020 made by Syarifudin SH., Notary in Tangerang City.

Mata Acara Rapat Kedua / Second Meeting Agenda

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru yaitu Seri C dan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian sekaligus melakukan pembatalan hasil RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 26 Februari 2020 untuk mata acara yang sama. / Approval of amendments to the Company's Articles of Association in connection with the issuance of the Company's shares with a new classification of shares, namely Series C and with a different nominal value in accordance with applicable regulations, thereby canceling the results of the Extraordinary GMS of the Company on February 26, 2020 for the same agenda.

Keputusan / Resolution

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru, yaitu saham Seri C dengan nilai nominal yang berbeda yaitu Rp50,00 (lima puluh Rupiah), sesuai dengan peraturan yang berlaku, di antaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2017 tentang pengeluaran saham dengan nilai nominal berbeda. / Approved to amend the Company's Articles of Association in connection with the issuance of the Company's shares with a new classification of shares, namely Series C shares with a different nominal value, namely Rp50.00 (fifty Rupiah), in accordance with applicable regulations, including Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2017 regarding the issuance of shares with different nominal values.



2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun perubahan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang. / Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution to take all necessary actions related to the decision on the agenda of this meeting, including preparing amendments to the Articles of Association in a Notary Deed and submitting it to the competent authority for approval and/or receipt of notification amendments to the Articles of Association, do everything that is deemed necessary and useful to make additions and/or changes in the amendments to the Articles of Association if this is required by the competent authority.

Realisasi / Realization

Telah terealisasi dengan dikeluarkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar dengan Nomor: 17 tanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh Syarifudin SH., Notaris di Kota Tangerang. / This has been realized with the issuance of the Deed of Amendment to the Articles of Association Number: 17 dated November 27, 2020 made by Syarifudin SH., Notary in Tangerang City.

Mata Acara Rapat Ketiga / Third Meeting Agenda

Penegasan persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui 2 tahapan Penawaran Umum Terbatas, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan demikian akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan. / Confirmation of approval to increase the authorized capital, issued capital and paid-up capital of the Company by granting Pre-emptive Rights through 2 stages of Limited Public Offering, namely Limited Public Offering VI and Limited Public Offering VII, thereby changing the Articles of Association of the Company in relation to the capital structure.

Keputusan / Resolution

Menegaskan kembali keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 26 Februari 2020 yaitu Terkait penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai POJK No. 15/2015 juncto POJK No. 14/2019 yaitu: / Reaffirming the decision of the Extraordinary GMS on 26 February 2020, which is related to increasing capital by granting Pre-emptive Rights in accordance with POJK No. 15/2015 in conjunction with POJK No. 14/2019, namely:

1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 60.820.296.033 (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh tiga) saham melalui 2 (dua) Tahap, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan penjelasan sebagaimana telah dikemukakan yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan. / Give approval to the Company to issue shares with Pre-emptive Rights (HMETD), which is to increase the issued and paid-up capital of the Company by a maximum of 60,820,296,033 (sixty billion eight hundred twenty million two hundred ninety six thousand thirty three) shares through 2 (two) Stages, namely Limited Public Offering VI and Limited Public Offering VII, with the explanation as stated above which will be implemented after the Registration Statement from the Financial Services Authority becomes effective.
2. Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan, mencakup namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019, antara lain meliputi: / Give approval to authorize the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by granting the Company's Pre-emptive Rights (HMETD), including but not limited to: meet the requirements specified in the applicable laws and regulations including POJK No. 32/2015 in conjunction with POJK No. 14/2019, among others including:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). / Determine the certainty of the number of shares issued in the context of the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by granting Pre-emptive Rights (HMETD).
 - b. Menentukan kepastian jadwal Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) / Determine the ratios of Shareholders entitled to the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by granting Pre-emptive Rights (HMETD).
 - c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya. / Determine the exercise price for the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by granting Pre-emptive Rights (HMETD) with the approval of the Board of Commissioners.
 - d. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). / Determine the certainty of the date of the Register of Shareholders (DPS) entitled to Pre-emptive Rights (HMETD).



- e. Menentukan kepastian penggunaan dana / Determine the certainty of the use of funds.
 - f. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan persetujuan Dewan Komisaris. / Determine the certainty of the schedule for the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by Granting Pre-emptive Rights (HMETD).
 - g. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). / Signing the documents required for the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) including the Notary deeds and their amendments and/or additions.
3. Memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan Modal Dasar dan penambahan Modal Disetor/Ditempatkan dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) selesai dilaksanakan. / Approved the amendments to the Company's Articles of Association in connection with the Increase of Authorized Capital and the addition of Paid-Up/Issued Capital in the Company after the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by Granting Pre-emptive Rights (HMETD) were completed.
 4. Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tersebut melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah dilaksanakan, selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / Give approval to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to declare the realization of the number of shares that have been issued in the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by granting the Pre-emptive Rights (HMETD) to implement the decision Meeting and determine the certainty of the amount of issued and paid-up capital and declare the changes to the Company's Articles of Association before a Notary, in connection with the Limited Public Offering VI (PUT VI) and Limited Public Offering VII (PUT VII) by granting Pre-emptive Rights (HMETD) after implementation, subsequently notify the amendments to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and take all necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

Realisasi / Realization

- Penawaran Umum Terbatas VI telah terealisasi dengan dikeluarkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar/ Perubahan Modal dengan Nomor: 06 tanggal 11 Februari 2021. / Limited Public Offering VI has been realized with the issuance of the Deed of Amendment to the Articles of Association /Amendment to Capital Number: 06 dated February 11, 2021.
- Penawaran Umum Terbatas VII telah terealisasi dengan dikeluarkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar/ Perubahan Modal dengan Nomor: 07 tanggal 6 Desember 2021. / The Limited Public Offering VII has been realized with the issuance of the Deed of Amendment to the Articles of Association/Change in Capital Number: 07 dated December 6, 2021.

Keduanya dibuat oleh Syarifudin SH., Notaris di Kota Tangerang. / Both realizations were drafted by Syarifudin SH., Notary in Tangerang City.



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, memberi nasihat kepada Direksi, dan memastikan bahwa perseroan betul-betul menerapkan GCG.

The Board of Commissioners is the company's organ in charge of conducting general and/or specific supervision in accordance with the articles of association, providing advice to the Board of Directors, and ensuring that the company has fully implemented the GCG.

DASAR HUKUM

Pembentukan Dewan Direksi, termasuk pula wewenang, tanggung jawab, dan keanggotaan Direksi PT Bank Banten mengacu pada dasar-dasar hukum berikut ini:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

LEGAL BASIS

The formation of the Board of Commissioners, including its authorities, responsibilities, and Commissioners membership of PT Bank Banten refers to the following legal basis:

1. Law No.40 Year 2007 on Limited Liability Company.
2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
7. Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.
8. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mengawasi kinerja Direksi dan membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
3. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration of Issuers or Public Companies.
4. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 on the Governance Implementation for Commercial Banks;
5. Financial Services Authority Regulation No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks;
6. Financial Services Authority Circular Letter No.13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;
7. The Company's prevailing Articles of Association;
8. Board of Commissioners Charter as guidance in implementing duties and responsibilities as well as oversight on the Board of Directors performance and assist the Board of Commissioners in improving the implementation of good corporate governance principles.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Pedoman dan Tertib Kerja, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan dan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dan auditor internal (SKAI), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak Otoritas;
4. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar.
6. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pursuant to the Charter, the Board of Commissioners duties and responsibilities include:

1. Ensuring the implementation of GCG in every Company's business activities in all levels or organization elements;
2. Implementing supervisory on the Board of Directors duties and responsibilities, namely by directing, monitoring and evaluating the Company's strategic policy implementation, as well as advisory to the Board of Directors;
3. Ensuring that the audit findings and recommendation from the internal audit (IAU), external auditors and authorities supervision results are followed up by the Board of Directors;
4. Providing approval on certain issues agreed upon with the Board of Directors as long as the matters are not against the Bank's Articles of Association and prevailing laws and regulations;
5. In certain conditions, shall convene the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law and Articles of Association;
6. Notifying the authorities at the latest 7 (seven) working days since the finding of:
 - a. Violation in financial and banking laws and regulations; and
 - b. Events or estimation of event that may put the Bank's business continuity at risk.

7. Membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dan wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.
8. Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern, Dewan Komisaris bertanggung Jawab:
 - a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - b. Mengkaji efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Divisi Audit Intern paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Intern, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

PERNYATAAN KEPEMILIKAN PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dimuat dalam Piagam Dewan Komisaris dan disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
7. Anggaran Dasar Perseroan berikut dengan perubahan-perubahannya yang berlaku;

7. Establishing at least the Audit Committee, Risk Oversight Committee as well as Remuneration and Nomination Committee and shall evaluate the committees' performance at the end of fiscal year.
8. In conducting Internal Audit function, the Board of Commissioners is responsible for:
 - a. Ensuring that the Board of Directors prepares and maintains an adequate, effective, and efficient internal control system;
 - b. Reviewing the effectiveness and efficiency of the internal control system based on information obtained from the Internal Audit Division at least 1 (one) time in 1 (one) year;
 - c. Appointing an independent quality controller from an external party to review the performance of the Internal Audit Division, taking into account the recommendations of the Audit Committee.

STATEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS WORK GUIDELINES AND ETHICS ESTABLISHMENT

The Company has the Board of Commissioners Work Guidelines and Ethics as stated in the BOC Charter and prepared based on:

1. Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company;
2. Regulation of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. Regulation of Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
4. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;
5. Financial Services Authority Regulation No.1/POJK.03/2019 dated January 28, 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks;
6. Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;
7. The Articles of Association of the Company and its applicable amendments;



Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris menjadi panduan bagi Bank Banten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mengawasi kinerja Direksi sekaligus membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Per 31 Desember 2021, komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Hasanuddin	Komisaris Utama Independen / President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	RUPSLB 10 Maret 2021 / EGMS 10 March 2021
Media Warman	Komisaris Independen / Independent Commissioner	RUPSLB 22 November 2017 / EGMS 22 November 2017
M. Yusuf	Anggota / Member	RUPSLB 10 Maret 2021 / EGMS 10 March 2021

Semua anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam proses mengambil keputusan wajib menghindari benturan kepentingan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Pengendali maupun pihak eksternal yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan. Setiap keputusan Dewan Komisaris bersifat independen dan untuk kepentingan Perseroan.

KRITERIA DEWAN KOMISARIS

- Memiliki akhlak, moral yang baik dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;

The Board of Commissioners charter serves as guidance in duties implementation and responsibility as well as in the oversight of the Board of Directors performance, and assists the Board of Commissioners in improving the good corporate governance implementation.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As of 31 December 2021, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

All members of the Board of Commissioners have passed the fit and proper test by the Financial Services Authority.

INDEPENDENCY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners in decision making process shall avoid any conflict of interest with other members of the Board of Commissioners the Board of Directors, Controlling Shareholders or any external party having business relationship with the Company. Every decision made shall be independent and for the purpose of the Company.

CRITERIA OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

- Having good moral and integrity as well as legal capacity to take any legal action;
- Within the past five (5) years prior to appointment and during the course of terms:
 - Has never been declared bankrupt;
 - Has never been act as former member of Board of Commissioners or Board of Directors which was declared guilty causing a bankruptcy of a company;
 - Has never been sentenced for a crime causing financial loss to the country and/or financial sector;
 - Has never been act as former member of Board of Commissioners or Board of Directors whereby during each directorship:
 - Never conducted an Annual General Meeting of Shareholders;

- ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERITAHUAN

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris pada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

RANGKAP JABATAN

Bank Banten telah memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif di lembaga maupun perusahaan keuangan, baik bank dan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri, sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Tata Kelola Bank Umum.

Dalam mematuhi independensinya, masing-masing anggota Dewan Komisaris telah dipastikan tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal.

Dalam pelaksanaannya, Bank Banten juga memastikan bahwa Komisaris Independen telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal, yakni sebagai berikut:

- ii. His accountability, management and supervisory report rejected by the General Meeting of Shareholders or failed to submit his accountability report as a member of the Board of Directors and/ or Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders, and;
 - iii. Caused a company that had already obtained licenses, approvals or registered with the Financial Service Authority to not fulfil its obligations to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Service Authority.
3. Has a strong commitment to obey and comply with the prevailing regulations;
 4. Has a good knowledge and/or competence required by the issuer or public company.

APPOINTMENT AND DISMISSAL

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders. The proposed appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Commissioners to GMS must consider a recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

CONCURRENT POSITIONS

Bank Banten has ensured that all members of the Board of Commissioners do not hold any concurrent position as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or Executives at the financial institutions or financial companies, both banks or non banks, as stipulated by the Financial Services Authority regarding the implementation of Corporate Governance of Commercial Banks.

To fulfil its independency, each member of the Board of Commissioners does not have familial relations up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners from outside the Issuer or Public Company and fulfills the requirements as referred to in the Capital Market Regulations.

In its implementation, Bank Banten also ensures that the Independent Commissioner complies with the requirements as stipulated in the Capital Market Regulations, which are as follows:



1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan merawat komitmen untuk senantiasa menerapkan GCG secara optimal, Bank Banten membentuk sejumlah komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Komite Audit.
2. Komite Pemantau Risiko.
3. Komite Nominasi Remunerasi dan Nominasi.

Sepanjang tahun 2021, seluruh komite telah menunjukkan kinerja yang optimal melalui rekomendasi dan atau usulan yang diberikan kepada Dewan Komisaris melalui rapat secara berkala. Dan digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengawasan atas kinerja Bank.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS 2021

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya, antara lain meliputi:

1. Mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) di Bank Banten;
2. Melakukan review atas Laporan Keuangan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan selama tahun 2021 pada surat kabar;
3. Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022-2024 yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
4. Memberikan persetujuan atas action plan Bank Banten dalam rangka melakukan langkah perbaikan atas kinerja Bank Banten;

1. Not the person who work or have authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise over the activities of the Company within the last 6 (six) months, unless for reappointment as an Independent Commissioner of the Company for the next period;
2. Do not have direct or indirect shares of the Company;
3. Do not have any affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or major shareholders of the Company; and
4. Do not have any direct or indirect business relationship with the Company's activities.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

To assist the implementation of the duties of the Board of Commissioners and maintain the commitment to always implement GCG optimally, Bank Banten has formed a number of committees under the Board of Commissioners as follows:

1. Audit Committee.
2. Risk Oversight Committee.
3. Remuneration and Nomination Committee.

Throughout 2021, all committees have delivered their best performance through the recommendation/suggestion to the Board of Commissioners by periodical meetings and have been used by the Board of Commissioners as the supervision basis of Bank's performance.

DUTIES IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2021

In 2021, the Board of Commissioners performed their duties, such as:

1. Supervise the implementation of Good Corporate Governance principles at Bank Banten;
2. Reviewing the 2020 Annual Financial Statements and quarterly Published Financial Reports for 2021 in newspapers;
3. Approval of the 2022-2024 Bank Business Plan (RBB) which has been submitted to the Financial Services Authority;
4. Approving the action plan of Bank Banten in order to take steps to improve the performance of Bank Banten;

- Melakukan pengawasan atas realisasi RBB serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran);
- Melakukan rapat secara berkala dengan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris untuk membahas kinerja dan rencana strategis Bank Banten;
- Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui rapat-rapat rutin dengan Direksi terkait pelaksanaan kebijakan strategis Bank Banten;
- Melakukan pembahasan temuan audit internal, temuan audit OJK dengan Direksi dan divisi-divisi terkait dalam memastikan langkah tindak lanjutnya;
- Memastikan bahwa Direksi selalu menindaklanjuti hasil temuan audit internal maupun eksternal (Otoritas Jasa Keuangan) selama tahun 2021;
- Menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020 kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021.

- Supervise the realization of the RBB and submit reports to the Financial Services Authority (every semester);
- Conduct regular meetings with the Committees under the Board of Commissioners to discuss the performance and strategic plans of Bank Banten;
- Supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors through regular meetings with the Board of Directors regarding the implementation of Bank Banten's strategic policies;
- Discussing internal audit findings, OJK audit findings with the Board of Directors and related divisions in ensuring follow-up steps;
- Ensure that the Board of Directors always follows up on the findings of internal and external audits (Financial Services Authority) during 2021;
- Delivering accountability for supervisory duties that have been carried out during the 2020 financial year to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

Dalam rangka mengembangkan kompetensinya, anggota Dewan Komisaris Perseroan mengikuti pelatihan atau program pengembangan kompetensi secara berkala. Pada tahun 2021, pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Bapak Hasanuddin - Komisaris Utama Independen

COMPETENCY TRAINING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In order to develop their competence, members of the Company's Board of Commissioners attended training or competency development programs on a regular basis. In 2021, details of the training attended by the Board of Commissioners are described in details as follows:

Mr. Hasanuddin – Independent President Commissioner

No	Tanggal Pelaksanaan / Implementation Date	Judul/Jenis Pelatihan / Title/Type of Training	Penyelenggara / Organizer
1	Maret 2021 / March 2021	Digital Banking di Era Pandemi / Digital Banking in the Pandemic Era	FKDK BPDSI
2	Mei 2021 / May 2021	Peran BPD Dalam Pembiayaan Infrastruktur Daerah (Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol) / The Role of BPD in Financing Regional Infrastructure (Toll Road Development Financing)	FKDK BPDSI
3	Juli 2021 / July 2021	Kewajiban Bank Umum Dalam Pemenuhan Modal Inti Minimum Sesuai Dengan POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum / Obligations of Commercial Banks in Fulfilling Minimum Core Capital In accordance with POJK No. 12/POJK.03/2020 Regarding Commercial Bank Consolidation	FKDK BPDSI
4	September 2021 / September 2021	Tindak Pidana Perbankan: Tantangan dan Strategi Pencegahannya / Banking Crime: Challenges and Prevention Strategies	FKDK BPDSI
5	Oktober 2021 / October 2021	Penguatan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dalam rangka mendorong BPD Lebih Berdaya Saing, Adaptif dan Kontributif bagi Perekonomian Nasional / Strengthening the Active Supervision of the Board of Commissioners in order to encourage BPD to be More Competitive, Adaptive and Contributive to the National Economy	FKDK BPDSI
6	Desember 2021 / December 2021	Peran Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) Dalam Pemberdayaan UMKM / The Role of Regional Development Banks throughout Indonesia (BPDSI) in Empowering MSMEs	FKDK BPDSI
7	Desember 2021 / December 2021	Kewajiban Bank untuk Spin Off (Pemisahan) Unit Usaha Syariah / Bank Obligations for Spin Off (Separation) of Sharia Business Units	FKDK BPDSI



Bapak Media Warman – Komisaris
Mr. Media Warman – Commissioner

No	Tanggal Pelaksanaan / Implementation Date	Judul/Jenis Pelatihan / Title/Type of Training	Penyelenggara / Organizer
1	Januari 2021 / January 2021	Upaya Penguatan Sinergi BPD Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional / Efforts in Strengthening BPD Synergy to Support National Economic Recovery	FKDK BPDSI
2	Maret 2021 / March 2021	<i>Digital Banking</i> di Era Pandemi / Efforts to Strengthen BPD Synergy to Support Digital Banking National Economic Recovery in the Pandemic Era	FKDK BPDSI
3	Mei 2021 / May 2021	Peran BPD Dalam Pembiayaan Infrastruktur Daerah (Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol) / The Role of BPD in Financing Regional Infrastructure (Toll Road Development Financing)	FKDK BPDSI
4	Juli 2021 / July 2021	Kewajiban Bank Umum Dalam Pemenuhan Modal Inti Minimum Sesuai Dengan POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum / Obligations of Commercial Banks in Fulfilling Minimum Core Capital In accordance with POJK No. 12/POJK.03/2020 Regarding Commercial Bank Consolidation	FKDK BPDSI
5	September 2021 / September 2021	Tindak Pidana Perbankan: Tantangan dan Strategi Pencegahannya / Banking Crime: Challenges and Prevention Strategies	FKDK BPDSI
6	Oktober 2021 / October 2021	Penguatan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dalam rangka mendorong BPD Lebih Berdaya Saing, Adaptif dan Kontributif bagi Perekonomian Nasional / Strengthening the Active Supervision of the Board of Commissioners in order to encourage BPD to be More Competitive, Adaptive and Contributive to the National Economy	FKDK BPDSI
7	Desember 2021 / December 2021	Peran Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) Dalam Pemberdayaan UMKM / The Role of Regional Development Banks throughout Indonesia (BPDSI) in Empowering MSMEs	FKDK BPDSI
8	Desember 2021 / December 2021	Kewajiban Bank untuk Spin Off (Pemisahan) Unit Usaha Syariah / Bank Obligations for Spin Off (Separation) of Sharia Business Units	FKDK BPDSI

Bapak M. Yusuf – Komisaris
Mr. M. Yusuf - Commissioner

No	Tanggal Pelaksanaan / Implementation Date	Judul/Jenis Pelatihan / Title/Type of Training	Penyelenggara / Organizer
1	Maret 2021 / March 2021	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 / Risk Management Certification Level 1	LSPP
2	Maret 2021 / March 2021	<i>Digital Banking</i> di Era Pandemi / Digital Banking in the Pandemic Era	FKDK BPDSI
3	Mei 2021 / May 2021	Peran BPD Dalam Pembiayaan Infrastruktur Daerah (Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol) / Role of BPD in Local Infrastructure Financing (Toll Road Construction Financing)	FKDK BPDSI
4	Juli 2021 / July 2021	Kewajiban Bank Umum Dalam Pemenuhan Modal Inti Minimum Sesuai Dengan POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum / The Role of BPD in Financing Regional Infrastructure (Toll Road Development Financing) Obligations of Commercial Banks in Fulfilling Minimum Core Capital In accordance with POJK No. 12/POJK.03/2020 Regarding Commercial Bank Consolidation	FKDK BPDSI
5	September 2021 / September 2021	Tindak Pidana Perbankan: Tantangan dan Strategi Pencegahannya / Banking Crime: Challenges and Prevention Strategies	FKDK BPDSI
6	Oktober 2021 / October 2021	Penguatan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dalam rangka mendorong BPD Lebih Berdaya Saing, Adaptif dan Kontributif bagi Perekonomian Nasional / Strengthening the Active Supervision of the Board of Commissioners in order to encourage BPD to be More Competitive, Adaptive and Contributive to the National Economy	FKDK BPDSI
7	Desember 2021 / December 2021	Peran Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) Dalam Pemberdayaan UMKM / The Role of Regional Development Banks throughout Indonesia (BPDSI) in Empowering MSMEs	FKDK BPDSI
8	Desember 2021 / December 2021	Kewajiban Bank untuk Spin Off (Pemisahan) Unit Usaha Syariah / Bank Obligations for Spin Off (Separation) of Sharia Business Units	FKDK BPDSI
9	Desember 2021 / December 2021	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level II / Provision of Level II Risk Management Certification	Efektif Pro

Direksi

Board of Directors

Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2017.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Anggaran Dasar Perseroan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, antara lain: mengatur tugas dan tanggung jawab, etika, dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat sesuai dengan SK No.394/SK/DIR-BB/21 tanggal 29 Juli 2021 tentang Tugas dan Kewajiban, dengan rincian tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank.
3. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern.
4. Membentuk paling kurang Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap operasional Bank.
5. Membentuk paling kurang Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Kredit dan *Asset Liability Committee* (ALCO), serta wajib mengevaluasi kinerja komite setiap akhir tahun.
6. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
7. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai.
8. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank.

The Board of Directors is a Company Organ that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company.

LEGAL BASIS

1. Law No. 40 Year of 2017
2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
3. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 on the Governance Implementation for Commercial Banks;
4. Articles of Association of the Company.

BOARD OF DIRECTOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

In the implementation of its duties, the Board of Directors refers to the Charter, namely: regulates the duties and responsibilities, work ethics and periods as well as meetings convention in accordance with the Decree No. 394/SK/DIR-BB/21 July 29, 2021, which regulates the following duties and responsibilities:

1. Implementing duties and responsibilities in managing the Bank in accordance with the authorities, Articles of Association and prevailing laws and regulations;
2. Implementing Good Corporate Governance principles in every Bank's business activities in all organization elements of the Bank;
3. Following up the internal and external auditors' recommendation;
4. Establishing at least the Internal Audit Unit (IAU), Risk Management Unit (RMU) and Compliance Unit that are independent toward the Bank's operations;
5. Establishing at least the Risk Management Committee, Information Technology Steering Committee, Credit Policy Committee, and Asset Liability Committee (ALCO). The committees' performance shall be evaluated at the end of fiscal year;
6. Providing accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners;
7. Disclosing the strategic policy in employment to the employees;
8. Disclosing material facts regarding Bank's condition in order to not provide false information regarding the Bank's condition and situation;



9. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi.
10. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proyek bersifat khusus;
 - b. Didasari oleh kontrak kerja yang jelas; dan
 - c. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus;
11. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan UU dan Anggaran Dasar.
12. Bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas kerugian pihak lain akibat pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apabila terbukti:
 - a. Bukan karena kesalahan/kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Direktur Utama

- a. Merencanakan, Memimpin, Mengawasi, dan Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur termasuk Divisi yang berada langsung di bawah supervisinya yang meliputi antara lain Divisi Sekretariat Perusahaan, Perencanaan & Hukum, Divisi Audit Internal, dan Divisi *Treasury* dalam mendukung pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS Perseroan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perbankan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasikan, Membangun, dan Mengarahkan dalam penetapan sasaran dan strategi serta kebijakan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan pasar dengan mendorong Bisnis dalam memasarkan produk dan jasa dengan lebih dinamis dan kompetitif serta pengkajian yang lebih komprehensif dari Divisi Manajemen Risiko.

Direktur dan Transformasi

- a. Merencanakan, Memimpin dan Mengkoordinasikan serta Mengawasi secara langsung aktivitas Divisi-Divisi yang berada di bawah supervisinya yang meliputi Divisi

Scope of Works and Responsibilities of each Member of the Board of Directors

President Director:

- a. Plan, Lead, Supervise, and Coordinate the activities and implementation of duties of all Directors including the Divisions that are directly under his/her supervision which include, among others, the Corporate Secretariat, Planning & Legal Division, Internal Audit Division, and Treasury Division in supporting the implementation of the Company's management as stipulated in the Budget The basis and resolutions of the Company's GMS with due observance of the prevailing laws and regulations and banking regulations;
- b. Coordinate, Build, and Direct in setting targets and strategies and policies needed to meet the challenges of market competition by encouraging Business to market products and services more dynamically and competitively as well as a more comprehensive assessment of the Risk Management Division

Operations Director:

- a. Plan, Lead, and Coordinate as well as Directly Supervise the activities of the Divisions under his/her supervision which include the Operational & General Division,



Operasional, & Umum, Divisi Teknologi Informasi & Big Data, Divisi Human Capital & Transformasi, Divisi Akuntansi & Keuangan dan Kepala Cabang, guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku;

- b. Memimpin dan memastikan tercapainya sasaran Operasional Perusahaan berdasarkan maksud dan tujuan, visi dan misi serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan dalam bidang keuangan dan operasional sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Direktur Kepatuhan

- a. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku, untuk meningkatkan *Good Corporate Governance* perbankan, kualitas manajemen risiko, dan kemampuan operasional manajemen;
- b. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Bisnis:

- a. Merencanakan, Memimpin dan Mengkoordinasikan serta Mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan satuan kerja di Divisi yang berada di bawah supervisinya yang meliputi Divisi Kredit, Divisi Dana & Jasa, Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit, dan Area Manager dalam mendukung pencapaian target bisnis yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);
- b. Memimpin dan memastikan tercapainya sasaran bisnis Perusahaan berdasarkan maksud dan tujuan, visi dan misi serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan dalam bidang pengembangan dan pemasaran bisnis Komersial, Konsumer, UMKM baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang mengacu pada:

1. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.
4. Anggaran Dasar Perseroan.

Information Technology & Big Data Division, Human Capital & Transformation Division, Accounting & Finance Division and Branch Heads, to ensure implementation run in accordance with applicable regulations and policies;

- b. Lead and ensure the achievement of the Company's Operational targets based on the aims and objectives, vision and mission as well as the Company's Long Term Plan in the financial and operational fields as stipulated in the Bank's Business Plan (RBB).

Compliance Director:

- a. Ensure the Bank's compliance with various applicable rules and regulations to improve banking Good Corporate Governance, risk management quality, and management operational capability;
- b. Ensure that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of Bank Indonesia/ Financial Services Authority and the prevailing laws and regulations.

Business Director:

- a. Plan, Lead and Coordinate as well as Directly Supervise the implementation of work unit work in the Divisions under his/her supervision which include the Credit Division, Funds & Services Division, Restructuring & Credit Settlement Division, and Area Manager in supporting the achievement of business targets set out in the Bank's Business Plan (RBB);
- b. Lead and ensure the achievement of the Company's business goals based on the aims and objectives, vision and mission as well as the Company's Long Term Plan in the field of Commercial, Consumer, MSME business development and marketing both at the Head Office and Branch Offices.

BOARD OF DIRECTORS CHARTER

The Company has in place the Board of Directors Charter stipulated based on the Board of Directors Decree which referring to:

1. Law No. 40 year 2007 regarding Limited Company.
2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuers or Public Companies.
3. Indonesian Stock Exchange Regulation No. I-A concerning Listing of Shares and Non-Share Securities Issued by Listed Companies;
4. The Company's Articles of Association.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun sebagai pedoman kerja bagi Direksi. Dengan tujuan agar Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri, dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perusahaan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan.

KOMPOSISI DIREKSI

Hingga 31 Desember 2021, komposisi Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Agus Syabaruddin	Direktur Utama / President Director	RUPSLB 10 Maret 2021 / EGMS 10 March 2021
Cendria Tj. Tasdik	Direktur / Director	RUPSLB 10 Maret 2021 / EGMS 10 March 2021
Kemal Idris	Direktur / Director	RUPSLB 22 November 2017 / EGMS 22 November 2017
Denny Sorimulia Karim	Direktur / Director	RUPSLB 10 Maret 2021 / EGMS 10 March 2021

Semua anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

RANGKAP JABATAN

Bank Banten telah memastikan seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. Perseroan juga sudah memastikan seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank atau perusahaan lain, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam memenuhi independensinya, Bank Banten telah memastikan masing-masing anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

KRITERIA DIREKSI

Perseroan memastikan seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

- Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik serta cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
- Dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

The Board of Directors Charter is regulated as a working guideline for the Board of Directors in order to perform their duties and responsibilities in a transparent, accountable, responsible, independent, and fair in the efforts to achieve purposes of the Company as well as provide an expected value by the interested parties.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Board of Directors of the Company as of December 31, 2021 is as follows:

All members of the Board of Directors have passed the fit and proper test by the Financial Services Authority.

CONCURRENT POSITIONS

Bank Banten has ensured that members of the Board of Directors do not hold any concurrent position as regulated by the Financial Services Authority regarding the implementation of Corporate Governance of Commercial Banks, and are not holding any concurrent position in other banks or companies, both domestically and overseas. To fulfil its independency, each member of the Board of Directors does not have familial relations up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.

BOARD OF DIRECTOR CRITERIA

The Company ensures that all members of the Board of Directors of the Company shall meet the general requirements as defined in the Financial Services Authority Regulations, namely:

- Has good moral and integrity as well as capable in carrying out legal actions;
- Within the past five (5) years prior to appointment and during the course of directorship:
 - has never been declared bankrupt;
 - has never been act as former member of Board of Directors or Board of Commissioners which was declared guilty causing a bankruptcy of a company;
 - has never been sentenced for a crime causing financial loss to the country and/or financial sector; and

- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

INDEPENDENSI DIREKSI

Dalam proses pengambilan keputusan, Direksi telah memastikan tidak terjadi benturan kepentingan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang saham Pengendali maupun pihak eksternal yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan. Setiap keputusan Direksi untuk kepentingan Perseroan bersifat independen.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE YANG Mendukung PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Guna penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan membantu tugas Direksi, Perseroan telah membentuk beberapa komite di bawah Direksi dengan keanggotaan Komite per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. *Asset & Liability Committee* (ALCO), SK Direksi No. 151 tanggal 21 Oktober 2020.
2. Komite Manajemen Risiko, SK Direksi No. 118/SK/DIR-BB/XI/18 tanggal 9 November 2018;
3. Komite Kebijakan Perkreditan, SK Direksi No. 088/SK/DIR-BB/XII/17 tanggal 29 Desember 2017.

- d. has never served as member of Board of Directors or Board of Commissioners whereby during its term:
 - i. Did not conduct an Annual General Meeting of Shareholders,
 - ii. His/her accountability, management and supervisory report rejected by the General Meeting of Shareholders or failed to submit his/her accountability report as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders, and;
 - iii. Caused a company that had already obtained licenses, approvals or registered with the Financial Service Authority to not fulfil its obligations to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Service Authority;
3. Has a strong commitment to obey and comply with the prevailing regulations;
4. Has a good knowledge and/or competence required by the issuers or public companies.

APPOINTMENT AND DISMISSAL

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS). The proposed appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Directors to GMS must consider a recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

INDEPENDENCY OF THE BOARD OF DIRECTORS

In the decision-making process, the Board of Directors has ensured no conflict of interest with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Controlling Shareholders or external parties that have business relations with the Company. Every decision of the Board of Directors for the Company's interests is independent.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS COMMITTEES

In the implementation of good corporate governance and in order to assist the Board of Directors' duties, the Company has established several Committees under the Board of Directors, with the following membership as of 31 December 2020:

1. *Asset & Liability Committee* (ALCO), BOD Decree No. 151 dated 21 October 2020.
2. Risk Management Committee, BOD Decree No. 118/SK/DIR-BB/XI/18 dated 9 November 2018.
3. Credit Policy Committee, BOD Decree No. 088/SK/DIR-BB/XII/17 dated 29 December 2017.



4. Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi, SK Direksi No. 102/SK/Dir-BB/VIII/20 pada tanggal 13 Agustus 2020.
5. Komite Kebijakan Bank, SK Direksi No. 128/SK/Dir-BB/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
6. Komite Disiplin, SK Direksi No. 002/SK/DIR-BB/I/17 tanggal 27 Januari 2017.

Rapat Komite di bawah Direksi dilakukan secara berkala, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan data pendukung rapat dengan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2021, Rapat Komite berjalan secara optimal disertai peningkatan kualitas setiap komite yang ada di Perseroan.

PELATIHAN KOMPETENSI DIREKSI

Dalam mengembangkan kompetensinya, anggota Direksi Perseroan dapat mengikuti pelatihan atau program pengembangan kompetensi. Pada tahun 2021, pelatihan yang diikuti oleh Direksi tersedia di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2021

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama:

- a. Mengkoordinasikan dan memimpin serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengurusan perusahaan sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perusahaan;
- b. Mengarahkan dan menetapkan penyusunan Business Plan serta *Action Plan* jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pada bidang bisnis (Kredit dan Pendanaan) serta operasional bank agar sejalan dengan kebijakan perusahaan;
- c. Mengendalikan kegiatan organisasi dan aktivitas perusahaan agar tetap fokus pada strategi dasar pencapaian sasaran perusahaan, termasuk dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Divisi Audit Intern;

4. Information Technology Steering Committee, BOD Decree No. 102/SK/Dir-BB/VIII/20 dated 13 August 2020.
5. Bank Policy Committee, BOD Decree No. 128/SK/Dir-BB/X/2019 dated 31 October 2019.
6. Discipline Committee, BOD Decree No. 002/SK/DIR-BB/I/17 dated 27 January 2017.

The meetings of Committees under the Board of Directors are carried out periodically to provide recommendation to the Board of Directors, as a forum of decision-making and meetings' supporting material with the Board of Commissioners.

Throughout 2021, the Committee's meetings were carried out optimally by continuing to improve the quality of each committee in the Company.

BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY TRAINING

In developing their competence, members of the Company's Board of Directors can take part in training or competency development programs. In 2021, the training attended by the Board of Directors was available in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2021

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors in 2021 are as follows:

President director:

- a. Coordinated and led and be responsible for the implementation of the company's management as stipulated in the Company's Articles of Association, GMS Resolutions while still taking into account the principles of Good Corporate Governance in every company's business activities at all levels or levels of the Company's organization;
- b. Directed and determined the preparation of Business Plans and short, medium and long term Action Plans in the business sector (Credit and Funding) and bank operations to be in line with company policies;
- c. Controlled organizational activities and company activities to stay focused on the basic strategy of achieving company goals, including by paying attention to the results of examinations and recommendations submitted by the Internal Audit Division;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> d. Memberi pengarahan atas penyusunan anggaran tahunan (<i>annual budget</i>) yang meliputi penerimaan, biaya dan keuntungan, dan melakukan evaluasi atas usulan anggaran konsolidasi serta memotivasi dan mendukung jajaran manajemen untuk mencapai anggaran yang telah disepakati; e. Mengembangkan seluruh sumberdaya dalam perusahaan (SDM, <i>Fixed Asset</i>, Keuangan) agar dapat memberi kontribusi yang lebih baik dalam pencapaian sasaran perusahaan maupun perkembangan perusahaan (<i>corporate growth</i>) secara berkesinambungan; f. Membangun dan Mengarahkan peningkatan prudential banking agar kegiatan bank senantiasa berpedoman pada Standar Operasional Prosedur, Kepatuhan dan Manajemen Risiko; g. Menetapkan perencanaan dan konsep-konsep serta langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran-sasaran bisnis sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) serta melakukan evaluasi berkala atas pencapaian sasaran bisnis; h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Direktur Bisnis dalam mengarahkan dan membina unit kerja Kepala Divisi dan Kepala Cabang untuk mencapai target pangsa pasar (<i>market share</i>) dan meningkatkan volume bisnis (dana dan kredit) di seluruh Area Manager dan Kantor Cabang di bawahnya; i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Direktur Operasional dan Transformasi dalam memimpin dan mengarahkan strategi, tujuan, dan target finansial, implementasi kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank, untuk jangka pendek dan jangka panjang secara komprehensif; j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dalam memimpin dan mengarahkan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam bidang Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum Bank terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Perbankan yang berlaku; k. Mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mensupervisi secara langsung unit kerja/Divisi yang berada di bawah koordinasinya (Divisi Sekretariat Perusahaan, Perencanaan & Hukum, Divisi Audit Intern, dan Divisi Treasury) secara berkesinambungan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga pelaksanaannya berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tetap pada tujuan dan strategi jangka panjang Perusahaan; l. Memastikan tercapainya sasaran Perusahaan berdasarkan maksud dan tujuan, visi dan misi serta rencana jangka panjang Perusahaan dengan penuh tanggung jawab; | <ul style="list-style-type: none"> d. Provided direction on the preparation of the annual budget (<i>annual budget</i>) which includes revenues, costs and profits, and evaluate the proposed consolidated budget as well as motivate and support the management to achieve the agreed budget; e. Developed all resources within the Company (HR, Fixed Assets, Finance) in order to make a better contribution to the achievement of company goals and sustainable development of the company (<i>corporate growth</i>); f. Developed and directed the improvement of prudential banking so that bank activities are always guided by Standard Operating Procedures, Compliance and Risk Management; g. Established plans and concepts as well as strategic steps in achieving business goals in accordance with the budget planning set out in the Bank's Business Plan (RBB) as well as conducting periodic evaluations of the achievement of business goals; h. Coordinated the implementation of the Business Director's activities in directing and fostering the work units of Division Heads and Branch Heads to achieve market share targets and increase business volume (funds and credit) in all Area Managers and Branch Offices under them; i. Coordinated the implementation of the activities of the Director of Operations and Transformation in leading and directing strategies, objectives and financial targets, implementing policies and strategies related to bank operational activities, for the short and long term in a comprehensive manner; j. Coordinated the implementation of the activities of the Director in charge of the compliance function in leading and directing the preparation and implementation of policies and strategies in the field of Risk Management, Compliance and Bank Law with respect to the prevailing laws and regulations and banking regulations; k. Coordinated, directed, and directly supervised the work units/divisions under his/her coordination (Corporate Secretariat, Planning & Legal Division, Internal Audit Division, and Treasury Division) on an ongoing basis in accordance with their respective fields, so that the implementation runs smoothly, effectively, efficient and stick to the Company's long-term goals and strategies; l. Ensured the achievement of the Company's goals based on the aims and objectives, vision and mission as well as the Company's long-term plans with full responsibility; |
|---|---|



- m. Membangun struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- n. Mengarahkan proses tindak lanjut penyelesaian temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan dari otoritas lainnya yang berkaitan;
- o. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- p. Mengarahkan dalam pembuatan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sekaligus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
- r. Melakukan Hak dan Kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi;
- s. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Direksi.

Direktur Operasional dan Transformasi:

- a. Mengkoordinasikan dan memimpin serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengurusan Perusahaan sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perusahaan;
- b. Mengendalikan kegiatan organisasi dan aktivitas Perusahaan agar tetap fokus pada strategi dasar pencapaian sasaran Perusahaan, termasuk dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Internal Audit;
- c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran tahunan (*Annual Budget*) yang meliputi penerimaan, biaya dan keuntungan, dan melakukan

- m. Built an internal control structure, ensured the implementation of the internal audit function at every level of management and following up on internal audit findings in accordance with the policies or directions given by the Board of Commissioners;
- n. Directed the follow-up process for the completion of audit findings and recommendations from the External Auditor, the results of the supervision of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and/or the results of the supervision of other relevant authorities;
- o. Submitted the Annual Work Plan which includes the Annual Budget to the Board of Commissioners for approval from the Board of Commissioners, prior to the start of the next fiscal year, with due observance of the applicable provisions;
- p. Directed in the preparation of Annual Reports, Financial Reports and other company documents as referred to in the applicable laws and regulations;
- q. Led and coordinated the implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) as well as being accountable for the implementation of its duties and responsibilities to the Shareholders through the General Meeting of Shareholders;
- r. Performed the rights and obligations of the Director as stipulated in the Company's Articles of Association and the Limited Liability Company Law, if for certain actions a decision is required from all members of the Board of Directors;
- s. Carried out other duties and responsibilities as stipulated in the guidelines and work procedures of the Board of Directors.

Director of Operations and Transformation:

- a. Coordinated and led and was responsible for the implementation of the Company's management as stipulated in the Company's Articles of Association, GMS Resolutions while still taking into account the principles of Good Corporate Governance in every company's business activities at all levels or levels of the Company's organization;
- b. Controlled the organization's activities and the Company's activities in order to stay focused on the basic strategy of achieving the Company's goals, including by paying attention to the results of audit and recommendations submitted by the Internal Audit;
- c. Directed and coordinated the preparation of the Annual Budget which includes revenues, costs and profits, and evaluating the proposed consolidated budget as well as

- evaluasi atas usulan anggaran konsolidasi serta memotivasi dan mendukung jajaran manajemen untuk mencapai anggaran yang telah disepakati;
- d. Merumuskan perencanaan dan konsep-konsep serta langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran-sasaran bisnis sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) serta melakukan evaluasi berkala atas pencapaian sasaran bisnis;
 - e. Mengarahkan dan mensupervisi serta mengendalikan unit kerja yang berada di bawah supervisinya secara berkesinambungan dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing agar sejalan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perbankan yang berlaku sehingga mampu menghadapi persaingan pasar;
 - f. Membangun dan Mengarahkan peningkatan Prudential Banking agar kegiatan bank senantiasa berpedoman pada Standar Operasional Prosedur, Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
 - g. Mengarahkan penyusunan Business Plan serta Action Plan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pada bidang keuangan dan operasional agar sejalan dengan kebijakan perusahaan;
 - h. Mengkoordinasikan perancangan konsep dan *Operating Flow & Technology* dalam bidang Operasional Bank untuk selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi;
 - i. Menyetujui laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi perbankan di Indonesia, berikut analisisnya, tersedia tepat waktu dan dapat digunakan Direksi sebagai referensi penyusunan kebijakan dan strategi;
 - j. Menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan berkala perusahaan publik tersedia dan diajukan pada waktunya sesuai dengan dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - k. Menetapkan dan memperbaharui (*update*) sistem prosedur operasional Perusahaan dan Standard Pelayanan Nasabah (*Service Level Agreement*);
 - l. Menetapkan dan mengarahkan penyusunan dan pelaporan anggaran operasional dan Perusahaan serta neraca keuangan Perusahaan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - m. Memimpin pengembangan teknologi informasi di Perusahaan untuk mendukung operasi bank Perusahaan secara terintegrasi;
 - n. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen Bank kepada Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya yang berwenang terpenuhi;
- motivating and supporting the management to achieve the agreed budget;
- d. Formulated plans and concepts as well as strategic steps in achieving business goals in accordance with the budget planning set out in the Bank's Business Plan (RBB) as well as conducting periodic evaluations of the achievement of business goals;
 - e. Directed, supervised, and controlled the work units under his/her supervision on an ongoing basis in carrying out tasks related to their respective fields so that they are in line with company policies and applicable banking regulations so that they are able to face market competition;
 - f. Developed and directed the improvement of Prudential Banking so that bank activities always refers to Standard Operating Procedures, Compliance and Risk Management;
 - g. Directed the preparation of Business Plans and Action Plans for short, medium and long term in the financial and operational sectors so that they are in line with company policies;
 - h. Coordinated the design of concepts and Operating Flow & Technology in the field of Bank Operations to be further stipulated in the Decree of the Board of Directors;
 - i. Approved the financial statements in accordance with banking accounting rules in Indonesia, along with the analysis, available on time and can be used by the Board of Directors as a reference for formulating policies and strategies;
 - j. Approved that the annual reports and periodic financial reports of public companies are available and submitted on time in accordance with the applicable schedule and regulations;
 - k. Established and updated the Company's operational procedure system and Customer Service Standards (Service Level Agreement);
 - l. Stipulated and directed the preparation and reporting of the Company's operational and financial budgets as well as the Company's balance sheet with the principles of accountability and transparency;
 - m. Led the development of information technology in the Company to support the Company's bank operations in an integrated manner;
 - n. Ensured that the Bank's compliance with the Bank's commitments to Bank Indonesia/Financial Services Authority and other competent authorities is fulfilled;



- o. Memastikan pelaporan-pelaporan pelaksanaan kepatuhan Bank ke Direksi, Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan terpenuhi sesuai waktu yang ditentukan;
- p. Melakukan Hak dan Kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi;
- q. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Direksi.

Direktur Kepatuhan

- a. Mengkoordinasikan dan memimpin serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengurusan Perusahaan sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perusahaan;
- b. Mengendalikan kegiatan organisasi dan aktivitas perusahaan agar tetap fokus pada strategi dasar pencapaian sasaran Perusahaan, termasuk dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Internal Audit;
- c. Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan dan strategi, pemutakhiran dan sosialisasi kebijakan dalam bidang Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum;
- d. Memimpin dan mengarahkan penyusunan Business Plan serta Action Plan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pada bidang Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum agar sejalan dengan kebijakan Perusahaan;
- e. Merumuskan strategi guna mendorong dan mewujudkan terciptanya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi & kegiatan usaha Bank;
- f. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- g. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- h. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengelola dan meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;

- o. Ensured that reports on the implementation of the Bank's compliance to the Board of Directors, Board of Commissioners, Financial Services Authority are fulfilled according to the specified time;
- p. Performed the rights and obligations of the Director as stipulated in the Company's Articles of Association and the Limited Liability Company Law, if for certain actions a decision is required from all members of the Board of Directors;
- q. Carried out other duties and responsibilities as stipulated in the guidelines and work procedures of the Board of Directors.

Director of Compliance

- a. Coordinated, led, and was responsible for the implementation of the Company's management as stipulated in the Company's Articles of Association, GMS Resolutions while still taking into account the principles of Good Corporate Governance in each of the Company's business activities at all levels or levels of the Company's organization;
- b. Controlled the organization's activities and company activities in order to stay focused on the basic strategy for achieving the Company's goals, including by paying attention to the results of audit and recommendations submitted by the Internal Audit;
- c. Led and directed the formulation and implementation of policies and strategies, updated and disseminated policies in the areas of Risk Management, Compliance and Legal;
- d. Led and directed the preparation of Business Plans and short, medium and long term Action Plans in the areas of Risk Management, Compliance and Legal to be in line with Company policies;
- e. Formulated strategies to encourage and realize the creation of a Compliance Culture at all levels of the Bank's organization & business activities;
- f. Proposed compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors;
- g. Established compliance systems and procedures that will be used to formulate the Bank's internal provisions and guidelines;
- h. Ensured that all policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of Bank Indonesia and the prevailing laws and regulations;
- i. Managed and minimized the Bank's Compliance Risk;

- j. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau Kepala Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya yang berwenang terpenuhi;
- m. Memastikan pelaporan-pelaporan pelaksanaan kepatuhan Bank ke Direksi, Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan terpenuhi sesuai waktu yang ditentukan;
- n. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Hukum;
- o. Membangun struktur pengendalian internal, mendukung terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan oleh Direktur Utama;
- p. Bersama-sama dengan Direktur lainnya mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sekaligus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama;
- q. Melakukan Hak dan Kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi;
- r. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Direksi.

Direktur Bisnis

- a. Mengkoordinasikan dan memimpin serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengurusan Perusahaan sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perusahaan;
- b. Mengendalikan kegiatan organisasi dan aktivitas Perusahaan agar tetap fokus pada strategi dasar pencapaian sasaran Perusahaan, termasuk dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Internal Audit;

- j. Took preventive measures so that the policies and/or decisions taken by the Board of Directors of the Bank or the Head of the Branch Office of a Foreign Bank do not deviate from the provisions of Bank Indonesia and the prevailing laws and regulations;
- k. Took preventive measures so that policies and/or decisions taken by the Bank's Board of Directors do not deviate from the provisions of Bank Indonesia/Financial Services Authority and the prevailing laws and regulations;
- l. Ensured that the Bank's compliance with the Bank's commitments to Bank Indonesia/Financial Services Authority and other competent authorities is fulfilled;
- m. Ensured that reports on the implementation of the Bank's compliance to the Board of Directors, Board of Commissioners, Financial Services Authority are fulfilled according to the specified time;
- n. Performed other tasks related to the Compliance, Risk Management and Legal Functions;
- o. Built an internal control structure, supporting the implementation of the internal audit function at every level of management and following up on internal audit findings in accordance with the policies or directions given by the President Director;
- p. Together with other Directors coordinated the implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) as well as account for the implementation of duties and responsibilities to the President Director;
- q. Performed the rights and obligations of the Director as stipulated in the Company's Articles of Association and the Limited Liability Company Law, if for certain actions a decision is required from all members of the Board of Directors;
- r. Carried out other duties and responsibilities as stipulated in the guidelines and work procedures of the Board of Directors.

Director of Business

- a. Coordinated, led, and was responsible for the implementation of the Company's management as stipulated in the Company's Articles of Association, GMS Resolutions while still taking into account the principles of Good Corporate Governance in each of the Company's business activities at all levels or levels of the Company's organization;
- b. Controlled the organization's activities and the Company's activities in order to stay focused on the basic strategy of achieving the Company's goals, including by paying attention to the results of audit and recommendations submitted by the Internal Audit;



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Memberi pengarahan atas penyusunan anggaran tahunan (<i>Annual Budget</i>) yang meliputi penerimaan, biaya dan keuntungan, dan melakukan evaluasi atas usulan anggaran konsolidasi serta memotivasi dan mendukung jajaran manajemen untuk mencapai anggaran yang telah disepakati; d. Merumuskan perencanaan dan konsep-konsep serta langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran-sasaran bisnis sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) serta melakukan evaluasi berkala atas pencapaian sasaran bisnis; e. Mengarahkan dan membina unit kerja Kepala Divisi, Area Manager dan Kepala Cabang untuk mencapai target pangsa pasar (<i>Market Share</i>) dan meningkatkan volume bisnis (Dana dan Kredit) serta penyelesaian kredit bermasalah di seluruh Area dan Kantor Cabang di bawahnya, sehingga tingkat kesehatan bank tetap terjaga; f. Mengarahkan dan mensupervisi unit kerja yang berada di bawah supervisinya secara berkesinambungan dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing agar sejalan dengan kebijakan perusahaan serta mampu menghadapi persaingan pasar; g. Membangun dan mengarahkan peningkatan prudential banking agar kegiatan bank senantiasa berpedoman pada Standar Operasional Prosedur, Kepatuhan dan Manajemen Risiko; h. Memimpin dan mengarahkan penyusunan Business Plan serta Action Plan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pada bidang bisnis (Kredit dan Pendanaan) agar sejalan dengan kebijakan Perusahaan; i. Mengarahkan dan membina Divisi, Area Manager dan Kepala Cabang untuk melakukan transformasi dan optimalisasi bisnis baik dalam aspek finansial, pelayanan, tata kelola perusahaan yang baik maupun pencegahan fraud; j. Mengarahkan proses peningkatan image bank melalui penciptaan strategi pemasaran yang inovatif, efektif dan efisien termasuk menetapkan segmentasi pasar kredit, penciptaan program inovatif dan produk dana & jasa guna peningkatan pengembangan bisnis; k. Mengkoordinasikan dalam peningkatan hubungan baik dengan nasabah utama dan calon nasabah baru yang potensial guna menambah customer base; l. Menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan kredit dan pendanaan; | <ul style="list-style-type: none"> c. Provided direction on the preparation of the Annual Budget which includes revenues, costs and profits, and evaluate the proposed consolidated budget as well as motivate and support the management to achieve the agreed budget; d. Formulated plans and concepts as well as strategic steps in achieving business goals in accordance with the budget planning set out in the Bank's Business Plan (RBB) as well as conducting periodic evaluations of the achievement of business goals; e. Directed and fostered the work units of Division Heads, Area Managers and Branch Heads to achieve market share targets and increase business volume (Funds and Credit) as well as settlement of non-performing loans in all Areas and Branch Offices under them, so that the bank's soundness level is maintained; f. Directed and supervised the work units under his/her supervision on an ongoing basis in carrying out tasks related to their respective fields so that they are in line with company policies and are able to face market competition; g. Developed and directed the improvement of prudential banking so that bank activities always refers to Standard Operating Procedures, Compliance and Risk Management; h. Led and directed the preparation of a short, medium and long term Business Plan and Action Plan in the business sector (Credit and Funding) to be in line with Company policies; i. Directed and fostered Divisions, Area Managers, and Branch Heads to carry out business transformation and optimization in terms of financial, service, good corporate governance and fraud prevention; j. Directed the process of improving the bank's image through the creation of innovative, effective and efficient marketing strategies including establishing credit market segmentation, creating innovative programs and fund products & services to enhance business development; k. Coordinated in improving good relations with key customers and potential new customers in order to increase the customer base; l. Maintained and improved good relations with institutions that are closely related to credit and funding; |
|--|---|

- m. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan penyelamatan serta penyelesaian atas kredit-kredit bermasalah agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga;
- n. Membangun struktur pengendalian internal, mendukung terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan oleh Direktur Utama;
- o. Bersama-sama dengan Direktur lainnya mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sekaligus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama;
- p. Melakukan Hak dan Kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi;
- q. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Direksi.

- m. Coordinated and directed the implementation of rescue and settlement of non-performing loans so that the bank's soundness level is maintained;
- n. Built an internal control structure, supporting the implementation of the internal audit function at every level of management and following up on internal audit findings in accordance with the policies or directions given by the President Director;
- o. Together with other Directors coordinated the implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) as well as account for the implementation of duties and responsibilities to the President Director;
- p. Performed the rights and obligations of the Director as stipulated in the Company's Articles of Association and the Limited Liability Company Law, if for certain actions a decision is required from all members of the Board of Directors;
- q. Carried out other duties and responsibilities as stipulated in the guidelines and work procedures of the Board of Directors.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan dalam RUPS. Sebagaimana penetapan Remunerasi untuk Tahun 2021 diputuskan dalam Mata Acara Rapat Ketiga RUPS T 17 Juli 2020 RUPS 2020. Rapat memutuskan untuk gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari Anggota Direksi dan Dewan Komisaris merujuk hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2019.

The remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is stipulated in the GMS. As the decision of stipulation of Remuneration for Year 2020 in the Third Agenda Meeting of AGMS 17 July 2020, the Meeting stipulated that the salary or honorarium and other allowances for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners refer to the resolutions of Annual General Meeting of Shareholders 2019.

TRANSPARANSI PEMBERIAN REMUNERASI BANK

Kegiatan remunerasi Perseroan dalam proses penyusunan/ telah disusun oleh pihak internal Perseroan dan tidak menggunakan/menggunakan jasa konsultan eksternal.

TRANSPARENCY OF THE BANK'S REMUNERATION

The Company's remuneration policy is in the development process/has been formulated by the Company's internal party and does not engage/used external consultant services.

Berikut rincian jenis serta besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sepanjang tahun 2021:

The following are details of the type and amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors of Company's throughout 2021:



No.	Jenis Remunerasi / Remuneration Types	Jumlah Diterima / Total Received			
		Direksi / Board of Directors		Dewan Komisaris / Board of Commissioners	
		Orang / Personnel	Jutaan Rp / Million Rp	Orang / Personnel	Jutaan Rp / Million Rp
1.	Gaji, Bonus, Tunjangan Rutin, Tantiem, dan Fasilitas Lainnya dalam bentuk non Natura / Salary, Bonus, Routine Allowance, Tantiem, and Other Facilities in non-Natura form	4	Rp. 5,784,766,466	3	Rp. 2,265,772,367
2.	Fasilitas Lain dalam bentuk Natura, Perumahan, Transportasi dan Asuransi / Other Facilities in the form of Natura, Housing, Transportation and Insurance	4	Rp. 5,955,699,245	3	Rp. 2,746,557,832

PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS YANG DITERIMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SELAMA TAHUN 2021

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

THE REMUNERATION PACKAGE AND FACILITIES RECEIVED BY THE BOC AND BOD DURING 2021

The Remuneration Package grouped within income level received by the Board of Commissioners and Board of Directors during 2021 are as follows:

No.	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun / Total Remuneration per Person in 1 (one) Year	Jumlah Direksi / Total BOD	Jumlah Dewan Komisaris / Total BOC
1.	Di atas Rp 2 miliar / More than Rp2 billion	4	0
2.	Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar / More than Rp1 billion up to Rp2 billion	0	3
3.	Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar / More than Rp500 million up to Rp1 billion	0	0
4.	Rp 500 juta ke bawah / Below Rp500 million	0	0

Remunerasi yang bersifat variabel: NIHIL

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama tahun 2021:

Remunerasi yang bersifat variabel: NIHIL

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama tahun 2021:

Remunerasi yang Bersifat Variabel / Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun / Total Received in 1 (one) Year					
	Direksi / Board of Directors		Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Karyawan / Employees	
	Orang / Personnel	Jutaan Rp / Million Rp	Orang / Personnel	Jutaan Rp / Million Rp	Orang / Personnel	Jutaan Rp / Million Rp
Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT akan dicantumkan dalam kebijakan remunerasi Bank yang saat ini tengah dalam penyusunan/telah disusun oleh Perseroan.

Position and number of parties who become MRT will be included in the Bank's remuneration policy which is currently in preparation/has been prepared by the Company.

Keterangan / Description	Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar) / Number of Shares Owned (shares)	Jumlah Opsi / Number of Options		Harga Opsi / Option Price	Jangka Waktu / Timeline
		Yang diberikan (lembar saham) / Granted (shares)	Yang telah dieksekusi (lembar saham) / Executed (shares)		
Direksi / Board of Directors					
Agus Syabarrudin	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Cendria Tj. Tasik	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Kemal Idris	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Denny Sorimulia Karim	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Dewan Komisaris / Board of Commissioners					
Hasanuddin	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Media Warman	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil
M. Yusuf	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Pejabat Eksekutif / Executives					
-	-	-	-	-	-
Total (7)	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Perseroan telah menghitung rasio gaji terendah dan tertinggi sepanjang tahun 2021. Berikut rincian rasio gaji pegawai di Perseroan sepanjang tahun 2020:

- Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 19,46.
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,25.
- Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,25.
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,82.

Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Perseroan kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja: NIHIL.

Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank): NIHIL.

Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun: NIHIL.

HIGHEST AND LOWEST SALARY RATION IN 2021

In 2021, the Company has calculated the ratio of the lowest and highest salary throughout the year. The details of the salary ratio of employees at Company throughout 2021 are as follows:

- The ratio of the highest and lowest employee salaries is 19,46.
- The ratio of the highest and lowest salaries of the Board of Directors is 1,25.
- The ratio of the highest and lowest salaries of the Board of Commissioners is 1,25.
- The ratio of the highest and lowest salaries of the Board of Directors and employees is 2,82.

The number of recipients and total variable remuneration that are guaranteed without conditions will be awarded by the Company to prospective Board of Directors, prospective Board of Commissioners, and/or prospective employees for the first 1 (one) year of work: NIL.

Total deferred variable remuneration (cash and/or shares or share-based instruments issued by the Bank): NIL.

Total deferred variable remuneration paid for 1 (one) year: NIL.



Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1(satu) tahun meliputi:

Details of the amount of remuneration given in 1 (one) year include:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap

A. Fixed Remuneration

No.		Tidak Ditangguhkan / Not Deferred	Ditangguhkan / Deferred
1.	Tunai / Cash	Nihil / Nil	Nihil / Nil
2.	Saham/Instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank / Shares or Share-based instruments issued by the Bank	Nihil / Nil	Nihil / Nil

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel

No.		Tidak Ditangguhkan / Not Deferred	Ditangguhkan / Deferred
1.	Tunai / Cash	Nihil / Nil	Nihil / Nil
2.	Saham/Instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank / Shares or Share-based instruments issued by the Bank	Nihil / Nil	Nihil / Nil

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel / Variable Remuneration	Sisa yang Masih Ditangguhkan / Deferred Balance	Total Pengurangan Selama Periode Pelaporan / Total Reductions During the Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit / Due to Explicit Adjustment	Disebabkan Penyesuaian Implisit / Due to Implicit Adjustment	Total (A+B)
1. Tunai / Cash	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta Rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut. / Shares or Share-based instruments issued by the Bank (in shares and nominal in million Rupiah which is the conversion of the said shares)	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Meeting

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar berikut perubahannya, POJK No. 33/POJK.04/2014 serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris di mana Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala sedikitnya 1(satu) kali dalam 2 bulan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar, kebijakan rapat Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Board of Commissioners Meeting Policies

The Board of Commissioners Meetings policy refers to the Articles of Association and its amendments, POJK No.33/POJK.04/2014 as well as BOC Charter where the BOC Meeting shall be conducted periodically at least once in 2 months.

As stated in the Articles of Association, the BOC meeting policy shall include the following:

1. The BOC Meetings can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or at the request of 1 (one) or more Shareholders, jointly owning 1/10 (one tenth) or more of the total shares that has been placed by the Company

- saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1(satu)kali dalam (dua) bulan;
 3. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat;
 4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada Rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan;
 5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, di mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut;
 6. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, di mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain;
 7. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut;
 8. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
 9. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang tercantum pada Risalah Rapat; dan
 10. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

with legitimate voting rights;

2. The Board of Commissioners must hold a Meeting at least 1 (one) time in (two) months;
3. The BOC Meetings as referred to can be held, valid and has the rights to make binding decisions if more than 1/2 (one half) of members of the Board of Commissioners are present or represented at the Meeting;
4. The Board of Commissioners must schedule a meeting for the following year prior to the end of fiscal year. At the scheduled Meeting, the materials for the Meeting shall be submitted to the participants no later than 5 (five) days before the Meeting is held;
5. The BOC Meetings is chaired by the President Commissioner, if the President Commissioner is absent or unable to attend the Meeting, which does not need to be proven to a third party, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners who is present at the Meeting;
6. Every member of the Board of Commissioners who personally in any way, either directly or indirectly, has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is one of the parties, then he/she must state the nature of the interest in a meeting of the Board of Commissioners and have no right to participate in voting on matters relating to the transaction or contract, unless the Board of Commissioners Meeting determines otherwise;
7. Decision making in the BOC Meetings must be made based on deliberation to reach a consensus. If the deliberation to reach a consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on the vote in favor of more than 1/2 (one half) of the number of votes cast legally in the Meeting;
8. The results of the Meeting must be stated in the Minutes of Meeting, signed by all members of the Board of Commissioners who are present, and submitted to all members of the Board of Commissioners;
9. In the event that a member of the Board of Commissioners does not sign the results of the meeting, the reasons are prepared in writing in a separate letter which will be placed in the Minutes of Meeting; and
10. The BOC Meetings can also be held through teleconferences, video conferences, or other electronic media that allows all participants in the BOC Meetings to see and/or hear each other directly and participate in the BOC Meetings.



Rencana Rapat Dewan Komisaris

Sebelum berakhirnya Tahun Buku 2020, Perseroan telah menjadwalkan sejumlah 11 (sebelas) kali pelaksanaan agenda Rapat Dewan Komisaris di Tahun 2021 dengan proyeksi sebagai berikut:

Board of Commissioners Meeting Plan

Before the end of the 2020 Fiscal Year, the Company scheduled 11 (eleven) Board of Commissioners Meeting plans in 2021 with the following projections:

No.	Agenda/Pembahasan / Agenda/Discussion	Proyeksi Pelaksanaan / Convention Projection
1.	Draft Laporan Pengawasan RBB Semester II-2020 / Draft of RBB Supervision Report Semester II-2020	Februari / Februari
2.	Pembagian Tugas Komite-Komite Dekom / Division of Duties of the Committees of the Board of Commissioners	Maret / March
3.	Presentasi Kinerja DAI / DAI Performance Presentation	Maret / March
4.	Presentasi Kinerja Manrisk & Kepatuhan / Manrisk Performance and Compliance Presentation	Maret / March
5.	Evaluasi Dekom Terhadap Progres Penyehatan Bank / Evaluation of the Board of Commissioners on the Progress of Bank Restructuring	April / April
6.	Remunerasi Pengurus Bank Banten / Bank Banten Management Remuneration	Mei / May
7.	Perubahan Keanggotaan Komite Dekom Dan Lain Lain / Changes in Membership of the Board of Commissioners and Other Committees	Mei / May
8.	Draft Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BB Semester I/2021 / Draft Report on Supervision of Business Plan B Semester I/2021	Agustus / August
9.	Kinerja BB Posisi Sept 2021 / BB Performance Position Sept 2021	Oktober / October
10.	Pembahasan Rencana Pembagian Wilayah Binaan BB / Discussion on Plan for Division of BB Assisted Areas	November / November
11.	Penunjukan Kap Untuk Audit Lap Keu Tahunan 31/12/21 / Appointment of Public Accounting Firm for Annual Financial Statement Audit 12/31/21	Desember / December
12.	Pembahasan Kebijakan Remunerasi Pengurus / Management Remuneration Policy Discussion	Desember / December

Realisasi Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, realisasi pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris ialah sebanyak 20 (dua puluh) kali rapat dengan beberapa agenda meliputi:

1. Evaluasi Dewan Komisaris terhadap progress penyehatan Bank Banten
2. Perubahan Susunan Komite Audit
3. Presentasi Kinerja Divisi Audit Intern
4. Presentasi Kinerja Divisi Kepatuhan
5. Presentasi Kinerja Divisi Manajemen Risiko
6. Pengangkatan Kepala Divisi Audit Intern
7. Pembagian tugas-tugas Komite Dewan Komisaris
8. Perubahan Keanggotaan Komite Audit
9. Pembahasan Draft Laporan Pengawasan RBB Bank Banten (semesteran)
10. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan tahunan 31 Desember 2021

Realization of Board of Commissioners Meetings Convention

In 2021, the realizations of Board of Commissioners Meetings convention were 20 (twenty) meetings with the following agendas:

1. Evaluation of the Board of Commissioners on the progress of Bank Banten's restructuring
2. Changes in the Composition of the Audit Committee
3. Presentation of Internal Audit Division Performance
4. Compliance Division Performance Presentation
5. Risk Management Division Performance Presentation
6. Appointment of Head of Internal Audit Division
7. Division of duties of the Committee of the Board of Commissioners
8. Changes in Audit Committee Membership
9. Discussion on the Draft Bank Banten RBB Supervision Report (semester)
10. Appointment of a Public Accounting Firm for the audit of the annual financial statements for December 31, 2021

Berikut frekuensi dan kehadiran rapat:

The followings are the meeting frequency and attendance:

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	% Kehadiran / % Percentage
1	Hasanuddin *)	Komisaris Utama Independen / President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	20	18	90%
2	Media Warman	Komisaris Independen / Independent Commissioner	20	20	100%
3	M. Yusuf *)	Komisaris / Commissioner	20	18	90%
4	Titi Khoiriah **)	Komisaris / Commissioner	20	2	10%

*) Bapak Hasanuddin dan Bapak M. Yusuf diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPSLB tanggal 10 Maret 2021. / Mr. Hasanuddin and Mr. M. Yusuf were appointed as Commissioners based on EGMS 10 March 2021

**) Ibu Titi Khoiriah tidak menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB tanggal 10 Maret 2021. / Mrs. Titi Khoiriah did not serve as Independent Commissioner based on EGMS 10 March 2021

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat bersama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan. Tata cara pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sama dengan Rapat Dewan Komisaris.

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sebelum berakhirnya Tahun Buku 2020, Perseroan telah menjadwalkan sejumlah 12 (dua belas) kali pelaksanaan agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di Tahun 2021 dengan proyeksi sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETINGS

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings Policies

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014, the Board of Commissioners and the Board of Directors are required to hold joint meetings periodically at least 1 (once) every 4 (four) months. The procedure for conducting the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors is the same as the Board of Commissioners Meeting.

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings Plans

Prior to the end of 2020 Fiscal Year, the Company has scheduled 12 (twelve) times of Joint BOC & BOD Meeting agenda implementation in 2021 with the following projections:

No.	Agenda/Pembahasan / Agenda/Discussion	Proyeksi Pelaksanaan / Convention Projection
1.	Penyelesaian Kredit Bermasalah / Settlement of Non-performing Loans	Februari / February
2.	Rencana Penambahan Mata Acara Persetujuan Hapus Buku Kredit Yang Tidak Produktif / Plan to Add Approval to Eliminate Unproductive Loan Books	Februari / February
3.	Action Plan Penyehatan Bank Banten / Bank Banten Restructuring Action Plan	Februari / February
4.	Kredit Bermasalah (Termasuk Penjaminan Kredit) / Non-performing Loans (Including Credit Guarantee)	Februari / February
5.	Pembahasan Rencana Kerjasama Penjaminan Kredit / Discussion of the Credit Guarantee Cooperation Plan	Februari / February
6.	Pembahasan RUPSLB Bank Banten / Discussion of Bank Banten Extraordinary General Meeting of Shareholders	Maret / March
7.	Hasil Audit Desember 2020 / December 2020 Audit Results	Maret / March
8.	Progres Penyehatan Bank Banten / Bank Banten Restructuring Progress	April / April
9.	Progres Penyehatan Bank Banten / Bank Banten Restructuring Progress	Juni / June
10.	Progres Penyehatan Bank Banten / Bank Banten Restructuring Progress	Juli / July



No.	Agenda/Pembahasan / Agenda/Discussion	Proyeksi Pelaksanaan / Convention Projection
11.	Progres Penyehatan Bank Banten / Bank Banten Restructuring Progress	Agustus / August
12.	Progres PUT VII & Persetujuan / PUT VII Progress & Approval	September / September
13.	Progres Penyehatan Bank Banten / Bank Banten Restructuring Progress	September / September
14.	Penerapan APU PPT DI Bank Banten / Implementation of AML-CFT at Bank Banten	Oktober / October
15.	Progres Penyehatan Bank Banten / Bank Banten Restructuring Progress	Oktober / October
16.	Rencana Pemisahan BB dari BGD / BB Separation Plan from BGD	Oktober / October
17.	Pembahasan Lanjutan Hapus Buku Kredit UMKM EKS BPI & Bank Eksekutif / Follow-up Discussion on Elimination of the Ex-BPI & Bank Executive Umkm Loan Book	November / November
18.	Progres Penyehatan Bank Banten / Bank Banten Restructuring Progress	November / November
19.	Progres Penyehatan Bank Banten / Bank Banten Restructuring Progress	Desember / December
20.	Audit Kap 31 Des 2021 / KAP Audit on December 31, 2021	Desember / December

Catatan / Notes:

Jadwal rapat disesuaikan dengan kebutuhan, dalam perjalanan pengawasan dalam tahun berjalan akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan / The meeting schedule is adjusted to the needs, in the course of supervision in the current year it will be carried out according to needs

Realisasi Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2021, realisasi pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi ialah sebanyak 26 (dua puluh enam) kali rapat dengan beberapa agenda meliputi:

1. Progres Penyehatan Bank Banten.
2. Pembahasan Rencana Kerjasama Penjaminan Kredit.
3. Rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VII.
4. Rencana Pelaksanaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa.
5. *Action Plan* Penyehatan Bank Banten.
6. Penerapan APU-PPT di Bank Banten.
7. Penyelesaian Kredit Bermasalah.
8. Audit Kantor Akuntan Publik 31 Desember 2021.

Convention Implementation of Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

Throughout 2021, the convention realization of Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings were 26 (twenty six) meetings with the following agenda:

1. Progress of Bank Banten Restructuring.
2. Discussion of the Credit Guarantee Cooperation Plan.
3. Implementation Plan for Limited Public Offering VII.
4. Annual and Extraordinary GMS Implementation Plan.
5. Action Plan for Bank Banten Restructuring.
6. Application of AML-CFT at Bank Banten.
7. Resolution of Non-performing Loans.
8. Public Accounting Firm Audit for 31 December 2021.

Berikut Frekuensi dan Kehadiran Rapat

The Following is the Meeting Frequency and Attendance

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	% Kehadiran / % Attendance
Dewan Komisaris					
1	Hasanuddin *)	Komisaris Utama Independen / President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	26	17	65%
2	Media Warman	Komisaris Independen / Independent Commissioner	26	26	100%
3	M. Yusuf *)	Anggota / Member	26	17	65%
4	Titi Khoiriah **)	Direktur Utama / President Director	26	9	35%
Direksi					
1	Agus Syabarrudin *)	Direktur Utama / President Director	26	17	65%
2	Kemal Idris	Direktur Kepatuhan / Compliance Director	26	24	92%
3	Cendria Tj. Tasdik *	Direktur Bisnis / Business Director	26	14	54%
4	Denny S. Karim	Direktur Operasi & Transformasi / Director of Operation & Transformation	26	17	65%



No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	% Kehadiran / % Attendance
5	Fahmi Bagus Mahesa	Mantan Direktur Utama / Formerly President Director	26	7	27%
6	Jaja Jarkasih	Mantan Direktur Bisnis / Formerly Director of Business	26	7	27%

*) Bapak Hasanuddin dan Bapak M. Yusuf diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPSLB tanggal 10 Maret 2021 / Mr. Hasanuddin and Mr. M. Yusuf were appointed as Commissioners based on the EGMS on March 10, 2021

**) Bapak Agus Syabarrudin, Bapak Cendria Tj. Tasdik dan Bapak Denny S. Karim diangkat menjadi Direksi berdasarkan RUPSLB tanggal 10 Maret 2021 / Mr. Agus Syabarrudin, Mr. Cendria Tj. Tasdik and Mr. Denny S. Karim were appointed as the Board of Directors based on the EGMS on March 10, 2021

***) Ibu Titi Khoiriah tidak menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB tanggal 10 Maret 2021 / Mrs. Titi Khoiriah does not serve as an Independent Commissioner based on the EGMS on March 10, 2021

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar berikut perubahannya dan POJK No. 33/POJK.04/2014 di mana Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar, kebijakan rapat Direksi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat;
4. Direksi harus menjadwalkan Rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud, bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan;
5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, di mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi;
6. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Board of Directors Meeting Policies

The Board of Directors Meetings policy refers to the Articles of Association and its amendments, OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 where the BOD Meeting shall be conducted periodically at least once in a month. As stated in the Articles of Association, the BOC meeting policy shall include the following:

1. The BOD Meetings can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors or at the request of 1 (one) or more Shareholders, jointly owning 1/10 (one tenth) or more of the total shares that has been placed by the Company with legitimate voting rights;
2. The Board of Directors must hold a periodical Meeting at least 1 (one) time in a month;
3. The BOD Meetings as referred to are valid and has the rights to make binding decisions if more than 1/2 (one half) of members of the Board of Directors are present or represented at the Meeting;
4. The Board of Directors must schedule a meeting for the following year prior to the end of fiscal year. At the scheduled Meeting, the materials for the Meeting shall be submitted to the participants no later than 5 (five) days before the Meeting is held;
5. The BOD Meetings is chaired by the President Director, if the President Director is absent or unable to attend the Meeting, which does not need to be proven to a third party, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors who is present at the Meeting;
6. Every member of the Board of Directors who personally in any way, either directly or indirectly, has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is one of the parties, then he/she must state the nature of the interest in a meeting of the Board of



suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain;

7. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir;
8. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi;
9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang diletakan pada Risalah Rapat; dan
10. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

Directors and have no right to participate in voting on matters relating to the transaction or contract, unless the Board of Directors Meeting determines otherwise;

7. Decision making in the BOD Meetings must be made based on deliberation to reach a consensus. If the deliberation to reach a consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on the vote in favor of more than 1/2 (one half) of the number of votes cast legally in the Meeting;
8. The results of the Meeting must be stated in the Minutes of Meeting, signed by all members of the Board of Directors who are present, and submitted to all members of the Board of Directors;
9. In the event that a member of the Board of Directors does not sign the results of the meeting, the reasons are prepared in writing in a separate letter which will be placed in the Minutes of Meeting; and
10. The BOD Meetings can also be held through teleconferences, video conferences, or other electronic media that allows all participants in the BOD Meetings to see and/or hear each other directly and participate in the BOD Meetings.

Rencana Rapat Direksi

Sebelum berakhirnya Tahun Buku 2020, Perseroan telah menjadwalkan sejumlah 30 (tiga puluh) kali pelaksanaan agenda Rapat Direksi di Tahun 2021 dengan proyeksi sebagai berikut:

Board of Directors Meeting Plans

Prior to the end of 2020 Fiscal Year, the Company has scheduled 30 (thirty) Board of Directors Meeting agenda implementation in 2021 with the following projections:

No.	Agenda/Pembahasan / Agenda/Discussion	Proyeksi Pelaksanaan / Convention Projection
1.	ALCO	12 Kali / 12 times
2.	Rapat Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee Meeting	4 Kali / 4 times
3.	Rapat Komite Pengarah IT / IT Steering Committee Meeting	2 Kali / 2 times

Realisasi Pelaksanaan Rapat Direksi

Selama tahun 2021, realisasi pelaksanaan Rapat Direksi ialah sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) kali rapat dengan beberapa agenda meliputi:

1. Rapat ALCO
2. Komite Manajemen Risiko
3. Rapat Komite Pengarah IT
4. Rapat Komite Kredit
5. Rapat Direksi
6. Rapat Penyusunan dan Penyesuaian RBB

Convention Implementation of Board of Directors Meetings

Throughout 2021, the convention realization of Board of Directors Meetings were 43 (Forty three) meetings with the following agenda:

1. ALCO Meeting
2. Risk Management Committee
3. IT Steering Committee Meeting
4. Credit Committee Meeting
5. Board of Directors Meeting
6. RBB Preparation and Adjustment Meeting

Berikut Frekuensi dan Kehadiran Rapat:

The Following is the Meeting Frequency and Attendance:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	% Kehadiran / % Attendance
Agus Syabarrudin	Direktur Utama / President Director	43	43	100%
Cendria Tj. Tasdik	Direktur / Director	43	43	100%
Kemal Idris	Direktur / Director	43	43	100%
Denny Sorimulia Karim	Direktur / Director	43	43	100%

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan dalam bentuk:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.
2. Hubungan kepengurusan atau pengelolaan pada Pemegang Saham Utama/Pengendali.
3. Hubungan kepemilikan saham masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan sebagai badan hukum.

AFFILIATE RELATIONSHIP BETWEEN MEMBERS OF BOC, BOD AND MAJORITY SHAREHOLDER AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Affiliation shall means relationship between the Board of Directors, Board of Commissioners and Main/Controlling Shareholders of the Company, either in the form of:

1. Family relationship due to marriage and descent to the second degree either horizontal or vertical.
2. Management or oversight relationship with Main/Controlling Shareholder.
3. Share ownership by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Main/Controlling Shareholders as legal entity.

Berikut adalah hubungan afiliasi Perseroan per 31 Desember 2021:

The following are the affiliations held by the Company as of 31 December 2021:

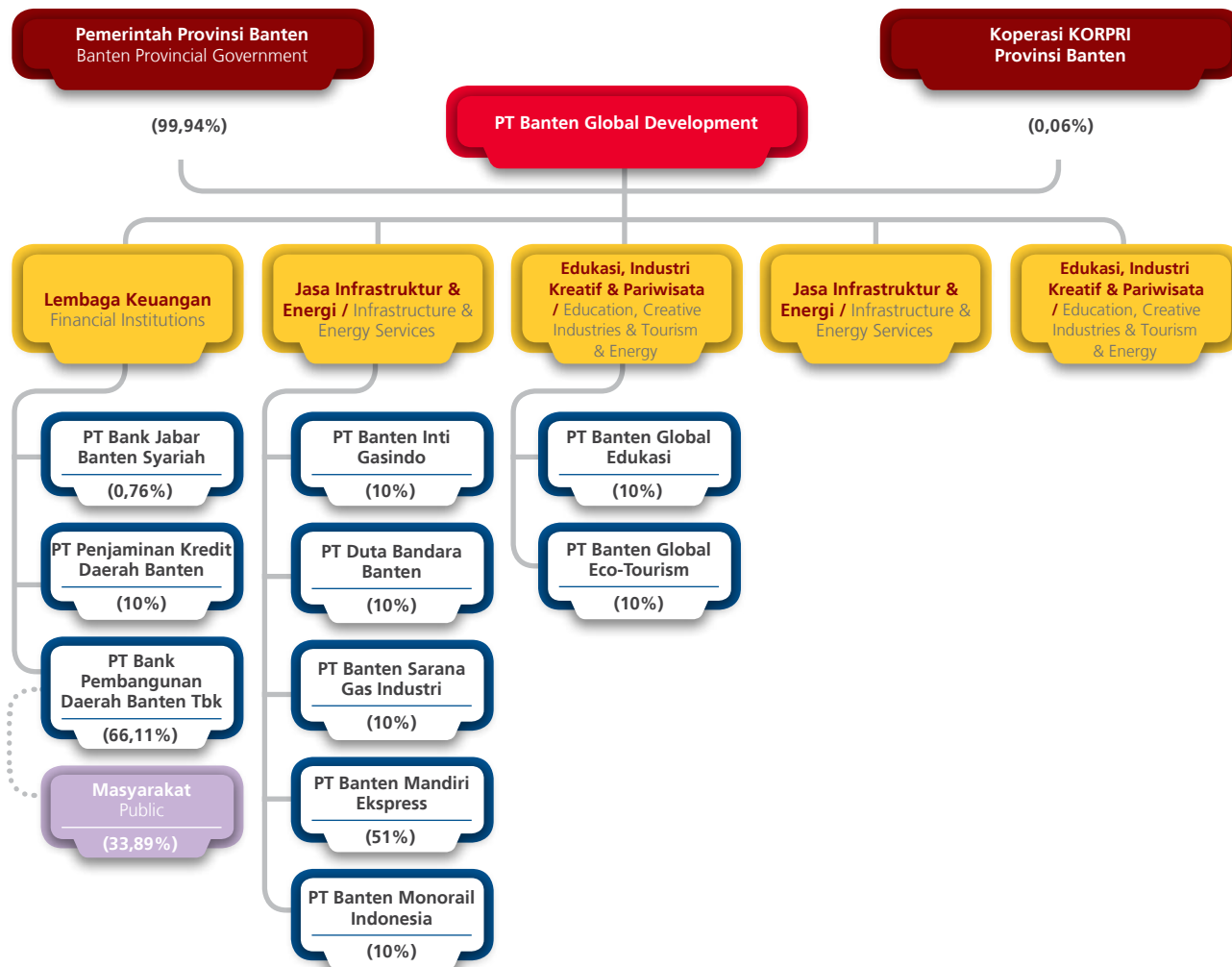
Nama / Name	Hubungan Afiliasi Dengan / Affiliate Relationship With					
	Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham Utama / Majority Shareholders	
	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Dewan Komisaris / Board of Commissioners						
Hasanuddin		✓		✓		✓
Media Warman		✓		✓		✓
M. Yusuf		✓		✓	✓	
Direksi / Board of Directors						
Agus Syabarrudin		✓		✓		✓
Cendra Tj. Tasdik		✓		✓		✓
Kemal Iris		✓		✓		✓
Denny Sorimulia Karim		✓		✓		✓



INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAMA UTAMA DAN PENGENDALI

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAMA UTAMA DAN PENGENDALI

Struktur Hubungan Kepemilikan Saham Perseroan Struktur Hubungan Kepemilikan Saham Perseroan



Komite Dewan Komisaris

Board of Commissioners Committees

KOMITE AUDIT

Dasar Hukum

1. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

AUDIT COMMITTEE

Legal Basis

1. Decree of the Board of Directors of the PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-305/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 concerning Regulation Number I-A on Listing of Shares and Equity Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies;
2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Tatacara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Piagam Komite Audit

Komite Audit Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan No. 005/SK-KOM/BB/III/19 tanggal 27 Maret 2019. Piagam Komite Audit merupakan panduan bekerja bagi Komite Audit yang menjelaskan, antara lain: masa tugas dan komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan, dan penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Oleh karenanya, Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Komposisi Komite Audit

Ditahun 2021, terdapat perubahan keanggotaan Komite Audit berdasarkan SK No. 007/SK-KOM/BB/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 menjadi sebagai berikut:

3. Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.04/2015 dated 23 December 2014 on the Establishment and Audit Committee Charter.
4. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
5. Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning Procedures for the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
6. Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated January 29, 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks.

Audit Committee Charter

The Audit Committee of the Company has an Audit Committee Charter approved by the Board of Commissioners through Decree No. 005/SK-KOM/BB/III/19 dated March 27, 2019. The Audit Committee Charter is a guideline for the Audit Committee which explains, among others, the tenure and composition, membership structure and requirements, duties, responsibilities and authority, work procedures and methods, meeting arrangements, reporting systems for activities and handling complaints or reporting related to alleged violations related to financial reporting.

Appointment and Dismissal

The Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. Thus, the Audit Committee is directly responsible to the Board of Commissioners.

Audit Committee Composition

In 2021, there was a change of Audit Committee membership pursuant to the Decree of the Board of Commissioners No. 007/SK-KOM/BB/V/2021 dated May 25, 2021 as follows:

No	Nama / Name	Jabatan / Position
Ketua Komite Audit / Chairman of Audit Committee		
1.	Media Warman	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee		
2.	M. Yusuf	Komisaris / Commissioner
3.	Hariyadi	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang audit dan akuntansi / Independent party with expertise in audit and accounting
4.	Douval	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan / Independent party with expertise in financing and banking



Berdasarkan SK No. 011/SK-KOM/BB/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021:

Pursuant to Decree No. 011/SK-KOM/BB/VIII/2021 dated 10 August 2021

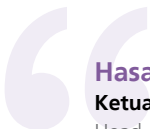
No	Nama / Name	Jabatan / Position
Ketua Komite Audit / Chairman of Audit Committee		
1.	Hasanuddin	Komisaris Utama Independen / President Independent Commissioner
Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee		
2.	Media Warman	Komisaris Independen / Independent Commissioner
3.	Hariyadi	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang audit dan akuntansi / Independent party with expertise in audit and accounting
4.	Douval	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan / Independent party with expertise in financing and banking

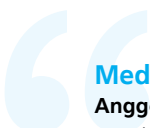
Keanggotaan Komite Audit Perseroan terdiri atas 4 (empat) orang yang diketuai oleh 1 (satu) Komisaris Utama Independen dan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang audit, akuntansi, keuangan dan perbankan. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik.

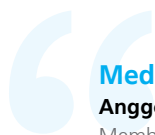
The membership of the Company's Audit Committee consists of 4 (four) people chaired by 1 (one) Independent President Commissioner and assisted by 1 (one) committee member from the Independent Commissioner and 2 (two) committee members from independent parties with expertise in auditing, accounting, finance and banking. All members of the Audit Committee have met the criteria of independence, expertise, integrity and good morals.

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

 Hasanuddin Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	
Warga Negara / Nationality	Indonesia
Usia / Age	57 tahun / 57 years old
Masa Jabatan / Terms of Office	25 Mei 2021 s.d sekarang / 25 May 2021 to present
Dasar Pengangkatan / Appointment Basis	SK. No. 007/SK/KOM-BB/V/21 dated 25 Mei 2021 / Decree No. 007/SK/KOM-BB/V/21 dated May 25, 2021
Riwayat Pendidikan / Educational Background	Telah diuraikan dalam Profil Dewan Komisaris pada Bab Profil / Described in the Board of Commissioners profile in Profile chapter
Riwayat Jabatan / Position History	Telah diuraikan dalam Profil Dewan Komisaris pada Bab Profil / Described in the Board of Commissioners profile in Profile chapter

 Media Warman Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	
Warga Negara / Nationality	Indonesia
Usia / Age	57 tahun / 57 years old
Masa Jabatan / Terms of Office	25 Mei 2021 s.d sekarang / 25 May 2021 to present
Dasar Pengangkatan / Appointment Basis	SK. No. 007/SK/KOM-BB/V/21 dated 25 Mei 2021 / Decree No. 007/SK/KOM-BB/V/21 dated May 25, 2021



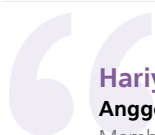
Media Warman

Anggota Komite Audit

Member of Audit Committee

99

Riwayat Pendidikan / Educational Background	Telah diuraikan dalam Profil Dewan Komisaris pada Bab Profil / Described in the Board of Commissioners profile in Profile chapter
Riwayat Jabatan / Position History	Telah diuraikan dalam Profil Dewan Komisaris pada Bab Profil / Described in the Board of Commissioners profile in Profile chapter



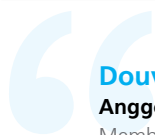
Hariyadi

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)

Member of Audit Committee (Independent Party)

99

Warga Negara / Nationality	Indonesia
Usia / Age	60 tahun / 60 years old
Masa Jabatan / Terms of Office	25 Mei 2021 s.d sekarang / 25 May 2021 to present
Dasar Pengangkatan / Appointment Basis	SK. No. 007/SK/KOM-BB/V/21 dated 25 Mei 2021 / Decree No. 007/SK/KOM-BB/V/21 dated May 25, 2021
Riwayat Pendidikan / Educational Background	Telah diuraikan dalam Profil Komite Audit pada Bab Profil / Described in Audit Committee profile in Profile chapter
Riwayat Jabatan / Position History	Telah diuraikan dalam Profil Komite Audit pada Bab Profil / Described in Audit Committee profile in Profile chapter



Douval

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)

Member of Audit Committee (Independent Party)

99

Warga Negara / Nationality	Indonesia
Usia / Age	41 tahun / 41 years old
Masa Jabatan / Terms of Office	25 Mei 2021 s.d sekarang / 25 May 2021 to present
Dasar Pengangkatan / Appointment Basis	SK. No. 007/SK/KOM-BB/V/21 dated 25 Mei 2021 / Decree No. 007/SK/KOM-BB/V/21 dated May 25, 2021
Riwayat Pendidikan / Educational Background	Telah diuraikan dalam Profil Komite Audit pada Bab Profil / Described in Audit Committee profile in Profile chapter
Riwayat Jabatan / Position History	Telah diuraikan dalam Profil Komite Audit pada Bab Profil / Described in Audit Committee profile in Profile chapter

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan SK No.003/SK-KOM/BB/XII/2018 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain: laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank;

Duties and Responsibilities

Pursuant to Decree No. SK No. 003/SK-KOM/BB/XII/2018 the duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. Reviewing financial information that will be issued by the Company to the public and/or regulators, including financial statements, projections and other reports related to the bank financial information;
2. Reviewing compliance with laws and regulations on bank activities;



3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
 6. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal Bank;
 7. Mengevaluasi kinerja Divisi Audit Internal (SKAI);
 8. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern dan Otoritas Jasa Keuangan;
 9. Memastikan SKAI bekerja secara independen;
 10. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
 11. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
 12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - Penetapan Piagam Audit Internal;
 - Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI;
 - Rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI;
 - Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS (antara lain berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa);
 - Penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI;
 - Pemberian remunerasi tahunan Divisi Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
 13. Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;
3. Providing independent opinion in the event of dissenting of opinions between the management and accountants for the services rendered;
 4. Reviewing the audit implementation by internal auditor and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the internal auditors;
 5. Monitoring and evaluating the audits planning and implementation as well as monitoring the follow-up of audit results to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting process;
 6. Monitoring and reviewing the effectiveness of the Bank's internal audit;
 7. Evaluating the performance of Internal Audit Division (SKAI);
 8. Ensuring the Internal Audit Division communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners, external auditors and the Financial Services Authority;
 9. Ensuring the Internal Audit Division works independently;
 10. Reviewing audit reports and ensuring the Board of Directors takes the necessary corrective actions immediately to resolve control weaknesses, fraud, policy compliance issues, laws and regulations, or other issues identified and reported by the Internal Audit Division;
 11. Ensuring the Internal Audit Division upholds integrity in the performance of its duties;
 12. Providing recommendations to the Board of Commissioners on:
 - Stipulation of Internal Audit Charter;
 - Appointment and Termination of SKAI Head;
 - Audit plan, scope and budget of SKAI;
 - Appointment of public accountant and public accountant firm to the Board of Commissioners for submission to the GMS (among other based on independency, assignment scope, and service fees);
 - Appointment of external independent quality control to re-analyze the performance of SKAI Division;
 - Provision of annual remuneration to overall Internal Audit Division as well as performance reward.
 13. Monitoring and evaluating at least on:
 - Appropriateness of audit by public accountant firm with audit standard;
 - Appropriateness of financial statements with financial accounting standard;



- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;

14. Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

15. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank;

16. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;

17. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi bank;

18. Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit bersama dengan Direktur Utama menandatangani Laporan yang wajib disampaikan ke OJK, meliputi:

- Laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
- Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal (semesteran).

Adapun wewenang Komite Audit terkait tugas dan tanggung jawab:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Independensi Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi syarat independensi, yaitu jika tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama.

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit Perseroan telah melaksanakan rapat Komite Audit sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

- Follow up implementation by the Board of Directors on the findings of internal audit unit, public accountant, and supervisory results of the Financial Services Authority;

14. To provide recommendation to the Board of Commissioners.

15. Reviewing complaints related to the bank accounting process and financial reporting;

16. Reviewing and providing recommendations to the Board of Commissioners on the potential of conflict of interest;

17. Maintaining confidentiality of the bank documents, data and information;

18. Independent Commissioner as a Chairman of Audit Committee and the President Director to sign the mandatory Reports submitted to OJK, including:

- Specific report on internal audit findings that predicted to endanger the Bank business continuity;
- Internal audit implementation and main results reports (by semester).

The Audit Committee Authority related to duties and responsibilities:

1. To access the bank documents, data and information on employees, funds, assets and resources as required;
2. To directly communicate with employees, including the Board of Directors and parties in charge of internal audit function, risk management and accountant related to the Audit Committee duties and responsibilities;
3. To engage independent party outside of the Audit Committee members as required to assist its duties implementation (if required);
4. To carry out other authority provided by the Board of Commissioners.

Audit Committee Independence

Pursuant to POJK No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 on the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee, members of the Company's Audit Committee have met the independence requirements, which are not affiliated with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or major shareholders.

Audit Committee Meetings

Throughout 2021, the Company's Audit Committee held 12 (twelve) Audit Committee meetings with the following attendance:



No	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah / Total		%
			Rapat / Meeting	Hadir / Attendance	
1	Hasanuddin *)	Komisaris Utama Independen / President Commissioner concurrently as Independent Commissioner (Ketua Komite / Committee Chairman)	12	10	90%
2	Media Warman	Komisaris Independen (Anggota) / Independent Commissioner (Member)	12	12	100%
3	M. Yusuf **)	Komisaris (Anggota) / Commissioner (Member)	12	6	50%
4	Titi Khoiriah ***)	Komisaris Independen (Ketua Komite) / Independent Commissioner (Committee Chairman)	12	2	17%
5	Hariyadi	Pihak Independen (Anggota) / Independent Party (Member)	12	12	100%
6	Douval	Pihak Independen (Anggota) / Independent Party (Member)	12	12	100%

*) Bapak Hasanuddin dan Bapak M. Yusuf diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPSLB tanggal 10 Maret 2021 / Mr. Hasanuddin and Mr. M Yusuf were appointed as Commissioners based on EGMS 10 March 2021

**) Bapak M. Yusuf efektif tidak menjadi anggota Komite Audit Per 10 Agustus 2021 / Mr. M Yusuf effectively did not serve as Audit Committee member as of 10 August 2021

***) Ibu Titi Khoiriah tidak menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB tanggal 10 Maret 2021 / Mrs. Titi Khoiriah did not serve as Independent Commissioner based on EGMS 10 March 2021

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan dan arahan dalam Piagam Komite Audit dengan rincian sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan audit internal selama tahun 2021 serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melakukan jasa audit keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Tbk, posisi 31 Desember 2021 (antara lain meliputi, independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa, keahlian dan pengalaman KAP dan Tim Audit dari KAP, dan metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP).
4. Membuat Laporan Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Melakukan *review* atas Rencana Kerja Tahunan Divisi Audit Intern dan Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern sebelum disampaikan ke OJK.
6. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk bahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada OJK dan PSPT, antara lain :

Implementation of Audit Committee Duties In 2021

Throughout 2021, the Audit Committee has carried out various duties and responsibilities in accordance with the rules and directives in the Audit Committee Charter with the following details:

1. Monitor and evaluate policies, planning, and implementation of internal audit during 2021 as well as monitoring the follow-up to audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.
2. Monitor and evaluate the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the Internal Audit Division, public accountants, and the results of supervision from the Financial Services Authority.
3. Provide recommendations to the Board of Commissioners on the use of services from a Public Accounting Firm (KAP), namely KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono to perform financial audit services for PT Bank Pembangunan Daerah Tbk, position December 31, 2021 (including, among others, independence, scope of assignment, service fees, expertise and the experience of the KAP and the Audit Team from the KAP, and the audit methodology, techniques, and tools used by the KAP).
4. Prepare an Evaluation Report on the implementation of the provision of audit services for the annual historical financial information ending 31 December 2020 to the Financial Services Authority.
5. Reviewing the Internal Audit Division's Annual Work Plan and Main Internal Audit Reports before submitting them to OJK.
6. Provide input to the Board of Commissioners for the Board of Commissioners' Supervisory Report material to OJK and PSPT, including:



- Penguatan Struktur Permodalan Bank, mendorong PSP untuk melakukan penambahan modal untuk bisa menjaga kelangsungan operasional bank secara sehat;
- Peningkatan kinerja bank, antara lain peningkatan NIM;
- Mengendalikan biaya dana, biaya *overhead* dan perbaikan ratio BOPO;
- Penyelesaian NPL, antara lain melalui percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan *collection* dan melakukan pengawasan/monitoring yang ketat terhadap kualitas kredit "*special mention*" karena rentan menjadi NPL;
- Penanganan kasus *fraud* dan pengenaan sanksi yang tegas kepada yang terlibat;

- Strengthening the Bank's Capital Structure, encouraging PSP to make additional capital in order to maintain the continuity of bank operations in a healthy manner;
- Improved bank performance, including increasing NIM;
- Controlling the cost of funds, overhead costs and improvement of BOPO ratio;
- Settlement of NPLs, among others, by accelerating the settlement of non-performing loans and increasing collection and conducting strict supervision/monitoring of the quality of "*special mention*" loans because they are vulnerable to NPLs;
- Handling fraud cases and imposing strict sanctions on those involved;

Pelatihan Kompetensi Audit

Dalam mengembangkan kompetensinya, anggota Komite Audit Perseroan dapat mengikuti pelatihan ataupun program pengembangan kompetensi. Pada tahun 2021, pelatihan yang diikuti oleh Komite Audit telah diuraikan di Bab 3 Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Audit Competency Training

To develop their competence, members of the Company's Audit Committee can take part in training or competency development programs. In 2021, the training attended by the Audit Committee has been described in Chapter 3 of the Company Profile in this Annual Report.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Legal Basis

1. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
2. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December 23, 2015 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan oleh Dewan Komisaris.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee of the Company has a Nomination and Remuneration Committee Charter which is approved by the Board of Commissioners.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mengatur tentang masa tugas dan komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, tata cara dan prosedur kerja, dan penyelenggaraan rapat.

Nomination and Remuneration Committee Charter regulates the tenure and composition, structure and requirements of membership, duties, responsibilities and authority, work procedures and procedures and the organization of meetings.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Oleh karenanya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Appointment and Dismissal

The Nomination and Remuneration Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. Therefore, the Nomination and Remuneration Committee is directly responsible to the Board of Commissioners of the Company.



Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Bank telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 009/SK/KOM-BB/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi dengan keanggotaan sebagai berikut:

Composition of Nomination and Remuneration Committee

The Bank has in place the Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. 009/SK/KOM-BB/V/2021 dated May 25, 2021 regarding Changes in the Membership Composition of the Nomination & Remuneration Committee with the following membership:

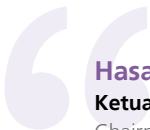
No	Nama / Name	Jabatan / Position
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Chairman of Nomination and Remuneration Committee		
1.	Hasanuddin	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of Nomination and Remuneration Committee		
2.	Media Warman	Komisaris Perseroan / Company's Commissioner
3.	M. Yusuf	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan / Independent Party with expertise in financing and banking
Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi / Secretary of Nomination and Remuneration Committee		
4.	Kepala Divisi Human Capital & Transformasi	Chairman of Human Capital & Transformation Division

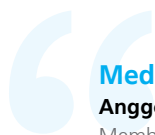
Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan terdiri atas 2 (dua) orang yang diketuai oleh 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang anggota yang berasal dari Komisaris dan 1 (satu) orang anggota komite yang berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas, dan moral yang baik.

Membership of Company Nomination and Remuneration Committee consists of 2 (two) members which is chaired by 1 (one) chairman and is supported by 1 (one) member as Commissioner and 1 (one) member from managerial position under the Board of Directors in charge of human resources. All members of the Nomination and Remuneration Committee have met the criteria of independency, skills, integrity and good moral.

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of Nomination and Remuneration Committee

 Hasanuddin Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman of Nomination and Remuneration	
Warga Negara / Nationality	Indonesia
Usia / Age	57 tahun / 57 years old
Masa Jabatan / Terms of Office	4 tahun / 4 years
Dasar Pengangkatan / Appointment Basis	SK Dewan Komisaris Nomor 009/SK/KOM-BB/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 / Decree of the Board of Commissioners No. 009/SK/KOM-BB/V/2021 dated 25 May 2021
Riwayat Pendidikan / Educational Background	Telah diuraikan dalam profil Dewan Komisaris pada bab Profil / Described in the Board of Commissioners Profile in the Profile chapter
Riwayat Jabatan / Position History	Telah diuraikan dalam profil Dewan Komisaris pada bab Profil / Described in the Board of Commissioners Profile in the Profile chapter



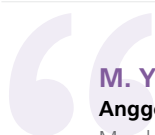
Media Warman

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Member of Nomination and Remuneration



Warga Negara / Nationality	Indonesia
Usia / Age	57 tahun / 57 years old
Masa Jabatan / Terms of Office	4 tahun / 4 years
Dasar Pengangkatan / Appointment Basis	SK Dewan Komisaris Nomor 009/SK/KOM-BB/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 / Decree of the Board of Commissioners No. 009/SK/KOM-BB/V/2021 dated 25 May 2021
Riwayat Pendidikan / Educational Background	Telah diuraikan dalam profil Dewan Komisaris pada bab Profil / Described in the Board of Commissioners Profile in the Profile chapter
Riwayat Jabatan / Position History	Telah diuraikan dalam profil Dewan Komisaris pada bab Profil / Described in the Board of Commissioners Profile in the Profile chapter



M. Yusuf

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Member of Nomination and Remuneration



Warga Negara / Nationality	Indonesia
Usia / Age	56 tahun / 56 years old
Masa Jabatan / Terms of Office	4 tahun / years
Dasar Pengangkatan / Appointment Basis	SK Dewan Komisaris Nomor 009/SK/KOM-BB/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 / Decree of the Board of Commissioners No. 009/SK/KOM-BB/V/2021 dated 25 May 2021
Riwayat Pendidikan / Educational Background	Telah diuraikan dalam profil Dewan Komisaris pada bab Profil / Described in the Board of Commissioners Profile in the Profile chapter
Riwayat Jabatan / Position History	Telah diuraikan dalam profil Dewan Komisaris pada bab Profil / Described in the Board of Commissioners Profile in the Profile chapter

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris, Nomor 015/SK-KOM/BB/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

Terkait Kebijakan Nominasi

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris:
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Program pengembangan kemampuan anggota Dekom/Direksi;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

Duties and Responsibilities

Pursuant to Decree of the Board of Commissioners No. 015/SK-KOM/BB/X/2017 dated October 16, 2017 regarding the Guidelines and Work Rules of the Remuneration & Nomination Committee, the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

Related to Nomination Policies

Providing recommendation to the Board of Commissioners on:

- Position structures of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - Required policy and criteria in nomination process;
 - Performance evaluation policy of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - Competence development program of members of the Board of Commissioners/Board of Directors
- Assisting the Board of Commissioners on the performance assessment of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on the benchmark developed as evaluation materials;



3. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Pemilihan Pihak Independen calon anggota Komite Dewan Komisaris.

Terkait Kebijakan Remunerasi:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi (kesesuaian kebijakan dengan pelaksanaannya), paling kurang meliputi:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Prestasi kerja individual;
 - Kewajaran dengan *peer group*;
 - Sasaran dan strategi jangka panjang Bank;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi bagi:
 - Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Pejabat Eksekutif dan Pegawai untuk disampaikan ke Direksi;
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Independensi

- Komite Remunerasi dan Nominasi wajib independen dalam melaksanakan tugasnya.
- Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas-tugasnya, paling kurang dalam laporan tahunan dan laporan pelaksanaan GCG.
- Dalam hal terjadi benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, maka Komite Remunerasi dan Nominasi harus mengungkapkannya paling kurang dalam laporan tahunan (*annual report*) dan laporan pelaksanaan GCG.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

3. Providing recommendation on qualified candidates as members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the Board of Commissioners for submission to the GMS;
4. Providing recommendation to the Board of Commissioners on:
 - a. Selection of candidate of members of the Board of Commissioners and or Board of Directors for submission to the GMS;
 - b. Selection of candidate of Independent Party as members of the Board of Commissioners Committee.

Related to Remuneration Policy:

1. Conducting evaluation on the remuneration policy (appropriateness of policy with its implementation), at least including:
 - Financial performance and fulfilment of impairment according to the prevailing rules;
 - Individual work performance;
 - Fairness with peer group;
 - The Bank long-term targets and strategies.
2. Providing recommendation to the Board of Commissioners on the remuneration structure, policy on remuneration and remuneration amount for:
 - Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders
 - Executives and Employees to be submitted to the Board of Directors
3. Assisting the Board of Commissioners on the performance assessment with the appropriateness of remuneration accepted by members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

Independency

- The Remuneration and Nomination Committee must be independent in carrying out its duties.
- The Remuneration and Nomination Committee is required to report the implementation of its duties, at least in the annual report and GCG implementation report.
- In the event of a conflict of interest in the decision-making process, the Remuneration and Nomination Committee must disclose it at least in the annual report and GCG implementation report.

Nomination and Remuneration Committee Meetings

Throughout 2021, the Nomination and Remuneration Committee held 4 (four) Nomination and Remuneration Committee meetings with the following attendance:

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	% Kehadiran / % Attendance
1.	Hasanuddin	Ketua / Chairman	4	4	100%
2.	Media Warman	Anggota / Member	4	4	100%
3.	M. Yusuf	Anggota / Member	4	4	100%
4.	Dindin Rusdiana	Sekretaris / Secretary	2	2	50%
5.	Dida Herdiyana	Sekretaris / Secretary	1	1	25%
6.	Hufon Hendriyanto	Sekretaris / Secretary	1	1	25%

Pelatihan Kompetensi Nominasi dan Remunerasi

Dalam mengembangkan kompetensinya, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengikuti pelatihan ataupun program pengembangan kompetensi. Pada tahun 2021, pelatihan yang diikuti oleh Komite Audit tersedia di Bab 3 Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Sepanjang Tahun 2021

- Menyusun beberapa kebijakan terkait remunerasi dan nominasi, meliputi:
 - Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Pedoman Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Pedoman Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Kebijakan Kode Etik (*Code of Conduct*) Bank Banten.
- Memberikan rekomendasi calon Pihak Independen sebagai Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Perseroan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Pengawasan Risiko.

Nomination and Remuneration Competency Training

In developing its competencies, members of the Nomination and Remuneration Committee of the Company can attend training or competency development programs. In 2021, the training participations by the Nomination and Remuneration Committee is available in the Chapter 3 Company Profile of this Annual Report.

Duties Implementation of Nomination and Remuneration Committee in 2021

- Developed policies on remuneration and nomination, such as:
 - Nomination and Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors;
 - Nomination Guidelines of the Board of Commissioners and Board of Directors;
 - Performance Assessment Guidelines for Commissioners and Board of Directors;
 - Remuneration Guidelines of the Board of Commissioners and Board of Directors;
 - Code of Conduct Policy of Bank Banten.
- Provided recommendations for Independent Party candidates as Members of the Audit Committee and Risk Oversight Committee of Company.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Legal Basis

- Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.4/2014 dated December 8, 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

Risk Oversight Committee Charter

The Risk Oversight Committee has a Guideline and Procedure that outlines the tasks, authorities, obligations, responsibilities, division of work, working hours, ethics, meetings, organizational structure and tasks related to the Risk Oversight Committee.



Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Oleh karena itu Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Komposisi Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2021, terdapat perubahan keanggotaan Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 008/SK-KOM/BB/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 menjadi sebagai berikut:

Appointment and Dismissal

The Risk Oversight Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. As such, the Risk Oversight Committee is directly responsible to the Board of Commissioners.

Risk Oversight Committee Composition

In 2021, there was a change in the Risk Oversight Committee membership pursuant Decree of the Board of Commissioners No. 008/SK-KOM/BB/V/2021 25 May 25, 2021 to be as follows:

No	Nama / Name	Jabatan / Position
Ketua Komite Pemantau Risiko / Chairman of Risk Oversight Committee		
1.	Media Warman	Komisaris Perseroan / Company's Commissioner
Anggota Komite Pemantau Risiko / Member of Risk Oversight Committee		
2.	Hasanuddin	Komisaris Independen / Independent Commissioner
3.	Douval	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko / Independent party with expertise in risk management
4.	Hariyadi	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan / Independent party with expertise in financing and banking

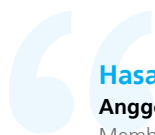
Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan terdiri atas 5 (lima) orang yang diketuai oleh 1 (satu) Komisaris Independen dan dibantu oleh 1 (satu) orang anggota yang berasal dari Komisaris Utama Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen Risiko, keuangan dan perbankan. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik.

The membership of the Company's Risk Monitoring Committee consists of 5 (five) people chaired by 1 (one) Independent Commissioner and assisted by 1 (one) member from the Independent President Commissioner, 1 (one) Commissioner and 2 (two) members. committees from independent parties with expertise in Risk management, finance and banking. All members of the Risk Monitoring Committee have met the criteria of independence, expertise, integrity and good morals.

Profil Komite Pemantau Risiko

Audit Committee Profile

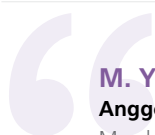
 Media Warman Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Oversight Committee	
Warga Negara / Nationality	Indonesia
Usia / Age	57 tahun / 57 years old
Masa Jabatan / Terms of Office	25 Mei 2021 s.d sekarang / 25 May 2021 to present
Dasar Pengangkatan / Appointment Basis	SK. No. 008/SK/KOM-BB/V/21 tanggal 25 Mei 2021 / Decree No. 008/SK/KOM-BB/V/21 dated May 25, 2021
Riwayat Pendidikan / Educational Background	Telah diuraikan dalam profil Dewan Komisaris pada bab Profil / Described in the Board of Commissioners Profile in the Profile Chapter
Riwayat Jabatan / Position History	Telah diuraikan dalam profil Dewan Komisaris pada bab Profil / Described in the Board of Commissioners Profile in the Profile Chapter

**Hasanuddin****Anggota Komite Pemantau Risiko**

Member of Risk Oversight Committee

99

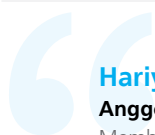
Warga Negara / Nationality	Indonesia
Usia / Age	57 tahun / years old
Masa Jabatan / Terms of Office	25 Mei 2021 s.d sekarang / 25 May 2021 to present
Dasar Pengangkatan / Appointment Basis	SK. No. 008/SK/KOM-BB/V/21 tanggal 25 Mei 2021 / Decree No. 008/SK/KOM-BB/V/21 dated May 25, 2021
Riwayat Pendidikan / Educational Background	Telah diuraikan dalam profil Dewan Komisaris pada bab Profil / Described in the Board of Commissioners Profile in the Profile Chapter
Riwayat Jabatan / Position History	Telah diuraikan dalam profil Dewan Komisaris pada bab Profil / Described in the Board of Commissioners Profile in the Profile Chapter

**M. Yusuf****Anggota Komite Pemantau Risiko**

Member of Risk Oversight Committee

99

Warga Negara / Nationality	Indonesia
Usia / Age	57 tahun / years old
Masa Jabatan / Terms of Office	25 Mei 2021 s.d sekarang / 25 May 2021 to present
Dasar Pengangkatan / Appointment Basis	SK. No. 008/SK/KOM-BB/V/21 tanggal 25 Mei 2021 / Decree No. 008/SK/KOM-BB/V/21 dated May 25, 2021
Riwayat Pendidikan / Educational Background	Telah diuraikan dalam profil Dewan Komisaris pada bab Profil / Described in the Board of Commissioners Profile in the Profile Chapter
Riwayat Jabatan / Position History	Telah diuraikan dalam profil Dewan Komisaris pada bab Profil / Described in the Board of Commissioners Profile in the Profile Chapter

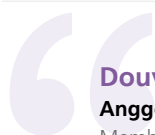
**Hariyadi****Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen)**

Member of Risk Oversight Committee (Independent Party)

99

Warga Negara / Nationality	Indonesia
Usia / Age	60 tahun / years old
Masa Jabatan / Terms of Office	25 Mei 2021 s.d sekarang / 25 May 2021 to present
Dasar Pengangkatan / Appointment Basis	SK. No. 008/SK/KOM-BB/V/21 tanggal 25 Mei 2021 / Decree No. 008/SK/KOM-BB/V/21 dated May 25, 2021
Riwayat Pendidikan / Educational Background	Telah diuraikan dalam profil Komite Pemantau Risiko pada Bab Tata Kelola Perusahaan / Described in the Risk Oversight Committee Profile in the Good Corporate Governance Chapter
Riwayat Jabatan / Position History	Telah diuraikan dalam profil Komite Pemantau Risiko pada Bab Tata Kelola Perusahaan / Described in the Risk Oversight Committee Profile in the Good Corporate Governance Chapter





Douval

Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen)

Member of Risk Oversight Committee (Independent Party)

99

Warga Negara / Nationality	Indonesia
Usia / Age	41 tahun / years old
Masa Jabatan / Terms of Office	25 Mei 2021 s.d sekarang / 25 May 2021 to present
Dasar Pengangkatan / Appointment Basis	SK. Anggota Komite Audit No. 006/SK/KOM-BB/XII/20 Tanggal 1 Desember 2020 / Decree No. 006/SK/KOM-BB/XII/20 dated December 1, 2020
Riwayat Pendidikan / Educational Background	Telah diuraikan dalam profil Komite Pemantau Risiko pada Bab Tata Kelola Perusahaan / Described in the Risk Oversight Committee Profile in the Good Corporate Governance Chapter
Riwayat Jabatan / Position History	Telah diuraikan dalam profil Komite Pemantau Risiko pada Bab Tata Kelola Perusahaan / Described in the Risk Oversight Committee Profile in the Good Corporate Governance Chapter

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan SK No. 004/SK-KOM/BB/XII/2018, Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities

Based on Decree No. 004/SK-KOM/BB/XII/2018, the Risk Oversight Committee shall provide opinion to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identify matters that require the attention of the Board of Commissioners, other duties related to the duties of the Board of Commissioners, among others:

1. Evaluate the suitability of Risk Management Policy with the implementation of the policy;
2. Monitor and evaluate the performance of the Risk Management Committee and Risk Management Unit to provide recommendations to the Board of Commissioners.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang 2021, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian rapat sebagai berikut:

Risk Oversight Committee Meetings

Throughout 2021, the Risk Oversight Committee held 8 (eight) meetings with the following attendance:

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	% Kehadiran / % Attendance
1	Media Warman	Komisaris Independen (Ketua Komite) / Independent Commissioner (Committee Chairman)	8	8	100%
2	Hasanuddin *)	Komisaris Utama Independen (Anggota) / President Commissioner concurrently as Independent Commissioner (Member)	8	6	75%
3	M. Yusuf *)	Komisaris (Anggota) / Commissioner (Member)	8	6	75%
4	Titi Khoiriah **)	Komisaris Independen (Ketua Komite) / Independent Commissioner (Committee Chairman)	8	2	25%
5	Hariyadi	Pihak Independen (Anggota) / Independent Party (Member)	8	8	100%
6	Douval	Pihak Independen (Anggota) / Independent Party (Member)	8	8	100%

*) Bapak Hasanuddin dan Bapak M. Yusuf diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPSLB tanggal 10 Maret 2021. / Mr. Hasanuddin and Mr. M. Yusuf were appointed as Commissioners based on EGMS on 10 March 2021.

**) Ibu Titi Khoiriah tidak menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPSLB tanggal 10 Maret 2021. / Mrs. Titi Khoiriah did not serve as Independent Commissioner based on EGMS on 10 March 2021.

Pelatihan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Dalam mengembangkan kompetensinya, anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan dapat mengikuti pelatihan atau program pengembangan kompetensi. Pada tahun 2021, pelatihan yang diikuti oleh Komite Pemantau Risiko tersedia di Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Sepanjang Tahun 2021

Selama tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan risiko dengan melakukan *review* terhadap dashboard risiko secara bulanan, dan evaluasi atas laporan profil risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, serta memberikan pendapat, saran, dan rekomendasi perbaikan serta strategi mitigasi risikonya.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
3. Melakukan *review* atas *draft* Kebijakan Manajemen Risiko sebelum dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK.
4. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terhadap seluruh aspek penilaian dalam Tingkat Kesehatan Bank, termasuk seluruh risiko inheren yang perlu menjadi perhatian antara lain risiko kredit, operasional, strategik dan kepatuhan dengan memberikan masukan mitigasi risikonya, termasuk juga upaya untuk perbaikan aspek permodalan, rentabilitas dan juga implementasi GCG.
5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk bahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada OJK dan PSPT.

Komite Direksi

Board of Directors Committee

KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Dasar Hukum

1. Anggaran Dasar Perseroan
2. SK Direksi No.012/SK/DIR-BB/II/19 tanggal 19 Februari 2019

Struktur Keanggotaan

Keanggotaan Komite ALCO terdiri atas 7 (Tujuh) orang yang diketuai oleh 1 (satu) orang, yaitu Direktur Utama. Seluruh anggota Komite ALCO telah memenuhi kriteria kompetensi/keahlian, integritas, dan moral yang baik.

Risk Oversight Committee Competency Training

In developing its competencies, members of the Risk Oversight Committee of the Company can attend training or competency development programs. In 2021, the training participations by the Risk Oversight Committee is available in the Chapter 3 Company Profile of this Annual Report.

Duties Implementation of the Risk Oversight Committee During 2021

The Risk Oversight Committee has carried out the following duties implementation during 2021:

1. Conduct risk monitoring by reviewing the risk dashboard on a monthly basis, and evaluating risk profile reports and Bank Soundness Level Reports, as well as providing opinions, suggestions, and recommendations for improvement as well as risk mitigation strategies.
2. Evaluate the implementation of the duties and responsibilities of the Risk Management Unit and the implementation of the duties of the Risk Management Committee.
3. Reviewed the draft Risk Management Policy prior to the request of approval from the Board of Commissioners and submission to OJK.
4. Recommend to the Board of Commissioners on all aspects of the assessment of the Bank Soundness Level, including all inherent risks that need attention including credit, operational, strategic and compliance risks by providing input on risk mitigation, including efforts to improve aspects of capital, profitability and also the implementation of GCG.
5. Provide input to the Board of Commissioners for the Board of Commissioners' Supervisory Report material to OJK and PSPT.

ASSET AND LIABILITIES COMMITTEE

Legal Basis

1. Articles of Association of the Company.
2. Decree of the BOD No. 012/SK/DIR-BB/II/19 dated February 19, 2019

Membership Structure

ALCO Committee membership consist of 7 (seven) members which chair by 1 (one) member namely President Director. All members of ALCO Committee has met the criteria of competency/expertise, integrity and good moral.



Berdasarkan SK Direksi No. 342/SK/DIR-BB/VII/21 tanggal 27 Juli 2021 keanggotaan Komite ALCO adalah sebagai berikut:

Based on Decree of the Board of Directors No. 342/SK/DIR-BB/VII/21 dated 27 July 2021, the membership of the ALCO Committee is as follows

Ketua / Chairman	Direktur Utama / President Director
Anggota Tetap / Permanent Members	1. Direksi / Board of Directors 2. Kepala Divisi <i>Treasury</i> (Sekretaris) / Head of Treasury Division (Secretary) 3. Kepala Divisi Dana dan Jasa / Head of Fund and Service Loans Division 4. Kepala Divisi Kredit / Head of Credit Division 5. Kepala Divisi Akuntansi & Keuangan / Head of Accounting & Finance Division 6. Kepala Divisi Manajemen Risiko / Head of Risk Management Division
Anggota Tidak Tetap / Temporary Members	1. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Perencanaan dan Hukum / Corporate Secretary, Planning and Legal Division 2. Kepala Divisi Kepatuhan / Legal Division 3. Kepala Divisi Operasional dan Umum / Operations and General Division 4. Kepala Divisi Teknologi Informasi dan <i>Big Data</i> / Information Technology and Big Data Division 5. Kepala Divisi <i>Human Capital</i> dan Transformasi / Human Capital and Transformation Division 6. Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit / Head of Restructuring & Credit Settlement Division 7. <i>Area Manager</i> 8. <i>Project Management Officer</i> (PMO)

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO meliputi:

- Komite ALCO merupakan salah satu komite tetap di bawah Direksi yang berfungsi menetapkan kebijakan dan strategi *Asset* dan *Liability* Perseroan (*Asset & Liabilities Management*);
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan serta strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan termasuk kebutuhan dana tidak terduga dan meminimalisasi *Idle Fund*;
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan serta strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko valuta asing;
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan serta strategi harga (*Pricing Policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor;
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan serta strategi dalam penataan portofolio investasi; dan
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan serta strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *Net Interest Margin* (NIM) yang optimal.

Wewenang

Adapun wewenang Komite ALCO terkait tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat;

Duties and Responsibilities

The ALCO Committee duties and responsibilities are as follows:

- ALCO Committee is one of permanent committee under the Board of Directors that has the function to determine the Company's Assets and Liabilities Management;
- Determine and evaluate the policy and strategy of liquidity management to maintain its compliance with applicable rules, fulfil liquidity requirements including required unexpected, funds and to minimize idle funds;
- Determine and evaluate the policy and strategy related to market risk, namely interest rate risk and foreign exchange risk;
- Determine and evaluate the pricing policy and strategy for the products of funds, loans, and inter office accounts;
- Determine and evaluate the policy and strategy of investment portfolio arrangement; and
- Determine and evaluate the policy and strategy balance sheet structure arrangement by anticipating the changes of interest rates to achieve optimum Net Interest Margin (NIM).

Authorities

The ALCO Committee authority related to duties and responsibilities are as follows:

- Provide input to the ALCO Secretary in developing meeting agenda and materials;

2. Memberikan masukan berupa informasi dan analisa pada rapat ALCO, antara lain mengenai:
 - a. Metodologi penentuan harga produk dana dan pinjaman;
 - b. Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing;
 - c. Penentuan harga produk dana dan pinjaman;
 - d. Daya saing bunga produk dan pinjaman;
 - e. Strategi bank pesaing;
 - f. Kendala penerapan hasil keputusan ALCO;
 - g. Perilaku nasabah dan Perubahannya.
3. Setiap anggota tetap wajib menghadiri rapat ALCO yang diselenggarakan, dalam hal Pimpinan Divisi berhalangan hadir harus mengirimkan perwakilannya.
4. Anggota tidak tetap wajib menghadiri rapat ALCO bila diperlukan;
5. Mengambil keputusan secara musyawarah, mufakat atas usulan dan/atau pemecahan masalah yang terkait dengan kondisi bisnis dan *Asset & Liability* Bank.

Penyelenggaraan ALCO

1. ALCO diadakan minimal 1 kali dalam sebulan atau dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh direksi sesuai kebutuhan;
2. Sebelum pelaksanaan rapat ALCO, sekretaris ALCO dapat mengadakan rapat *Supporting Staff Group* (SSG) ALCO yang anggotanya adalah seluruh Pimpinan Bagian dari Divisi anggota tetap ALCO;
3. Sekretaris ALCO mengorganisir pelaksanaan rapat ALCO dan sekaligus sebagai notulis dalam pelaksanaan rapat;
4. Dalam hal Direktur Utama sebagai ketua ALCO berhalangan hadir, maka rapat ALCO sekurang-kurangnya dihadiri 51% dari Dewan Direksi;
5. ALCO dapat dilaksanakan dan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh 51% dari jumlah anggota tetap;
6. Pimpinan Divisi sebagai anggota ALCO dapat mengusulkan dan mempresentasikan usulan dalam rapat ALCO untuk dapat diambil keputusan;
7. Pengambilan keputusan rapat ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat yang sah;
8. Keputusan rapat yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh ketua ALCO atau 51% dewan Direksi dalam hal ketua ALCO berhalangan hadir;
9. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat oleh notulis, ditandatangani oleh Ketua ALCO dan didokumentasikan oleh Sekretaris ALCO.

2. Provide input such as information and analysis during ALCO meetings, among others regarding:
 - a. Methodology for pricing of funds and loans products;
 - b. Methodology for measuring liquidity risk, interest rate risk, and foreign exchange risk;
 - c. Determining pricing for funds and loans products;
 - d. Competitiveness of product and loans interests;
 - e. Strategy of competition banks;
 - f. Obstacles in implementing ALCO decisions;
 - g. Customer behaviour and changes.
3. Each permanent member shall attend the ALCO meeting, in the event that the Division Head is unable to attend, a representative shall attend.
4. Non-permanent members are required to attend ALCO meetings if necessary;
5. Decision making by deliberation, consensus on proposals and or solutions to issues related to business conditions and the Bank's Asset & Liability.

ALCO Implementation

1. ALCO is held at least once a month or in certain circumstances as determined by the Board of Directors as required;
2. Prior to the implementation of the ALCO meeting, the secretary of ALCO may hold a meeting of the ALCO Supporting Staff Group (SSG) which members are all Heads of the Division of permanent members of ALCO;
3. The Secretary of ALCO organizes the ALCO meeting implementation and at the same time serves as administrator in the meeting implementation;
4. In the event that the President Director as chairman of ALCO is unable to attend, the ALCO meeting shall be attended by at least 51% of the Board of Directors;
5. ALCO can be implemented and valid if attended by at least 51% of permanent members;
6. The Division Head as a member of ALCO can propose and present proposals in the ALCO meeting for decision making;
7. Decisions in the ALCO meeting are only made through legitimate resolutions of the meeting;
8. Meeting decisions are legitimate and binding if approved by the chairman of ALCO or 51% of the Board of Directors in the event that the chairman of ALCO is unable to attend;
9. The meeting results must be recorded in the meeting minutes by the administrator, signed by the chairman of ALCO and documented by the secretary of ALCO.



Rapat Komite

Selama tahun 2021, ALCO telah melaksanakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, sebagai berikut:

Committee Meetings

During 2021, ALCO has held 11 (eleven) meetings, as follows

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	% Kehadiran / % Attendance
1.	Direktur Utama / President Director	Ketua / Chairman	11	10	90.9%
2.	Direksi / Board of Directors	Anggota / Member	11	11	100.0%
3.	Divisi Dana dan Treasury / Funds and Treasury Division	Anggota / Member	11	11	100.0%
4.	Divisi Kredit Komersial dan Konsumer / Commercial and Consumer Loans Division	Anggota / Member	11	11	100.0%
5.	Divisi Kredit UMKM / MSME Loans Division	Anggota / Member	11	10	99.9%
6.	Divisi Akuntansi / Accounting Division	Anggota / Member	11	7	63.6%
7.	Divisi Manajemen Risiko / Risk Management Division	Anggota / Member	11	11	100.0%

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan SK Direksi No.326/SK/DIR-BB/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021. Adapun tugasnya, antara lain: merumuskan kebijakan, arah, strategi, penerapan manajemen risiko, mengawasi penerapan manajemen risiko, merumuskan langkah-langkah yang diambil apabila terdapat kendala dalam penerapan manajemen risiko, melakukan kajian berkala terhadap kebijakan manajemen risiko bank dan memberikan saran-saran langkah perbaikan, dan memberikan masukan kepada Direksi terkait penetapan limit risiko pada masing-masing aktivitas fungsional.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee was formed based on the Decree of the Board of Directors No. 326/SK/DIR-BB/VII/2021 dated July 21, 2021. Its duties include: formulating policies, directions, strategies, implementation of risk management, supervising the implementation of risk management, formulating steps to be taken if there are obstacles in the application of risk management, conducting periodic reviews of bank risk management policies and providing advices for improvement steps, and provide input to the Board of Directors regarding the determination of risk limits for each functional activity.

Struktur Keanggotaan

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri atas tiga (3) unsur (sekretaris, anggota tetap, dan anggota tidak tetap) diketuai oleh 1 (satu) orang Ketua. Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko telah memenuhi kriteria kompetensi/keahlian, integritas, dan moral yang baik.

Membership Structure

Risk Management Committee membership consist of 3 (three) members (secretary, permanent members and non permanent members) which chair by 1 (one) Chairman. All members of Risk Management Committee has met the criteria of competency/expertise, integrity and good moral.

Berdasarkan SK Direksi No.326/SK/DIR-BB/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Directors No. 326/SK/DIR-BB/VII/2021 dated July 21, 2021, the membership of the Risk Management Committee is as follows:

Ketua / Chairman	Direktur Kepatuhan / Compliance Director
Sekretaris / Secretary	Kepala Divisi Manajemen Risiko / Head of Risk Management Division
Anggota / Members	- Direktur Utama / President Director - Direktur Bisnis / Business Director - Direktur Operasional / Operations Director - Kepala Divisi Kepatuhan / Head of Compliance Division - Kepala Divisi Audit Intern / Head of Internal Audit Division - Kepala Divisi Kredit / Head of Credit Division - Kepala Divisi Dana & Jasa / Head of Fund & Services Division

- Kepala Divisi Treasury / Head of Treasury Division
- Kepala Divisi Operasional & Umum / Head of Operations & General Division
- Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit / Head of Restructuring & Credit Settlement Division
- Kepala Divisi Human Capital & Transformasi / Head of Human Capital & Transformation Division
- Kepala Divisi Akuntansi & Keuangan / Head of Accounting & Finance Division
- Kepala Divisi Teknologi & Big Data / Head of Technology & Big Data Division
- Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Perencanaan & Hukum / Head of Corporate Secretariat, Planning & Legal Division

Wewenang dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko

Wewenang dan Tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi:

1. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko, paling sedikit mencakup:
 - a. Penyusunan kebijakan dan perubahannya, strategi dan pedoman penerapan Manajemen risiko;
 - b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen risiko;
 - c. Melakukan evaluasi dan menetapkan limit risiko (risk appetite & risk tolerance) untuk ditetapkan oleh Direksi;
 - d. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal; dan
 - e. Memperoleh data informasi dari Audit Intern mengenai hasil audit internal.

Wewenang

Wewenang Komite Manajemen Risiko meliputi:

1. Pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*) serta per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
3. Kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
4. Pengkajian atas usulan aktivitas dan atau produk baru;
5. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan internal (internal model);
6. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan atau kepada komite Manajemen Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite Manajemen Risiko secara berkala.

Committee's Authorities and Responsibilities

The Authority and Responsibility of Risk Management Committee are:

1. Evaluating and providing recommendations to the President Director related to risk management, including at least:
 - a. Formulation of policies and their amendments, strategies and guidelines for the implementation of risk Management;
 - b. Improvement or refinement of the implementation of risk management based on the results of the evaluation of the implementation of risk Management;
 - c. Evaluating and setting risk limits (risk appetite & risk tolerance) to be determined by the Board of Directors;
 - d. Determination of matters related to business decisions that deviate from normal procedures; and
 - e. Obtain information data from the Internal Audit regarding the results of the internal audit.

Authorities

The Risk Management Committee Authority related to duties and responsibilities are as follows:

1. Monitoring the implementation of Risk Management strategy that has been approved by the Board of Directors;
2. Monitoring the overall composite Risk position as well as by type of Risk, and by type of functional activity as well as performing stress testing;
3. Periodic review of the Risk Management process;
4. Analysis of proposed new activities and/or products;
5. Evaluation of the accuracy of model and validity of data used to measure Risk for the Bank using internal model purposes;
6. Provide recommendations to the operating unit (risk taking unit) and/or to the Risk Management committee according to its authority;
7. Develop and submit a Risk profile/composition report to the President Director or a specifically assigned Director and the Risk Management committee periodically.



Rapat Komite

Selama tahun 2021, rapat Komite Manajemen Risiko Perseroan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, sebagai berikut:

Committee Meetings

In 2021, the Company's Risk Management Committee held 4 (four) meetings, as follows:

No.	Jabatan / Position	Jumlah / Total		
		Rapat / Meetings	Hadir / Attendance	% Kehadiran / % Attendance
1.	Ketua / Chairman	4	4	100%
2.	Sekretaris / Secretary	4	4	100%
3.	Anggota Tetap / Permanent Members	4	4	100%

KOMITE PENGARAH SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi dibentuk oleh Direksi berdasarkan SK Direksi 306/SK/Dir-BB/ VII/2021 pada tanggal 16 Juli 2021 dengan tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Teknologi
Informasi yang searah dengan Rencana Strategis Bank, dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, sumber daya yang dibutuhkan, serta manfaat yang diperoleh, misalnya dalam pergantian dan pengembangan aplikasi Switching Bank;
2. Perumusan kebijakan, standard dan prosedur Teknologi Informasi dan Big Data yang utama;
3. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
5. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank;
6. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi pada sektor Teknologi Informasi agar memberi kontribusi tercapainya tujuan bisnis Bank;
7. Pemantauan atas kinerja TSI dan upaya peningkatannya;
8. Koordinasi dengan unit kerja terkait dan atau pihak eksternal dalam penyelesaian masalah Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan;
9. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi, pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi;
10. Penyelenggaraan dan risalah rapat dapat dikelola, didokumentasikan dan dimonitor tindaklanjutnya oleh Sekretaris Komite.

INFORMATION AND TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The Information Technology Steering Committee is established by the Board of Directors based on Decree of the Board of Directors 306/SK/DIR-BB/VII/2021 dated 16 July 2021 with the duties and responsibilities of recommending to the Board of Directors regarding the following matters:

1. Technology Strategic Plan
Information Technology Strategic Plan in line with the Bank's Strategic Plan, taking into account the effectiveness, efficiency, resources required and benefits obtained, for example in the change and development of Switching Bank application.
2. Formulation of major Information Technology and Big Data policies, standards and procedures;
3. Compliance between the implementation of approved Information Technology projects with the Information Technology Strategic Plan.
4. Compatibility between the implementation of Information Technology projects with an agreed project plan (project charter).
5. TSI conformity with the needs of the management information system and the needs of the Bank's business activities;
6. The effectiveness of measures to minimize the risk of investment in the Information Technology sector in order to contribute to the achievement of the Bank's business objectives;
7. Monitoring the performance of Information Technology and efforts to improve it;
8. Coordination with related work units and or external parties in resolving Information Technology problems that cannot be resolved;
9. Formulation of Information Technology policies and procedures, Information Technology security, and risk management related to the use of Information Technology;
10. The organization and minutes of meetings can be managed, documented and monitored for follow-up by the Committee Secretary.

Struktur Keanggotaan

Membership Structure

Ketua / Chairman	Direktur Operasional & Transformasi (merangkap anggota) / Operations & Transformation Director (concurrently as member)
Sekretaris / Secretary	Kepala Divisi Teknologi Informasi & Big Data / Head of Information Technology and Big Data Division
Anggota / Members	- Direktur Kepatuhan / Compliance Director - Direktur Bisnis / Business Director - Seluruh Kepala Divisi / All Division Heads

Rapat Komite

Selama tahun 2021, Komite Teknologi Sistem Informasi telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut:

1. Tanggal 21 Juli 2021
2. Tanggal 27 Oktober 2021

Committee Meetings

During 2021, the Information Systems Technology Committee has held 2 (two) meetings, as follows:

1. Dated July 21, 2021
2. Dated October 27, 2021

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan melaksanakan tugasnya berdasarkan SK Direksi No. 188/SK/DIR-BB/V/21 tanggal 28 Mei 2021.

CREDIT POLICY COMMITTEE

The Credit Policy Committee performs its duties based on the Decree of the Board of Directors No. 188/SK/DIR-BB/V/21 dated 28 May 2021.

Struktur Keanggotaan

Seluruh anggota Komite Kebijakan Perkreditan telah memenuhi kriteria kompetensi/keahlian, integritas dan moral yang baik. Komite Kebijakan Perkreditan dibentuk oleh Direksi berdasarkan SK Direksi No. 188/SK/DIR-BB/V/21 tanggal 28 Mei 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

Membership Structure

All members of the Credit Policy Committee have met the criteria of competency/expertise, integrity and good moral. The Credit Policy Committee was established by the Board of Directors pursuant to Board of Directors Decree No. 188/SK/DIR-BB/V/21 dated 28 May 2021, with the following rules:

Ketua / Chairman	Direktur Utama / President Director
Sekretaris / Secretary	Bagian Kebijakan & Support Divisi kredit / Credit Division Policy & Support Section
Anggota Tetap / Permanent Members	- Direksi yang membidangi Perkreditan / Director in charge of Credit - Pimpinan satuan kerja Bidang Operasional yang terkait dengan perkreditan / Head of Operations Division work unit related to credit - Pimpinan Satuan kerja Audit Internal / Head of Internal Audit Unit
Anggota Tidak Tetap / Non Permanent Members	- Direksi lain yang tidak membidangi Perkreditan / Other Director who is not in charge of Credit - Divisi lain yang terkait*) / Other related division*)

*Anggota Tidak Tetap KKP disesuaikan dengan bahasan dalam rapat Komite Kebijakan Perkreditan. / The Credit Policy Committee Non Permanent Members are adjusted with the meeting discussion of the Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan meliputi:

1. Memberi masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) maupun kebijakan internal lainnya terkait perkreditan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Mengawasi agar KPB maupun kebijakan internal lainnya terkait perkreditan diterapkan dan dilaksanakan secara

Duties & Responsibilities

The following are duties and responsibilities of the Credit Policy Committee:

1. Provide input to the Board of Directors in the development of Bank Credit Policy and other internal policies related to credit, particularly those relating to the formulation of prudential principles in credit.
2. Oversee the application and implementation of Bank Credit Policy and other internal policies related to credit



konsekuen dan konsisten, serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan kebijakan dimaksud.

3. Melakukan kajian berkala terhadap KPB maupun kebijakan internal lainnya terkait perkreditan dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan kebijakan dimaksud.
4. Memantau dan mengevaluasi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio kredit;
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur besar tertentu;
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Wewenang Memutus Kredit;
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit;
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB;
 - g. Kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
5. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB serta hasil evaluasi atas butir 4 (empat).
6. Memberikan saran dan langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris terkait hal-hal pada butir 5 (lima).

Wewenang

Wewenang Komite Kebijakan Perkreditan terkait tugas dan tanggung jawab melakukan kajian berkala terhadap KPB maupun ketentuan internal lainnya terkait perkreditan di Bank Banten.

Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Perkreditan 2021

Pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Perkreditan selama tahun 2021, antara lain meliputi:

1. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian ketentuan internal yang berlaku.
2. Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan internal.
3. Menetapkan kebijakan/ ketentuan internal terkait perkreditan
4. Memberikan rekomendasi terkait pengkinian ketentuan.
5. Membuat Laporan atas pelaksanaan komite kebijakan perkreditan.

consequently and consistently, and formulate solutions in the event of problems or obstacles in the implementation of the said policies.

3. Conduct periodic reviews of Bank Credit Policy and other internal policies related to credit and provide advice to the Board of Directors in the event that changes or improvements in the policy are required.
4. Monitor and evaluate the following:
 - a. The development and quality of the loan portfolio;
 - b. The truth of the implementation of the authority to decide on credit;
 - c. The truth of the process of granting, development, and quality of credit granted to related parties and certain large debtors;
 - d. The correctness of the implementation of the provisions on the Limit of Credit Termination Authority;
 - e. Compliance with the provisions of laws and regulations and other regulations in the implementation of lending;
 - f. Settlement of non-performing loans in accordance with those stipulated in the KPB;
 - g. Sufficient amount of allowance for credit losses.
5. Submit a written report periodically to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding the oversight results on the application and implementation of Bank Credit Policy and evaluation results of point 4 (four).
6. Provide suggestions and corrective steps to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding the matters in point 5 (five).

Authorities

The authority of the Credit Policy Committee regarding the duties and responsibilities of conducting periodic reviews of KPB and other internal provisions related to credit at Bank Banten.

Credit Policy Committee Duties Implementation in 2021

The following are duties implementation of the Credit Policy Committee during 2021:

1. Monitor and evaluate the suitability of applicable internal regulations.
2. Monitor and evaluate the implementation of internal policies.
3. Establish policies/internal provisions related to credit.
4. Provide recommendations regarding updating provisions.
5. Make a report on the implementation of the credit policy committee.

Rapat Komite

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan diselenggarakan di Kantor Pusat Bank atau tempat lain yang disepakati oleh peserta rapat paling kurang 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Selama tahun 2021, Komite Kebijakan Perkreditan telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan pembahasan sebagai berikut:

Committee Meetings

The Credit Policy Committee meetings are held at the Bank's Head Office or other place agreed upon by the meeting participants at least once every six (6) months or as required.

During 2021, the Credit Policy Committee has held 5 (five) meetings with the following discussions:

No.	Tanggal / Date	Pembahasan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan / Meeting Discussion of Credit Policy Committee
1	31 Maret 2021 / 31 March 2021	Pengesahan Perubahan Ketentuan: / Endorsement of Changes to Terms a. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit / Credit Rescue and Settlement b. Komite Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit dan Limit Kewenangan Memutus Limit Wewenang Memutus Keringanan/ Penghapusan Tunggal Bunga, Denda, Pinalty, dan Biaya Lainnya Kredit Aktif dan Kredit Hapus Buku dalam Rangka Pelunasan / Credit Restructuring & Settlement Committee and Authority Limits Deciding Authority Limits To cut waivers/Abolition of Arrears Interest, Fines, Pinalty, and Other Expenses Active Loans and Write-Off Loans in Repayment
2	28 Mei 2021 / 28 May 2021	Perubahan Ketentuan Komite Kebijakan Perkreditan / Changes in Credit Policy Committee Provisions
3	22 Juli 2021 / 22 July 2021	Pengesahaan SOP Kredit Modal Kerja Konstruksi / Approval of SOP for Construction Working Capital Credit
4	30 Juli 2021 / 30 July 2021	Pengesahan Perubahan Ketentuan Komite Kredit & BWMK / Ratification of Changes to Credit Committee & BWMK Provisions
5	30 September 2021 / 30 September 2021	Pengesahan Pedoman Kredit Pola Channeling / Approval of Channeling Pattern Credit Guidelines

No.	Jabatan / Position	Jumlah / Total		
		Rapat / Meetings	Hadir / Attendance	% Kehadiran / % Attendance
Anggota Tetap / Permanent Members				
1.	Ketua (Direktur Utama) / Chairman (President Director)	5	5	100
2.	Direktur Bidang / Field Director	5	5	100
3.	Pimpinan Satuan Kerja bidang Operasional terkait Perkreditan / Head of Operations field Work Unit related to Credit	5	5	100
4.	Pimpinan Satuan Kerja Audit Intern / Head of Internal Audit Unit	5	5	100
Anggota Tidak Tetap / Temporary Members				
5.	Direksi lain yang tidak membidangi / Other Directors who are not in charge of the field	5	5	100
6.	Divisi terkait / Related divisions	5	5	100

KOMITE DISIPLIN

Komite Disiplin adalah komite yang berada di bawah Direksi, yang berfungsi melakukan pengkajian ulang dan evaluasi secara bersama serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam penetapan sanksi terhadap pegawai yang terbukti/ terindikasi melakukan tindakan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dan berpotensi dan atau berdampak signifikan merugikan keuangan maupun reputasi Perseroan.

DISCIPLINARY COMMITTEE

The Disciplinary Committee is a Committee under the Board of Directors with the function to conduct a joint review and evaluation as well as provide recommendations to the Board of Directors in determining sanctions against employees who are proven/indicated to commit acts of fraud/violation against applicable provisions that have the potential or significant impact on the Company's financial and reputation.



Struktur Keanggotaan

Komite Disiplin Bank Banten dibentuk berdasarkan SK Direksi Nomor 212/SK/Dir-BB/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang beranggotakan:

Ketua / Chairman	Kepala Divisi Human Capital & Transformasi / Head of Human Capital & Transformation Division
Sekretaris / Secretary	Bagian Human Capital yang membidangi Hubungan Industrial / Human Capital section in the field of Industrial Relationship
Anggota Tetap / Permanent Members	- Kepala Divisi Kepatuhan (<i>Ex-Officio</i>) / Head of Compliance Division (Ex-Officio) - Kepala Divisi Manajemen Risiko (<i>Ex-Officio</i>) / Head of Risk Management Division (Ex-Officio) - Kepala Divisi Audit Intern (<i>Ex-Officio</i>) / Head of Internal Audit Division (Ex-Officio) - Kepala Bagian Hukum (<i>Ex-Officio</i>) / Head of Legal Section (Ex-Officio)
Anggota Tidak Tetap / Non Permanent Members	- Kepala Divisi Terkait / Related Division Head - Area Manager - Kepala Cabang / Kepala Bagian Terkait / Branch Head/Related Section Head - Staf Ahli yang ditunjuk Direksi karena pengetahuan, pengalaman, dan keahliannya, yang diperlukan untuk memberikan pertimbangan. / Expert Staff appointed by the Board of Directors because of their knowledge, experience, and expertise, which are needed to give consideration. - Pimpinan unit kerja terkait dan/atau pihak lain yang mengetahui permasalahannya / Head of the relevant work unit and/or other parties who are familiar with the issues.

Membership Structure

Bank Banten Disciplinary Committee establishment refers to the Decree of the Board of Directors No. 212/SK/Dir-BB/VI/2021 dated 8 June 2021 with the following members:

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Disiplin adalah:

- Melakukan pengkajian ulang dan evaluasi bersama serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam penetapan sanksi terhadap karyawan yang terbukti/terindikasi melakukan tindakan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku yang berpotensi dan/atau berdampak signifikan merugikan keuangan perusahaan maupun reputasi.

Duties & Responsibilities

The Duties and Responsibilities of the Disciplinary Committee are as follows:

- Reviewing and evaluating as well as providing recommendations to the Board of Directors in determining sanctions against employees who are proven/indicated to commit acts of fraud/violation against applicable provisions that have the potential or significant impact on the company's financial and reputation.

Pelaksanaan Tugas Komite Disiplin Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Tim Komite Disiplin telah menindaklanjuti temuan audit dengan melaksanakan agenda pembahasan, pemanggilan serta permintaan klarifikasi karyawan yang terlibat, dan pemberian sanksi, untuk kasus-kasus sebagai berikut:

Duties Implementation of Disciplinary Committee in 2021

Throughout 2021, the Disciplinary Committee team has followed up the audit findings by implementing discussion agenda, summoning and requesting clarification of involved employees, and sanctioned, for the following cases:

No.	Permasalahan / Cases	Divisi/KC/KCP Divisions / Branch Offices/Sub Branch Offices	Status Penyelesaian / Settlement Status
1	Proses Kredit PT Harum Nusantara Makmur / Credit Process of PT Harum Nusantara Makmur	Divisi Kredit / Credit Division	- Karyawan terkait sudah dikenakan sanksi. / The related employee has been penalized - Penyelesaian Kredit on progress / Credit settlement on progress
2	Penyalahgunaan RAB Operasional Divisi Kredit / Misuse of the Credit Division Operational RAB	Divisi Kredit / Credit Division	Karyawan terkait sudah dikenakan sanksi. / The related employees have been penalized.
3	Proses Kredit PT Swarna Syandana Mandiri, CV Banten Inspira Mandiri, dan PT Debitindo Jaya / Credit Process of PT Swarna Syandana Mandiri, CV Banten Inspira Mandiri, and PT Debitindo Jaya	KC Rangkasbitung	Karyawan terkait sudah dikenakan sanksi. / The related employees have been penalized.



No.	Permasalahan / Cases	Divisi/KC/KCP Divisions / Branch Offices/Sub Branch Offices	Status Penyelesaian / Settlement Status
4	Penyalahgunaan Penerbitan Bank Garansi / Misuse of Issuance of Bank Guarantees	KC Rangkasbitung	Karyawan terkait sudah dikenakan sanksi PHK dan dalam proses hukum. / The related employees have been penalized by layoffs and is in the legal process.
5	Permasalahan proses pelunasan kredit / Problems with the credit repayment process	KC Surabaya	Karyawan terkait sudah dikenakan sanksi. / The related employees have been penalized.

Rapat Komite

Selama tahun 2021, Komite Disiplin telah dua puluh (20) kali pertemuan dengan lima (5) agenda pembahasan yang terkait dengan tindakan kedisiplinan.

Berikut kehadiran rapat Komite:

Committee Meetings

During 2021, the Disciplinary Committee has held twenty (20) meetings with five (5) discussion agenda related with disciplinary actions.

The following are the Committee meeting attendance:

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Hadir / Total Attendance	% Kehadiran / % Attendance
1	Dindin Rusdiana	Kadiv Umum & SDM / Head of General & Human Resources Division	8	8	100%
2	Aef Setiawan	Kabag SDM / Head of Human Resources Section	8	8	100%
3	Kalmet Nehru	Kadiv Internal Audit & Kepatuhan / Head of Internal Audit & Compliance Division	8	8	100%
4	Feddy Febriansyah	Kadiv Manajemen Risiko / Head of Risk Management Division	8	7	90%
5	Muhamad Gibran	Kabag Hukum / Head of Law Section	8	7	90%
6	Rudi Hendrawan	Kadiv Kepatuhan / Head of Compliance Division	8	7	90%
7	Dida Herdiyana	Kadiv HCT / Head of HCT Division	10	10	100%
8	David Aryanto D.S	Kabag Hukum / Head of Legal Section	12	12	100%
9	Herliana	Kadiv Manajemen Risiko / Head of Risk Management Division	12	12	100%
10	Agus Junaedi	Kadiv Internal Audit / Head of Internal Audit Division	12	12	100%
11	Hufon Hendriyanto	Kadiv HCT / Head of HCT Division	2	2	100%

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan dan komunikasi korporat dalam rangka meningkatkan reputasi Perseroan. Sekretaris Perusahaan juga berperan sebagai penghubung antara organ Perusahaan dengan pihak eksternal termasuk lembaga pemerintah dan nonpemerintah, pemegang saham, serta pelaku pasar modal lainnya. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga bertanggungjawab menjaga citra baik Perseroan di mata para Pemangku Kepentingan secara luas.

Fungsi Sekretaris Perusahaan Perseroan dipegang secara perorangan oleh seorang Sekretaris Perusahaan yang mengepalai unit kerja Divisi Sekretariat Perusahaan dan Hukum, dan berada di bawah supervisi langsung Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan memiliki posisi yang strategis untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan dan komunikasi korporat dalam rangka meningkatkan reputasi Perseroan.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary has a strategic role in the implementation of corporate governance and corporate communications to enhance the Company's reputation. The Corporate Secretary also serves as a liaison between the company's organ with the external parties including government and non-government institutions, shareholders, as well as other capital market communities. Moreover, the Corporate Secretary is responsible to strive in maintaining good image of Company to all stakeholders extensively.

The Company Corporate Secretary functions is individually held by a Corporate Secretary that led the Corporate Secretariat Division unit and under direct supervision of the President Director. The Corporate Secretary has a strategic position to the corporate governance implementation and corporate communication in improving the Company's reputation.

Dasar Pembentukan

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan antara lain mengacu pada:

1. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/ POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik;
3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Perseroan dijabat oleh David Aryanto Dwi Saputro berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: Nomor: 0388/SK/DIR-BB/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021. Penunjukkan telah dilaporkan ke OJK dan Bursa Efek Indonesia dan dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Bank Banten (www.bankbanten.co.id).

Basis of Establishment

The establishment, appointment, and functions implementation of the Corporate Secretary refer to:

1. Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
2. Regulation of the Financial Services Authority No. 35/ POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.
3. Board of Directors Decree of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 on the Amendment of Regulation No. I-A Concerning the Share Listing and Equity Securities Issued by Listed Companies.

Profile of Corporate Secretary

The Company's Corporate Secretary is held by David Aryanto Dwi Saputro based on the Decree of the Board of Directors Number: 0388/SK/DIR-BB/VII/2021 dated 26 July 2021. The appointment has been reported to the OJK and the Indonesia Stock Exchange and published on the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id) and the Bank Banten website (www.bankbanten.co.id).



99

Meraiah gelar Sarjana Hukum di Universitas Pasundan pada tahun 2000. Mengawali karier di bidang perbankan pada tahun 2001. Selanjutnya menjadi Asisten (2006-2010) di BJB, lalu menjadi Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Indramayu pada tahun 2011 BJB, lalu Manajer di Divisi Kepatuhan dan Hukum BJB, kemudian Manajer di Divisi Hukum BJB pada tahun 2013.

Semenjak Januari 2014, menjadi Manajer di Bank BJB, kemudian sejak Januari 2016 menjadi Pemimpin Grup Litigasi BJB. Lalu pada Januari 2016 menjadi Pemimpin Grup Litigasi Pidana BJB dan dilanjutkan dengan posisi Pemimpin Grup Pengembangan Produk pada Januari 2017 BJB. Pada Januari 2018 bergabung dengan perseroan sebagai Kepala Bagian Hukum dan kemudian menjadi Pimpinan Kantor Cabang Sangaji. Pada Juli 2021 beliau diangkat dan resmi menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Bank Banten.

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang tetapi tidak terbatas meliputi:

Indonesian citizen, 45 years old. He earned a Bachelor of Laws degree at Pasundan University in 2000. Started his career in banking in 2001. Then he became Assistant (2006-2010) at BJB, then became Head of Indramayu Sub-Branch Office in 2011 BJB, then Manager in the Compliance and Legal Division of BJB, then Manager in the Legal Division of BJB in 2013.

Since January 2014, he has been a Manager at Bank BJB, then since January 2016 has been the Leader of the BJB Litigation Group. Then in January 2016 he became the Head of the BJB Criminal Litigation Group and continued with the position of Product Development Group Leader in January 2017 BJB. In January 2018 he joined the Company as Head of the Legal Division and later became the Head of the Sangaji Branch Office. In July 2021 he was appointed and officially served as Corporate Secretary of Bank Banten.

Corporate Secretary Functions and Duties

Referring to Article 5 of the Financial Services Authority Regulation No.35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the function of the Corporate Secretary is to carry out duties at least but not limited to include:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web;
 - b. Penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung dengan Pemegang Saham, OJK, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

1. Keeping abreast of capital market developments, especially the prevailing laws and regulations in the capital market sector;
2. Provide input to the Board of Directors and the Board of Commissioners to comply with the provisions of the laws and regulations in the capital market sector;
3. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of corporate governance which includes:
 - a. Information disclosure to the public, including the availability of information on the website;
 - b. Timely submission of reports to the Financial Services Authority;
 - c. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders;
 - d. Organizing and documenting the Meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners; and
 - e. Implementation of an orientation program towards the Company for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
4. As a liaison with shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders.

Aktivitas dan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2021

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya antara lain:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka
 - a. Melaksanakan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara elektronik melalui sistem Pelaporan Elektronik dan IDX net maupun non elektronik, termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai Perusahaan Terbuka yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretariat Perusahaan, meliputi:

Implementation and Activities of Corporate Secretary Duties in 2021

In line with the Financial Services Authority Regulations, Company Corporate Secretary has a Policy and Guidelines Standard as the Corporate Secretary platform in implementing its functions and duties, among others:

1. Bank Activity as Listed Company:
 - a. Carry out electronic disclosure to the public through Electronic Reporting System and IDXnet as well as non-electronic, including reporting to the Regulators in relations with the Bank status as a public company that becomes the authority of the Corporate Secretariat unit, covering:

Keterangan / Description	
JANUARI / January	
7	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan Periode 31 Desember 2020 / Monthly Report on the Registration of the Company's Securities Holders for the Period of December 31, 2020
22	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim Periode 30 Juni 2020 (Audited) / Submission of Proof of Advertising Information on Interim Financial Statements for the Period of June 30, 2020 (Audited)
25	Penyampaian Mata Acara RUPS Luar Biasa Perseroan / Submission of the Company's Extraordinary GMS Agenda
28	Penyampaian Koreksi atas Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan Periode 31 Desember 2020 / Submission of Corrections to the Company's Securities Holder Registration Monthly Report for the Period of December 31, 2020



Keterangan / Description

FEBRUARI / February

- | | |
|----|---|
| 1 | Pengumuman RUPS Luar Biasa / Announcement of Extraordinary GMS |
| 4 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan Periode 31 Januari 2021 / Monthly Report of Company's Securities Holder Registration Period January 31, 2021 |
| 16 | Penyampaian Perubahan Mata Acara RUPS Luar Biasa Perseroan / Submission of Changes to the Agenda of the Company's Extraordinary GMS |
| | Pemanggilan RUPS Luar Biasa Perseroan / Invitation to the Company's Extraordinary GMS |

MARET / March

- | | |
|----|--|
| 5 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan Periode 28 Februari 2021 / Monthly Report on the Registration of the Company's Securities Holders for the Period of February 28, 2021 |
| 12 | Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Perseroan / Submission of the Summary of Minutes of the Extraordinary GMS of the Company |
| 15 | Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Luar Biasa Perseroan / Submission of Proof of Advertising Results of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders |

APRIL

- | | |
|----|---|
| 6 | Penyampaian Mata Acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan / Submission of the Company's Annual GMS and Extraordinary GMS |
| 8 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan Periode 31 Maret 2021 (Unaudited) / Monthly Report of Company's Securities Holder Registration Period March 31, 2021 (Unaudited) |
| 12 | Penyampaian Risalah RUPS Luar Biasa Perseroan / Submission of Minutes of the Company's Extraordinary GMS |
| 13 | Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan / Announcement of the Company's Annual GMS and Extraordinary GMS |
| 15 | Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan Periode 31 Desember 2020 (Audited) / Submission of Proof of Advertising Information on Annual Financial Statements for the Period of December 31, 2020 (Audited) |
| 28 | Penyampaian Perubahan Mata Acara RUPS Tahunan Perseroan / Submission of Changes in the Company's Annual GMS Agenda |
| | Laporan Informasi atau Fakta Material Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan / Report of Information or Material Facts Invitation to the Company's Annual GMS and Extraordinary GMS |
| | Penyampaian Laporan Tahunan Tahun 2020 / Submission of the 2020 Annual Report |

MEI / May

- | | |
|----|---|
| 3 | Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan atas efektifnya pengangkatan Bpk.Hasanuddin sebagai Komisaris Utama Independen, Bpk.Agus Syabarrudin sebagai Direktur Utama dan Bpk. Cendria Tj Tasdik sebagai Direktur Bisnis / Material Information or Facts Report of Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the Company for the effective appointment of Mr. Hasanuddin as Independent President Commissioner, Mr. Agus Syabarrudin as President Director and Mr. Cendria Tj Tasdik as Business Director |
| 7 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 30 April 2021 / Monthly Report of Securities Holder Registration As of April 30, 2021 |
| 21 | Laporan informasi atau Fakta Material Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan atas efektifnya pengangkatan Bpk.M.Yusuf sebagai Komisaris dan Bpk.Denny Sorimulia Karim sebagai Direktur Operasional dan Transformasi / Information reports or material facts on changes in the composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the Company for the effective appointment of Mr. M. Yusuf as Commissioner and Mr. Denny Sorimulia Karim as Director of Operations and Transformation |
| | Laporan Informasi atau Fakta Material Ringkasan Hasil RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan / Material Information or Facts Report Summary of Results of the Company's Annual GMS and Extraordinary GMS |
| 24 | Laporan Informasi atau Fakta Material Pengumuman Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan / Material Information or Facts Report Announcement of Minutes of the Company's Annual GMS and Extraordinary GMS |
| 25 | Perubahan susunan Anggota Komite Audit Perseroan / Changes in the composition of the Company's Audit Committee Members |
| 28 | Perubahan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan / Changes in the composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee |
| 31 | Penyampaian Laporan Berkelanjutan Tahun 2020 / Submission of the 2020 Sustainability Report |

Keterangan / Description	
JUNI / June	
3	Perubahan <i>Corporate Secretary</i> Perseroan / Changes to the Company's Corporate Secretary
4	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 31 Mei 2021 / Monthly Report of Securities Holder Registration As of May 31, 2021
21	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan / Material Information or Facts Report Submission of Minutes of the Company's Annual GMS and Extraordinary GMS
JULI / July	
6	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 Juni 2021 / Monthly Report of Securities Holder Registration as of June 30, 2021
13	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (PUT) VI Perseroan / Report on the Use of Proceeds from the Company's Public Offering (PUT) VI
27	Perubahan <i>Corporate Secretary</i> Perseroan / Changes to the Company's Corporate Secretary
AGUSTUS / August	
2	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim Periode 30 Juni 2021 (<i>Unaudited</i>) / Submission of Proof of Advertising Information on Interim Financial Statements for the Period of June 30, 2021 (<i>Unaudited</i>)
9	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 31 Juli 2021 / Monthly Report of Securities Holder Registration As of July 31, 2021
12	Perubahan Susunan Anggota Internal Audit Perseroan / Changes in the Composition of the Company's Internal Audit Members
	Perubahan Susunan Komite Audit Perseroan / Changes in the Composition of the Company's Audit Committee
13	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa / Explanation of Mass Media Coverage
20	Laporan Informasi atau Fakta Material Prospektus Ringkas PMHMETD VII Perseroan / Material Information or Facts Report of the Company's PMHMETD VII Abridged Prospectus
SEPTEMBER	
6	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Agustus 2021 / Monthly Report of Securities Holder Registration as of August 31, 2021
OKTOBER / October	
4	Laporan Informasi atau Fakta Material Prospektus Ringkas PMHMETD VII Perseroan - Informasi tambahan dan/ atau Perbaikan / Material Information or Facts Report of the Company's PMHMETD VII Condensed Prospectus - Additional and/ or Improvement Information
5	Laporan Informasi atau Fakta Material Jadwal PMHMETD VII Perseroan / Material Information or Facts Report of the Company's PMHMETD VII Schedule
	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 30 September 2021 / Monthly Report of Securities Holder Registration As of September 30, 2021
6	Penyampaian Bukti Iklan Prospektus Ringkas PMHMETD VII Perseroan - Informasi Tambahan dan/ atau Perbaikan / Submission of Proof of the Company's PMHMETD VII Condensed Prospectus - Additional Information and/or Improvements
29	Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan Susunan Anggota Direksi atas efektifnya pengangkatan Bpk. Kemal Idris sebagai Direktur Kepatuhan / Report of Information or Material Facts on Changes in the Composition of Members of the Board of Directors on the effectiveness of the appointment of Mr. Kemal Idris as Director of Compliance
NOVEMBER	
2	Penyampaian Prospektus PMHMETD VII Perseroan / Submission of the Company's PMHMETD VII Prospectus
	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim Periode 30 September 2021 (<i>Unaudited</i>) / Submission of Proof of Advertising Information on Interim Financial Statements for the Period of September 30, 2021 (<i>Unaudited</i>)
3	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 31 Oktober 2021 / Monthly Report of Securities Holder Registration As of October 31, 2021
DESEMBER / December	
3	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 30 November 2021 / Monthly Report of Securities Holder Registration As of November 30, 2021
9	Perubahan Internal Audit Perseroan / Changes in the Company's Internal Audit
10	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan Tahun 2021 / 2021 Annual Public Expose Plan
21	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan Tahun 2021 / Submission of 2021 Annual Public Expose Material
29	Laporan Hasil Public Expose Tahunan Tahun 2021 / 2021 Annual Public Expose Results Report



- b. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Luar Biasa dan *Public Expose* selama tahun 2021, meliputi;

- b. Organizing and documenting the Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders and Public Expose during 2021, including.

No.	Agenda / Agenda	Tanggal / Date
1.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa / Extraordinary General Meeting of Shareholders	10 Maret 2021 / 10 March 2021
2.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / Annual General Meeting of Shareholders	20 Mei 2021 / 20 May 2021
3.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa / Extraordinary General Meeting of Shareholders	20 Mei 2021 / 20 May 2021
4.	<i>Public Expose</i> Tahunan / Annual Public Expose	24 Desember 2021 / 24 December 2021

- c. Menyelenggarakan Aksi Korporasi Perseroan, yaitu Penawaran Umum Terbatas VII serta melakukan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan aksi korporasi tersebut.
- d. Menyusun Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 serta menyampaikannya kepada Regulator terkait.
- e. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

- c. Organizing the Company's Corporate Action, namely Limited Public Offering VII and conducting information disclosure related to the corporate action.
- d. Prepare the 2021 Fiscal Year Annual Report and submit it to the relevant Regulators.
- e. Carry out the Bank's compliance function with regulations in the capital market sector.

2. Aktivitas Komunikasi Korporasi

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi komunikasi korporasi;
- b. Melakukan aktivitas komunikasi yang bersifat korporasi kepada Pemangku Kepentingan internal maupun eksternal korporasi antara lain:
- Melaksanakan pemberitaan dan iklan di media massa termasuk media daring .Perseroan mengeluarkan Siaran Pers untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang dijalankan, baik yang terkait dengan kinerja Bank maupun kegiatan lainnya meliputi:

2. Corporate Communications Activities

- a. Establish corporate communication policies and strategies;
- b. Conducting corporate communication activities to the internal and external stakeholders of the Corporation, among others:
- Carry out news and advertisements in the mass media including online media. The Company issues a Press Release to inform various activities carried out, both those related to the Bank's performance or other activities including:

Daftar Siaran Pers Bank Banten Sepanjang 2021

List of Bank Banten Press Releases Throughout 2021

No.	Tanggal / Date	Judul Siaran Pers / Title of Press Release
1	3 Maret 2021 / 3 March 2021	Bank Banten Raih Penghargaan Indonesia <i>Best BUMD Award</i> 2021 / Bank Banten Wins Indonesia Best BUMD Award 2021
2	10 Maret 2021 / 10 March 2021	Bank Banten Tetapkan Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Baru / Bank Banten Appoints New Board of Commissioners and Directors
3	29 Maret 2021 / 29 March 2021	Bank Banten Siap Bangun Kembali Kepercayaan dan Raih Kejayaan / Bank Banten Ready to Rebuild Trust and Achieve Success
4	30 Maret 2021 / 30 March 2021	Tingkatkan Kepercayaan, Bank Banten Rangkul BRI / Increase Trust, Bank Banten Embraces BRI
5	8 April 2021 / 8 April 2021	Tingkatkan Penerapan GCG dan Manajemen Risiko, Bank Banten Implementasikan PSAK 71 / Improving the Implementation of GCG and Risk Management, Bank Banten Implements PSAK 71
6	9 April 2021 / 9 April 2021	Bank Banten Canangkan Transformasi Budaya Perusahaan dan Raih Penghargaan dari <i>Economic Review</i> / Bank Banten Launches Corporate Culture Transformation and Wins Award from Economic Review

Daftar Siaran Pers Bank Banten Sepanjang 2021
List of Bank Banten Press Releases Throughout 2021

No.	Tanggal / Date	Judul Siaran Pers / Title of Press Release
7	21 April 2021 / 21 April 2021	BRI dan Bank Banten Perkuat Sinergi dan Kerjasama Strategi / BRI and Bank Banten Strengthen Synergy and Strategic Cooperation
8	29 April 2021 / 29 April 2021	Memaknai <i>Nuzulul Quran</i> , Bank Banten Berbagi Kebajikan / Interpreting Nuzulul Quran, Bank Banten Shares Kindness
9	30 April 2021 / 30 April 2021	OJK Restui Agus Syabarrudin Menjadi Direktur Utama Bank Banten / OJK approves Agus Syabarrudin as President Director of Bank Banten
10	5 Mei 2021 / 5 May 2021	Gubernur Banten Dukung Penuh Manajemen Baru Bank Banten Untuk Melakukan Transformasi dan Pencapaian Kinerja Terbaik / The Governor of Banten Fully Supports the New Management of Bank Banten to Transform and Achieve the Best Performance
11	7 Mei 2021 / 7 May 2021	Dinyatakan Sehat oleh OJK, Bank Banten Kuat dan Siap Jadi Jawara / Declared Healthy by OJK, Bank Banten is Strong and Ready to Become a Champion
12	11 Mei 2021 / 11 May 2021	Bank Banten Tebar Berkah Ramadan / Bank Banten Spreads Ramadan Blessings
13	19 Mei 2021 / 19 May 2021	Sambut Pengelolaan RKUD Provinsi Banten, Bank Banten Layani Aktivasi Rekening ASN Banten / Welcoming Banten Province RKUD Management, Banten Bank Serves Banten ASN Account Activation
14	19 Mei 2021 / 19 May 2021	Jadi Narasumber di Untirta dan UIN Syarif Hidayatullah, Dirut Bank Banten Dorong Digitalisasi Perbankan / Become a Resource Person at Untirta and UIN Syarif Hidayatullah, Managing Director of Bank Banten Encourages Banking Digitalization
15	19 Mei 2021 / 19 May 2021	Dorong Transformasi Budaya Perusahaan, Bank Banten Luncurkan "TRUST" / Encouraging Corporate Culture Transformation, Bank Banten Launches "TRUST"
16	28 Mei 2021 / 28 May 2021	Raih Kembali Kepercayaan, Bank Banten Kelola RKUD Provinsi Banten / Regaining Trust, Bank Banten Manages RKUD Banten Province
17	1 Juni 2021 / 1 June 2021	Jadi Jawara, Nilai Transaksi Saham Bank Banten (BEKS) Menggeliat / Become a Champion, the Transaction Value of Bank Banten (BEKS) Shares Stretches
18	1 Juni 2021 / 1 June 2021	Perkuat Ekosistem Keuangan Daerah, Bank Banten Jalin Kerja Sama dengan Bapenda Provinsi Banten / Strengthening Regional Financial Ecosystem, Bank Banten Establishes Cooperation with Bapenda Banten Province
19	2 Juni 2021 / 2 June 2021	Komitmen jalankan prinsip GCG, Bank Banten Raih Penghargaan IICD / Commitment to implementing GCG principles, Bank Banten Wins IICD Award
20	2 Juni 2021 / 2 June 2021	Jadi Jawara, Nilai Transaksi Saham Bank Banten (BEKS) Menggeliat / Become a Champion, the Transaction Value of Bank Banten (BEKS) Shares Stretches
21	2 Juni 2021 / 2 June 2021	Agus Syabarrudin Optimis Bank Banten Akan Cetak PAD Bagi Provinsi Banten / Agus Syabarrudin Is Optimistic Bank Banten Will Print PAD for Banten Province
22	3 Juni 2021 / 3 June 2021	Bank Banten Raih Penghargaan di Ajang <i>Infobank Digital Brand Award 2021</i> / Bank Banten Wins Award at Infobank Digital Brand Award 2021
23	8 Juni 2021 / 8 June 2021	Perkuat Ekosistem Keuangan Daerah, Bank Banten Gandeng Petani dan Nelayan / Strengthening Regional Financial Ecosystem, Bank Banten Collaborates with Farmers and Fishermen
24	10 Juni 2021 / 10 June 2021	Bank Banten Pastikan Terus Tingkatkan Pelayanan / Bank Banten Ensures Continue to Improve Services
25	11 Juni 2021 / 11 June 2021	Bank Banten Raih <i>Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award 2021</i> / Bank Banten Wins Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award 2021
26	23 Juni 2021 / 23 June 2021	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, Bank Banten Tandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Banten / Optimizing Regional Tax Revenue, Bank Banten Signs a Cooperation Agreement with the Banten Province Samsat Development Team
27	29 Juni 2021 / 29 June 2021	Targetkan 200 Ribu Peserta, Bank Banten Dukung Program Vaksinasi COVID-19 di Provinsi Banten / Targeting 200 Thousand Participants, Bank Banten Supports COVID-19 Vaccination Program in Banten Province
28	2 Juli 2021 / 2 July 2021	Dukung PPKM Darurat, Bank Banten Lakukan Penyesuaian Jam Layanan / Support Emergency PPKM, Bank Banten Adjusts Service Hours
29	16 Juli 2021 / 16 July 2021	Bank Banten Pacu Digitalisasi dan Perluas Kemitraan / Bank Banten Stimulates Digitalization and Expands Partnership
30	19 Juli 2021 / 19 July 2021	<i>Kick Off HUT Ke-5</i> , Bank Banten Usung Tema 'Transformasi Bersama Membangun Banten' / 5 th Anniversary Kick Off, Bank Banten Brings the Theme 'Together Transformation to Build Banten'



Daftar Siaran Pers Bank Banten Sepanjang 2021

List of Bank Banten Press Releases Throughout 2021

No.	Tanggal / Date	Judul Siaran Pers / Title of Press Release
31	19 Juli 2021 / 19 July 2021	Idul Adha, Bank Banten Salurkan Qurban ke Masjid Banten Lama / Eid al-Adha, Bank Banten Distributes Qurban to the Old Banten Mosque
32	22 Juli 2021 / 22 July 2021	Temui Walikota Serang, Dirut Bank Banten Bahas Rencana Kerjasama dengan Pemerintah Kota Serang / Meeting with the Mayor of Serang, Managing Director of Bank Banten to Discuss the Plan of Cooperation with the Serang City Government
33	26 Juli 2021 / 26 July 2021	Temui Mulyadi Jayabaya dan Sekda Kabupaten Lebak, Dirut Bank Banten Tawarkan Kerjasama Penguatan Permodalan Perseroan / Meeting with Mulyadi Jayabaya and the Secretary of the Lebak Regency, the Managing Director of Bank Banten Offers Cooperation to Strengthen the Company's Capital
34	27 Juli 2021 / 27 July 2021	Ketua DPRD Kota Serang Dukung Peralihan Kasda Kota Serang ke Bank Banten / Serang City DPRD Chair Supports the Transition of Serang City Kasda to Bank Banten
35	28 Juli 2021 / 28 July 2021	Bank Banten Tumbuh Moncer, <i>Buyback</i> Piutang PNS Rp 557 Miliar dari BJB / Bank Banten Grows Smoothly, Buyback of Receivables for Civil Servants of Rp557 Billion from BJB
36	29 Juli 2021 / 29 July 2021	Gempita HUT Kelima Bank Banten, Gelorakan Transformasi dan Digitalisasi Perusahaan / Excitement for the Fifth Anniversary of Bank Banten, Encouraging Company Transformation and Digitalization
37	5 Agustus 2021 / 5 August 2021	Dorong Perpindahan RKUD, Dirut Bank Banten Temui Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan / Pushing for RKUD Shift, Managing Director of Bank Banten Meets with the Chairman of the DPRD of South Tangerang City
38	9 Agustus 2021 / 9 August 2021	Bidik Sinergitas, Dirut Bank Banten Temui Dirut Bank BJB / Aim for Synergy, Managing Director of Bank Banten Meets Managing Director of Bank BJB
39	12 Agustus 2021 / 12 August 2021	Digitalisasi Dorong Saham BEKS To The Moon / Digitalization Drives BEKS Stocks To The Moon
40	14 Agustus 2021 / 14 August 2021	Bank Banten Catat Kenaikan Pendapatan 262% hingga Agustus 2021 / Bank Banten Recorded 262% Revenue Increase Until August 2021
41	16 Agustus 2021 / 16 August 2021	Bank Banten Lakukan Pengembangan Layanan Transaksi Digital / Bank Banten Develops Digital Transaction Services
42	18 Agustus 2021 / 18 August 2021	Bank Banten Sambut Baik Rencana Pemindahan RKUD Kota Serang ke Bank Banten / Bank Banten Welcomes the Plan to Move RKUD Serang City to Bank Banten
43	17 September 2021 / 17 September 2021	Gandeng FDS, Bank Banten Tingkatkan Kualitas Layanan / Cooperating with FDS, Bank Banten Improves Service Quality
44	24 Agustus 2021 / 24 August 2021	Bersiap Terbitkan 23 Miliar Saham Baru, Bank Banten Kejar Target Meraih Laba / Preparing to Issue 23 Billion New Shares, Bank Banten Pursues Profit Target
45	31 Agustus 2021 / 31 August 2021	Bank Banten Apresiasi Perhatian Perkumpulan Urang Banten Terhadap Performa Perusahaan / Bank Banten Appreciates Urang Banten Association's Attention to Company Performance
46	26 Agustus 2021 / 16 August 2021	Bank Banten Teken MoU Dengan Kejaksaan Tinggi Banten / Bank Banten Signs MoU with Banten High Prosecutor
47	3 September 2021 / 3 September 2021	Tingkatkan Layanan Kepada Pensiunan, Bank Banten Teken MoU Dengan Taspen / Improving Services for Retirees, Bank Banten Signs MoU With Taspen
48	13 September 2021 / 13 September 2021	Bank Banten Kucurkan Rp100 Juta Dukung Atlet Banten Berlaga di PON XX Papua / Bank Banten Disburses IDR 100 Million to Support Banten Athletes Competing in XX Papua PON
49	13 September 2021 / 13 September 2021	Catat Kenaikan Aset Hingga 28,11%, Dirut Bank Banten Optimis Segera Laba / Records Increase in Assets of Up to 28.11%, President Director of Bank Banten Optimistic of Profit Soon
50	27 September 2021 / 27 September 2021	Romansa CLBK, Bukti Cinta Bank Banten kepada Nasabah Setia / CLBK Romance, Proof of Bank Banten's Love for Loyal Customers
51	27 September 2021 / 27 September 2021	Bank Banten Apresiasi Rencana Pemisahan Perseroan dari Banten Global Development / Bank Banten Appreciates the Plan to Separate the Company from Banten Global Development
52	30 September 2021 / 30 September 2021	Pandu Sjahrir Sambut Positif Rencana Digitalisasi Bank Banten / Pandu Sjahrir Welcomes Bank Banten's Digitalization Plan Positively
53	4 Oktober 2021 / 4 October 2021	Implementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berbasis ISO 37001, Bank Banten Berupaya Tingkatkan Aspek GCG / Implementing Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001, Bank Banten Efforts to Improve GCG Aspects
54	7 Oktober 2021 / 7 October 2021	Bank Banten (BEKS) Tetapkan Harga <i>Rights Issue</i> Rp77 per Saham / Bank Banten (BEKS) Sets Rights Issue Price of Rp77 per Share
55	11 Oktober 2021 / 11 October 2021	Bank Banten Tandatangani Kerjasama dengan Asuransi Reliance Indonesia / Bank Banten Signs Cooperation with Asuransi Reliance Indonesia

Daftar Siaran Pers Bank Banten Sepanjang 2021
List of Bank Banten Press Releases Throughout 2021

No.	Tanggal / Date	Judul Siaran Pers / Title of Press Release
56	18 Oktober 2021 / 18 October 2021	Wahidin Halim Dukung Penuh <i>Rights Issue</i> Bank Banten / Wahidin Halim Fully Supports the Rights Issue of Bank Banten
57	22 Oktober 2021 / 22 October 2021	Dukung Bulan Inklusi Keuangan, Bank Banten Hadirkan ATM Bagi Warga Baduy / Supporting Financial Inclusion Month, Bank Banten Presents ATMs for Baduy residents
58	26 Oktober 2021 / 26 October 2021	<i>Rights Issue</i> Bank Banten Raih Rp618 Miliar / Bank Banten Rights Issue Reaches Rp618 Billion
59	2 November 2021 / 2 November 2021	Pemprov Banten Apresiasi Peningkatan Performa Bank Banten, Aset Naik Rp1,5T / Banten Provincial Government Appreciates Bank Banten Performance Improvement, Assets Increase by Rp1.5T
60	4 November 2021 / 4 November 2021	Tingkatkan Layanan, Bank Banten Resmi Operasikan KCP Kramatwatu / Improve Services, Bank Banten Officially Operates KCP Kramatwatu
61	5 November 2021 / 5 November 2021	Dana Pihak Ketiga tumbuh Rp1,19 triliun, Gubernur Banten Komitmen Majukan Bank Banten / Third Party Funds grew by Rp1.19 trillion, Banten Governor Committed to Advance Bank Banten
62	16 November 2021 / 16 November 2021	Tingkatkan Layanan di Tangerang Raya, Bank Banten Resmikan KCP Duta Indah Iconic / Improving Services in Greater Tangerang, Bank Banten Inaugurates KCP Duta Indah Iconic
63	21 November 2021 / 21 November 2021	Dirut Bank Banten Paparkan Konsep Ekonomi Kerakyatan Syariah di ITB Ahmad Dahlan / President Director of Bank Banten Explains the Concept of Islamic People's Economy at ITB Ahmad Dahlan
64	22 November 2021 / 22 November 2021	Dispenda Banten dan Bank Banten Luncurkan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart dan Indomart / Dispenda Banten and Bank Banten Launch Motor Vehicle Tax Service at Alfamart and Indomart
65	25 November 2021 / 25 November 2021	Dipercaya Kelola Pendapatan Daerah Banten Rp13T, Bank Banten Nantikan Dukungan Kabupaten/ Kota di Banten / Trusted to Manage Banten Regional Revenue of Rp13T, Bank Banten Expects Regency/City Support in Banten
66	27 November 2021 / 27 November 2021	Edukasi Bank Banten Bangun Sinergitas Perbankan dan Ekonomi Kewirausahaan Bagi Santripreneur dan Masyarakat / Bank Banten Education Builds Banking Synergy and Entrepreneurship Economy for Santripreneurs and Society
67	29 November 2021 / 29 November 2021	Kian Dekat Dengan Masyarakat, Bank Banten <i>Buka Payment Point</i> di Kantor Perumda Tirta Benteng Cipondoh / Closer to the Community, Bank Banten Opens a Payment Point at the Office of Perumda Tirta Benteng Cipondoh
68	2 Desember 2021 / 2 December 2021	Dukungan Pemerintah Daerah Dorong Bank Banten Raih Peringkat Nasional A dari <i>Fitch Ratings</i> / Local Government Support Pushes Bank Banten to Achieve National A Rating from Fitch Ratings
69	6 Desember 2021 / 6 December 2021	Kian Mesra Dengan Pemkot Tangsel, Bank Banten Dukung Turnamen Golf Tangsel Open 2021 / More Friendly with Tangsel City Government, Bank Banten Supports Tangsel Open Golf Tournament 2021
70	9 Desember 2021 / 9 December 2021	Bank Banten Mulai Lakukan Penyaluran Jamsosratu dari Pemprov Banten / Bank Banten Starts Distributing Jamsosratu from the Banten Provincial Government
71	13 Desember 2021 / 13 December 2021	Peningkatan Performa Bank Banten Dorong DPRD Banten Persiapkan Perda Ekosistem Keuangan Daerah / Performance Improvement of Bank Banten Encourages DPRD Banten to Prepare Regional Regulation on Regional Financial Ecosystem
72	15 Desember 2021 / 15 December 2021	Jadi Ketua IKALUIN Banten, Dirut Bank Banten Siap Jadikan Alumni UIN Mitra Strategis / Becoming Head of IKALUIN Banten, the President Director of Bank Banten Is Ready to Make UIN Alumni Strategic Partners
73	21 Desember 2021 / 21 December 2021	Bersama Hebitren, Bank Banten Siap Dukung Pesantren / Together with Hebitren, Bank Banten is Ready to Support Islamic Boarding Schools
74	22 Desember 2021 / 22 December 2021	Tandatangan MoU, Bupati Lebak Dukung Upaya Akselerasi Bisnis Bank Banten / Signing MoU, Lebak Regent Supports Bank Banten Business Acceleration Efforts
75	24 Desember 2021 / 24 December 2021	Aset Tumbuh 35,78 dan Kredit Tumbuh 27,5%, Bank Banten Targetkan <i>Hyper Growth</i> di Tahun 2022 / Assets Grow 35.78 and Loans Grow 27.5%, Bank Banten Targets Hyper Growth in 2022
76	28 Desember 2021 / 28 December 2021	Terima Kunjungan Komisi III DPRD Banten, Dirut Bank Banten Paparkan Konsep Ekosistem Ekonomi Daerah Banten / Received a Visit from Commission III DPRD Banten, President Director of Bank Banten Explains the Concept of the Banten Regional Economic Ecosystem
77	30 Desember 2021 / 30 December 2021	Jaro Saija Jadi Nasabah, Dirut Bank Banten Optimis Bisa Kian Melayani Kebutuhan Warga Baduy Luar / Jaro Saija Becomes a Customer, President Director of Bank Banten Optimistic That He Can Serve the Needs of the Outer Baduy Residents
78	31 Desember 2021 / 31 December 2021	Tutup Tahun 2021, Dirut Bank Banten Raih Penghargaan dari PWI Banten / Near the Closing of 2021, the President Director of Bank Banten Receives an Award from PWI Banten



- Melaksanakan tindakan antisipatif dan korektif atas setiap pemberitaan dan iklan di media massa termasuk media *online*.
 - Mendukung unit-unit kerja terkait dalam penyelesaian keluhan nasabah.
 - Melaksanakan pengelolaan website Bank bersama-sama dengan Unit Kerja terkait.
 - Melaksanakan fungsi pengelolaan risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko reputasi.
- c. Mengadakan dan melaksanakan kegiatan tertentu (*event, acara, sponsorship*) sebagai pelaksanaan strategi komunikasi yang bersifat korporasi serta pengelolaan reputasi atau risiko reputasi.

3. Aktivitas Kesekretariatan dan Protokol

Sepanjang tahun 2021, kegiatan Kesekretariatan dan Protokol adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi fungsi pelaksanaan rapat Direksi, termasuk melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak yang diperlukan dalam kehadirannya untuk memastikan kesiapan informasi/data/agenda rapat yang akan digunakan pada Rapat Direksi atau Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan kelancaran penyelenggaraan rapat tersebut serta tindak lanjut yang diperlukan oleh Unit Kerja atau pihak terkait lainnya;
- b. Mengkoordinasi fungsi penyiapan dan mengikuti pelaksanaan rapat Direksi maupun rapat koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris, membantu Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan dalam bertindak sebagai notulis serta menata kerjakan notulen dan memberitahukan hasil rapat ke Unit Kerja terkait sesuai kepentingannya, termasuk dalam rangka persiapan RUPS/RUPSLB untuk memastikan rapat Direksi maupun rapat koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris serta RUPS/RUPSLB terselenggara dan diadministrasikan serta mendapat tindak lanjut sesuai kewenangannya;
- c. Mengkoordinasi fungsi pembuatan laporan kepada regulator Pengawas Bank (Otoritas Jasa Keuangan Pengawas) atau pihak berwenang lainnya atas RUPS/RUPSLB, perubahan susunan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan konsistensi dan kontinuitas informasi pada pihak internal, eksternal dan instansi terkait;

- Implement anticipatory and corrective actions on every news and advertisement in the mass media, including online media.
 - Support related work units in resolving customer complaints.
 - Implement the management of the Bank's website together with the related Work Units.
 - Carry out the risk management function which includes the process of identification, measurement, monitoring and control of reputation risk management.
- c. Organize and carry out certain activities (*events/ sponsorship*) as the implementation of corporate communication strategies as well as reputation/reputation risk management.

3. Secretariat and Protocol Activities

Throughout 2021, Secretarial and Protocol activities are as follows:

- a. Coordinated the function of the implementation of the Board of Directors meeting, including confirming with the parties required in their presence to ensure the readiness of information/data/meeting agenda to be used at the Board of Directors Meeting or the Board of Directors Meeting with the Board of Commissioners and the smooth implementation of the meeting and the necessary follow-up actions by the Work Unit or other related parties;
- b. Coordinated the function of preparing and participating in the implementation of the Board of Directors meetings as well as coordination meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners, assisting the Head of the Corporate Secretariat Division in acting as a note-taker as well as preparing the minutes and notifying the results of the meeting to the relevant Work Units according to their interests, including in the preparation of the GMS/EGMS for ensure that the meeting of the Board of Directors as well as the coordination meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the GMS/EGMS are held and administered and receive follow-up actions according to their authority;
- c. Coordinated the function of making reports to the Bank Supervisory regulator (Financial Services Authority Supervisor) or other authorities on the GMS/EGMS, changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to ensure consistency and continuity of information to internal, external and related agencies;



- d. Mengkoordinasi pengelolaan, penatakerjaan, dan proses pemenuhan dan pengadministrasian pemenuhan kebutuhan atas hak-hak dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris;
- e. Mengkoordinasi pelaksanaan dan penatakerjaan hal-hal terkait perjalanan Dinas Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. Mengkoordinasi dan memonitor kegiatan protokoler atas acara-acara Perusahaan;
- g. Mengkoordinasi fungsi penyusunan dan sosialisasi kebijakan/ketentuan tentang tanggung jawab, hak dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris, serta aktivitas kesekretariatan sesuai ketentuan dan tata kelola perusahaan yang baik;
- h. Mengkoordinasi fungsi penyelenggaraan administrasi keuangan dan mendukung penyelenggaraan kesekretariatan Perusahaan sesuai ketentuan dan tata kelola perusahaan yang baik;
- i. Mengkoordinasi pelaksanaan proses Administrasi dan Pengarsipan Dokumen.

- d. Coordinated the management, administration, and fulfillment processes and administration of fulfillment of the needs for the rights and facilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- e. Coordinated the implementation and administration of matters related to the official travel of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- f. Coordinated and monitored protocol activities for Company events;
- g. Coordinated the function of the preparation and dissemination of policies/stipulations regarding the responsibilities, rights and facilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as secretarial activities in accordance with the provisions and good corporate governance;
- h. Coordinated the function of financial administration and support the implementation of the Company's secretariat in accordance with the provisions and good corporate governance;
- i. Coordinated the implementation of the Administration and Archiving of Documents.

4. Aktivitas Pemberian Dana Bantuan

Melaksanakan kegiatan baik yang merupakan pelaksanaan program pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti Program Kemitraan dan pemberian sumbangan atau donasi sehubungan dengan bencana alam melalui program TJSL yang dilakukan oleh Perseroan, yaitu:

4. Donation Activity

Carry out activities that are either the implementation of government programs or in collaboration with third parties, such as the Partnership Program and the provision of donations or donations in connection with natural disasters through the CSR program carried out by the Company, namely:

No	Tanggal / Date	Kegiatan / Activity	Bidang / Field
1	22 Januari 2021 / 22 January 2021	Pembangunan Yayasan Al - Idrisyah / Al-Idrisyah Foundation Construction	Keagamaan / Religion
2	23 Februari 2021 / 23 February 2021	Bantuan Sembako Bencana Alam Banjir di Wilayah Tangerang / Food Assistance for Flood Natural Disasters in Tangerang Area	Sosial / Social
3	7 April 2021 / 7 April 2021	Sponsorship Perbasasi Banten Acara PON Papua 2021 Pelatda Banten / Sponsorship of Perbasasi Banten for PON Papua 2021 Pelatda Banten	Olahraga / Sports
4	26 April 2021 / 26 April 2021	Partisipasi dalam Program CSR Pemerintah Kabupaten Pandeglang / Participation in the Pandeglang Regency Government's CSR Program	Keagamaan / Religion
5	29-30 April 2021 / 29-30 April 2021	Buka Puasa Bersama dan Bantuan Sosial / Iftar Together and Social Assistance	Sosial / Social
6	29 April 2021 / 29 April 2021	Pemberian Santunan Anak Yatim dan Buka Bersama di seluruh Kantor Cabang / Giving Compensation to Orphans and Iftar in all Branch Offices	Keagamaan / Religion
7	29 April 2021 / 29 April 2021	Bantuan Sosial dan Pemberian Santunan (LVRI Kota Serang, Rumah Tahfidz Qur'an Al Halim, Yayasan Kalimatunsawa, Tenaga Dasar di Lingkungan Gedung Negara Provinsi Banten / Social Assistance and Compensation (LVRI Serang City, Tahfidz Qur'an Al Halim House, Kalitunsawa Foundation, Basic Staff in the Banten Province State Building Environment	Keagamaan / Religion
8	7 Mei 2021 / 7 May 2021	Sponsorship Berbagi Kebajikan Ramadan melalui Ekbispar Pokja Wartawan Banten / Sponsorship Sharing the Goodness of Ramadan through the Ekbispar Pokja Banten Journalists	Keagamaan / Religion



No	Tanggal / Date	Kegiatan / Activity	Bidang / Field
9	10 Mei 2021 / 10 May 2021	Pemberian Takjil Bulan Ramadhan 1442 H di KC dan KCP / Giving Takjil for the Month of Ramadan 1442 H at KC and KCP	Keagamaan / Religion
10	19 Mei 2021 / 19 May 2021	Bantuan Dana CSR pada LVRI Kota Serang dan Paguyuban UMKM / CSR Fund Assistance to LVRI Serang City and the MSME Association	Sosial / Social
11	29 Juni 2021 / 29 June 2021	<i>Sponsorship</i> Gerakan Pemberian Vaksinasi Serentak di Dinas Prov Banten / Sponsorship of the Simultaneous Vaccination Movement at the Banten Provincial Office	Sosial / Social
12	29 Juli 2021 / 29 June 2021	Pemberian Masker dan <i>Hand Sanitizer</i> dalam rangka HUT Ke-5 BB di seluruh KC dan KCP / Provision of Masks and Hand Sanitizer in the context of the 5 th Anniversary of BB in all KC and KCP	Sosial / Social
13	26 Agustus 2021 / 26 August 2021	Bantuan terpal untuk hunian korban bencana tanah longsor di Kecamatan Lebak Gedong Kab. Lebak Provinsi Banten / Tarpaulin assistance for the housing of landslide victims in Lebak Gedong District, Lebak Regency, Banten Province	Sosial / Social
14	2 September 2021 / 2 September 2021	Pembangunan Masjid At-Taqwa Kp.Guha Ciminyak Desa Ciminyak Kec. Muncang Kab. Lebak / Construction of At-Taqwa Mosque Kp. Guha Ciminyak, Ciminyak Village, Muncang District, Lebak Regency	Keagamaan / Religion
15	28 September 2021 / 28 September 2021	Pemberian Bantuan BAZNAS Provinsi Banten dalam rangka vaksinasi "Kita Jaga Kyai" / Provision of BAZNAS Banten Province Assistance in the context of "We Take Care of Kyai" vaccinations	Keagamaan / Religion
16	4 Oktober 2021 / 4 October 2021	Bantuan dukungan pemberian sembako kepada masyarakat Serang dan Cilegon melalui satuan grup satu KOPASSUS / Assistance in providing basic necessities to the people of Serang and Cilegon through the KOPASSUS group one unit	Sosial / Social
17	23 Oktober 2021 / 23 October 2021	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Majelis Dzikir Bumi Alit Padjajaran - Cikuesal / Commemoration of the Birthday of the Prophet Muhammad SAW Earth Remembrance Council Alit Padjajaran - Cikuesal	Keagamaan / Religion
18	27 Oktober 2021 / 27 October 2021	Pemberian Bantuan hadiah untuk atlet dan pelatih asal Kabupaten Tangerang peraih medali emas PON XX Papua / Giving gifts to athletes and coaches from Tangerang Regency who won gold medals in XX Papua PON	Olahraga / Sports
19	27 Oktober 2021 / 27 October 2021	Pemberian Bantuan dana PERPANI Banten untuk menunjang kebutuhan atlet Pelatda cabang panahan PON XX Papua 2021 / Provision of Banten PERPANI funding assistance to support the needs of the Archery Pelatda athletes of the XX Papua PON 2021	Olahraga / Sports
20	29 Oktober 2021 / 29 October 2021	Pemberian bantuan dana gebyar vaksin Kabupaten Pandeglang / Provision of donations for vaccines in Pandeglang Regency	Sosial / Social
21	18 November 2021 / 18 November 2021	Pemberian bantuan kegiatan KECERAN ke-25 Tahun Mande Kamboja Putih Banten / Providing assistance for the 25th KECERAN activity, the Year of Mande Cambodia, Putih Banten	Keagamaan / Religion
22	15 November 2021 / 15 November 2021	Partisipasi kegiatan pemberian kesekretariatan HIPMI Banten / Participation in HIPMI Banten secretariat activities	Sosial / Social
23	19 November 2021 / 19 November 2021	Pemberian Bantuan dana Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Jam'i As-Salam Kota Tangerang / Providing assistance for the birthday of the Prophet Muhammad SAW Jam'i As-Salam Mosque, Tangerang City	Keagamaan / Religion
24	7 Desember 2021 / 7 December 2021	Bantuan dana RAKERDA & Pelantikan Karang Taruna Provinsi Banten / RAKERDA Fund Assistance & Inauguration of Karang Taruna in Banten Province	Sosial / Social

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sebagai penghubung dengan pihak-pihak eksternal, Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan dunia pasar modal serta secara konsisten meningkatkan kompetensinya di bidang hukum, keuangan, komunikasi dan tata kelola perusahaan. Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai Pelatihan/*Workshop*/Seminar antara lain:

Corporate Secretary Competency Improvement Programs

As a liaison with external parties, the Corporate Secretary must always keep abreast of developments in the capital market world and consistently improve his competence in the fields of law, finance, communication and corporate governance. Throughout 2021, the Corporate Secretary has attended various trainings/workshops/seminars, including:

No	Pelatihan / Training	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
1.	<i>Workshop & Focus Group Discussion Culture Transformation Bank Banten 2021</i>	16-17 April 2021 / 16-17 April 2021	Gerak Gerik Training Center
2.	<i>Character Building Budaya Perusahaan</i>	20-21 Juli 2021 / 20-21 July 2021	Gerak Gerik Training Center
3.	Pembekalan & Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 / Training and Test Level 3 for Risk Management Certification	3-4 November 2021 / 3-4 November 2021	Efektifpro / LSPP

Di samping itu, jajaran pegawai di bawah fungsi Sekretaris Perusahaan dan hukum telah mengikuti pelatihan dan berpartisipasi aktif dalam seminar/sosialisasi terkait peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh regulator.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Satuan Kerja Audit Intern Bank Banten dalam hal ini Divisi Audit Intern (DAI) menyediakan assurance dan consulting yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional Bank. Unit kerja ini juga membantu Bank mencapai tujuannya dengan mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola (*governance*) melalui pendekatan yang teratur dan sistematis.

Dasar Hukum

Fungsi Audit Intern Bank dilaksanakan oleh Divisi Audit Intern (DAI) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Intern.

Piagam Internal Audit

Piagam Audit Intern Perseroan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 172/SK/DIR-BB/XII/20 tentang Piagam Audit Internal tanggal 28 Desember 2020. Piagam Audit Intern berisi antara lain tujuan, visi dan misi, fungsi, struktur dan kedudukan audit intern, tugas dan tanggung jawab serta hubungan dengan unit kerja lain yang melakukan fungsi pengendalian intern, wewenang divisi audit intern, kode etik audit intern, persyaratan auditor intern, pertanggungjawaban aktivitas audit intern, larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksanaan dalam Divisi Audit Intern (DAI) dari pelaksanaan kegiatan operasional bank termasuk dalam perusahaan anak, kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Divisi Audit Intern (DAI).

In addition, the ranks of employees under the Corporate Secretary and legal functions have attended training and actively participated in seminars/socialization related to the latest regulations issued by the regulator.

INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit of Bank Banten, in this case the Internal Audit Division (DAI), provides independent and objective assurance and consulting designed to add value and improve the Bank's operations. This work unit also helps the Bank achieve its objectives by evaluating and improving the effectiveness of the risk management, control, and governance processes through an orderly and systematic approach.

Legal Basis

The Bank's Internal Audit function is carried out by the Internal Audit Division (DAI) in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.03/2019 dated January 28, 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks. Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Charter.

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter of the Company is stipulated based on Decree of the Board of Directors No. 172/SK/DIR-BB/XII/20 dated 28 December 2020. The Internal Audit Charter contains, among others, objectives, vision and mission, function, structure and position of internal audit, duties and responsibilities as well as relations with other work units that carry out internal control functions, authority, code of conduct, internal auditor requirements, accountability for internal audit activities, prohibition of concurrent duties and positions, as well as the implementation in the Internal Audit Unit (IAU) in the bank operations including subsidiaries, criteria of external experts usage in supporting internal audit function, terms and conditions that shall be fulfilled by the Internal Audit Unit (IAU).



Untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain, tanggung jawab dan akuntabilitas kepala divisi audit intern, persyaratan untuk mematuhi standar profesional audit intern, prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern, kebijakan pembatasan dan masa tunggu (cooling off period), dan pengendalian mutu.

Piagam Audit Intern disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang penerapan fungsi audit intern pada Bank Umum.

Divisi Audit Intern secara struktural berada di bawah Direktur Utama dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 41 (empat puluh satu) orang termasuk KIC pada posisi 31 Desember 2021.

To maintain independency if required to provide consultancy or other specific duties, responsibilities and accountability of head of internal audit division, requirements for compliance with standards internal audit professional, procedures in coordinating internal audit function with legal expert or external auditors, limitation policy and cooling off period, and quality control.

The Internal Audit Charter is established based on Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines of the Internal Audit Charter, and the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 on the Implementation of Internal Audit Function of Commercial Banks.

The Internal Audit Unit is structurally under the President Director with 41 (forty one) employees, including KIC as of December 31, 2021.

Profil Satuan Kerja Audit Intern

Internal Audit Unit (IAU) Profile



Warga Negara Indonesia berusia 53 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi, bidang Akuntansi pada tahun 1992 dari STIE Perbanas, Jakarta.

Beliau mengawali karier di Koperasi Karyawan PT Tambang Timah sebagai Kepala Pembukuan (1987-1989), Kemudian menjabat sebagai *Accounting Officer* di Bank Umum Servitia (1989-1991), dan *Accounting Officer* dan *Branch Manager* (1991-1993) di Bank Susila Bakti, Selanjutnya berkarier sebagai *Loan Administration Manager* (1993-1997) di Bank PDFCI, sebagai *Audit Manager* (2001-2012) di Bank Mega, sebagai *Senior Manager* pada Divisi SKAI (2012-2018) di Bank Banten, sebagai Kepala Bagian Kepatuhan (2018-2021) pada Divisi Kepatuhan & Hukum di Bank Banten, dan pada tahun 2021, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Audit Intern.

Beliau diangkat melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 234/SK/Dir-BB/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan Penggantian dan Penunjukan Kepala Divisi Audit Intern.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Audit Intern (DAI)

Kepala Divisi Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite

Indonesian citizen, 53 years old. He earned a Bachelor's degree in Economics, majoring in Accounting in 1992 from STIE Perbanas, Jakarta.

He started his career at PT Tambang Timah Employee Cooperative as Head of Bookkeeping (1987-1989), Then, serving as Accounting Officer at Servitia Commercial Bank (1989-1991), and Accounting Officer and Branch Manager (1991-1993) at Bank Susila Bakti, and continued his career as Loan Administration Manager (1993-1997) at Bank PDFCI, as Audit Manager (2001-2012) at Bank Mega, as Senior Manager in the Internal Audit Unit (2012-2018) at Bank Banten, as Head of Compliance (2018-2021) in the Compliance & Legal Division at Bank Banten, and in 2021, he served as Head of the Internal Audit Unit.

He was appointed through the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 234/SK/Dir-BB/VI/2021 dated June 14, 2021 regarding Determination of Replacement and Appointment of Head of Internal Audit Division.

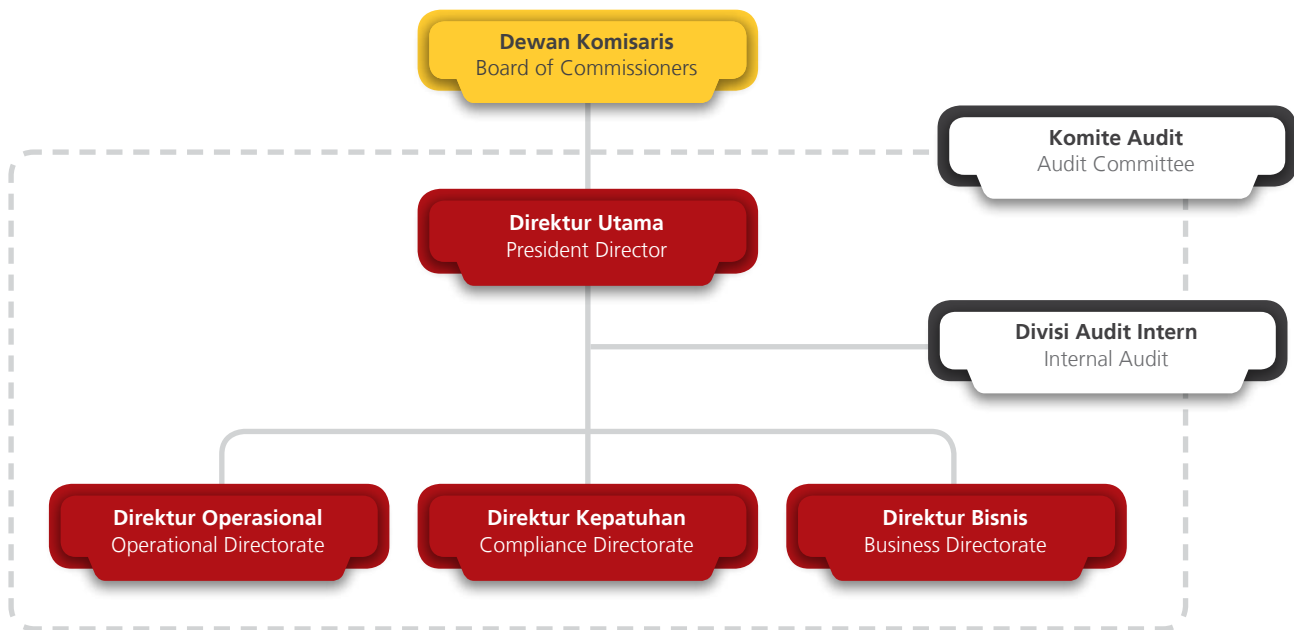
Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit Unit (IAU)

The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners by considering the recommendations

Audit.

Struktur Organisasi

Satuan Kerja Audit Internal secara struktural berada di bawah Direktur Utama dengan jumlah sumber daya manusia per 31 Juli 2021 sebanyak 41 orang (16 orang auditor umum dan TI dan 25 orang KIC).



Tugas dan Tanggung Jawab

Divisi Audit Intern (DAI) memiliki fungsi untuk menjaga, meningkatkan dan menciptakan nilai tambah bagi para *stakeholders* melalui penyelarasan aktivitas Audit Intern dengan *business objectives* Perseroan, dengan target utama adalah untuk meyakinkan bahwa:

- Risiko telah teridentifikasi dan dikelola secara memadai sesuai kompleksitas kegiatan Perseroan;
- Informasi penting keuangan, manajerial dan operasional telah disajikan secara akurat, andal, dan tepat waktu;
- Seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan kebijakan standar, prosedur serta peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
- Program-program, rencana-rencana, dan tujuan-tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam menjalankan tugasnya, tugas SKAI antara lain meliputi:

- *Jasa Assurance*
Suatu pengujian obyektif terhadap bukti/fakta yang bertujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas *governance process*, *risk management*, dan *internal control* dalam kegiatan operasional Bank.
- *Jasa Consulting*
Jasa konsultasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan *governance process*, *risk*

of the Audit Committee.

Organization Structure

The Internal Audit Unit is structurally under the President Director with the total human resources number of 41 people (16 general and IT auditors and 25 KIC staff) as of 31 July 2021.

Duties and Responsibilities

Internal Audit Unit (IAU) has the function to maintain, improve and create added value for the stakeholders through the alignment of Internal Audit activities with the Company business objectives, with the main target to ensure that:

- Risks have been identified and managed adequately according to the Company activities complexity.
- Key financial, managerial and operations information have been presented accurately, qualified and timely.
- All Company activities have been in accordance with the policies, standards, procedures and prevailing laws and regulations.
- Effective and efficient achievements of programs, plans and objectives.

In performing its functions, IAU duties include:

- *Assurance Services*:
An objective examination of evidences/facts aims to provide independent assessment on the governance process, risk management, and internal control in the Bank operations activity.
- *Consulting Services*:
A consultation service aims to improve the effectiveness of governance process, risk management, and internal



management, dan *internal control*. Jasa konsultasi yang diberikan bersifat tidak mengikat, dan tanpa mengabaikan prinsip independensi, sehingga tanggung jawab atas tindak lanjut dari hasil konsultasi tersebut tetap berada pada *auditee*.

Selain itu, Divisi Audit Intern juga bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun rencana Audit Internal Tahunan yang fleksibel dengan *risk-based approach* yang tepat, termasuk risiko-risiko dan *internal control system* yang telah diidentifikasi oleh manajemen, serta menyampaikan rencana audit tersebut kepada Direktur Utama guna mendapatkan review dan persetujuan kemudian menyampaikan rencana audit tersebut kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit;
2. Melaksanakan rencana audit internal tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas-tugas khusus yang diminta oleh Manajemen dan Dewan Komisaris;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
7. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
8. Bekerja sama dengan Komite Audit untuk mengkomunikasikan berbagai hal yang berhubungan dengan Audit dan wajib menyampaikan hasil komunikasi tersebut kepada Direktur Utama;
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan, antara lain berdasarkan: permintaan dari Direksi, Komisaris, dan *professional judgement* Kepala DAI.

Pelaksanaan Kegiatan DAI Tahun 2021

Di tahun 2021, DAI telah melaksanakan fungsi audit internal sesuai rencana/program kerja yang disusun secara berkala, yaitu:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;

control implementation. The consultation service is not binding, and adhere to the principle of independency, thereby the responsibility on the follow up of the consultation findings remain with the auditee.

In addition, the responsibilities of Internal Audit Unit are:

1. Prepare a flexible annual Internal Audit plan with appropriate risk-based approach, including risks and internal control system identified by management, and submit the audit plan to the President Director in order to obtain the review and approval and then submit the audit plan to Board of Commissioners and Audit Committee;
2. Implement the approved annual internal audit plan, including specific tasks requested by Management and Board of Commissioners;
3. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with Company policy;
4. Conduct examination and assessment of efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
5. Provide suggestions for improvements and objective information on the activities examined at all levels of management;
6. Prepare audit report and submit the report to the President Director and Board of Commissioners;
7. Monitoring, analysing and reporting on the implementation of suggested improvements;
8. Cooperate with the Audit Committee to communicate various matters relating to the audit and shall communicate the results of such communications to the President Director;
9. Develop a program to evaluate the quality of its internal audit activities; and
10. Conduct special inspection if required, among others based on: request from Board of Directors, Commissioners, professional judgment of IAU Head.

Implementation of IAU Activities in 2021

In 2021, the IAU has carried out an internal audit function according to a work plan/program that is prepared periodically, which are:

1. To assist the duties of the President Director and the Board of Commissioners in carrying out supervision by outlining operational planning, implementation, and monitoring of audit results;
2. Making analysis and evaluation in financial, accounting, operational, and other activities through auditing;

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Sertifikasi Profesi Kegiatan SKAI

Dalam menunjang profesi, karyawan DAI melaksanakan kegiatan pelatihan. Hingga akhir tahun 2021, sertifikasi yang dimiliki oleh karyawan DAI adalah BSMR Level 1, BSMR Level 2, BSMR Level 3, Sertifikasi Auditor Level Officer dan Supervisor, ACFE, dan QIA.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal di Bank Banten merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan secara berkesinambungan (*on-going basis*), guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perseroan; menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat; meningkatkan kepatuhan yang berlaku; mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian; meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem pengendalian internal yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen dan Karyawan untuk pencapaian 3 (tiga) tujuan, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Komponen pengendalian internal menurut COSO meliputi lingkungan pengendalian; penaksiran risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; serta pemantauan yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Control Environment

Lingkungan pengendalian menjadi dasar bagi keempat komponen pengendalian lainnya. Lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Lingkungan pengendalian menentukan arah Perusahaan dan memengaruhi kesadaran pengendalian pihak manajemen dan karyawan. Berbagai elemen penting yang terdapat di lingkungan pengendalian adalah:

- Integritas dan nilai etika manajemen.
- Struktur organisasi
- Keterlibatan Dewan Komisaris dan Komite Audit, jika ada.
- Filosofi manajemen dan siklus operasionalnya.
- Prosedur untuk mendelegasikan tanggung jawab dan otoritas.
- Metode manajemen untuk menilai kinerja.

3. Identifying all possibilities to improve and enhance the efficient use of resources and funds; and
4. Providing objective improvements and information on activities examined at all levels of management.

Profession Certifications of IAU

In fostering its profession, the IAU employees participated in the training activity. As of the end of 2021, the IAU employees had obtained the following certifications: BSMR Level 1, BSMR Level 2, BSMR Level 3, Auditor Certification for Officer and Supervisor Levels, and QIA.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System in Bank Banten serves as controlling mechanisms set by the Company management at an on-going basis. This is aimed to maintain and safeguard the Company assets; guarantee a more accurate reports; improve compliance with prevailing rules; reduce the financial/losses impact, violations include breaches/fraud and violation of prudential aspect; improve organization effectiveness and enhance cost efficiency.

The internal control system involving the Board of Commissioners, management and employees to achieve 3 (three) objectives, which are operations effectiveness and efficiency; financial reporting reliability; and compliance with prevailing laws and regulations. The internal control components based on COSO include control environment; risk assessment; control activity; information and communication, as well as monitoring, which are elaborated below:

a. Control Environment

The control environment serves as the basis for the other four control components. The control environment is defined as a set of standards, processes, and structures that provide the basis for implementing internal control in the organization. The control environment determines the Company direction and affects the control awareness of management and employees. The important elements in the control environment are:

- Integrity and ethical values of management.
- Organizational structure
- Involvement of the Board of Commissioners and Audit Committee, if any.
- Management philosophy and operational cycle.
- Procedures for delegating responsibility and authority.
- Management methods for performance assessment.



- Pengaruh eksternal, seperti pemeriksaan oleh badan pemerintah.
- Kebijakan dan Praktik perusahaan dalam mengelola sumber daya manusianya.

b. *Risk Assessment*

Menurut COSO, definisi risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang akan berdampak merugikan bagi pencapaian tujuan. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko yang teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penilaian risiko menjadi landasan bagi pengelolaan atau manajemen risiko.

c. *Control Activities*

Aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi risiko Perusahaan yang telah diidentifikasi. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda, seperti: otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta Perusahaan dan pemisahan fungsi. Aktivitas pengendalian dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu pengendalian komputer dan pengendalian fisik.

d. *Information and Communication*

Informasi yang bersangkutan harus diidentifikasi, tergambar dan terkomunikasi dalam sebuah *form* dan *time frame* yang memungkinkan orang-orang menjalankan tanggung jawabnya. Sistem informasi menghasilkan laporan, yang berisi informasi operasional, finansial, dan terpenuhinya keperluan sistem, yang membuatnya mungkin untuk menjalankan dan mengendalikan bisnis. Informasi dan Komunikasi tidak hanya menghadapi data-data yang dihasilkan internal, tetapi juga kejadian eksternal, kegiatan dan kondisi yang diperlukan untuk memberikan informasi dalam rangka pembuatan keputusan bisnis dan laporan eksternal. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam hal yang lebih luas, mengalir ke bawah, ke samping dan ke atas organisasi. Seluruh personel harus menerima dengan jelas pesan dari manajemen teratas bahwa pengendalian tanggung jawab diambil dengan serius. Para personel harus mengerti peran mereka dalam sistem pengendalian internal, sebagaimana mereka mengerti bahwa kegiatan individu mereka berhubungan dengan pekerjaan orang lain. Mereka harus memiliki niat

- External influences, such as audit by government agencies.
- Company policies and practices in managing its human resources.

b. *Risk Assessment*

According to COSO, the definition of risk is the possibility of an event that will have an adverse impact on goals achievement. Risk assessment involves a dynamic and interactive process for risks identification and assessment to goals achievement. The identified risks are further compared with the predetermined risk tolerance levels. As such, risk assessment becomes the basis for management or risk management.

c. *Control Activities*

Control activities include the actions that are established through policies and procedures used to ensure that appropriate action is taken to address identified company risks. Control activities include different activities, such as: authorization, verification, reconciliation, analysis, work performance, maintaining the security of company assets and segregation of functions. Control activities can be grouped into two different categories, namely computer control and physical control.

d. *Information and Communication*

The information concerned must be identified, illustrated and communicated in a form and timeframe that allows employees to carry out their responsibilities. Information systems generate reports, which contain operational, financial, and system requirements, which make it possible to perform and control the business. Information and Communication does not only handle the data generated internally, but also external events, activities and conditions required to provide information for business decisions making and external reports. Effective communication must also take place on the broader context, cascaded down, across and up the organization. All personnel should receive a clear message from the top management that controlling responsibility is taken seriously. The personnel must understand their role in the internal control system, as they understand that their individual activities are related to the work of others. They must have the intention of communicating significant information to their supervisors. Moreover, effective communication with external parties, such as customers,



untuk mengkomunikasikan informasi yang signifikan kepada atasannya. Selain itu juga dibutuhkan komunikasi efektif dengan pihak eksternal, seperti *customer*, *supplier*, *regulator*, dan Pemegang Saham.

e. *Monitoring Activities*

Sistem pengendalian internal perlu diawasi, sebuah proses untuk menentukan kualitas performa sistem dari waktu ke waktu. Pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya yang dimaksudkan untuk memastikan tiap-tiap komponen pengendalian internal ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Organisasi, baik perusahaan maupun pemerintah, biasanya memiliki unit audit internal yang menjadi penopang terselenggaranya pengendalian internal dan bertanggung jawab langsung kepada manajer puncak atau dewan pengawas.

Perseroan belum melakukan implementasi sistem pengendalian internal kontrol dengan menggunakan COSO.

Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu pengurus Perseroan dalam:

- Menjaga aset Perseroan serta menjamin tersedianya laporan keuangan dan SIM yang dapat dipercaya;
- Meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan serta pelanggaran prinsip kehati-hatian;
- Memberikan informasi dan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan manajemen yang bersifat strategis.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat Perseroan dengan menciptakan budaya pengendalian, budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan yang antara lain meliputi:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal secara umum, termasuk kebijakan terkait lainnya yang ditetapkan oleh Direksi;
- Direksi menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian internal yang ditetapkan Perseroan;
- Direktur Kepatuhan berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan internal dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- Divisi Manajemen Risiko mengukur dan memantau kondisi risiko Bank dalam bentuk laporan profil risiko triwulan untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;

suppliers, regulators and shareholders are also required.

e. *Monitoring Activities*

The internal control system shall be supervised, a process to determine the quality of system performance over time. Monitoring includes continuous evaluation, separate evaluation, or a combination of the two which are aimed at ensuring each component of internal control exists and functions as intended. Organizations, both companies and governments, usually have an internal audit unit that supports the implementation of internal control and is directly responsible to the top management or the supervisory board.

The Company has not yet commenced the implementation of the internal control system by using COSO.

Effective internal control system can help the Company's management to:

- Maintain the Company's assets and ensure the availability of a trusted financial statements and SIM;
- Improve the Company's compliance with the prevailing laws and regulations;
- Reduce risk of losses, fraud and violation of prudential principles;
- Provide information and feedback in developing strategic management policies.

Implementation of internal control system is the responsibility of the Bank management and executives by creating the culture of control, risk awareness and compliance which among others includes:

- The Board of Commissioners supervises the implementation of internal control in general, including other related policies set by the Board of Directors;
- The Board of Directors creates and maintains an effective internal control system and ensures that the system performs safely and soundly in accordance with the internal control objectives set by the Company's;
- Compliance Director plays an active role in preventing internal irregularities in establishing policies related to the prudential principle;
- Risk Management Division measures and monitors the Bank's risk conditions through a quarterly risk profile report to be submitted to the Financial Services Authority;



- e. Divisi Kepatuhan dan Hukum mengkaji ulang dan memberi masukan atas pengembangan ketentuan internal serta memberikan pelatihan atas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) di seluruh kantor Perseroan;
- f. Divisi Audit Intern mengevaluasi kecukupan dan efektivitas penerapan SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan;
- g. Bank menjamin pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya dalam praktik dan penerapan penilaian risiko.

Hasil Tinjauan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2021

DAI telah melakukan pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal tahun 2021 pada Kantor Cabang maupun Divisi kantor pusat dan telah menyampaikan laporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan fungsi audit yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal Bagi Bank Umum, Piagam Audit dan Rencana Kerja Audit yang berbasis risiko.

AKUNTAN PUBLIK

Prosedur Penunjukan Akuntan Publik Penunjukan Akuntan Publik Perseroan dilaksanakan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 20 Mei 2021. Pada tahun 2021, Akuntan Publik Perseroan adalah Kanaka Puradiredja, Suhartono yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- e. Compliance and Legal Division reviews and provides input on the development of internal regulations and provides training on anti-money laundering and counter terrorism financing (AML & CTF) programs in all Company's offices;
- f. Internal Audit Division evaluates the adequacy and effectiveness of internal control system continuously in relation to the Bank's operations that have the potential to cause losses in the targets achievement set by the Company's management;
- g. The Bank ensures the implementation of an independent internal audit through adequate reporting channels, and expertise of internal auditors, particularly in the practice and application of risk assessments.

Results of Internal Control System Review in 2021

The Head of IAU has conducted an examination and evaluation of the implementation of the internal control system in 2021 at the Branch Office and Headquarters Division and has submitted a report to the Board of Directors and Board of Commissioners.

Internal Control System Effectiveness

The audit was conducted based on Circular of the Financial Services Authority No. 35/SEOJK.03/2017 regarding the Internal Control System Guidelines for Commercial Banks, Audit Charter and Audit Work Plan of risk-based.

PUBLIC ACCOUNTANT

The procedure for the Appointment of Public Accountant The appointment of the Company's Public Accountant is carried out through the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated May 20, 2021. In 2021, the Company's Public Accountant was Kanaka Puradiredja, Suhartono who was appointed by the Board of Commissioners.

Akuntan Publik yang Melakukan Audit untuk 5 (lima) Tahun Terakhir
Public Accountant for the Last 5 (Five) Years

Tahun / Year	Akuntan Publik / Public Accountant	Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	Biaya Jasa Audit / Audit Fee	Jasa lain yang diberikan selain audit / Other Services Fee
2021	Florus Daeli, MM, CPA	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Rp1.542.975.002	Jasa audit Laporan Keuangan untuk periode 31 Maret dan 31 Desember 2021. / Financial Statement audit services for the period March 31 and December 31, 2021.
2020	Florus Daeli, MM, CPA	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Rp564.995.000	KAP menerbitkan Comfort Letter Perseroan dalam rangka PUT VI / KAP issues the Company's Comfort Letter in the context of PUT VI
2019	Florus Daeli, MM, CPA	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Rp522.500.000	

Akuntan Publik yang Melakukan Audit untuk 5 (lima) Tahun Terakhir
Public Accountant for the Last 5 (Five) Years

Tahun / Year	Akuntan Publik / Public Accountant	Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	Biaya Jasa Audit / Audit Fee	Jasa lain yang diberikan selain audit / Other Services Fee
2018	Tan Siddharta	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Rp522.500.000	
2017	Tan Siddharta	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Rp475.000.000	
2016	Tan Siddharta	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Rp525.000.000	

Fungsi Kepatuhan

Compliance Function

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan Tata Kelola Perusahaan. Bank Banten berkomitmen untuk terus membangun serta memperkuat budaya kepatuhan secara efektif dan menyeluruh, mulai dari manajemen hingga karyawan. Untuk memastikan fungsi Kepatuhan tersebut terlaksana secara konsisten dan berkesinambungan, pelaksanaan Fungsi Kepatuhan berada dibawah Direktur Kepatuhan.

Fungsi Kepatuhan Bank telah memiliki Piagam Kepatuhan (*compliance charter*), Kode Etik Kepatuhan (*compliance code of conduct*), Pedoman Kepatuhan (*compliance policies*).

Dalam menjalankan Fungsi Kepatuhan, Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dimana Fungsi kepatuhan Bank sekurangnya meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Regulator.

Independensi dan Kriteria Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka melaksanakan fungsi Kepatuhan, Bank memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen yang dipimpin oleh Kepala Divisi Kepatuhan.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Wajib memenuhi persyaratan independensi.
2. Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Implementation of the Compliance Function is one of the important elements in efforts to improve Corporate Governance. Bank Banten is committed to continuing to build and strengthen a compliance culture in an effective and comprehensive manner, from management to employees. To ensure that the Compliance function is carried out consistently and continuously, the implementation of the Compliance Function is under the Compliance Director.

The Bank's Compliance Function has a Compliance Charter, Compliance Code of Conduct, and Compliance Policies.

In carrying out the Compliance Function, the Bank refers to the Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks, in which the Bank's compliance function shall at least include actions to:

1. Realize the implementation of a compliance culture at all levels of the Bank's organization and business activities;
2. Manage compliance risks faced by the Bank;
3. Ensure that the policies, provisions, systems and procedures as well as activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the Regulator and the prevailing laws and regulations;
4. Ensure the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to the Regulator.

Compliance Function Independency and Criteria

In order to carry out the Compliance function, the Bank has a Director in charge of the compliance function and establishes an independent Compliance Unit led by the Head of the Compliance Division.

The Director who oversees the Compliance Function

1. Must meet the independence requirements.
2. The President Director and/or Deputy President Director are prohibited from holding concurrent positions as directors in charge of the Compliance Function.



3. Dilarang membawahkan fungsi:
 - Bisnis dan operasional;
 - Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
 - Tresuri (treasury).
 - Keuangan dan akuntansi.
 - Logistik dan pengadaan barang atau jasa.
 - Teknologi informasi. dan/atau
 - Audit intern.

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

1. Memenuhi persyaratan independensi;
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak melaksanakan tugas lain di luar Fungsi Kepatuhan;
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan;
5. Berkoordinasi langsung dengan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan

1. Wajib independen.
2. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepatuhan.

Pedoman Operasional Kepatuhan

Bank telah memiliki Piagam Kepatuhan (*compliance charter*), Kode Etik Kepatuhan (*compliance code of conduct*), Pedoman Kepatuhan (*compliance policies*) yang menjadi pedoman pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

Jumlah dan Sertifikasi Kepatuhan

Pegawai dan Pejabat Satuan Kerja Kepatuhan yang telah memiliki sertifikasi per 31 Desember 2021 sebanyak 9 (sembilan) orang, dengan rincian sebagai berikut:

3. Is forbidden to carry out the following functions:
 - Business and operations;
 - Risk management that makes decisions on the Bank's business activities;
 - Treasury;
 - Finance and accounting;
 - Logistics and procurement of goods or services;
 - Information Technology; and/or
 - Internal audit.

Head of Compliance Work Unit

1. Must meet the requirements of independence;
2. Must master the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of laws and regulations;
3. Must not carry out other duties outside the Compliance Function;
4. Must have a high commitment to implement and develop a Compliance Culture;
5. Must coordinate directly with the Director in charge of the Compliance Function.

Compliance Work Unit

1. Must be independent.
2. Officials and staff in the compliance work unit are prohibited from being placed in a position facing a conflict of interest in carrying out the responsibilities of the Compliance Function.
3. Must be responsible for the implementation of the compliance function.

Compliance Operations Guideline

The Bank already has a Compliance Charter, a Compliance Code of Conduct, Compliance Policies which serve as guidelines for the implementation of the Compliance Function.

Compliance Number and Certification

There are 9 (nine) employees and officials of the Compliance Work Unit who have been certified as of December 31, 2021, with details as follows:

No.	Keterangan / Description	Sertifikasi / Certification
1	1 (satu) orang Kepala Divisi Kepatuhan / 1 (one) Head of Compliance Division	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 / Risk Management Certification Level 3 Sertifikasi Kepatuhan Level Officer / Officer Level Compliance Certification
2	1 (satu) orang Kepala Bagian Kepatuhan / 1 (one) Head of Compliance Section	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 / Risk Management Certification Level 2 Sertifikasi Kepatuhan Level Officer / Officer Level Compliance Certification
3	1 (satu) orang Kepala Bagian APU-PPT / 1 (one) Head of APU-PPT	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 / Risk Management Certification Level 2 Sertifikasi Kepatuhan Level Officer / Officer Level Compliance Certification

No.	Keterangan / Description	Sertifikasi / Certification
4	1 (satu) orang Staf Kepatuhan / 1 (one) Compliance Officer	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 / Risk Management Certification Level 1 Sertifikasi Kepatuhan Level Officer 1 / Officer Level 1 Compliance Certification
5	3 (tiga) orang Staf Kepatuhan / 3 (three) Compliance Officers	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 / Risk Management Certification Level 1 Sertifikasi Kepatuhan Level Officer 1 / Officer Level 1 Compliance Certification
6	2 (dua) orang Staf APU-PPT / 2 (two) APU-PPT staff	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 / Risk Management Certification Level 1 Sertifikasi Kepatuhan Level Officer 1 / Officer Level 1 Compliance Certification

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan tahun 2021

Selama tahun 2021, dalam rangka memitigasi risiko kepatuhan dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta meningkatkan budaya kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan:

1. Pemantauan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian, meliputi KPMM, BMPK, NPL, GWM dan RIM secara berkala;
2. Membangun aplikasi reminder atas kewajiban pelaporan eksternal kepada Otoritas yang harus dilakukan oleh Unit Kerja, dimana aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan dan mendorong tingkat kepatuhan dalam penyampaian feedback laporan serta untuk memantau penyampaian laporan tersebut;
3. Melakukan pembuatan opini kepatuhan atau kajian atas draft kebijakan, prosedur internal, penerbitan produk dan/atau aktivitas produk baru bank guna memastikan telah sesuai dengan ketentuan regulator dan internal bank yang berlaku;
4. Melakukan pembuatan opini kepatuhan terkait permohonan pengajuan kredit/perpanjangan/penambahan/restrukturisasi kredit;
5. Melakukan pemantauan penerbitan ketentuan-ketentuan dari Regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan) melalui website Regulator. Atas ketentuan yang baru tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan akan melakukan kajian dan mendistribusikan hasil kajian tersebut kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Unit Kerja terkait;
6. Menyusun compliance checklist untuk perubahan Jaringan Kantor Bank, yaitu pembukaan, penutupan, pemindahan alamat dan perubahan status;
7. Menyusun compliance checklist Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper test) untuk calon Dewan Komisaris dan Direksi;
8. Menyampaikan laporan pengangkatan efektif anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dari Otoritas Jasa Keuangan;

Compliance Function Implementation in 2021

During 2021, in order to mitigate compliance risk and apply the precautionary principle as well as improve the compliance culture, the Compliance Unit has implemented:

1. Monitoring the implementation of the precautionary principle, including KPMM, LLL, NPL, GWM and RIM on a regular basis;
2. Build a reminder application for external reporting obligations to the Authority that must be carried out by the Work Unit, where this application is intended to facilitate and encourage the level of compliance in submitting feedback reports and to monitor the submission of these reports;
3. Conducting a compliance opinion or review of draft policies, internal procedures, issuance of new bank products and/or product activities to ensure that they are in compliance with applicable regulatory and internal bank regulations;
4. Make compliance opinions related to applications for credit applications/extensions/additions/credit restructuring;
5. Monitoring the issuance of regulations issued by the Regulator (Bank Indonesia, Financial Services Authority, Center for Financial Transaction Reports and Analysis and/or laws and regulations) through the Regulator's website. Based on the new provisions, the Compliance Unit will conduct a study and distribute the results of the study to the Board of Directors, Board of Commissioners and related Work Units;
6. Prepare a compliance checklist for changes to the Bank's Office Network, namely opening, closing, changing addresses and changing status;
7. Prepare a compliance checklist for the Fit and Proper test for candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors;
8. Submit reports on the effective appointment of members of the Board of Commissioners and Board of Directors who have passed the capability and compliance test from the Financial Services Authority;



9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Direksi serta Dewan Komisaris sesuai ketentuan berlaku;
10. Menyusun pelaksanaan Tata Kelola Bank tahun 2020 dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta instansi terkait secara tepat waktu;
11. Memantau dan memastikan pemenuhan komitmen Bank kepada OJK, BI atau regulator lainnya telah ditindaklanjuti;
12. Pemantauan terhadap kewajiban dan/atau permintaan data dari Regulator, dimana atas pemantauan ini dilakukan melalui pembuatan daftar kewajiban dan/atau permintaan data yang kemudian disampaikan kepada unit kerja melalui e-mail;
13. Melakukan pelatihan/sosialisasi atas Budaya Kepatuhan dan Penerapan Program APU-PPT kepada Kantor Cabang yang selama pandemic ini dilakukan secara daring.
14. Melakukan pemantauan atas Penerapan Program APU-PPT, diantaranya:
 - a. Melakukan pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah/WIC;
 - b. Melakukan pemantauan Rekening Nasabah;
 - c. Melakukan pemantauan terhadap Pengkinian Data Nasabah;
 - d. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu SDDS;
 - e. Melakukan Identifikasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Indikator Kepatuhan Tahun 2021

Indikator Kepatuhan posisi 31 Desember 2021 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan Bank Banten terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

2021 Compliance Indicator

The Compliance Indicators position December 31, 2021 as a form of commitment and level of compliance of Bank Banten to the provisions and laws and regulations, are as follows:

Parameter / Parameter	Ketentuan Regulator / Regulator Rules	Bank Banten
KPMM	Minimal 10% s/d 11% / Minimum 10% to 11%	38,85%
NPL (net)	Maksimal 5% / Maximum 5%	0,65%
BMPK Pihak Terkait / BMPK of Related Party	Maksimal 10% dari Modal / Maximum 10% from Capital	1,38%
GWM Rupiah	Minimal 3% / Minimum 3%	4,09%
RIM	Minimal 84% s/d 94% / Minimum 84% to 94%	86.10%

Fungsi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Anti Money Laundering and Counter Terrorism Funding

Dalam rangka peningkatan penerapan program APU-PPT yang lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU-TPPU), Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU-TPPT), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.01/2017 dan POJK No.23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU-PPT di Sektor Perbankan serta Peraturan PPATK terkait, Bank berkomitmen penuh untuk senantiasa melaksanakan Program APU-PPT yang ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, yang meliputi:

Persetujuan atas Kebijakan dan Prosedur APU PPT yang Mencakup:

- Customer Due Dilligent* (CDD) dalam rangka identifikasi Nasabah dan Pengkinian Data CDD Nasabah, termasuk metode klasifikasi penentuan risiko nasabah, cabang dan unit bisnis terhadap potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme, Identifikasi *Beneficial Owner*, *Walk In Customer* (WIC) dan penyaringan data nasabah terhadap database nasabah yang berisiko tinggi (*High Risk Customer*);
- Pemantauan dan analisa secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil CDD nasabah, termasuk penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi dalam rangka penerapan APU-PPT;
- Identifikasi dan penilaian risiko terjadi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terkait produk, layanan, aktivitas maupun adanya jaringan distribusi *channel* baru yang berlaku di seluruh unit bisnis dan operasional;
- Seluruh produk dan layanan, aktivitas maupun adanya jaringan distribusi channel baru di lakukan review terlebih dahulu oleh unit kerja yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebelum diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap penerapan program APU-PPT;
- Identifikasi dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Sistem Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), Penyediaan Permintaan Data dan Informasi Terduga Pendanaan

To improve effective and efficient AML – CTF program implementation as regulated by the Law No. 8 of 2010 regarding the Prevention and Eradication of Anti Money Laundering (UU-TPPU), Law No. 9 of 2013 regarding the Prevention and Eradication of Terrorism Financing (UU-TPPT), Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 12/POJK.01/2017 and POJK No.23/POJK.01/2019 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector, and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of the AML-CFT Program in the Banking Sector as well as the related PPATK Regulations, the Bank is fully committed to continuously implementing the AML-CFT Program which is determined and actively supervised by the Board of Directors and the Board of Commissioners, which includes:

Approval on AML-CTF policies and procedures that include:

- Customer Due Diligence (CDD) for Customer Identification and Data Update, including risk determination classification method for customers, branches and business units toward money laundering and terrorism funding potentials, identification of Beneficial Owner, Walk in Customer (WIC) and screening of customers data with high-risk customers database.
- Continuous monitoring and analysis to identify the appropriateness between the customers' transactions with the customer CDD profiles, including business relations completion and transactions refusal for AML-CTF implementation.
- Identification and risk assessment on the Money Laundering and Terrorism Funding related to products, services, activities as well as new channel distribution networks applicable in all business and operating units.
- All products and services, activities as well as the existence of a new channel distribution network are reviewed first by the work unit in charge of Compliance and Risk Management before being implemented to ensure compliance with the implementation of the AML-CFT program;
- Identification and reporting of Suspicious Financial Transactions (LTKM), Cash Financial Transactions (LTKT), and Integrated Service User System (SIPESAT), Provision of Requests for Data and Information on Suspected



Terorisme (SIPENDAR) ke PPAK, Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) OJK modul APU-PPT dan Pelaporan Permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi PEDAL;

- f. Pengelolaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), yang dikeluarkan oleh Regulator dan melaporkannya kepada Mabes Polri dan OJK melalui SIGAP;
- g. Prosedur penyaringan karyawan baru dan pemantauan transaksi pegawai sebagai bagian dari penerapan *know your employee* (KYE);
- h. Mengikutsertakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan APU-PPT dalam program pelatihan dan sosialisasi terkait APU-PPT yang diselenggarakan oleh regulator maupun pihak eksternal lainnya;
- i. Melakukan pelatihan kepada Petugas Kantor Cabang dan Unit Kerja terkait dengan penerapan Program APU dan PPT; dan
- j. Penatausahaan dokumen CDD dan dokumen lainnya terkait APU-PPT minimal 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan nasabah.

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA APU-PPT

Dalam menjalankan fungsinya, Unit Pengelolaan APU-PPT melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan melalui Divisi Kepatuhan & Hukum. Saat ini Unit Pengelolaan APU-PPT Kantor Pusat terdiri dari pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman perbankan yang memadai mengenai penilaian dan mitigasi risiko terkait penerapan program APU-PPT. Mengingat jumlah Kantor Cabang cukup banyak, Bank menunjuk PIC APU-PPT dan *Officer* APU-PPT pada setiap Kantor Cabang yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU-PPT agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan berada dibawah koordinasi Unit Pengelolaan APU-PPT Kantor Pusat.

PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM PENERAPAN APU-PPT

Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi nasabah, Perseroan telah memiliki sistem aplikasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah, termasuk identifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Pengembangan aplikasi APU-PPT tersebut terus dikembangkan sejalan dengan kebutuhan Bank dan perubahan sistem dari regulator untuk mendukung kesiapan data, laporan dan proses analisa transaksi keuangan.

Terrorism Financing (SIPENDAR) to PPAK, OJK Online Reporting Application (APOLO) module APU- PPT and Reporting Requests from the Corruption Eradication Commission (KPK) through the PEDAL application;

- f. Management of the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (DPPSPM), issued by the Regulator and reporting them to Police Headquarters and OJK through SIGAP;
- g. Procedures for screening new employees and monitoring employee transactions as part of implementing *know your employee* (KYE);
- h. Involve officials who are responsible for the management of AML-CFT in training and socialization programs related to AML-CFT organized by regulators and other external parties;
- i. Conducting training to Branch Office Officers and Work Units related to the implementation of the APU and PPT Programs; and
- j. Administration of CDD documents and other documents related to APU-PPT at least 5 (five) years after the end of the business relationship with the customer.

ESTABLISHMENT OF AML -CTF UNIT

In implementing its functions, the AML-CTF Unit reports and responsible to the Compliance Director through the Compliance & Legal Division. Currently the AML-CTF Unit of Head Office consists of employees with adequate banking knowledge and experience on risk assessment and mitigation related to the AML CTF programs. Considering the large number of Branch Offices, the Bank appoints APU-PPT PIC and APU-PPT Officer at each Branch Office who are responsible for the implementation of the APU-PPT Program so that it runs in accordance with the provisions and is under the coordination of the Head Office APU-PPT Management Unit.

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM APPLICATION IN THE AML -CTF IMPLEMENTATION

To monitor the customers' profiles and transactions, the Company has in place app system that can identify, analyse, monitor and provide effective report on the customers' transaction characteristics, including suspicious financial transactions identification. The development of the APU-PPT application continues in line with the needs of the Bank and changes in the system from the regulator to support the availability of data, reports and financial transaction analysis processes.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN APU-PPT

Bank menerapkan *Know Your Employee* (KYE) terhadap pegawai baik sejak penerimaan awal maupun selama menjadi pegawai, diantaranya :

- Memenerapkan prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan pegawai baru (*pre employee screening*);
- Pengenalan dan pemantauan profil pegawai termasuk transaksi yang terindikasi mencurigakan yang dilakukan oleh pegawai.

Dalam rangka mengingatkan kompetensi yang memadai terhadap pegawai yang bertanggung jawab dalam penerapan program APU-PPT, Divisi yang membidangi fungsi kepatuhan bekerja sama dengan Divisi *Human Capital* dan Transformasi, secara berkala menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan pegawai pada program pelatihan/ sosialisasi bidang APU-PPT. Selain itu, khusus pegawai di Unit Pengelolaan APU-PPT diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan APU-PPT yang diselenggarakan pihak eksternal untuk meningkatkan kemampuan dalam dan kompetensinya melakukan analisa dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sepanjang tahun 2021, Perseroan melalui Unit Kerja Pengelolaan APU-PPT telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian Ketentuan Internal

Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan penerapan program APU-PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku, Bank telah menyampaikan ketentuan internal berkaitan dengan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU-PPT kepada seluruh jajaran organisasi melalui portal ketentuan internal, *e-mail* korporasi, sosialisasi, grup *whatsapp*, koordinasi langsung dengan unit kerja terkait yang melaksanakan penerapan program APU-PPT, dan *reminder* atas penyampaian kebijakan dan prosedur program APU-PPT secara berkala dengan menyesuaikan kebutuhannya.

PELATIHAN/SOSIALISASI APU-PPT

Bank telah melakukan pelatihan atau sosialisasi atas program APU-PPT diantaranya:

1. Melaksanakan pelatihan kepada Petugas di seluruh Kantor Cabang atas kebijakan/prosedur program APU-PPT termasuk pembahasan atas kasus/modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang sedang marak terjadi sehingga Kantor Cabang dapat memitigasi apabila terdapat kasus yang serupa;

AML-CTF HUMAN RESOURCES AND TRAININGS

The Bank implements the *Know Your Employee* (KYE) towards employees both from initial acceptance and during their tenure as employees, including:

- Implementing screening procedures for new employee recruitment (*pre employee screening*);
- Recognition and monitoring of employee profiles, including suspicious transactions carried out by employees.

To improve adequate competency for employees responsible in the AML-CTF program implementation, the Compliance Division cooperates with Human Capital and Transformation Division periodically to organize and/or invite employee to the AML-CTF program trainings/ dissemination. Moreover, the employees of AML-CTF Unit are provided the opportunity to participate in the AML-CTF trainings organized externally to improve the capabilities and competence in analysing and risk mitigation on money laundering and terrorism funding.

During 2021, the Company AML-CTF Unit has implemented various activities, as follows:

1. Internal Rules Dissemination

As part of effective internal control system and to ensure appropriate AML-CTF program application with prevailing policies and procedures, the Bank has conveyed internal provisions relating to the Policies and Procedures for the Implementation of the AML-CFT Program to all levels of the organization through the internal regulation portal, corporate *e-mail*, socialization, *whatsapp* groups, direct coordination with relevant work units implementing the AML-CFT program, and reminders. for the submission of policies and procedures for the APU-PPT program on a regular basis by adjusting to their needs.

AML-CTF TRAININGS/DISSEMINATION

The Bank has conducted training or outreach on the APU-PPT program including:

1. Carry out training for officers in all Branch Offices on the policies/procedures of the AML-CFT program including discussions on cases/modes of money laundering and/or terrorism financing that are currently on the rise so that Branch Offices can mitigate if there are similar cases;



2. Mengikutsertakan pejabat dan karyawan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan APU-PPT dalam program pelatihan/sosialisasi/webinar bidang APU-PPT baik yang diselenggarakan oleh Pihak Eksternal oleh pihak eksternal maupun oleh regulator;
3. Melakukan *reminder* atas ketentuan internal termasuk pemantauan yang harus dilakukan oleh Kantor Cabang melalui aplikasi APU-PPT dan pelaksanaan pengkinian data nasabah yang terus berjalan;

PENILAIAN RISIKO APU-PPT

Bank telah mengembangkan penilaian dengan metode pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) guna melakukan pengukuran risiko APU-PPT ditingkat nasabah. *Risk Based Approach* adalah pengukuran risiko APU dan PPT yang melekat pada masing-masing nasabah dengan menggunakan indikator-indikator yang antara lain mencakup identitas/profil nasabah, faktor geografis/negara maupun kegiatan usaha nasabah.

PELAPORAN KE PPATK DAN OJK

Pelaporan kepada PPATK, OJK, KPK, dan Aparat Penegak Hukum dalam rangka implementasi APU-PPT dilakukan oleh Unit Pengelolaan APU-PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction Report/CTR*) menggunakan Aplikasi GoAML;
2. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report/STR*) menggunakan Aplikasi GoAML;
3. Laporan Permintaan data dan informasi oleh PPATK terkait analisis (TPPU/TPPT);
4. Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT);
5. Laporan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) modul APUPPT;
6. Laporan pengayaan data Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR);
7. Laporan Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP);
8. Laporan Pengelolaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) ke Mabes POLRI;
9. Laporan Aplikasi Pertukaran Data Elektronik (PEDAL KPK);
10. Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian data Nasabah sesuai rencana pengkinian yang dilaporkan ke OJK.

PENILAIAN RISIKO APU-PPT

Bank telah mengembangkan penilaian dengan metode pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) guna melakukan pengukuran risiko APU-PPT ditingkat nasabah. *Risk Based Approach* adalah pengukuran risiko APU dan

2. Include officials and employees who are responsible for the management of AML-CFT in training/socialization/webinar programs in the AML-CFT field, both organized by External Parties by external parties and by regulators;
3. Perform reminders on internal regulations including monitoring that must be carried out by Branch Offices through the APU-PPT application and ongoing customer data updating;

AML -CTF RISK ASSESSMENT

The Bank has developed risk based approach assessment in order to implement AML-CTF risk measurement for the customers. The risk based approach is the AMLCTF risk measurement embedded into each customer by applying the indicators such as customers identity/profile, geographical/country factor as well as customer business activity.

REPORTING TO PPATK AND OJK

Reports to PPATK, OJK, KPK, and Law Enforcement Officials in the context of APU-PPT implementation are carried out by the APU-PPT Management Unit in accordance with applicable regulations, including:

1. Cash Transaction Report (CTR) using the GoAML Application;
2. Suspicious Transaction Report (STR) using the GoAML Application;
3. Reports on requests for data and information by PPATK related to analysis (TPPU/TPPT);
4. Integrated Service User Information System Report (SIPESAT);
5. OJK Online Reporting Application Report (APOLO) APUPPT module;
6. Report on data enrichment of the Information System for Suspected Terrorism Financing (SIPENDAR);
7. Report on the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program Information System (SIGAP);
8. Report on the Management of the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) to the POLRI Headquarters;
9. Electronic Data Exchange Application Report (KPK PEDAL);
10. Report on the Plan and Realization of Customer data updating according to the update plan reported to the OJK.

AML-CTF RISK ASSESSMENT

The Bank has developed an assessment using a risk-based approach to measure AML-CTF risk at the customer level. Risk Based Approach is a measurement of AML and CFT risk inherent in each customer by using indicators which include

PPT yang melekat pada masing-masing nasabah dengan menggunakan indikator-indikator yang antara lain mencakup identitas/profil Nasabah, faktor geografis/negara maupun kegiatan usaha nasabah.

PENGENDALIAN INTERNAL

Untuk memastikan bahwa penerapan program APU-PPT sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, Perseroan telah memiliki sistem pengendalian intern, baik yang bersifat fungsional maupun melekat yang dapat memastikan bahwa penerapan Program APU -PPT telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Divisi Audit Internal sebagai satuan kerja yang melaksanakan pengendalian internal secara berkesinambungan melakukan pengawasan, di mana pengawasan harian di cabang dilakukan oleh tim di bawahnya, yaitu Kontrol Internal Cabang (KIC).

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan program APU-PPT

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan program APU-PPT telah dilakukan diantaranya, melalui persetujuan atas kebijakan dan prosedur program APU-PPT, mendukung pengembangan aplikasi APU-PPT, mengevaluasi pelaksanaan program APU-PPT secara berkala melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh Unit Kerja Pengelolaan APU-PPT dan rapat rutin membahas perkembangan penerapan APU-PPT.

Penilaian Penerapan Program APU-PPT oleh Pihak Eksternal

Pada bulan November 2021, Penerapan Program APU-PPT Bank Banten mendapatkan kategori Sangat Baik "A" berdasarkan penilaian Financial Integrity Rating (FIR) on Money Laundering and Terrorist Financing yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK).

Manajemen Risiko

Risk Management

Manajemen Risiko Perseroan bertujuan untuk mengelola setiap risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mitigasi risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional Perusahaan.

Semakin kompleksnya usaha dan aktivitas yang dilakukan Perseroan, berakibat semakin kompleksnya risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko menjadi suatu kebutuhan

the identity/profile of the Customer, geographical/country factors and the customer's business activities.

INTERNAL CONTROL

To ensure appropriate implementation of AML CTF program with the stipulated policies, the Company has in place the internal control system both functional or integrated that is able to ensure the appropriateness of AML-CTF program application with the set policies and procedures.

The Internal Audit Division is a unit in charge for internal control, continuously conduct the oversight, where the daily supervisory at the branch is conducted by its team, namely Branch Internal Control (BIC).

Board of Directors and Commissioners Oversight on AML-CTF Program

Active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners on the implementation of the AML-CFT program has been carried out including, through approval of the policies and procedures for the AML-CFT program, supporting the development of the AML-CFT application, evaluating the implementation of the AML-CFT program on a regular basis through reports submitted by the AML-CFT Management Work Unit and regular meetings to discuss the progress of AML-CFT implementation.

Assessment of AML-CTF Program Implementation by External Party

In November 2021, Bank Banten's AML-CFT Program Implementation received a Very Good category "A" based on the Financial Integrity Rating (FIR) on Money Laundering and Terrorist Financing conducted by the Financial and Transaction Analysis Reporting Center (PPATK).

Risk Management in the Company aims to manage every risk by identifying, analyzing and mitigating risks that may arise from the Company's operations.

The increasingly complex business and activities undertaken by the Company, resulting in increasingly complex risks faced. As such, the function of identification, measurement, monitoring and risk control becomes a requirement that



yang harus dipenuhi agar segala aktivitas usaha yang dilakukan Perseroan tidak menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, Bank Banten senantiasa terus melakukan penyempurnaan kualitas kebijakan, sistem dan proses kerja untuk memastikan pengelolaan risiko yang sesuai dengan perkembangan pasar, serta senantiasa mengakomodasi perubahan peraturan.

Implementasi manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh jajaran manajemen sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Tata Kelola Manajemen Risiko

Risk Governance diperlukan agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif, dan sebagai bagian dari sistem Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) yang menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* sesuai dengan tujuan bisnis Bank. *Risk Governance* juga mengatur dengan jelas peranan tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, keterkaitan antar fungsi pengelolaan risiko, serta penetapan kebijakan yang memastikan bahwa risiko dikelola dengan baik. Di samping itu, penerapan budaya manajemen risiko pada seluruh *risk taking* unit menjadi prioritas sehingga seluruh insan peduli terhadap risiko.

Sistem Manajemen Risiko

Perseroan menerapkan pengawasan inklusif dari seluruh elemen struktur organisasi meliputi pengawasan aktif pengurus yang meliputi pengawasan aktif pengurus Perseroan, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi dan pengendalian internal yang menyeluruh.

Dalam mencapai sasaran dan terukurnya toleransi risiko sehingga mencapai kesinambungan usaha yang optimal, maka Perseroan selalu berusaha memperkuat kerangka dan proses manajemen risiko di pada setiap pengelolaan risiko dan proses bisnis dengan melakukan penyempurnaan atas kebijakan, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Banten telah menetapkan kerangka manajemen risiko berdasarkan 4(empat) bagian, meliputi:

1. Bagan *Risk Appetite and Tolerance* adalah bahwa setiap aktivitas bisnis bank telah diatur dan termuat dalam *Risk Appetite and tolerance*, sehingga terciptanya pendapatan Bank yang sesuai dengan jumlah risiko yang dapat diterima oleh Perseroan.

must be fulfilled so that all business activities conducted by Company do not cause loss. To that end, Company continues to make improvements in the quality of policies, systems and work processes to ensure risk management in accordance with market developments, and always accommodate regulatory changes.

Implementation of risk management is the responsibility of all levels of management in accordance with their respective functions and authorities.

Risk Governance

Risk Governance is required for effective implementation of risk management, and as part of the Corporate Governance system that establishes risk appetite and risk tolerance in accordance with the Bank's business objectives. Risk Governance also clearly defines roles and responsibilities, decision-making processes, linkages among risk management functions, and policy decisions that ensure that risks are well managed. In addition, Risk Governance also stipulates the importance of applying risk management culture to all working units in the Bank.

Risk Management System

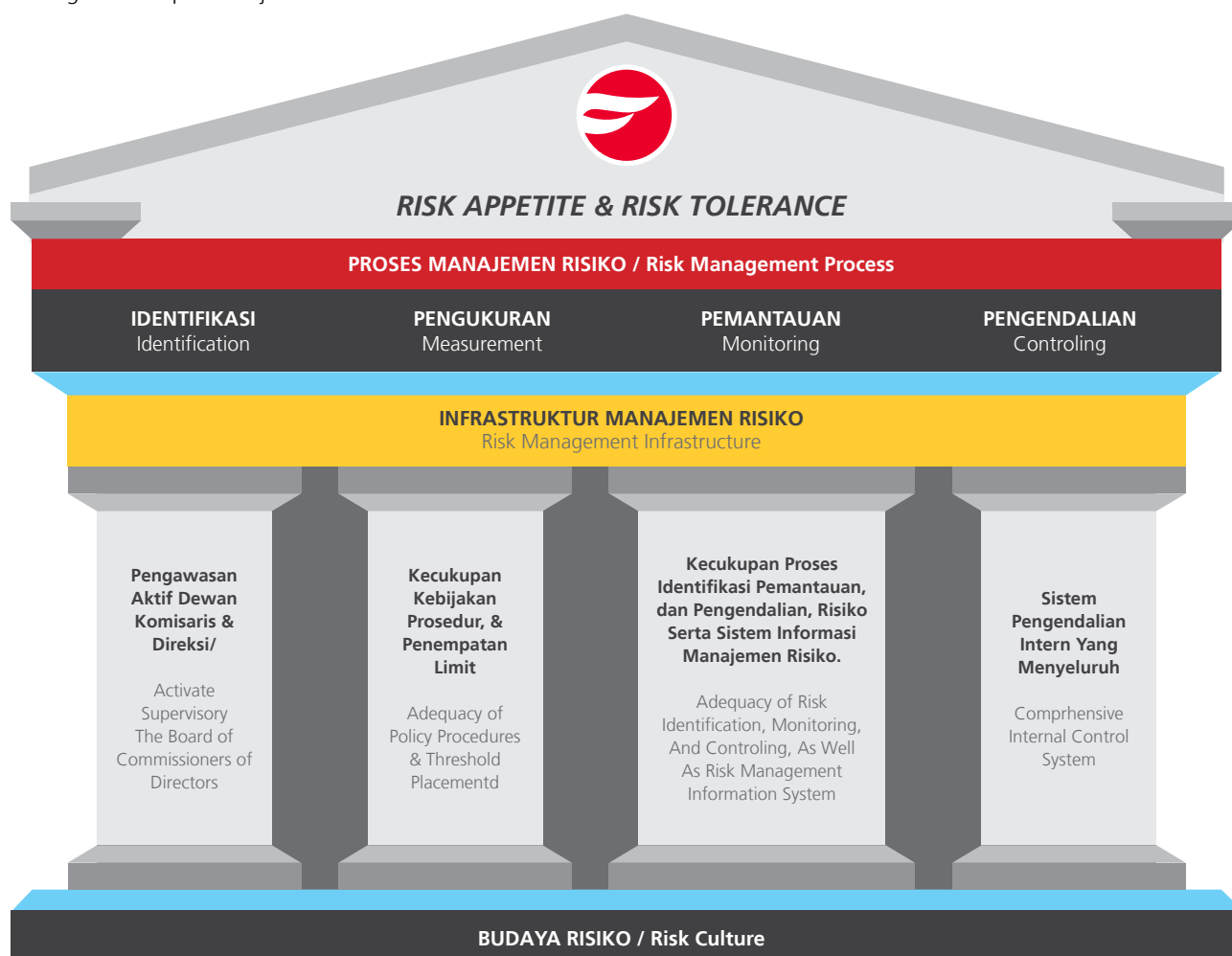
The Company implements inclusive oversight of all elements of the organizational structure, including active supervision of the management which includes active supervision of the Company management, adequacy of policies, procedures, and threshold setting, adequacy of identification processes, measurement, monitoring and risk control as well as information systems and internal control.

In achieving the target and measurable risk tolerance, hence to achieve optimum business continuity, the Company strives to strengthen the risk management framework and processes in every risk management and business process by making improvements to policies, infrastructure, and the quality of human resources.

To implement Risk Management, the Bank has established a risk management framework based on 4 (four) pillars of risk management implementation in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016. The pillars are:

1. Risk Appetite and Tolerance Diagram is that every bank business activity has been regulated and stated in the Risk Appetite and tolerance, hence the bank revenues is created in accordance with the total risk that can be accepted by the Company.

2. Bagan Proses Manajemen Risiko adalah meningkatkan tugas dan fungsi manajemen risiko dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di seluruh aktivitas bisnis bank sehingga risiko dapat diminimalisasi sejak dini.
 3. Bagan Infrastruktur Manajemen Risiko adalah meningkatkan sistem pengendalian internal Bank yang komprehensif, yang terdiri dari 4 (empat) pilar penerapan manajemen risiko, yaitu:
 - a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
 4. Bagan Budaya Risiko adalah mengembangkan kebiasaan sadar risiko (*risk awareness*), yang bertujuan membangun budaya risiko yang kuat, mengenali risiko sejak dini, menyadari bahwa risiko melekat pada setiap aktivitas bisnis Bank serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi maupun Kebijakan dan Pedoman Bank.
2. Risk Management Process Diagram is the improvement of risk management duties and function for risk identification, measurement, monitoring and control in all bank business activities hence the risk can be minimized early.
 3. Risk Management Infrastructure Diagram is the improvement of the Bank comprehensive internal control system from 4 (four) risk management implementation pillars, namely:
 - a. Active supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
 - b. Adequacy of policies, procedures and limit setting;
 - c. Adequacy of identification process, measurement, monitoring and risk control, and Risk Management information system; and
 - d. Comprehensive internal control system
 4. Risk Culture Diagram is the development of risk awareness to develop strong risk culture, early risk detection, awareness that risk is embedded in every bank business activity and ensure compliance with the Bank regulation, Policies and Guidelines.



Jenis Risiko Perseroan dan Mitigasi Risiko

Jenis risiko adalah pengelompokan potensi kerugian yang material, dan yang mungkin timbul dalam kegiatan atau area yang berbeda dalam Perseroan. Secara umum Perseroan mengidentifikasi beberapa risiko utama yang berpotensi memiliki dampak terhadap aktivitas operasional Perseroan.

Risiko-risiko yang dihadapi Perseroan antara lain adalah:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Pasar
4. Risiko Operasional
5. Risiko Kepatuhan
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Strategis

Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan dirumuskan langkah mitigasinya agar dampak yang timbul dapat terkendali. Berikut penjelasan dari masing-masing risiko serta mitigasi yang dilakukan Perseroan.

RISIKO KREDIT

Risiko Kredit merupakan risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Peringkat komposit risiko kredit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam bidang kredit.

Per 31 Desember 2021, Risiko kredit secara komposit tingkat risikonya adalah *Moderate*, dengan *inherent risk* adalah *Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah *Fair*.

Komposisi kredit Perseroan terkonsentrasi pada segmen konsumen atau sektor ekonomi rumah tangga. Perseroan terus berupaya menjaga posisi NPL sesuai ketentuan di tengah pandemi COVID-19. NPL nett pada periode ini sebesar 1,38% atau turun 3,13% dari periode Desember 2020 sebesar 4,51%. Bank melakukan restruktur kepada debitur-debitur berdampak COVID-19 dan terus mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah.

Penerapan Manajemen Risiko

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat secara berkala untuk membahas kebijakan dan keputusan strategis Bank. Untuk itu, Komite-komite dibentuk sebagai wadah Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pejabat Senior terkait untuk membahas hal yang spesifik.

Company's Risk Types & Risks Mitigation

Risk type is a grouping of potential losses which are material, and which may arise in different activities or areas of the company. In general the Company identifies some of the main risks that could potentially impact the Company's operational activities.

The following are risks encountered by the Company:

1. Credit Risk
2. Liquidity Risk
3. Market Risk
4. Operational Risk
5. Compliance Risk
6. Legal Risk
7. Reputation Risk
8. Strategic Risk

Such risks shall be well managed and the mitigation of each risk must be formulated hence the impacts that arise can be controlled. The following are elaboration on each risk and its mitigation efforts by the Company.

CREDIT RISK

Credit risk represents the risk of loss that may occur due to the failure of the counterparty in fulfilling its obligations. The composite rating of credit risk is the final rating of the Bank Rating in the credit sector.

As of 31 December 2021, the credit risk composite rating was at Moderate, with inherent risk at Moderate and the Quality of Credit Risk Management Implementation was at Fair.

The Company loans composition were concentrated on the consumer segment or household economic sector. Amid the COVID-19 pandemic, the Company strives to maintain NPL position according to the rules. Net NPL of the period was 1,38% or decreased by 3,13% from December 2020 period of 4.51%. The Bank carried out restructuring for the borrowers impacted by the COVID-19 and continued to resolve the non performing loans.

Risk Management Implementation

1. Board of Commissioners and Board of Directors Active Supervision
The BOC and BOD convene regular meeting to discuss Bank's policies and strategic decisions. To that end, the Committees are formed as a forum for Board of Commissioners and Directors, as well as Senior Executives



Komite-komite dalam lingkup Dewan Komisaris, yaitu komite Manajemen Risiko dan Komite Kebijakan Kredit Rapat-rapat komite telah dilaksanakan sesuai ketentuan internal Perseroan.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Perseroan telah melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan penetapan limit pada aktivitas terkait risiko kredit.
3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko
 - a. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis kelompok portofolio nasabah atas kredit yang diberikan dan *counter party* atas *money market*
 - b. Pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi yang terekspos risiko kredit, kondisi keuangan debitur, jangka waktu kredit yang dikaitkan dengan perubahan potensial dipasar, aspek jaminan serta kemampuan Perseroan untuk menyerap potensi kegagalan
 - c. Pemantauan risiko dilakukan mulai dari *Risk Taking* Unit sebagai unit pengelola, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sampai dengan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala dan terus menerus. Perseroan juga telah membuat *Dashboard System* untuk memantau kinerja aktivitas perkreditan dan kualitas kredit yang telah diberikan.
 - d. Pengendalian Risiko dilaksanakan melalui beberapa cara, seperti mitigasi risiko, pengelolaan posisi dan risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan risiko konsentrasi dalam rencana tahunan Perseroan, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dan analisis konsentrasi secara berkala, yang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
4. Sistem Pengendalian Internal

Beberapa langkah pengendalian internal yang dilakukan oleh Perseroan terkait dengan risiko kredit adalah sebagai berikut:

 - a. Menerapkan *Proactive Risk Management* sebagai upaya melakukan mitigasi risiko kredit;
 - b. Pemberian Batas Wewenang Memberi Kredit (BWMK) secara efektif;
 - c. Pembentukan Komite Kredit Kantor Pusat untuk Kredit Komersial;
 - d. Peningkatan Peran Administrasi Kredit Kantor Pusat;
 - e. Pelatihan terkait Risiko Kredit; dan
 - f. Mempercepat penyelesaian *Non-Performing Loan*(NPL).

concerned to discuss specific issues. The Committees within the scope of the Board of Commissioners, the Risk Oversight Committee and the Audit Committee. Committee meetings have been conducted in accordance with the Company's internal rules.

2. Adequacy of Policies, Procedures and Determination of Limit

The Bank has updated its policies, procedures and limits on activities related to credit risk.
3. Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Control
 - a. The risk identification process is performed by analysing customer portfolio groups on loans and counterparty of money market.
 - b. Measurements are made taking into account the characteristics of each type of transactions that are exposed to credit risk, the financial condition of the debtor, the loan period associated with potential changes in the market, the guarantee aspect and the Company's ability to absorb potential failure.
 - c. Risk monitoring shall be conducted starting from the Risk-Taking Unit as a management unit, Risk Management Unit (SKMR) to the Risk Management Committee, which is conducted periodically and continuous!The Company has also created a "Dashboard System" to monitor the performance of credit activities and the given credit quality.
 - d. Risk control is carried out in several ways, such as risk mitigation, active positioning and risk management, targeting of concentration risk limits in the Company's annual plan, determining the level of authority in the consent and periodic approval process of concentration, which is at least once a year.
4. Internal Control System

Some of the Company's internal control measures related to credit risk are as follows:

 - a. Implement Proactive Risk Management as an effort to mitigate credit risk;
 - b. The granting of the Limit on the Authority to Provide Credit (BWMK) selectively;
 - c. Establishment of the Head Office Credit Committee for Commercial Loans;
 - d. Improved Role of Head Office Credit Administration;
 - e. Training on Credit Risk; and
 - f. Accelerate the settlement of Non-Performing Loan (NPL).

Mitigasi Risiko Kredit

Risiko Kredit terus melakukan pengembangan sistem dan informasi dalam menguatkan kebijakan pada aktivitas perkreditan, *treasury* dan investasi pada aktivitas perkreditan, pembiayaan *trade finance*, pendanaan dan instrumen hutang. Pemantauan dan pengukuran secara berkelanjutan terhadap aktivitas perkreditan agar memenuhi *risk appetite* dan *risk tolerance*. Upaya tersebut dilakukan melalui *monitoring* atas pemenuhan modal minimum, konsentrasi kredit, portofolio kredit bank, BMPK, NPL kredit, segmen kredit, dan sektor ekonomi.

RISIKO PASAR DAN LIKUIDITAS

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Pengelolaan risiko pasar merupakan sebuah proses yang dimulai dari atas ke bawah di dalam organisasi Perseroan, dimulai dari Komite Manajemen Risiko, *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dan manajemen senior secara aktif terlibat dalam perencanaan, persetujuan, peninjauan, dan penilaian risiko pasar, dan likuiditas.

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Penerapan Manajemen Risiko

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Peran Dewan Komisaris terkait manajemen risiko pasar dan likuiditas, antara lain: mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko pasar dan likuiditas melalui rapat dengan Direksi dan memutus permohonan Direksi terkait transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
 - b. Peran Direksi terkait manajemen risiko pasar dan likuiditas, antara lain: melakukan evaluasi strategi manajemen risiko pasar dan likuiditas melalui rapat *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dan rapat Komite Manajemen Risiko.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit
 \Bank telah melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan penetapan limit pada aktivitas terkait risiko pasar dan likuiditas.

Credit Risk Mitigation

Credit Risk continues to implement system and information development in strengthening credit policies and activities, treasury and investment in credit activities, trade finance, funding and debt instruments. Continuous monitoring and measurement on credit activities to fulfil risk appetite and risk tolerance. The efforts are carried out through monitoring on the fulfilment of minimum capital, credit concentration, bank credit portfolio, LLL, NPL, credit segment and economic sectors.

MARKET RISK AND LIQUIDITY RISK

Market Risk is the Risk in the balance sheet position and the administrative account, including derivative transactions, due to the overall changes in market conditions, including the risk of changes in the option price. Market risk management is a top-down process within the Company's organization, starting from the Risk Management Committee, the Assets and Liabilities Committee (ALCO) and senior management are actively involved in planning, approving, reviewing and valuing market and liquidity risks.

Liquidity Risk is the risk due to the inability of the Bank to meet obligations due from cash flow funding sources and/or from high quality liquidity assets that can be mortgaged, without disrupting the activities and financial condition of the Company.

Risk Management Implementation

1. Board of Commissioners and Board of Directors Active Supervision
 - a. The Role of the Board of Commissioners regarding market risk and liquidity management, among others: to evaluate the Board of Directors accountability of the implementation of market risk and liquidity management through meetings with the Board of Directors and to decide upon the application of the Board of Directors regarding transactions that require the approval of the Board of Commissioners.
 - b. Role of Directors related to market risk and liquidity management, among others: to evaluate market risk and liquidity risk management strategies through Assets and Liabilities Committee (ALCO) meetings and Risk Management Committee meetings.
2. Adequacy of Policies, Procedures and Determination of Limit
 The Bank has updated its policies, procedures and limits on activities related to market risk and liquidity.

3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

- Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko yang dapat mempengaruhi risiko pasar dan likuiditas;
- Pengukuran dilakukan melalui beberapa metode di antaranya dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas, profil maturitas, dan proyeksi arus kas, rasio ALNCD, ALDPK, dan ALNCF, rasio surat berharga dengan melakukan *stress test* terhadap suku bunga dan likuiditas;
- Pemantauan risiko pasar dan likuiditas dilakukan baik oleh Unit Bisnis Kredit dan *Funding, Treasury* maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan ALCO. Untuk pemantauan yang dilakukan oleh SKMR dilaporkan kepada Direksi dan unit kerja terkait disertai dengan *Dashboard* dan *Red Flag*;
- Perseroan mencatatkan portofolio Surat Berharga *Trading* ke dalam neraca dan *profil/Loss*-nya ke dalam laba/rugi serta menghitung ke dalam ATMR pasar;
- Pengukuran *Interest Rate Risk In Banking* (IRRB) dilakukan atas *repricing gap* suku bunga;
- Pengendalian risiko telah dilakukan dengan *pricing* suku bunga, baik kredit maupun Dana Pihak Ketiga (DPK).

4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal pada risiko pasar dan likuiditas, antara lain:

- Proactive Risk Management*, yaitu adanya bagian risiko pasar dan likuiditas yang melakukan *monitoring* dan bersifat independen dan *risk taking unit*, yaitu terkait kredit, pendanaan dan *treasury*;
- Pemberian limit transaksi terkait aktivitas *treasury*, yaitu transaksi pasar uang antar bank, transaksi surat berharga dan transaksi dengan Bank Indonesia;
- Audit reguler tahunan, audit insidental, dan remote audit oleh DAI.

Mitigasi Risiko

- Risiko Pasar, melakukan pemantauan terpadu atas kondisi yang dibentuk oleh risiko pasar di dalamnya meliputi dana pihak ketiga (DPK), aktiva likuid, pasiva likuid, rasio *funding liquidity risk*, pemenuhan terhadap ketentuan *liquidity buffer*, posisi repo, posisi *money market line*, stress tes dan likuiditas beserta identifikasi dan pemantauan risiko pasar. Mendukung langkah pemantauan terhadap risiko pasar juga dilakukan melalui *monthly dashboard market & liquidity report*.

3. Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Control

- The risk identification process is conducted by analysing the sources of risk that may affect market risk and liquidity.
- Measurement is done through several methods such as using liquidity ratios, maturity profile, and cash flow projection, ALNCD, ALDPK, and ALNCF ratios, own securities ratio in trading position, as well as stress test on interest rate and liquidity.
- Monitoring of market risk and liquidity shall be conducted by Credit Business Unit and Funding, Treasury or by Risk Management Unit (SKMR) and ALCO. The monitoring by SKMR is reported to the Board of Directors and relevant work unit including Dashboard and Red Flag.
- The Company registered the Securities Trading portfolio into its balance sheet and profit/loss into profit/loss and calculated into the market ATMR.
- Interest Rate Risk in Banking Book (IRRB) measurement is performed on the interest rate-repricing gap.
- Risk control has been performed with interest rate pricing, both credit and Third -Party Fund (DPK).

4. Internal Control System

Internal control system on market risk and liquidity, among others:

- Proactive Risk Management, which is part of market risk and liquidity monitoring and independent of risk-taking unit, which is related to credit, funding and treasury.
- Provision of transaction limits related to treasury activities, i.e. interbank money market transactions, securities transactions and transactions with Bank Indonesia.
- Annual audits, in-house audits, and remote audits by DAI.

Risk Mitigation

- Market Risk, conducts an integrated monitoring of conditions set by market risk including third party funds (TPF), liquid activities, liquid liabilities, funding liquidity risk ratio, compliance with liquidity buffer requirements, repo positions, money market line positions, stress tests and liquidity, as well as identification and monitoring of market risk. Monitoring toward market risk is also carried out through a monthly dashboard market & liquidity report.



2. Risiko Likuiditas, Bank secara aktif melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan melakukan dan mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan antara lain sebagai berikut:
 - a. Mendukung penguatan fungsi ALCO terkait risiko likuiditas dan pasar
 - b. Mendukung program-program untuk penguatan likuiditas
 - c. Melakukan pemantauan terpadu pada risiko likuiditas melalui otomatisasi *daily reporting system liquidity*.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Penerapan Manajemen Risiko

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Peran Dewan Komisaris terkait manajemen risiko operasional adalah memastikan bahwa kebijakan remunerasi Perseroan sesuai dengan Strategi Manajemen Risiko Perseroan dan mampu memantau profil risiko operasional;
 - b. Peran Direksi terkait manajemen risiko operasional adalah mendorong terciptanya budaya pengungkapan secara objektif atas risiko operasional di seluruh elemen organisasi, menetapkan kebijakan *reward* yang efektif dan terintegrasi dalam sistem penilaian kerja serta menetapkan kode etik kepada seluruh pegawai.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Perseroan telah memutakhirkan/menyusun beberapa ketentuan internal terkait operasional Bank.
3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko
 - a. Aspek utama yang digunakan untuk melakukan identifikasi risiko operasional secara umum terdapat pada risiko inheren yang di dalamnya terkandung karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, *fraud* dan kejadian eksternal;
 - b. Pengukuran Risiko Operasional menggunakan beberapa metode, yaitu penilaian sendiri (*self assesment*) untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan pada lingkungan risiko operasional, *risk mapping* untuk memetakan jenis risiko atas aktivitas fungsional, struktur organisasi dan alur proses transaksi, indikator risiko utama (*key risk indicator*) untuk pengukuran yang

2. Liquidity Risk, the Bank actively mitigates a liquidity risk by implementing and carrying out the following policies:
 - a. Supporting the strengthening of ALCO's functions related to liquidity and market risks
 - b. Supporting programs to strengthen liquidity
 - c. Perform integrated monitoring on liquidity risk through an automated daily reporting system liquidity.

OPERATIONAL RISK

Operational risk is the risk due to the inadequacy and/or non-functioning of internal processes, human error, system failure, and/or the existence of external events affecting the Company operations.

Risk Management Implementation

1. Board of Commissioners and Board of Directors Active Supervision
 - a. The Role of the Board of Commissioners relating to operational risk management is to ensure that the Company's remuneration policy complies with the Company's Risk Management Strategy and monitors the operational risk profile.
 - b. The role of the Board of Directors in relation to operational risk management is to encourage the creation of an objective disclosure culture over operational risk across all organizational elements, establishing an effective and integrated reward policy in the performance appraisal system and establishing a code of conduct for all employees.
2. Adequacy of Policies, Procedures and Determination of Limit The Company has updated the Bank's operational policies and procedures.
3. Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Control
 - a. The main aspects used to identify operational risks in general are at inherent risks in which the characteristics and complexity of business, human resources, information technology, fraud and external events are present.
 - b. Operational Risk Measurement uses several methods, namely self-assessment to identify weaknesses and strengths in the operational risk environment, risk mapping to map the types of risks of functional activities, organizational structures and transaction processing flow, key risk indicator for general measurements, comparing existing activities with the

bersifat umum, membandingkan antara aktivitas yang ada dengan prosedur yang dimiliki serta pengumpulan data dan analisa atas kejadian yang ditemukan oleh Kontrol Intern Cabang atau Divisi Audit Intern maupun oleh *risk taking unit*;

- c. Pemantauan risiko dilakukan melalui kejadian risiko yang dilaporkan, baik oleh unit kerja pelaksana maupun dari unit kerja pengawas (Divisi Audit Intern dan Kontrol Internal Cabang);
 - d. Pengendalian risiko dilaksanakan melalui pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur, dan pengawasan atas aktivitas operasional. Terkait dengan pengamanan transaksi *core banking*, Perseroan melakukan mitigasi risiko dengan mengeluarkan ketentuan yang mengatur penggunaan *User ID* dan *Password*;
4. Sistem Pengendalian Internal
- Sistem pengendalian internal dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko operasional dilakukan dengan cara:
- a. Pengendalian internal dilakukan secara berkala oleh Kontrol Internal Cabang (di bawah koordinasi Divisi Audit Internal) dan Divisi Audit Internal (DAI). Bank juga memiliki pedoman strategi anti *fraud* sebagai salah satu penguatan pilar pengendalian internal;
 - b. Untuk menjaga keamanan informasi, Perseroan menerapkan joint domain atas komputer yang ada di Bank sehingga aktivitas komputer dapat termonitor dengan baik.

Mitigasi Risiko

Bank selalu dan akan terus menerapkan *four eyes principal* serta penetapan limit pada seluruh pelaksanaan operasional Bank. Dalam penerapan dan pengembangan teknologi, Perseroan selalu melaksanakan *System Development Life Cycle* serta pelaksanaan manajemen proyek sesuai dengan ketentuan dan *best practise*. Perseroan terus meningkatkan kualitas pengukuran, identifikasi, pemantauan dan pengendalian risiko operasional dengan akan membuat *Risk Control Self-Assessment (RCSA)/Operational Risk Self-Assessment (ORSA)*, *Lost Event Database (LED)*, dan *Key Risk Indicator (KRI)*. Dalam pengelolaan risiko operasional di dalamnya pemantauan terhadap *fraud*, *turn over* karyawan, pelatihan karyawan, sertifikasi manajemen risiko, penghitungan ATMR risiko operasional.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh karena Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan regulator lainnya yang berlaku. Contohnya adalah Kewajiban Pemenuhan Modal

procedures held and data collection and analysis of events discovered by Branch Internal Control or SKAI or by risk taking unit.

- c. Risk monitoring is conducted through reported risk events, either by the implementing unit or from the regulatory unit (SKAI and Branch Internal Control).
- d. Risk control is implemented through updating of policies and procedures, and oversight of operational activities. With regard to securing core banking transactions, the Company mitigates risk by issuing provisions governing the use of User ID and Password;

4. Internal Control System

Internal control system in support of operational risk management implementation is carried out by:

- a. Internal control is carried out periodically by Internal Controls Branch and Internal Audit Unit (IAU). The Bank also complements the anti-fraud strategy guidelines also added as one of the strengthening of the internal control pillars.
- b. To maintain information security, Company applies joint domain on computer in Bank so that computer activity can be monitored properly.

Risk Mitigation

The Bank strives and will continue to apply four eyes principal and sets the thresholds in all of the Bank's operations. In the application and development of technology, the Company always implements the System Development Life Cycle as well as the implementation of project management in accordance with the stipulations and best practices. The Bank continues to improve the quality of measurement, identification, monitoring and control of operational risk by developing a Risk Control Self-Assessment (RCSA)/Operational Risk Self-Assessment (ORSA), Lost Event Database (LED), and Key Risk Indicator (KRI). In managing operational risk, monitoring of fraud, employee turnover, employee training, risk management certification, calculation of RWA for operational risk are carried out.

COMPLIANCE RISK

Compliance risk is the risk caused by the Company's failure to comply with or not comply with or not enforce other applicable laws and regulatory requirements. Examples of Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR), Earning Assets



Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM) maupun ketentuan lainnya.

Penerapan Manajemen Risiko

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
Peran Dewan Komisaris dan Direksi terkait manajemen risiko kepatuhan adalah dengan memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan dengan terintegrasi dengan Manajemen Risiko lain yang berdampak pada Profil Risiko Kepatuhan Bank serta memastikan setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan dengan efektif dan termonitor guna tindakan perbaikan.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit
Perseroan telah melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan penetapan limit pada aktivitas terkait risiko kepatuhan antara lain dengan menerbitkan ketentuan yang mengatur mengenai Penegasan Implementasi Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Penegasan transaksi tunai dan non tunai serta pemindahbukuan.
3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko
 - a. Proses identifikasi risiko kepatuhan di mulai dari pengkajian pada kecukupan kebijakan dan prosedur, serta pelaksanaan aktivitas operasional yang terkait dengan risiko kepatuhan, termasuk denda/penalti yang diberikan oleh Otoritas;
 - b. Pengukuran dilakukan melalui besarnya denda/penalti yang terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan dalam satu periode dan pengenaan sanksi yang diberikan oleh Otoritas ataupun Pemerintah;
 - c. Pemantauan risiko kepatuhan dilakukan dengan membandingkan antara produk/layanan/aktivitas yang dikeluarkan/dilakukan oleh Perseroan dengan peraturan/undang-undang yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran;
 - d. Pengendalian risiko dilaksanakan melalui pembuatan kajian atas kebijakan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas (OJK, Bank Indonesia, dan lain-lain) dan Badan Pemerintah lainnya, terutama yang terkait dengan Perseroan dan disampaikan kepada manajemen secara berkala.
4. Sistem Pengendalian Internal
Divisi Kepatuhan dan Hukum membuat daftar pelaporan yang telah dibuat oleh Unit Kerja terkait pelaporan dan disampaikan kepada Direksi secara berkala.

Quality or Legal Lending Limit (LLL), Statutory Reserves (GWM) as well as other provisions.

Risk Management Implementation

1. Board of Commissioners and Board of Directors Active Supervision
The role of the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding compliance risk management is to ensure that Risk Management for Compliance Risk is conducted in an integrated manner with other Risk Management that impacts the Bank's Compliance Risk Profile and ensures that compliance issues are effectively addressed and monitored for corrective action.
2. Adequacy of Policies, Procedures and Determination of Limit
The Company has updated the policies, procedures and limits on activities related to compliance risk by issuing provisions regulating the Implementation of the Implementation of Deposit Insurance Institution Provisions (LPS) as well as the affirmation of cash and non-cash transactions and book entry.
3. Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Control
 - a. The process of identifying compliance risks begins with an assessment of the adequacy of policies and procedures, as well as the implementation of operational activities related to compliance risks, including penalties granted by the Regulator.
 - b. Measurements are made through the amount of fines/penalties incurred as a result of a violation committed by the Company in a period, either by the regulator, OJK or the government.
 - c. Compliance risk monitoring is performed by comparing the products/services/activities issued/conducted by Company with the prevailing laws/regulations so that no violations occur.
 - d. Risk control is exercised through the review of policies or provisions issued by the Regulators (OJK, Bank Indonesia, etc) and other Government Agencies, particularly those relating to the Company and submitted to management on a regular basis.
4. Internal Control System
The compliance work unit creates a reporting list that has been created by the reporting work unit and submitted to management on a regular basis.

Mitigasi Risiko

Bank selalu berupaya untuk mematuhi ketentuan BI dan regulator lainnya antara lain dengan identifikasi dan pengukuran risiko melalui total biaya/beban yang timbul dari sanksi dan/atau denda dari pihak otoritas berdasarkan neraca keuangan Perseroan serta *mapping* rasio kepatuhan Bank terhadap regulator.

RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko yang muncul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yudiris. Risiko hukum melekat pada produk dan layanan yang ditawarkan. Oleh karenanya, pengkajian terhadap produk dan layanan telah dilakukan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin keberadaan perlindungan konsumen yang memadai dan terjaganya kepentingan Perseroan.

Penerapan Manajemen Risiko

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Peran Dewan Komisaris terkait manajemen risiko hukum adalah memastikan *legal governance* berjalan sesuai dengan standar yang digunakan;
 - b. Peran Direksi terkait manajemen risiko hukum adalah mendorong mekanisme komunikasi yang efektif dan memastikan berjalannya *legal consistency* serta *legal completeness* pada setiap kegiatan usaha.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan, Penetapan Limit Bank telah melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan penetapan limit pada aktivitas terkait risiko hukum, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Kredit untuk persiapan Lelang Agunan.
3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko
 - a. Proses identifikasi risiko hukum dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya risiko tersebut yang melekat pada faktor litigasi, kelemahan perikatan dan ketiadaan/perubahan perundang-undangan;
 - b. Pengukuran risiko hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif seperti kerugian karena tuntutan pihak ketiga dan denda dari regulator;
 - c. Pemantauan risiko dilakukan oleh unit kerja legal dan SKMR secara berkala atas dampak perubahan suatu ketentuan atau peraturan terhadap eksposur risiko hukum Bank;
 - d. Pengelolaan risiko hukum dilakukan sejak rencana penerbitan produk dan aktivitas baru dengan cara mengidentifikasi risiko hukum yang melekat pada

Risk Mitigation

The Bank strives to comply with BI and other regulators stipulations, among others, by identifying and measuring risk through the total costs/expenses that derive from sanctions and/or fines from the regulators based on the Company's balance sheet as well as the mapping of the Bank's compliance ratio to regulators.

LEGAL RISK

Legal risks are risks arising from lawsuits and/or weakness of juridical aspects. Legal risks are attached to the products and services offered. Consequently, product and service assessments have been conducted in accordance with applicable laws and regulations to ensure the existence of adequate consumer protection and the maintenance of Company interests.

Risk Management Implementation

1. Active Supervision of BOC and BOD
 - a. The role of the Board of Commissioners regarding legal risk management is to ensure that legal governance runs according to the standards used;
 - b. The role of the Board of Directors regarding legal risk management is to encourage effective communication mechanisms and ensure legal consistency and legal completeness in all business activities.
2. Adequacy of Policies, Procedures and Determination of Limit The Bank has updated the policies, procedures and limits on activities related to legal risks, among others: provisions regulating the Completeness of Completeness of Credit Documents for the preparation of Collateral Auction.
3. Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Control
 - a. The process of identifying legal risk is carried out by analysing the factors causing the risk inherent in the litigation factor, the weakness of engagement and the absence/change of legislation.
 - b. Measurement of legal risk is done through qualitative and quantitative approaches such as losses due to third party demands and penalties from regulators;
 - c. Risk monitoring is performed by the legal work unit and SKMR periodically on the impact of changes in any provision or regulation on the Bank's legal risk exposure.
 - d. Legal risk management is conducted since the issuance of new products and activities by identifying the legal risks inherent in new products and activities,



produk dan aktivitas baru, termasuk melakukan pengkajian atas surat perjanjian yang digunakan, baik antara Bank dengan nasabah ataupun antara Bank dengan pihak ketiga, untuk selanjutnya dilakukan pengendalian terhadap risiko tersebut;

- e. Pengendalian risiko hukum didasarkan pada tingkat risiko dan toleransi risiko yang telah ditetapkan oleh Bank.

4. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian risiko hukum di Bank Banten telah berjalan sesuai dengan koridor yang ditetapkan meliputi kegiatan:

- a. Memberikan dukungan kepada semua unit kerja Perseroan dengan me-review kontrak dan perjanjian kerjasama antara Bank dengan pihak lain;
- b. Dalam hal penerbitan jaminan/garansi Bank maka telah dilakukan *review* atas dokumen-dokumen yang dimaksud sehingga memberikan perlindungan hukum kepada Bank.

Mitigasi Risiko

Kualitas penerapan risiko hukum cukup memadai dengan melakukan dan mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Internalisasi budaya manajemen risiko hukum pada seluruh level organisasi.
2. Melakukan analisa dampak risiko, yang meliputi identifikasi, pengukuran dan mitigasi, atas ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan operasional yang terkait dengan risiko hukum, untuk dicatat dan menjadi *database* kejadian yang berdampak kerugian sebagai mitigasi potensi risiko hukum di kemudian hari.
3. Melakukan *review* secara berkala dan dilakukan perbaikan-perbaikan atau penambahan klausul yang dapat melindungi Perseroan atas setiap perjanjian dengan pihak ketiga.

RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Perseroan menyadari bahwa terjadinya risiko reputasi akan berpengaruh kepada risiko-risiko lainnya, bahkan dapat berdampak berat bagi keberadaan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan secara pro aktif mengkomunikasikan kegiatan Bank, baik melalui publikasi maupun mengadakan pertemuan secara berkala dengan *stakeholder*, seperti nasabah dan media. Dalam publikasi maupun forum pertemuan tersebut, Perseroan juga melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan negatif yang muncul di masyarakat. Selain itu, sebagai salah satu bentuk kepedulian Perseroan terhadap masyarakat, Bank Banten juga rutin mengadakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

including reviewing the agreement between the Bank and the customer or between the Bank and a third party, control of those risks.

- e. Legal risk control is based on the level of risk and risk tolerance set by the Bank.

4. Internal Control System

Legal risk control in Bank Banten has been run in accordance with the established corridor covering activities:

- a. Provide support to all Company's work units by reviewing contracts and agreements between the Bank and other parties.
- b. In the case of a Bank issuing guarantee/warranty, a review of the above documents has been made so as to provide legal protection to the Bank.

Risk Mitigation

The quality of legal risk application has been adequate by carrying out and implementing the stipulated policies, among others, as follows:

1. Internalization of legal risk management culture at all levels of the organization.
2. Conduct a risk impact analysis, which includes identification, measurement and mitigation, on the inappropriateness of operational activities related to legal risk, to be recorded and become a database of events that may impact in losses as a mitigation of potential legal risks in the future.
3. Conduct periodic reviews and make improvements or additions to clauses that can protect the Company on any agreements with third parties.

REPUTATION RISK

Reputation Risk is the Risk due to the decrease of stakeholder confidence level stemming from negative perception towards the Company. The Company realizes that the occurrence of reputational risk will affect other risks, even can have severe impact on the existence of the Company. Therefore, the Company proactively communicates the Bank's activities, either through publication or regular meetings with stakeholders, such as customers and the media. In the publication or forum of the meeting, the Bank also clarified the negative news that appeared in the community. In addition, as a form of Company awareness of the community, the Company also regularly held Corporate Social Responsibility (CSR).

Penetapan Manajemen Risiko

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Peran Dewan Komisaris terkait manajemen risiko reputasi adalah memberikan perhatian atas Divisi Sekretaris Perusahaan dan peningkatan peran Customer Care serta mendorong perilaku profesional dan menjaga etika bisnis bagi seluruh elemen organisasi Bank dalam upaya membangun dan menjaga reputasi;
- b. Peran Direksi terkait manajemen risiko reputasi, selain memiliki peran yang sama dengan Komisaris adalah dengan menunjuk/menetapkan unit kerja/fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan informasi terkait Perseroan kepada nasabah dan Pemangku Kepentingan Perseroan.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan penetapan limit pada aktivitas terkait risiko reputasi, antara lain mengenai penunjukan *Person in Charge* (PIC) Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah serta Prosedur Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

- a. Identifikasi terhadap risiko di mulai dari pengkajian pada kecukupan kebijakan dan prosedur, serta pelaksanaan aktivitas operasional yang terkait dengan risiko reputasi, termasuk sosialisasi produk/layanan kepada petugas Bank;
- b. Pengukuran terkait risiko reputasi dilakukan berdasarkan jumlah keluhan dan pemberitaan negatif yang diajukan ke Perseroan untuk dianalisis potensi kerugian atas keluhan/pemberitaan tersebut;
- c. Pemantauan atas risiko reputasi dilakukan dengan membandingkan produk/layanan yang dikeluhkan nasabah dengan produk/layanan yang ada untuk mengantisipasi keluhan di masa mendatang, termasuk antisipasi perbaikan atas produk/layanan;
- d. Pengendalian internal atas risiko reputasi diwujudkan dengan adanya SDM yang menangani pengaduan dan *Call Center* untuk menangani keluhan nasabah, serta unit Sekretaris Perusahaan yang menangani pemberitaan negatif.

4. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal telah dilakukan mulai dari penyusunan kebijakan dan prosedur terkait risiko reputasi seperti Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta Pengaduan Nasabah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas.

Risk Management Implementation

1. Board of Commissioners and Board of Directors Active Supervision

- a. The role of the Board of Commissioners regarding reputation risk management is to pay close attention to the Division of Corporate Secretary and enhance the role of Customer Care and encourage professional behaviour and maintain business ethics for all elements of the Bank organization in an effort to build and maintain reputation.
- b. The role of the Board of Directors in relation to reputation risk management, in addition to having the same role as the Commissioners is to designate/work units/functions that have authority and responsibility in providing Company-related information, to the customers and Company stakeholders.

2. Adequacy of Policies, Procedures and Determination of Limit

The Bank has updated its policies, procedures and limits on reputation risk related activities, such as the appointment of Person in Charge (PIC) of Customer Complaints Service and Settlement and Transparency of Bank Product Information and Use of Customer Personal Data.

3. Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Control

- a. Identification of reputational risk starts from an assessment of the adequacy of policies and procedures, as well as the implementation of operational activities related to reputation risk, including product/service socialization to Bank officers.
- b. Measurements related to reputation risk are based on the number of complaints and negative reports submitted to the Company for analysis of potential losses of such complaints/reports.
- c. Monitoring of reputation risk is performed by comparing products/services that customers complain about with existing products/services in anticipation of future complaints, including anticipated improvements to products/services.
- d. Internal control over reputation risk is manifested by the presence of complaints human resources and Call Center to handle customer complaints, as well as the Corporate Secretary unit handling negative reporting.

4. Internal Control System

Internal Control has been done starting from the preparation of policies and procedures related to reputation risk such as Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML-CTF) and Customer Complaint in accordance with the provisions of the regulator.



Agar pengendalian risiko reputasi berjalan efektif, maka Perseroan telah memiliki divisi yang bertanggung jawab atas hal tersebut, yaitu Divisi Sekretariat Perusahaan dan pelaksanaan di kantor cabang dilakukan oleh *Customer Service*. Pengendalian juga didukung dengan Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi antara kantor pusat dan kantor cabang sehingga memudahkan pemantauan atas keluhan nasabah.

Mitigasi Risiko

Bank Banten terus berupaya menjaga nama baik Perseroan dan selalu memonitor berbagai pemberitaan sekaligus segera menindaklanjuti jika menemui laporan keluhan nasabah Bank melalui media. Perseroan juga telah mengaplikasikan *call centre* untuk melayani nasabah sehingga nasabah dapat menyalurkan keluhan dan pengaduan berkaitan pelaksanaan layanan maupun hal lainnya, yang kemudian segera ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Pada tahun 2021, hal-hal tersebut akan terus dilakukan dan terus ditingkatkan sehingga dapat meminimalisasi risiko reputasi.

RISIKO STRATEGI

Risiko strategi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan dan/atau penerapan strategi Perseroan yang tidak tepat, atau kegagalan Bank dalam merespons perubahan-perubahan kondisi eksternal. Semakin ketatnya persaingan antar bank, baik dalam wujud keragaman layanan dan produk-produk Bank, promosi, suku bunga, maupun pelayanan kepada nasabah, telah mendorong para pelaku pasar untuk lebih inovatif. Hal ini mengharuskan Bank Banten untuk dapat mengkonsolidasikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Ketidaktepatan dalam menentukan target market dan strategi yang ditempuh dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan, baik secara finansial maupun non finansial.

Penerapan Manajemen Risiko

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Peran Dewan Komisaris terkait manajemen risiko strategi, antara lain: Dewan Komisaris secara berkala melakukan rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko melalui rapat Komite Pemantau Risiko;
 - b. Peran Direksi terkait manajemen risiko strategi, antara lain: Direksi secara berkala melakukan rapat untuk membahas pelaksanaan manajemen risiko atau dalam hal ini melalui rapat bersama Komite Manajemen Risiko yang dilaksanakan guna merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal.

In order to control the reputation risk effectively, the Company already has a division that is responsible for the matter, namely Division of Corporate Secretary assisted by Customer Care and implementation in branch office is done by Customer Service. Control is also supported by an integrated Management Information System between the head office and branch offices making it easier to monitor customer complaints.

Risk Mitigation

The Company strives to maintain its good name and continues to monitor news and immediately follows up if there are complaints from the Bank customers through the media. The Company has also implemented a call center to provide customer services to channel complaints and claims regarding service implementation and other matters, which will be immediately followed up by the related work units. In 2021, these measures will continue to be implemented and improved so as to minimize reputation risk.

STRATEGIC RISK

Strategic risk is a risk caused by decision making and/or improper implementation of Bank strategy, or failure of the Company in responding to changes in external conditions. The increasingly intense competition among banks, both in the diversity of Bank services and products, promotions, interest rates, and services to customers, has encouraged market participants to be more innovative. This requires the Company to be able to consolidate its resources and capabilities. The inaccuracy in determining the target market and the strategies pursued can cause losses for the Company, both financially and non-financially.

Risk Management Implementation

1. Board of Commissioners and Board of Directors Active Supervision
 - a. The Role of the Board of Commissioners regarding strategy risk management, among others: the Board of Commissioners periodically conducts meetings to evaluate the implementation of risk management through meetings of the Risk Oversight Committee;
 - b. The Role of the Board of Directors regarding strategy risk management, among others: The Board of Directors periodically conducts meetings to discuss the implementation of risk management or in this case through meetings with the Risk Management Committee to respond to changes in the business environment, both external and internal.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Perseroan telah melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan penetapan limit pada aktivitas yang terkait risiko strategi.

3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

- Proses identifikasi risiko strategi di mulai dari pengkajian pada Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk rasio-rasio yang akan dicapai pada tahun buku berikutnya. Identifikasi juga dilakukan melalui pengkajian terhadap produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan terutama dalam aspek pencapaian bisnis;
- Pengukuran risiko strategi dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan/atau kuantitatif dan pengukuran dimaksudkan untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil aktual serta mengevaluasi kinerja fungsional individu;
- Pemantauan risiko strategi dilakukan dengan memantau risiko-risiko keuangan dibandingkan dengan RBB atau dengan rata-rata industri perbankan di Indonesia;
- Pengendalian risiko strategi dilakukan dengan memberikan masukan kepada tim manajemen untuk mendukung pencapaian rasio-rasio keuangan sesuai dengan target RBB.

4. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian dilakukan dengan menjaga hubungan komunikasi yang baik antar divisi dalam rangka pencapaian strategi bisnis, serta melalui pemantauan secara periodik atas perkembangan bisnis yang dijalankan.

Mitigasi Risiko

Manajemen selalu berupaya agar hal-hal yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dapat tercapai. Hal tersebut dapat terlaksana karena dilakukannya hal-hal sebagai berikut:

- Rencana Bisnis Bank selalu disosialisasikan kepada seluruh unit kerja, dan
- Penyusunan Rencana Bisnis Bank disesuaikan dengan visi dan misi Bank serta profil Bank sebagai Bank Pembangunan Daerah.

Efektivitas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko Tahun 2021

Efektivitas dari strategi pengelolaan risiko Perseroan tahun 2021 dilakukan dengan tetap melanjutkan rencana bisnis tahun sebelumnya yang difokuskan pada pengelolaan manajemen risiko terbaik untuk mewujudkan penguatan kinerja Bank yang berkualitas.

2. Adequacy of Policies, Procedures and Determination of Limit

The Company has updated its policies, procedures and limits on activities related to strategy risks.

3. Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Control

- The process of identifying strategy risk starts from an assessment of the Bank Business Plan (RBB), including the ratios to be achieved in the following fiscal year. Identification is also done through an assessment of new products and activities to be published primarily in aspects of business achievement.
- Strategy risk measurement is done through qualitative and/or quantitative approaches and measurements intended to compare results achieved with actual results as well as evaluate individual functional performance.
- Strategy risk monitoring is performed by monitoring financial ratios compared to RBB or with the average banking industry in Indonesia.
- Strategy risk control is carried out by providing input to the management team to support the achievement of financial ratios in accordance with RBB targets.

4. Internal Control System

Control is done by maintaining good communication relationships between divisions in the framework of achieving business strategy, and through periodic monitoring of business developments that run.

Risk Mitigation

The Bank strives to ensure the achievement of matters stated in the Bank Business Plan. This is done as a result of the following measures:

- Continual dissemination of the Bank Business Plan to all work units, and
- Alignment of the Bank Business Plan development with the Bank vision and mission, as well as the Bank profile as the Regional Development Bank.

Effectiveness of Risk Management System Implementation in 2021

The effectiveness of the Company risk management strategy in 2021 is carried out by continuing the previous year business plan which is focused on the best risk management to manifest the strengthening of the Bank performance quality.



Efektivitas dari strategi manajemen risiko Perseroan dibagi menjadi 3 (tiga) prioritas utama yaitu:

1. Proses penerapan manajemen risiko yang sistematis dari kebijakan, prosedur dan berbagai pendekatan untuk membangun konteks pemetaan risiko dan menilai risiko, memantau, meninjau ulang, mencatat dan melaporkan secara terintegrasi.
2. Pengukuran alokasi modal serta *stress test* dengan menggunakan metode *basic* maupun *advanced* berdasarkan unit bisnis.
3. Meningkatkan *alarm warning system* melalui pengembangan *dashboard* otomatisasi manajemen risiko sehingga potensi risiko dapat dikendalikan sejak dini.

The effectiveness of the Company risk management strategy is divided into 3 (three) main priorities, which are:

1. A systematic risk management implementation process on policies, procedures and various approaches to build a context for risks mapping and assessment, monitoring, reviewing, recording and reporting in an integrated manner.
2. Measurement of capital allocation and stress tests using basic and advanced methods based on business units.
3. Improve the warning system alarm through the development of a risk management automation dashboard hence the potential risks can be initially controlled.

Profil Risiko Tahun 2021

Adapun tabel profil risiko Bank per Desember 2021 (TW4) adalah sebagai berikut:

Risk Profile in 2021

The Bank's risk profile table as of December 2021 (TW4) is as follows:

No.	Jenis Risiko / Risk Type	Peringkat Risiko Inheren / Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko / Risk Management Quality Level	Peringkat Tingkat Risiko / Risk Level
1	Kredit / Credit	Moderate	Fair	Moderate
2	Pasar / Market	Low to Moderate	Fair	Low to Moderate
3	Likuiditas / Liquidity	Low to Moderate	Fair	Low to Moderate
4	Operasional / Operations	Moderate	Fair	Moderate
5	Hukum / Legal	Moderate	Fair	Moderate
6	Strategik / Strategic	Moderate	Fair	Moderate
7	Kepatuhan / Compliance	Moderate	Fair	Moderate
8	Reputasi / Reputation	Low to Moderate	Fair	Low to Moderate

Perkara Penting yang Dihadapi Perseroan

Legal Cases Faced by The Company

Sepanjang tahun 2021, Perseroan mencatat beberapa kasus adanya pelanggaran internal yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum. Berikut rincian informasi dalam tabel di bawah ini:

Throughout 2021, Company recorded several cases internal violations that had been followed up through the legal process. The detailed information is in presented in the following table:

Permasalahan Hukum / Litigation	Jumlah Kasus Perdata / Total Civil Cases	Jumlah Kasus Pidana / Total Criminal Cases
Berjalan / Ongoing	16 (enam belas / sixteen)	5 (lima / five)
Case Closed	10 (sepuluh / ten)	2 (dua / two)

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh / Total Cases Conducted By					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi / Members of BOC and BOD		Pegawai Tetap / Permanent Employee		Pihak Ketiga / Third Party	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	0	0	0	4	2	1
Telah Diselesaikan / Resolved	0	0	0	2	0	1
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank / In the process of settlement within the Bank	0	0	0	2	2	0
Belum Diupayakan Penyelesaian / Not Yet Resolved	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum / Resolved Through Legal Process	0	0	0	0	0	4

Sanksi Administrasi

Administrative Sanction

PENGENAAN SANKSI SEPANJANG TAHUN 2021

Perseroan telah menyampaikan laporan kepada pihak Otoritas terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian sepanjang tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif yang bersifat material yang dikenakan kepada Bank Banten.

SANCTIONS DURING 2021

The Company has submitted a report to the relevant authorities in accordance with applicable regulations. However, throughout 2021, there were no material administrative sanctions imposed on Bank Banten.

Kode Etik

Codes of Conduct

Kode Etik Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor:005/SK/KOM-BB/VI/2020 dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 074/SK/DIR-BB/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020 tentang Kebijakan Kode Etik (*Code of Conduct*) Bank Banten.

Kode Etik Bank Banten merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan Perusahaan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi insan Bank dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kode Etik Bank Banten sendiri merupakan salah satu bentuk kontinuitas komitmen nyata Insan Bank dalam mencapai tataran tertinggi dalam berbisnis secara beretika. Butir-butir dalam Kode Etik Bank Banten pada dasarnya mengidentifikasi dan merupakan kristalisasi etika maupun harapan Perusahaan kepada segenap Insan Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan) untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Bank Banten Code of Conduct is regulated in the Decree of the Board of Commissioners No. 005/SK/KOM-BB/VI/2020 and Decree of the Board of Directors No. 074/ SK/DIR-BB/VI/2020, dated 29 June 2020 on the Code of Conduct Policy of Bank Banten.

Bank Banten Code of Conduct is an internal guideline containing business ethics, work ethics, commitment, and enforcement of Company regulations and other stipulations applicable for the Bank's employee in carrying out business and other activities as well as in interacting with stakeholders.

Bank Banten Codes of Conduct itself is a form of commitment to the tangible commitment of the Bank's employee in achieving the highest level of ethical business. The Bank Banten Code of Conduct elements basically identify and represent the crystallization of ethics and Company expectations for all Bank's employees (Board of Commissioners, Board of Directors and Employees) to achieve the Corporate objectives.



Adapun isi dari Kode Etik Bank Banten, yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

1. Bekerja profesional dengan mengedepankan moralitas, patuh dan taat kepada peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu berpijak kepada nilai utama Bank serta menjunjung tinggi Kode Etik Bankir Indonesia;
2. Menjaga hubungan baik antar Insan Bank dalam hubungan kerja sama atau kompetisi di lingkungan internal dan/atau eksternal Bank;
3. Menjaga rahasia bank dan rahasia jabatan sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memanfaatkan data dan informasi tersebut untuk meraih keuntungan pribadi;
4. Menghindari pengambilan keputusan jika terdapat benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan Bank. Dalam hal kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan Bank maka akan mendahulukan kepentingan perusahaan;
5. Tidak melakukan tindakan penyimpangan, pelanggaran dan/atau *fraud* yang dapat merugikan keuangan maupun reputasi Bank;
6. Menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja termasuk menjaga aset dan harta Bank;
7. Melakukan pencatatan data, transaksi dan laporan secara jujur dan akurat;
8. Tidak menerima imbalan/ hadiah/ cendera mata dalam bentuk apa pun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya;
9. Tidak ikut serta dalam kegiatan organisasi yang mengakibatkan terjadinya perbenturan kepentingan;
10. Menggunakan fasilitas dan identitas Bank (*corporate identity*) semata-mata untuk kegiatan usaha Bank dan dilarang untuk menyalahgunakan *corporate identity* dimaksud untuk kepentingan pribadi.

Penegakan Kode Etik

Karyawan dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas implementasi Kode Etik Bank Banten kepada Pemimpin Unit Kerja atau mekanisme *whistleblowing system* melalui email: HCCARES@BANKBANTEN.CO.ID.

Upaya implementasi dan penegakkan Kode Etik Bank Banten dilakukan dengan penuh kesadaran secara berkelanjutan dalam bentuk komitmen, sikap dan perbuatan, yang dilakukan antara lain dengan:

- a. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik Bank Banten
Insan Bank diharuskan membaca, memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani "Pernyataan Kepatuhan Insan Bank Banten terhadap Kode Etik".

The following are contents of Bank Banten Codes of Conduct, which are currently applicable:

1. Work professionally by promoting morality, complying with and obeying the Company rules and applicable regulations and laws and always adhering to the main values of the Bank and upholding the Indonesian Bankers Code of Ethics;
2. Maintain good relations between the Bank personnels or competition relations within the Bank's internal and/or external environment.
3. Maintain the bank and position confidentiality in accordance with the Bank policies and applicable legal provisions and not to take advantage on such data and information for personal gain;
4. Avoid decision making in the event of a conflict of interest between personal interests and the Bank. In the event that personal interest's conflict with the interests of the Bank, he/she will prioritize the interests of the Company;
5. Do not commit fraud and/or violation that can harm the financial and reputation of the Bank;
6. Maintain work security, health, and safety, including protecting the Bank's assets;
7. Record data, transactions and reports honestly and accurately;
8. Not accepting rewards/gifts/souvenirs in any form related to their duties and responsibilities;
9. Not involved in organization activities that resulted in conflict of interests;
10. Use the Bank corporate identity and facilities solely for the Bank's business activities and are prohibited from misusing the intended corporate identity for personal interests.

Enforcement of Code of Conduct

The employee can report allegation of fraud on the implementation of Bank Banten Code of Conduct to the Head of Work Unit or by whistleblowing system mechanism through email: HCCARES@BANKBANTEN.CO.ID.

The implementation and enforcement of Bank Banten Code of Conduct is implemented with full awareness continuously through commitment, behavior and conduct, which are carried out among others with:

- a. Compliance Statement of Bank Banten Codes of Conduct
The Bank's employee has to read, understand well and must sign the "Compliance Statement of Bank Banten Employee to Code of Conduct".

b. Manajemen dan Seluruh Karyawan Bank

Komitmen Insan Bank untuk tidak menerima uang dan/atau barang gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya dipublikasikan melalui media massa dan Situs Web Bank.

c. *Annual Disclosure* Benturan Kepentingan

Insan Bank diharuskan membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan.

d. Pakta Integritas

Pakta Integritas ditandatangani oleh karyawan pada seluruh level manajerial. Selain itu penandatanganan Pakta Integritas berupa Deklarasi Anti *Fraud* dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif Bank.

e. *Program Awareness*

Pelanggaran terhadap Kode Etik Bank Banten dapat dikenai sanksi sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris yang terbukti melanggar Kode Etik Bank Banten akan dilaporkan ke pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Direksi yang terbukti melanggar Kode Etik Bank Banten dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Karyawan yang telah terbukti melanggar Kode Etik Bank Banten dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan ketentuan yang berlaku, yang pada tingkat tertentu dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan atau tanpa surat peringatan terlebih dahulu;
4. Karyawan yang mengetahui pelanggaran dan/atau percobaan pelanggaran terhadap Kode Etik Bank Banten namun tidak melaporkannya, dianggap melanggar Kode Etik Bank Banten dan dapat dikenai sanksi/ hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Budaya Perusahaan

Corporate Culture

Nilai-nilai Budaya Perusahaan merupakan panduan dalam bertindak, berperilaku sehari-hari dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai, untuk mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan Bank Banten dalam mencapai sasaran strategis sangat bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari SDM Bank yang berkualitas dan kompeten yang dapat mendukung peningkatan performa kinerja Perusahaan.

b. The Bank Management and All Employees.

The Commitment of the Bank's employee of not receiving money and/or gratifications and/or gifts related to its obligations and duties published through mass media and the Bank Website.

c. Annual Disclosure of Conflict of Interest.

The Bank's employee shall prepare an annual disclosure regarding conflict of interest every year, and every work unit must submit transaction/decision reports with conflicts of interests every quarter.

d. Integrity Pact

The Integrity Pact is signed by employee in all managerial level. Moreover, the signing of Integrity Pact is a Declaration of Anti Fraud carried out by all Board of Commissioners, Board of Directors as well as Executives of the Bank.

e. Awareness Program.

The breach to Bank Banten Codes of Conduct will be sanctioned with the following:

1. The Board of Commissioners that are proven to breach the Bank Banten Code of Conduct will be reported to the shareholders in the General Meeting of Shareholders;
2. The Board of Directors that are proven to breach the Bank Banten Code of Conduct will be temporarily suspended from position by the Board of Commissioners according to applicable rules;
3. Employees that proven to breach the Bank Banten Code of Conduct will be rendered sanctions in accordance with the company rules and applicable rules, which in certain levels can be resulted in work termination with or without prior warning letters;
4. Employees that are aware on any breach and/or alleged breach to the Bank Banten Code of Conduct however remained silent, are considered breaching the Bank Banten Code of Conduct and will be sanctioned/penalized according to applicable rules.

The Corporate Culture values serve as the guidelines in the action, daily conduct in implementing duties and responsibilities as employee, to achieve the company's goals. The Company's success in achieving strategic targets is very much depending on the HR support, contribution, and commitment of quality and competent that may bolster the Company's performance improvement.



Pegawai yang kompeten dan memiliki integritas, serta berorientasi pada kepuasan nasabah merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam mempertahankan loyalitas nasabah. Untuk mencapai hal tersebut Bank Banten secara konsisten terus mendorong pengembangan SDM untuk mengimplementasikan Budaya Perusahaan dan Budaya Kerja, termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga sasaran strategis perusahaan sesuai visi dan misi dapat tercapai.

Perseroan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki Budaya Kerja yang positif. Hal ini tentunya dapat diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai Budaya Perusahaan. Sebagai suatu organisasi, Bank Banten dituntut untuk memiliki suatu aturan yang mengikat seluruh jajarannya dalam bertindak sesuai dengan standar tertinggi dalam integritas dan profesional di seluruh aspek aktivitas perusahaan, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di Perusahaan.

Visi Bank Banten

Menjadi Bank yang Terbaik dan Mitra Terpercaya.

Misi Bank Banten

1. Mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten;
2. Memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi pada kepuasan nasabah, dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua Pemangku Kepentingan.

Nilai-nilai dasar yang menjadi inti dari pengembangan Budaya Perusahaan yang diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja terangkum dalam TRUST.

Employees with competency and integrity, and who are oriented to customer satisfaction are one of the factors supporting success in maintaining customer loyalty. To achieve this, Bank Banten consistently encourages HR development by implementing Corporate Culture and Work Culture, including its value, in order to meet the Company's strategic targets in order to its vision and mission.

The Company realizes that every individual in the organization can only be fully progressing if it has a positive Work Culture. This goal can be manifested through the implementation of Corporate Culture values. As an organization, Bank Banten is required to have a rule binding all elements in their conduct according to the highest standard in integrity and professional in all aspect of company's activities, and in compliance with all laws and regulations and applicable policies in the Company.

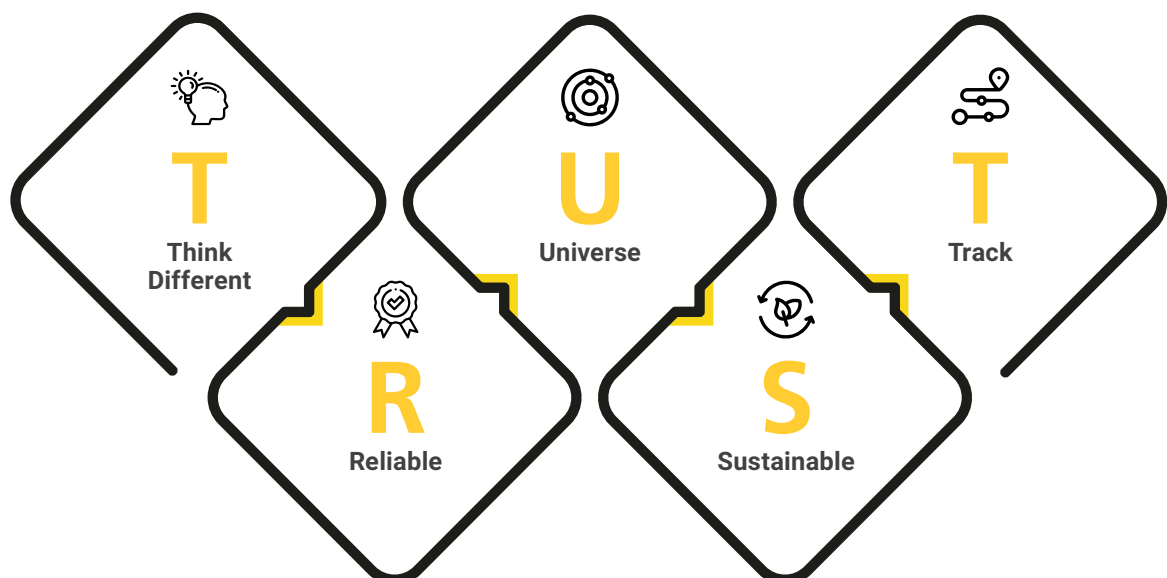
Bank Banten Vision

Becoming the Best Bank and a Reliable Partner.

Bank Banten Mission

1. Supporting development program for economic growth and prosperity of Banten communities.
2. Providing the best banking services that continuously oriented toward customers satisfactory, and improving sustainable benefits value for all Stakeholders.

The basic values that serve as the core development of Corporate Culture, which is manifested through the implementation of work values, is summarized into TRUST.



Think Different;

Mampu bekerja profesional dalam menghadapi tantangan secara konsisten;

- Berpikir kreatif dan inovatif berbasis risiko.
- Membangun karakter intrapreneur.
- Mampu memberikan solusi dalam setiap keadaan.

Reliable;

Mampu bekerja profesional dalam menghadapi tantangan secara konsisten

- Tangguh, kolaboratif dan proaktif.
- Kompeten dan berintegritas.
- Berkomunikasi secara terbuka dan efektif.

Universe;

Membangun sinergi positif dengan sesama dan lingkungan sebagai bentuk syukur Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Berempati dan saling menghargai.
- Bersikap positif dan peduli lingkungan.

Sustainable;

Memberikan manfaat kepada perusahaan, masyarakat, dan lingkungan secara berkelanjutan

- Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- Selalu memberikan layanan terbaik.
- Berperan aktif dalam aksi keuangan berkelanjutan.

Track;

Menyelesaikan setiap pekerjaan secara tuntas, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan

- Cepat, tepat dan akurat.
- Berorientasi pada hasil.
- Patuh terhadap ketentuan.

Think Different;

Able to work professionally in facing challenges consistently;

- Risk-based creative and innovative thinking.
- Building intrapreneur character.
- Able to provide solutions in every situation.

Reliable;

Able to work professionally in facing consistent challenges

- Resilient, collaborative and proactive.
- Competent and with integrity.
- Communicate openly and effectively.

Universe;

Building positive synergy with others and the environment as a form of gratitude for the grace of God Almighty

- Empathy and mutual respect.
- Be positive and care about the environment.

Sustainable;

Providing benefits to the Company, society and the environment in a sustainable manner

- Apply the principles of good governance.
- Always provide the best service.
- Take an active role in sustainable finance action.

Track;

Complete every job completely, on time and accountable according to the provisions

- Fast, precise and accurate.
- Results oriented.
- Comply with regulations.

Pelaporan Keuangan

Whistleblowing System

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Bank Banten telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian internal guna mendukung pencapaian visi dan misi, namun praktiknya masih saja terjadi pelanggaran atau kecurangan (fraud) yang dapat merugikan Bank. Guna mendukung pengembangan dan penerapan strategi anti-fraud, diharapkan setiap pegawai yang mengetahui adanya tindakan kecurangan harus melaporkan ke Perseroan. Untuk itu Perseroan menyediakan sarana pelaporan yang bersifat independen, rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan Pelapor melalui *Whistleblowing System* (WBS).

In carrying out business activities, the Bank has applied the precautionary principle and internal control system to support the achievement of the vision and mission, but in practice violations or fraud still occur that may be detrimental to the Bank. In order to support the development and implementation of anti-fraud strategy, every employee is expected to be aware on any fraud and to report to the Company. To that end, the Company provides reporting facility that is independent, confidential and has the protection mechanism through *Whistleblowing System* (WBS).



Peran WBS bertujuan untuk:

1. Mendorong seluruh pegawai berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran;
2. Mempermudah pihak-pihak terkait dalam menangani laporan pelanggaran;
3. Mengurangi kerugian, memperkuat sistem kontrol internal serta meningkatkan reputasi Bank di mata Pemangku Kepentingan;
4. Meningkatkan iklim kerja yang lebih jujur, bersih, dan kondusif.

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan Perusahaan, Perseroan menetapkan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Pegawai wajib menyampaikan informasi yang disertai bukti-bukti dan akan ditindaklanjuti Manajemen, di mana kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh Manajemen;
2. Membebaskan pelapor dari kesalahan penyampaian informasi;
3. Penyembunyian adanya informasi *fraud* akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Pelaku *fraud* akan dikenai sanksi sesuai ketentuan Perusahaan;
5. Akan diberikan *reward* atau pengurangan sanksi (jika WB terlibat) kepada WB jika informasi yang disampaikan terbukti benar.
6. Penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Untuk penerapan WBS, Perseroan telah memiliki Pedoman *Whistleblowing* dan membentuk Pengelola WBS termasuk menerapkan prinsip-prinsip *Whistleblowing* yang meliputi:

1. Menjaga kerahasiaan;
2. Melindungi pelapor;
3. Menindaklanjuti laporan.

Laporan pengaduan atas pelanggaran dapat disampaikan antara lain melalui:

- a. Surat yang ditujukan kepada:
Direksi
PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk
Gedung Duta Indah Iconic, Tower H
Jl. MH Thamrin Km 2 Tangerang - Banten (dengan menulis kode WB)
- b. Pelaporan melalui email ditujukan kepada antifraud@bankbanten.co.id dengan tembusan direksi@bankbanten.co.id

Laporan pelanggaran yang diterima pengelola WBS akan ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi. Pegawai yang memberi laporan akan diidentifikasi terlebih dahulu

The objectives of WBS application are as follows:

1. Encouraging all employees to come forward in reporting any violations;
2. Facilitating related parties in handling the whistleblowing system;
3. Reducing losses, strengthening internal control system and improving Bank reputation in the eye of stakeholders;
4. Improving an honest, transparent and favorable working environment.

To minimize fraud that can be detrimental to it, the Company stipulates policies, among others are:

1. Employees must submit information that is accompanied by evidence and will be followed up by the Management, where the confidentiality of the reporter's identity is guaranteed by the Management;
2. Release the whistleblower from inaccuracy of information submission;
3. Hiding of fraud information will be sanctioned in accordance with the prevailing rules;
4. Violators will be sanctioned in accordance with the prevailing rules;
5. Reward or sanction reduction will be provided (if the whistleblower is also involved) to the whistleblower when the information is correctly confirmed.
6. Law enforcement.

For the WBS implementation, the Company has in place the Whistleblowing Guidelines, established WBS Handlers including implementing the Whistleblowing principles, which includes:

1. Safeguarding confidentiality;
2. Protecting the whistleblower;
3. Following up the reports.

Complaint reports on violations can be submitted, among others, through:

- a. Letter addressed to:
Board of Directors
PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk
Gedung Duta Indah Iconic, Tower H
Jl. MH Thamrin Km 2 Tangerang – Banten (by adding WB codes)
- b. Reports via email are addressed to antifraud@bankbanten.co.id with a copy to directors@bankbanten.co.id

Reports of violations received by WBS managers will be followed up by investigation. The employees who file the report to find the truth of the report first, if all the evidence

keakuratannya, bila seluruh bukti sesuai, maka akan menjadi faktor penambah nilai dalam penilaian kinerja dan pegawai dapat diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran (*fraud*). Hasil investigasi selanjutnya dibahas dalam rapat Komite Disiplin dalam rangka memberikan sanksi bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran (*fraud*).

Untuk menjaga objektivitas, pemberian sanksi kepada pegawai atau pelaku *fraud* tetap berpedoman pada Peraturan Perusahaan. Perseroan juga melaporkan *fraud* yang terjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian *fraud* tersebut, Perseroan terus dan selalu melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian internal.

Kebijakan Policy

Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik, baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, penetapan komposisi Dewan Komisaris telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Perseroannya itu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta tidak membedakan *gender*. Hal ini diperlukan untuk efektivitas tugas pengawasan Dewan Komisaris, untuk itu Perseroan terus menjaga bauran keahlian dan pengalaman anggota Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

Perseroan mendukung praktik perbankan yang bersih dan bebas korupsi. Komitmen budaya anti korupsi dan anti-fraud ini dibuktikan dengan tertulisnya Kebijakan Strategi Anti-Fraud dengan SK No. 230/SK/DIR-BB/VI/2021 tanggal 16 juni 2021 tentang Kebijakan Strategi Anti-Fraud dan Kode Etik Perusahaan. Perseroan juga telah membuka ruang terkait

is appropriate, then it will be a value-adding factor in performance appraisal and employees can be rewarded according to applicable regulations if there are strong indications of violations (*fraud*). The investigation results will further discuss in the Discipline Committee meeting in order to sanctions the employee that proved of fraud.

To maintain objectivity, the sanctions to employees or violators remain guided by the Corporate Regulations. The Company also reported fraud to the Financial Services Authority in accordance with the prevailing regulations. The Company will continue and evaluate improvement on the fraud, especially on the internal control aspect weakness.

The Board of Commissioners composition is a combination of characteristics both in terms of organs of the Board of Commissioners and members of the Board of Commissioners individually, according to the needs of the Public Company. These characteristics can be reflected in the determination of expertise, knowledge and experience required in the implementation of oversight duties and advisory by the Board of Commissioners of a Public Company. The composition that has taken into account the needs of the Public Company is positive, specifically in relation to decision making in implementing supervisory function by considering a wider range of aspects.

Based on the Shareholders policy, determination of the Board of Commissioners composition has been carried out by taking into account the Company needs and business complexity, namely by taking into account the diversity of expertise, educational background and experience and does not differentiate genders. This is necessary for the effectiveness of the Board of Commissioners oversight duties, for that Company continues to maintain the diversity of expertise and experience of the Board of Commissioners members.

ANTI CORRUPTION POLICIES AND PROCEDURES

The Company supports clean and corruption-free banking practices. This anti-corruption and anti-fraud cultural commitment is evidenced by the writing of the Anti-Fraud Strategy Policy with Decree No. 230/SK/DIR-BB/VI/2021 dated June 16, 2021 regarding the Anti-Fraud Strategy Policy and the Company's Code of Ethics. The Company has



pelaporan dugaan korupsi maupun *fraud* melalui sistem *whistleblowing system* sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Dalam menjalankan bisnis usahanya, PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk ("Bank Banten") selalu berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan bisnis Bank Banten yang berlandaskan kode etik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Bank Banten menyadari pentingnya pengendalian anti penyuapan yang harus dipahami secara menyeluruh dan memadai oleh seluruh seluruh karyawan Bank Banten.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 merupakan salah satu upaya Bank dalam menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan kegiatan bisnis secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar, terbebas dari praktik penerimaan suap, gratifikasi ataupun kegiatan lainnya yang bertentangan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman dan dalam rangka mencegah terjadinya praktik suap yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan secara korporasi, dan demi mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif di lingkungan Bank, maka Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank Banten menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh seluruh karyawan Bank Banten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN NASABAH

Guna memenuhi ketentuan pihak otoritas terkait perlindungan konsumen, Perseroan telah memiliki Kebijakan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan dan adanya kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan, maka telah dilakukan penyempurnaan pada portal pengaduan Bank dengan tujuan agar seluruh pengaduan yang diterima dapat dimonitor serta diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan pihak otoritas.

Pengawasan terhadap proses penyelesaian pengaduan oleh unit kerja terkait selalu dilaporkan secara berkala kepada Direksi, agar status pengaduan dapat diketahui. Perseroan juga menyampaikan laporan berkala (triwulanan) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia secara tepat waktu. Perseroan selalu berupaya menyelesaikan pengaduan

also opened an opportunity related to reporting suspected corruption and fraud through the whistleblowing system as previously explained.

In running its business, PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk ("Bank Banten") always strives to apply the principles of Good Corporate Governance consistently and continuously. In order to realize Bank Banten's business management based on a code of ethics and good governance principles, Bank Banten realizes the importance of anti-bribery control which must be understood thoroughly and adequately by all employees of Bank Banten.

The implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System is one of the Bank's efforts to demonstrate its commitment to conducting business activities in a transparent, accountable, responsible, independent and fair manner, free from the practice of accepting bribes, gratuities or other activities that are contrary to the principles of Good Corporate Governance.

Therefore, to increase understanding and in order to prevent bribery practices that can harm the interests of the Company as a corporation, and in order to support the creation of a conducive control environment within the Bank, the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Banten establish Anti-Bribery Management System Guidelines that can serve as a reference by all employees of Bank Banten in carrying out their duties and responsibilities.

CUSTOMER PROTECTION POLICY

In order to comply with the provisions of the authorities relating to consumer protection, the Company already has a Customer Service and Complaints Settlement Policy as well as Procedure. Along with the increasing knowledge of the community towards banking and the ease of access in complaints, the Bank has improved its complaints portal with the objective that all complaints received can be monitored and resolved properly and in accordance with the provisions of the authorities.

Monitoring on the complaints settlement process by the relevant work unit is always reported periodically to the Board of Directors, hence the status of the complaint is known. The Company also submits periodic (quarterly) reports to the Financial Services Authority and Bank Indonesia in a timely manner. The Company always strives to resolve customer

nasabah dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh pihak otoritas, dan selanjutnya secara bertahap akan menyesuaikan sarana dan prasarana terkait aspek perlindungan konsumen sesuai ketentuan pihak otoritas.

Sebagai upaya Perseroan untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kemudahan akses kepada nasabah, maka saat ini Perseroan telah memiliki layanan *Call Center* dengan nomor akses 1500-410 sebagai sarana dalam memberikan informasi, solusi, serta memberikan pelayanan kepada nasabah ataupun calon nasabah. Layanan *call center* ini melayani nasabah ataupun calon nasabah selama 24 jam sehari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

Benturan Kepentingan

Conflict of Interest

Dalam melaksanakan aktivitas usahanya, potensi benturan kepentingan dapat dialami oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dengan demikian, guna memastikan pemenuhan peraturan yang berlaku, Perseroan mengatur penanganan atas benturan kepentingan melalui Surat Keputusan Direksi No. 514/SK/DIR-BB/IX/21.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka anggota-anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

Kewenangan penyelesaian atas transaksi benturan kepentingan adalah pada RUPS pemegang saham independen sesuai dengan peraturan yang berlaku.

complaints within the period as stipulated by the authorities, and will gradually adjust the facilities and infrastructure related to consumer protection aspects in accordance with the provisions of the authorities.

As an effort of to improve services and provide easy access to customers, Company currently has a Call Center service with access number 1500-410 as a means of providing information, solutions, and provide services to customers or potential customers. This call center service serves customers or prospective customers 24 hours a day, 7 (seven) days a week.

The Board of Directors and Board of Commissioners of Company may encounter potential conflict of interest in carrying out its business activities. Therefore, in order to ensure compliance with applicable regulations, the Company regulates the management of conflicts of interest through Decree of the Board of Directors No. 514/SK/DIR-BB/IX/21.

In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Executive Officers are prohibited from taking actions that may harm the Bank or reduce the Bank's profit and shall disclose conflict of interest in any decision.

The authority to settle the conflict of interest transaction is at the GMS of independent shareholders in accordance with the applicable regulations.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Bank Financial and Non-Financial Condition Transparency

Dalam rangka meningkatkan tata kelola Perusahaan dan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, transparansi dilakukan berdasarkan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

In order to improve Corporate governance and compliance with Financial Services Authority Regulations, the Bank's transparency policy refers to:

- Financial Services Authority Regulation N37/POJK.03/2019 dated 20 December 2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports;
- Financial Services Authority Regulation N29/POJK.04/2016 dated 29 July 2016 concerning the Annual Report of Issuers or Public Companies;
- Financial Services Authority Regulation N55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.



Selama tahun 2021, Perseroan telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain meliputi:

1. Laporan Publikasi, disampaikan kepada pihak Otoritas secara berkala setiap periode bulanan, triwulanan dan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku serta diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak (koran) dan elektronik (*website*);
2. Laporan Tahunan 2020 dan disusun serta disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan Tahunan 2020 telah disampaikan ke pihak otoritas dan Pemegang Saham pengendali Perseroan, serta instansi terkait lainnya;
3. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank (*Good Corporate Governance/GCG*) tahun 2020, disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan telah disampaikan kepada pihak otoritas dan Pemegang Saham pengendali Perseroan. Laporan tersebut juga tersedia pada *website* Bank (www.bankbanten.co.id) sebagai informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
4. Informasi lainnya yang disajikan pada *website* Perseroan, antara lain meliputi:
 - a. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
 - b. Penyelenggaraan dan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - c. *Public Expose*;
 - d. Jaringan kantor Bank;
 - e. Produk dan layanan perbankan (untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank);

Masyarakat juga dapat langsung memperoleh informasi mengenai Perseroan dengan menghubungi Divisi Sekretariat Perusahaan melalui e-mail corporate.secretary@bankbanten.co.id

PENYEDIA DANA KEPADA PIHAK TERKAIT

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sepanjang tahun 2021, tidak terjadi beberapa pelanggaran maupun pelampauan BMPK kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (debitur inti).

During 2021, Company submitted transparency on financial and non-financial conditions as information for those in need, including among others:

1. Monthly, quarterly and annual Publication Report, submitted to the authority in accordance with prevailing provisions and informed to the public through printed media (newspapers) and electronic (*website*);
2. The 2020 Annual Report and prepared and presented based on the provisions of the authorities regarding the Annual Report of the Issuer or Public Company. The 2020 Annual Report has been submitted to the Company's authority and controlling shareholders, as well as other relevant agencies;
3. The 2020 Implementation Report on Good Corporate Governance (GCG), prepared and presented based on the provisions of the authorities regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks, and has been submitted to the authorities and controlling Shareholders of the Company. The report is also available on the Bank's website (www.bankbanten.co.id) as a means of information for the people.
4. Other information presented on the Company's website includes:
 - a. Composition of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
 - b. Implementation and summary of the results of the Company's General Shareholders' Meeting;
 - c. Public Expose;
 - d. Bank office network;
 - e. Banking products and services (to facilitate the public to obtain information related to products and services offered by the Bank);

The public can also directly obtain information about the Company by contacting the Corporate Secretary via e-mail corporatesecretary@bankbanten.co.id.

PROVIDER OF FUNDS TO RELATED PARTIES

Provision of Funds to Related Parties with the Bank refers to Bank Indonesia regulation on Legal Lending Limit (LLL). Throughout 2021, there was no violation or exceeding LLL to related parties and the provision of large funds (core debtors).

No.	Penyediaan Dana / Funding	Jumlah / Total	
		Debitur / Debtors	Nominal / Nominal
1.	Kepada Pihak Terkait / To Related Parties	-	-
	Kepada Debitur Inti: / To Core Debtors:		
2.	· Individu / Individuals	23	360.584
	· Grup / Groups	3	110.059

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE LAPORAN

Sepanjang tahun 2021, Perseroan tidak memberikan dana untuk kegiatan politik. Sementara itu pemberian dana untuk kegiatan sosial dicakup melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.

PROVISION OF FUNDS FOR SOCIAL AND/OR POLITICAL ACTIVITIES DURING THE REPORTING PERIOD

During 2021, Company did not provide funds for political activities. Meanwhile, funding for social activities is covered through Corporate Social Responsibility activities.

Penerapan Pedoman GCG

GCG Guidelines Application

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA PENERAPAN DI PERUSAHAAN

Sesuai POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta Lampirannya yang menjelaskan tentang 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINE OF PUBLIC COMPANY IMPLEMENTATION IN THE COMPANY

In accordance with POJK No.21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for Governance of Public Companies and SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies and its attachments which explain 5 (five) aspects, 8 (eight) principles of Good Corporate Governance, as well as 25 (twenty five) recommendations for the implementation of aspects and principles of Good Corporate Governance.

Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip 1

Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.
2. Bank mempunyai prosedur terkait pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS
3. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.
4. Terpenuhi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS tahun 2021

Relationship of Public Company With The Shareholders In Ensuring The Shareholders' Rights

Principle 1

Improving the Value of General Meeting Of Shareholders (GMS).

1. A Public Company has a technical method or procedure for voting, both openly and privately, that prioritizes independence and the interests of shareholders.
2. The Bank has procedures related to voting in making decisions on a GMS agenda.
3. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of a Public Company attended the Annual GMS.
4. Fulfilled all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners attended the 2021 GMS.



5. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
6. Terpenuhi ringkasan risalah RUPS telah dibuat pada Situs Web Bank.

Prinsip 2

Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.
2. Bank telah membuat laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka.
3. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.
4. Terpenuhi Bank mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.

Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Prinsip 3

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.

1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
2. Saat ini Bank mempunyai jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang komisaris independen dan satu orang komisaris non independen.
3. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
4. Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi sesuai dengan kebutuhan.

Prinsip 4

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
2. Bank telah memiliki Kebijakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) Kinerja Dewan Komisaris, yaitu SK No. 035/SK/DIR-BB/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.
3. Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.

5. The summary of the minutes of the GMS is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.
6. The summary of the minutes of the GMS has been complied with on the Bank's Website.

Principle 2

Improving Communication Quality of Public Company with Shareholders or Investors.

1. The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.
2. The Bank has made periodic reports, disclosure of information, business conditions or prospects and performance, as well as the implementation of Public Company governance.
3. The Public Company discloses the Public Company's communication policies with shareholders or investors on the Website.
4. Compliance fulfillment as the Bank discloses the Public Company's communication policy with shareholders or investors on the Website.

The Board of Commissioners' Function and Role

Principle 3

Strengthening the Membership and Composition of Board of Commissioners.

1. The determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the conditions of the Public Company.
2. Currently, the Bank has 3 (three) members of the Board of Commissioners, consisting of 2 (two) independent commissioners and one non-independent commissioner.
3. The determination of the composition of the members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.
4. The composition of the members of the Board of Commissioners has met the needs.

Principle 4

Improving the quality of job and responsibility performance of Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.
2. The Bank has a self-assessment policy for the performance of the Board of Commissioners, namely SK No. 035/SK/DIR-BB/III/2018 dated March 20, 2018.
3. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Public Company Annual Report.

4. Terpenuhi.
5. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
6. Sesuai Pedoman Dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris, yaitu SK No.010/SK/KOM-BB/VII/21.
7. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.
8. Terpenuhi sesuai dengan Pedoman Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu SK KOM No.002/SK/KOM-BB/VI/2020 dan SK DIR No.072-A/SK/DIR-BB/VI/2020.

Fungsi dan Peran Direksi

Prinsip 5

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi

1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.
2. Jumlah anggota Direksi saat ini telah terpenuhi yaitu berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan.
3. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
4. Komposisi anggota Direksi telah memenuhi sesuai dengan kebutuhan.
5. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.
6. Terpenuhi.

Prinsip 6

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.
2. Bank telah memiliki Kebijakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) Kinerja Direksi yaitu SK No. 035/SK/DIR-BB/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.
3. Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.
4. Terpenuhi.

4. Fulfilled.
5. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.
6. In accordance with the Guidelines and Work Procedures of the Board of Commissioners, namely SK No.010/SK/KOM-BB/VII/21.
7. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function shall formulate a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors.
8. Fulfilled in accordance with the Nomination Guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors, namely SK KOM No. 002/SK/KOM-BB/VI/2020 and SK DIR No.072-A/SK/DIR-BB/VI/2020.

The Board of Directors' Function and Role

Principle 5

Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors

1. The determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the condition of the Public Company and its effectiveness in decision making.
2. The current number of members of the Board of Directors has been fulfilled, which is 4 (four) consisting of the President Director, Business Director, Operations Director and Compliance Director.
3. The determination of the composition of the members of the Board of Directors takes into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.
4. The composition of the members of the Board of Directors has complied with the needs.
5. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.
6. Fulfilled.

Principle 6

Improving the Quality of Job and Responsibility Performance of Board of Directors

1. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.
2. The Bank has a self-assessment policy for the performance of the Board of Directors, namely SK No. 035/SK/DIR-BB/III/2018 dated March 20, 2018.
3. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed in the Public Company's annual report.
4. Fulfilled.



5. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
6. Sesuai Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi No.394/SK/DIR-BB/VII/21 tanggal 29 Juli 2021.

Partisipasi Pemangku Kepentingan

Prinsip 7

Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan

1. Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.
2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti-fraud*.
3. Terpenuhi dengan SK DIR No.230/SK/DIR-BB/VI/2021 tentang Kebijakan Penerapan Strategi *Anti-Fraud*.
4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.
5. Terpenuhi dengan SK DIR No. No. 020/SK/DIR-BB/VI/17 tanggal 02 Juni 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.
7. Terpenuhi dengan SK DIR No.008/SK/DIR-BB/II/2022 tentang Kebijakan Perkreditan Bank.
8. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.
9. Terpenuhi dengan SK DIR No. 281/SK/DIR-BB/VII/21 tentang Pedoman *Whistleblowing*.
10. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
11. Terpenuhi SK No. Pedoman Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu SK KOM No.002/SK/KOM-BB/VI/2020 dan SK DIR No.072-A/SK/DIR-BB/VI/2020.

Prinsip 8

Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.
2. Bank juga menggunakan sosial media sebagai media untuk keterbukaan informasi
3. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain

5. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes.
6. In accordance with the Board of Directors' Code of Conduct No. 394/SK/DIR-BB/VII/21 dated July 29, 2021.

Participation of Stakeholders

Principle 7

Improving Corporate Governance Aspects Through Participation of Stakeholders

1. Being public means having a policy to prevent insider trading.
2. Public Companies have anti-corruption and anti-fraud policies.
3. Fulfilled with Decree of the Board of Directors No. 230/SK/DIR-BB/VI/2021 concerning Policy on Implementation of Anti-Fraud Strategy.
4. The Public Company has a policy regarding the selection and capacity building of suppliers or vendors.
5. Fulfilled with Decree of the Board of Directors No. 020/SK/DIR-BB/VI/17 dated June 2, 2017 concerning Guidelines for the Procurement of Goods and Services;
6. The Public Company has a policy regarding the fulfillment of creditors' rights.
7. Fulfilled with Decree of the Board of Directors No. 008/SK/DIR-BB/II/2022 concerning Bank Credit Policy.
8. Public Companies have a whistleblowing system policy.
9. Fulfilled with Decree of the Board of Directors No. 281/SK/DIR-BB/VII/21 concerning Whistleblowing Guidelines.
10. The Public Company has a policy of providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.
11. Fulfillment of Decree No. Guidelines for the Nomination of the Board of Commissioners and the Board of Directors, namely Decree of the Board of Commissioners No. 002/SK/KOM-BB/VI/2020 and Decree of the Board of Directors No.072-A/SK/DIR-BB/VI/2020.

Principle 8

Improving the Implementation of Information Disclosure.

1. Public Companies utilize the use of information technology more broadly than the Website as a medium for information disclosure.
2. The Bank also uses social media as a medium for information disclosure.
3. The Public Company Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in the Public Company's share ownership of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure

pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

4. Terpenuhi.

HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2021

Bank Banten secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) Penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. *Self Assessment* penerapan Tata Kelola yang Baik yang dilakukan oleh Bank merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola yang Baik dalam aktivitas pelaksanaan kegiatan bisnis Bank sehingga Bank dapat segera menetapkan rencana tindakan korektif yang diperlukan.

Selama tahun 2021, Bank Banten telah melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) Penerapan Tata Kelola yang Baik dengan menggunakan 11 (sebelas) aspek kriteria yang ditetapkan oleh OJK, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern.
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure).
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal.
11. Rencana Strategis Bank.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola pada periode Juli s/d Desember 2021 adalah sebagai berikut:

of the final beneficial owner in the Public Company's share ownership through the major and controlling shareholders.

4. Fulfilled.

ASSESSMENT RESULTS OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN 2021

Bank Banten periodically conducts a self-assessment of the Implementation of Good Corporate Governance by referring to the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 and Circular Letter of the Financial Services Authority No.13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. Self Assessment of the implementation of Good Governance conducted by the Bank is one of the efforts to improve and improve the quality of the implementation of Good Governance in the implementation of the Bank's business activities so that the Bank can immediately determine the necessary corrective action plans.

During 2021, Bank Banten has carried out a self-assessment of the Implementation of Good Governance using 11 (eleven) aspects of the criteria set by the OJK, namely:

1. Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors.
2. Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.
3. Completeness and Implementation of Committee Duties.
4. Handling Conflicts of Interest.
5. Implementation of the Bank's Compliance Function.
6. Implementation of the Internal Audit Function.
7. Implementation of the External Audit Function.
8. Implementation of Risk Management including Internal Control System.
9. Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Exposures.
10. Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions, Governance Implementation Report and Internal Reporting.
11. Bank's Strategic Plan.

The results of the Self Assessment of the Implementation of Governance within the period of July to December 2021 are as follows:



Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola

Results of Self Assessment of Governance Implementation

Peringkat / Level		Definisi Peringkat / Level Definition
Individu	3	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. / It reflects that the Bank's management has implemented good governance in general. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. / This level is projected in the adequate compliance with the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the application of Good Corporate Governance principles, in general these weaknesses are quite significant and require sufficient attention from the Bank's management.

A. Governance Structure

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - Komposisi jumlah anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang, telah sesuai dengan ketentuan regulator.
 - Seluruh anggota Direksi berasal dari kalangan profesional, serta independen dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - Komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini telah terpenuhi yaitu terdiri atas 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris.
 - Dewan Komisaris Bank berasal dari kalangan profesional dan independen.
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - Komposisi Komite telah sesuai dengan ketentuan (Ketua Komite tidak merangkap lebih dari 2 komite).
 - Seluruh Pihak Independen Anggota Komite berasal dari kalangan profesional dan independen terhadap Dewan Komisaris, Direksi dan / atau PSP Bank.
- Penanganan Benturan Kepentingan
Bank telah mengkinikan ketentuan terkait Penanganan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.
- Penerapan fungsi Kepatuhan Bank
 - Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

A. Governance Structure

- Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors
 - The composition of the number of members of the Board of Directors is 4 (four) people, in accordance with the provisions of the regulator.
 - All members of the Board of Directors come from professional circles, and are independent from fellow members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 - The Board of Directors has guidelines and work rules that include work ethic arrangements, working hours, and meetings.
- Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners
 - The current composition of the number of members of the Board of Commissioners has been fulfilled, consisting of 2 (two) Independent Commissioners and 1 (one) Commissione
 - The Bank's Board of Commissioners comes from professional and independent circles.
- Completeness and Implementation of Committee Duties
 - Composition of the Committee has complied with the provisions (Chairman of the Committee does not concurrently have more than 2 committees).
 - All Independent Parties Members of the Committee come from professional circles and are independent of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or PSP of the Bank.
- Conflicts of Interest Handling
The Bank has updated the provisions regarding the Handling of Transactions Containing Conflicts of Interest.
- Implementation of Bank's Compliance function
 - The appointment of the Director in charge of the Compliance Function is in accordance with the provisions of the Financial Services Authorit



b. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

6. Penerapan fungsi audit intern

- a. Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), yaitu Divisi Audit Intern yang dipimpin oleh Kepala Divisi Audit Intern.
- b. Secara kontinu melakukan kegiatan pelatihan serta pengarahan terhadap Auditor dalam rangka meningkatkan kompetensi audit.

7. Penerapan fungsi audit ekstern

Penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik telah memenuhi aspek-aspek yang ditetapkan oleh regulator dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

8. Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik.

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

Bank telah memiliki ketentuan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar termasuk pemantauan dan penyelesaian yang tercantum dalam ketentuan internal terkait perkreditan, antara lain Pedoman BMPK dan Kebijakan Perkreditan.

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal

- a. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- b. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

11. Rencana strategis Bank

- a. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.
- b. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik;

B. Governance Process

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam mengelola Bank sesuai Anggaran Dasar Bank.

b. The Bank has provided quality human resources in the compliance work unit to complete tasks effectively.

6. Internal audit function implementation

- a. The Bank already has an Internal Audit Unit (SKAI), namely the Internal Audit Division led by the Head of the Internal Audit Division
- b. Continuously conducting training activities and directing the Auditor in order to improve audit competence.

7. External audit function implementation

Audit assignments to public accountants and public accounting firms have met the aspects set by the regulator and registered with the Financial Services Authority.

8. Implementation of risk management including Internal Control System

The Bank has an adequate organizational structure to support the implementation of risk management and good internal control.

9. Provision of funds to related parties and provision of large funds (*large exposure*)

The Bank has provisions regarding the provision of funds to related parties and the provision of large funds including monitoring and settlement as stated in the internal provisions related to credit, including the BMPK Guidelines and Credit Policy.

10. Transparency of financial and non-financial conditions, governance implementation reports and internal reporting

- a. The Bank has policies and procedures regarding procedures for implementing transparency of financial and non-financial condition
- b. Availability of complete, accurate, and timely internal reporting supported by an adequate management information system.

11. Bank's strategic policy

- a. The Bank's strategic plan has been prepared in the form of a corporate plan and a business plan in accordance with the Bank's vision and mission
- b. The Bank's strategic plan is fully supported by the owner;

B. Governance Process

1. Duties and Responsibility Implementation of the Board of Directors

- a. The Board of Directors is fully responsible for managing the Bank in accordance with the Bank's Articles of Association

- b. Kebijakan strategis diputus melalui rapat Direksi, dan ditindaklanjuti secara teknis oleh satuan kerja terkait.
 - c. Pelaksanaan tugas Direksi bersifat independen dan profesional.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
 - b. Tidak ditemukan keputusan Dewan Komisaris yang merugikan Bank.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a. Rapat komite diselenggarakan sesuai keperluan Bank dan hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat.
 - b. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
4. Penanganan Benturan Kepentingan
Tidak terdapat keputusan atau transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi Kepatuhan Bank
 - a. Laporan Fungsi Kepatuhan Triwulanan yang telah disampaikan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris selama tahun 2021.
 - b. Bank telah membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank.
6. Penerapan fungsi audit intern
 - a. Divisi Audit Intern telah melaksanakan fungsi audit intern dan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
 - b. Pelaksanaan kerja Divisi Audit Intern telah dikaji ulang oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun sekali.
7. Penerapan fungsi audit ekstern
Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
 - a. Masih terdapat kebijakan-kebijakan dan strategi Bank yang belum dikinikan sesuai rentang waktu 1 tahun ke belakang ataupun berdasarkan perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan.
- b. Strategic policies are decided through a meeting of the Board of Directors, and followed up technically by the relevant work unit
 - c. The implementation of the duties of the Board of Directors is independent and professional.
2. Duties and Responsibility Implementation of Board of Commissioners
 - a. The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independentl
 - b. There were no decisions of the Board of Commissioners that were detrimental to the Bank.
3. Completeness and Implementation of Committee Duties
 - a. Committee meetings are held according to the needs of the Bank and the results of the meeting are stated in the minutes of the meetin
 - b. The results of committee meetings are recommendations that can be used optimally by the Board of Commissioners.
4. Conflicts of Interest Handling
There are no decisions or transactions that have a conflict of interest.
5. Implementation of Bank Compliance function
 - a. Quarterly Compliance Function Report that has been submitted to the President Director and the Board of Commissioners during 202
 - b. The Bank has taken steps to support the creation of a compliance culture in all of the Bank's business activities.
6. Internal audit function implementation
 - a. The Internal Audit Division has carried out the internal audit function and is carried out based on the annual work plan that has been approved by the President Director and the Board of Commissioner
 - b. The work implementation of the Internal Audit Division has been reviewed by external parties every 3 (three) years.
7. Exteranl audit function implementation
Public Accountant have carried out independent and professional audits.
8. Risk management implementation including Internal Control System
 - a. There are Bank policies and strategies that have not been updated according to the past 1 year or based on changes in factors that significantly affect the Bank's business activities, risk exposure, and/or risk profil



b. Peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan Bank.

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan jumlah besar telah sesuai dengan ketentuan Regulator.

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal

Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.

11. Rencana strategis Bank

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan.

C. Governance Outcome

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Pertanggungjawaban Direksi atas kinerja Bank tahun 2020 telah diterima pada RUPST tanggal 20 Mei 2021.

b. Program pelatihan karyawan disiapkan Divisi Human Capital & Transformasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan seluruh karyawan (bidang operasional, bisnis baru, dan lainnya sesuai kebutuhan Bank).

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

b. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan, antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.

b. The active role of the Board of Commissioners and the Board of Directors in supervising and managing the Bank.

9. Provision of funds to related parties and provision of large funds (*large exposure*)

Provision of funds to related parties and large amounts is in accordance with the provisions of the Regulator.

10. Transparency of financial and non-financial conditions, governance implementation reports and internal reporting

The Bank is required to compile a report on the implementation of governance at the end of each financial year with coverage in accordance with the provisions.

11. Bank's strategic plan

The Bank has prepared a realistic, comprehensive, measurable (*achievable*) Bank Business Plan (RBB) with due observance of the precautionary principle and responsiveness to changes.

C. Governance Outcome

1. Duties and Responsibility Implementation of the Board of Directors

a. The Board of Directors' accountability for the Bank's performance in 2020 was accepted at the AGMS on 20 May 2021.

b. Employee training programs are prepared by the Human Capital & Transformation Division to improve the knowledge, skills, and abilities of all employees (operations, new businesses, and others according to the Bank's needs).

2. Duties and Responsibility Implementation of Board of Commissioners

a. There is no owner intervention on the composition and/or implementation of the duties of the Board of Commissioner

b. Increased knowledge, skills, and abilities of Members of the Board of Commissioners in Bank supervision shown, among others, by improving the Bank's performance, solving problems faced by the Bank, and achieving results in accordance with Stakeholder expectations

3. Completeness and Duty Implementation of the Committee

Preparation of minutes of meetings, including the disclosure of dissenting opinions in a clear and well-documented manner.



4. Penanganan Benturan Kepentingan
Selama tahun 2021 Bank tidak menghadapi Benturan Kepentingan.
 5. Penerapan fungsi Kepatuhan Bank
Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.
 6. Penerapan fungsi audit intern
Pelaksanaan fungsi audit internal telah dilakukan secara cukup memadai.
 7. Penerapan fungsi audit ekstern
Cakupan atas pemeriksaan telah sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan yang berlaku.
 8. Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
 9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
 10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal
Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.
 11. Rencana strategis Bank
Penyusunan rencana strategis Bank disesuaikan kondisi internal Bank dan disusun sesuai dengan atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank
4. Conflicts of Interest Handling
During 2021 the Bank did not face any Conflict of Interest.
 5. Bank's Compliance function implementation
The Bank has submitted the main report on the implementation of the duties of the director in charge of the compliance function and a special report to the Financial Services Authority and related parties.
 6. Internal audit function implementation
The implementation of the internal audit function has been carried out adequately.
 7. External audit function implementation
The scope of the inspection is in accordance with the scope and applicable provisions.
 8. Risk management implementation including Internal Control System
The Board of Directors and the Board of Commissioners are able to actively supervise the implementation of risk management policies and strategies.
 9. Provision of funds to related parties and provision of large funds (*large exposure*)
Reports on the provision of funds to related parties have been submitted periodically to the Financial Services Authority in a timely manner.
 10. Transparency of financial and non-financial conditions, governance implementation reports and internal reporting
The Bank has submitted a complete and timely annual report to the Financial Services Authority and the Bank's shareholders.
 11. Bank's strategic plan
The preparation of the Bank's strategic plan is adjusted to the Bank's internal conditions and prepared in accordance with the basis of a comprehensive study by taking into account the business opportunities and strengths of the Bank.

Tabel Eksposur Risiko

Risk Exposure Table

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM

QUANTITATIVE DISCLOSURE OF COMMERCIAL BANK CAPITAL STRUCTURE

BANK: PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.

Komponen Modal / Capital Components		31 Desember 2021 (Audited) / December 31, 2021 (Audited)		31 Desember 2020 (Audited) / December 31, 2020 (Audited)	
		Bank	Konsolidasi / Consolidated	Bank	Konsolidasi / Consolidated
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Komponen Modal / Capital Components				
A.	Modal Inti / Core Capital	1.503.369	-	791.094	-
1.	Modal disetor / Paid-in capital	4.308.864	-	2.173.360	-
2.	Cadangan Tambahan Modal / Disclosed Reserve	-2.432.778	-	-801.760	-
3.	Modal Inovatif / Innovative Capital	-	-	-	-
4.	Faktor Pengurang Modal Inti / Core Capital Deduction Factor	2.674.252	-	2.409.076	-
5.	Kepentingan Non Pengendali / Non-Controlling Interest	-	-	-	-
B.	Modal Pelengkap / Supplementary Capital	21.421	-	16.922	-
1.	Level Atas / Upper Tier	21.421	-	16.922	-
2.	Level Bawah maksimum 50% / Maximum Lower Tier 50% Modal Inti maksimum 50% / Maximum Core Capital 50%	-	-	-	-
3.	Faktor Pengurang Modal Pelengkap / Supplementary Capital Deduction Factor	-	-	-	-
C.	Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap / Core Capital and Supplementary Capital Deduction	-	-	-	-
	Eksposur Sekuritisasi / Securitization Exposure	-	-	-	-
D.	Modal Pelengkap Tambahan yang Memenuhi Persyaratan / Eligible Additional Supplementary Capital	-	-	-	-
E.	Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar / Anticipation Additional Supplementary Capital	-	-	-	-
II	Total Modal Inti Dan Modal Pelengkap (A +B - C) / Total Core Capital And Supplementary Capital (A+B-C)	1.524.790	-	808.016	-
III	Total Modal Inti, Modal Pelengkap, dan Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar (A + B - C + E) / Total Core Capital, Supplementary Capital, And Additional Supplementary Capital To Anticipate Market Risk (A+B-C+E)	1.524.790	-	808.016	-
IV	Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit / Risk Weighted Assets (RWA) With Credit Charge	3.421.127	-	1.972.624	-
V	Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Operasional / Risk Weighted Assets (RWA) With Operational Charge	236.884	-	352.683	-
VI	Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Pasar / Risk Weighted Assets (RWA) With Market Charge	-	-	-	-
A.	Metode Standar / Standardized Method	-	-	-	-
B.	Model Internal / Internal Model	-	-	-	-
VII	Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar [Iii : (IV + V + VI)] / Capital Adequacy Risk For Credit, Operational And Market Risk [III : (IV + V + VI)]	41,68%	-	34,75%	-



Tabel Eksposur Risiko

Risk Exposure Table

Tabel 2.1.a Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah – Bank secara Individual

Table 2.1.a Disclosure of Net Claims by Region – Bank Only

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

No.	Kategori Portfolio / Portfolio Category	31 Desember 2021 / December 31, 2021			31 Desember 2020 / December 31, 2020		
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah / Receivables based on Region			Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah / Receivables based on Region		
		Banten	Luar Banten / Outside Banten	Total	Banten	Luar Banten / Outside Banten	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims to Government	-	1.684.758	1.684.758	-	1.031.220	1.031.220
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	68.897	68.897
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims on Banks	27.410	8.105	35.516	29.816	690	30.506
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Claims Secured by Residential Property	6.229	-	6.229	189.437	-	189.437
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Claims Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee Loan/Pension	1.660.196	736.346	2.396.542	1.660.041	700.181	2.360.222
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims on Micro and Small Enterprise and Retail Portfolio	88.099	25.875	113.974	144.668	3.318	147.986
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims on Corporate	33.832	61.980	95.812	726	11.006	11.732
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Claims That Have Been Due Date	92.153	343.776	435.930	81.110	90.195	171.305
11	Aset Lainnya / Other Assets	-	1.869.643	1.869.643	-	904.255	904.255
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposures at Sharia Unit (If any)	-	-	-	-	-	-
Total		1.907.920	4.730.484	6.638.404	2.105.798	2.809.762	4.915.560

*) sesuai pedoman pengisian bahwa Bank tidak perlu mengisi perbandingan tahun sebelumnya / according to the filling guidelines that the Bank does not need to fill in the previous year's data

Tabel Eksposur Risiko Risk Exposure Table

Tabel 2.1.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah – Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Table 2.1.b. Disclosure of Net Claims by region – Bank Consolidated with Subsidiaries

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

No.	Kategori Portfolio / Portfolio Category	31 Desember 2021 / December 31, 2021			31 Desember 2020 / December 31, 2020		
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah / Receivables based on Region			Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah / Receivables based on Region		
		Banten	Luar Banten / Outside Banten	Total	Banten	Luar Banten / Outside Banten	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims to Government	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims on Banks	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Claims Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Claims Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee Loan/Pension	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims on Micro and Small Enterprise and Retail Portfolio	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims on Corporate	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Claims That Have Been Due Date	-	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya / Other Assets	-	-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposures at Sharia Unit (If any)	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-



Tabel 2.2.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak – Bank secara Individu
 Table 2.2.a. Disclosure of Net Claims based on Remaining Contract Period – Bank Only

No.		Kategori Portfolio / Portfolio Category	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
			Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak / Net Claims Based On Remaining Contract Period			
			< 1thn / < 1 year	> 1thn s.d 3 thn / >1 year to 3 years	> 3thn s.d 5 thn / >3 years to 5 years	> 5thn / >5 years
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims to Government		1.684.758	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims on Public Sector Entity		-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims on Banks		1.689	19.717	14.110	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Claims Secured by Residential Property		415	1.025	698	4.092
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Claims Secured by Residential Property		-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee Loan/Pension		30.888	195.635	262.434	1.907.586
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims on Micro and Small Enterprise and Retail Portfolio		60.008	32.666	4.671	16.629
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims on Corporate		91.488	-	3.111	1.212
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Claims That Have Been Due Date		222.455	31.250	90.896	91.328
11	Aset Lainnya / Other Assets		1.869.643	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposures at Sharia Unit (If any)		-	-	-	-
Total			3.961.344	280.294	375.920	2.020.847

*) sesuai pedoman pengisian bahwa Bank tidak perlu mengisi perbandingan tahun sebelumnya / According to the charging that the bank is no need to fill comparison last year

Tabel 2.2.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak – Bank secara Konsolidasi dengan Pe
 Table 2.2.b. Disclosure of Net Claims based on Remaining Contract Period – Bank Consolidated with Subsidiaries

No.		Kategori Portfolio / Portfolio Category	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
			Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak / Net Claims Based On Remaining Contract Period			
			< 1thn / < 1 year	> 1thn s.d 3 thn / >1 year to 3 years	> 3thn s.d 5 thn / >3 years to 5 years	> 5thn / >5 years
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims to Government		-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims on Public Sector Entity		-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims on Banks		-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Claims Secured by Residential Property		-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Claims Secured by Residential Property		-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee Loan/Pension		-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

Non-Kontraktual / Non-Contractual		31 Desember 2020 / December 31, 2020					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak / Net Claims Based On Remaining Contract Period					
		< 1thn / < 1 year	> 1thn s.d 3 thn / >1 year to 3 years	> 3thn s.d 5 thn / >3 years to 5 years	> 5thn / >5 years	Non-Kontraktual / Non-Contractual	Total
		(7)	(8)				
-	1.684.758	1.031.220	-	-	-	-	1.031.220
-	-	68.036	-	-	-	-	68.036
-	-	-	-	-	-	-	-
-	35.516	7.764	17.337	5.282	-	-	30.383
-	6.229	74.737	72.414	10.798	31.350	-	189.299
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.396.542	546.169	430.563	173.396	1.200.160	-	2.350.288
-	113.974	90.033	25.364	6.542	25.651	-	147.590
-	95.812	10.893	32	-	721	-	11.646
-	435.930	103.143	28.780	33.986	5.091	-	171.000
-	1.869.643	904.255	-	-	-	-	904.255
-	-	-	-	-	-	-	-
-	6.638.404	2.836.250	574.490	230.004	1.262.973	-	4.903.717

303

Perusahaan Anak

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

Non-Kontraktual / Non-Contractual		31 Desember 2020 / December 31, 2020					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak / Net Claims Based On Remaining Contract Period					
		< 1thn / < 1 year	> 1thn s.d 3 thn / >1 year to 3 years	> 3thn s.d 5 thn / >3 years to 5 years	> 5thn / >5 years	Non-Kontraktual / Non-Contractual	Total
		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-



Tabel 2.2.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak – Bank secara Konsolidasi dengan Pe
 Table 2.2.b. Disclosure of Net Claims based on Remaining Contract Period – Bank Consolidated with Subsidiaries

No.	Kategori Portfolio / Portfolio Category	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak / Net Claims Based On Remaining Contract Period			
		< 1thn / < 1 year	> 1thn s.d 3 thn / >1 year to 3 years	> 3thn s.d 5 thn / >3 years to 5 years	> 5thn / >5 years
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims on Micro and Small Enterprise and Retail Portfolio	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims on Corporate	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Claims That Have Been Due Date	-	-	-	-
11	Aset Lainnya / Other Assets	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposures at Sharia Unit (If any)	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

Tabel 3.2.b.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo – Bank secara Individual

Table 3.2.b.1. Disclosure of Counterparty Credit Risk: Repo Transactions -Bank Only

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

No.	Kategori Portfolio / Portfolio Category	31 Desember 2021 / December 31, 2021				31 Desember 2020 / December 31, 2020			
		Nilai Wajar SSB Repo / Fair Value Sharia Supervisory Board Repo	Kewajiban Repo / Liabilities Repo	Tagihan Bersih / Net Claims	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo / Fair Value Sharia Supervisory Board Repo	Kewajiban Repo / Liabilities Repo	Tagihan Bersih / Net Claims	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims to Government	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims on Banks	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims on Micro and Small Enterprise and Retail Portfolio	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi / Claims on Corporate	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposures at Sharia Unit (If any)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

		31 Desember 2020 / December 31, 2020						
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak / Net Claims Based On Remaining Contract Period						
		Non- Kontraktual / Non- Contractual	Total	< 1thn / < 1 year	> 1thn s.d 3 thn / >1 year to 3 years	> 3thn s.d 5 thn / >3 years to 5 years	> 5thn / >5 years	Non- Kontraktual / Non- Contractual
		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-



**Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko
Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit – Bank secara Individual**
 Table 4.1.a. Disclosure of Net Claims Based on Risk Weight after Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation – Bank Only

No.	Kategori Portfolio / Portfolio Category	31 Desember 2021 / December 31, 2021												ATMR
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / Net Claims after Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation												
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya / Others		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A Eksposur Neraca / Balance Sheet Exposure														
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims to Government	1.691.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank / Claims on Banks	-	732.832	-	-	-	-	35.437	-	-	-	-	164.285	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Claims Secured by Residential Property	-	4.720	1.422	-	-	-	-	-	-	-	-	1.299	
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Claims Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai Pensiunan / Employee Loan/ Pension	-	-	-	-	-	-	2.382.045	-	-	-	-	1.191.023	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portoflio / Claims on Micro and Small Enterprise and Retail Portfolio	-	-	-	-	-	-	-	113.387	-	-	-	85.041	
9	Tagihan Kepada Korporasi / Claims on Corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	296.355	-	-	296.355	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Claims That Have Been Due Date	-	-	-	-	-	-	-	-	830	41.797	-	63.525	
11	Aset Lainnya / Other Assets	75.595	-	-	-	-	-	-	-	1.794.048	1.777.977	-	4.461.014	

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

Beban Modal / Capital Charge	31 Desember 2020 / December 31, 2020												ATMR	Beban Modal / Capital Charge
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / Net Claims after Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation													
	0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya / Others			
	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)		
- 1.031.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 28.100	-	-	-	-	-	-	- 62.598	-	-	-	-	-	31.299	2.504
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.143	2.776	2.580	-	-	-	-	27.729	-	-	-	-	-	14.381	1.150
104	- 189.282	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.895	3.032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.282	2.516	1.456.835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.367	23.309
6.803	- 75.480	-	-	-	-	-	-	- 72.696	-	-	-	-	69.618	5.569
23.708	2.300	3.499	-	-	-	-	-	-	-	5.934	-	-	6.634	531
5.082	- 50.589	-	-	-	-	-	- 34.041	-	39.651	46.719	-	-	136.868	10.949
356.881	35.545	-	-	-	-	-	-	-	- 852.639	16.071	-	-	876.746	70.140



**Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko
Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit – Bank secara Individual**
Table 4.1.a. Disclosure of Net Claims Based on Risk Weight after Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation – Bank Only

		31 Desember 2021 / December 31, 2021											
No.	Kategori Portfolio / Portfolio Category	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / Net Claims after Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation											ATMR
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya / Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposures at Sharia Unit (If any)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Neraca / Total Balance Sheet Exposure		1.766.913	737.552	1.422	-	-	-	2.417.482	113.387	2.091.233	1.819.774	-	6.262.542
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratiif / Exposure to Commitment/Contingency Obligations in Administrative Account Transactions													
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims to Government	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims on Banks	-	-	-	-	-	-	104	-	-	-	-	52
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Claims Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Claims Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan / Employee Loan/ Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims on Micro and Small Enterprise and Retail Portfolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims on Corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	3,211	-	-	3,211

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

Beban Modal / Capital Charge	31 Desember 2020 / December 31, 2020												ATMR	Beban Modal / Capital Charge
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / Net Claims after Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation													
	0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya / Others			
	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501.003	1.102.457	1.778.265	155	-	-	-	124.368	72.696	898.224	62.790	-	1.464.807	117.185	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	-	-	-	-	-	-	-	114,765	-	-	-	-	57,383	4,591



**Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko
Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit – Bank secara Individual**
 Table 4.1.a. Disclosure of Net Claims Based on Risk Weight after Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation – Bank Only

No.	Kategori Portfolio / Portfolio Category	31 Desember 2021 / December 31, 2021												ATMR
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / Net Claims after Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation												
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya / Others		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Claims That Have Been Due Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposures at Sharia Unit (If any	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Eksposur TRA / Total TRA Exposure		-	-	-	-	-	-	104	-	3,211	-	-	3,264	
C Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)														
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims to Government	1.321.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank / Claims on Banks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel / Claims on Micro and Small Enterprise and Retail Portfolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Korporasi / Claims on Corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah / Exposures at Sharia Unit (If any)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Eksposur Counterparty Credit Risk / Total Exposure Counterparty Credit Risk		1.321.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual
 Table 4.2.a. Disclosure of Net Claims and Credit Risk Mitigation Techniques

No.	Kategori Portfolio / Portfolio Category	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
		Bagian yang Dijamin Dengan / Exposure which is Secured by			
		Tagihan Bersih / Net Claims	Agunan / Collateral	Garansi / Warranty	Asuransi Kredit / Credit Insurance
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Eksposur Neraca / Balance Sheet Exposure					
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims to Government	1.691.318	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims on Banks	768.269	4.429	-	12.199
5	Kredit Beragun Rumah / Claims Secured by Residential Property	6.142	-	-	3.599
6	Kredit Beragun Properti / Claims Secured by Residential Property	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Perusahaan / Employee Loan/Pension	2.382.045	1.779	-	633.208
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel / Claims on Micro and Small Enterprise and Retail Portfolio	113.387	948	-	14.145
9	Tagihan Kepada Korporasi / Claims on Corporate	296.355	-	-	23.640
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Claims That Have Been Due Date	42.627	-	-	6.962
11	Aset Lainnya / Other Assets	1.869.643	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposures at Sharia Unit (If any)	-	-	-	-
Total Eksposur Neraca / Total Balance Sheet Exposure		7.169.786	7.155	-	693.752
B Eksposur Rekening Administratif / Administrative Account Exposure					
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims to Government	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims on Banks	104	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah / Claims Secured by Residential Property	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti / Claims Secured by Residential Property	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Perusahaan / Employee Loan/Pension	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel / Claims on Micro and Small Enterprise and Retail Portfolio	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi / Claims on Corporate	3.211	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Claims That Have Been Due Date	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposures at Sharia Unit (If any)	-	-	-	-
Total Eksposur Rekening Administratif / Total Administrative Account Exposure		3.316	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

		31 Desember 2020 / December 31, 2020					
		Bagian yang Dijamin Dengan / Exposure which is secured by					Bagian yang Tidak Dijamin / Unsecured Exposure
Lainnya / Others	Bagian yang Tidak Dijamin / Unsecured Exposure	Tagihan Bersih / Net Claims	Agunan / Collateral	Garansi / Warranty	Asuransi Kredit / Credit Insurance	Lainnya / Others	Bagian yang Tidak Dijamin / Unsecured Exposure
(7)	(8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9) - [(10)+(11)+(12)+(13)]
-	1.691.318	1.031.220	-	-	-	-	1.031.220
-	-	68.897	-	-	28.100	-	40.797
-	-	-	-	-	-	-	-
-	751.641	30.382	-	-	-	-	30.382
-	2.543	189.298	-	-	92	-	189.206
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.747.059	2.360.222	-	-	1.459.351	-	900.871
-	98.295	148.176	-	-	75.480	-	72.696
-	272.715	11.732	-	-	5.799	-	5.933
-	35.665	171.000	-	-	84.630	-	86.370
-	1.869.643	904.255	-	-	-	-	904.255
-	-	-	-	-	-	-	-
-	6.468.879	4.915.182	-	-	1.653.452	-	3.261.730
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	104	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.211	57.382	-	-	-	-	57.382
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.316	57.382	-	-	-	-	57.382



Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual
 Table 4.2.a. Disclosure of Net Claims and Credit Risk Mitigation Techniques

No.	Kategori Portfolio / Portfolio Category	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
		Bagian yang Dijamin Dengan / Exposure which is Secured by			
		Tagihan Bersih / Net Claims	Agunan / Collateral	Garansi / Warranty	Asuransi Kredit / Credit Insurance
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C Eksposur Counterparty Credit Risk / Counter party Credit Risk Exposure					
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims to Government	1.321.583	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims on Banks	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel / Claims on Micro and Small Enterprise and Retail Portfolio	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi / Claims on Corporate	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposures at Sharia Unit (If any)	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk/ Total Counter party Credit Risk Exposure		1.321.583	-	-	-
Total (A+B+C)		1.321.583	-	-	-

Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca
 Table 6.1.1. Disclosure of Asset Exposures in the Balance Sheet

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

No.	Kategori Portfolio / Portfolio Category	31 Desember 2021 / December 31, 2021			31 Desember 2020 / December 31, 2020		
		Tagihan Bersih / Net Claims	ATMR Sebelum MRK / RWA before CRM	ATMR Setelah MRK / RWA after CRM	Tagihan Bersih / Net Claims	ATMR Sebelum MRK / RWA before CRM	ATMR Setelah MRK / RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims to Government	1.691.318	-	-	1.031.220	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims on Public Sector Entity	-	-	-	68.897	45.349	31.299
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims on Banks	768.269	164.285	158.411	30.382	15.769	14.381
5	Kredit Beragun Rumah / Claims Secured by Residential Property	6.142	1.299	1.539	189.298	37.895	37.895
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Claims Secured by Commercial Property	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Perusahaan / Employee Loan/Pension	2.382.045	1.191.023	1.044.183	2.360.222	1.180.111	741.802
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel / Claims on Micro and Small Enterprise and Retail Portfolio	113.387	85.041	77.253	148.176	111.132	69.618

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

Lainnya / Others		Bagian yang Tidak Dijamin / Unsecured Exposure	31 Desember 2020 / December 31, 2020					Bagian yang Tidak Dijamin / Unsecured Exposure
			Bagian yang Dijamin Dengan / Exposure which is secured by					
			Tagihan Bersih / Net Claims	Agunan / Collateral	Garansi / Warranty	Asuransi Kredit / Credit Insurance	Lainnya / Others	
(7)	(8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9) - [(10)+(11)+(12)+(13)]	
-	1.321.583							
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1.321.583	-	-	-	-	-	-	
-	7.793.777	-	-	-	-	-	-	



Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca
 Table 6.1.1. Disclosure of Asset Exposures in the Balance Sheet

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

No.	Kategori Portfolio / Portfolio Category	31 Desember 2021 / December 31, 2021			31 Desember 2020 / December 31, 2020		
		Tagihan Bersih / Net Claims	ATMR Sebelum MRK / RWA before CRM	ATMR Setelah MRK / RWA after CRM	Tagihan Bersih / Net Claims	ATMR Sebelum MRK / RWA before CRM	ATMR Setelah MRK / RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Tagihan Kepada Korporasi / Claims on Corporate	296.355	296.355	279.521	11.732	11.732	6.633
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Claims That Have Been Due Date	42.627	63.525	54.873	171.000	236.675	136.867
11	Aset Lainnya / Other Assets	1.869.643	-	1.802.084	904.255	-	876.746
Total		7.169.786	1.801.528	3.417.863	4.915.182	1.638.663	1.915.241

Tabel 6.1.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif
 Table 6.1.2. Disclosure of Commitment/Contingent Liability Exposures in Administrative Account Transactions

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

No.	Kategori Portfolio / Portfolio Category	31 Desember 2021 / December 31, 2021			31 Desember 2020 / December 31, 2020		
		Tagihan Bersih / Net Claims	ATMR Sebelum MRK / RWA before CRM	ATMR Setelah MRK / RWA after CRM	Tagihan Bersih / Net Claims	ATMR Sebelum MRK / RWA before CRM	ATMR Setelah MRK / RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims to Government	-	-	-	-	0	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	0	0
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	0	0
4	Tagihan Kepada Bank / Claims on Banks	104	52	52	-	0	0
5	Kredit Beragun Rumah / Claims Secured by Residential Property	-	-	-	-	0	0
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Claims Secured by Commercial Property	-	-	-	-	0	0
7	Kredit Pegawai/Perusahaan / Employee Loan/Pension	-	-	-	-	0	0
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel / Claims on Micro and Small Enterprise and Retail Portfolio	-	-	-	-	0	0
9	Tagihan Kepada Korporasi / Claims on Corporate	3.211	3.211	3.211	57.382	57.382	57.382
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Claims That Have Been Due Date	-	-	-	-	0	0
Total		3.316	3.264	3.264	57.382	57.382	57.382

Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

Table 6.1.3. Disclosure of Exposure Due to Counterparty Credit Risk

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

No.	Kategori Portfolio / Portfolio Category	31 Desember 2021 / December 31, 2021			31 Desember 2020 / December 31, 2020		
		Tagihan Bersih / Net Claims	ATMR Sebelum MRK / RWA before CRM	ATMR Setelah MRK / RWA after CRM	Tagihan Bersih / Net Claims	ATMR Sebelum MRK / RWA before CRM	ATMR Setelah MRK / RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims to Government	1.321.583	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims on Banks	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel / Claims on Micro and Small Enterprise and Retail Portfolio	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi / Claims on Corporate	-	-	-	-	-	-
Total		1.321.583	-	-	-	-	-

Tabel 6.1.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

Table 6.1.7. Disclosure of Total Credit Risk Measurement

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020
Total ATMR Risiko Kredit / Total Credit Risk Weighted Asset	3.421.127	1.972.624
Total Faktor Pengurang Modal / Total Credit Risk Weighted Asset	-	-

Tabel 8.1.a. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Individual

Table 8.1.a. Disclosure of Quantitative Risk Operational - Bank Only

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

No.	Pendekatan yang Digunakan / Approach Used	31 Desember 2021 / December 31, 2021			31 Desember 2020 / December 31, 2020		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) / Gross Income (Average of the past 3 years)	Beban Modal / Capital Charge	ATMR / RWA	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) / Gross Income (Average of the past 3 years)	Beban Modal / Capital Charge	ATMR / RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar / Basic Indicator Approach	103,175	15,476	193,454	188,098	28,215	352,683
Total		103,175	15,476	193,454	188,098	28,215	352,683

Tabel 9.1.a. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah – Bank Secara Individual
 Table 9.1.a Disclosure of Rupiah Maturity Profile – Bank Only

No.	Pos-Pos / Posts	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
		Saldo / Balance	Jatuh Tempo / Maturity		
			<1 bulan / <1 month	> 1 bln s.d. 3 bln / >1 month to 3 months	>3 bln s.d. 6 bln / >3 months to 6 months
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I NERACA / BALANCE SHEET					
A. Aset / Assets					
1.	Kas / Cash	75.595	75.595	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia / Placement in Bank Indonesia	866.832	866.832	-	-
3.	Penempatan pada Bank / Placement in Other Banks	732.832	732.832	-	-
4.	Surat Berharga / Securities	817.926	-	200.913	-
5.	Kredit yang Diberikan / Loan	3.084.003	242.705	12.395	48.069
6.	Tagihan Lainnya / Other Receivables	1.321.583	1.321.583	-	-
7.	Lain-lain / Others	90.425	90.425	-	-
	Total Aset / Total Assets	6.989.195	3.329.972	213.308	48.069
B. Kewajiban / Liabilities					
1.	Dana Pihak Ketiga / Third Party Fund	4.639.455	1.999.654	574.521	354.725
2.	Kewajiban pada Bank Indonesia / Liabilities to Bank Indonesia	-	-	-	-
3.	Kewajiban pada Bank Lain / Liabilities to Other Banks	2.117.842	1.902.999	167.843	46.000
4.	Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities Issued	-	-	-	-
5.	Pinjaman yang Diterima / Fund Borrowings	-	-	-	-
6.	Kewajiban Lainnya / Other Liabilities	-	-	-	-
7.	Lain-lain / Others	196.450	177.409	-	-
	Total Kewajiban / Total Liabilities	6.953.747	4.080.062	742.364	400.725
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca / Difference between Assets and Liabilities in the Balance Sheet	35.449	-750.090	-529.055	-352.656
II REKENING ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIVE ACCOUNT					
A. Tagihan Rekening Administratif / Derivative Receivable					
1.	Komitmen / Commitment	-	-	-	-
2.	Kontijensi / Contingency	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif / Total Administrative Account Receivables	-	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif / Derivative Payable					
1.	Komitmen / Commitment	1.229	1.229	-	-
2.	Kontijensi / Contingency	64.305	-	-	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif / Total Derivative Payable	65.534	1.229	-	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif / Difference between Receivables and Liabilities in Administrative Accounts	-65.534	-1.229	-	-
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] / Difference (IA - IB) + (IIA - IIB)	-30.086	-751.319	-529.055	-352.656
	Selisih Kumulatif / Cumulative Difference	-30.086	-751.319	-1.280.374	-1.633.030

(dalam jutaan Rupiah / in millions of Rupiah)

		31 Desember 2020 / December 31, 2020					
>6 bln s.d. 12 bln / >6 months to 12 months	>12 bulan / >12 months	Jatuh Tempo / Maturity					
		Saldo / Balance	<1 bulan / <1 month	> 1 bln s.d. 3 bln / >1 month to 3 months	>3 bln s.d. 6 bln / > 3 months to 6 months	>6 bln s.d. 12 bln / > 6 months to 12 months	>12 bulan / >12 months
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	35.545	35.545	-	-	-	-
-	-	407.112	407.112	-	-	-	-
-	-	2.571	2.571	-	-	-	-
-	617.013	617.099	-	-	-	-	617.099
103.773	2.677.060	3.789.819	76.079	243.539	294.375	522.965	2.652.861
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	93.229	93.229	-	-	-	-
103.773	3.294.073	4.945.375	614.536	243.539	294.375	522.965	3.269.960
582.780	1.127.775	2.583.459	1.869.702	72.444	101.243	38.494	501.576
-	-	-	-	-	-	-	-
1.000	-	674.230	659.230	15.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	436.383	-	-	-	436.383	-
-	19.041	307.253	279.935	-	-	-	27.318
583.780	1.146.816	4.001.325	2.808.867	87.444	101.243	474.877	528.894
-480.008	2.147.257	944.050	-2.194.331	156.095	193.132	48.088	2.741.066
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6.373	-	-	-	-	6.373
-	64.305	110.043	-	-	-	-	110.043
-	64.305	116.416	-	-	-	-	116.416
-	-64.305	-116.416	-	-	-	-	-116.416
-480.008	2.082.952	827.634	-2.194.331	156.095	193.132	48.088	2.624.650
-2.113.038	-30.086	827.634	-2.194.331	-2.038.236	-1.845.104	-1.797.016	827.634





Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social Responsibility



“”

Sebagai Perseroan yang menjalankan bisnisnya di tengah-tengah masyarakat, Bank Banten senantiasa memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga dapat mencegah dampak negatif sekaligus menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan

As a company that runs its business among the society, Bank Banten always pays attention to social, economic and environmental impacts to prevent negative impacts while creating added value for all stakeholders

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social Responsibility



322



Perusahaan senantiasa berkomitmen menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melaksanakan proses identifikasi serta analisis terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan setiap aktivitas bisnis dan operasional yang di jalan (*due diligence*), guna menyusun pemetaan skala prioritas atas isu-isu keberlanjutan secara lengkap.

KOMITMEN PELAKSANAAN CSR

Bank Banten menyadari untuk menjamin keberlanjutan bisnis, Perseroan harus selalu berupaya memberikan manfaat bagi seluruh para pemangku kepentingan. Karenanya, Perseroan memandang bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan aspek yang sangat penting untuk dijalankan karena akan memberikan dampak positif terhadap nilai Perusahaan.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan ekonomi daerah wilayah Provinsi Banten. Sebagai bukti nyata, sepanjang tahun 2021, Bank Banten menjalankan tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan dengan memprioritaskan upaya membangun Banten untuk menjadi lebih baik. Bank Banten

The Company committed to carrying out its Social and Environmental Responsibility activities in a comprehensive and sustainable manner by carrying out a process of identification and analysis of the social, economic, and environmental impacts generated by each business and ongoing operational activities (*due diligence*), in order to develop a complete priority scale mapping of sustainability issues.

CSR IMPLEMENTATION COMMITMENT

Bank Banten realizes that to ensure business continuity, the Company must always strive to provide benefits to all stakeholders. Therefore, the Company views that Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) is a very important aspect to be implemented as it will have a positive impact on the Company's values.

As a Regional Development Bank, the Company is committed to paying special attention to regional economic development in the Banten Province. As tangible evidence, throughout 2021, Bank Banten carried out its responsibilities to all stakeholders by prioritizing efforts to build Banten to be better. Bank Banten ran a CSR program that synergized with all stakeholders to create a prosperous Banten community

“ Dalam pengelolaan program dan dana CSR Perseroan dilaksanakan oleh Divisi Sekretariat Perusahaan. Perseroan senantiasa berkomitmen dalam menjalankan tanggung jawab sosial

The management of the Company's CSR program and funds is carried out by the Corporate Secretariat Division. The Company is committed to carrying out social responsibility. ”

menjalankan program CSR yang bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Banten yang sejahtera sekaligus memperkuat pembangunan Banten. Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan wujud sumbangsih nyata Perseroan untuk masyarakat dan lingkungan yang telah mendukung keberlanjutan usaha Perseroan.

PROFIL PERSEROAN

Pembahasan mengenai Profil Perusahaan telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pembahasan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

DEWAN KOMISARIS

Pembahasan mengenai Dewan Komisaris telah diuraikan pada Bab Profil.

DIREKSI

Pembahasan mengenai Direksi telah diuraikan pada Bab Profil.

life while strengthening Banten's development. The implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities was a form of the Company's real contribution to society and the environment that has supported its business sustainability.

COMPANY PROFILE

Explanation on the Company's Profile has been stated in the Company Profile Chapter.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Explanation on the General Meeting of Shareholders has been stated in the Good Corporate Governance Chapter.

BOARD OF COMMISSIONERS

Explanation on the Board of Commissioners has been stated in the Company Profile Chapter.

BOARD OF DIRECTORS

Explanation on the Board of Directors has been stated in the Company Profile Chapter.

Unit Penanggung Jawab Pelaksanaan Kinerja Keberlanjutan

Unit In Charge of Sustainability Performance Implementation

Untuk menciptakan kinerja yang berkelanjutan, Direksi Perseroan memiliki kewenangan untuk membentuk beberapa Unit Kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas Direksi dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja keberlanjutan di Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

To create a sustainable performance, the Board of Directors of the Company has the authority to establish several Work Units that have duties and responsibilities in accordance with the duties of the Board of Directors in order to support the implementation of sustainability performance in the Company, with the following description:

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pelaksana Kinerja Keberlanjutan

Duties and Responsibilities of the Unit In Charge of Sustainability Performance Implementation

Tugas yang Berkaitan dengan Aspek Keberlanjutan / Duty Related to Sustainability Aspects	Unit Pelaksana/Penanggung Jawab / Unit In Charge
Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan Perusahaan / Corporate Governance and Compliance Implementation	Divisi Kepatuhan / Compliance Division
Pengelolaan keuangan / Financial management	Divisi Akuntansi dan Keuangan / Accounting and Finance Division
Pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa / Goods and services procurement management	Divisi Operasional dan Umum / Operational and General Division
Pengelolaan masalah lingkungan / Environmental issues management	Divisi Sekretariat Perusahaan / Corporate Secretariat Division
Pengelolaan masalah ketenagakerjaan / Manpower issues management	Divisi Human Capital & Transformasi / Human Capital & Transformation Division
Pengelolaan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Occupational Health and Safety (OHS) issues management	Divisi Human Capital & Transformasi / Human Capital & Transformation Division
Pengelolaan hubungan dengan masyarakat (termasuk pelaksanaan CSR) / Relationship with the public management (including CSR implementation)	Divisi Sekretariat Perusahaan dan Hukum / Corporate Secretariat and Legal Division
Pengelolaan hubungan dengan pelanggan / Relationship with customers management	- Divisi Operasional dan Umum / Operational and General Division - Divisi Dana dan Jasa / Fund and Service Division

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, dan Unit Penanggung Jawab Pelaksanaan Kinerja Keberlanjutan

Competency Development for Board of Commissioners, Board of Directors, and Unit In Charge Of Sustainability Performance Implementation

Perseroan senantiasa menerapkan aspek keberlanjutan, untuk itu Dewan Komisaris, Direksi, dan Unit Penanggung Jawab Pelaksanaan Kinerja Keberlanjutan melakukan pengembangan kompetensi terkait penerapan aspek keberlanjutan dan prinsip Keuangan Berkelanjutan. Sepanjang tahun 2021 pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris dan Direksi telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan. Sementara pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Unit Penanggung Jawab Pelaksanaan Kinerja Keberlanjutan diuraikan pada Bab Profil Perusahaan.

The Company always applies the sustainability aspects, as such the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Unit In Charge of Sustainability Performance Implementation carry out competency development related to the implementation of sustainability aspects and the principles of Sustainable Finance. Throughout 2021, the competency development participated by the Board of Commissioners and the Board of Directors has been described in the Corporate Governance Chapter. Meanwhile, the competency development that has been followed by the Unit Responsible for the Implementation of Sustainability Performance is described in the Company Profile Chapter.

PENGELOLA KEGIATAN CSR

Dalam pengelolaan program dan dana CSR Perseroan dilaksanakan oleh Divisi Sekretariat Perusahaan. Perseroan senantiasa berkomitmen dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Mengingat kondisi Perusahaan yang masih dalam proses transformasi dan belum menghasilkan laba, saat ini anggaran TJSL Perseroan disisihkan dari biaya promosi dan sponsorship.

DUE DILIGENCE PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sebagai Perseroan yang menjalankan bisnisnya di tengah-tengah masyarakat, Bank Banten senantiasa memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga dapat mencegah dampak negatif sekaligus menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Adapun isu yang menjadi fokus program TJSL Perseroan merupakan bagian dari 17 *SDG's* (*Sustainable Development Goals*), sehingga ada 6 (enam) aspek program, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana alam;
2. Pendidikan berkualitas;
3. Kegiatan keagamaan;
4. Aspek sosial terhadap pengentasan kelaparan;
5. Kesehatan; dan
6. Lingkungan.

Berdasarkan keenam aspek tersebut, Perseroan juga telah memetakan pemangku kepentingan Perseroan, baik dari sisi internal Perseroan maupun dari eksternal, sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan Internal / Internal Stakeholder	Pemangku Kepentingan Eksternal / External Stakeholder
Pemegang Saham / Shareholders	Nasabah / Customers
Pegawai / Employees	Masyarakat / Public
	Pemerintah Daerah / Regional Government
	Mitra Kerja/Pemasok / Business Partners/Suppliers
	Media Massa / Mass Media

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Dalam merumuskan strategi pelaksanaan program CSR Perseroan, mengacu pada aspirasi para pemangku kepentingan dan diselaraskan dengan ketentuan POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan. Sepanjang tahun 2021

CSR ACTIVITIES MANAGER

The management of the Company's CSR program and funds is carried out by the Corporate Secretariat Division. The Company is committed to carrying out social responsibility. Considering the condition of the Company, which is still in the process of transformation and has not yet made a profit, the Company's CSR budget is currently set aside from promotion and sponsorship costs.

DUE DILIGENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM IMPLEMENTATION

As a company that runs its business among the society, Bank Banten always pays attention to social, economic and environmental impacts to prevent negative impacts while creating added value for all stakeholders. The issues that are the focus of the Company's CSR program are part of the 17 *SDG's* (*Sustainable Development Goals*), hence the 6 (six) aspects of the program, which include the following:

1. Concern for communities affected by natural disasters;
2. Quality education;
3. Religious activity;
4. Social aspects of hunger alleviation;
5. Health; and
6. Environment.

Based on these six aspects, the Company has also mapped its stakeholders, both internally and externally, as follows:

CSR PROGRAM IMPLEMENTATION STRATEGY

The Company's formulation of CSR program implementation strategy is matched with stakeholders' aspirations and the provisions of POJK 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions. Throughout 2021, the Company's



Perseroan memiliki ruang lingkungan tanggung jawab sosial Perusahaan di bidang lingkungan, kemasyarakatan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja, serta tanggung jawab terhadap nasabah.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAIK YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

Pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan secara umum bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi para pemangku kepentingan, diantaranya bagi nasabah, pegawai, masyarakat, pemegang saham, serta *regulator* agar sejalan dengan visi dan misi Perseroan. Bank Banten juga berkomitmen untuk fokus menyalurkan dana tanggung jawab sosial Perusahaan yang merupakan bagian dari 17 *Sustainable Development Goals* yang menasar 6 (enam) aspek program yang telah disebutkan sebelumnya.

scope of corporate social responsibility are environment, community, occupational health, security and safety, as well as responsibility to customers.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES, BOTH OBLIGATIONS AND EXCEEDING OBLIGATIONS

In general, the implementation of corporate social responsibility aims to make a positive contribution to stakeholders, including customers, employees, society, shareholders and regulators to be in line with the Company's vision and mission. Bank Banten is committed to focus on disbursing corporate social responsibility funds which are part of the 17 Sustainable Development Goals targeting the 6 (six) aspects of the previously-mentioned program.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia

Corporate Social Responsibility on Human Rights

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Perseroan senantiasa berupaya berkomitmen menjalankan aktivitas operasional yang memenuhi aspek perlindungan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan praktik ketenagakerjaan yang memperhatikan prinsip kemanusiaan sekaligus menjamin tidak terjadi pelanggaran HAM, termasuk tindakan diskriminasi.

COMMITMENT AND POLICY ON HUMAN RIGHTS

The Company strives for the commitment to carrying out operational activities that meets the protection and Human Rights (HAM) aspects. This commitment is manifested in the form of implementing labor practices that pay attention to humanitarian principles while at the same time ensuring that there are no human rights violations, including acts of discrimination.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAM

Perseroan selalu memperhatikan aspek HAM dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), yang diimplementasikan pada aktivitas-aktivitas berikut ini:

1. Penghormatan Hak Dasar Pekerja (Penghapusan Diskriminasi, Standar Pengupahan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pengembangan Kompetensi)

Perseroan melaksanakan sejumlah praktik ketenagakerjaan yang menjadi bagian tanggung jawab kepada pegawai. Perseroan menerapkan prinsip kesetaraan, suku, agama, ras, dan golongan sebagai wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, keselamatan, dan kesehatan kerja.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES RELATED TO HUMAN RIGHTS

The Company always pays attention to the human rights aspect in the management of Human Resources (HR), which is implemented in the following activities:

1. Respect for Employee's Basic Rights (Elimination of Discrimination, Wage Standards, Occupational Health and Safety and Competency Development)

The Company implements a number of manpower practices which are part of the responsibilities to the employees. The Company applies the principles of equality, ethnicity, religion, race and class as a form of compliance with Law No. 13 of 2003 concerning Labor, occupational safety and health.

2. Pencegahan Tenaga Kerja Anak dan Kerja Paksa

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Sebagai upaya mencegah praktik kerja paksa, Perseroan telah mengatur hari dan jam kerja sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 77.

3. Hak Cuti Pegawai

Perseroan memberikan hak cuti kepada pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Cuti Tahunan dan Cuti Besar setiap pegawai ditetapkan selama 15 (lima belas) hari kerja dalam setahun.
- Hak cuti pegawai diberikan kepada karyawan-karyawati yang telah memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih secara berturut-turut.
- Cuti melahirkan diberikan kepada pegawai wanita yang sudah menikah untuk mempersiapkan proses melahirkan dan proses perawatan setelah melahirkan. Waktu cuti maksimal 3 (tiga) bulan, yaitu 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan.
- Pegawai yang menderita sakit diberikan hak cuti sakit dengan tidak memotong hak cuti tahunan dan wajib melampirkan surat keterangan dokter yang mencantumkan diagnosa.
- Pegawai wanita yang dalam masa haid merasakan sakit pada hari pertama dan kedua dapat mengajukan cuti haid dan tidak memotong hak cuti tahunan.
- Pegawai yang telah bekerja selama masa kerja 5 (lima) tahun selama berturut-turut berhak atas cuti besar selama 1 (satu) bulan yang diberikan pada tahun keenam dengan tata cara pelaksanaan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Pegawai berhak atas cuti menjalankan ibadah wajib keagamaan untuk kali pertama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Cuti di luar tanggungan Perusahaan diberikan kepada pegawai yang telah memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih secara berturut-turut dengan permohonan cuti dan tata cara pelaksanaan cuti yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

4. Kebebasan untuk Beribadah

Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing. Untuk pegawai yang beragama Islam, Perseroan memfasilitasi ruang guna menjalankan ibadah shalat di setiap kantor operasional Bank.

2. Prevention of Child Labor and Forced Labor

The Company is committed to fulfilling Law No.13 of 2003 concerning Manpower regarding the protection, wages and welfare. The Company has also regulated working days and hours in accordance with Law No. 13 of 2003 Article 77 as an effort to prevent forced labor practices.

3. Employee Leave Rights

The Company grants leave rights to employees with the following conditions:

- Annual Leave and Leave of each employee is set for 15 (fifteen) working days in a year.
- Employee leave rights are granted to employees who have worked for 12 (twelve) months or more consecutively.
- Maternity leave is given to married female employees to prepare for childbirth and postnatal care, the maximum length of rest is 3 (three) months, 1.5 (one and a half) months before giving birth and 1.5 (one and a half) months after giving birth.
- Employees suffering from illness are entitled to sick leave without deducting annual leave rights and are required to attach a doctor's certificate stating the diagnosis.
- Female employees who feel pain on the first and second days of menstruation can apply for menstrual leave and not deduct annual leave entitlements.
- Employees who have worked for 5 (five) consecutive years of work are entitled to a 1 (one) month grand leave which is granted in the sixth year with the implementation procedure regulated in separate provisions.
- Employees are entitled to leave to perform compulsory religious worship for the first time in accordance with the prevailing laws and regulations.
- Unpaid leave is given to employees who have worked for 3 (three) years or more consecutively with the request for leave and the procedures for implementing the leave are regulated in separate provisions.

4. Freedom to Worship

The Company provides opportunities for all employees to perform worship according to their respective beliefs. For Muslim employees, the Company facilitates space for praying in every operational office of the Bank.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Perusahaan yang merupakan entitas usaha selalu bersinggungan dengan berbagai pihak. Atas kesadaran itu, Bank Banten memiliki komitmen untuk senantiasa mewujudkan penerapan prinsip operasi yang adil sebagai bagian dari upaya pemenuhan tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan.

Secara garis besar, operasi yang adil menegaskan pentingnya pengelolaan Perusahaan sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku, termasuk di antaranya anti korupsi, keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab, persaingan yang adil, mendorong tanggung jawab sosial di rantai nilai; dan menghargai hak kepemilikan.

PELAKSANAAN KOMITMEN OPERASI YANG ADIL

Dalam menerapkan GCG, Perseroan senantiasa melakukan upaya pencegahan praktik penyimpangan dan kecurangan dengan menyusun sejumlah kebijakan internal yang relevan dengan asas-asas operasi yang adil. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan anti-korupsi yang mencakup pencegahan benturan kepentingan, dan penerapan *Whistleblowing System* (WBS) serta Kode Etik.

Perseroan telah menjalankan WBS guna mengoptimalkan peran serta insan Perseroan dan pihak lain terkait, dalam mengungkap praktik pelanggaran atau kecurangan yang terjadi pada lingkup internal Bank Banten.

Adapun uraian penjelasan lengkap mengenai implementasi kebijakan Anti-Korupsi, WBS, dan kebijakan internal Perusahaan lainnya yang relevan dengan asas-asas operasi yang adil sudah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, pada Laporan Tahunan ini.

DAMPAK KEBIJAKAN

Penerapan kebijakan asas-asas operasi yang adil berdampak langsung pada karyawan, antara lain terciptanya kegiatan usaha dan iklim persaingan yang sehat sehingga berdampak positif pada realisasi kinerja operasional dan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

COMMITMENT AND POLICY ON FAIR OPERATION

In carrying out its business operations, the Company as a business entity is always in contact with various parties. Based on this awareness, Bank Banten is committed to always realizing the application of fair operating principles as part of efforts to fulfill responsibilities to all stakeholders.

Broadly speaking, fair operation emphasizes the importance of managing the Company in accordance with prevailing business ethics; including anti-corruption, involvement in responsible politics; fair competition; promoting social responsibility in the value chain; and respecting property rights.

IMPLEMENTATION OF FAIR OPERATION COMMITMENT

In implementing GCG, the Company always makes efforts to prevent irregularities and fraudulent practices by compiling a number of internal policies that are relevant to the principles of fair operation. These policies include anti-corruption policies that include preventing conflicts of interest, and implementing the Whistleblowing System (WBS) and Code of Ethics.

The Company implements WBS in order to optimize the participation of the Company's personnel and other related parties, in uncovering violations or fraud practices that occur in the internal scope of Bank Banten.

The full description of the implementation of the Anti-Corruption policy, WBS, and other internal Company policies that are relevant to the principles of fair operation have been described in the Corporate Governance Chapter, in this Annual Report.

POLICY IMPACT

The full description of the implementation of the Anti-Corruption policy, WBS, and other internal Company policies that are relevant to the principles of fair operation have been described in the Corporate Governance Chapter, in this Annual Report.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Corporate Social Responsibility on The Environment

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Perseroan meyakini aspek lingkungan hidup senantiasa menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan seluruh industri untuk turut melindungi alam dan lingkungan hidup, Perseroan memiliki komitmen yang kuat dalam pemenuhan tanggung jawab terkait lingkungan hidup meskipun bidang usaha Perseroan tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan eksplorasi alam.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Perseroan memberikan perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan hidup melalui penciptaan suasana kerja yang mengusung konsep *go green* baik di lingkungan kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang.

DAMPAK DAN RISIKO OPERASIONAL BANK TERHADAP LINGKUNGAN

Sebagai Perusahaan yang berkegiatan usaha pada sektor industri keuangan, seluruh kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan tidak berdampak dan berisiko langsung terhadap lingkungan hidup.

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan menjalankan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup melalui berbagai program, antara lain sebagai berikut:

- **Efisiensi Penggunaan Energi**

Perseroan berupaya melakukan efisiensi dalam penggunaan energi sebagai salah satu bentuk kontribusi Perseroan terhadap lingkungan hidup. Perseroan menyadari, listrik dan BBM yang menjadi sumber energi yang banyak digunakan Perseroan bersumber dari bahan bakar fosil yang tidak terbarukan. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan secara jangka panjang.

Perusahaan terus berupaya melakukan efisiensi dalam penggunaan energi. Tindakan itu merupakan implementasi dari kebijakan ramah lingkungan, yakni SK Direksi No. 145/SK/DIR-BB/XII/19 tentang Pedoman Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

COMMITMENT AND POLICY ON THE ENVIRONMENT

The Company believes that the environmental aspect will always be one of the main factors that affect the sustainability of the Company's business. In accordance with the provisions of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, which requires all industries to participate in protecting nature and the environment, the Company has a strong commitment to fulfilling environmental responsibilities even though the Company's line of business is not in direct contact with natural exploration activities.

In environmental management, the Company pays attention to environmental sustainability through creating a work atmosphere that carries the concept of going green both at the head office and at branch offices.

IMPACT AND RISK OF BANK OPERATIONS ON THE ENVIRONMENT

As a Company operating in the financial industry, all the Company's business activities have no direct impact and risk to the environment.

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES RELATED TO THE ENVIRONMENT

The Company carries out social responsibility related to the environment through various programs, including the following:

- **Efficient Energy Use**

The Company seeks to create efficiency in the use of energy as the Company's contribution to the environment. The Company realizes that electricity and fuel, which are the energy sources widely used by the Company, come from non-renewable fossil fuels. In addition, the use of fossil fuels also has a negative impact on the environment in the long run.

The Company continues to strive for efficiency in energy use. This action is the implementation of an environmentally friendly policy, namely the Decree of the Board of Directors No. 145/SK/DIR-BB/XII/19 concerning Guidelines for Sustainable Finance Action Plans.



• **Pengelolaan Limbah**

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perseroan juga menghasilkan limbah yang utamanya merupakan limbah domestik (sampah perkantoran). Perseroan berupaya untuk mengelola limbah dengan baik melalui penyediaan tempat pembuangan sampah di setiap kantor operasional. Untuk mengelola limbah tersebut, Perseroan menggunakan layanan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan di masing-masing wilayah yang mengambil sampah di Perseroan secara berkala.

• **Efisiensi Penggunaan Kertas**

Dalam rangka berkontribusi terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Perseroan melakukan upaya efisiensi penggunaan kertas di setiap operasionalnya. Upaya tersebut dilakukan melalui memaksimalkan penggunaan sistem digital, seperti penggunaan email atau internet untuk keperluan surat menyurat. Dan jika memang membutuhkan kertas untuk keperluan kantor seperti *drafting*, Perseroan sudah menerapkan kebijakan penggunaan kertas bekas atau *print* bolak-balik.

• **Program Penghijauan**

Perseroan menyadari bahwa menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menjadi suatu keharusan demi masa depan yang lebih baik. Untuk itu, Perseroan memberikan bantuan program penghijauan yang diimplementasikan dalam bentuk:

1. Penanaman pohon di sekitar area trotoar jalan utama Kantor pusat Bank Banten.
2. Penanaman pohon mangrove di wilayah pesisir pantai Ujung Kulon Pandeglang, Banten.

DAMPAK KEGIATAN

Perseroan telah berhasil merealisasikan target terkait CSR di bidang lingkungan sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan manajemen Perseroan untuk tahun 2021. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan Perseroan menghasilkan dampak langsung, antara lain:

- Efisiensi biaya kantor.
- Penurunan suhu panas bumi.
- Terjaga kelestarian lingkungan.

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN

Sampai dengan tahun 2021, Perseroan belum memiliki sertifikasi di bidang lingkungan.

• **Waste Management**

In its operations Company also produces waste, which is mainly domestic waste (office garbage). The Company strives to manage waste properly by providing garbage dump areas in every operational office. To manage this waste, the Company uses the services provided by the Sanitation Office in each area which collects the waste on a regular basis.

• **Efficient Paper Consumption**

In order to contribute to reducing greenhouse gas (GHG) emissions, the Company has created paper consumption efficiency in each of its operations. This effort is carried out through optimizing the use of digital systems such as email or intranet for correspondence. And if paper is absolutely required for office needs such as drafting, the Company is already using used paper or both-side printing.

• **Greening Program**

The Company realizes that maintaining and preserving the environment is a must for a better future. To that end, the Company provides assistance for reforestation programs which are implemented in the form of:

1. Planting trees around the sidewalk area of the main road of Bank Banten head office.
2. Planting mangrove trees in the coastal area of Ujung Kulon Pandeglang, Banten.

ACTIVITIES IMPACTS

The Company has succeeded in realizing targets related to CSR in the environmental sector in accordance with the activity plan set by the Company's management for 2021. The implementation of environmental management that has been carried out by the Company has resulted in direct impacts, including:

- Office cost efficiency
- Decrease in the global temperature
- Environmental sustainability

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION

As of 2021, the Company did not have a certification in the field of environment.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Sebagai badan usaha, selain menjalankan bisnisnya, Perseroan juga bertanggung jawab dalam pembangunan daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Di samping itu, Perseroan juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan guna menopang kelancaran kegiatan bisnis dan perekonomian di sektor riil.

Terkait penanganan pengaduan masalah lingkungan, sejauh ini Perseroan belum menjalankan mekanisme sistem pengaduan tersebut. Hal ini dikarenakan Perseroan sebagai pelaku jasa keuangan dalam kegiatan usahanya tidak secara langsung bersinggungan dengan lingkungan, sehingga pengaduan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, tidak ada. Namun demikian dalam menjalankan fungsi tanggung jawab sosial dan lingkungan, Perseroan akan berusaha mengoptimalkan pelayanan dan penyelesaian masalah pengaduan dengan menghubungi Bank Banten kantor cabang terdekat atau melalui *Call Center* 1500410.

BIAYA YANG DIKELUARKAN

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup sepanjang tahun 2021, Perseroan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

ENVIRONMENTAL COMPLAINTS MECHANISM

Apart from performing its business, the Company is also responsible for regional development and community living standard improvement. Moreover, the Company also has the social and environmental responsibility required to support the effectiveness of business and economic activities in the real sector.

With regards to the handling of complaints on environmental issues, the Company has not yet implemented a complaint system mechanism. This is because, as a financial service business, the Company does not directly affect the environment, hence there are no complaints related to environmental issues. However, in carrying out its social and environmental responsibility function, the Company will try to optimize its services and complaints can be submitted by contacting the nearest Bank Banten branch office or via the call center: 1500410.

COST INCURRED

In implementing social responsibility related to the environment throughout 2021, the Company has realized a budget of Rp0 (zero).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, Dan Keselamatan Kerja

Corporate Social Responsibility on Manpower, Occupational Health and Safety

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan berupaya untuk menjadi perusahaan yang taat asas dan taat aturan, termasuk dalam hal ketenagakerjaan, Perseroan selalu berupaya untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tanggung jawab sosial terhadap pekerja, Perseroan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menciptakan tempat kerja dan lingkungan yang aman dan sehat dengan perlakuan dan pemenuhan hak setara kepada semua pegawai dan mitra kerja tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, jenis kelamin, dan afiliasi politik.

Berkaitan dengan kewajiban tersebut, Perseroan memastikan bahwa Perusahaan selalu menjalankan praktik ketenagakerjaan yang baik dan benar. Selain menyempurnakan sistem secara terus-menerus dan menyediakan layanan kesehatan

COMMITMENT AND POLICY ON MANPOWER, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

As a Regional-State-Owned Enterprise (BUMD), the Company strives to be a company that abides by the principles and rules, including in the matter of employment, strives to comply with all applicable laws and regulations. As its social responsibility towards employees, the Company is responsible to providing and creating a safe and healthy workplace and environment with equal treatment and fulfilment of the rights of all employees and business partners without discrimination on the basis of race, religion, gender and political affiliation.

Regarding these obligations, the Company ensures that the Company always carries out good and correct employment practices. In addition to continuously improving the system and providing health services to employees and their family



kepada pegawai dan anggota keluarganya, Perseroan juga memberikan transparansi informasi ketenagakerjaan dengan rutin mengadakan sosialisasi peraturan kerja dan kode etik. Untuk memenuhi aspek keselamatan kerja, Perseroan memastikan alat pemadam kebakaran dan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan selalu tersedia, berfungsi, dan mudah diakses.

Dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dengan pegawai, sekaligus demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pegawai, Perseroan senantiasa berpedoman pada sejumlah peraturan berikut ini:

1. Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan Kerja.

KEGIATAN DAN DAMPAK KEGIATAN

Pelaksanaan kebijakan Perseroan terkait bidang ketenagakerjaan yakni sebagai berikut:

1. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik diyakini sebagai salah satu faktor penunjang kinerja Perseroan untuk dapat mencapai performa maksimal. Perseroan terus berupaya membangun SDM terbaik dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Provinsi Banten untuk menjadi insan Bank Banten tanpa membedakan golongan, suku, ras, agama, dan gender.

2. Kesetaraan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan

Setiap pegawai Bank Banten memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan program disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana pengembangan perusahaan. Sepanjang tahun 2021, Perseroan mengadakan pendidikan dan/atau pelatihan yang telah dirinci pada bab Tinjauan Unit Pendukung Bisnis bagian Sumber Daya Manusia.

3. Remunerasi

Kebijakan remunerasi yang diterapkan Perseroan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan *skill*, kompetensi, dan integritas pegawai. Perseroan juga telah menaati semua aturan yang berlaku terkait remunerasi, di mana besaran remunerasi seluruh pegawai Bank

members, the Company also provides transparency of manpower information by regularly conducting dissemination of work regulations and code of conduct. To meet the safety aspects of work, the Company ensures that fire extinguishers and first aid kits are always available, functional and easily accessible.

In building harmonious industrial relations with the employees, as well as for the creation of a safe and comfortable work environment for all employees, the Company always adheres to the following rules:

1. Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety.
2. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.
3. Law No. 36 of 2009 concerning Health.
4. Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems.

ACTIVITIES AND IMPACTS

The implementation of Company policies related to the manpower sector can be explained as follows:

1. Gender Equality and Job Opportunities

Qualified Human Resources is believed to be one of the supporting factors for the Company in order to achieve maximum performance. The Company continues to strive to recruit the best HR and provide equal opportunities to all Indonesian people to become Bank Banten personnel regardless of class, race, religion and gender.

2. Equality in Education and Training Programs

Every employee of Bank Banten has the same opportunity to take part in education and training programs, and program implementation is tailored to the needs and development plans of the company. Throughout 2021, the Company held education and/or training as detailed in the Human Resources section of the Business Support Unit Review chapter.

3. Remuneration

The remuneration policy implemented by the Company is based on the provisions of the applicable laws and regulations by prioritizing employee skills, competence and integrity. The Company has also complied with all applicable rules regarding remuneration, where the amount of remuneration for all Bank employees is in



telah sesuai atau berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank. Terkait dengan remunerasi, Perseroan senantiasa berupaya agar tidak terjadi gap yang terlalu tinggi. Perseroan pun tidak menutup kemungkinan atas penambahan besaran remunerasi dan kompensasi bagi karyawan dengan prestasi tertentu serta capaian melebihi sasaran, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan penilaian *Key Performance Indicators* (KPI). Adapun remunerasi yang diterima oleh Insan Bank Banten adalah sebagai berikut:

1. Upah/Gaji pokok;
2. Tunjangan, yang terdiri dari:
 - Tunjangan Jabatan.
 - Tunjangan Pendidikan
 - Tunjangan Mutasi Lokasi Kerja.
 - Tunjangan Hari Raya.
 - Tunjangan Pulsa Telepon Seluler.
 - Tunjangan Pernikahan.
3. Fasilitas-fasilitas terdiri dari:
 - Fasilitas Asuransi Kesehatan.
 - Fasilitas Pembelian Kaca Mata.
 - Fasilitas Kredit Pegawai.
 - Fasilitas Perjalanan Dinas.
 - Fasilitas Kepesertaan Program BPJS Kesehatan.
 - Fasilitas Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun) Fasilitas Kegiatan Olah Raga, dan Keagamaan
 - Fasilitas Sarana Ibadah Keagamaan
4. Bantuan dan santunan yang diberikan terdiri dari:
 - Bantuan Musibah dan Bencana Alam
 - Santunan Kematian

4. Fasilitas Pengobatan

Perseroan memberikan jaminan penggantian biaya rawat inap di rumah sakit, rawat jalan setelah keluar dari rumah sakit, biaya persalinan, biaya perawatan gigi, penggantianacamata, alat bantu dengar, pemeriksaan lab, dan pengobatan medis lainnya yang direkomendasikan dokter pasca rawat inap. Selain itu Perseroan juga melengkapi fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang tersedia di setiap kantor layanan untuk keperluan pegawai.

5. Asuransi Kesehatan

Perseroan mengikutsertakan pegawai beserta keluarganya dalam asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di mana pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan

accordance with or above the Minimum Wage standard applicable in the operational area of the Bank. With regard to remuneration, the Company always strives to avoid too high a gap. The Company also does not rule out the possibility of increasing the amount of remuneration and compensation for employees with certain achievements and achievements exceeding targets, based on the results of performance evaluations and assessment of *Key Performance Indicators* (KPI). The remuneration received by Bank Banten personnel is as follows:

1. Basic wage/salary;
2. Allowances, which consist of:
 - Positional allowance
 - Education allowance
 - Transfer Allowance
 - Holiday allowance
 - Cellular phone credit allowance.
 - Marriage allowance.
3. The facilities consist of:
 - Health insurance facility
 - Eyewear Purchase Facility
 - Employee Credit Facility
 - Official Travel Facility
 - BPJS Health Program Participation Facilities
 - BPJS Employment Program Participation Facility (Work accident insurance, Life Insurance, Pension Plan and Pension Benefits), Facilities of Sports & Religious Activities
 - Religious Worship Facilities
4. The assistance and compensation provided consists of:
 - Disaster and Natural Disaster Relief
 - Compensation for death

4. Medical Facilities

The Company provides reimbursement benefits for hospitalization costs, outpatient care after discharge from the hospital, baby delivery costs, dental care costs, glasses replacement, hearing aids, lab examinations and other medical treatments recommended by post-hospital doctors. In addition, The Company complements the First Aid facility for Accidents (P3K) which is available at every service office for the needs of employees.

5. Health Insurance

The Company enrolls employees and their families into health insurance organized by BPJS Healthcare which is implemented in stages. This facility aims to provide protection and insurance coverage when undergoing

proteksi dan biaya pertanggungan asuransi kepada karyawan serta keluarganya ketika menjalani pemeriksaan kesehatan atau perawatan di rumah sakit, termasuk jaminan bagi karyawan dan istri pegawai yang menjalani persalinan. Guna menyukseskan program ini, Perseroan telah melakukan sosialisasi mengenai BPJS Kesehatan kepada pegawai agar dapat memahami tentang program BPJS Kesehatan baik secara konsep maupun teknis pelaksanaannya.

6. Program Dana Pensiun

Perseroan telah mengikutsertakan seluruh pegawai sebagai peserta jaminan Program Dana Pensiun Bank Banten, dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Tujuan program ini, yakni untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak setelah purna bakti.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Perseroan berkomitmen kuat untuk menerapkan praktik-praktik terbaik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) melalui upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat bagi para pegawai serta nasabah yang datang agar dapat mengoptimalkan kinerja dan produktivitasnya dengan menerapkan prinsip K3 di seluruh kegiatan operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat risiko kecelakaan kerja pada industri perbankan terbilang rendah. Namun demikian, Perseroan tetap berinisiatif memberikan perhatian khusus untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Salah satu upaya Perseroan terkait menghindari risiko kecelakaan kerja adalah dengan menyusun *layout* kantor dengan baik dan menggunakan peralatan-peralatan yang ergonomis untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman.

Perseroan juga melakukan identifikasi tingkat dan risiko bahaya di setiap unit kerja, yang kemudian ditetapkan upaya mitigasi yang sebaiknya dilakukan. Di samping itu, Perseroan juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan program. Hal itu guna memastikan efektivitas penurunan risiko bahaya telah sesuai dengan rencana yang digunakan sebagai input data dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan selanjutnya.

TINGKAT *TURNOVER* KARYAWAN

Divisi HCT juga telah menghentikan sebanyak 134 karyawan pada tahun 2021. Data *turnover* karyawan tersebut sebagai berikut:

medical examinations or hospital treatment, including insurance for employees and the employees' wives who are undergoing labor. The Company has conducted dissemination regarding BPJS Healthcare to employees hence they can understand about the program both in concept and in technical implementation.

6. Pension Fund Program

All employees have been included as participants in the Bank Banten Pension Fund Program, with a Defined Benefit Pension Program (PPMP) to provide sustainable income for Participants and Eligible Parties after retirement.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

The Company is highly committed to implementing the best practices of Occupational Health and Safety (OHS) through efforts to create a safe, comfortable and healthy work environment for the employees and customers to optimize their performance and productivity by applying OHS principles in all activities in accordance with prevailing laws and regulations.

The level of risk of work accidents in the banking industry is relatively low. However, the Company still takes the initiative to pay special attention to avoid work accidents. One of the Company's efforts related to avoiding the risk of work accidents is by arranging a good office layout and using ergonomic equipment to create a healthy, safe, and comfortable work environment.

The Company also identifies the level and risk of danger in each work unit, which then determines the mitigation efforts that should be carried out. In addition, the Company also periodically evaluates the implementation of the program. This is to ensure that the effectiveness of hazard risk reduction is in accordance with the plan that is used as data input in determining further corrective steps.

EMPLOYEE *TURNOVER* RATE

The HR Division has also terminated 134 employees in 2021. The employee *turnover* data is as follows:

Pensiun / Retiring	2
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri / Resigning	126
PHK / Terminated	4
Meninggal dunia / Passed away	2
Total berhenti / Total resigned	134 orang

Berdasarkan data tersebut di atas, tingkat *turnover* karyawan di Bank Banten sebesar 7,69%.

MEKANISME PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN

Perseroan menyediakan sarana pengaduan masalah ketenagakerjaan yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai untuk menyampaikan pengaduan, saran, serta rekomendasi. Ketika terjadi permasalahan terkait ketenagakerjaan, Perseroan mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan melalui mekanisme bipartit. Namun jika tidak mendapatkan kesepakatan, maka Perseroan menjalankan proses sesuai regulasi internal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait ketenagakerjaan.

DAMPAK KEGIATAN

Dengan menerapkan tanggung jawab sosial terkait K3, menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenang pada setiap insan Bank Banten sehingga akan menghasilkan kinerja positif bagi Perseroan. Sebaliknya, dengan timbulnya kecelakaan kerja dapat memengaruhi aktivitas kerja serta dapat merugikan karyawan maupun Perusahaan.

Based on the above data, the employee turnover rate at Bank Banten was 7.69%.

EMPLOYMENT PROBLEM SOLVING MECHANISM

The Company provides a means of complaint on labor issues that can be used by all employees to submit complaints, suggestions, and recommendations. When there are problems related to employment, the Company prioritizes amicable settlement through a bipartite mechanism. However, if there is no agreement, the Company will carry out the process according to internal regulations that refer to the applicable laws and regulations, especially those related to employment.

IMPACT OF ACTIVITIES

By implementing social responsibility in OHS, the employees are psychologically calmer and they will be guaranteed to receive welfare rights from the Company to elevate their performance. Good performance will have a positive impact on the Company. Conversely, the occurrence of work accidents can affect work activities and can harm employees and the Company.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Social Responsibility In Social and Community Development

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Perseroan memiliki komitmen untuk memberdayakan masyarakat secara berkesinambungan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program TJSL. Bank menyusun program dan melaksanakan kegiatan TJSL yang dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah di mana Bank beroperasi.

Program-program tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang dijalankan oleh Bank Banten mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

COMMITMENT AND POLICY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

The Company is committed to empowering the community in a sustainable manner which was manifested through various TJSL programs. The Bank creates programs and implements TJSL activities that positively impact on the living standard and welfare of the community, especially in areas where the Bank operates.

The social responsibility programs related to social and community development carried out by Bank Banten refer to the laws and regulations in Indonesia, including the following:



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; 6. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; 9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 10. POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Law No. 25 of 2007 concerning Investment; 2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; 3. Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises; 4. Law No. 13 of 2011 concerning Handling of the Poor; 5. Government Regulation No. 32 of 1998 concerning Small Business Guidance and Development; 6. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility; 7. Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 59 of 2017 concerning Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals; 8. Financial Services Authority Regulation No. 1/ POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector; 9. Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 13 of 2012 concerning Forum for the Responsibility of the Business World in the Implementation of Social Welfare; 10. 1POJK 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions. |
|---|---|

Dalam menerapkan program tanggung jawab sosial kepada masyarakat, Perseroan menekankan pada beberapa hal utama, yaitu tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat penyaluran agar dapat terlihat peran nyata Perseroan di tengah masyarakat demi keberlangsungan Bank.

In implementing social responsibility programs to the community, the Company emphasizes on several main things, namely the right target, the right benefits, and the right distribution so that the Company's real role in the community can be seen for the sustainability of the Bank.

Sebagai bentuk pemenuhan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, program TJSI Perseroan disalurkan dalam beberapa bidang yang meliputi pendidikan, kewirausahaan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, dan edukasi literasi keuangan perbankan. Pelaksanaan program tersebut merupakan bentuk kontribusi Perseroan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas kehidupan, dan menciptakan lingkungan yang bermanfaat serta meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat.

As a form of fulfillment of the principles of Good Corporate Governance, the Company's CSR programs are channeled in several areas including: education, entrepreneurship, health, social society, and banking financial literacy education. The implementation of the program is a form of the Company's contribution to sustainable economic development, improving the quality of life, and creating a beneficial environment as well as enhancing community empowerment.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Perseroan memiliki jaringan yang tersebar luas di Provinsi Banten sehingga kegiatan sosial masyarakat menjadi bagian dari keberlangsungan Perseroan. Pada tahun 2021 Perseroan melakukan kegiatan sosial dan lingkungan dengan berfokus pada beberapa kegiatan yang memiliki dampak terhadap langkah kebaikan dan empati kepada masyarakat yang terdampak bencana alam dan kesehatan bersama menuju masyarakat Banten yang lebih baik, sehat dan terbebas,

ACTIVITIES IMPLEMENTATION

The Company has a wide-spread network in Banten Province so that community social activities are part of the Company's sustainability. In 2021, the Company carried out social and environmental activities by focusing on several activities that had an impact on kindness and empathy for people affected by natural disasters and joint health towards a better, healthier and free Banten community from the Covid-19 pandemic. As part of these efforts, the Company carried out a mapping of

dari pandemi Covid-19. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perseroan melakukan pemetaan terhadap isu-isu sosial pada masyarakat di sekitar area operasional demi terciptanya *Sustainable Development Goals* di wilayah Provinsi Banten dengan hasil sebagai berikut:

1. Bantuan korban bencana alam;
2. Sarana dan prasarana umum;
3. Sarana ibadah;
4. Pendidikan;
5. Pengentasan kemiskinan;
6. Bantuan obat-obatan.

social issues in the community around its operational areas in order to create Sustainable Development Goals in the Banten Province with the following results:

1. Assistance for victims of natural disasters;
2. Public facilities and infrastructure;
3. Facilities of worship;
4. Education;
5. Poverty alleviation;
6. Medical assistance.

Kegiatan TJSL terkait kegiatan sosial yang dilaksanakan Perseroan diantaranya sebagai berikut:

CSR activities related to social activities carried out by the Company include the following:

No.	Bidang / Area	Nama Kegiatan / Activities	Tanggal / Date	Tempat / Place	Alamat / Address	Biaya / Cost
1	Keagamaan / Religious	Pembangunan Yayasan Al - Idrisiyah / Al-Idrisiyah Foundation Construction	22 Januari 2021 / January 22, 2021	Kota Serang	Kp. Sampang 3 RT004/ RW001 Kel. Terumbu Kec. Kasemen Kota Serang, Banten	5.000.000
2	Sosial / Social	Bantuan Sembako Bencana Alam Banjir di Wilayah Tangerang / Food Assistance for Flood Victims in Tangerang Area	23 Februari 2021 / February 23, 2021	Tangerang	Perumahan Total Persada, Kota Bumi Tangerang	9.855.620
3	Olahraga / Sports	Sponsorship Perbasasi Banten Acara PON Papua 2021 Pelatda Banten / Sponsorship of Perbasasi Banten for PON Papua 2021 Pelatda Banten	7 April 2021 / April 7, 2021	Cikupa	Perum Medang Lestari Jl. Lestari Hijau Blok C7 No. A14 RT008 RW007, Balaraja	8.100.000
4	Keagamaan / Religious	Partisipasi dalam Program CSR Pemerintah Kabupaten Pandeglang / Participation in the Pandeglang Regency Government's CSR Program	26 April 2021 / April 26, 2021	Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	12.495.000
5	Sosial / Social	Buka Puasa Bersama dan Bantuan Sosial / Mass Iftar and Social Assistance	29-30 April 2021 / April 29-30, 2021	Kota Serang	Kota Serang	11.855.100
6	Keagamaan / Religious	Pemberian Santunan Anak Yatim dan Buka Bersama di Seluruh Kantor Cabang / Giving Compensation to Orphans and Mass Iftar in All Branch Offices	29 April 2021 / April 29, 2021	Kantor Cabang Bank Banten di Banten dan Luar Banten / Bank Banten Branch Offices in Banten and Outside Banten	Kantor Cabang Bank Banten / Bank Banten Branch Office	127.958.438
7	Keagamaan / Religious	Bantuan Sosial dan Pemberian Santunan (LVRI Kota Serang, Rumah Tahfidz Qur'an Al Halim, Yayasan Kalimatunsawa, Tenaga Dasar di Lingkungan Gedung Negara Prov Banten / Social Assistance and Compensation (LVRI Serang City, Tahfidz Qur'an Al Halim House, Kalitunsawa Foundation, Basic Staff in the Banten Province State Building Environment	29 April 2021 / April 29, 2021	Kota Serang	Gedung Negara Provinsi Banten	20.000.000
8	Keagamaan / Religious	Sponsorship Berbagi Kebajikan Ramadhan melalui Ekbispar Pokja Wartawan Banten / Sponsorship Sharing the Goodness of Ramadan through the Ekbispar Pokja Banten Journalists	7 Mei 2021 / May 7, 2021	Kota Serang	Kota Serang	1.500.000



No.	Bidang / Area	Nama Kegiatan / Activities	Tanggal / Date	Tempat / Place	Alamat / Address	Biaya / Cost
9	Keagamaan / Religious	Pemberian Takjil Bulan Ramadhan 1442 H di KC dan KCP / Giving Takjil on Ramadan 1442 H at KC and KCP	10 Mei 2021 / May 10, 2021	Kantor Cabang Bank Banten di Banten dan Luar Banten / Bank Banten Branch Offices in Banten and Outside Banten	Kantor Cabang Bank Banten / Bank Banten Branch Office	35.212.385
10	Sosial / Social	Bantuan Dana CSR pada LVRI Kota Serang dan Paguyuban UMKM / CSR Fund Assistance to LVRI Serang City and the MSME Association	19 Mei 21 / May 19, 2021	Pandeglang	Gedung Juang 45 Kab. Pandeglang	12.500.000
11	Sosial / Social	Sponsorship Gerakan Pemberian Vaksinasi Serentak di Dinas Kesehatan Provinsi Banten / Sponsorship of the Simultaneous Vaccination Movement at the Banten Provincial Health Office	29 Juni 2021 / June 29, 2021	Kota Serang	Pelataran Gedung Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka Pabuaran, Serang Banten	75.000.000
12	Sosial / Social	Pemberian Masker dan Hand Sanitizer dalam rangka HUT Ke-5 BB di Seluruh KC dan KCP / Provision of Masks and Hand Sanitizer in the framework of the 5th Anniversary of BB in all KC and KCP	29 Juli 2021 / July 29, 2021	Seluruh Cabang	Kantor Cabang Bank Banten / Bank Banten Branch Office	61.780.000
13	Sosial / Social	Bantuan Terpal untuk Hunian Korban Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Lebak Gedong Kab Lebak Prov Banten / Tarpaulin Assistance for Shelters for Landslide Victims in Lebak Gedong District, Lebak Regency, Banten Province	26 Agustus 2021 / August 26, 2021	Kabupaten Lebak	Kantor Cabang Rangkasbitung	10.000.000
14	Keagamaan / Religious	Pembangunan Masjid At-Taqwa Kp.Guha Ciminyak Desa Ciminyak Kec. Muncang Kab. Lebak / Construction of At-Taqwa Mosque Kp. Guha Ciminyak, Ciminyak Village, Kec. Muncang Kab. Lebak	2 September 2021 / September 2, 2021	Kabupaten Lebak	Kampung Guha, Desa Ciminyak, Kec. Muncang, Kab. Lebak - Banten	15.000.000
15	Keagamaan / Religious	Pemberian Bantuan BAZNAS Provinsi Banten Dalam Rangka Vaksinasi "Kita Jaga Kiai" / Provision of BAZNAS Assistance for Banten Province for "We Take Care of Kiai" Vaccinations	28 September 2021 / September 28, 2021	Kota Serang	Masjid Agung Kota Serang Banten	50.000.000
16	Sosial / Social	Bantuan Dukungan Pemberian Sembako kepada Masyarakat Serang dan Cilegon Melalui Satuan Grup Satu KOPASSUS / Support for the Provision of Basic Food to the Communities of Serang and Cilegon Through the KOPASSUS Group One Unit	4 Oktober 2021 / October 4, 2021	Kabupaten Serang	Desa Lontar, Kec. Tirtayasa	9.789.000
17	Keagamaan / Religious	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Majelis Dzikir Bumi Alit Padjajaran – Cikuesal / Commemoration of the Birthday of the Prophet Muhammad SAW at Council of Earth Dhikr Alit Padjajaran - Cikuesal	23 Oktober 2021 / October 23, 2021	Kota Serang	Kecamatan Cikeusal	20.000.000
18	Olahraga / Sports	Pemberian Bantuan Hadiah untuk Atlet dan Pelatih Asal Kabupaten Tangerang Peraih Medali Emas PON XX Papua / Provision of Prizes for Athletes and Trainers from Tangerang Regency who Won Gold Medals for Papua PON XX	27 Oktober 2021 / October 27, 2021	Kabupaten Tangerang	KONI Kota Tangerang	15.000.000

No.	Bidang / Area	Nama Kegiatan / Activities	Tanggal / Date	Tempat / Place	Alamat / Address	Biaya / Cost
19	Sosial / Social	Pemberian Bantuan Dana Gebyar Vaksin Kabupaten Pandeglang / Provision of Assistance for Vaccines in Pandeglang Regency	29 Oktober 2021 / October 29, 2021	Kabupaten Pandeglang	Jl.Komp SMA 1 Cigadung RT/RW 001/013 Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung, Kab. Pandeglang	2.500.000
20	Keagamaan / Religious	Pemberian Bantuan Kegiatan KECERAN ke-25 Tahun Mande Kamboja Putih Banten / Provision of Assistance for the 25th KECERAN Activity of Mande Kamboja Putih Banten	18 November 2021 / November 18, 2021	Kota Serang	Alun-Alun Serang	3.000.000

BIAYA TJSL TERHADAP MASYARAKAT

Selama tahun 2021, Perseroan telah merealisasikan dana TJSL terkait kegiatan sosial sebesar Rp506.545.543,- (lima ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

DAMPAK KEGIATAN TJSL TERHADAP MASYARAKAT

Pengembangan sosial kemasyarakatan merupakan salah satu hal yang memiliki peranan yang cukup penting dalam hal keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Perusahaan menyadari apabila perusahaan mengabaikan tanggung jawab sosialnya, maka hal tersebut dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan, berupa tuntutan dari lingkungan internal dan eksternal Perusahaan khususnya masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi terganggunya keberlangsungan usaha, perlu sikap yang tegas dan komitmen yang tinggi untuk menjaga hubungan yang baik dan berkesinambungan terhadap *stakeholders*.

TJSL EXPENSE TO THE PUBLIC

In 2021, the Company realized a TJSL fund for social activities amounting to Rp506,545,543 (five hundred six million five hundred forty five thousand five hundred forty three rupiah).

IMPACT OF CSR ACTIVITIES ON SOCIETY

Community social development is one of important roles in the survival of a company. The Company realizes that if it neglects its social responsibility, it can interfere with the company's business continuity, such as demands from the company's internal and external environment, especially the community. As such, to anticipate the disruption of business continuity, it is necessary to have a firm attitude and high commitment to maintain a good and sustainable relationship with the stakeholders.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Produk Atau Nasabah

Corporate Social Responsibility Towards Products or Customers

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memberikan kontribusi yang terbaik bagi para nasabahnya dari tahun ke tahun demi kenyamanan dan kepercayaan nasabah. Untuk itu Perseroan menawarkan inovasi dalam pelayanan dan produk untuk menguatkan kompetensi visinya menjadi Bank yang berkinerja tinggi dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Di samping itu, Perseroan juga menyadari bahwa layanan yang berkualitas menjadi kunci utama dalam menjaga loyalitas nasabah serta keberlangsungan bisnis. Karena itu Perseroan selalu berupaya memahami kebutuhan nasabah dan mendahulukan layanan yang premium guna memastikan pertumbuhan usaha dalam jangka panjang.

COMMITMENT AND POLICY

The Company is committed to always providing the best contribution for its customers from year to year for the convenience and trust of customers. For this reason, the Company offers innovations in services and products to strengthen the competence of its vision to become a high-performing bank and create added value for the community. In addition, the Company also realizes that quality service is the main key in maintaining customer loyalty and business continuity. Therefore, the Company always strives to understand customer needs and prioritize premium services to ensure long-term business growth.



ISU-ISU DAN RISIKO YANG RELEVAN TERKAIT KONSUMEN

Perseroan telah melakukan pemetaan terkait isu-isu dan risiko yang relevan terkait konsumen. Perseroan mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Peraturan OJK No.31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Pemenuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan isu dan risiko utama bagi Perseroan.

CAKUPAN DAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN

Cakupan dan lingkup utama tanggung jawab sosial kepada konsumen adalah penanganan keluhan pelanggan. Untuk itu, Perseroan telah membuka saluran komunikasi dengan nasabah dan calon nasabah, yaitu melalui layanan pelanggan di *Call Center* 1500410. Fasilitas *call center* ini dapat diakses selama 24 jam oleh nasabah. Selain itu, Perseroan juga menyediakan *counter customer service* di setiap kantor layanan.

Lebih jauh lagi, mengacu pada Peraturan OJK Nomor 7/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan untuk konsumen dan/atau masyarakat serta Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di sektor jasa keuangan, Perseroan juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan literasi keuangan kepada masyarakat.

PELAKSANAAN KEGIATAN Ketersediaan Informasi Produk

Ketersediaan informasi mengenai Perseroan selalu terintegrasi terhadap kepuasan nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan informasi publik, Perseroan mengelola situs resmi yang beralamat di www.bankbanten.co.id yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam situs *web* tersebut, Perseroan mencantumkan informasi lengkap produk dan jasa, pelaporan, dan informasi lain yang relevan. Ketersediaan informasi mengenai Perseroan kepada publik merupakan bagian dari penerapan prinsip keterbukaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

CONSUMER-RELEVANT ISSUES AND RISKS

The Bank has carried out mapping related issues and risks that are relevant to consumers. The Company refers to the policies and regulations applicable in Indonesia:

1. OJK Regulation No.31/POJK.07/2020 on the Implementation of Consumer and Community Services in the Financial Services Sector by the Financial Services Authority.
2. Bank Indonesia Regulation No.22/20/PBI/2020 on Bank Indonesia Consumer Protection.

Compliance with these provisions is a major issue and risk for the Company.

SCOPE AND COVERAGE OF RESPONSIBILITY TO CONSUMERS

The main scope and coverage of social responsibility to consumers is the handling of customer complaints. To that end, the Company has opened a channel of communication with customers and prospective customers, namely through customer service at the 1500410 Call Center. This call center facility can be accessed 24 hours by customers. In addition, the Company also provides customer service counter at each service office.

Furthermore, according to OJK Regulation No. 7/POJK.07/2016 concerning Improvement of Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and/or Society and OJK Circular No. 30/SEOJK.07/2017 on Implementation of Activities to Improve Financial Literacy in the Financial Services Sector. The Company is also expected to take an active role in providing financial literacy education to the public.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES Product Information Availability

The availability of information on the Company is always integrated with customer satisfaction. To meet the need for public information, the Company maintains an official website at www.bankbanten.co.id which can be easily accessed by the public and other stakeholders. In this website, the Company includes complete product and service information, reporting, and other relevant information. The availability of information about the Company to the public is part of the Good Corporate Governance principle of transparency.

Layanan Pelanggan

Perseroan menyediakan layanan pelanggan di *Call Center* 1500410 untuk memastikan berinteraksi dengan Perseroan, dan juga sebagai saluran komunikasi bagi Perseroan dengan nasabah dan calon nasabah.

Penanganan Keluhan Pelanggan

Perseroan melakukan pemantauan, pelaporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah secara rutin kepada Direksi, unit-unit kerja, serta pihak regulator. Laporan digunakan untuk dapat mendukung bank dalam pengembangan proses penanganan pengaduan nasabah yang sistematis dan akurat. Penyampaian pelaporan disampaikan melalui laporan bulanan bank umum terintegrasi kepada Bank Indonesia serta melalui sistem elektronik Si-Peduli (Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Nasabah) kepada OJK. Perseroan juga menjadi anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Untuk meminimalkan sengketa dengan konsumen, setiap transaksi dibuat berdasarkan perjanjian baku. Pedoman penyusunan perjanjian dengan nasabah selalu dievaluasi agar senantiasa sejalan dengan POJK dan PBI yang berlaku.

KERAHASIAAN DATA NASABAH

Sebagai lembaga keuangan, Perseroan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dan kerahasiaan nasabah yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia Bank terkait kebijakan kerahasiaan Nasabah. Di mana yang dimaksud Rahasia Bank menurut Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpanan dan simpanannya, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Kendati demikian, terdapat beberapa pengecualian bagi bank untuk memberikan Rahasia Bank sejalan dengan Pasal 40 ayat 1 Undang Undang Perbankan bahwa "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan

Customer Services

The Company provides customer service at the Call Center 1500410 to ensure interaction with the Company, as well as serves as a communication channel for the Company with customers and prospective customers.

Customer Complaints Handling

The Company monitors and reports on the handling and settlement of customer complaints on a regular basis to the Board of Directors, work units, and regulators. Reports are used to support banks in developing a systematic and accurate customer complaint handling process. Reports are submitted through an integrated commercial bank monthly report to Bank Indonesia as well as through the Si-Peduli electronic system (Customer Education and Protection Reporting Information System) to OJK. The Company is also a member of the Indonesian Banking Alternative Dispute Resolution Institute (LAPSPI). To minimize disputes with consumers, every transaction is made based on a standard agreement. Guidelines for drafting agreements with customers are always evaluated so that they are always in line with the applicable POJK and PBI.

CONFIDENTIALITY OF CUSTOMER DATA

As a financial institution, the Company is committed to maintaining customer trust and confidentiality which refers to the following provisions:

1. Law No. 7 of 1992 concerning Banking
2. Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law No. 7 of 1992
3. Bank Indonesia Regulation No. 2/19/PBI/2000 concerning Requirements and Procedures for Issuance of Orders or Written Permits to Open Bank Confidentialities Regarding Customer confidentiality policy, which is defined as bank secrecy according to Article 1 No. 28 of Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 on Banking, which states that Bank Secrecy is everything related to information regarding depositors and their deposits. Information regarding a customer other than a Deposit Customer, does not constitute information that must be kept confidential by the bank.

However, there are some exceptions for banks to provide bank confidentiality in line with Article 40 paragraph 1 of the Banking Law that "Banks are required to keep information regarding their depositing customers and their



dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.” Beberapa pengecualian bagi bank untuk memberikan rahasia bank itu, yaitu dalam hal-hal berikut:

1. Untuk kepentingan perpajakan.
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Lelang.
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya.
5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank
6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.
7. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia.

EDUKASI LITERASI KEUANGAN

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat, Perseroan memiliki kewajiban mengedukasi konsumen dan memajukan tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan. Pada tahun 2021 pandemi Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan, sehingga berdampak adanya pembatasan interaksi secara tatap muka langsung. Oleh karena itu, kegiatan edukasi lebih difokuskan melalui media sosial seperti instagram dan website www.bankbanten.co.id.

DAMPAK

Mengingat perbankan adalah institusi kepercayaan maka fungsi pengawas yang ada di semua bank adalah mengembangkan mekanisme perlindungan nasabah bank. Kepercayaan publik yang bersifat tidak fundamental dapat memengaruhi fungsi intermediasi perbankan. Demikian juga dengan skala ekonomi dalam dunia perbankan tidak akan efektif dalam mengatasi krisis kepercayaan jika informasi tidak tersedia secara baik. Dengan memberikan jaminan keamanan melalui perlindungan konsumen serta menyediakan informasi yang baik diharapkan nasabah akan menerima hak-haknya serta yang paling penting adalah merasa terjamin saat menyimpan uangnya di bank.

deposits confidential, except in the cases referred to in Article 41, Article 41A, Article 42, Article 43. , Article 44, and Article 44A.” Some exceptions for banks to provide bank confidentiality, namely in the following cases:

1. For tax purposes.
2. For settlement of bank receivables that have been submitted to the Accounts Receivable and Auction Administration Agency.
3. For the purposes of the judiciary in criminal cases.
4. In a civil case between a bank and its customer.
5. To exchange information between banks
6. Upon request, approval or power of attorney from the depositing customer in writing.
7. In the event that the depositing customer has passed away.

FINANCIAL LITERACY EDUCATION

In accordance with the Financial Services Authority Circular Letter No. 1/SEOJK.07/2014 regarding education to increase financial literacy to consumers and/or the public, the Company has an obligation to educate consumers and to bring forward the levels of financial literacy and financial inclusion. In 2021, the Covid-19 pandemic in Indonesia increased, resulting in restrictions on face-to-face interactions. Therefore, educational activities are more focused on social media such as Instagram and the website www.bankbanten.co.id.

IMPACTS

Considering that banking is an institution of trust, the supervisory function in all banks is to develop a mechanism for protecting the bank customers. Public trust that is not fundamental in nature can affect the banking intermediary function. Likewise, economies of scale in the banking world will not be effective in overcoming the crisis of trust if information is not properly available. By providing security guarantees through consumer protection, as well as providing good information, it is expected that customers will receive their rights and the most important thing is to feel secure when depositing their money in the bank.



Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank



Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

Statement of Board of Commissioners on the Responsibility for the Annual Report 2021 of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report of the Company. This statement is hereby made in all truthfulness.

Dewan Komisaris

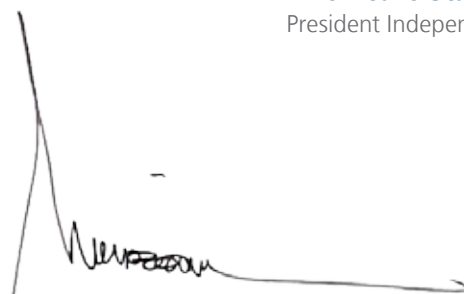
Board of Commissioners



HASANUDDIN

Komisaris Utama Independen

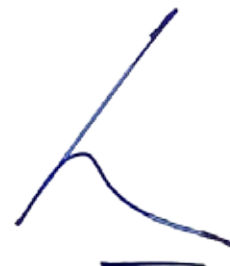
President Independent Commissioner



MEDIA WARMAN

Komisaris Independen

Independent Commissioner



M. YUSUF

Komisaris

Commissioner

Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

Statement of Board of Directors on the Responsibility for the Annual Report 2021 of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report of the Company. This statement is hereby made in all truthfulness.

Direksi

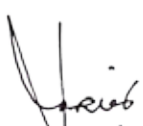
Board of Directors



Dr. AGUS SYABARRUDIN
Direktur Utama
President Director



CENDRIA T.J. TASDIK
Direktur Bisnis
Business Director



KEMAL IDRIS
Direktur Kepatuhan
Compliance Director



DENNY S. KARIM
Direktur Operasional & Transformasi
Operational and Transformation Director

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
LAPORAN KEUANGAN / *FINANCIAL STATEMENTS*
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021 /
As of and For the Year Ended December 31, 2021

dan/ *and*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2021**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We the undersigned:

- | | | |
|-----------------|---|------------------|
| 1. Nama | Agus Syabarrudin | Name |
| Alamat kantor | Jl Sudirman Lingk. Kemang. Ruko Sembilan
No. 04-06 Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang,
Banten | Office address |
| Alamat domisili | Jl. Sakura I Blok G-1/2. RT 002, RW 005, Kel.
Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota
Tangerang Selatan | Domicile address |
| Nomor telepon | 0254 - 791 5877 | Telephone |
| Jabatan | Direktur Utama / <i>President Director</i> | Title |
| 2. Nama | Denny S. Karim | Name |
| Alamat kantor | Jl Sudirman Lingkungan Kemang,
Ruko Sembilan No. 04-06
Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Banten | Office address |
| Alamat domisili | Jl. Pinang Perak I Blok SL No. 1 RT 014, RW
016, Kel Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan | Domicile address |
| Nomor telepon | 0254 - 791 5877 | Telephone |
| Jabatan | Direktur / <i>Director</i> | Title |

Menyatakan bahwa:

Declared that:

- | | |
|---|---|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (dahulu PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk); | 1. <i>Responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (formerly PT Bank Pundi Indonesia, Tbk);</i> |
| 2. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (dahulu PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (formerly PT Bank Pundi Indonesia, Tbk) have been prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (dahulu PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk) telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information presented in the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (formerly PT Bank Pundi Indonesia, Tbk) is complete and correct;</i> |
| b. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (dahulu PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (formerly PT Bank Pundi Indonesia, Tbk) do not contain any incorrect material information or fact nor omit any material information or fact;</i> |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (dahulu PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk). | 4. <i>Responsible for the internal control system of PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (formerly PT Bank Pundi Indonesia, Tbk).</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Serang, 15 Maret 2022 / *March 15, 2022*
PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk
(dahulu / *formerly* PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk).

		
Agus Syabarrudin		Denny S. Karim
Direktur Utama <i>President Dir</i>		Direktur/ <i>Director</i>

71293AJX644203838

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman /</u> <u>Page</u>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN / <i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>	i – iii
LAPORAN KEUANGAN PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 / <i>FINANCIAL STATEMENTS</i> AS OF AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021	
LAPORAN POSISI KEUANGAN / <i>STATEMENT OF FINANCIAL POSITION</i>	1 – 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN / <i>STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>	3 – 4
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS / <i>STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY</i>	5
LAPORAN ARUS KAS / <i>STATEMENT OF CASH FLOWS</i>	6 – 7
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN / <i>NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS</i>	8 – 112

Laporan Auditor Independen***Independent Auditors' Report***

Ref: 00014/3.0409/AU.1/07/0126-3/1/III/2022

**Para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk*****The Shareholders, Commissioners and Directors of
PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk***

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan***Management's responsibility for the financial statements***

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor***Auditors' responsibility***

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan asumsi Bank akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Kami membawa perhatian ke catatan No. 42 atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan tentang saldo rugi dan rencana manajemen, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Bank telah mengalami akumulasi saldo rugi sebesar Rp2.657.404 atau 58,40% dari jumlah modal saham dan tambahan modal disetor Bank. Kondisi tersebut telah menimbulkan keraguan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kelangsungan usaha Bank akan sangat tergantung pada keberhasilan rencana manajemen dan dukungan pemegang saham sebagaimana telah diungkapkan dalam catatan No. 42 atas laporan keuangan terlampir. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Kami membawa perhatian ke catatan No.13 tentang biaya dibayar dimuka, pada bulan Maret 2021 sebagai bagian dari penyehatan, Bank telah melakukan perjanjian Kerjasama dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Banten terkait penjaminan kredit mikro Eks Bank Pundi dengan nilai penjaminan sebesar Rp800.000 juta. Berdasarkan sertifikat penjaminan tanggal 24 Maret 2021, Bank telah mengikat kredit kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dengan nilai kredit sebesar Rp771.221 juta. Perjanjian penjaminan tersebut telah mempengaruhi penyesuaian jumlah pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit dan dicatat sebagai bagian dari Asuransi dibayar dimuka untuk diamortisasi selama periode waktu kontrak penjaminan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk as of December 31, 2021, and their financial performance and cash flows for the year ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

The attached financial statements have been prepared with the assumption that the Bank will continue its business on an ongoing basis. We draw attention to note No. 42 to the accompanying financial statement which explains the balance loss and management plan, that as of December 31, 2021 the Bank has accumulated an accumulated loss of Rp2,657,404 or 58.40% of the total share capital and additional paid-in capital of the Bank. This condition has raised doubts about the Bank's ability to maintain its business continuity. The continuity of the Bank's business will depend on the success of the management plan and shareholder support as disclosed in note NO. 42 to the accompanying financial statements. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

We draw attention to note No. 13 regarding prepaid fees, in March 2021 as part of restructuring the Bank has entered into a Cooperation agreement with PT Penjaminan Kredit Daerah Banten regarding microcredit guarantees for Ex Bank Pundi with a guarantee value of Rp800,000 million. Based on the guarantee certificate dated March 24, 2021, the Bank has tied a loan to PT Penjaminan Kredit Daerah Banten with a credit value of Rp771,221 million. The guarantee agreement has affected the adjustment of the amount of allowance for impairment losses on credit and is recorded as part to be amortized over the period of the guarantee contract. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Kami membawa perhatian ke catatan No. 16 tentang aset lain-lain atas laporan keuangan terlampir, bahwa dalam rangka penyehatan Bank, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 manajemen Bank telah melakukan penangguhan sejumlah biaya terutama terkait cadangan kerugian penurunan nilai atas hapus buku kredit sebesar Rp922.057 dan Rp639.216. Biaya yang ditangguhkan tersebut diamortisasi secara proporsional selama periode waktu yang sudah ditentukan oleh manajemen, yang telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham pengendali Bank dan telah dikomunikasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

We draw attention to note No. 16 regarding other assets in the accompanying financial statements, that for the purpose of restructuring the Bank, as of December 31, 2021 and 2020, the Bank's management has deferred a number of costs, mainly related to the allowance for impairment losses on write-offs of Rp922,057 and Rp639,216. The deferred fees are amortized proportionally over a period of time determined by management, which has been approved by the Bank's controlling shareholders and has been communicated to the Financial Services Authority. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

KANAKA PURADIREDDA, SUHARTONO




Florus Daeli, SE., Ak., MM., CPA., CA., CRA., CLA., CTA., ASEAN CPA.

Nomor Izin Akuntan Publik No. AP. 0126

License of Public Accountant No. AP.0126

Jakarta, 15 Maret 2022/ March 15, 2022

Ref: 00014/3.0409/AU.1/07/0126-3/1/III/2022



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
ASET				ASSETS
Kas	3e,5,37,38	75.595	35.545	Cash
Giro pada Bank Indonesia	3e,3f,6,37,38	158.888	102.188	Current accounts in Bank Indonesia
Giro pada bank lain	3e,3f,7,37,38	32.831	2.580	Current accounts in other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3e,3g,8,36,37,38	1.566.833	304.924	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	3e,3h,9,36,37,38	817.926	617.099	Securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	10	1.321.583	-	Securities purchased under agreement to resell
Kredit pihak ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp374.813 dan Rp 821.577	3e,3i,3r,4,11,37 38,39	2.709.189	2.968.242	Loan third parties – net allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp374,813 and Rp 821,577, respectively
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	3e,12,38,39	17.072	88.503	Accrued interest receivable
Biaya dibayar dimuka	3j,13	738.914	57.993	Prepaid expenses
Aset tetap dan Aset hak guna – setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp287.677 dan Rp248.225	3k,14,37	60.833	65.323	Fixed assets and right of use of assets - net of accumulated depreciation as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp287,677 and Rp248,225 respectively
Agunan yang diambil alih – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp776	3m,15	16.072	16.072	Foreclosed asset – net allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting Rp776, respectively
Aset pajak tangguhan	3v,4,32b	360.028	421.291	Deferred tax assets
Aset lain-lain	16,37,38	973.847	657.521	Others assets
JUMLAH ASET		8.849.611	5.337.281	TOTAL ASSETS

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas segera	3e,3o,17,38	116.264	221.036	Liabilities due immediately
Simpanan dari nasabah	3e,3o,18,38,39			Deposit from customers
- Pihak ketiga		4.172.208	2.425.102	- Third parties
- Pihak berelasi		467.246	157.105	- Related parties
Simpanan dari bank lain	3e,3q,19,38,39			Deposits from other banks
- Pihak ketiga		2.107.640	674.878	- Third parties
- Pihak berelasi		10.202	604	- Related parties
Liabilitas atas efek - efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3e,3r,20,38	-	436.384	Securities sold under repurchase agreement securities
Utang pajak	21	4.347	2.587	Taxes payable
Liabilitas imbalan pasca kerja	33	24.895	32.455	Post employments benefit liabilities
Liabilitas lain-lain	22,38	55.662	25.549	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS		6.958.464	3.975.700	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham untuk seri A dan Rp180 (nilai penuh) untuk seri B dan Rp50 (nilai penuh) untuk seri C. Modal dasar - 1.075.511.715 saham seri A dan 5.335.431.323 saham seri B dan 45.459.495.228 saham seri C. Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.075.511.715 saham seri A dan 5.335.431.323 saham seri B dan 45.459.495.228 saham seri C pada 31 Desember 2021 (setelah reverse stock). dan modal saham nilai nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham untuk seri A dan Rp180 (nilai penuh) untuk seri B dan Rp50 (nilai penuh) untuk seri C. Modal dasar - 1.075.511.715 saham seri A dan 5.335.431.323 saham seri B dan 119.282.212.938 saham seri C. Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.075.511.715 saham seri A dan 5.335.431.323 saham seri B dan 2.749.411.299 saham seri C pada 31 Desember 2020 (setelah reverse stock)	23	4.308.864	2.173.360	Share capital - Rp1,000 (full amount) par value per share for A series share and Rp180 (full amount) for B series share and Rp50 (full amount) for C series share. Authorized - 1,075,511,715 A series shares and 5,335,431,323 B series shares and 45,459,495,228 C series shares. Issued and fully paid - 1,075,511,715 A series shares and 5,335,431,323 B series shares and 45,459,495,228 as of December 31, 2021 (after reverse stock). and Share capital - Rp1,000 (full amount) par value per share for A series share and Rp180 (full amount) for B series share and Rp50 (full amount) for C series share. Authorized - 1,075,511,715 A series shares and 5,335,431,323 B series shares and 119,282,212,938 C series shares. Issued and fully paid - 1,075,511,715 A series shares and 5,335,431,323 B series shares and 2,749,411,299 as of December 31, 2020 (after reverse stock).
Tambahan modal disetor	24	241.475	1.583.496	Additional paid-in capital
Laba belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual		712	-	Unrealized gain on available for sale securities
Kerugian aktuarial setelah pajak		(2.500)	(3.047)	Actuarial loss net off taxes
Saldo rugi		(2.657.404)	(2.392.228)	Net loss
JUMLAH EKUITAS		1.891.147	1.361.581	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		8.849.611	5.337.281	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL				OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan bunga	3t,25,37	310.272	372.209	Interest income
Beban bunga	3t,26	(251.404)	(338.465)	Interest expense
Pendapatan bunga – bersih		58.868	33.744	Interest income – net
Pendapatan operasional lainnya				Other operating income
Administrasi	27	29.297	21.961	Administrative
Keuntungan dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar pada laporan laba rugi – net		508	-	Gain from charges in fair value of financial assets at fair value through profit and loss- net
Keuntungan penjualan efek		227	-	Gain on sale of securities
Lain - lain – bersih		10.053	3.776	Others – net
		40.085	25.737	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		98.953	59.481	TOTAL OPERATING INCOME
Pemulihan (penyisihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan – bersih	28	79.761	(23.199)	Provision of impairment reverse (losses) On financial assets – net
Beban operasional lainnya				Other operating expenses
Umum dan administrasi	29	(250.640)	(175.635)	General and administrative
Tenaga kerja dan tunjangan	30	(132.485)	(119.005)	Personnel
		(383.125)	(294.640)	
RUGI OPERASIONAL – BERSIH		(204.411)	(258.358)	NET OPERATING LOSS
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL – BERSIH	31	143	(2.362)	NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) – NET
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(204.268)	(260.720)	LOSS BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME (EXPENSES) TAX BENEFIT
Pajak tangguhan tahun berjalan	3v,32d	44.026	56.088	Deferred tax current year
Pajak tangguhan yang tidak bisa dikompensasi	3v,32d	(104.934)	(103.526)	Deferred tax cannot be acknowledged
		(60.908)	(47.438)	
RUGI BERSIH (Saldo dipindahkan)		(265.176)	(308.158)	NET LOSS (Balance carried forward)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
RUGI BERSIH (Saldo pindahan)		(265.176)	(308.158)	NET LOSS (Balance brought forward)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that would never be reclassified to profit loss
Keuntungan (kerugian) aktuarial	33	701	(1.041)	Actuarial gain (loss)
Pajak tangguhan	32b	(154)	229	Deferred tax
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that would never be reclassified to profit loss
Perubahan nilai wajar dari efek - efek dalam kelompok tersedia untuk dijual-bersih		913	-	Changes in fair value of available for sale securities-net
Pajak tangguhan	32b	(201)	-	Deferred tax
		<u>1.259</u>	<u>(812)</u>	
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF		(263.917)	(308.970)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS
RUGI PER SAHAM DASAR				BASIC LOSS PER SHARE AND
DAN DILUSIAN (nilai penuh)	3x,34	(5,11)	(33,64)	DILUTED (full amount)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

		Modal saham - ditempatkan dan disetor penuh/ Share capital - authorized issued and fully paid	Tambahan modal disetor/ Additional paid - in capital	Penghasilan Komprehensif lain/Other Comprehensive Income	Saldo rugi/ Net loss	Jumlah ekuitas/ Total equity	
	Catatan/ Notes						
Saldo per 1 Januari 2020		2.035.889	32.496	(2.235)	(1.516.617)	549.533	Balance as of January 1, 2020
Penyesuaian atas dampak penerapan awal PSAK 71		-	-	-	(671.423)	(671.423)	Adjustment to the impact of the initial application PSAK 71
Modal disetor atas hasil Penawaran Umum Terbatas VI	23	137.471	-	-	-	137.471	Capital increase of limited public offering VI
Tambahan modal disetor	24	-	1.551.000	-	-	1.551.000	Additional paid-in capital
Dampak penyesuaian tarif pajak	32b	-	-	-	103.970	103.970	Impact on tax rate adjustment
Kerugian aktuarial		-	-	(812)	-	(812)	Actuarial loss
Jumlah rugi bersih tahun berjalan	34	-	-	-	(308.158)	(308.158)	Total net loss for the current year
Saldo per 31 Desember 2020		2.173.360	1.583.496	(3.047)	(2.392.228)	1.361.581	Balance as of December 31, 2020
Modal disetor atas hasil Penawaran Umum Terbatas VII	23	2.135.504	-	-	-	2.135.504	Capital increase of limited public offering VII
Tambahan modal disetor	24	-	(1.551.000)	-	-	(1.551.000)	Additional paid – in capital
Agio saham	24	-	216.759	-	-	216.759	Stock premium
Biaya emisi saham	24	-	(7.780)	-	-	(7.780)	Share issuance cost
Keuntungan aktuarial		-	-	547	-	547	Actuarial gain
Laba belum direalisasi surat berharga – AFS		-	-	712	-	712	Unrealized gain on available for sale securities
Jumlah rugi bersih tahun berjalan	34	-	-	-	(265.176)	(265.176)	Total net loss for the current year
Saldo per 31 Desember 2021		4.308.864	241.475	(1.788)	(2.657.404)	1.891.147	Balance as of December 31, 2021

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga		381.703	389.464	Receipts of interest
Pembayaran bunga		(248.518)	(333.865)	Payment of interest
Penghasilan operasional lainnya – bersih		39.576	25.737	Receipts of other operating income – net
Pembayaran beban umum dan administrasi		(210.984)	(144.551)	Payment of general and administrative expenses
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan		(139.344)	(114.909)	Payment of personal expenses and benefit
Pembayaran beban non operasional – bersih		80.346	(2.690)	Payment of non-operating expenses – net
Arus kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi		(97.221)	(180.814)	Cash flow before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				Decrease (increase) in operating assets:
Efek – efek	9	(199.914)	325.933	Securities
Efek Repo	10	(1.321.583)	-	Securities Repo
Kredit	14	259.053	1.547.905	Loans
Biaya dibayar dimuka	13	(680.922)	(4.406)	Prepaid expenses
Agunan yang diambil alih dan aset lain - lain	15,16	(316.327)	(78.694)	Foreclosed asset and other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	17	(107.658)	68.632	Liabilities due immediately
Simpanan dari nasabah	18	2.057.247	(3.001.968)	Deposit from customer
Simpanan dari bank lain	19	1.442.359	(363.671)	Deposit from other banks
Utang pajak	21	1.762	(4.029)	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	22	30.114	(27.229)	Other liabilities
Liabilitas atas efek - efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	20	(436.383)	(249.123)	Securities sold under repurchase agreement securities
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		727.748	(1.786.650)	Net cash provided (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	14	66	5.827	Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset tetap	14	(7.928)	(16.850)	Acquisition of fixed assets
Perolehan aset sewa guna usaha	14	(27.236)	(23.952)	Acquisition of leased assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas Investasi		(35.098)	(34.975)	Net cash used in investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM INVESTMENT FUNDING
Penerbitan saham baru - bersih	23	584.504	1.688.471	Issuance of new shares – Net
Biaya emisi saham	24	208.978	-	Stock issuance fee
Kas bersih diperoleh dari aktivitas Pendanaan		793.482	1.688.471	Net cash provided investing Funding

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		1.388.910	(313.968)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH EQUIVALENTS AND CASH
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		445.237	759.205	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		1.834.147	445.237	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE ENDING OF YEAR
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				Cash and cash equivalents at the end of year consist of:
Kas	5	75.595	35.545	Cash
Giro pada Bank Indonesia	6	158.888	102.188	Current account with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	7	32.831	2.580	Current account with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8	1.566.833	304.924	Placements with Bank Indonesia and other banks
		1.834.147	445.237	

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk ("Bank"), didirikan pada tanggal 11 September 1992. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Nopember 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, Tambahan No. 6651 tanggal 26 Desember 1992.

Bank memulai aktivitas operasi di bidang perbankan pada tanggal 9 Agustus 1993.

Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar pada Akta No. 36 tanggal 14 Juni 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, "PT Bank Pundi Indonesia Tbk" telah berubah nama menjadi "PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk". Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0012108.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 12/KDK.03/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar pada Akta No. 104 tanggal 30 Juni 2010 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, "PT Bank Eksekutif Internasional Tbk" telah berubah nama menjadi "PT Bank Pundi Indonesia Tbk". Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-37404.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/58/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 12 tanggal 18 Juni 2021 dari Syarifudin, S.H., Notaris di Tangerang, diantaranya mengenai perubahan Modal Dasar. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0429094 tanggal 16 Juli 2021.

Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No.673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, PT Banten Global Development dan Pemerintah Provinsi Banten, didirikan di Republik Indonesia, masing-masing adalah entitas induk dan entitas induk terakhir Bank.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 4 – 6 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Banten. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 jumlah jaringan cabang-cabang dan kantor-kantor pembantu Bank adalah sebagai berikut:

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk ("the Bank") was established on September 11, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on November 10, 1992 and published in Supplement No. 6651 of the State Gazette of Republic Indonesia No. 103 dated December 26, 1992.

The Bank started its commercial banking operations on August 9, 1993.

Based on the Bank's Articles of Association's amendment by Deed No. 36 dated June 14, 2016 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, "PT Bank Pundi Indonesia Tbk" has changed its name to "PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk". These amendment were approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0012108.AH.01.02 Year 2016 dated June 27, 2016. The change in the Bank's name had been approved by Indonesia Financial Services Authority (OJK) through Decision Letter of the Commissioner of Indonesia Financial Services Authority No. 12/KDK.03/2016 dated July 29, 2016.

Based on the Bank's Articles of Association's amendment by Deed No. 104 dated June 30, 2010 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, "PT Bank Eksekutif Internasional Tbk" has changed its name to "PT Bank Pundi Indonesia Tbk". These amendment were approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-37404.AH.01.02 Year 2010 dated July 28, 2010. The change in the Bank's name had been approved by Bank Indonesia through Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No. 12/58/KEP.GBI/2010 dated September 23, 2010.

The Bank's Articles of Association has been amended several times, most recently by Deed No. 12 dated June 18, 2021 of Syarifudin, S.H., Notary in Tangerang, such as change in company's domicile and concerning assignment powers of Directors. These amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0429094 dated July 16, 2021.

The Bank obtained a license as a commercial bank based on the decision letter No.673/KMK.017/1993 of the Minister of Finance dated June 23, 1993.

On December 31, 2020 and 2019, PT Banten Global Development and Banten Provincial Government, incorporated in the Republic of Indonesia, are the parent company and ultimate parent company of the Bank, respectively.

The Bank's head office is located in Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 4 – 6 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Banten. As of December 31, 2021 and 2020 the number of the Bank's branches and representative offices were as follows:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

	2021
Kantor Pusat	1
Kantor Cabang	26
Kantor Cabang Pembantu	10
Kantor Kas	4

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Bank memiliki masing-masing 150 dan 150 Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

b. Penawaran Umum

Pada tanggal 22 Juni 2001, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan suratnya No.S-1531/PM/2001 untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 277.500.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan harga penawaran Rp140 (nilai penuh) per saham. Secara bersamaan diterbitkan 55.500.000 Waran Seri I yang menyertai seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut secara cuma-cuma. Waran tersebut memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham baru yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga Rp175 (nilai penuh) per saham mulai tanggal 13 Januari 2003 sampai dengan tanggal 12 Juli 2004. Pada tanggal 13 Juli 2001, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta). Pada tanggal 31 Desember 2004, tidak ada waran yang dikonversi menjadi saham dan semua hak untuk membeli saham sudah berakhir.

Untuk meningkatkan permodalan Bank, yang berdampak terhadap peningkatan jumlah efek, Bank telah melakukan beberapa aksi korporasi berupa penawaran umum terbatas sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- Pada tanggal 30 Juni 2010, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-5949/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham sejumlah 5.122.500.000 saham biasa. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 saham lama berhak membeli 6 saham baru dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp100 (nilai penuh) per saham.
- Pada tanggal 15 September 2011, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan suratnya No. 10116/BL/2011 untuk melakukan penawaran umum terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham berjumlah 3.282.262.230 saham biasa. Setiap pemegang saham yang memiliki 6 saham lama berhak membeli 5 saham baru dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp100 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

	2020	
	1	Head Office
	26	Branch Office
	10	Supporting Branch Office
	4	Cash Office

As of December 31, 2021 and 2020 the Bank owns 150 and 150 Automated Teller Machines (ATMs), respectively.

b. Public Offering

On June 22, 2001, the Bank obtained approval from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) in his letter No. S-1531/PM/2001 to offer its shares to the public at a maximum of 277,500,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share for an offering price of Rp140 (full amount) per share. Simultaneously, the Bank issued 55,500,000 Series I Warrants accompanying the shares offered in the Public Offering. The warrants entitle the holder to purchase newly issued shares of the portfolio with a nominal value of Rp100 (full amount) per share at a price of Rp175 (full amount) per share from January 13, 2003 until July 12, 2004. On July 13, 2001, these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (formerly Jakarta Stock Exchange). As of December 31, 2004, no conversion of warrants is made and all the rights to purchase through warrants has expired.

To increase the capital of the Bank, which resulted in increased number of shares, the Bank has conducted several corporate actions such as limited public offering rights issue, as described below:

- On June 30, 2010, the Bank obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) in his Letter No. S-5949/BL/2010 related to its approval of the limited public offering I for the issuance of pre-emptive rights for existing shareholders at 5,122,500,000 common shares. The holder can exercise the right to purchase 6 new shares for every 1 share held with a nominal value of Rp100 (full amount) per share at Rp100 (full amount) per share.
- On September 15, 2011, the Bank obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Bapepam-LK in his Letter No. 10116/BL/2011 related to its approval of the limited public offering II for the issuance of pre-emptive rights for existing shareholders amounting to 3,282,262,230 common shares. The holder can exercise the right to purchase 5 new shares for every 6 shares held with a nominal value of Rp100 (full amount) per share at Rp100 (full amount) per share.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum (lanjutan)

- Pada tanggal 30 Agustus 2012, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan suratnya No. 10485/BL/2012 untuk melakukan penawaran umum terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham berjumlah 1.496.604.923 saham biasa. Setiap pemegang saham yang memiliki 100 saham lama berhak membeli 27 saham baru dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp120 (nilai penuh) per saham.
- Pada tanggal 29 Juli 2016, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-384/D.04-16 untuk melakukan penawaran umum terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham berjumlah 35.416.600.785 saham biasa seri B. Setiap pemegang saham yang memiliki 1.000 saham biasa seri A berhak membeli 3.293 saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp18 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp18,35 (nilai penuh) per saham.
- Pada tanggal 24 Nopember 2016, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-694/D.04-16 untuk melakukan penawaran umum terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 saham biasa seri B. Setiap pemegang saham berhak membeli 777 saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp18 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp18,35 (nilai penuh) per saham.
- Pada tanggal 8 Desember 2020, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-286/D.04-2020 untuk melakukan penawaran umum terbatas VI dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham, sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.
- Pada tanggal 30 September 2021, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-177/D.04/2021 untuk melakukan penawaran umum terbatas VII dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham, sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.

Jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 51.870.438.266 dan 9.096.244.907 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering (continued)

- On August 30, 2012, the Bank obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Bapepam-LK in his Letter No. 10485/BL/2012 related to its approval of the limited public offering III for the issuance of pre-emptive rights for existing shareholders amounting to 1,496,604,923 common shares. The holder can exercise the right to purchase 27 new shares for every 100 shares held with a nominal value of Rp100 (full amount) per share at Rp120 (full amount) per share.
- On July 29, 2016, the Bank obtained the notice of effectivity from Financial Services Authority in his Letter No. S-384/D.04-16 related to its approval of the limited public offering IV for the issuance of pre-emptive rights for existing shareholders amounting to 35,416,600,785 common shares series B. The holder can exercise the right to purchase 3,293 common shares series B for every 1,000 common shares series A held with a nominal value of Rp18 (full amount) per share at Rp18.35 (full amount) per share.
- On November 24, 2016, the Bank obtained the notice of effectivity from Financial Services Authority in his Letter No. S-694/D.04-16 related to its approval of the limited public offering V for the issuance of pre-emptive rights for existing shareholders amounting to 17,937,712,419 common shares series B. The holder can exercise the right to purchase 777 common shares series B with a nominal value of Rp18 (full amount) per share at Rp18.35 (full amount) per share.
- On December 8, 2020, the Bank obtained an effective statement from the Financial Services Authority with its letter No. S-286/D.04-2020 to conduct a limited public offering VI in the framework of issuing Pre-emptive Rights (HMETD) to shareholders, in accordance with applicable capital market regulations.
- On September 30, 2021, the Bank obtained an effective statement from the Financial Services Authority with its letter No. S-177/D.04/2021 to conduct a limited public offering VII in the context of the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD) to shareholders, in accordance with the applicable capital market regulations.

Total of Bank's shares listed on the Indonesia Stock Exchange as of December 31, 2021 and 2020 are 51,870,438,266 and 9,096,244,907 shares.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Pengurus Bank

Pada tanggal 31 Desember 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No.12 tanggal 18 Juni 2021 dari Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)¹⁾
 Komisaris²⁾
 Komisaris (Independen)³⁾

Hasanuddin
 M. Yusuf
 Media Warman

Direksi

Direktur Utama⁴⁾
 Direktur⁵⁾
 Direktur⁶⁾
 Direktur⁷⁾

Agus Syabarrudin
 Cendria Tj Tasdik
 Denny Sorimulia Karim
 Kemal Idris

- ¹⁾ Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagai Komisaris Utama Independen berdasarkan Surat Keputusan OJK No. Kep-41/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.
- ²⁾ Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagai Komisaris berdasarkan Surat Keputusan OJK No. Kep-69/D.03/2021 tanggal 17 Mei 2021.
- ³⁾ Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan OJK No. Kep-45/PB.1/2018 tanggal 22 Oktober 2018.
- ⁴⁾ Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-42/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.
- ⁵⁾ Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-43/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.
- ⁶⁾ Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-70/D.03/2021 tanggal 17 Mei 2021.
- ⁷⁾ Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-95/D.03/2021 tanggal 13 Juli 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 7 tanggal 16 April 2019 dari Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Plt Komisaris Utama (Independen)¹⁾
 Komisaris (Independen)²⁾

Media Warman
 Titi Khoiriah

Direksi

Direktur Utama³⁾
 Direktur⁴⁾
 Direktur⁵⁾

Fahmi Bagus Mahesa
 Jaja Jarkasih
 Kemal Idris

1. GENERAL (continued)

c. Composition of the Bank's Management

As of December 31, 2021, the members of the Bank's Boards of Commissioners and Directors based on Notarial dated No. 12 dated June 18, 2021 of Syarifudin, S.H., Notary in Tangerang City, are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner (Independent)¹⁾
 Commissioner²⁾
 Commissioner (Independent)³⁾

Board of Directors

President Director⁴⁾
 Director⁵⁾
 Director⁶⁾
 Director⁷⁾

- ¹⁾ Complied the fit and proper test as President Commissioners Independent from Indonesia Financial Services Authority through letter No. Kep-41/KDK.03/2021 dated April 26, 2021.
- ²⁾ Complied the fit and proper test as Commissioner from Indonesia Financial Services Authority through letter No. Kep-69/D.03/2021 dated May 17, 2021.
- ³⁾ Complied the fit and proper test as Independent Commissioner from Indonesia Financial Services Authority through letter No. Kep-45/PB.1/2018 dated October 22, 2018.
- ⁴⁾ Complied the fit and proper test as President Director from Indonesia Financial Services Authority through letter No. Kep 42/KDK.03/2021 dated April 26, 2021.
- ⁵⁾ Complied the fit and proper test from Indonesia Financial Services Authority through letter No. KEP-43/KDK.03/2021 dated April 26, 2021.
- ⁶⁾ Complied the fit and proper test from Indonesia Financial Services Authority through letter No. KEP-70/D.03/2021 dated May 17, 2021.
- ⁷⁾ Complied the fit and proper test from Indonesia Financial Services Authority through letter No. KEP-95/D.03/2021 dated Juli 13, 2021.

As of December 31, 2020, the members of the Bank's Boards of Commissioners and Directors based on Notarial dated No. 7 dated April 16, 2019 of Syarifudin, S.H., Notary in Tangerang City, are as follows:

Board of Commissioners

Acting as President Commissioner
 (Independent)¹⁾
 Commissioner (Independent)²⁾

Board of Directors

President Director³⁾
 Director⁴⁾
 Director⁵⁾

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Pengurus Bank (lanjutan)

- 1) Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan OJK No. Kep-45/PB.1/2018 tanggal 22 Oktober 2018. Saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Komisaris Utama berdasarkan Akta PKR No. 7 tanggal 16 April 2019.
- 2) Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan OJK No. Kep-60/PB.1/2018 tanggal 4 Desember 2018.
- 3) Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-130/D.03/2017 tanggal 18 Juli 2017.
- 4) Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-14/PB.1/2017 tanggal 25 September 2017.
- 5) Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-58/PB.1/2018 tanggal 4 Desember 2018.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021
<u>Komite Audit</u>	
Ketua, merangkap anggota	Hasanuddin
Anggota	Media Warman M.Yusuf Douval Hariyadi

Susunan *Corporate Secretary* dan Ketua Satuan Kerja Audit Internal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021
Sekretaris Perusahaan	Chandra Dwipayana
Ketua Satuan Kerja Audit Internal	Kalmet Nehru

Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah 978 dan 950 dan karyawan (tidak diaudit).

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Bank, secara langsung atau tidak langsung, termasuk Direktur, Komisaris dan pejabat eksekutif dari Bank sesuai dengan peraturan BI.

1. GENERAL (continued)

c. Composition of the Bank's Management (continued)

- 1) Complied the fit and proper test as Independent Commissioner from Indonesia Financial Services Authority through letter No. Kep-45/PB.1/2018 dated October 22, 2018. Currently served as Temporary Appointment of Ad Interim (AI) President Commissioner through Annual Shareholders' Meeting as documented in Notarial Deed No. 7 dated April 16, 2019
- 2) Complied the fit and proper test as Independent Commissioner from Indonesia Financial Services Authority through letter No. Kep-60/PB.1/2018 dated December 4, 2018.
- 3) Complied the fit and proper test as President Director from Indonesia Financial Services Authority through letter No. Kep-130/D.03/2017 dated July 18, 2017.
- 4) Complied the fit and proper test from Indonesia Financial Services Authority through letter No. KEP-14/PB.1/2017 dated September 25, 2017.
- 5) Complied the fit and proper test from Indonesia Financial Services Authority through letter No. KEP-58/PB.1/2018 dated December 4, 2018.

The Bank's Audit Committee as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2020	
		<u>Audit Committee</u>
	Titi Khoiriah	Chairman, concurrent member
	Media Warman	Members
	Hariyadi	
	Douval	
	-	

The Bank's *Corporate Secretary* and Head of Internal Audit as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2020	
	Chandra Dwipayana	<i>Company Secretary</i>
	Kalmet Nehru	<i>Head of Internal Audit</i>

As of December 31, 2021 and 2020 the Bank has a total of 978 and 950 employees, respectively (unaudited).

Key management personnel are those people whom have the authority and responsibility to plan, lead and control activities of the Bank, directly or indirectly. Key management personnel are the Directors, Commissioners and executive employees of the Bank according to BI regulation.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Pada tanggal 1 Januari 2020, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku yang relevan dengan operasi Bank yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan", mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen. PSAK ini juga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur pelunasan dipercepat yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah terutang.
- 2) PSAK No. 73, "Sewa", menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (1) sewa jangka pendek dan (2) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

Penerapan dari standart dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya:

- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian laporan keuangan
- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- Amendemen PSAK No. 25: Kebijakan akuntansi, Perubahan estimasi, dan kesalahan
- Penyesuaian PSAK 2019 PSAK No.1 : Penyajian laporan keuangan
- Revisi 2019 kerangka konseptual pelaporan keuangan

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATIONS OF PSAK (ISAK)

a. Amendments/improvements and interpretations to standards effective in the current year

On January 1, 2020, there were new standards and adjustments or amendments to several still valid standards that were relevant to the Bank's operations which were effective since that date, namely as follows:

- 1) SFAS No. 71, "Financial Instruments", provides for classification and measurement of financial instrument based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment. This SFAS also provides that a financial asset with prepayment features that may result in negative compensation qualifies as a contractual cash flow derived solely from the principal and interest of the principal amount owed.
- 2) SFAS No. 73, "Lease", establishes the principles of recognition, measurement, presentation and disclosure of leases by introducing a single accounting model with requiring to recognize right-of-use assets and lease liabilities. There are two optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities, namely: (1) short term lease and (2) lease with low value underlying assets.

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substansial changes to Bank accounting policies and had no material effect on the amount reported for the current or prior financial periods;

- Amandemens of SFAS; No. 1 Presentation of financial statements
- SFAS 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business;
- Amandement of SFAS; No. 25 Acoounting policies, Changes in accounting estimates, and errors.
- Adjustmen of 2019 SFAS No. 1; Presentation of financial statements.
- Revised 2019 conceptual framework for financial reporting

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk beberapa standar baru atau yang direvisi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, serta peraturan-peraturan mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep nilai historis, kecuali dinyatakan secara khusus. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode akrual, kecuali laporan arus kas dan beberapa akun yang diukur berdasarkan penjelasan kebijakan akuntansi dari akun yang bersangkutan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Bank. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan lain khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat.

c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", definisi pihak berelasi adalah:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Bank jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Bank;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan terhadap Bank; atau
 - (iii) merupakan personil manajemen kunci dari Bank ataupun entitas induk dari Bank.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, which comprise the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesia Institute of Accountants, including applicable new or revised standards effective January 1, 2020 and the Regulations regarding the Presentation Guidelines and Disclosure of Financial Statements issued by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).

b. Basis measurement and preparation of financial statements

The financial statements have been prepared using the historical cost basis, unless otherwise stated. The preparation of these financial statements was based on accrual method, except for cash flows and certain accounts which are measured on the basis explained in the related accounting policies.

The statements of cash flows are prepared using modified direct method, with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities. For the purpose of statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash, current accounts in Bank Indonesia, current accounts in other banks and placements in Bank Indonesia and other banks that mature within 3 (three) months from acquisition date, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings nor restricted.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah, which also represent the Bank's functional currency. All figures in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

c. Transactions with Related Parties

According to SFAS No. 7 (Revised 2015) "Related Parties Disclosure", related parties is defined as:

- 1) A person or a close member of that person's family is related to Bank if that person:
 - (i) has control or joint control over the Bank;
 - (ii) has significant influence over Bank; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the Bank or of a parent of the Bank.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", definisi pihak berelasi adalah: (lanjutan)

- 2) Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Bank jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
 - (i) entitas tersebut dan Bank adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
 - (ii) merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Bank (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha dimana Bank adalah anggota dari kelompok usaha tersebut);
 - (iii) entitas tersebut dan Bank adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) entitas yang merupakan ventura bersama dari asosiasi Bank atau asosiasi dari ventura bersama dari Bank;
 - (v) entitas yang merupakan suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank. Bank adalah penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Bank;
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) di atas;
 - (vii) entitas yang dipengaruhi secara signifikan oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) atau orang yang bersangkutan merupakan personil manajemen kunci dari entitas tersebut (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

d. Pelaporan Segmen

Bank melaporkan informasi segmen yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana bank terlibat dan lingkungan ekonomi dimana bank beroperasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transactions with Related Parties (continued)

According to PSAK No. 7 (Revised 2015) "Related Parties Disclosure", related parties is defined as: (continued)

- 2) An entity is related to Bank if any of the following conditions applies:
 - (i) the entity and Bank are members of the same group;
 - (ii) an associate or joint venture of the Bank (or an associate or joint venture of a member of a Bank of which the Group is a member);
 - (iii) the entity and Bank are joint ventures of the same third party;
 - (iv) the entity is a joint venture of an associate of the Bank or is an associate of a joint venture of the Bank;
 - (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to Bank. If Bank are itself such a plan, the sponsoring employers are also related to Bank;
 - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1);
 - (vii) entity has significantly influenced by a person identified in (1) (i) or that person is a member of the key management personnel from the entity (or of a parent of the entity).

The transaction was conducted on terms agreed by both parties, which terms may not be the same as other transactions conducted by parties who are not related.

All transactions and balances with significant related parties, whether or not conducted with the terms and conditions, as were done with the parties that have no relation to related parties, have been disclosed in the relevant notes to the financial statements.

d. Segment Reporting

Bank discloses segment information that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the bank engages and economic environments in which it operates.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Pelaporan Segmen (lanjutan)

Sebuah segmen operasi adalah sebuah komponen dari entitas yang:

- terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari bank yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam entitas.

e. Instrumen Keuangan

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

A. Aset Keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi,
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ;

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Segment Reporting (continued)

An operating segment is a component of an entity:

- *that engages in business activities which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same bank);*
- *whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and*
- *for which discrete financial information is available.*

Segment reporting made by the bank is based on the financial information used by operating decision makers in evaluating operating segment performance and determining the allocation of its resources. Segmentation based on the activity of each legal entity operating activities in the entity.

e. Financial Instruments

Classification of Financial Assets and Liabilities

A. Financial Assets

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

The group classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition :

- *Financial assets measured at amortized cost,*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ;*
- *Financial assets measured at fair value through profit or loss ;*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

A. Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga atau *solely payments of principal and interest (SPPI)* dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ;

Pada saat pengakuan awal, Bank dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasi sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Bank dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “*accounting mismatch*”)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Classification of Financial Assets and Liabilities (continued)

A. Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- *Financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and*
- *The contractual terms of the financial assets provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.*

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- *Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and*
- *The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.*

Financial assets measured at fair value through profit or loss ;

At initial recognition, the Bank can assign an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

*At initial recognition, the Bank can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as “*accounting mismatch*”)*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

A. Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Sebelum 1 Januari 2020, Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (1) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (2) pinjaman yang diberikan dan piutang, (3) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan (4) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

- 1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan kedalam dua sub-kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.
- Aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika telah memenuhi kriteria tertentu.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

- 2) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Classification of Financial Assets and Liabilities (continued)

A. Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies before January 1, 2020

Prior to January 1, 2020, the Bank classified its financial assets into categories (1) financial assets measured at fair value through profit or loss, (2) loans and receivables, (3) held-to-maturity financial assets and (4) available financial assets. for sale. This classification depends on the purpose for which the financial asset was acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

- 1) Financial Assets at Fair Value through Profit and Loss (FVPL)

Financial assets at FVPL are classified into two sub-categories as follows:

- Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in the near term.
- Financial assets are designated at initial recognition at FVPL if certain criteria are met.

Financial assets at FVPL are recorded in the statements of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in the statements of profit or loss and other comprehensive income. Interest earned is recorded as interest income.

- 2) Loan and receivables

Loan and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are not intended to sale in the near term immediate or short-term resale and are not classified as financial assets at FVPL, held to maturity (HTM) financial assets or AFS financial assets.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

A. Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

2) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

3) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen Bank memiliki intens positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila Bank menjual atau mereklasifikasi aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut harus direklasifikasi menjadi aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (*tainting rule*).

Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif, setelah dikurangi cadangan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

A. Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies before January 1, 2020 (continued)

2) Loan and receivables (continued)

After initial measurement, loan and receivables are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment loss. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees and costs that are an integral part of the effective interest rate. The amortization is recorded as part of interest income in the statements of profit or loss and comprehensive income. The losses arising from impairment are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

3) Held to maturity (HTM) financial assets

HTM financial assets are quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities for which the Bank's management has the positive intention and ability to hold to maturity. When the Bank sells more than an insignificant amount of HTM financial assets, the entire category would be tainted and reclassified as AFS financial assets.

After initial measurement, these financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment loss. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees that are an integral part of the effective interest rate. The amortization is recorded as part of interest income in the statements of comprehensive income. The losses arising from impairment are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

A. Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

4) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau karena perubahan kondisi pasar.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar. Komponen hasil (*yield*) efektif dari surat berharga utang tersedia untuk dijual diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laba atau rugi yang belum direalisasi yang timbul dari penilaian pada nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual tidak diakui dalam laporan laba rugi, melainkan dilaporkan sebagai laba atau rugi komprehensif yang belum direalisasi pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan, penghasilan komprehensif lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta laporan perubahan ekuitas.

Apabila aset keuangan dilepaskan, atau dihentikan pengakuannya, maka laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika Bank memiliki lebih dari satu jenis surat berharga yang sama, maka diterapkan dasar metode identifikasi khusus. Bunga yang diperoleh dari aset keuangan tersedia untuk dijual diakui sebagai pendapatan bunga yang dihitung berdasarkan suku bunga efektif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai aset keuangan juga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

A. Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies before January 1, 2020 (continued)

4) Available-for-sale (AFS) financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets which are designated as available for sale or not classified in any of the other categories. They are purchased and held indefinitely and may be sold to meet the liquidity requirements or changes in market conditions.

After initial measurement, AFS financial assets are subsequently measured at fair value. The effective yield component of AFS debt securities is reported in the statements of profit or loss and other comprehensive income. The unrealized gains and losses arising from the fair valuation of AFS financial assets are excluded from the statements of profit or loss, and are reported as net unrealized comprehensive income or loss on AFS financial assets in the equity section of the statements of financial position, other comprehensive income and in the statements of changes in equity.

When the financial asset is disposed of or derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in equity is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income. When the Bank holds more than one investment in the same security, a specific identification basis is applied. Interest earned on holding AFS financial assets are reported as interest income using the effective interest rate. Losses arising from impairment of such financial assets are also recognized in the statements of profit or loss and comprehensive income.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

B. Liabilitas Keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, atau jika Bank memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini. Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi.
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Bank mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi kecuali:

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
2. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
3. Kontrak jaminan keuangan.
4. Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar.
5. Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2020, Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (1) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (2) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

B. Financial Liabilities

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition;

- Financial liabilities at fair value through profit or loss, Financial liabilities are classified in this category if the liabilities are classified from trading activities or when the Bank elects to designate a financial liability under this category. Changes in fair value are recognized directly in the statements of profit or loss.
- Financial liabilities measured at amortized cost.

The Bank classifies all financial liabilities after initial recognition at amortized cost except:

1. Financial liabilities at fair value through profit or loss.
2. Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied.
3. Financial guarantee contracts.
4. Commitment to provide loans at below market interest rates.
5. Contingent benefits recognized by the acquirer in the business combination.

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost are measured at fair value less transaction costs. After initial recognition, the Bank measures all financial liabilities at amortized cost using the effective interest method.

Prior to January 1, 2020, the Bank classified financial liabilities into categories (1) financial liabilities at fair value through profit or loss and (2) financial liabilities at amortized cost.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

B. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

- 1) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, atau jika Bank memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini. Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- 2) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Bank untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut tidak diselesaikan melalui penukaran kas atau aset keuangan lain melainkan dengan saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi instrumen keuangan setelah penerapan PSAK 71 efektif setelah 1 Januari 2020 dan PSAK 55 sebelum 1 Januari 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

B. Financial Liabilities (continued)

Applicable accounting policies before January 1, 2020

- 1) *Financial Liabilities at Fair Value through Profit and Loss (FVPL)*

Financial liabilities are classified in this category if the liabilities are classified from trading activities or when the Bank elects to designate a financial liability under this category. Changes in fair value are recognized directly in the statements of profit or loss and comprehensive income.

- 2) *Financial liabilities measured at amortized cost.*

This category represents financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL in initial recognition.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVPL are classified as financial liabilities measured at amortized cost, where the substance of the contractual arrangement required the Bank to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

Financial liabilities measured at amortized cost are recognized initially at fair value and are subsequently carried at amortized cost, taking into account the impact of amortization (or accretion) based on EIR method for any related premium, discount and any directly attributable transaction costs.

Bank classifies the financial instruments into classes that reflect the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification SFAS 71 effective after January 1, 2020 and SFAS 55 before January 1, 2020 can be seen in the table below:

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 71) / <i>Category as defined by PSAK 71</i>		Golongan (ditentukan oleh Bank)/ <i>Class (as determined by the Bank)</i>
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Efek-efek / <i>Marketable securities</i> Obligasi Pemerintah / <i>Government Bonds</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>	Kas / <i>Cash</i> Giro pada Bank Indonesia/ <i>Current accounts with Bank Indonesia</i> Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i> Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia/ <i>Placements with other bank and Bank Indonesia</i> Tagihan lainnya/ <i>Other receivables</i> Kredit yang diberikan/ <i>Loans</i> Pendapatan bunga yang masih akan diterima/ <i>Accrued interest receivable</i>
		Efek-efek/Securities
		Obligasi Pemerintah/ <i>Government bonds</i>
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Financial assets at fair value through other comprehensive income</i>	
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial liabilities at fair value through profit or loss</i>	Liabilitas derivatif – tidak terkait lindung nilai/ <i>Derivative payables- non hedging related</i>
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Liabilitas segera/ <i>Obligation due immediately</i> Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i> Simpanan dari bank lain/ <i>Deposits from other banks</i> Efek-efek yang dijual dengan janji di beli kembali/ <i>Securities sold under agreements to repurchase</i> Beban yang masih harus dibayar/ <i>Accrued expenses</i> Liabilitas lain-lain/ <i>Other liabilities</i>

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 55 (Revisi 2014)/ <i>Category as defined by PSAK No. 55 (Revised 2014)</i>		Golongan (ditentukan oleh Bank)/ <i>Class (as determined by the Bank)</i>
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ <i>Financial assets held for trading</i> : - Efek-efek/Securities
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loan and receivables</i>	Kas/ <i>Cash</i>
		Giro pada Bank Indonesia/ <i>Current accounts in Bank Indonesia</i>
		Giro pada bank lain/ <i>Current accounts in other banks</i>
		Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ <i>Placements in Bank Indonesia and other banks</i>
		Tagihan lainnya - transaksi perdagangan/ <i>Other receivables - trade transactions</i>
		Kredit yang diberikan/ <i>Loans</i>
		Pendapatan bunga yang masih akan diterima/ <i>Accrued interest receivable</i>
	Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo/ <i>Held to maturity investments</i>	Efek-efek/Securities
	Aset keuangan tersedia untuk dijual/ <i>Available for sale financial assets</i>	Obligasi Pemerintah/ <i>Government bonds</i>
		Efek-efek/Securities
		Obligasi Pemerintah/ <i>Government bonds</i>
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial liabilities at fair value through profit or loss</i>	Liabilitas derivatif – tidak terkait lindung nilai/ <i>Derivative payables- non hedging related</i>
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Liabilitas segera/ <i>Obligation due immediately</i>
		Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>
		Simpanan dari bank lain/ <i>Deposits from other banks</i>
		Efek-efek yang dijual dengan janji di beli kembali/ <i>Securities sold under agreements to repurchase</i>
		Beban yang masih harus dibayar/ <i>Accrued expenses</i>
		Liabilitas lain-lain/ <i>Other liabilities</i>

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (*bid price* untuk posisi beli dan *ask price* untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*) dan perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments traded in active markets at the statement of financial position date is based on their quoted market price or dealer price quotations (*bid price* for long positions and *ask price* for short positions), without any deduction for transaction costs. When current bid and asking prices are not available, the last price is used since it provides evidence of the current fair value as long as there has not been a significant change in economic circumstances since the transaction occurs.

For all other financial instruments not listed in an active market, except investment in unquoted equity securities, the fair value is determined by using appropriate valuation techniques. Valuation techniques include net present value techniques and comparison to similar instruments that have observable market prices.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

B. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Kesepakatan induk untuk menyelesaikan secara neto (*master netting agreements*) tidak dapat dijadikan dasar untuk menyajikan saling hapus antara aset dan liabilitas yang terkait dalam laporan posisi keuangan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Bank menghentikan aset keuangan, jika dan hanya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Bank mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Ketika entitas mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan (aset awal), tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih entitas (penerima akhir) maka entitas memperlakukan transaksi tersebut sebagai pengalihan aset keuangan, jika dan hanya jika, seluruh persyaratan ini terpenuhi:

- Bank tidak wajib membayar nilai tertentu kepada penerima akhir, kecuali jika entitas memperoleh nilai tertentu yang ekuivalen dari aset awal.
- Bank tidak diizinkan berdasarkan persyaratan dalam kontrak pengalihan untuk menjual atau mengagunkan aset awal kecuali untuk menjamin hak penerima akhir untuk menerima arus kas.
- Bank berkewajiban untuk menyerahkan setiap arus kas yang ditagih untuk dan atas nama penerima akhir tanpa penundaan yang signifikan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

B. Financial Liabilities (continued)

Offsetting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The master netting agreement can not be based for presenting offset between assets and liabilities related in the statement of financial position.

Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

The bank discontinues a financial asset, if and only if:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired; or
- The Bank transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.

When an entity retains the contractual right to receive cash flows from a financial asset (the original asset), but also bears a contractual obligation to pay the cash flows received to one or more entities (the final recipient), the entity treats the transaction as a transfer of a financial asset, if and only if, all of these conditions are met:

- The bank is not required to pay a specified amount to the final recipient, unless the entity obtains a certain amount equivalent to the original asset.
- The bank is not permitted under the terms of the transfer contract to sell or pledge the original asset except to guarantee the final recipient's right to receive cash flows.
- The bank is obliged to deliver any invoiced cash flows for and on behalf of the final beneficiary without significant delay.

The financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged, cancelled or has expired.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Bank tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. Bank telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa.

Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika hanya jika, model bisnis untuk aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

Applicable accounting policies January 1, 2020 (continued)

Financial asset (or, where applicable, a part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a. The rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b. The Bank retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c. The Bank has transferred their rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but have transferred control of the asset.

The financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged, cancelled or has expired.

Reclassification of Financial Instrument

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

The Bank reclassify financial assets only when the business model for financial assets changes.

Reclassification of financial assets from amortized cost to fair value through profit or loss is carried at fair value. The difference between the carrying value and the fair value is recognized as gain or loss in profit or loss.

Reclassification of financial assets from amortized cost to fair value through other comprehensive income is stated at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is carried at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum diamortisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

Bank tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasikan aset keuangan dari kategori dimiliki hingga jatuh tempo. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (selain dari kondisi spesifik tertentu), maka seluruh aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasi menjadi aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, Bank tidak diperkenankan mengklasifikasi aset keuangan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo selama dua tahun.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo aset tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Reclassification of Financial Instrument (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Reclassification of financial assets from the fair value through other comprehensive income classification to the amortized cost classification is carried at carrying value. The unamortized gain or loss is written off from equity and adjusted for fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income is carried at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost is carried at fair value.

The Bank are not allowed to reclassify financial liabilities.

Applicable accounting policies before January 1, 2020

The Bank shall not reclassify any financial instrument out and into the fair value through profit and loss classification while it is held or issued.

The Bank shall not reclassify any financial assets under the category of HTM. If there is a sale or reclassification of HTM financial asset for more than an insignificant amount before maturity (other than in certain specific circumstances), the entire HTM financial assets will have to be reclassified as AFS financial assets. Subsequently, the Bank shall not classify the financial assets as HTM during the following two years.

Reclassification of financial assets from HTM to AFS are recorded at fair value. The unrealized gain or loss is recognized in equity until that financial asset is derecognized and at the time the cumulative gain or loss previously recognized in equity shall be recognized on the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassification of financial asset from available for sale to held to maturity is recorded at book value. Unrealized gains or losses have to be amortized using the effective interest rate method until the maturity of the asset.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Pengakuan Penurunan Nilai Aset Keuangan

Bank mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan yang menerapkan persyaratan penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Pada setiap tanggal pelaporan entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, entitas mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, entitas membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Pada tanggal pelaporan entitas hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengakui dalam laba rugi jumlah perubahan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Entitas mengakui perubahan membaik atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan penurunan nilai, meskipun kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya lebih kecil dari jumlah kerugian kredit ekspektasian yang termasuk dalam estimasi arus kas pada saat pengakuan awal.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

Recognition of Impairment of Financial Assets

The Bank recognizes an allowance for possible losses on expected credit losses on financial assets measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income, lease receivables, contract assets or loan commitments and financial guarantee contracts that impose impairment requirements.

As of reporting date, an entity shall measure the allowance for possible losses on financial instruments at the amount of expected credit losses over their lifetime, if the credit risk on those financial instruments has increased significantly since initial recognition.

As of reporting date the entity assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making that assessment, an entity considers changes in default risk that occur over the life of the financial instrument, not changes in the amount of expected credit losses. In making that assessment, the entity compares the risk of default on a financial instrument that occurs at the reporting date with the risk of default on initial recognition and considers reasonable and supportable information available without undue cost or effort, which is an indication of a significant increase in credit risk since recognition early.

As of reporting date, the entity recognizes only the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial asset as an allowance for losses on financial assets purchased or resulting from deteriorating financial assets.

As of reporting date, an entity recognizes in profit or loss the amount of changes in lifetime expected credit losses as an impairment gain or loss. An entity shall recognize the amendment of the expected lifetime credit loss as an impairment gain, even though the lifetime expected credit loss is less than the amount of the expected credit loss that was included in the cash flow estimate at initial recognition.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Jika dalam periode pelaporan sebelumnya bank telah mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, tetapi pada tanggal pelaporan periode kini ditentukan bahwa risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut tidak lagi terpenuhi (tidak meningkat secara signifikan), maka bank mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan pada tanggal pelaporan periode kini.

Bank mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Jumlah yang dimaksud merupakan penyesuaian terhadap penyisihan kerugian pada tanggal pelaporan yang disyaratkan pengakuannya.

Untuk menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit, bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung, termasuk informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Bank mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan :

- Jumlah yang tidak biasa dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi, Estimasi Kerugian Kredit Ekspektasian mencerminkan jumlah probabilitas tertimbang dan tidak bisa yang ditentukan dengan mengevaluasi rentang keluaran yang mungkin.
- Nilai waktu atas uang-*discount rate*; dan
- Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan (*forward looking*).

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, bank tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, bank mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

Periode maksimum yang dipertimbangkan dalam mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode kontraktual musiman (termasuk opsi perpanjangan) selama bank terekspos terhadap risiko kredit. Periode tersebut dimaksud tidak mencakup periode yang lebih panjang meskipun periode yang lebih panjang tersebut konsisten dengan praktis bisnis yang ada.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

If in the previous reporting period the bank has measured allowance for losses for financial instruments for an amount of expected credit losses over its lifetime, but at the reporting date of the current period it is determined that the credit risk on the financial instrument is no longer fulfilled (does not increase significantly), then the bank measures the allowance for losses in the amount of 12 months expected credit loss at the reporting date of the current period.

The Bank recognizes the amount of the expected credit loss (or credit loss recovered) in profit or loss, as an impairment gain or loss. The amount referred to is an adjustment to the allowance for possible losses on the reporting date where recognition is required.

To determine whether there has been an increase in credit risk, banks consider reasonable and supported information, including forward-looking information.

The Bank measures the expected credit loss on financial instruments in a way that reflects:

- Unusual and probability-weighted amounts determined by evaluating a series of probable outcomes, Estimated Expected Credit Loss reflects a weighted and unbiased probability amount determined by evaluating the possible range of outputs.
- The time value of the money-*discount rate*; and
- Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date regarding past events, current conditions and forecasts of future economic conditions (*forward looking*).

When measuring expected credit losses, the bank does not have to identify all possible scenarios. However, banks consider the risk or probability of credit loss by reflecting the probability of occurrence and non-occurrence of credit losses, even though the possibility of credit losses is very low.

The maximum period considered in measuring expected credit losses is the seasonal contractual period (including extension options) during which the bank is exposed to credit risk. This period does not cover a longer period even though the longer period is consistent with existing business practices.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai aset keuangan ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai aset keuangan termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian aset keuangan yang terjadi. Sulit untuk mengidentifikasi peristiwa diskrit tunggal, namun demikian, dampak kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset keuangan mengalami penurunan nilai aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, tetapi bukan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, entitas mengukur kerugian aset keuangan ekspektasian sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto aset dan nilai kini dari arus kas masa depan yang diestimasi didiskonto dengan suku bunga efektif awal aset keuangan. Penyesuaian diakui di laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Credit - impaired financial asset

Financial asset is impaired in the value of a financial asset when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is impaired by a financial asset includes observable data about the following events:

- Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower;
- breaches of contract, such as events of default or arrears;
- The lender, for economic or contractual reasons in connection with the borrower's financial difficulties, has made concessions to the borrower that would not have been possible if the borrower had not experienced such difficulties;
- There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- The disappearance of an active market for financial assets due to financial difficulties; or
- Purchase or issue of financial assets at a deep discount that reflects the loss of financial assets incurred. It is difficult to identify a single discrete event, however, the combined effect of several events can cause a financial asset to be impaired.

For financial assets that have deteriorated at the reporting date, but not financial assets that were purchased or originated from deteriorating financial assets, an entity shall measure the expected financial asset loss as the difference between the asset's gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at interest rates effective initial financial assets. The adjustments are recognized in profit or loss as an impairment gain or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pengelompokan kualitas /stage Aset Keuangan

a. Stage 1

Memakup instrument keuangan yang tidak memiliki peningkatan resiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki resiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan.

b. Stage 2

Memakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan resiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali Bank merasa resiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL seumur hidup. ECL seumur hidup adalah ekspektasi kerugian kredit yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut.

c. Stage 3

Memakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Tahap ini biasanya diisi oleh debitur yang mengalami gagal bayar.

Cross Staging

Cross Staging antar debitur yang sama akan diterapkan, jika satu debitur (CIF) memiliki multi rekening (fasilitas) dan *stage* yang berbeda akan dilakukan *worst stage* artinya satu debitur akan memiliki *stage* yang terburuk.

Faktor utama dalam menentukan apakah instrumen keuangan memerlukan perhitungan ECL 12 bulan (*stage 1*) atau ECL seumur hidup (*stage 2*) disebut dengan kriteria *Significant Increase in Credit Risk* (SICR). Penentuan kriteria SICR ini memerlukan pengkajian dan diskusi apakah telah terjadi peningkatan resiko kredit secara signifikan pada tanggal pelaporan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Financial asset quality classification

a. Stage 1

Includes financial instruments that do not have a significant increase in credit risk since initial recognition or have a low credit risk at the reporting date. For these assets, a 12 month ECL calculation will apply.

b. Stage 2

Includes financial instruments that experience an increase in credit risk since initial recognition (unless the Bank feels the credit risk is low at the reporting date) but has not been proven to have an objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL calculations will apply. ECL lifetime is the expected credit loss expected from all default events that may occur during the estimated life of the financial instrument.

c. Stage 3

Includes financial instruments that have been objectively proven to be impaired at the reporting date. This stage is usually filled by debtors who experience defaults.

Cross staging

Cross staging between debtors the same will be applied, if one debtor (CIF) has multiple accounts (facilities) and different stages will be the worst stage, meaning that one debtor will have the worst stage.

The main factor in determining whether a financial instrument requires a 12 month ECL (*stage 1*) or lifetime (*stage 2*) ECL calculation is called the *Significant Increase in Credit Risk* (SICR) criterion. Determining the SICR criteria requires reviewing and discussing whether there has been a significant increase in credit risk at the reporting date.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Cross Staging

Dalam PSAK 71 terdapat sebuah *rebuttable presumption* bahwa resiko kredit terhadap aset keuangan akan dianggap meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika pembayaran kontraktual sudah lebih dari 30 DPD. Asumsi ini akan berlaku kecuali jika Bank dapat membuktikan, melalui argumen yang masuk akal dan berdasarkan fakta, bahwa resiko tidak meningkat secara signifikan pada 30 DPD. Selain itu, definisi gagal bayar (*Default*) pada PSAK 71 juga menyebutkan praduga (*rebuttable presumption*) bahwa aset keuangan yang sudah menunggak 90 hari telah gagal bayar.

Metode Kerugian Kredit Ekspektasian

a. Kredit Ekspektasian 12 bulan

Jika tidak terjadi peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian dimaksud merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya

Jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal-baik dinilai secara individu atau kolektif-dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan didukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Kriteria Stage Aset Keuangan

a. Stage 1

- Umur tunggakan (DPD) = 0 - 30 hari
- Kolektibilitas 1 atau 2
- Tidak ada *Flagging* Restrukturisasi
- Perhitungan Kerugian kredit espektasian dengan menggunakan *probability of default* 12 bulan
- Pendapatan Bunga diakui selama periode kredit yaitu suku bunga efektif diperhitungkan dengan jumlah nilai bruto (*Effective Interest Rate To Gross Carrying Amount*).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Cross staging

In SFAS 71 there is a *rebuttable presumption* that credit risk to financial assets will be considered to have increased significantly since initial recognition if the contractual payment is more than 30 DPD. This assumption will apply unless the Bank can prove, through reasonable arguments and based on facts, that the risk does not increase significantly at 30 DPD. In addition, the definition of default in SFAS 71 also mentions the *rebuttable presumption* that financial assets that are 90 days in arrears have defaulted.

Expected Credit Losses method.

a. Expected Credit 12 months

If there has been no significant increase since initial recognition. The loss represents the expected credit loss arising from a financial instrument default that may occur within 12 months after the reporting date.

b. Expected credit throughout its life

If the credit risk on the financial instrument has increased significantly since initial recognition - whether assessed individually or collectively - by considering all reasonable and supportable information, including information that is forward-looking.

Financial asset stage criteria

a. Stage 1

- Days pay due (DPD) = 0 – 30 days
- Collectability 1 or 2
- No Restructuring Flagging
- Calculation of expected credit losses using a 12 month probability of default
- Interest income is recognized during the credit period, namely the effective interest rate is calculated by the total gross value (*Effective Interest Rate To Gross Carrying Amount*).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Kriteria Stage Aset Keuangan

b. Stage 2

- Umur tunggakan (DPD) = 31 - 90 hari
- Kolektibilitas 2
- Ada *Flagging* Restrukturisasi
- Perhitungan Kerugian kredit espektasian dengan menggunakan *probability of default* seumur pinjaman.
- Pendapatan Bunga diakui selama periode kredit yaitu suku bunga efektif diperhitungkan dengan jumlah nilai bruto (*Effective Interest Rate To Gross Carrying Amount*).

c. Stage 3

- Umur tunggakan (DPD) > 90 hari
- Kolektibilitas > 2
- *Flagging* POCI
- Perhitungan Kerugian kredit espektasian dengan menggunakan *probability of default* seumur pinjaman
- Pendapatan Bunga diakui selama periode kredit yaitu suku bunga efektif diperhitungkan dengan jumlah nilai neto atau biaya diamortisasi (*Effective Interest Rate To Net Carrying Amount*).

Indikator kualitatif kriteria Stage 2 Aset Keuangan

- a. Perubahan persyaratan kredit (keringanan), dalam hal perjanjian kredit masih berjalan dalam waktu yang singkat.
- b. Tidak ada pembayaran angsuran.
- c. Peningkatan signifikan pada risiko kredit pada instrumen lain dari peminjam yang sama.
- d. Kebijakan peningkatan monitoring debitur karena peningkatan risiko kredit.
- e. Meningkatnya premi risiko debitur yang disebabkan peningkatan risiko kredit pada debitur.
- f. Perubahan faktor eksternal yang merugikan bisnis dan keuangan debitur.
- g. Penurunan rating internal dan eksternal.

Indikator kualitatif kriteria Stage 3 Aset Keuangan

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur.
 - Penurunan omset melebihi 50%
 - Penurunan laba melebihi 30%
 - Piutang usaha macet melebihi 50% dari total

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Stage Financial asset criteria

b. Stage 2

- Days pay due (DPD) = 31 – 90 days
- Collectability 2
- On Restructuring *Flagging*
- Calculation of expected credit losses using a probability of default for the duration of the loan.
- Interest income is recognized during the credit period, namely the effective interest rate is calculated by the total gross value (*Effective Interest Rate To Gross Carrying Amount*).

c. Stage 3

- Days pay due > 90 days
- Collectability > 2
- *Flagging* POCI
- Calculation of expected credit losses using a probability of default for the duration of the loan
- Interest income is recognized during the credit period, namely the effective interest rate is calculated by the net value or amortized cost (*Effective Interest Rate To Net Carrying Amount*).

Qualitative indicators of Stage 2 Financial Assets criteria

- a. Changes in credit terms (relief), if the credit agreement is still running for a short time.
- b. No installment payments.
- c. Significant increase in credit risk on other instruments from the same borrower.
- d. Policy to increase debtor monitoring due to increased credit risk.
- e. Increased debtor risk premium due to increased credit risk on debtors.
- f. Changes in external factors that are detrimental to the debtor's business and finances.
- g. Internal and external downgrades.

Qualitative indicators of Stage 3 Financial Assets criteria

- a. Significant financial difficulties experienced by debtors.
 - Decreased turnover by more than 50%
 - Profit reduction exceeding 30%
 - Bad debt receivables exceed 50% of the total

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Indikator kualitatif kriteria Stage 3 Aset Keuangan

b. Pelanggaran perjanjian kredit.

- Tidak dipenuhinya satu atau lebih syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kredit seperti syarat penandatanganan, syarat pencairan/penarikan, pelanggaran terhadap *covenant* kredit.
- Penyalahgunaan penggunaan kredit.
- Adanya masalah hukum dan ekonomi yang signifikan dari debitur.
- Terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) permasalahan hukum yang dialami debitur baik yang terkait dengan usaha maupun masalah hukum diluar usaha.
- Terdapat permasalahan internal keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau penyalahgunaan dana oleh anggota keluarga debitur.

c. Terdapat kemungkinan bahwa debitur dinyatakan pailit.

- Terdapat hutang macet kepada pihak ketiga.
- Terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tuntutan hukum pailit oleh pihak ketiga.

Pengelompokan kredit berdasarkan umur tunggakan (Delinquency Bucket)

Aset Keuangan dikelompokkan lagi kedalam kelompok tunggakan (*delinquency buckets*) yang merepresentasikan kualitas kredit yang terdiri dari :

- a. Rating 1, yakni untuk kredit yang tidak memiliki tunggakan.
- b. Rating 2, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
- c. Rating 3, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari.
- d. Rating 4, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
- e. Rating 5, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Qualitative indicators of Stage 3 Financial Assets criteria

b. Credit agreement violation

- Failure of one or more of the terms stipulated in the credit agreement, such as signing conditions, disbursement / withdrawal conditions, violation of credit covenants
- Abuse of use of credit.
- There are significant legal and economic problems from the debtors.
- There is at least 1 (one) legal problem experienced by the debtor, whether related to business or legal problems outside the business.
- There are internal family problems, for example divorce, death, prolonged illness, or misuse of funds by members of the debtor's family.

c. There is a possibility that the debtor will be declared bankrupt.

- There is bad debt to third parties.
- There is at least 1 (one) bankruptcy lawsuit by a third party.

Credit grouping based on the age of arrears (Delinquency Bucket)

Financial assets are further classified into delinquency buckets, which represent credit quality, consisting of:

- a. Rating 1, which is for credits that are not in arrears.
- b. Rating 2, namely for loans with arrears of principal and / or interest of up to 30 (thirty) days.
- c. Rating 3, namely for loans with arrears of principal and / or interest of more than 30 (thirty) days up to 60 (sixty) days.
- d. Rating 4, namely for loans with arrears of principal and / or interest of more than 60 (sixty) days up to 90 (ninety) days.
- e. Rating 5, namely for loans with arrears of principal and / or interest of more than 90 (ninety) days up to 120 (one hundred and twenty) days.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pengelompokan kredit berdasarkan umur tunggakan (Delinquency Bucket) (lanjutan)

- f. Rating 6, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari.
- g. Rating 7, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 150 (seratus lima puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- h. Rating 8, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Teknik Evaluasi Kerugian Kredit Ekspektasian

Teknik dalam mengevaluasi Kerugian Kredit Ekspektasian menggunakan metode *Migration Analysis*, dengan menggunakan pendekatan statistik dari data historis kredit berdasarkan segmentasi :

- a. Bank wide
- b. Rating (stage)
- c. Produk kredit.

Perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian atau *Expected Credit Loss (ECL)* Dalam menentukan besarnya Kerugian Kredit Ekspektasian, maka pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai mencakup :

- a. *Probability of default*
- b. *Exposure at default*
- c. *Lost given default*
- d. *Discount factor*
- e. *Forward looking adjustment*

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang dievaluasi penurunan nilainya dihitung secara individual dan kolektif serta cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk masing-masing untuk kelompok individual dan kolektif tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Credit grouping based on the age of arrears (Delinquency Bucket) (continued)

- f. Rating 6, namely for loans with arrears in principal and / or interest of more than 120 (one hundred twenty) days up to 150 (one hundred and fifty) days.
- g. Rating 7, namely for loans with arrears of principal and / or interest of more than 150 (one hundred and fifty) days up to 180 (one hundred and eighty) days.
- h. Rating 8, namely for loans with arrears of principal and / or interest of more than 180 (one hundred and eighty) days.

Technique for Evaluating Expected Credit Losses

Techniques in evaluating Expected Credit Losses use the *Migration Analysis* method, using a statistical approach from credit historical data based on segmentation:

- a. Bank wide
- b. Stage
- c. Credit products

Calculation of Expected Credit Loss (ECL) In determining the amount of Expected Credit Loss, the formation of Allowance for Impairment Losses includes:

- a. *Probability of default*
- b. *Exposure at default*
- c. *Lost given default*
- d. *Discount factor*
- e. *Forward looking adjustment*

Applicable accounting policies before January 1, 2020.

The Bank assesses, at each reporting date, whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. Impairments for financial assets that are being evaluated are assessed individually and collectively, along with the allowance for impairment loss incurred for both individually and collectively assessment.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai, aset keuangan yang dievaluasi penurunan nilainya dihitung secara individual dan kolektif serta cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk untuk masing-masing kelompok individual dan kolektif tersebut, jika dan hanya jika, terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal dari suatu aset (suatu kejadian yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi dengan handal.

Bukti mengenai penurunan nilai meliputi indikasi bahwa peminjam atau kelompok peminjam mengalami kesulitan keuangan secara signifikan, gagal dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok, kemungkinan akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya dan terdapat hasil observasi data yang mengindikasikan terdapat penurunan nilai pada estimasi arus kas masa depan, seperti perubahan kondisi ekonomi yang berhubungan dengan gagal bayar.

Khusus untuk kredit yang diberikan, Bank menggunakan kriteria tambahan untuk menentukan bukti obyektif penurunan nilai sebagai berikut:

1. Kredit yang diberikan dengan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet (kredit bermasalah) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
2. Semua kredit yang direstrukturisasi.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang secara individual mengalami penurunan nilai yang signifikan, dengan menggunakan metode *discounted cash flows*. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dan aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai, dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies before January 1, 2020 (continued)

A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, impairments for financial assets that are being evaluated are assessed individually and collectively, along with the allowance for impairment loss incurred for both individually and collectively assessment, if and only, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (an "incurred loss event") and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

Evidence of impairment may include indications that the borrower or a group of borrowers is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

Specific to a given loan, the Bank uses additional criteria for determining the objective evidence of impairment as follows:

1. Loans with sub-standard, doubtful and loss collectibility (non-performing loans) in accordance with the regulations of Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 on Asset Quality Rating for Commercial Banks as latest amended by PBI No. 14/15/PBI/2012 date October 24, 2012 about Assessment of Commercial Bank Asset Quality.
2. Restructured loans.

The Bank first determines whether there is objective evidence of impairment of financial assets. Individually made on valuation of financial assets that are individually significant value has decreased, by using the method of discounted cash flows. Financial assets that are not significant but the decline of values and financial assets that do not experience a decrease in value, included in the group of financial assets with similar risk characteristics and assessment done collectively.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik yang jumlahnya signifikan maupun tidak signifikan, maka aset keuangan tersebut akan dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan penurunan nilai kelompok aset keuangan tersebut dilakukan secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kredit, Bank menetapkan portofolio kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kredit yang dievaluasi secara individual memiliki nilai signifikan dengan plafon kredit diatas Rp50, yang mengalami penurunan nilai sesuai kolektibilitas 3, 4 dan 5 atau tunggakan (*day past due/DPD*) lebih dari 90 hari ($DPD > 90$).
- b. Kredit yang dievaluasi secara kolektif memiliki nilai signifikan dengan plafon kredit diatas Rp50, dengan kolektibilitas 1 dan 2 atau tunggakan (*day past due/DPD*) kurang atau sama dengan 90 hari ($DPD \leq 90$).
- c. Kredit yang dievaluasi secara kolektif memiliki nilai tidak signifikan dengan plafon sampai dengan Rp50.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies before January 1, 2020 (continued)

If Bank determines there is no objective evidence of impairment exist for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is continuous to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

In performing evaluation of loan impairment, Bank determines loans portfolio is as follows:

- a. Loans which individually evaluated have significant value with a loan limit above Rp50, which has impairment according collectibility 3, 4 and 5 or day past due (*DPD*) more than 90 days ($DPD > 90$).
- b. Loans which collectively evaluated have significant value, up to Rp50 with collectibility 1 and 2 or day past due (*DPD*) less or equal to 90 days ($DPD \leq 90$).
- c. Loans which collectively evaluated have insignificant value with plafond up to Rp50.

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment individually, if one of the following criteria is met:

1. Loans which individually have significant value and objective evidence of impairment; or
2. Restructured loans which individually have significant value.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

A. Perhitungan penurunan nilai secara individu

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika pinjaman yang diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Bank menggunakan metode *fair value of collateral* sebagai arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan; atau
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan aspek legal pengikatan agunan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies before January 1, 2020 (continued)

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through collective, if one of the following criteria is met:

1. Loans which individually have significant value and there is no objective evidence of impairment; or
2. Loans which individually have no significant value; or
3. Restructured loans that individually have no significant value.

A. Calculation of individual impairment

The amount of impairment loss is measured as the difference between the financial asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future impairment losses that have not incurred) discounted using at the original effective interest rate of the financial asset. The carrying amount of the asset is account reduced through impairment and expenses losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. If a loan or financial assets held to maturity have a variable interest rate, the discount rate used for measuring each impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

The calculation of the present value of estimated future cash flows of the financial asset with collateral reflects the cash flows that may result from foreclosure collateral less costs for obtaining and selling the collateral, regardless whether or not foreclosure is probable or not.

The Bank uses fair value of collateral method as future cash flows if it fulfill one of the following conditions:

1. Loans are collateral dependent, if the loan repayment is only derived from collateral; or
2. Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legal aspect binding of collateral.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

B. Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Bank.

Bank menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *roll rates analysis method*, dengan menganalisis kredit pada setiap periode tunggakan (*delinquency stage*) dalam rentang waktu bulanan (30 hari) yang digolongkan dalam 8 (delapan) *bucket* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif dengan menggunakan data historis minimal 3 (tiga) tahun.

Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan kredit yang diberikan dan efek-efek (di dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang) diklasifikasikan ke dalam "Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas kredit yang diberikan yang telah dihapuskan pada tahun berjalan dicatat sebagai pemulihan dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies before January 1, 2020 (continued)

B. The calculation of collective impairment

For the purposes of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped based on similar credit risk characteristics such as loan segmentation and arrears status. Future cash flows from a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment, estimated based on historical loss experienced for assets that have credit risk characteristics similar to the characteristics of the group's credit risk in the Bank.

The Bank used statistical model analysis methods, namely the roll rates analysis method, by analyzing the delinquent loans in each period (delinquency stage) in a monthly range (30 days) were classified in 8 (eight) bucket for the assessment of impairment of financial assets collectively using historical data at least 3 (three) years.

When loans is uncollected, reversing journal is written-off loans with Allowance for impairment. Loans can be written off after all the necessary procedures have been performed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges related to loans and securities (in held-to-maturity and loans and receivables) are classified into the "Allowance for Impairment Losses".

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as increasing the debtor's credit rating), the impairment loss previously recognized is reversed by adjusting the allowance account. Total recovery of financial assets are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Subsequent recoveries of loans written-off in the current year is recorded as a recovery of the Allowance for Impairment Losses.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

B. Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Penerimaan kemudian atas kredit yang diberikan yang telah dihapus bukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

1) Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Bank pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan kerugian penurunan nilai tersebut tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dilaporkan pada biaya amortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Penurunan nilai diakui secara terpisah dengan nilai bruto aset dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai kolektif atas kredit, Bank memakai data kerugian historis untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas kredit secara kolektif sesuai dengan PSAK. Data historis yang digunakan adalah data kerugian historis yang ada dalam Bank sesuai kelompok kredit yang mempunyai tingkat risiko kredit yang sama.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies before January 1, 2020 (continued)

B. The calculation of collective impairment (continued)

Subsequent recoveries of loans written-off in previous years are recorded as other operating income.

1) Financial assets carried at amortized cost

The Bank first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that the impairment are individually assessed and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment for impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss on loan and receivables or held to maturity financial assets that carried at amortized cost for individually assessed has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses) that have not been incurred discounted at the financial asset's original effective interest rate (i.e. the effective interest rate computed at initial recognition). Impairment loss is recognized separately from the gross value of assets and losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

For the purposes of collective impairment evaluation of loans, the Bank used historical data to determine the impairment on loans collectively in accordance with the requirements of the SFAS. The historical data used is the existing data in accordance with the Bank's loans groups having the same level of credit risk.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

B. Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

- 2) Aset keuangan yang dikelompokkan dalam tersedia untuk dijual

Dalam hal instrumen ekuitas dikelompokkan dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar yang signifikan dan berkelanjutan dibawah biaya perolehannya. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kerugian penurunan nilai instrumen ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui pada ekuitas.

Dalam hal instrumen utang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakui berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Bank melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam entitas.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Applicable accounting policies before January 1, 2020 (continued)

B. The calculation of collective impairment (continued)

- 2) Financial assets classified as available-for-sale

In case of equity investments classified as AFS, assessment of any impairment would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investments below its cost. Where there is objective evidence of impairment, the cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income then removed from equity and recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Impairment losses on equity investments are not reversed through the statements of profit or loss and other comprehensive income. Increases in fair value after impairment are recognized directly in equity.

In the case of debt instruments classified as AFS, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost. Interest continues to be accrued at the original effective interest rate on the reduced carrying amount of the asset and is recorded as part of interest income in the statements of profit or loss and other comprehensive income. If, in subsequent period, the fair value of a debt instrument increased and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss then it recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss is reversed through the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Segment reporting made by the bank is based on the financial information used by operating decision makers in evaluating operating segment performance and determining the allocation of its resources. Segmentation based on the activity of each legal entity operating activities in the entity.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Giro pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 3e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Kebijakan akuntansi untuk pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada (Catatan 3e).

Giro Wajib Minimum

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bank diwajibkan untuk menempatkan sejumlah persentase tertentu atas simpanan nasabah pada Bank Indonesia.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), call money dan deposito berjangka.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat catatan 3e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penempatan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, call money, deposito berjangka dan tabungan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang dan disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan EIR dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Kebijakan akuntansi untuk pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada (Catatan 3e).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Current accounts in Bank Indonesia and Other Banks

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

The current accounts with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Current accounts with other banks and Bank Indonesia are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to Note 3e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Current accounts in Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment loss and classified as loan and receivables. The specific accounting policy for loan and receivables is disclosed in (Note 3e).

Statutory Reserves Requirement

In accordance with prevailing Bank Indonesia regulation concerning Statutory Reserve in Rupiah and Foreign Currency for Commercial Banks, Bank is required to place certain percentage of deposits from customers with Bank Indonesia.

g. Placements in Bank Indonesia and Other Banks

Applicable accounting policies as of 1 January 2020

Placements with other banks and Bank Indonesia consist of Bank Indonesia Deposit Facility (BIDF), call money and time deposits.

Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Placements with other bank are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to note 3e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Applicable accounting policies before January 1, 2020

Placements in Bank Indonesia and other banks represent placements in Bank Indonesia Deposit Facility, call money, time deposit and saving.

Placements in Bank Indonesia and other banks are classified as loan and receivables and are stated at amortized cost using EIR less any allowance for impairment losses. The specific accounting policy for loan and receivables is disclosed in (Note 3e).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Efek-efek

Efek-efek terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang dikategorikan sebagai efek utang dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Kebijakan akuntansi untuk efek-efek diungkapkan dalam (Catatan 3e).

i. Kredit

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang dan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kebijakan akuntansi untuk pinjaman yang diberikan dan piutang dijelaskan pada (Catatan 3e).

Kredit dalam rangka perjanjian sindikasi, dinyatakan sebesar porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru. Setelah syarat dan ketentuan telah dinegosiasi ulang, penurunan nilai yang ada sebelumnya akan diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal sebelum ketentuan kredit dimodifikasi dan kredit tersebut tidak lagi dalam kategori "past due". Manajemen akan melakukan kaji ulang kredit yang direstrukturisasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh syarat terpenuhi dan pembayaran dimasa datang akan terjadi. Kredit tersebut akan dimasukkan dalam perhitungan penurunan nilai secara individual atau kolektif, yang dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal dan mengikuti perlakuan atas perhitungan penurunan nilai kreditnya.

Beberapa kebijakan internal mengenai restrukturisasi kredit sebagai berikut:

- Restrukturisasi diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pinjaman baik pokok ataupun bunga pinjaman dan masih memiliki prospek usaha

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, da tagihan yang berasal dari fasilitas trade finance yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasikan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities

Securities represent investments in Certificates of Bank Indonesia (SBI), Deposits Certificates of Bank Indonesia (SDBI), government bonds and corporate bonds are considered as debt securities and classified as HTM and AFS financial assets. The accounting policy for these securities is disclosed in (Note 3e).

i. Loans

Loans are classified as loans and receivables and are stated at amortized cost less allowance for impairment losses. The specific accounting policy for loans and receivables is described in (Note 3e).

Syndicated loans are stated at the principal amount in accordance with the risk portion borne by the Bank.

Loans restructuring may involve extending the payment arrangements and the agreement of new loan conditions. Once the terms have been renegotiated, any previous impairment is measured using the original EIR as calculated before the modification of the terms and the loan is no longer considered "past due". Management continuously reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and that the future payments are likely to occur. The loans continue to be subject to an individual or collective impairment assesment, which calculated using the loans's original EIR and follow the impairment assessment of loans.

Some internal policies regarding loan restructuring are as follows:

- Restructuring granted to debtors who has difficulty of loan payment both loan principal or interest of loan and they still have business prospects

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents there of, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities which have not been settled within 15 days.

Loans are classified as amortized cost.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

i. Kredit (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Lihat catatan 3e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

- Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Bank
- Wajib dilakukan analisa ulang atas kemampuan pembayaran kewajiban dan appraisal ulang agunan
- Keputusan restrukturisasi dilakukan oleh pejabat yang berbeda dari pemutus kredit awal
- Wajib disempurnakan legalitas dan pengikatan agunan
- Penetapan kualitas kredit setelah restrukturisasi mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia terkini mengenai kualitas aktiva produktif

Kredit yang diberikan dihapusbukukan, ketika kredit sudah masuk dalam kategori macet (kolektibilitas 5) dan tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian dimasa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan, disajikan sebagai pendapatan operasional lainnya.

j. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Biaya dibayar dimuka akan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Loans (continued)

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on the effective interest rate method less allowance for impairment losses

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion or risks borne by the Bank

Refer to Note 3e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

- The debtors must submit an application of loan restructuring to the Bank
- Mandatory conducted a re-analysis of the ability of repayment obligations and re-appraisal of collateral
- Decision of the restructuring carried out by different officials from the initial loans authorized
- Mandatory enhanced legal and binding of collateral
- Determination of loans collectibility after restructuring refers to the latest Bank Indonesia regulations concerning the quality of earning assets

Loans are written-off, when loans has been included in loss category (collectibility 5) and there is no realistic prospect of collection in the near future and all collaterals that has sought to be realized or take over. When a loan is deemed uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment losses.

The recoveries of loans written-off presented as other operational income.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are expenses which have been incurred but have not been recognized as expenses in the related period.

Prepaid expenses are recognized as expenses in the statements of profit or loss and other comprehensive income during amortization in accordance with the expected beneficial period.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK No. 16, "Aset Tetap", Bank memilih model biaya untuk pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap (kecuali tanah tidak disusutkan) dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tarif penyusutan/ Depreciation rate
Renovasi bangunan yang disewa	10-33%
Kendaraan	20%
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor	20%

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun buku untuk memastikan bahwa nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan ekspektasi pola manfaat ekonomis dari aset tersebut.

Suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara (misalnya: dijual, disewakan dalam sewa pembiayaan, atau disumbangkan). Dalam menentukan tanggal pelepasan aset, entitas menerapkan kriteria dalam PSAK No. 23 (Revisi 2010): "Pendapatan" untuk mengakui pendapatan dari penjualan barang. PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa" diterapkan untuk pelepasan melalui jual dan sewa-balik.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Fixed Assets

In accordance with SFAS No. 16, "Fixed Assets", Bank has decided to use the cost model for fixed assets measurement.

Fixed assets (except land that is not depreciated) are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Such costs include the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred.

Depreciation are computed using straight-line method, based on the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

	Tahun/Years	
Leasehold improvement	3 – 10	
Vehicles	5	
Office equipment, machine and furnitures	5	

The estimated residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed at each reporting date to ensure that such residual values, useful lives and depreciation methods are consistent with the expected pattern of economic benefits from those assets.

Fixed asset that are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset, (calculated as the difference between the net proceeds from disposal and the carrying amount of fixed asset) is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the year of derecognition.

Disposal of fixed assets can be done in various ways (eg: sold, leased under a finance lease, or donated). In determining the date of disposal of asset, an entity applies the criteria in SFAS No. 23 (Revised 2010): Revenue to recognize revenue from the sale of goods. SFAS No. 30 (Revised 2011), "Lease" applied for release through the sale and lease-back.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Aset Tetap (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian merupakan aset yang masih dalam proses penyelesaian dan belum siap untuk digunakan, serta dimaksudkan untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha. Aset ini dicatat sebesar biaya yang telah dikeluarkan.

Estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu telah ditelaah setiap akhir tahun pelaporan.

l. Aset dan Liabilitas Sewa

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Pada tahun berjalan, Bank telah menerapkan PSAK 73 (diterbitkan oleh DSAK IAI pada tahun 2017) yang mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Berbeda dengan akuntansi *lessee*, persyaratan untuk akuntansi *lessor* sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK 73 pada Laporan Keuangan dijelaskan di bawah ini.

Tanggal penerapan awal PSAK 73 untuk Bank adalah 1 Januari 2020. Bank telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK 73. Dengan demikian, informasi komparatif yang disajikan untuk tahun 2019 tidak disajikan kembali sebagaimana dilaporkan sebelumnya, pada PSAK 30 dan interpretasi terkait.

a) Dampak definisi baru dari sewa

- Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa atas dasar jika penyewa memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Fixed Assets (continued)

Construction in progress consist of assets that are still in progress of construction and not yet ready for use and are intended to be used in business activity. This account is recorded based on the amount paid.

Estimation of economic life, depreciation method, and residual value are reviewed at each financial year-end.

l. Lease Assets and Liabilities

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

In the current year, the Bank has implemented SFAS 73 (issued by DSAK IAI in 2017) which became effective on January 1, 2020.

SFAS 73 applies new requirements or amendments in connection with lease accounting. This standard introduces significant changes to the lessee's accounting by eliminating the difference between operating and financing leases, and requires the recognition of use rights assets and the recognition of lease liabilities at inception for all leases, except for short-term leases and low-value asset leases. In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting are largely unchanged. The impact of the adoption of SFAS 73 on Financial Statements is described below.

The initial application date of SFAS 73 for Banks is January 1, 2020. The Bank has implemented SFAS 73 using a modified retrospective approach by recognizing the cumulative impact from the initial application of SFAS 73. Accordingly, the comparative information presented for 2019 is not restated as previously reported, in SFAS 30 and related interpretations.

a) Impact of the new definition of lease

- The main change from the definition of lease relates to the concept of control. SFAS 73 determines whether a contract constitutes, or contains a lease on the basis that the lessee has the right to control the use of the asset for a specified period of time in exchange for consideration. This is the difference in determining whether a contract is, or contains a lease based on SFAS 30, with the concept of risk and benefit.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

1. Aset dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

- a) Dampak definisi baru dari sewa
- Bank menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang diterapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak yang dicatat atau diubah pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Dalam persiapan untuk pertama kali penerapan PSAK 73, Bank telah melakukan proyek implementasi. Proyek tersebut telah menunjukkan bahwa definisi baru dari PSAK 73 tidak akan secara signifikan mengubah lingkup kontrak Bank untuk memenuhi definisi dari sewa.
 - Bank menggunakan cara praktis yang terdapat pada panduan transisi dalam PSAK 73, yaitu penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang hampir sama.
- b) Dampak pada akuntansi lessee
- Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa merupakan jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Biaya aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

Bangunan	:	10 Tahun
Kendaraan	:	5 Tahun
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor	:	5 Tahun

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

1. Lease Assets and Liabilities (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

- a) Impact of the new definition of lease
- The Bank applies the definition of leases and related guidelines applied in SFAS 73 to all contracts recorded or amended on or after January 1, 2020. In preparation for the first implementation of SFAS 73, the Bank has undertaken an implementation project. The project has demonstrated that the new definition of SFAS 73 will not significantly change the scope of the Bank's contract to meet the definition of a lease.
 - Banks use the practical method contained in the transition guidelines in SFAS 73, namely the use of a single discount rate for lease portfolios with almost the same characteristics.
- b) The impact on the lessee's accounting
- The Bank applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and low value asset leases. The Bank recognizes a lease obligation to make lease payments and use rights assets that represent the right to use the underlying asset.

The Bank recognizes the use rights assets on the inception date of the lease. Use rights assets are measured at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of the lease obligations. Lease liabilities are the amount of lease payments accrued until the end of the lease term, discounted using the incremental loan interest rate. The cost of lease assets includes the amount of lease liability recognized, initial direct costs paid, recovery costs and lease payments made on or before the start date of the lease less rental incentives received. Use rights assets are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset, as follows:

10 Tahun	Building
5 Tahun	Vehicle
5 Tahun	Office equipment, machinery and equipment

If ownership of the leased asset is transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payment reflects the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. Use rights assets are tested for impairment in accordance with PSAK 48 Impairment of Assets Value.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

I. Aset dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pada tanggal dimulainya sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dengan durasi kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini ditunjukkan pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Bank menyajikan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi pada PSAK 30, yang tidak diungkapkan dalam laporan posisi keuangan. Penerapan pencatatan PSAK 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), Bank:

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Lease Assets and Liabilities (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

At the inception date of the lease, the Bank recognizes lease liabilities at the present value of future lease payments that will be made over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments) less lease incentive receivables, variable lease payments that are index or interest rate dependent, and the amount expected to be paid in a residual value guarantee. The lease payment also includes the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Bank and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank exercising the lease termination option. Variable lease payments that are not dependent on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Bank uses the incremental loan interest rate of the lessee at the inception date of the lease because the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the increase in interest and less lease payments made. In addition, the carrying amount of the lease liability is remeasured if there are modifications, changes in the term of the lease, changes in lease payments, or changes in the valuation of the option to purchase the underlying asset.

Short-term leases with a duration of less than 12 months and leases of low value assets, as well as elements of the leases, partially or wholly do not apply the recognition principles stipulated by SFAS 73 will be treated the same as operating leases in SFAS 30. lease on a straight-line basis over the lease term in the statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is shown under general and administrative expenses in the income statement.

The Bank presents leases that were previously classified as operating leases in SFAS 30, which are not disclosed in the statement of financial position. The application of SFAS 73 listing applies to all leases (except as stated earlier), the Bank:

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

I. Aset dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

- Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan
- Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

Kebijakan terkait Sewa sebelum tanggal 1 Januari 2020:

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut sesuai dengan PSAK No. 30 (Revisi 2014), "Sewa".

Transaksi sewa yang dilakukan Bank diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika tidak terdapat pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan garis lurus selama masa sewa.

Transaksi jual dan sewa-balik meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Pembayaran sewa dan harga jual biasanya saling terkait karena keduanya dinegosiasikan sebagai suatu paket. Perlakuan akuntansi untuk transaksi jual dan sewa-balik bergantung pada jenis sewanya.

Jika suatu transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa pembiayaan, selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual (*lessee*), tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

Jika transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa operasi dan jelas bahwa transaksi tersebut terjadi pada nilai wajar, maka laba atau rugi harus diakui segera.

Transaksi jual dan sewa-balik yang dilakukan Bank merupakan sewa operasi dan diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Lease Assets and Liabilities (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

- Present asset rights as part of property, plant and equipment and lease liabilities are presented as part of other liabilities in the statement of financial position, measured at the present value of future lease payments;
- Record the depreciation of the use of rights assets and interest on the lease liability in the statement of comprehensive income and loss; and
- Separating the total payment into principal (presented in financing activities) and interest (presented in operational activities) in the cash flow statement.

Lease-related policies before January 1, 2020:

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date of whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset in accordance with SFAS No. 30 (Revised 2014), "Leases".

The lease transaction entered into by the Bank was classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. Lease payment is recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.

A sale and lease-back transaction involves the sale of an asset and the leasing back of the same asset. The lease payment and the sale price are usually interdependent because they are negotiated as a package. The accounting treatment of a sale and lease-back transaction depends upon the type of the lease involved.

If a sale and lease-back transaction results in a finance lease, any excess of the sales proceeds over the carrying amount shall not be immediately recognizes as income by a seller (lessee); instead it shall be deferred and amortized over the lease term.

If a sale and lease-back transaction results in an operation lease, and it is clear that the transaction is established at fair value, any gain or loss shall be recognized immediately.

The sale and lease-back transaction entered into by the Bank was considered as an operating lease and is recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

l. Aset dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Kebijakan terkait Sewa sebelum tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awal sewa hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. Terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual, kecuali jika perubahan tersebut hanya memperbarui atau memperpanjang perjanjian yang ada;
- b. Opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, kecuali ketentuan pembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah termasuk dalam masa sewa;
- c. Terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada suatu aset tertentu; atau
- d. Terdapat perubahan substansial atas aset yang disewa.

Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan penerapannya pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario a, c atau d dan pada tanggal pembaharuan atau perpanjangan sewa pada skenario b.

Dalam perlakuan akuntansi sewa oleh lessee, sewa pembiayaan, dimana terdapat pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset kepada Bank, dikapitalisasi pada awal sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan ke laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Aset sewaan disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Bank akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Lease Assets and Liabilities (continued)

Lease-related policies before January 1, 2020 (continued)

A reassessment is made after inception of the lease only if one of the following applies:

- a. There is a change in contractual terms, other than a renewal or extension of the agreement;
- b. A renewal option is exercised or extension granted, unless the term of the renewal or extension was initially included in the lease term;
- c. There is a change in the determination of whether the fulfillment is dependent on a specified asset; or
- d. There is a substantial change to the asset.

Where a reassessment is made, lease accounting shall commence or cease from the date when the change in circumstances gave rise to the reassessment for scenarios a, c or d and the date of renewal or extension period for scenario b.

Under the lessee accounting, finance leases, which transfer to the Bank substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item, are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly against statement of profit or loss and other comprehensive income.

Capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Bank will obtain ownership by the end of the lease term.

Operating lease payments are recognized as an expense in the statements of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

m. Agunan yang Diambil Alih dan Properti Terbengkalai

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan atau nilai *outstanding* kredit mana yang lebih rendah. Selisih lebih antara saldo kredit yang tidak dapat ditagih dengan nilai agunan yang diambil alih tersebut dibebankan pada cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan. Laba atau rugi yang diperoleh atau berasal dari penjualan agunan yang diambil alih dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Properti terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha operasional Bank. Properti terbengkalai ini dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasi. Biaya-biaya pemeliharaan dan perbaikan periode berjalan dibebankan pada saat terjadinya.

Atas agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai, dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku (Catatan 3s).

n. Aset Takberwujud

Bank mengklasifikasikan aset takberwujud dalam aset lain-lain, berupa perangkat lunak dan hak paten. Aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 5 tahun atau dengan tarif penyusutan sebesar 20% untuk perangkat lunak dan 10 tahun atau dengan tarif penyusutan sebesar 10% untuk hak paten.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi ditelaah setiap akhir tahun.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika:

- Dilepas; atau
- Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Foreclosed Assets and Abandoned Properties

Foreclosed assets acquired through loan foreclosures are stated at net realizable value, which is the fair value of the foreclosed asset, net of estimated cost to sell or stated as loan outstanding amount, whichever is lower. The excess of the uncollectible loan balance over the value of the collateral is charged to allowance for impairment losses on non financial asset. Gain or losses earned or incurred from the sale of foreclosed assets are credited or charged to statements of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

Abandoned properties represent Bank's fixed assets in form of property which was not used for the Bank's business operational activity. These properties are stated at net realizable value. Repairs and maintenance expenses for the current period are charge to expense as incurred.

Foreclosed assets and abandoned properties are provided with allowance for impairment losses in accordance with the regulation of SFAS (Note 3s).

n. Intangible Assets

The Bank classifies intangible assets in others assets, such as software and patent. Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment loss, if any.

Amortization is recognized in statements of profit or loss and comprehensive income using the straight line method based on its estimated useful lives of 5 years or with depreciation rate of 20% for software and 10 years or with depreciation rate of 10% for patent.

The estimated useful lives, residual values and amortization method are reviewed at each financial year end.

Intangible assets is derecognition if:

- Disposed; or
- If there is no expectation of future economic benefit used or released.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

o. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari nasabah maupun dari bank lain.

Liabilitas segera disajikan sebesar jumlah liabilitas bank dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan pada (Catatan 3e).

p. Simpanan dari Nasabah

Giro merupakan dana nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan dana nasabah yang bisa ditarik setiap saat berdasarkan persyaratan tertentu yang disepakati bersama.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan Bank.

Simpanan dari nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan pada (Catatan 3e).

q. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari kewajiban terhadap bank lain, dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan dan *interbank call money*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Kebijakan akuntansi untuk kewajiban keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan pada (Catatan 3e).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Liabilities Due Immediately

Liabilities due immediately are recognized at the time of the obligations occurred or receipt of transfer order from customers or other banks.

Liabilities due immediately are stated at the liability amount and classified as financial liabilities measured at amortized cost. The specific accounting policy for financial liabilities measured at amortized cost is explained in (Note 3e).

p. Deposits from Customers

Demand deposits represent deposits from customers that can be used as instruments of payment and can be withdrawn at any time through cheques or transfer of funds with clearing account or other forms.

Savings accounts represent deposits from customers that can be withdrawn at anytime based on certain conditions agreed by both parties.

Time deposits represent deposits from customers that can be withdrawn after a certain time in accordance with the agreement between the customers and the Bank.

Deposits from customers are classified as financial liabilities at amortized cost. The specific accounting policy for financial liabilities at amortized cost is explained in (Note 3e).

q. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks in the form of demand deposits, time deposits, saving and interbank call money.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities at amortized cost. The specific accounting policy for financial liabilities at amortized cost is explained in (Note 3e).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

r. Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali dan Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dengan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar dimuka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek – efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 3e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Securities Sold under Repurchase Agreement and Securities purchased under agreement to resell

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

Securities purchased under agreements to resell are classified as amortized cost.

Securities purchased under agreements to resell are presented as assets in the statement of financial position, at the resale price net of unamortized interest income and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold using effective interest rate method.

Securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using effective interest rate method.

Refer to Note 3e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

s. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Non-Kuangan dan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Sejak tanggal 1 Januari 2011, Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011. Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian atas aset non produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi. Namun, Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

PSAK No. 48 (Revisi 2014) mengenai "Penurunan Nilai Aset" mensyaratkan manajemen Bank untuk menelaah nilai aset untuk setiap penurunan dan penghapusan ke nilai wajar jika keadaan menunjukkan bahwa nilai tercatat tidak bisa diperoleh kembali. Di lain pihak, pemulihan kerugian penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. Penurunan (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban (pendapatan) pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Nilai tercatat aset ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Setiap rugi penurunan atau pemulihan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

t. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, pendapatan maupun beban bunganya diakui dengan menggunakan metode EIR, yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, masa yang terpendek, mana yang lebih sesuai sebagai nilai bersih aset atau liabilitas keuangan. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual instrumen keuangan termasuk *fee*/biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan instrumen tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari EIR.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Allowance for Impairment Losses on Non-financial Assets and Estimated Losses on Commitments and Contingencies

Starting January 1, 2011, the Bank determines allowance for impairment losses from non-financial assets, based on Bank Indonesia Letter No.13/658/DPNP/IDPnP dated December 23, 2011. The Bank no longer required to provide the provision for possible losses on non-earning assets and estimated losses on commitments and contingencies. However, the Bank still need to calculate the allowance for impairment losses accordance with applicable Financial Accounting Standards.

In compliance with SFAS No. 48 (Revised 2014), "Impairment in Asset Value", asset values are reviewed for any impairment and possible write-down to their fair values whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be fully recovered. On the other hand, a reversal of an impairment loss is recognized whenever there is indication that the asset is not impaired anymore. The amount of impairment loss (reversal of impairment loss) is recognized in the current period's statement of profit or loss and other comprehensive income.

The carrying values of assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable. Any impairment loss is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the current period.

t. Interest Income and Expense

Interest income and expenses are recorded in accordance with SFAS No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments; Recognition and Measurement".

Financial instruments measured at amortized cost, financial assets and liabilities classified as AFS is recorded using the EIR method, which is the rate that exactly discounts of estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. The calculation takes into account all contractual terms of the financial instrument and includes any fees or incremental costs that are directly attributable to the instrument and as an integral part of the EIR.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

t. Pendapatan dan Beban Bunga (lanjutan)

Nilai tercatat aset atau liabilitas keuangan disesuaikan jika Bank merevisi estimasi pembayaran maupun penerimaan. Nilai tercatat yang disesuaikan tersebut dihitung dengan menggunakan EIR awal dan perubahan nilai tercatat dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Tetapi untuk aset keuangan yang telah direklasifikasi, dimana pada tahun berikutnya Bank meningkatkan estimasi penerimaan kas sebagai hasil dari peningkatan pengembalian penerimaan kas, dampak peningkatan pemulihan tersebut diakui sebagai penyesuaian EIR sejak tanggal perubahan estimasi.

Pada saat nilai tercatat aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang serupa telah diturunkan akibat adanya kerugian penurunan nilai, penghasilan bunga tetap diakui dengan menggunakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa mendatang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Penerimaan dari kredit yang “diragukan” dan “macet” diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai penghasilan bunga.

u. Pendapatan dan Biaya Lain-lain

Provisi yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset keuangan diakui sebagai penyesuaian atas EIR aset keuangan tersebut.

Seluruh penghasilan dan beban lain-lain yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

v. Pajak Penghasilan

Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sesuai dengan PSAK No. 46 (Revisi 2014), “Pajak Penghasilan”.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Interest Income and Expense (continued)

The carrying amount of the financial asset or financial liability is adjusted if the Bank revises its estimates of payments or receipts. The adjusted carrying amount is calculated based on the original EIR and the change in carrying amount is recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income. However, for a reclassified financial asset for which the Bank subsequently increases its estimates of future cash receipts as a result of increased recoverability of those cash receipts, the effect of that increase is recognized as an adjustment to the EIR from the date of the change in estimate.

Once the recorded value of a financial asset or a group of similar financial assets has been reduced due to an impairment loss, interest income continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

Collection from loan classified as “doubtful” and “loss” is recognized as a deduction of loan outstanding. The excess payment from loan outstanding is recognized as interest income.

u. Other Income and Expenses

Fees that are directly attributable to the financial asset are recognized as adjustments to the EIR on such asset.

All of these other income and expenses are recorded in the statement of profit or loss and comprehensive income when incurred.

v. Income Tax

Accounting treatment for income tax is in accordance with SFAS No. 46 (Revised 2014), “Income Tax”.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing tax rates or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to the differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and carryforward tax benefit of unused fiscal losses as long as the probable taxable income will be available in future periods against the deductible and carryforward tax benefit.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

v. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Pajak tangguhan diakui dengan metode liabilitas atas perbedaan pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan laporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling-hapus atas aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama atau kelompok usaha yang bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas atas aset lancar neto.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan dicatat ketika surat ketetapan diterima atau, jika Bank mengajukan banding, ketika hasil banding telah ditetapkan.

w. Imbalan Pasca-kerja

Bank menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2016) "Imbalan Kerja". Bank menghitung dan mencatat imbalan pasca-kerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 (UU No. 13/2003). Imbalan pasca-kerja merupakan manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini cadangan imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*. Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui segera pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan. Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan diamortisasi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Bank mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial dari liabilitas imbalan kerja diakui secara langsung di dalam penghasilan komprehensif lain.

Bank mengakui laba atau rugi dari *curtailment* pada saat *curtailment* terjadi. Keuntungan atau kerugian *curtailment* terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kewajiban manfaat pasti dan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang diakui sebelumnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Income Tax (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at statement of financial position date. Deferred tax is charged to or credited in the statements of profit or loss and other comprehensive income, except when it relates to items charged to or credited directly in equity, the deferred tax is also charged to or credited directly in equity.

Deferred tax has recognized with liability method through the difference at the reporting date between the bases of tax imposition's asset and liability and the carrying amount for the purpose of financial statement at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liability are offset if there is legally right to offsetting of current tax assets towards current tax liability or deferred tax assets and liability at the same entity or business group that intend to complete assets and liability of net current assets.

Deferred tax assets and liabilities are presented in the statements of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Bank, when the result of the appeal is determined.

w. Post-employment Benefits

The Bank have adopted SFAS No. 24 (Revised 2016) "Employee Benefits". The Bank calculates and recognizes post-employment benefit obligation for severance pay, gratuity and compensation in accordance with Labor Law No. 13 dated March 25, 2003 (UU No. 13/2003). Post-employment benefits are unfunded which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension. The actuarial valuation method used to determine the present value of defined-benefit obligation, related current service costs and past service costs is the Projected Unit Credit. Current service costs, interest costs, past service costs which are already vested, and effects of curtailments and settlements (if any) are charged directly to statement of profit or loss and other comprehensive income. Past service costs which are not yet vested for working (active) employees are amortized during the employees' average remaining years of service, until the benefits become vested.

The Bank has recognized actuarial gain or loss from employee benefit liability shall be recognized directly in other comprehensive income.

The Bank has recognized gain or loss from curtailment when it occurred. Curtailment's gain or loss consist of the changes that have occurred in value of defined benefit obligation and actuarial gain or loss and past service costs that has recognized.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

x. Laba per Saham (LPS)

Sesuai dengan PSAK No. 56, "Laba Per Saham", laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan (dikurangi perolehan kembali saham beredar).

LPS dasar dihitung dengan membagi laba bersih periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan, yaitu sejumlah 51.870.438.266 dan 9.160.354.337 lembar saham untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 34).

Bank tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan oleh karenanya, rugi per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

y. Informasi Segmen

Bank menerapkan PSAK No. 5, "Segmen Operasi". PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Tidak terdapat dampak signifikan atas penerapan standar akuntansi yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

Segmen adalah bagian khusus dari Bank yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa untuk lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada manajemen untuk tujuan mengalokasikan sumber daya dalam satu segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, laba rugi bersih, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo transaksi antar kelompok usaha dieliminasi.

z. Provisi

Bank menerapkan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi".

Provisi diakui jika Bank memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Earnings per Share (EPS)

In accordance with SFAS No. 56, "Earnings per Share", earnings per share is computed based on the weighted-average number of issued and fully paid shares during the period (less treasury stock).

Basic EPS is computed by dividing the net income for the period with the weighted average number of shares outstanding during the period, which are 51,870,438,266 and 9,160,354,337 shares for the year ended, December 31, 2020 and 2021 (Notes 34).

The Bank has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2021 and 2020 accordingly, no diluted loss per share is calculated and presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

y. Segment Information

The Bank applied SFAS No. 5, "Operating Segments". The revised SFAS requires disclosures that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates. There is no significant impact on the adoption of the revised accounting standard on the financial statements.

A segment is a distinguishable component of the Bank that is engaged either in providing certain products and services (business segment), or in providing products and services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported shall be the measure reported to the management for the purposes of allocating resources to the segment and assessing its performance.

Segment revenue, expenses, net income, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. Segments are determined before intra-group balances and intragroup transactions are eliminated.

z. Provision

The Bank adopted SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets".

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

z. Provisi (lanjutan)

Provisi ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan pada tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai pasar kini atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas yang bersangkutan.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi tidak diakui.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang membutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitasnya.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berdampak pada nilai aset dan liabilitas dalam satu periode pelaporan, dimana estimasi dan asumsi tersebut merupakan estimasi terbaik berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Estimasi dan asumsi dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu serta faktor-faktor lain termasuk ekspektasi atas peristiwa yang akan datang, yang mempengaruhi:

- Penerapan kebijakan akuntansi.
- Nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan, pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan.
- Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama tahun pelaporan.

Pertimbangan

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada (Catatan 3e).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Provision (continued)

Provisions are determined by discounting the estimated future cash flow at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value money and the risks specific to the liability.

Provisions are reviewed at each statement of financial position date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

Use of Judgements, Estimates, and Significant Assumptions with Management

Some estimations and assumption made in order to the preparation of a financial statement that requires management's considerations in determining a methodology which is proper to asset valuation and liabilities.

Management make estimation and assumption that impact on the value of its assets and liabilities in one period of reporting, where estimation and the assumption are the best estimation based on Indonesian Financial Accounting Standards.

The estimation and assumption are constantly evaluated and based on past experience and other factors including expectations of events to come affecting:

- The application of accounting policies.
- The reported amounts of assets and liabilities, and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements.
- The reported amounts of revenues and expenses reported during reporting year.

Judgements

Classification of financial assets and liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering if they meet the definition set forth in SFAS No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are recognized for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in (Note 3e).

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Bank berdasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Bank melakukan penelaahan atas kredit pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dicatat. Justifikasi manajemen diperlukan untuk melakukan estimasi atas jumlah dan waktu arus kas dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai. Nilai tercatat dari kredit Bank sebelum cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.084.002 dan Rp3.789.819. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam (Catatan 11).

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Liabilitas imbalan pasca-kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan pasca-kerja Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp24.895 dan Rp32.455. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 33).

Penyusutan Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat bersih atas aset tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp60.833 dan Rp65.323. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 14).

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Bank reviews its loans at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management's judgment is applied in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the level of allowance required. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment loss. The carrying amount of the Bank's loan before allowance for impairment loss as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp3,084,002 and Rp3,789,819, respectively. Further details are shown in (Note 11).

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for the recoverable taxable income for the future from temporary difference. Management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based on timing and level of future taxable profits inline with future tax planning strategies.

Post-Employment Benefit Liability

Post-employment benefit obligation is determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others. The carrying amount of the Bank's estimated liabilities for post-employment benefits as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp24,895 and Rp32,455, respectively. Further details are discussed in (Note 33).

Depreciation of Fixed Assets and Right of Use Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. The net carrying amount of the Bank's fixed assets as of June December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp60.833 and Rp65.323, respectively. Further details are disclosed in (Note 14).

5. KAS

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp75.595 dan Rp35.545 termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Dalam saldo kas, termasuk uang pada mesin ATM pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sejumlah Rp17.454 dan Rp1.967.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo kas seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Tidak ada saldo kas pada pihak berelasi.

6. GIRO PADA BANK INDONESIA

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo giro pada Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp158.888 dan Rp102.188, seluruhnya dalam mata uang rupiah.

Pada tanggal 26 September 2013, BI mengeluarkan peraturan PBI No. 15/7/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing yang kemudian diperbaharui dengan PBI No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 dan terakhir dengan PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 dan perubahannya PBI No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 tanggal 18 April 2017, PBI No. 20/3/PBI/2018 tanggal 05 April 2018 dan PADG No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum bagi Bank Umum konvensional dalam Rupiah dan Valuta Asing, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar rata-rata 6,5% dan secara harian sebesar 3,5% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4% serta GWM Loan to Funding Ratio (LFR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LFR bank dan LFR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) bank dan KPM Insentif. GWM dalam Dollar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2020 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, GWM dalam Rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 3,5%, yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% dan secara rata-rata sebesar 3%.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Bank juga harus memenuhi RIM dan GWM RIM, jika RIM dan GWM RIM Bank kurang dari batas bawah Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 84% atau melebihi batas atas BI yaitu 94% dengan KPM Bank lebih kecil dari KPM insentif BI yang sebesar 14%.

5. CASH

As of December 31, 2021 and 2020 cash balance amounting to Rp75,595 and Rp35,545, respectively, includes cash at ATM.

Cash balance includes cash in ATM as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp17,454 and Rp1,967, respectively.

As of December 31, 2021 and 2020, all cash are denominated in Indonesian Rupiah. No cash in related parties.

6. CURRENT ACCOUNTS IN BANK INDONESIA

As of December 31, 2021 and 2020, the current accounts in Bank Indonesia amounting to Rp158,888 and Rp102,188 respectively, all the current accounts are in Rupiah.

On September 26, 2013, BI issued a regulation No. 15/7/PBI/2013 regarding Statutory Reserve in Rupiah and Foreign Currency for Commercial Banks which was amended with PBI No. 17/21/PBI/2015 dated November 26, 2015, and the latest with PBI No. 18/3/PBI/2016 dated March 10, 2016.

In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 and amended by PBI No. 17/21/PBI/2015 dated November 26, 2015. PBI No. 18/3/PBI/2016 dated March 10, 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 dated August 18, 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 dated April 18, 2017, PBI No. 20/3/PBI/2018 dated April 05, 2018 and PADG No. 20/30/PADG/2018 date November 30, 2018 regarding Minimum Statutory Reserves (GWM) with Commercial Banks in Rupiah and foreign currencies, each bank in Indonesia is required to have a minimum demand deposit balance in Bank Indonesia as liquidity reserve. The GWM in Rupiah consists of Primary GWM which is set at an average of 6.5% and 3.5% on a daily basis and the Secondary GWM which is set at 4% and GWM Loan to Funding Ratio (LFR GWM) which is determined based on parameters under disincentive and over disincentive for the difference between the bank's LFR and target LFR by taking into account the difference between the bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) and CAR incentive. GWM in United States Dollar is set at 8%.

The GWM ratio as of December 31, 2020 is calculated based on the Regulation of Members of the Board of Governors No. 22/10/PADG/2020 dated April 29, 2020 concerning "Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, GWM in Rupiah is set at an average of 3.5%, which must be fulfilled on an daily by 0.5% and an average of 3%.

As of December 31, 2021 Bank maintained RIM and GWM RIM if the RIM and GWM LFR of Bank is less than the Bank Indonesia (BI) lower limit of 84% or exceeds the BI upper limit of 94% with Bank Capital Adequacy Ratio (CAR) is lower than BI CAR incentives of 14%.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

6. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Rasio Intermediasi Makroprudensial	66,26%	153,25%
Rasio GWM Primer	3,65%	3,26%
Rasio GWM PLM	15,73%	6%

Macroprudential Intermediation ratio
Primary reserve ratio
PLM reserve ratio

7. GIRO PADA BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21.525	575
PT Bank Central Asia Tbk	7.918	1.152
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	3.010	647
PT BPD Jawa Tengah	300	173
PT BPD Lampung	25	16
PT Bank CIMB Niaga Tbk	25	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	17	17
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	-
Jumlah	32.831	2.580

7. CURRENT ACCOUNTS IN OTHER BANKS

This account consists of:

	2021	2020
Third parties		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	575	173
PT Bank Central Asia Tbk	1.152	16
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	647	-
PT BPD Jawa Tengah	173	17
PT BPD Lampung	16	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	17
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	17	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-
Total	2.580	2.580

Kisaran suku bunga untuk giro pada bank lain dalam mata uang Rupiah disajikan dalam (Catatan 39).

The average interest rates for current accounts in other banks in Rupiah are disclosed in (Note 39).

Klasifikasi kolektibilitas giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah lancar dan tidak ada giro pada bank lain yang diblokir dan digunakan sebagai jaminan.

All the above current accounts with other banks are classified as current and are not blocked nor used as collateral as of December 31, 2021 and 2020.

Berikut ini adalah saldo giro pada bank lain yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

As of December 31, 2021 and 2020, the current accounts in other banks balances impaired and not impaired are as follows:

	2021	2020
Giro pada bank lain yang tidak mengalami penurunan nilai	32.831	2.580
Jumlah	32.831	2.580

Current accounts with other banks not impaired
Total

Manajemen berpendapat bahwa seluruh giro pada bank lain dapat ditagih sehingga tidak perlu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

No allowance for impairment loss, were provided as management believes that all current accounts in other banks are collectible.

8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Pihak ketiga		
Deposito berjangka	700.000	-
Penempatan pada bank lain - <i>Interbank call money</i>	700.000	-
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia	167.000	305.000
Diskonto	(168)	(76)
Tabungan antar bank - PT Bank Negara Indonesia (Persero)	1	-
Jumlah	1.566.833	304.924

8. PLACEMENTS IN BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

This account consist of:

	2021	2020
Third parties		
Term deposit	-	-
Placement in Other Banks - <i>Interbank call money</i>	-	-
Bank Indonesia Deposit Facility	305.000	305.000
Discounted	(76)	(76)
Interbank savings - PT Bank Negara Indonesia (Persero)	1	-
Total	304.924	304.924

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

Kisaran suku bunga untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dalam mata uang rupiah diungkapkan dalam (Catatan 39).

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, klasifikasi kolektibilitas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah lancar dan tidak ada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang diblokir dan digunakan sebagai jaminan.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih sehingga tidak perlu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

9. EFEK-EFEK

Akun ini terdiri dari obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang dikelompokkan sebagai diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo sebagai berikut:

	2021	2020
Diperdagangkan		
<u>Reksadana</u>		
RD Trimkas 2	20.000	-
	20.000	-
Tersedia untuk dijual		
<u>Reksadana</u>		
RD Trimkas 2	80.370	-
RD Mega Asset Multicash	50.230	-
RD HPAM Ultima Money Market	40.295	-
RD Semesta Dana Kas	10.018	-
	180.913	-
Dimiliki hingga jatuh tempo		
<u>Obligasi pemerintah Republik Indonesia</u>		
FR0062	281.377	281.416
FR0064	214.718	214.678
PBS005	100.506	100.502
FR0058	17.265	17.358
PBS003	3.147	3.145
	617.013	617.099
Jumlah	817.926	617.099

Sisa umur jatuh tempo efek-efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 seluruhnya adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Lebih dari 1 sampai 5 tahun	-	-
Lebih dari 5 tahun	617.013	617.099
	617.013	617.099
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
	617.013	617.099

8. PLACEMENTS IN BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

The average interest rates for placements in Bank Indonesia and other banks in Rupiah are disclosed in (Note 39).

Based on the prevailing Bank Indonesia regulation, all the above placements in Bank Indonesia and other banks are classified as current and are not blocked nor used as collateral as of December 31, 2021 and 2020.

No allowance for impairment loss were provided as management believes that all placements in Bank Indonesia and other banks are collectible.

9. SECURITIES

This account represents government bonds and corporate bonds classified as trading, available for sale and held to maturity as follows:

Be marketed
<u>Mutual funds</u>
RD Trimkas 2
Available for sale
<u>Mutual funds</u>
RD Trimkas 2
RD Mega Asset Multicash
RD HPAM Ultima Money Market
RD Semesta Dana Kas
Held to maturity
<u>Government bonds of Republic</u>
<u>Indonesia</u>
FR0062
FR0064
PBS005
FR0058
PBS003

Total

The remaining maturity of securities as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

More than 1 year until 5 years
More than 5 years

Allowance for impairment losses

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

Jatuh tempo dan tanggal pembayaran bunga dari obligasi adalah sebagai berikut:

	Jatuh Tempo/ Maturity Period	Tanggal Pembayaran Bunga/Interest Payment Date	
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia			Government Bonds of the Republic of Indonesia
FR0062	15 April 2042/ April 15, 2042	15 April dan 15 Oktober/ April 15 and October 15	FR0062
PBS005	15 April 2043/ April 15, 2043	15 April dan 15 Oktober/ April 15 and October 15	PBS005
FR0064	15 Mei 2028/ May 15, 2028	15 Mei dan 15 November/ May 15 and November 15	FR0064
PBS003	15 Januari 2027/ January 15, 2027	15 Januari dan 15 Juli/ January 15 and July 15	PBS003
FR0058	15 Juni 2032/ June 15, 2032	15 Juni dan 15 Desember/ June 15 and December 15	FR0058

Kisaran suku bunga untuk efek-efek diungkapkan dalam (Catatan 39).

The average interest rates for securities are disclosed in (Note 39).

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, klasifikasi kolektibilitas efek-efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah lancar.

Based on the prevailing Bank Indonesia regulation, the collectibility classifications of securities as of December 31, 2021 and 2020 are current.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat efek-efek yang mengalami penurunan nilai.

The management believes that there were no impairment loss on securities.

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DI JUAL KEMBALI

Berikut ini adalah informasi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

19. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL

Here is information on securities purchased under resell agreement as of December 31, 2021 are as follows :

31 Des/ Dec 31, 2021

Counterparty/ Counterparty	Jenis efek / Type of securities	Jumlah nominal / Nominal amount	Tanggal dimulai/ Start date	Jatuh tempo/ Maturity date	Nilai penjualan kembali/ Resale value	Pendapatan bunga yang belum direalisasi / Unrealized interest comer	Nilai tercatat/ Carrying value
Bank Indonesia	VR0047	177.756	27 Des/ Dec 27, 2021	03 Jan/Jan 03, 2022	170.078	116	169.962
Bank Indonesia	FR0070	258.733	28 Des/ Dec 28, 2021	04 Jan/Jan 04, 2022	275.107	187	274.921
Bank Indonesia	VR0042	164.797	29 Des/ Dec 29, 2021	05 Jan/Jan 05, 2022	156.340	106	156.234
Bank Indonesia	VR0062	82.399	29 Des/ Dec 29, 2021	05 Jan/Jan 05, 2022	78.302	53	78.249
Bank Indonesia	VR0046	298.077	30 Des/ Dec 30, 2021	06 Jan/Jan 06, 2022	285.300	194	285.106
Bank Indonesia	VR0035	99.359	30 Des/ Dec 30, 2021	06 Jan/Jan 06, 2022	94.796	65	94.731
Bank Indonesia	VR0077	250.102	31 Des/ Dec 31, 2021	07 Jan/Jan 07, 2022	262.559	179	262.380
Jumlah		1.331.223			1.322.482	900	1.321.583

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

11. KREDIT

Akun ini terdiri dari :

a. Jenis kredit

	2021	2020
<u>Pihak ketiga</u>		
Konsumsi	2.523.893	1.703.447
Modal kerja	488.914	1.140.051
Investasi	71.195	946.321
Jumlah	3.084.002	3.789.819
Cadangan kerugian penurunan Nilai	(374.813)	(821.577)
Jumlah	2.709.189	2.968.242

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Kolektibilitas Bank Indonesia

11. LOANS

This account consist of :

a. Type of loans

Third parties
Consumer
Working capital
Investment
Total
Allowance for impairment losses

Total

b. By Economic Sector and Collectibility of Bank Indonesia

	2021						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Sub- Standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Perdagangan, perhotelan dan restoran	12.433	3.576	1.153	2.649	12.661	32.472	Trading, hotel and Restaurant
Jasa dunia usaha	142.946	1.318	-	-	55.197	199.461	Business services
Industri	40.397	421	-	-	10.514	51.332	Manufacturing
Pembiayaan rumah	11.114	2.876	119	-	697	14.806	Housing loan
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	873	10	-	-	17.360	18.243	Transportation, warehousing and Communication
Konstruksi	9.957	-	-	-	153.798	163.755	Construction
Pertanian, perburuan dan kehutanan	-	11	-	-	-	11	Agriculture, hunting and Forestry
Perikanan	31.800	5	-	-	36.740	68.545	Fisheries
Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	26.291	26.291	Mining and excavation
Lain-lain	2.336.774	55.101	6.026	10.676	100.509	2.509.086	Others
Jumlah	2.586.294	63.318	7.298	13.325	413.767	3.084.002	Sub-total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(41.149)	(30.920)	(3.389)	(5.203)	(294.152)	(374.813)	Allowance for impairment losses
Jumlah	2.545.145	32.398	3.909	8.122	119.615	2.709.189	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

11. KREDIT (lanjutan)

- b. Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Kolektibilitas Bank Indonesia (lanjutan)

2020							
	Lancar/ <i>Current</i>	Dalam Perhatian khusus/ <i>Special Mention</i>	Kurang lancar/ <i>Sub- Standard</i>	Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Macet/ <i>Loss</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Perdagangan, perhotelan dan restoran	28.231	665.527	773	1.067	310.349	1.005.947	Trading, hotel and Restaurant
Jasa dunia usaha	118.145	140.750	-	15.106	82.839	356.840	Business services
Industri	24.011	118.862	19.543	622	48.755	211.793	Manufacturing
Pembiayaan rumah	10.269	911	616	-	297	12.093	Housing loan
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	12.794	19.026	-	5.680	4.217	41.717	Transportation, warehousing and Communication
Konstruksi	24.015	39.312	-	18.704	137.647	219.678	Construction
Pembiayaan kendaraan bermotor	-	103	-	-	267	370	Car loan
Jasa pelayanan sosial	-	154	-	-	126	280	Social services
Pertanian, perburuan dan kehutanan	118	103.912	42	-	40.049	144.121	Agriculture, hunting and forestry
Perikanan	1.521	71.255	323	46	2.705	75.850	Fisheries
Pertambangan dan penggalian	21	2.258	-	-	27.022	29.301	Mining and excavation
Lain-lain	1.473.123	91.668	11.770	18.431	96.837	1.691.829	Others
Jumlah	1.692.248	1.253.738	33.067	59.656	751.110	3.789.819	Sub-total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(54.881)	(93.862)	(19.333)	(34.736)	(618.765)	(821.577)	Allowance for impairment losses
Jumlah	1.637.367	1.159.876	13.734	24.920	132.345	2.968.242	Total

- c. Menurut Jenis Konsumen

	2021		2020		
Individu	2.550.344	83%	3.212.262	85%	Individual
Korporat	533.658	17%	577.557	15%	Corporate
Jumlah	3.084.002	100%	3.789.819	100%	Total
Cadangan kerugian penurunan Nilai	(374.813)		(821.577)		Allowance for impairment Losses
Bersih	2.709.189		2.968.242		Net

- d. Berikut ini adalah saldo kredit pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan klasifikasi kolektibilitas:

- d. The collectibility classification of loans as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	2021			2020			
	Jumlah kredit/ <i>Total loans</i>	Cadangan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment losses</i>	Bersih/ <i>Net</i>	Jumlah kredit/ <i>Total loans</i>	Cadangan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment losses</i>	Bersih/ <i>Net</i>	
Lancar	2.586.293	(41.149)	2.545.144	1.692.248	(54.881)	1.637.367	Current
Dalam perhatian Khusus	63.318	(30.920)	32.398	1.253.738	(93.862)	1.159.876	Special mention
Kurang lancar	7.298	(3.389)	3.909	33.067	(19.333)	13.734	Sub-standard
Diragukan	13.325	(5.204)	8.121	59.656	(34.736)	24.920	Doubtful
Macet	413.768	(294.151)	119.617	751.110	(618.765)	132.345	Loss
Jumlah	3.084.002	(374.813)	2.709.189	3.789.819	(821.577)	2.968.242	Total

11. KREDIT (lanjutan)

- e. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 rincian kredit bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	2021		2020		
	Jumlah kredit/ Total loans	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Jumlah kredit/ Total loans	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
Perdagangan, perhotelan dan restoran	32.473	14.157	1.005.947	283.366	Trading, hotel and restaurant
Jasa dunia usaha	199.462	37.294	356.840	64.854	Business service
Konstruksi	163.756	140.838	219.679	120.429	Construction
Industri	51.331	6.712	211.794	54.018	Manufacturing
Pengangkutan, pergudangan dan Komunikasi	18.241	12.282	41.717	11.425	Transportation, warehousing and Communication
Pembiayaan kendaraan Bermotor	-	-	371	267	car loan
Pembiayaan rumah	14.805	1.809	12.093	1.745	Housing loan
Pertanian, perburuan dan kehutanan	11	-	144.120	33.077	Agriculture, hunting and forestry
Perikanan	68.545	19.444	75.850	23.006	Fisheries
Pertambangan dan Penggalian	26.291	25.984	29.301	26.264	Mining and excavation
Jasa pelayanan sosial	-	-	280	97	Sosial services
Lain-lain	2.509.087	116.293	1.691.827	203.029	Others
Jumlah	3.084.002	374.813	3.789.819	821.577	Total

- f. Jangka Waktu

Jangka waktu kredit diklasifikasikan berdasarkan periode kredit sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh temponya sebagai berikut:

Berdasarkan Periode Perjanjian

	2021	2020	
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	72.919	64.837	1 year or less
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	255.606	283.422	More than 1 year until 2 years
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	463.108	1.003.051	More than 2 years until 5 years
Lebih dari 5 tahun	2.292.369	2.438.509	More than 5 years
Jumlah	3.084.002	3.789.819	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(374.813)	(821.577)	Allowance for impairment losses
Bersih	2.709.189	2.968.242	Net

Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2021	2020	
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	406.942	1.639.839	1 year or less
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	107.611	215.745	More than 1 year until 2 years
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	538.852	439.655	More than 2 years until 5 years
Lebih dari 5 tahun	2.030.597	1.494.580	More than 5 years
Jumlah	3.084.002	3.789.819	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(374.813)	(821.577)	Allowance for impairment losses
Bersih	2.709.189	2.968.242	Net

- g. Kisaran suku bunga untuk kredit yang diberikan diungkapkan dalam (Catatan 39).

11. LOANS (continued)

- e. The details of non-performing loans as of December 31, 2021 and 2020 based on economic sector, are as follows:

- f. By Maturity

Classification of loans by maturity based on the term of the loans as stated in the loan agreements and the remaining period until its maturity is as follows:

By Period of Contract

By Remaining Period to Maturity

- g. The average interest rates for loans are disclosed in (Note 39).

11. KREDIT (lanjutan)

- h. Kredit dijamin dengan deposito berjangka, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank.
- i. Kredit Restrukturisasi

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo kredit yang direstrukturisasi Bank masing-masing adalah Rp67.951 dan Rp1.266.750 dengan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp35.730 dan Rp342.147 pada 31 Desember 2021 dan 2020. Kredit yang direstrukturisasi dilakukan dengan mengubah persyaratan pokok dan bunga serta perpanjangan waktu kredit.

Berikut ini adalah saldo kredit yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan klasifikasi kolektibilitas:

	2021	2020
Lancar	23.204	52.971
Dalam perhatian khusus	5.854	840.171
Kurang lancar	124	484
Diragukan	-	736
Macet	38.769	372.388
Jumlah	67.951	1.266.750
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35.730)	(342.147)
Bersih	32.221	924.603

- j. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Saldo awal	821.577	126.955
Saldo Penyesuaian Implementasi PSAK 71	-	671.423
Saldo awal setelah penyesuaian.	821.577	798.378
Penghapusan nilai selama tahun berjalan	(367.048)	-
Pemulihan nilai selama tahun berjalan	(79.716)	-
Penurunan nilai selama tahun berjalan	-	23.199
Saldo akhir	374.813	821.577

Berikut ini adalah saldo kredit yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021	2020
Kredit yang mengalami penurunan nilai	39.679	736.088
Kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	3.044.323	3.053.731
Jumlah kredit	3.084.002	3.789.819

11. LOANS (continued)

- h. Loans are secured with time deposits, registered mortgages over collateral or power of attorney to sell and by other guarantees generally acceptable to the Bank.
- i. Restructured Loans

As of December 31, 2021 and 2020, the balance of restructured loans amounting to Rp67,951 and Rp1,266,750 respectively, with related allowance for impairment loss of Rp35,730 and Rp342,147 as of December 31, 2021 and 2020, respectively. Restructured loans represent change of principal and interest terms and extension in loans terms.

The collectibility classification of restructured loans as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	2021	2020
Lancar	23.204	52.971
Dalam perhatian khusus	5.854	840.171
Kurang lancar	124	484
Diragukan	-	736
Macet	38.769	372.388
Jumlah	67.951	1.266.750
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35.730)	(342.147)
Bersih	32.221	924.603

- j. Allowance for Impairment Losses

Changes in allowances for impairment losses on loans are as follows:

	2021	2020
Saldo awal	821.577	126.955
Saldo Penyesuaian Implementasi PSAK 71	-	671.423
Saldo awal setelah penyesuaian.	821.577	798.378
Penghapusan nilai selama tahun berjalan	(367.048)	-
Pemulihan nilai selama tahun berjalan	(79.716)	-
Penurunan nilai selama tahun berjalan	-	23.199
Saldo akhir	374.813	821.577

As of December 31, 2021 and 2020, the loans balances impaired and not impaired are as follows:

	2021	2020
Kredit yang mengalami penurunan nilai	39.679	736.088
Kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	3.044.323	3.053.731
Jumlah kredit	3.084.002	3.789.819

11. KREDIT (lanjutan)

11. LOANS (continued)

2021					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah	
Saldo awal setelah penyesuaian implementasi PSAK 71	99.973	48.770	672.834	821.577	Initial balance after adjusting the implementation of SFAS 71
Penghapusan periode berjalan	(72.078)	(34.054)	(260.916)	(367.048)	Write-off during the period
Pemulihan periode berjalan	24.253	5.205	(109.174)	(79.716)	Value recovery during the period
Saldo akhir periode	52.148	19.921	302.744	374.813	Balance at end of the Period
2020					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah	
Saldo awal setelah penyesuaian implementasi PSAK 71	100.371	53.640	644.367	798.378	Initial balance after adjusting the implementation of SFAS 71
Pembentukan (pembalikan) periode berjalan	(398)	(4.870)	28.467	23.199	Establishment (reversal) of the current period
Saldo akhir periode	99.973	48.770	672.834	821.577	Balance at end of the Period

Tingkat Pemenuhan Penurunan Nilai

Compliance of Impairment

	2021	2020
Penurunan nilai sesuai dengan pemenuhan ketentuan Bank Indonesia	222.469	103.450
Tingkat pemenuhan	168,48%	122,19%

Compliance of impairment in accordance with Bank Indonesia regulation

The level of compliance

Peraturan Bank Indonesia terkait penurunan nilai adalah No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009. Sejak 24 Oktober 2012, Bank mengikuti PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Bank Indonesia regulation relate to impairment is No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 on Assets Quality Rating for Commercial Banks as amended by PBI No. 11/2/PBI/2009 dated January 29, 2009. Since October 24, 2012, the Bank followed the PBI No. 14/15/PBI/2012 date October 24, 2012 about Assessment of Commercial Bank Asset Quality.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya kredit.

The management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover impairment loss on uncollectible loans.

- k. Mutasi kredit yang dihapus buku untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 36a), adalah sebagai berikut:

- k. The movement of loans written-off for the period ended December 31, 2021 and 2020 (Note 36a), are as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	647.956	649.252	Beginning balance
Kenaikan (Penurunan)	1.377.514	(1.296)	Increase (Decrease)
Saldo akhir	2.025.470	647.956	Ending balance

- l. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

- l. As of December 31, 2021 and 2020, the Bank was in compliance with Legal Lending Limits (BMPK).

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

11. KREDIT (lanjutan)

- m. Rasio *Non-performing Loan* (NPL) Bank sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rasio NPL secara bruto masing-masing sebesar 14,09% dan 22,27% sedangkan rasio NPL secara neto masing-masing sebesar 4,27% dan 4,51%.
- n. Kredit konsumsi sebagian besar adalah kredit yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara Provinsi Banten yang dipergunakan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor dan kebutuhan konsumtif lainnya.
- o. Kredit modal kerja terdiri dari kredit berjangka, kredit rekening koran, kredit akseptasi dan cerukan yang diberikan kepada debitur untuk keperluan modal kerja.
- p. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk pembelian barang modal.
- q. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat kredit sindikasi yang diberikan oleh Bank.
- r. Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi masing-masing sebesar Rp85 dan Rp 724 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
- s. Kredit yang diberikan kepada karyawan Bank dibebani bunga masing-masing 6% - 7% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dengan jangka waktu pelunasan berkisar antara 1 sampai dengan 15 tahun dan dibayar melalui pemotongan gaji bulanan.
- t. Rasio kredit usaha mikro kecil terhadap jumlah kredit sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 adalah sebesar 1,31% dan 69% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
- u. Jumlah kredit yang dijamin dengan agunan tunai masing-masing sebesar Rp18.385 dan Rp71.600 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
- v. Seluruh saldo kredit dalam mata uang Rupiah.
- w. Jumlah biaya transaksi (provisi) yang menjadi bagian dari kredit adalah Rp Nihil dan Rp Nihil pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

12. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Kredit	10.605	81.494
Efek-efek	6.405	7.009
Penempatan pada bank lain	62	-
Jumlah	17.072	88.503

11. LOANS (continued)

- m. The ratio of *Non-performing Loan* (NPL) in accordance with Bank Indonesia Circular Letter No. 13/30/DPNP dated December 16, 2011. As of December 31, 2021 and 2020, ratio of NPL gross of allowance for impairment losses is 14.09% and 22.27%, respectively, while the ratio of NPL net (net of allowance for impairment losses) is 4.27% and 4.51%, respectively.
- n. Some of consumer loans are the loans that granted to Banten Provincial Civil State Apparatus which are used for the purchase of houses, vehicles and other consumptive needs.
- o. Working capital loans consist of term loans, overdraft loans, acceptances loans and overdrafts granted to borrowers for working capital purposes.
- p. Investment loans is a medium or long-term loans granted to debtor for the purchase of capital assets.
- q. As of December 31, 2021 and 2020, there were no syndicated loans granted by the Bank.
- r. Loans to related parties amounted to Rp85 and Rp724 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.
- s. The Bank charged interest for loans granted to employees for 6% - 7% per annum for year ended December 31, 2021 and 2020 with repayment periods ranging from 1 to 15 years and paid through monthly payroll deductions, respectively.
- t. The ratio of micro business loans to total loans in accordance with Bank Indonesia Circular Letter No. 13/30/DPNP dated December 16, 2011 is 1.31% and 69% on December 31, 2021 and 2020, respectively.
- u. Total loans with cash collateral amounting to Rp18,385 and Rp71,600, respectively, as of December 31, 2021 and 2020.
- v. All loans are denominated in Rupiah.
- w. Total of transaction costs (fees), which became part of the loans is RpNihil and RpNihil as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

12. ACCRUED INTEREST RECEIVABLE

This account consists of:

Loans
 Securities
 placement in another bank
Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

13. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Asuransi:		
Asuransi Jamkrida	715.926	-
Asuransi lainnya	3.466	13.467
Sewa	11.792	38.653
Promosi dan hadiah	959	3.520
Lain-lain	6.771	2.353
Jumlah	738.914	57.993

Asuransi

Pada tanggal 3 Maret 2021 Bank melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dengan surat perjanjian kerjasama No007/DIR/PKS/III/2021 dan No. 028/PKS/DIR-BB/III/21 terkait Penjaminan Kredit Mikro Eks Bank Pundi dengan nilai penjaminan maksimal Rp800.000.000.000 (nilai penuh) dan jangka waktu 1 Desember 2020 sampai dengan 30 November 2030.

Berdasarkan sertifikat penjaminan No.PKP-03-2021 30-0002 tanggal diterbitkan 24 Maret 2021 Bank telah mengikat Penjaminan kredit kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Banten terkait Penjaminan Kredit Mikro Eks Bank Pundi dengan nilai jumlah kredit sebesar Rp771.220.970.581 (nilai penuh) dengan biaya penjaminan sebesar Rp778.933.180.293 (nilai penuh).

Asuransi yang dijamin Bank ke PT Penjaminan Kredit Daerah Banten adalah sebagai berikut:

	2021
Saldo awal pokok asuransi jamkrida:	
Nilai kredit	771.221
Nilai premi	7.712
	778.933
Mutasi:	
Rekening perantara liabilitas segera	(62.429)
Amortisasi asuransi (Catatan 29)	(578)
	(63.007)
Saldo akhir	715.926

Biaya amortisasi asuransi dicatat pada beban umum dan administrasi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp578 (Catatan 29).

13. PREPAID EXPENSES

This account consists of:

	2021	2020
Insurance:		
Jamkrida insurance	-	-
Others insurance	13.467	13.467
Lease	38.653	38.653
Promotions and gifts	3.520	3.520
Others	2.353	2.353
Total	57.993	57.993

On March 3, 2021, the Bank entered into a cooperation agreement with PT Penjaminan Kredit Daerah Banten with a cooperation agreement letter No. 007/DIR/PKS/ III/2021 and No. 028/PKS/DIR-BB/III/21 related to Micro Credit Guarantee for Ex-Pundi Bank with a maximum guarantee value of Rp800,000,000,000 (full amount) and a period of December 1,2020 to November 30, 2030.

Based on the guarantee certificate No.PKP-03-2021 30-0002 issued date March 24, 2021, the Bank has binded a credit guarantee to PT Penjaminan Kredit Regional Banten regarding Micro Credit Guarantee of Ex Pundi Bank with a total credit value of Rp771,220,970,581 (full amount) with a guarantee fee of Rp778,933,180,293 (full amount).

The insurance guaranteed by the Bank to PT Penjaminan Kredit Daerah Banten is as follows:

Jamkrida insurance principal starting balance:	
Credit value	
Premi value	
Mutation :	
Immediate liability brokerage account	
Amortization insurance (Note 29)	
Ending balance	

Insurance amortization expense was recorded in general and administrative expenses as of December 31, 2021 amounting to Rp578 (Note 29).

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA

Rincian aset tetap sebagai berikut:

14. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE OF ASSETS

The detail of fixed assets as follows:

2021						
Perubahan selama periode berjalan/Changes during the period						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Pemilikan langsung						Direct ownership
<u>Biaya perolehan</u>						<u>Cost</u>
Renovasi bangunan yang disewa	157.828	4.154	-	35	162.017	Leasehold Improvement
Kendaraan	2.589	-	3	-	2.586	Vehicles
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor	129.179	3.739	199	-	132.719	Office equipment, machine and furnitures
	289.596	7.893	202	35	297.322	
Aset sewa guna	23.952	28.766	-	1.530	51.188	Right of use of assets
Jumlah	313.548	36.659	202	1.565	348.510	Total
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
Renovasi bangunan yang disewa	127.655	9.900	-	2.660	140.215	Leasehold Improvement
Kendaraan	2.028	554	3	-	2.579	Vehicles
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor	108.877	9.080	199	1.372	119.130	Office equipment, machine and furnitures
	238.560	19.534	202	4.032	261.924	
Aset sewa guna	9.665	17.618	-	1.530	25.753	Right of use of assets
Jumlah	248.225	37.152	202	5.562	287.677	Total
Nilai tercatat	65.323				60.833	Net-carrying value
31 Des/ Dec 31, 2020						
Perubahan selama periode berjalan/Changes during the period						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Pemilikan langsung						Direct ownership
<u>Biaya perolehan</u>						<u>Cost</u>
Renovasi bangunan yang disewa	163.154	7.674	15.715	2.715	157.828	Leasehold Improvement
Kendaraan	2.589	-	-	-	2.589	Vehicles
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor	131.595	9.176	11.592	-	129.179	Office equipment, machine and furnitures
Aset dalam penyelesaian	5.873	2.772	5.930	(2.715)	-	Constructions in progress
	303.211	19.622	33.236	-	289.596	
Aset sewa guna	-	38.734	22.263	7.481	23.952	Right of use of assets
Jumlah	303.211	58.356	55.499	7.481	313.548	Total
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
Renovasi bangunan yang disewa	129.305	14.171	15.821	-	127.655	Leasehold Improvement
Kendaraan	1.616	412	-	-	2.028	Vehicles
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor	106.739	8.229	6.091	-	108.877	Office equipment, machine and furnitures
	237.660	22.812	21.912	-	238.560	
Aset sewa guna	-	22.098	4.952	7.481	9.665	Right of use of assets
Jumlah	237.660	44.910	26.864	7.481	248.225	Total
Nilai tercatat	65.551				65.323	Net-carrying value

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Beban penyusutan yang dibebankan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp37.152 dan Rp44.910 (Catatan 29).

Rincian penjualan aset tetap selama tahun 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

		2021				
		Harga perolehan/ Acquisition cost	Akumulasi penyusutan/ Accumulated Depreciation	Nilai buku/ Net book value	Harga jual - bersih/ Proceeds from sale	Laba penjualan/ Gain on sale
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor		202	202	-	66	66
Jumlah		202	202	-	66	66
		2020				
		Harga perolehan/ Acquisition cost	Akumulasi penyusutan/ Accumulated Depreciation	Nilai buku/ Net book value	Harga jual - bersih/ Proceeds from sale	Laba penjualan/ Gain on sale
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor		11.591	6.091	5.500	5.827	327
Jumlah		11.591	6.091	5.500	5.827	327

Aset tetap (termasuk aset yang disewa), kecuali tanah, diasuransikan pada PT Asuransi Askrida Syariah dengan nilai pertanggungan sebesar Rp80.005 dan Rp77.250 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tersebut.

Aset dalam penyelesaian merupakan renovasi bangunan yang sedang dibangun oleh Bank di beberapa cabang. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian tersebut rata-rata sekitar 100%

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp297.322 dan Rp288.977.

15. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020	
Nilai tercatat	16.848	16.848	Cost
Cadangan kerugian penurunan nilai	(776)	(776)	Allowance for impairment losses
Jumlah	16.072	16.072	Total

Agunan yang diambil alih terdiri dari tanah dan bangunan.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp776.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dapat terealisasinya agunan yang diambil alih tersebut.

14. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE OF ASSETS (continued)

Depreciation charged to profit and loss for year ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp37,152 and Rp 44,910, respectively (Note 29).

The detail of sale on fixed assets in December 31, 2021 and 2020 are as follows:

All fixed assets (include leased assets), except land, are insured with PT Asuransi Askrida Syariah, amounting to Rp80,005 and Rp77,250 as of December 31, 2021 and 2020, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover impairment loss on the assets insured.

Management believes that there is no impairment in value of the aforementioned assets.

Constructions in progress include building renovations being constructed by the Bank at some branches. As of December 31, 2021 and 2020, the percentage of completion of construction in progress is about 100%.

As of December 31, 2021 and 2020, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and are still used amounting to Rp297,322 and Rp288,977, respectively.

15. FORECLOSED ASSETS

This account consists of:

Foreclosed assets consist of land and buildings.

Changes in the allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp776.

Management believes that the allowance for impairment losses of the foreclosed assets is adequate to cover all possible losses that may arise.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

16. ASET LAIN-LAIN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Aset takberwujud	12.689	16.701
Persediaan kantor	2.921	1.604
Biaya yang ditangguhkan:		
CKPN atas hapus buku kredit	325.341	-
BYD restrukturisasi	184.898	207.398
BYD lainnya	411.818	431.818
	922.057	639.216
Lainnya	36.180	-
Jumlah	973.847	657.521

a. Aset takberwujud

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Perangkat lunak:		
Biaya perolehan		
Saldo awal	88.246	86.559
Penambahan	2.030	1.687
Saldo akhir	90.276	88.246
Akumulasi amortisasi		
Saldo awal	(71.578)	(70.344)
Penambahan	(6.992)	(1.234)
Saldo akhir	(78.570)	(71.578)
	11.706	16.668
Hak paten:		
Biaya perolehan		
Saldo awal	114	114
Penambahan	-	-
Saldo akhir	114	114
Akumulasi amortisasi		
Saldo awal	(81)	(78)
Penambahan	(8)	(3)
Saldo akhir	(89)	(81)
	25	33
Perangkat lunak - sedang dalam penyelesaian	959	-
Jumlah nilai tercatat	12.689	16.701

Biaya amortisasi aset takberwujud dicatat pada beban umum dan administrasi pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp7.000 dan Rp1.237 (Catatan 29).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sisa umur dari perangkat lunak berkisar antara 1 sampai dengan 5 tahun dan hak paten berkisar 7 tahun dan dapat diperpanjang.

b. Persediaan kantor

Persediaan kantor merupakan persediaan barang cetakan, persediaan materai perangko dan persediaan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Barang cetak	1.451	1.167
Materai dan perangko	972	354
Lainnya	498	83
	2.921	1.604

16. OTHER ASSETS

This account consists of:

Intangible assets
Office supplies
Deferred charges:
CKPN for write off credit
BYD Restructuring
BYD others
Others
Total

a. Intangible assets

The details of intangible assets are as follows:

Software
Cost
Beginning balance
Addition
Ending balance
Accumulated amortization
Beginning balance
Addition
Ending balance
Patent
Cost
Beginning balance
Addition
Ending balance
Accumulated amortization
Beginning balance
Addition
Ending balance

Software – in progress

Total carrying value

The amortization intangible asset costs recorded in general and administrative expenses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp7,000 and Rp1,237, respectively (Note 29).

As of December 31, 2021, the remaining terms of software ranged from 1 to 5 years and patent ranged 7 years and are renewable.

b. Office supplies

Office supplies represent printed materials, postage stamps and other supplies with the following details:

Printed goods
Stamps and stamps
Others

16. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

c. Biaya yang ditangguhkan

Cadangan kerugian penurunan nilai atas hapus buku kredit

Sebagaimana disampaikan dalam dokumen penyesuaian Rencana Bisnis Bank tahun 2022-2024, manajemen Bank sudah melakukan penyelesaian kredit bermasalah ex-Bank Pundi dan Bank Eksekutif kategori no-hope pada bulan Desember 2021 dengan melakukan penangguhan biaya cadangan kerugian penurunan nilai atas hapus buku kredit sebesar 330.341.117.553 (nilai penuh). Adapun penyelesaian biaya tersebut akan diselesaikan secara bertahap selama 3 tahun mulai tahun 2021-2023.

Pembelian biaya yang ditangguhkan tersebut diamortisasi selama 3 tahun sejak tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	BYD CKPN
2021	5.000
2022	66.000
2023	259.341
	330.341

Biaya amortisasi atas cadangan kerugian penurunan nilai atas hapus buku kredit dicatat pada beban umum dan administrasi pada 31 Desember 2021 sebesar Rp5.000 (Catatan 29).

BYD restrukturisasi dan BYD lainnya

Sebagaimana disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat permohonan relaksasi atas penyelesaian biaya yang ditangguhkan No. 043/DIR-BB/I/21 tanggal 7 Januari 2021 dan No. 004/KOM-DIR/BB/III/21 tanggal 25 Maret 2021 perihal Progress dan Action Plan Penyehatan Bank Banten dan disampaikan kepada pemegang saham PT Banten Global Development melalui surat No. 452/Dir-BB/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.

Pembelian biaya yang ditangguhkan tersebut diamortisasi selama 10 tahun sejak tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	BYD restrukturisasi	Amortisasi	Nilai tercatat
2020	20.000	(20.000)	-
2021	22.500	(22.500)	-
2022	25.000	-	25.000
2023	27.500	-	27.500
2024	30.000	-	30.000
2025	32.500	-	32.500
2026	34.898	-	34.898
2027	35.000	-	35.000
2028	-	-	-
2029	-	-	-
2030	-	-	-
	227.398	(42.500)	184.898

Biaya amortisasi atas BYD restrukturisasi dan BYD lainnya dicatat pada beban umum dan administrasi pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp42.500 dan Rp20.000 (Catatan 29).

16. OTHER ASSETS (continued)

c. Deferred charges

Allowance for impairment losses on write-offs

As submitted in the document for adjustment the Bank's Business Plan for 2022-2024, the Bank's management has completed the settlement of non-performing loans ex-Bank Pundi and Bank Executive for the no-hope category in December 2021 by deferring the allowance for impairment losses on write-off loans amounting to 330,341,117,553. (full amount). The deferred charges will be completed in stages over 3 years starting in 2021-2023.

These deferred charges are to be amortized over 3 years starting in 2021, are as follows:

Amortisasi	Nilai tercatat
(5.000)	-
-	66.000
-	259.341
(5.000)	325.341

The amortization cost of the allowance for impairment losses on write-off credit recorded under general and administrative expenses as of December 31, 2021 amounted to Rp5,000 (Note 29).

Restructuring BYD and other BYD

As submitted to the Financial Services Authority (OJK) through a letter requesting relaxation on the settlement of the deferred fee No. 043/DIR-BB/I/21 dated January 7, 2021 and No. 004/KOM-DIR/BB/III/21 dated March 25, 2021 regarding the Progress and Action Plan for Bank Banten Restructuring and submitted to the shareholders of PT Banten Global Development through letter No. 452/Dir-BB/III/2021 dated March 23, 2021.

These deferred charges are planned to be amortized over 10 years starting in 2020, as follows:

BYD lainnya	Amortisasi	Nilai tercatat
-	-	-
20.000	(20.000)	-
25.000	-	25.000
30.000	-	30.000
35.000	-	35.000
40.000	-	40.000
45.000	-	45.000
50.000	-	50.000
55.000	-	55.000
60.000	-	60.000
71.818	-	71.818
431.818	(20.000)	411.818

The amortization costs of restructuring BYD and others BYD were recorded under general and administrative expenses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp42,500 and Rp20,000, respectively (Note 29).

17. LIABILITAS SEGERA

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Utang bunga	21.097	18.212
Lain-lain	95.167	202.824
Jumlah	116.264	221.036

Interest payable
Others
Total

18. SIMPANAN DARI NASABAH

Akun ini terdiri dari:

17. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

This account consists of:

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

This account consists of:

	31 Des/ Dec 31, 2021			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
Giro	452.303	206.122	658.425	Demand deposits
Tabungan	1.106	524.249	525.355	Savings
Deposito berjangka	13.837	3.441.837	3.455.674	Time deposits
Jumlah	467.246	4.172.208	4.639.454	Total

	31 Des/ Dec 31, 2020			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
Giro	152.877	127.127	280.004	Demand deposits
Tabungan	414	315.531	315.945	Savings
Deposito berjangka	3.814	1.982.444	1.986.258	Time deposits
Jumlah	157.105	2.425.102	2.582.207	Total

a. Giro

Giro yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit Bank adalah sebesar Rp Nihil dan Rp1.045 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo giro seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Kisaran suku bunga untuk giro diungkapkan dalam (Catatan 39).

a. Demand deposits

Demand deposits blocked out and pledged as loan collateral amounting to Rp Nil and Rp1,045 as of December 31, 2021 and 2020. All demands deposits are in Indonesian Rupiah.

The ranges of interest rates for demand deposits are disclosed in (Note 39).

b. Tabungan

Tabungan yang diblokir dan digunakan sebagai jaminan atas kredit sebesar RpNihil dan Rp Nihil pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo tabungan seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Kisaran suku bunga untuk tabungan diungkapkan dalam (Catatan 39).

b. Savings

Savings blocked and pledged as loan collateral amounting to Rp Nil and Rp Nil on December 31, 2021 and 2020. All savings are denominated in Indonesian Rupiah.

The ranges of interest rates for savings deposits are disclosed in (Note 39).

c. Deposito berjangka

Berdasarkan Jangka Waktu Kontrak

c. Time deposits

By Period of Contract

	31 Des/ Dec 31, 2021			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
Kurang dari atau 1 bulan	8.004	1.465.638	1.473.642	1 month or less
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	5.433	714.298	719.731	More than 1 month until 3 months
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	400	661.200	661.600	More than 3 months until 6 months
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	-	600.382	600.382	More than 6 months until 12 months
Lebih dari 12 bulan	-	319	319	More than 12 months
Jumlah	13.837	3.441.837	3.455.674	

18. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

Berdasarkan Jangka Waktu Kontrak (lanjutan)

31 Des/ Dec 31, 2020			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total
Kurang dari atau 1 bulan	351	1.368.043	1.368.394
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	3.003	382.056	385.059
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	400	166.614	167.014
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	60	63.412	63.472
Lebih dari 12 bulan	-	2.319	2.319
	3.814	1.982.444	1.986.258

Berdasarkan Jatuh Tempo

31 Des/ Dec 31, 2021			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total
Kurang dari atau 1 bulan	10.155	1.687.762	1.697.917
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	3.282	778.788	782.070
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	400	382.585	382.985
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	-	592.484	592.484
Lebih dari 12 bulan	-	218	218
	13.837	3.441.837	3.455.674

31 Des/ Dec 31, 2020			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total
Kurang dari atau 1 bulan	1.817	1.577.735	1.579.552
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	1.597	268.298	269.895
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	400	99.534	99.934
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	-	36.775	36.775
Lebih dari 12 bulan	-	102	102
	3.814	1.982.444	1.986.258

Kisaran suku bunga untuk deposito berjangka diungkapkan dalam (Catatan 39).

Deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit Bank adalah sebesar Rp13.645 dan Rp67.515 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo deposito berjangka seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat sertifikat deposito yang di amortisasi pada tahun berjalan.

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

c. Time deposits (continued)

By Period of Contract (continued)

31 Des/ Dec 31, 2020			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total
Kurang dari atau 1 bulan	351	1.368.043	1.368.394
Lebih dari 1 month until 3 months	3.003	382.056	385.059
More than 3 months until 6 months	400	166.614	167.014
More than 6 months until 12 months	60	63.412	63.472
More than 12 months	-	2.319	2.319
	3.814	1.982.444	1.986.258

By Remaining Period to Maturity

31 Des/ Dec 31, 2021			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total
Kurang dari atau 1 bulan	10.155	1.687.762	1.697.917
More than 1 month until 3 months	3.282	778.788	782.070
More than 3 months until 6 months	400	382.585	382.985
More than 6 months until 12 months	-	592.484	592.484
More than 12 months	-	218	218
	13.837	3.441.837	3.455.674

31 Des/ Dec 31, 2020			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total
Kurang dari atau 1 bulan	1.817	1.577.735	1.579.552
More than 1 month until 3 months	1.597	268.298	269.895
More than 3 months until 6 months	400	99.534	99.934
More than 6 months until 12 months	-	36.775	36.775
More than 12 months	-	102	102
	3.814	1.982.444	1.986.258

The ranges of interest rates for time deposits are disclosed in (Note 39).

Time deposits blocked out and pledged as loan collateral amounting to Rp13,645 and Rp67,515 as of December 31, 2021 and 2020, respectively. All time deposits are in Indonesian Rupiah.

As of December 31, 2021 and 2020, there is no deposits certificate that amortized on current year.

19. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Rincian simpanan dari bank lain terdiri atas:

31 Des/ Dec 31, 2021			
Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
Deposito berjangka	5.000	1.642.121	1.647.121
Inter-bank call money	-	27.000	27.000
Giro	5.202	418.951	424.153
Tabungan	-	19.568	19.568
	10.202	2.107.640	2.117.842

31 Des/ Dec 31, 2020			
Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
Deposito berjangka	-	271.435	271.435
Inter-bank call money	-	320.000	320.000
Giro	604	59.253	59.857
Tabungan	-	24.190	24.190
	604	674.878	675.482

Time deposits
Inter-bank call money
Demand deposits
Savings

Time deposits
Inter-bank call money
Demand deposits
Savings

Jangka waktu kontrak simpanan dari bank lain, kecuali deposito berjangka, adalah kurang dari atau satu bulan. Jangka waktu kontrak deposito berjangka dari bank lain adalah sebagai berikut:

Period of contract of deposits from other banks, except time deposits, is a month or less. Period of contract of time deposits from other banks are as follow:

	2021	2020	
Kurang dari atau 1 bulan	696.159	242.435	1 month or less
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	425.707	19.000	More than 1 month until 3 months
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	516.255	10.000	More than 3 months until 6 months
Lebih dari 6 s/d 9 bulan	36.000	-	More than 6 months until 9 months
	1.674.121	271.435	

Kisaran suku bunga untuk simpanan dari bank lain diungkapkan dalam (Catatan 39).

The ranges of interest rates for deposits from other banks are disclosed in (Note 39).

Giro yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit Bank adalah sebesar Rp2.740 dan Rp2.040 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo giro seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Demand deposits blocked out and pledged as loan collateral amounting to Rp2,740 and Rp2,040 as of December 31, 2021 and 2020. All demands deposits are in Indonesian Rupiah.

Deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit Bank adalah sebesar Rp2.000 dan Rp1.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo deposito berjangka seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Time deposits blocked out and pledged as loan collateral amounting to Rp2,000 and Rp1,000 as of December 31, 2021 and 2020, respectively. All time deposits are in Indonesian Rupiah.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

20. LIABILITAS ATAS EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Berikut ini adalah informasi liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

20. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT

Here is information on securities sold under repurchase agreement as of December 31, 2020 are as follows :

2020

Counterparty/ Counterparty	Jenis efek / Type of securities	Jumlah nominal / Nominal amount	Tanggal dimulai/ Start date	Jatuh tempo/ Maturity date	Nilai pembelian kembali/ Repurchase value	Bunga yang belum diamortisasi / Unamortized interest	Harga penjualan/ Selling price
Bank Indonesia	SUN FR62	163.000	14 Ags/ Ags 14, 2020	15 Feb/ Feb15, 2021	138.765	3.068	135.697
	SUN FR0058	15.000	25 Ags/ Ags 25, 2020	23 Feb/ Feb 23, 2021	15.988	348	15.640
	SUN FR0062	115.000	18 Ags/ Ags 18, 2020	18 Mei/ May 18, 2021	98.904	3.229	95.676
	SUN PBS064	110.000	16 Nov/ Nov 16, 2020	20 Mei/ May 20, 2021	105.465	2.322	103.144
	SUN FR005	100.000	14 Nov/ Nov 14, 2020	24 Ags/ Ags 24, 2021	88.973	2.746	86.227
Jumlah		503.000			448.095	11.713	436.384

21. UTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari:

21. TAXES PAYABLE

This account consists of:

	2021	2020	
Pajak penghasilan:			Income tax:
Pasal 4 (2)	2.979	2.450	Article 4 (2)
Pasal 21	1.226	13	Article 21
Pasal 23	142	95	Article 23
Pasal 26	-	19	Article 26
PPN	-	10	PPN
	4.347	2.587	

Besarnya pajak penghasilan terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai "Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" yang berlaku mulai tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak. Ketentuan peralihan dari Undang-Undang tersebut mengatur bahwa perpajakan untuk tahun fiskal 2007 dan sebelumnya dapat ditetapkan oleh DJP paling lambat pada akhir tahun 2013.

The filing of tax returns is based on the Bank's self-assessment of tax liabilities. Based on the Law No. 28 Year 2007 regarding "Third Amendment of Law No. 6 Year 1983 Regarding General Rules and Procedures of Taxation" which are applicable starting 2008, the Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 years from the date the tax becomes due. The transitional provisions of the said Law stipulate that taxers for fiscal year 2007 and before may be assessed by the DGT at the latest at the end of 2013.

22. LIABILITAS LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

22. OTHER LIABILITIES

This account consists of:

	2021	2020	
Liabilitas sewa guna usaha	15.600	8.915	Leases liabilities for business
Asuransi	6.482	1.607	Insurance
Kewajiban transaksi ATM	4.046	1	ATM transaction liabilities
Setoran Jaminan	139	466	Security deposits
Lain-lain	29.395	14.560	Others
	55.662	25.549	

Asuransi adalah pembayaran asuransi dari debitur atas kredit yang diberikan untuk kemudian dibayarkan ke perusahaan asuransi.

Insurance is the payment of the debtor for loans and then paid to the insurance company.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

23. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham dan kepemilikan saham Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

23. SHARE CAPITAL

The details of the Bank's shareholders and their shareholdings as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

2021 (Setelah/After Reverse Stock)					
Jenis saham	Jumlah saham (Jumlah penuh)/ Number of shares (Full amount)	Nilai nominal (Jumlah penuh)/ Nominal amount (Full amount)	Jumlah/ Total	Types of shares	
Saham seri A	1.075.511.715	1.000	1.075.512	Series A shares	
Saham seri B	5.335.431.323	180	960.378	Series B shares	
Saham seri C:				Series C shares:	
Hasil PUT VI	37.431.400.914	50	1.871.570	VI PUT Result	
Hasil PUT VII	8.028.094.314	50	401.404	VII PUT Result	
Sub – jumlah	51.870.438.266		4.308.864	Sub – total	

2021 (Setelah/After Reverse Stock)					
Nama pemegang saham	Jumlah saham (Jumlah penuh)/ Number of shares (Full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Total	Name of shareholder	
PT Banten Global Development	34.289.755.661	66,11%	2.139.556	PT Banten Global Development	
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	17.580.682.605	33,89%	2.169.308	Public (each below 5%)	
	51.870.438.266	100%	4.308.864		

2020 (Setelah/After Reverse Stock)					
Jenis saham	Jumlah saham (Jumlah penuh)/ Number of shares (Full amount)	Nilai nominal (Jumlah penuh)/ Nominal amount (Full amount)	Jumlah/ Total	Types of shares	
Saham seri A	1.075.511.715	1.000	1.075.512	Series A shares	
Saham seri B	5.335.431.323	180	960.377	Series B shares	
Sub – jumlah	6.410.943.038		2.035.889	Sub – total	

Pada tanggal 30 Desember 2020, terdapat tambahan modal saham seri C atas penawaran umum terbatas VI sesuai pengumuman bursa, dengan rincian sebagai berikut:

On December 30, 2020, there was an additional series C share capital for the limited public offering VI according to the stock exchange announcement, with details as follows:

Nomor Surat	Lembar saham/ Shares Stock	Harga saham /Stock Price	Nominal/Nominal	Reference number
No.Peng-P-00343/BEI.PP1/12-2020	1.133.823.021	50	56.691	No.Peng-P-00343/BEI.PP1/12-2020
No.Peng-P-00346/BEI.PP1/12-2020	1.025.019.453	50	51.251	No.Peng-P-00346/BEI.PP1/12-2020
No.Peng-P-00350/BEI.PP1/12-2020	590.568.825	50	29.529	No.Peng-P-00350/BEI.PP1/12-2020
Sub – jumlah	2.749.411.299		137.471	Sub – total
Jumlah	9.160.354.337		2.173.360	Total

2020 Setelah/After Reverse Stock					
Nama pemegang saham	Jumlah saham (Jumlah penuh)/ Number of shares (Full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Total	Name of shareholder	
PT Banten Global Development	3.269.755.661	35,69%	588.556	PT Banten Global Development	
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	5.890.598.676	64,31%	1.584.804	Public (each below 5%)	
	9.160.354.337	100%	2.173.360		

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 10 tanggal 21 Juli 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta para pemegang saham Bank telah menyetujui penawaran umum terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya 35.416.600.785 saham biasa seri B. Setiap pemegang saham yang memiliki 1.000 saham biasa seri A berhak membeli 3.293 saham biasa seri B dengan harga penawaran sebesar Rp18,35 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 29 Juli 2016, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-384/D.04-16.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 35 tanggal 31 Oktober 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta para pemegang saham Bank telah menyetujui penawaran umum terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 saham biasa seri B. Pada tanggal 24 Nopember 2016, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No.S-694/D-04/2016.

Berdasarkan hasil pelaksanaan penawaran umum terbatas IV dan V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Bank telah menambah 53.354.313.204 lembar saham dengan nilai nominal Rp18 (jumlah penuh) yang berasal dari penawaran umum terbatas IV sebanyak 35.416.600.785 lembar dan penawaran umum terbatas V sebanyak 17.937.712.419 lembar dan dengan demikian jumlah seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Bank meningkat menjadi 64.109.430.357 lembar saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 06 tanggal 11 Februari 2021 dari Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, para pemegang saham Bank telah menyetujui penawaran umum terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Bank telah menambah 37.431.400.914 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 (jumlah penuh), dengan demikian seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Bank meningkat menjadi 43.842.343.952 jumlah lembar saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 07 tanggal 6 Desember 2021 dari Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, para pemegang saham Bank telah menyetujui penawaran umum terbatas VII dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Bank telah menambah 8.028.094.314 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 (jumlah penuh), dengan demikian seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Bank meningkat menjadi 51.870.438.266 jumlah lembar saham.

23. SHARE CAPITAL(continued)

Based on the Extraordinary Shareholders' Meeting, as documented in Notarial Deed No. 10, dated July 21, 2016 of Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, the Bank's shareholders approved the limited public offering IV in issuance of rights for existing shareholders at a maximum of 35,416,600,785 series B common shares. The shareholder can exercise the rights to purchase 3,293 series B common shares for every 1,000 series A common shares held at Rp18.35 (full amount) per share. On July 29, 2016, the Bank obtained the notice of effectivity from the Financial Services Authority in Letter No. S-384/D.04-16.

Based on the Extraordinary Shareholders' Meeting, as documented in Notarial Deed No. 35, dated October 31, 2016 of Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, the Bank's shareholders approved the limited public offering V in issuance of rights for existing shareholders at a maximum of 17,937,712,419 series B common shares. On November 24, 2016, the Bank obtained the notice of effectivity from the Financial Services Authority in Letter No.S-694/D-04/2016.

Based on the results of limited public offering IV and V with pre-emptive rights to the Bank's shareholders, the Bank has added 53,354,313,204 shares with nominal value Rp18 (full amount) derived from limited public offering IV for 35,416,600,785 shares and limited public offering V for 17,937,712,419 and thus the Bank's total shares issued and fully paid increased to become 64,109,430,357 shares.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) as stated in the Deed No. 06 dated 11 February 2021 from Syarifudin, SH, Notary in Tangerang City, the Bank's shareholders have approved a limited public offering VI with Pre-emptive Rights (HMETD), the Bank has added 37,431,400,914 shares with a nominal value of Rp50 (full amount), thus all issued and fully paid shares of the Bank increased to 43,842,343,952 total shares.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) as stated in the Deed No. 07 December 6, 2021 from Syarifudin, SH, Notary in Tangerang City, the Bank's shareholders have approved a limited public offering VII with Pre-emptive Rights (HMETD), the Bank has added 8,028,094,314 shares with a nominal value of Rp50 (full amount), thus the total number of issued and fully paid shares of the Bank increased to 51,870,438,266 total shares.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Berdasarkan Surat dari Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) No. SR-288/PB.31/2020 pada tanggal 26 November 2020, Bank mendapat persetujuan untuk mencatat dana hasil RKUD milik pemerintah provinsi Banten sebesar Rp1.551.000 sebagai dana tambahan modal disetor. Pada tanggal 31 Desember 2021 dana tambahan modal tersebut telah direklasifikasi pada modal saham.

Akun ini merupakan agio saham sehubungan dengan penawaran umum pada tahun 2001, 2012 dan 2016 setelah dikurangi biaya emisi saham dengan perincian sebagai berikut:

	2021	2020
Perbedaan antara harga penawaran saham dengan nilai nominal per saham		
Tahun 2001	11.100	11.100
Tahun 2012	29.932	29.932
Tahun 2016	18.674	18.674
Tahun 2021	216.759	-
Biaya emisi saham		
Tahun 2001	(3.434)	(3.434)
Tahun 2010	(7.111)	(7.111)
Tahun 2011	(3.557)	(3.557)
Tahun 2012	(2.905)	(2.905)
Tahun 2016	(10.203)	(10.203)
Tahun 2020	(4.213)	-
Tahun 2021	(3.567)	-
	241.475	32.496

24. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Based on the Letter from the Financial Services Authorization (OJK) No. SR-288/PB.31/2020 on November 26, 2020. The bank received approval to record the proceeds from the RKUD owned by the Banten provincial government amounting to Rp1,551,000 as additional paid-in capital funds. As of December 31, 2021, the additional capital funds have been reclassified to share capital.

This account represents additional paid-in capital in connection with public offering in 2001, 2012 and 2016 after deducting share issuance costs as follows:

Difference between the offering price with par value per share
Year 2001
Year 2012
Year 2016
Year 2021
Share issuance costs
Year 2001
Year 2010
Year 2011
Year 2012
Year 2016
Year 2020
Year 2021

25. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Kredit	229.840	323.454
Efek-efek	40.278	46.043
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	22.490	2.262
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	1.104	450
Lainnya	16.560	-
	310.272	372.209

25. INTEREST INCOME

This account consists of:

Loans
Securities
Placement with Bank Indonesia and other banks
Current accounts with Bank Indonesia and other banks
Others

Pendapatan bunga dari efek-efek berasal dari obligasi pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia.

Interest income from securities comes from government bonds, Certificate of Bank Indonesia and Deposits Certificates of Bank Indonesia.

26. BEBAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Simpanan dari nasabah		
Deposito berjangka	128.730	190.296
Tabungan	5.762	8.820
Giro	20.173	58.912
Simpanan dari bank lain	74.854	51.020
Premi penjaminan pemerintah (Catatan 40b)	9.911	4.449
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	11.974	24.968
	251.404	338.465

26. INTEREST EXPENSE

This account consists of:

Deposits from customers
Time deposits
Saving
Demand deposits
Deposits from other banks
Government guarantee premium (Note 40b)
Securities sold under repurchase agreement

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

27. PENDAPATAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Administrasi kredit	16.066	8.869
Denda dan pinalti	755	898
Lain-lain	12.476	12.194
	29.297	21.961

27. ADMINISTRATIVE INCOME

This account consists of:

Loan administration
Late payment and penalties
Others

28. KERUGIAN PENURUNAN NILAI

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
<u>Aset keuangan</u>		
Penyisihan (Pemulihan) kerugian penurunan nilai kredit (Catatan 11j)	(79.761)	23.199
Penyisihan (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan	(79.761)	23.199

28. IMPAIRMENT LOSSES

This account consists of:

Financial assets
Provision (Recovery) for impairment losses
Loans (Note 11j)
Provision (Recovery) of impairment losses on financial assets

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Amortisasi biaya yang ditangguhkan (Catatan 16)	47.500	20.000
Komunikasi	40.696	8.168
Penyusutan (Catatan 14)	37.152	44.910
Jasa tenaga kerja	24.366	23.766
Sewa	22.947	15.845
Honorarium tenaga ahli	20.104	13.981
Penagihan kredit	13.145	9.978
Iklan, promosi dan pemasaran	8.386	4.173
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 16)	7.000	1.237
Transportasi dan perjalanan dinas	5.293	4.959
Perlengkapan kantor	4.267	2.571
Listrik, air dan gas	3.613	3.712
Iuran dan administrasi	1.954	6.848
Perbaikan dan pemeliharaan	1.488	2.797
Amortisasi asuransi kredit (catatan 13)	578	-
Pajak dan perizinan	476	412
Lain-lain	11.675	12.278
	250.640	175.635

29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

Amortization of deferred costs (Note 16)
Telecommunication
Depreciation (Note 14)
Outsourcing
Operating lease
Professional fees
Loan collection
Advertising, promotion and marketing
Amortization of intangible assets (Note 16)
Transportation and traveling
Office supplies
Electricity, water and gas
Administration and Contribution
Repair and maintenance
Amortization credit insurance (Note 13)
Taxes and licenses
Others

30. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Gaji dan upah	92.077	90.586
Kesejahteraan karyawan	35.849	18.596
Pelatihan	3.689	3.383
Imbalan pasca kerja (Catatan 33)	(6.860)	4.096
Biaya tenaga kerja lainnya	7.730	2.344
	132.485	119.005

30. PERSONAL EXPENSES

This account consists of:

Salaries and wages
Social security cost
Training
Post-employment benefit (Note 33)
Other labor cost

Perincian gaji dan tunjangan atas dewan komisaris, direksi dan komite audit adalah sebagai berikut:

The details of salaries and allowances of commissioners, directors and audit committee are as follows:

	2021				
	Jumlah/ Total	Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowance	Jumlah/ Total	
Dewan komisaris	3	1.929	336	2.265	Board of commissioners
Direksi	4	4.221	1.563	5.784	Directors
Komite audit	2	252	25	277	Audit committee
	9	6.402	1.924	8.326	

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

30. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN (lanjutan)

	2020			
	Jumlah/ Total	Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowance	Jumlah/ Total
Dewan komisaris	2	1.425	539	1.964
Direksi	3	3.432	1.385	4.817
Komite audit	2	271	33	304
	7	5.128	1.957	7.085

Bank belum dapat merealisasi kewajiban pendanaan pendidikan dan pelatihan sebesar 5% dari biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya dikarenakan Bank menyesuaikan anggaran pendidikan dengan situasi dan kondisi Bank secara keseluruhan.

30. PERSONAL EXPENSES (continued)

The Bank has not been able to realize the obligation for education and training expense by 5% of prior year's human resources expense since the Bank adjusted the education budget based on the overall current situation and condition of the Bank.

Board of commissioners
Directors
Audit committee

31. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Denda	(267)	(1.829)
Laba penjualan aset tetap – bersih (Catatan 14)	66	327
Lain-lain	344	3.864
	143	2.362

31. NON-OPERATING INCOME (EXPENSE) – NET

This account consists of:

Penalties
Gain on sale of fixed assets – net
(Note 14)
Others

32. PAJAK PENGHASILAN

Akun ini terdiri dari:

- Bank mengalami rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
- Pajak kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi	(204.268)	(260.720)
Perbedaan temporer:		
Penyusutan aset tetap	1.429	6.898
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	12.988
Amortisasi perangkat lunak	2.290	-
Cadangan imbalan pasti pasca kerja – bersih	(6.860)	4.096
Bersih	(3.141)	23.982
Perbedaan tetap:		
Beban yang tidak boleh dikurangkan-bersih	4.149	5.771
Bersih	4.149	5.771
Rugi fiskal periode berjalan	(203.260)	(230.967)
Ditambah akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya	(1.090.765)	(1.330.372)
Rugi fiskal yang tidak dapat diperhitungkan lagi	476.974	470.574
Akumulasi rugi fiskal akhir periode	(817.051)	(1.090.765)

32. INCOME TAX

This account consists of:

- The Bank is in tax loss position for the year ended December 31, 2021 and 2020.
- Current tax

A reconciliation between loss before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and tax loss is as follows:

Loss before tax per statements of profit or loss
Temporary differences:
Depreciation of fixed assets
Allowance for impairment losses
Software amortization
Provision for defined post employment benefits-net
Net
Permanent differences:
Non deductible expenses-
Net
Net
Fiscal loss for the period
Add accumulated fiscal loss from previous year
Less expired fiscal loss
Accumulated tax losses at the end of period

32. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

b. Pajak kini (lanjutan)

Menurut peraturan perpajakan, rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak terjadinya kerugian fiskal. Akumulasi rugi fiskal sebesar Rp817.051 dan Rp1.090.765 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

	Dikreditkan (dibebankan)/ Credited (charged) to				
	31 Desember/ December 31, 2020	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2021	
Rugi fiskal	239.968	(60.217)	-	179.751	Fiscal loss
Akumulasi penyusutan aset tetap	3.646	314	-	3.960	Accumulated depreciation of fixed asset
Amortisasi perangkat lunak	-	504	-	504	Provision of impairment losses
Penyisihan kerugian penurunan nilai	170.536	-	-	170.536	Provision of impairment losses
Keuntungan efek-efek yang belum direalisasi	-	-	(201)	(201)	Unrealized gain on available for sale securities
Liabilitas imbalan pasca- kerja	7.141	(1.509)	(154)	5.478	Post-employment benefit liability
Jumlah	421.291	(60.908)	(355)	360.028	Total

	Dikreditkan (dibebankan)/ Credited (charged) to						
	31 Desember/ December 31, 2019	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK 71/Adjustment in relation to implementation of SFAS 71	Penyesuaian terkait penurunan tarif pajak/Adjustment related to lower tax rates	31 Desember/ December 31, 2020	
Rugi fiskal	332.593	(52.714)	-	-	(39.911)	239.968	Fiscal loss
Akumulasi penyusutan aset tetap	2.418	1.518	-	-	(290)	3.646	Accumulated depreciation of fixed asset
Penyisihan kerugian penurunan nilai	22.689	2.857	-	147.713	(2.723)	170.536	Provision of impairment losses
Liabilitas imbalan pasca-kerja	6.831	901	229	-	(820)	7.141	Post-employment benefit liability
Jumlah	364.531	(47.438)	229	147.713	(43.744)	421.291	Total

c. Pajak Tangguhan

Manajemen berpendapat bahwa terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

d. Rekonsiliasi antara manfaat pajak dan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak Bank dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Rugi sebelum pajak penghasilan	(204.268)	(260.720)
Manfaat pajak berdasarkan tarif pajak yang berlaku	(44.939)	(57.358)
Pengaruh pajak:		
Perbedaan tetap	913	1.270
Pajak tangguhan yang tidak dapat diakui	104.934	103.526
Beban (manfaat) pajak penghasilan	60.908	47.438

32. INCOME TAX (continued)

b. Current tax (continued)

In accordance with Indonesia tax regulations, tax loss can be offset against the taxable income immediately within a period of five years after the tax loss had incurred. The tax loss amounting to Rp817,051. and Rp1,090,765 for the year ended December 31, 2021 and 2020, respectively.

c. Deferred Tax

Management believes that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences, which results in deferred tax assets, can be utilized.

d. A reconciliation between the total tax benefit and the amounts computed by applying the effective tax rates to loss before tax is as follow:

Loss before income tax	
Income tax benefit based on prevailing tax rates	
Tax effects of:	
Permanent differences	
Recognized deferred taxes	
Expenses (income) tax benefit	

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

32. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

- d. Rekonsiliasi antara manfaat pajak dan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak Bank dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Pada tanggal 18 Mei 2020, pemerintah menerbitkan UU No.2 tahun 2020, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia (Perppu) No.1 tahun 2020 menjadi Undang - Undang yang antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022. Perseroan telah membukukan pengaruh dari perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, berupa penambahan aset pajak tangguhan sebesar Rp9.121 dimana jumlah sebesar Rp47.347 dibebankan ke laba rugi periode berjalan dan sebesar Rp 229 dibebankan ke penghasilan komprehensif lainnya.

Rugi kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

33. LIABILITAS IMBALAN PASCA – KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2021 Bank menghitung dan mencatat imbalan pasca-kerja tanpa pendanaan khusus untuk karyawan yang berhak menurut Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 berdasarkan perhitungan aktuaria independen.

Pada tanggal 31 Desember 2020 Bank menghitung dan mencatat imbalan pasca-kerja tanpa pendanaan khusus untuk karyawan yang berhak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 berdasarkan perhitungan aktuaria independen. Berikut ini laporan aktuaria independen yaitu:

No./ No.	Periode/ Period	Aktuaria Independen/ Independent Actuaries	Tanggal Laporan/ Date of Report
1.	31 Desember/December 31, 2021	KKA Azwir Arifin & Rekan	10 Januari/January 10, 2022
2.	31 Desember/December 31, 2020	KKA Azwir Arifin & Rekan	11 Januari/January 11, 2021
3.	31 Desember/December 31, 2019	PT Quattro Asia Consulting	31 Januari/January 31, 2020
4.	31 Desember/December 31, 2018	PT Quattro Asia Consulting	18 Januari/January 18, 2019

Rincian liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	24.895	32.455	Present value of defined benefit obligation
Liabilitas imbalan pasca-kerja	24.895	32.455	Post-employment benefit liabilities

Beban imbalan pasca-kerja yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Laba rugi			Profit loss
Beban jasa kini	4.379	3.995	Current service cost
Beban jasa lalu	(8.789)	200	past service expense
Dampak kurtailmen	(4.833)	(2.325)	Curtailment effect
Beban bunga	2.383	2.226	Interest cost
	(6.860)	4.096	
Penghasilan komprehensif lainnya			Other comprehensive income
Kerugian aktuarial	(701)	1.041	Actuarial loss
	(701)	1.041	

32. INCOME TAX (continued)

- d. A reconciliation between the total tax benefit and the amounts computed by applying the effective tax rates to loss before tax is as follow: (continued)

On 18 May 2020, the government issued Law No.2 of 2020, which stipulates the Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia (Perppu) No.1 of 2020 into Law which, among other things, reduces the corporate income tax rate from the previous 25%. to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and to 20% since fiscal year 2022. The Company has recorded the effect of this change in corporate income tax rate in the financial statements for the year ended December 31, 2020, in the form of a increase in deferred tax assets amounting to Rp9,121 where the amount of Rp47,347 was charged to current period profit or loss and Rp 229 was charged to other comprehensive income.

Corporate loss tax for the year ended December 31,2020 are the basis for preparing annual tax return (SPT).

33. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

As of December 31, 2021 The Bank calculated and recorded unfunded defined post-employment benefits to its qualified employees in accordance with Copy Right Law No. 11 Year 2020 based on actuarial calculations independent actuaries.

As of December 31, 2020 The Bank calculated and recorded unfunded defined post-employment benefits to its qualified employees in accordance with Labor Law No. 13 Year 2003 based on actuarial calculations independent actuaries. The following independent actuarial report is:

The detail of defined post-employment benefit obligation is as follows:

The post-employment benefits expense recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

33. LIABILITAS IMBALAN PASCA – KERJA (lanjutan)

Rekonsiliasi nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Nilai kini liabilitas awal tahun	32.455	27.318
Beban jasa kini	4.379	3.995
Beban jasa lalu	(8.789)	200
Beban bunga	2.383	2.226
Dampak kurtailmen	(4.833)	(2.325)
	(6.860)	4.096
Kerugian aktuarial	(700)	1.041
Imbalan kerja yang dibayar perusahaan	-	-
Nilai kini liabilitas imbalan pasti akhir Tahun	24.895	32.455

33. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

Reconciliation of present value of defined benefit liabilities as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

Actual present value of liability at beginning of year
Current service cost
past service expense
Interest cost
Curtailment effect

Actuarial loss
Employment benefit paid by company
Ending balance of present value of defined benefit liabilities

Jumlah nilai kini imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 4 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Present value of defined benefit liability for the year ended December 31, 2021 and for the 4 previous years are as follows:

	2021	2020	2019	2018	2017
Nilai kini liabilitas	24.895	32.455	27.318	24.876	24.381

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung imbalan pasti pasca-kerja adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in the valuation of the defined post-employment benefits are as follows:

	2021	2020	
Umur pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal pensiun
Tingkat kenaikan gaji	1,50% per tahun/annum	1,50% per tahun/annum	Salary increase
Tingkat bunga diskonto	7,53% per tahun/annum	7,34% per tahun/annum	Discount rate
Tingkat pengunduran diri	≤ 44 = 1.20%	≤ 44 = 1.20%	Withdrawal/Resignation rate
	Tingkat pengunduran diri khusus untuk karyawan account officer diasumsikan sebesar 20% pertahun	Tingkat pengunduran diri khusus untuk karyawan account officer diasumsikan sebesar 20% pertahun	
	Withdrawal/Resignation rate for account officer staff assumed up to 20% per annum	Withdrawal/Resignation rate for account officer staff assumed up to 20% per annum	
Tingkat mortalita	<u>TMI IV 2019</u>	<u>TMI IV</u>	Mortality rate

34. RUGI PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Perhitungan rugi per saham dasar dan dilusian adalah sebagai berikut:

	2021	2020
	Setelah/After Reverse Stock	Sebelum/Before Reverse Stock
Rugi bersih untuk perhitungan rugi per saham dasar dan dilusian	(265.176)	(308.158)
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan rugi per saham dasar dan dilusian	51.870.438.266	9.160.354.337
Rugi per saham dasar dan dilusian (nilai penuh)	(5,11)	(33,64)

34. BASIC LOSS PER SHARE AND DILUTED

The calculation of basic loss per share and diluted are as follows:

Net loss for computation of basic and diluted loss per share
Weighted average number of ordinary shares for computation of basic and diluted loss per share
Basic loss per share and diluted (full amount)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

35. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, pihak-pihak berelasi adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.

Sifat Hubungan Pihak-pihak Berelasi

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi dan transaksinya adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat Hubungan/ <i>Nature of Relationship</i>
Pemerintah Provinsi Banten	Pemegang Saham pengendali Terakhir/ <i>ultimate shareholder</i>
PT. Banten Global Development	Pemegang Saham / <i>Shareholder</i>
PT Jamkrida Banten	Perusahaan afiliasi/ <i>Affiliated company</i>
Direksi, Komisaris dan pejabat eksekutif/ <i>Directors, Commissioners and executive officers</i>	Pengurus / <i>Management</i>

Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2021		2020		
	Jumlah/ <i>Total</i>	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas/ <i>Percentage to Total Liabilities (%)</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas/ <i>Percentage to Total Liabilities (%)</i>	
Liabilitas					Liabilities
Simpanan dari nasabah (Catatan 18)	467.246	6,71%	152.877	3,85%	Deposits from customers (Note 18)
Simpanan dari bank lain (Catatan 19)	10.202	0,15%	604	0,02%	Deposits from other bank (Note 19)
Jumlah	477.448	6,86%	153.481	3,87%	Total
	2021		2020		
	Jumlah/ <i>Total</i>	Persentase Terhadap Jumlah Beban Bunga/ <i>Percentage to Total Interest Expense (%)</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Persentase Terhadap Jumlah Beban Bunga/ <i>Percentage to Total Interest Expense (%)</i>	
Beban bunga	15.561	0,22%	41.183	12,17%	Interest expense

35. RELATED PARTIES TRANSACTION

Based on Bank Indonesia Regulation No. 7/3/PBI/2005 dated January 20, 2005, as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/13/PBI/2006 dated October 5, 2006 concerning the Legal Lending Limit for Commercial Banks, related parties are individuals and companies who have controlling relationship with the Bank, either direct or indirect, through ownership, management and finance.

Nature of Related Parties Relationship

The nature of relationship with related parties and transactions are as follows:

Transaksi/Transaction
- Giro (Catatan 19)/ Demand deposit (Note 19)
- Deposito berjangka (Catatan 19)/ Time deposit (Note 19)
- Deposito berjangka (Catatan 19)/ Time deposit (Note 19)
- Giro (Catatan 18) / Demand deposit (Note 18)
-Tabungan (Catatan 18) / Savings (Note 18)
-Deposito berjangka (Catatan 18) / Time deposit (Note 18)
-Modal saham (Catatan 23) / Share capital (Note 23)

Transactions with Related Parties

Significant transaction and balances with related parties are as follows:

35. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Penempatan dana dari pihak berelasi dalam bentuk simpanan (Catatan 18)

Giro

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, persentase rekening giro pihak berelasi dari jumlah rekening giro masing-masing sebesar 42,26% dan 45,16%. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tingkat bunga yang diberikan adalah berkisar antara 0% - 4,5%.

Tabungan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, persentase tabungan pihak berelasi dari jumlah tabungan masing-masing sebesar 0,21% dan 0,13%. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tingkat bunga yang diberikan adalah masing-masing sebesar 1% - 5% dan 1% - 5%.

Deposito Berjangka

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, persentase deposito berjangka pihak berelasi dari jumlah deposito berjangka masing-masing sebesar 0,37% dan 0,19%. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tingkat bunga yang diberikan berkisar antara 2,75% - 6% dan 3,5% - 10%.

Pihak berelasi perseorangan yang memiliki saldo simpanan diatas Rp1.000 dan pihak berelasi entitas yang memiliki simpanan diatas 0,5% modal disetor adalah sebagai berikut:

Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

	2021	2020
<u>Deposito Berjangka</u>		
PT Jamkrida Banten	7.403	3.387
PT Banten Global Development	6.000	-
PD BPR Serang	5.000	-
Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif Bank	433	427
<u>Tabungan</u>		
Direksi, Komisaris dan pejabat eksekutif Bank	1.105	414
<u>Giro</u>		
RKUD Provinsi Banten	436.348	152.622
PT Jamkrida Banten	15.499	174
PD BPR Serang	5.202	604
PT Banten Global Development	449	73
PT Banten Global Pariwara	5	6
PT Banten Mandiri Express	1	1

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada kompensasi yang diberikan kepada masing-masing anggota atau kelompok Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Utama yang juga sebagai karyawan, dan manajemen kunci lainnya.

35. RELATED PARTIES TRANSACTION (continued)

Transactions with Related Parties (continued)

Placement of funds from related parties in the form of deposits (Note 18)

Demand Deposits

On December 31, 2021 and 2020, the percentage of demand deposits from related parties to the total demand deposits is 42.26% and 45.16%, respectively. As of December 31, 2021 and 2020, interest rates are in the range of 0% - 4.5%.

Savings

On December 31, 2021 and 2020, the percentage saving from related parties to the total saving is 0.21% and 0.13% respectively. As of December 31, 2021 and 2020, interest rates are and 1% - 5% and 1% - 5% respectively.

Time Deposits

On December 31, 2021 and 2020, the percentage saving from related parties to the total saving is 0.37% and 0.19%, respectively. As of December 31, 2021 and 2022, interest rates are in the range 2.75% - 6% and 3.5% - 10%, respectively.

Individual related parties with deposit more than Rp1,000 and entities related parties with outstanding deposits more than 0.5% fully paid shares are as follows:

Transactions with Related Parties

<u>Time Deposits</u>
PT Jamkrida Banten
PT Banten Global Development
PD BPR Serang
The Bank's Directors, Commissioners and Executive Officers
<u>Savings</u>
The Bank's Directors, Commissioners and executive officers
<u>Demand Deposits</u>
RKUD Provinsi Banten
PT Jamkrida Banten
PD BPR Serang
PT Banten Global Development
PT Banten Global Pariwara
PT Banten Mandiri Express

As of December 31, 2021 and 2020, there is no compensations given to each members or Board of Directors, Board of Commissioners, Major Shareholders, who are also as employees and other key management.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

36. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

- a. Bank memiliki transaksi komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
KOMITMEN		
Tagihan komitmen	1.719	1.719
Jumlah	1.719	1.719
Liabilitas komitmen		
Komitmen kredit yang belum ditarik	-	-
Lainnya	(80)	(80)
Jumlah	(80)	(80)
Jumlah tagihan (liabilitas) komitmen – bersih	1.639	1.639

	2021	2020
KONTINJENSI		
Tagihan kontinjensi		
Kredit yang hapus buku (Catatan 11k)	2.025.470	647.956
Penghasilan bunga dalam penyelesaian	827.007	796.039
Lainnya	11.562	11.562
Jumlah	2.864.039	1.455.557
Liabilitas kontinjensi		
Bank garansi	(64.305)	(110.043)
Jumlah tagihan kontinjensi – Bersih	2.799.734	1.345.514

Pada 31 Desember 2021 dan 2020, Bank tidak memiliki saldo transaksi komitmen dan kontinjensi dengan pihak berelasi.

- b. Komitmen sewa.

Bank memiliki beberapa komitmen sewa operasi untuk kantor-kantor cabang dengan PT Dakara Makmur. Jangka waktu penyewaan berkisar antara 1 – 15 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan kedua pihak. Apabila Bank menunggak pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 1 %/oo (satu per mil) per hari dihitung sejak jatuh tempo pembayaran uang sewa.

Adapun pembatasan-pembatasan lain dalam perjanjian sewa tersebut diantaranya yaitu Bank memiliki hak untuk mengakhiri lebih awal setelah tahun ke-13 dari masa sewa dengan membayar ganti rugi kepada PT Dakara Makmur dan Bank juga mengasuransikan gedung serta perlengkapannya. Berikut adalah rincian lokasi gedung yang disewa dari PT Dakara Makmur:

No.	Nama lokasi/ Address of location
1	KC Bandung/ Jl. Astana Anyar No. 42 – 44, Bandung
2	KC Manado/ Jl. Sam Ratulangi No. 214, Manado
3	KC Lampung/ Jl. Laksamana Malahayati No. 230, Lampung

Beban sewa untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp22.947 dan Rp15.845. (Catatan 29)

- c. Litigasi

Saat ini Bank mempunyai perkara-perkara yang terkait dengan perkara perdata dan perkara sengketa konsumen sejumlah 24 perkara, dimana sejumlah 2 perkara, Bank berstatus sebagai Penggugat sedangkan sisanya sejumlah 22 perkara, Bank berstatus sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

- a. The Bank has commitment and contingent transactions as follows:

COMMITMENTS
Commitment receivables
Total
Commitment liabilities
Unused customer loan facilities
Others
Total
Total commitment receivables (liabilities)– net

CONTINGENCIES
Contingent receivables
Loans written-off (Note 11k)
Past due interest income
Others
Total
Contingent Liabilities
Bank guarantee
Total contingencies receivables – net

As of December 31, 2021 and 2020, the Bank does not have commitment and contingent transactions with related parties.

- b. Lease commitments

The Bank has entered into various operating lease commitments for its branches' premises with PT Dakara Makmur. The terms of the rentals range from 1 to 15 years and renewable upon mutual agreement of both parties. If the Bank arrears the payment will be charged with the calculation of pinalty 1 %/oo (one per mile) per day calculated from due the rent payment.

As for other restrictions in agreement rent is the Bank has the right to end earlier after years of 13 from tenancy by paying the compensation to PT Dakara Makmur and the Bank is also insuring the building and equipment. The following are details of location building lease from PT Dakara Makmur:

Rental expense for the year ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp22,947 and Rp15,845, respectively.(Note 29)

- c. Litigation

Currently, the Bank has cases associated with civil case and dispute consumer case total of 24 cases, which total of 2 cases, the Bank's status as the Plaintiff, and the remaining of 22 cases, the Bank's status as the Defendant or co-defendant.

36. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Litigasi (lanjutan)

Berikut ini rincian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank dengan debitur yaitu:

1. Kasus Perdata

No.	No. Perkara/Putusan / Case / Decision No.	Nama Penggugat/ Plaintiff Name	Nilai Gugatan/ Accusation Value	Status
1.	No. 331/PDT.G/2019/PN.Sgr 11/Pdt/2020/PT.Dps	I Nyoman Darmaya	2.000	Sedang dilakukan upaya peninjauan kembali oleh I Nyoman Darmaya/ <i>I Nyoman Darmaya's review is underway</i>
2.	No. 838/Pdt.G/2019/PNJKT.SEL	Bank Banten		Sedang dilakukan upaya kasasi oleh Pihak Pemohon Kasasi yang dahulunya Penggugat, Pembanding, dan Pemohon Kasasi / <i>An cassation effort is being made by the Cassation Petitioner who has formerly the Plaintiff, Appeler, and Cassation Petitioner</i>
3.	No. 124/Pdt.G/2020/PN.Sby	Alvian Bertho Canna Harendra	1.000	Sedang dilakukan upaya kasasi oleh Bank Banten dan Saudara Alvian Bertho / <i>An cassation effort is being made by Banten Bank and Alvian Bertho</i>
4.	No. 34/Pdt.G/2020/PN.Pdw	Ari Sutopo	900	Putusan dimenangkan oleh Bank Banten / <i>Verdict won by Banten Bank</i>
5.	No. 791/Pdt.G/2020/PN.Jak-sel	Siswito	826	Putusan sela dimenangkan oleh Bank Banten <i>Interim decision won by Banten Bank</i>
6.	No. 477/Pdt.G/2020/PN.Bdg	Hj. Enting Juhaeni	1.326	Banding dimenangkan oleh Bank Banten <i>Appeal won by Banten Bank</i>
7.	No. 662/Pdt.G/2020/PN JKT PST	Samsul Muslim	4.182	Putusan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2022 <i>The decision will be implemented at January 13, 2022</i>
8.	Aanmaning (Eksekusi) Putusan Kasasi No. 24K/PDT/2015 atas Menara Topaz			Menunggu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan eksekusi / <i>Waiting for the Central Jakarta District Court to be executed</i>
9.	No. 76/Pdt.G/2020/PN.SBR	Rodiyanti		Gugatan dicabut oleh Penggugat/ <i>The claim is withdrawn by the plaintiff</i>
10.	No. 47/Pdt.Bth/2021/PN.Tng	Siti Dewi		Menang di tingkat pertama dan menunggu penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang / <i>Win at the first level and wait for the decision from the Tangerang district court</i>
11.	No. 67/Pdt.G/2021/PN.Tgr	Dra Hamdiah		Menang di tingkat pertama dan menunggu penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang / <i>Win at the first level and wait for the decision from the Tangerang district court.</i>

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Litigation(continued)

The details legal issues encountered by Bank with debtors are as follows:

1. Civil Case

36. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Litigasi (lanjutan)

1. Kasus Pidana (lanjutan)

No.	No. Perkara/Putusan / Case / Decision No.	Nama Penggugat/ Plaintiff Name	Nilai Gugatan/ Accusation Value	Status
12.	No. 1151/Pdt.G/2021/PN.Sby	Soetarmi, S.Pd		Dalam putusan sidang tidak ada petikan putusan yang memberatkan atau merugikan Bank Banten / <i>In the court's decision, there are no excerpts of decisions that are incriminating or detrimental to Banten Bank</i>
13.	No. 322/Pdt.G/2021/PN.Medan	Zulkifli	1.000	Putusan ditunda / <i>Decision postponed</i>
14.	No. 207/Pdt.G/2021/PN.Bdg	Sadewo		Mediasi gagal, masuk ke pokok perkara dan menunggu relaas dari Pengadilan Negeri Bandung. / <i>Mediation failed, went into the main case and waited for a release from Bandung District Court</i>
15.	No. 357/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst	PT Debitindo Jaya		Bukti Penggugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022. / <i>Plaintiff's evidence will be implemented at January 11 2022</i>
16.	No. 147/Pdt.Bth/2021/PN.Tjk	Siswantoro		Sidang selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022. / <i>Next session will be implemented at January 12, 2022</i>
17.	No. 937/Pdt.G/2021/PN.Mdn	Kasiman		Sidang selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022 dengan agenda pemanggilan para pihak./ <i>Next session will be implemented at January 11, 2022 with calling part schedule.</i>
18.	No. 1009/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel	Ahmad Junaedi		Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022 dengan agenda Mediasi <i>Next session will be implemented at January 12, 2022 with mediation schedule</i>

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Litigation (continued)

1. Criminal Case (continued)

36. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- c. Litigasi (lanjutan)
2. Kasus Pidana

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- c. Litigation (continued)
2. Criminal Case

No.	Para Pihak / <i>The Parties</i>	Instansi/ <i>Agency</i>	Pokok Perkara/ <i>Subject Matter</i>	Status
1.	Pelapor : Bank Banten Terlapor : Suryadi Angga Kusuma	Bareskrim Mabes Polri	Adanya dugaan Pemalusan Surat Keterangan lunas dari pihak suryadi angga Kusuma dan pergantian asset jaminan yang sebelumnya Tercover untuk di jadikan pinjaman, menjadi tidak cover. / <i>There is an allegation of counterfeiting of the full payment certificate from Suryadi Angga Kusuma and the change of collateral assets that were previously covered to be used as loans, become non-covered.</i>	Sudah Melakukan Kunjungan Ke Lampung, dan akan ada permintaan Keterangan dari sodara indra dan sodara Hario. / <i>Have made a visit to Lampung, and there will be a request for information from Indra and Hario</i>
2.	Pelapor : Bank Banten Terlapor : MT Agustiono	Polres Metro Tangerang Selatan	Adanya Transaksi SKN Double Transfer Sebesar Rp.335.091.000 (nilai penuh) di input dua kali Kerekening MT.Agustinanto. yang mana uang tersebut belum di kembalikan oleh sodara MT.Agustianto / <i>There is a SKN Double Transfer Transaction of Rp. 335,091,000 (full amount) that is inputted twice into the MT.Agustinanto Account. which the money has not been returned by MT. Agustianto</i>	Pemanggilan Para Saksi. / <i>Calling all evidence</i>
3.	Pelapor : Bank Banten Terlapor : Nurul Hidayat	Polres Metro Tangerang Kota	Terdapat 10 Debitur yang setorannya tidak di setorkan Ke Rekening Debitur Oleh Pelaku yaitu Ex Karyawan AO Collection yaitu Sodadra Nurul Hidayat yaitu sebesar Rp.80.100.000 / <i>There are 10 debtors whose deposits were not deposited into the debtor's account by the perpetrator, namely the ex AO Collection employee, namely Nurul Hidayat, amounting to Rp. 80,100,000,-</i>	Sodara Nurul Hidayat Sudah di tetapkan Sebagai Tersangka. / <i>Nurul Hidayat has been a suspect</i>

36. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- c. Litigasi (lanjutan)
2. Kasus Pidana (lanjutan)

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- c. Litigation (continued)
2. Criminal Case (continued)

No.	Para Pihak / The Parties	Instansi/ Agency	Pokok Perkara/ Subject Matter	Status
4.	Pelapor : Bank Banten Terlapor : Retsi Putri Dewi Marisa	Polda Jawa Barat	Adanya Pemalsuan dokumen maupun tanda tangan seerta penggelapan uang deposito yang dilakukan sodari Retsi EX Karyawan Bank Banten. / There was forgery of documents and signatures as well as embezzlement of deposit money carried out by Retsi ex Bank Banten employees	Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Memutuskan Bahwa Sodari Resti Putri Dewi Marisa Bersalah, dan Harus Menjalani Hukuman Pidana Selama 5 Tahun Masa Kurungan. / The Judge's Decision at the Bandung District Court, Decided that Resti Putri Dewi Marisa was guilty, and had to serve a criminal sentence of 5 years in confinement.
5.	Surat Perintah Nomor : S.pLidik/315/II/RES.2.3/2020/Ditpideksus Tanggal 26 Februari 2020.	Bareskrim Mabes Polri	Dugaan Terjadinya Tindak pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas Pemberian Fasilitas Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk kepada PT Harum Nusantara Makmur. / The Allegation of Banking Crimes and Money Laundering on the Provision of Credit Facilities from PT. Regional Development Bank Banten Tbk to PT Harum Nusantara Makmur.	Menunggu Gelar Perkara dari Bareskrim Mabes Polri. / Waiting for Case Title from Bareskrim Police Headquarters
6.	Surat Laporan : B.18/X/RES.2.2/2021/Ditkrimsus	Polda Banten	Diduga adanya Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Kantor Rangkas Bitung. /The Allegation of Banking Crimes and Money Laundering on the Provision of Credit Facilities from PT. Regional Development Bank Banten Tbk to PT Harum Nusantara Makmur.	Agenda selanjutnya ialah Pemanggilan Para Saksi. / Next on the agenda is the Calling of the Witnesses.

Pada umumnya perkara perdata atau sengketa konsumen yang dihadapi oleh Bank dikarenakan adanya upaya Bank untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh Debitur atau Penjamin berdasarkan Hak Tanggungan dan kemudian Debitur atau Penjamin melakukan perlawanan atas upaya eksekusi yang dilakukan oleh Bank.

Generally, civil case or dispute consumer faced by the Bank due to the Bank's effort to do execution on goods collateral provided by Debtor or Guarantor based on Collateral and Debtor and Guarantor to resistance of execution's effort that has done by the Bank.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

36. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Litigasi (lanjutan)

Perkara-perkara tersebut diatas tidak mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha serta keadaan keuangan Bank karena risikonya sudah diperhitungkan sebagai resiko ketika Bank memberikan kredit (resiko kredit macet) dan sudah diberikan pencadangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila gugatan dimenangkan oleh Perseroan dalam pengadilan maka putusan atas nilai gugatan akan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya, demikian juga sebaliknya.

37. INFORMASI SEGMENT

Kegiatan Bank sepenuhnya adalah bank konvensional sehingga informasi segmen Bank tidak dikelompokkan per segmen usaha hanya dikelompokkan berdasarkan segmen geografis.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Litigation (continued)

That cases has not materially affected on activities and going concern and financial state of the Bank because the risk is calculated as the risk when the Bank provides a loans (loss of credit risk) and it has been provided reserve based on applicable regulation.

If the lawsuit won by the Company in the court, the decision on the value of the lawsuit will be recognized as other operating income, and vice versa.

37. SEGMENT INFORMATION

Bank activities are entirely conventional bank so that bank segment information is not classified as business segments and is only classified by geographical segment.

	2021			
	DKI Jakarta/ DKI Jakarta	Luar DKI Jakarta/ Outside Jakarta	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN				REVENUE
Pendapatan bunga	109.219	201.053	310.272	Interest income
Pendapatan lainnya	5.998	34.087	40.085	Other income
	115.217	235.140	350.357	
HASIL				INCOME
Laba (rugi) bersih	(229.632)	(35.544)	(265.176)	Net income (loss)
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
ASET				ASSETS
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – bersih	1.566.833	-	1.566.833	Placements in Bank Indonesia and other banks – net
Efek-efek – bersih	817.926	-	817.926	Securities – net
Reverse repo	1.321.583	-	1.321.583	Reverse repo
Kredit – bersih	300.022	2.409.167	2.709.189	Loans – net
Aset tetap – bersih	24.608	36.225	60.833	Fixed assets – net
Aset lainnya	1.382.260	990.987	2.373.247	Other assets
Jumlah aset	5.413.232	3.436.379	8.849.611	Total assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Simpanan nasabah dan dari bank lain	1.765.628	4.991.668	6.757.296	Deposits from customers and from other banks
Liabilitas lainnya	53.643	147.525	201.168	Other liabilities
Jumlah liabilitas	1.819.271	5.139.193	6.958.464	Total liabilities
Pengeluaran modal				Capital expenditure
Penyusutan				Depreciation
	2020			
	DKI Jakarta/ DKI Jakarta	Luar DKI Jakarta/ Outside Jakarta	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN				REVENUE
Pendapatan bunga	95.853	276.356	372.209	Interest income
Pendapatan lainnya	5.880	19.857	25.737	Other income
	101.733	296.213	397.946	
HASIL				INCOME
Laba (rugi) bersih	(135.964)	(172.194)	(308.158)	Net income (loss)
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
ASET				ASSETS
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – bersih	304.924	-	304.924	Placements in Bank Indonesia and other banks – net
Efek-efek – bersih	617.099	-	617.099	Securities – net
Kredit – bersih	540.251	2.427.992	2.968.243	Loans – net
Aset tetap – bersih	30.792	34.531	65.323	Fixed assets – net
Aset lainnya	1.089.603	92.032	1.181.635	Other assets
Jumlah aset	2.582.669	2.554.555	5.137.224	Total assets

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

37. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

37. SEGMENT INFORMATION (continued)

	2020			
	DKI Jakarta/ DKI Jakarta	Luar DKI Jakarta/ Outside Jakarta	Jumlah/ Total	
LIABILITAS				LIABILITIES
Simpanan nasabah dan dari bank lain	993.965	2.263.724	3.257.689	Deposits from customers and from other banks
Liabilitas lainnya	687.408	30.603	718.011	Other liabilities
Jumlah liabilitas	1.681.373	2.294.327	3.975.700	Total liabilities
Pengeluaran modal				Capital expenditure
Penyusutan	10.007	34.903	44.910	Depreciation

38. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

38. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

Tabel dibawah ini adalah nilai tercatat dan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

The table below sets out the carrying values and fair values of financial assets and liabilities in statements of financial position as of December 31, 2021 and 2020:

	2021		2020		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<u>Aset keuangan</u>					<u>Financial assets</u>
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang:</u>					<u>Loans and receivables:</u>
Kas	75.595	75.595	35.545	35.545	Cash
Giro pada Bank Indonesia	158.888	158.888	102.188	102.188	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	32.831	32.831	2.580	2.580	Current accounts with other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.566.833	1.566.833	304.924	304.924	Placements with Bank Indonesia and other banks
Kredit – bersih	2.709.189	2.709.189	2.968.242	2.968.242	Loans – net
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	17.072	17.072	88.503	88.503	Accrued interest receivables
Efek – efek yang di beli dengan janji dijual kembali	1.321.583	1.321.583	-	-	Securities purchased under agreement to resell
Aset lain-lain – bersih	5.388	5.388	93.469	93.469	Other assets – net
<u>Diperdagangkan:</u>					<u>Traded:</u>
Reksadana	20.000	20.000	-	-	Mutual funds
<u>Tersedia untuk dijual:</u>					<u>Available for sale:</u>
Reksadana	180.000	180.913	-	-	Mutual funds
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo:</u>					<u>Held to maturity:</u>
Efek-efek	611.606	617.012	617.099	611.606	Securities
Jumlah	6.698.985	6.705.304	4.212.550	4.207.057	Total
<u>Liabilitas keuangan</u>					<u>Financial liabilities</u>
Liabilitas segera	116.264	116.264	221.036	221.036	Liabilities due immediately
Simpanan dari nasabah	4.639.454	4.639.454	2.582.207	2.582.207	Deposit from customers
Simpanan dari bank lain	2.117.842	2.117.842	675.482	675.482	Deposit from other banks
Liabilitas lain-lain	55.662	55.662	25.549	25.549	Other liabilities
Jumlah	6.929.222	6.929.222	3.504.274	3.504.274	Total

38. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dengan dasar sebagai berikut:

Aset keuangan

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan aset lainnya adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Nilai wajar atas efek-efek ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Estimasi nilai wajar kredit yang diberikan (umumnya kredit dengan bunga mengambang) merupakan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima yang didiskontokan pada suku bunga pasar. Kredit yang diberikan disajikan bersih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Liabilitas keuangan

Nilai wajar liabilitas keuangan jangka pendek (biasanya kurang dari satu tahun) seperti simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain dan liabilitas lainnya adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut harus segera dibayar pada saat ditagih.

Pengukuran nilai wajar yang diakui pada laporan posisi keuangan

- Tingkat pertama pengukuran nilai wajar berasal dari kuotasi harga (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik.
- Tingkat kedua pengukuran nilai wajar berasal dari masukan lain selain dari kuotasi harga pasar yang sudah termasuk dalam tingkat pertama yang dapat diamati untuk aset maupun liabilitas, baik secara langsung (contohnya harga) atau tidak langsung (contohnya yang berasal dari harga).
- Tingkat ketiga pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang meliputi input untuk aset atau liabilitas jika tidak berdasarkan data pasar yang dapat diamati (masukan yang tidak dapat diamati).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank memiliki aset keuangan HTM yaitu efek-efek. Nilai wajar instrumen keuangan ini pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 hanya ada di tingkat pertama sebesar Rp617.012 dan Rp611.606.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank memiliki aset keuangan AFS yaitu efek-efek. Nilai wajar instrumen keuangan ini pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 hanya ada di tingkat pertama sebesar RpNihil dan RpNihil.

38. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (continued)

The fair values of the above financial assets and liabilities are determined based on the following:

Financial assets

The fair values of financial asset that are short-term in nature (generally less than 1 year) such as current accounts in Bank Indonesia, current accounts in other banks, placements in Bank Indonesia and other banks and other assets represent their carrying amounts as these approximates their fair values.

The fair values of securities are determined based on the latest published quoted price as of December 31, 2021 and 2020.

The estimated fair value of credit (normally floating interest bearing credit) represents the present value of estimated future cash flows which expected to be received at discounted current market rate. Loans are presented net of allowance for impairment losses.

Financial liabilities

The fair values of financial liabilities that are short-term in nature (generally less than 1 year) such as deposits from customers and deposits from other banks, and other liabilities represent their carrying amounts as these approximates their fair values.

The estimated fair value of deposits with no stated maturity is the amount payable on demand.

Fair value measurements recognized in the statements of financial position

- *Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).*
- *Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

As of December 31, 2021 and 2020, the Bank has securities as financial assets at HTM. The fair value of this financial instrument as of December 31, 2021 and 2020 is only in the level 1 of Rp617,012 and Rp611,606, respectively.

As of December 31, 2021 and 2020, the Bank has securities as financial assets at AFS. The fair value of this financial instrument as of December 31, 2021 and 2020 is only in the level 1 of RpNil and RpNil, respectively.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank memiliki aset keuangan diperdagangkan yaitu efek-efek. Nilai wajar instrumen keuangan ini pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 hanya ada di tingkat pertama sebesar Rp180.913 dan RpNihil.

Bank, sebagai penyedia jasa keuangan, menghadapi risiko dalam kegiatan operasionalnya seperti risiko kredit, risiko pasar/suku bunga, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan serta risiko reputasi dan risiko strategis.

Dalam mengelola risiko-risiko tersebut, Bank telah menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko, Profil Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang mengacu pada:

- POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum" yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2016
- POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum" yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2016.

Bank sudah menyusun Laporan Profil Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tersebut sejak periode Desember 2011.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen risiko Bank. Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, serta beberapa komite khusus seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Komite Aset-Liabilitas (ALCO), Komite Kredit, serta Komite Teknologi Informasi. Komite-komite tersebut bertugas mengarahkan Bank untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan meminimalkan risiko-risiko.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) juga bertanggung jawab melakukan kaji ulang atas penerapan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap kebijakan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur Bank untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Bank memonitor risiko kredit untuk meyakinkan bahwa kemungkinan kerugian yang terjadi akibat gagal bayar debitur Bank serta pemenuhan kontrak perjanjian dapat diminimalkan, baik untuk debitur individu maupun kelompok.

Pengelolaan eksposur risiko kredit meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

39. RISK MANAGEMENT (continued)

As of December 31, 2021 and 2020, the Bank has securities as financial assets at HTM. The fair value of this financial instrument as of December 31, 2021 and 2020, is only in the level 1 of Rp180,913 and RpNil, respectively.

The Bank, being in a financial service industry, is facing various inherent risks in its day-to-day business activities such as credit risk, market/interest rate risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, compliance risk, reputation risk and strategic risk.

In managing those risks, Bank has improved the Risk Management Policy, Risk Profile and Bank Rating Assessment which refers to:

- *POJK No. 4/POJK.03/2016 concerning "Health Level Assessment of Commercial Banks" released on January 27, 2016.*
- *POJK No. 18/POJK.03/2016 concerning "Implementation of Risk Management for Commercial Banks" released on March 22, 2016.*

The Bank has prepared Risk Profile Report and Bank Rating Assessment based on BI regulation since December 2011.

The members of the Boards of Commissioners and Directors are overall responsible for the risk management of the Bank. Risk management implementation is carried out through establishment of organizational structure, policies and procedures, and various committees such as Risk Management Committee, Risk Monitoring Committee, Audit Committee, Asset-Liability Committee, Credit Committee, and Information Technology Committee. These committees provide guidance to the Bank to identify, measure, monitor and mitigate risks.

The Internal Audit also responsible to review the application of risk management and compliance of policies.

Credit Risk

Credit risk is the risk that occurs due to the failure of debtors to pay principal and interest on credit. The Bank monitors credit risk to ensure that the potential loss from default on the credit and fulfillment of contractual agreements is minimized, at both on individual debtor and group of debtor.

Exposures to credit risk is managed through risk identification, risk measurement, risk monitoring and risk control.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- a. Pemberian kredit dilakukan dengan mengutamakan prinsip hati-hati dan berkelanjutan. Kebijakan dan prosedur pemberian kredit disusun secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk pengendalian risiko. Pemberian kredit dilakukan berdasarkan pada suatu kerangka acuan khusus pemberian kredit dan disetujui serta diketahui oleh pejabat Bank yang berwenang. Mulai tahun 2011, proses persetujuan kredit ditambahkan dengan metode presentasi proposal kredit oleh *Account Officer* di hadapan Komite Kredit Cabang.
- b. Analisa berkala atas kemampuan debitur untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.
- c. Pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai peraturan Bank Indonesia. Pada 31 Desember 2021 dan 2020, kredit kepada pihak berelasi dan pihak ketiga masih dalam BMPK yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Sejalan dengan misi Bank, maka sejak tahun 2017, Bank fokus pada pembiayaan konsumen.
- e. Bank melengkapi sistem pemantauan kinerja cabang dan kualitas portofolio kredit secara nasional dan harian.
- f. Permintaan jaminan atas kredit kepada debitur, berdasarkan kriteria yang ditetapkan Bank.
- g. Pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai untuk tujuan pelaporan keuangan hanya dibentuk atas kerugian yang terjadi pada tanggal laporan keuangan berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai yang tidak didukung dengan bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai dibentuk secara kolektif berdasarkan PSAK dan PAPI 2008.
- h. Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan ataupun pendukung kredit lainnya yang tercatat dalam laporan posisi keuangan maupun rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	2021	2020
<u>Laporan posisi keuangan</u>		
Giro pada Bank Indonesia	158.888	102.188
Giro pada bank lain	32.831	2.580
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.566.833	304.924
Efek-efek	817.926	617.099
Reverse repo	1.321.583	-
Kredit – bersih	2.709.189	2.968.242
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	17.072	88.503
Aset lain-lain – bersih	2.225.289	93.469
Jumlah	8.849.611	4.177.005
<u>Rekening administratif</u>		
Komitmen kredit yang belum Ditarik	1.229	2.339.155
Jumlah	1.229	2.339.155

39. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- a. Lending is conducted by prioritizing prudent and sustainable principle. Lending policies and procedures are developed in a systematic and structured in order to control risk. Lending is conducted within a defined framework specially for lending and are approved and noted at the appropriate level of responsibility within the Bank. Since 2011, lending approval process is added by the method of credit proposals presentation by *Account Officer* in the presence of *Branch Credit Committee*.
- b. Regular analysis of the ability of debtors to meet interest and principal repayment obligations.
- c. Monitor Legal Lending Limits (LLL) as required by Bank Indonesia. As of December 31, 2021 and 2020, the loans granted to related parties and third parties are still within the LLL required by Bank Indonesia.
- d. In line with the Bank's mission, since 2017, the Bank focuses on consumer financing.
- e. Bank controls the branches performance and loans portfolio quality nationally and daily.
- f. Collateral requirement as an assurance from debtors are based on the Bank's criteria.
- g. Allowance for impairment losses are recognized for financial reporting purposes only for losses that have been incurred at the date of the statements of financial position based on objective evidence of impairment. For those assets that have no objective evidence, these are assessed using collective assessment in accordance with SFAS and PAPI 2008.
- h. The maximum exposure to credit risk before collateral or other credit enhancements relating to on-balance items and off-statement of financial position items as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

<u>On-financial position</u>
Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia and other banks
Securities
Reverse repo
Loans – net
Accrued interest receivable
Other assets-net
Total
<u>Off-financial position</u>
Unused customer loan facilities
Total

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Untuk aset laporan posisi keuangan, eksposur risiko kredit maksimal adalah berdasarkan nilai tercatat dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan memperhitungkan agunan.

Manajemen berkeyakinan bahwa Bank memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mempertahankan eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal.

Konsentrasi risiko aset keuangan yang memiliki eksposur risiko kredit.

a. Sektor geografis

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, eksposur risiko kredit atas aset keuangan dan transaksi komitmen dan kontinjensi menurut sektor geografis berdasarkan laporan posisi keuangan dan rekening administratif adalah sebagai berikut:

	2021						
	Jakarta	Sumatera	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
<u>Laporan posisi keuangan</u>							
Giro pada Bank Indonesia	158.888	-	-	-	-	-	158.888
Giro pada bank lain	29.466	28	3.010	300	-	27	32.831
Penempatan pada bank							
Indonesia dan bank lain	1.566.833	-	-	-	-	-	1.566.833
Efek-efek	817.926	-	-	-	-	-	817.926
Reverse repo	1.321.583	-	-	-	-	-	1.321.583
Kredit – bersih	300.022	177.904	1.937.312	72.860	49.469	171.622	2.709.189
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	7.242	1.324	6.605	285	328	1.288	17.072
Aset lain-lain – bersih	1.211.429	21.872	958.111	12.209	11.751	9.917	2.225.289
Jumlah	5.413.389	201.128	2.905.038	85.654	61.548	182.854	8.849.611
<u>Rekening administrasi</u>							
Komitmen kredit yang belum ditarik	-	209	-	1.020	-	-	1.229
Jumlah	-	209	-	1.020	-	-	1.229

39. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

For on-statement of financial position items, the maximum credit risk exposures are based on the net carrying amounts reflected in the statements of financial position as of December 31, 2021 and 2020 considering the related collateral.

Management believes that it has the ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit risk.

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure.

a. Geographical sectors

The table below shows the credit risk exposure relating to financial assets and commitment and contingent transactions by geographical sectors based on-statement of financial position and off-statement of financial position items as of December 31, 2021 and 2020:

On-financial position

Current accounts in Bank Indonesia

Current accounts in other Banks

Placements in bank

Indonesia and other banks

Securities

Reverse repo

Loans – net

Accrued interest receivable

Other assets-net

Total

Off-financial position

Unused customer loan

Facilities

Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

a. Sektor geografis (lanjutan)

	2020						
	Jakarta	Sumatera	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
<u>Laporan posisi keuangan</u>							
Giro pada Bank Indonesia	102.188	-	-	-	-	-	102.188
Giro pada bank lain	1.710	22	647	173	-	28	2.580
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	304.924	-	-	-	-	-	304.924
Efek-efek	617.099	-	-	-	-	-	617.099
Kredit – bersih	540.251	209.530	1.883.792	52.247	49.983	232.439	2.968.242
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	7.893	1.383	78.370	73	(575)	1.359	88.503
Aset lain-lain – bersih	991.319	22.793	61.612	19.191	15.178	17.146	1.127.239
Jumlah	2.565.384	233.728	2.024.421	71.684	64.586	250.972	5.210.775
<u>Rekening administrasi</u>							
Komitmen kredit yang belum ditarik	1.216.580	616.243	460.772	41.278	3.385	897	2.339.155
Jumlah	1.216.580	616.243	460.772	41.278	3.385	897	2.339.155

b. Sektor industri

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, eksposur risiko kredit atas aset keuangan dan transaksi komitmen dan kontinjensi menurut sektor industri berdasarkan laporan posisi keuangan dan rekening administratif adalah sebagai berikut:

39. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

a. Geographical sectors (continued)

	2020						
	Jakarta	Sumatera	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
<u>On-financial position</u>							
Current accounts in Bank Indonesia	102.188	-	-	-	-	-	102.188
Current accounts in other banks	1.710	22	647	173	-	28	2.580
Placements in bank Indonesia and other banks	304.924	-	-	-	-	-	304.924
Securities	617.099	-	-	-	-	-	617.099
Loans – net	540.251	209.530	1.883.792	52.247	49.983	232.439	2.968.242
Accrued interest receivable	7.893	1.383	78.370	73	(575)	1.359	88.503
Other assets-net	991.319	22.793	61.612	19.191	15.178	17.146	1.127.239
Total	2.565.384	233.728	2.024.421	71.684	64.586	250.972	5.210.775
<u>Off-financial position</u>							
Unused customer loan Facilities	1.216.580	616.243	460.772	41.278	3.385	897	2.339.155
Total	1.216.580	616.243	460.772	41.278	3.385	897	2.339.155

b. Industry sectors

As of December 31, 2021 and 2020, credit risk exposure relating to financial assets and commitment and contingent transactions by industry sector based on-statement of financial position and off-statement of financial position items are as follows:

	2021						
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Industri/ Manufacturing	Jasa dunia usaha/ Services	Pertanian/ Agriculture	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
<u>Laporan posisi keuangan</u>							
Giro pada Bank Indonesia	158.888	-	-	-	-	-	158.888
Giro pada bank lain	-	32.831	-	-	-	-	32.831
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	866.832	700.001	-	-	-	-	1.566.833
Efek-efek	617.013	200.913	-	-	-	-	817.926
Reverse repo	1.321.583	-	-	-	-	-	1.321.583
Kredit – bersih	-	12.997	44.619	162.167	49.112	2.440.294	2.709.189
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	6.405	174	77	478	34	9.904	17.072
Aset lain-lain – bersih	-	-	-	-	-	2.225.289	2.225.289
Jumlah	2.970.721	946.916	44.696	162.645	49.146	4.675.487	8.849.611
<u>Rekening administratif</u>							
Komitmen kredit yang belum ditarik	-	-	1.020	209	-	-	1.229
Jumlah	-	-	1.020	209	-	-	1.229
<u>On-financial position</u>							
Current accounts in Bank Indonesia	158.888	-	-	-	-	-	158.888
Current accounts in other banks	-	32.831	-	-	-	-	32.831
Placements in Bank Indonesia and other banks	866.832	700.001	-	-	-	-	1.566.833
Securities	617.013	200.913	-	-	-	-	817.926
Reverse repo	1.321.583	-	-	-	-	-	1.321.583
Loans – net	-	12.997	44.619	162.167	49.112	2.440.294	2.709.189
Accrued interest Receivable	6.405	174	77	478	34	9.904	17.072
Other assets – net	-	-	-	-	-	2.225.289	2.225.289
Total	2.970.721	946.916	44.696	162.645	49.146	4.675.487	8.849.611
<u>Off-financial position</u>							
Unused customer loan Facilities	-	-	1.020	209	-	-	1.229
Total	-	-	1.020	209	-	-	1.229

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

b. Sektor industri (lanjutan)

	2020						
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Industri/ Manufacturing	Jasa dunia usaha/ Services	Pertanian/ Agriculture	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total
Laporan posisi keuangan							
Giro pada Bank Indonesia	102.188	-	-	-	-	-	102.188
Giro pada bank lain	-	2.580	-	-	-	-	2.580
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	304.924	-	-	-	-	-	304.924
Efek-efek	617.099	-	-	-	-	-	617.099
Kredit – bersih	-	10.452	157.776	291.986	163.887	2.344.141	2.968.242
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	312	4.704	8.706	4.887	69.894	88.503
Aset lain-lain – bersih	-	-	-	-	-	1.127.239	1.127.239
Jumlah	1.024.211	13.344	162.480	300.692	168.774	3.541.274	5.210.775
Rekening administratif							
Komitmen kredit yang belum ditarik	-	-	-	-	-	2.339.155	2.339.155
Jumlah	-	-	-	-	-	2.339.155	2.339.155

c. Konsentrasi kredit menurut sektor ekonomi dan jenis konsumen diungkapkan pada (Catatan 11).

Risiko Pasar/Suku Bunga

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (*adverse movement*). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga options. Sebagai Bank Non Devisa, saat ini Bank hanya terekspos risiko suku bunga.

Risiko suku bunga merupakan bagian risiko pasar bagi Bank. Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan transaksi Bank yang mengandung risiko suku bunga. Adapun transaksi Bank yang mengandung risiko suku bunga seperti: simpanan atau dana pihak ketiga (deposito berjangka, giro dan tabungan), kredit, surat berharga dan penempatan antar bank.

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan kebijakan manajemen risiko suku bunga sesuai dengan batasan, sistem dan prosedur yang telah dibuat untuk menghadapi risiko suku bunga ini. Tujuan utama manajemen risiko suku bunga adalah untuk membatasi dampak buruk dari pergerakan suku bunga yang dapat mengurangi laba dan untuk meningkatkan pendapatan di dalam batasan tertentu. Sebagian besar suku bunga atas simpanan nasabah adalah suku bunga mengambang yang langsung berhubungan dengan suku bunga pasar atau suku bunga yang diumumkan secara periodik, sementara kredit adalah suku bunga tetap.

39. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

b. Industry sectors (continued)

								On-financial position
								Current accounts in Bank Indonesia
								Current accounts in other banks
								Placements in Bank Indonesia and other banks
								Securities
								Loans – net
								Accrued interest Receivable
								Other assets – net
								Total
								Off-financial position
								Unused customer loan facilities
								Total

c. Loans concentrations per economic sector and per type of customer are disclosed in (Note 11).

Market/Interest Rate Risk

Market risk is the risk that arises because of the market variable movement of the portfolio held by the Bank, which could cause adverse movement to the Bank. Market variables are interest rates and exchange rates, including the derivative of these two types of market risk, i.e. changes in options price. As a Non Foreign Exchange Bank, now Bank is only exposed to interest rate risk.

Interest rate risk is a part of market risk. The interest rate risk is the potential loss arising from the movement in market interest rates which opposite with the Bank's transactions that have interest rate risk. The Bank's transactions that have interest rate risk such as: customers' deposits (time deposits, demand deposits, and savings), loans, securities and inter-bank placement.

The Bank's management is responsible for implementing and monitoring the interest risk management policies in accordance with defined limits, system procedures and policy to manage the risk of interest rate. The main objectives of interest rate risk management are to limit the adverse effect of interest rate movements to reduce profits and to enhance earnings within defined parameters. A substantial portion of deposits from customers are entered at floating interest rates, either directly linked to market rates or based upon published rates, while loans are entered at fix interest rates.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar/Suku Bunga

Untuk memperkecil dampak perubahan risiko suku bunga terhadap pendapatan Bank, Bank tetap menjaga rasio RSA (*rate sensitivity asset*) terhadap RSL (*rate sensitivity liabilities*) agar tidak terlalu jauh dari 100%. Pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020, rasio RSA/RSL masing-masing sebesar 96,28% dan 125,35%. Dengan rasio yang tidak jauh dari 100% tersebut apabila terjadi perubahan suku bunga secara paralel pada aset dan liabilitas, Bank tidak terekspos risiko suku bunga yang besar. Bank juga senantiasa memantau *repricing profile* setiap pengelompokan waktu (*time bucket*) untuk mengetahui dampak perubahan suku bunga terhadap *Net Interest Income* (NII) Bank secara lebih akurat.

Tabel dibawah ini menunjukkan *repricing profile* aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap suku bunga dan diurutkan berdasarkan rentang waktu suku bunga tersebut akan di-*repricing* (untuk *floating rate*) atau tanggal jatuh temponya (untuk *fixed rate*), 31 Desember 2021 dan 2020:

39. RISK MANAGEMENT (continued)

Market/Interest Rate Risk

To minimize the impacts of interest rate exchange risk, the Bank made efforts to reduce the gap between assets and liabilities that were sensitive to such risk. In December 31, 2021 and 2020, the gap was 96.28% and 125.35% respectively. With that small gap between the assets and liabilities, the Bank would not be significantly exposed when interest rate changes were applied in parallel to both the assets and liabilities. The Bank also monitored the repricing profile over time to identify the impacts of the risk on its Net Interest Income (NII).

The table below showed the repricing profile of the assets and liabilities that were sensitive to interest rate exchange arranged by its periodic repricing for floating rates and by its tenor for fixed rates, as of December 31, 2021 and 2020:

2021							
Jangka waktu kontrak/Period of contract							
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3-12 bulan/ 3-12 months	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
Aset keuangan							Financial assets
Giro pada Bank Indonesia	158.888	-	-	-	-	158.888	Current accounts in Bank Indonesia
Giro pada bank lain	32.831	-	-	-	-	32.831	Current accounts in other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.566.833	-	-	-	-	1.566.833	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	200.913	-	-	-	617.013	817.926	Securities
Reverse repo	1.321.583	-	-	-	-	1.321.583	Reverse repo
Kredit – bersih	-	200	52.113	519.248	2.137.628	2.709.189	Loans – net
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	6.467	1	117	2.043	8.444	17.072	Accrued interest Receivable
Jumlah	3.287.515	201	52.230	521.291	2.763.085	6.624.322	Total
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Simpanan dari nasabah							Deposit from customer
Giro	658.425	-	-	-	-	658.425	Demand deposits
Tabungan	525.355	-	-	-	-	525.355	Savings
Deposito berjangka	1.473.642	719.731	1.261.982	319	-	3.455.674	Time deposits
Simpanan dari bank lain							Deposits from other banks
Giro	424.153	-	-	-	-	424.153	Demand deposits
Tabungan	19.568	-	-	-	-	19.568	Savings
Inter-bank call money	27.000	-	-	-	-	27.000	Inter-bank call money
Deposito berjangka	696.159	425.707	552.255	-	-	1.674.121	Time deposits
Jumlah	3.824.302	1.145.438	1.814.237	319	-	6.784.296	Total

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar/Suku Bunga (lanjutan)

39. RISK MANAGEMENT (continued)

Market/Interest Rate Risk (continued)

	2020					
	Jangka waktu kontrak/Period of contract					
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3-12 bulan/ 3-12 months	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total
Aset keuangan						
Giro pada Bank Indonesia	102.188	-	-	-	-	102.188
Giro pada bank lain	2.580	-	-	-	-	2.580
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	304.924	-	-	-	-	304.924
Efek-efek	-	-	-	-	617.099	617.099
Kredit – bersih	-	38	41.934	898.365	2.027.905	2.968.242
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	1	1.250	26.786	60.466	88.503
Jumlah	409.692	39	43.184	925.151	2.705.470	4.083.536
Liabilitas keuangan						
Simpanan dari nasabah						
Giro	280.004	-	-	-	-	280.004
Tabungan	315.945	-	-	-	-	315.945
Deposito berjangka	1.368.394	385.059	230.486	2.319	-	1.986.258
Simpanan dari bank lain						
Giro	59.857	-	-	-	-	59.857
Tabungan	24.190	-	-	-	-	24.190
Inter-bank call money	320.000	-	-	-	-	320.000
Deposito berjangka	242.435	19.000	10.000	-	-	271.435
Jumlah	2.610.825	404.059	240.486	2.319	-	3.257.689

Kisaran suku bunga atas aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

The ranges of interest rates for financial assets and liabilities are as follows:

	2021	2020	
Aset Keuangan			Financial Assets
Giro pada Bank Indonesia	0 - 1,50%	0 - 1,50%	Current accounts in Bank Indonesia
Giro pada bank lain	0 - 1,00%	0 - 1,00%	Current accounts in other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2,75 - 3,50%	3,00 - 4,25%	Placements in Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	5 - 6,50%	6,00 - 8,25%	Securities
Kredit	6,00 - 82,59%	6,00 - 82,59%	Loans
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Simpanan dari nasabah			Deposit from customer
Giro	0 - 4,50%	0 - 4,50%	Demand deposits
Tabungan	0 - 5,00%	0,00 - 2,50%	Savings
Deposito berjangka	2,25 - 8,00%	3,50 - 10,00%	Time deposits
Simpanan dari bank lain			Deposits from other banks
Giro	0 - 7,00%	0 - 1,50%	Demand deposits
Inter-bank call money	2,77 - 3,50 %	3,30 - 5,38%	Inter-bank call money
Tabungan	0 - 3,00%	1,00 - 3,00%	Savings
Deposito berjangka	2,25 - 6,75%	5,25 - 8,00%	Time deposits

Sensitivitas Suku Bunga

Analisis sensitivitas suku bunga diukur dengan kemampuan eksekusi modal Bank untuk menyerap potensi kerugian dari perubahan suku bunga/fluktuasi suku bunga (BI rate). Berdasarkan data historis BI rate selama satu tahun terakhir, fluktuasi suku bunga (standar deviasi) untuk posisi 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 3,5% dan 3,75 %. Hal ini disebabkan karena eksekusi modal bank yang tinggi untuk menutup perubahan suku bunga pada laporan posisi keuangan sehingga Bank dinilai sangat tidak rentan terhadap pergerakan suku bunga.

Interest Rate Sensitivity

Interest rate sensitivity analysis is measured with capital excess capability to cover interest rate exchange potential loss. by making an interest rate/fluctuation interest rate (BI rate). Based on historical data BI rate over the past year, interest rate fluctuation (standard deviation) as of December 31, 2021 and 2020 is 3.5% and 3.75%, respectively. This was due to Bank's capital excess was high enough to cover the impact to interest rate exchange so that the Bank was assessed as not vulnerable to interest rate exchange movements.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Bank tidak dapat memenuhi liabilitasnya kepada nasabah dan pihak lawan pada saat jatuh tempo.

Bank memantau likuiditasnya dengan menganalisa profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas.

39. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Bank may unable to meet its obligations to customers and counterparties at maturity.

The Bank monitors its liquidity by analyzing its maturity profile of assets and liabilities.

2021								
Nilai tercatat/ Carrying value	Tidak mempunyai jatuh tempo kontraktual/ No contractual maturity	Kurang dari/ Less than 1bulan/ Month	1-3 bulan/ Months	3-6 bulan/ months	6-12 bulan/ months	Lebih dari/ more than 12 bulan/ months		
Aset Keuangan							Financial Assets	
Kas	75.595	75.595	-	-	-	-	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	158.888	158.888	-	-	-	-	Current accounts in Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	32.831	32.831	-	-	-	-	Current accounts in other Banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.566.833	-	1.566.833	-	-	-	Placements in Bank Indonesia and other Banks	
Efek-efek	817.926	200.913	-	-	-	617.013	Securities	
Reverse repo	1.321.583	-	1.321.583	-	-	-	Reverse repo	
Kredit – bersih	2.709.189	-	61.173	3.974	45.272	98.595	Loans – net	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	17.072	6.467	32	56	130	469	Accrued interest receivable	
Jumlah	6.699.917	474.694	2.949.621	4.030	45.402	99.064	3.127.105	Total
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities	
Liabilitas segera	116.264	116.264	-	-	-	-	Liabilities due immediately	
Simpanan dari nasabah	4.639.454	1.196.880	1.684.818	782.070	382.985	592.484	218	Deposit from customers
Simpanan dari bank lain	2.117.842	472.221	1.430.778	167.843	46.000	1.000	-	Deposit from other banks
Liabilitas lain-lain	84.904	84.904	-	-	-	-	-	Other liabilities
Jumlah	6.958.464	1.870.269	3.115.596	949.913	428.985	593.484	218	Total
Perbedaan jatuh tempo	(258.547)	(1.395.575)	(165.975)	(945.883)	(383.583)	(494.420)	3.126.887	Maturity gap
2020								
Nilai tercatat/ Carrying value	Tidak mempunyai jatuh tempo kontraktual/ No contractual maturity	Kurang dari/ Less than 1bulan/ Month	1-3 bulan/ Months	3-6 bulan/ months	6-12 bulan/ months	Lebih dari/ more than 12 bulan/ months		
Aset Keuangan							Financial Assets	
Kas							Cash	
Giro pada Bank Indonesia	102.188	102.188	-	-	-	-	Current accounts in Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	2.580	2.580	-	-	-	-	Current accounts in other Banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	304.924	-	-	304.924	-	-	Placements in Bank Indonesia and other Banks	
Efek-efek	617.099	-	-	-	-	617.099	Securities	
Kredit – bersih	2.968.242	-	903.030	23.429	68.759	145.379	1.827.645	Loans – net
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	88.503	-	26.925	699	2.050	4.335	54.494	Accrued interest Receivable
Jumlah	4.083.536	104.768	929.955	329.052	70.809	149.714	2.499.238	Total
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities	
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	-	-	Liabilities due immediately
Simpanan dari nasabah	2.582.207	595.949	1.579.552	269.895	99.935	36.775	101	Deposit from customers
Simpanan dari bank lain	675.482	84.047	576.435	15.000	-	-	-	Deposit from other banks
Liabilitas repo	-	-	-	-	-	-	-	Repo liabilities
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	Other liabilities
Jumlah	3.257.689	679.996	2.155.987	284.895	99.935	36.775	101	Total
Perbedaan jatuh tempo	825.847	(575.228)	(1.226.032)	44.157	(29.126)	112.939	2.499.137	Maturity gap

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Bank telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perbedaan jatuh tempo (*gap*) antara lain dengan cara menggeser deposito jangka pendek menjadi deposito dengan jangka waktu yang lebih panjang yaitu dengan pola komitmen. Disamping itu, Bank telah mengelola pola penarikan simpanan nasabah.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko timbulnya kerugian akibat sistem dan pengendalian yang tidak memadai, kesalahan manusia atau kegagalan pengendalian manajemen, termasuk bencana alam, kegagalan sistem, risiko pengelolaan dana, risiko operasi kustodian dan kecurangan (*fraud*).

Kerangka kerja dibentuk untuk memastikan adanya identifikasi dan pengendalian terhadap risiko operasional, termasuk pengendalian melalui kebijakan dan prosedur standar, praktik usaha serta pengawasan kepatuhan. Pengendalian tersebut akan terus ditinjau kembali dan disempurnakan secara berkala.

Risiko Hukum

Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank. Ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada dan adanya proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Bank selalu melakukan penilaian terhadap segala jenis perjanjian yang dilakukan Bank, baik dengan nasabah maupun dengan pihak ketiga sebelum perjanjian tersebut digunakan.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada prakteknya risiko kepatuhan melekat pada Bank, seperti terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum, Kualitas Aset Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

39. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The Bank undertakes actions to overcome the maturity gap among others by shifting short-term time deposits into time deposits with longer period using commitment pattern. In addition, the Bank has been managing the pattern of withdrawals of customer deposits.

Operational Risk

Operational risk is the risk arising from losses as a result of inadequate systems and controls, human error or management failure, includes the threat of natural disasters, systems failure, funds management risk, custodian operations risk dan fraud.

A framework is in place to ensure operational risk is identified and controlled. This includes a variety of controls including formal policies and standard procedures, business practices and compliance monitoring. These controls are subject for regular reviews and updates.

Legal Risk

Legal risk may arise due to the weakness of juridical aspects caused by lack of agreement made by the Bank. absence and/or changes in regulation which led to a transaction conducted by the Bank to be not in accordance with the regulation and the litigation process arising from third-party lawsuit against the Bank and the Bank against third party.

Bank always make an assessment of any kind of agreement involving the Bank, both with customers and with third parties before the agreement is implemented.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk that may arise due to the non-compliance by the Bank with prevailing regulations and laws. In practice, compliance risks are inherent with the Bank's risks. such as to comply with Minimum Reverse Requirement, Quality of Earning Assets, Allowance for Impairment Loss, Legal Lending Limit and other risk that may arise relating to certain regulations.

Reputation risks are risks which are caused by among others negative publication of the Bank's business or negative perception of the Bank itself.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Reputasi berkaitan erat dengan kepercayaan. Tanpa reputasi, maka kepercayaan tidak akan ada karena reputasi merupakan komponen yang sangat penting dalam industri perbankan. Reputasi merupakan salah satu aset Bank yang terpenting, namun justru paling sulit untuk dilindungi. Reputasi dapat menjadi suatu keunggulan kompetitif, namun berpotensi untuk rusak terutama karena perkembangan media dan komunikasi, regulasi yang makin ketat, juga loyalitas nasabah yang menurun.

Penilaian risiko reputasi meliputi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Risiko inheren terdiri dari pengaruh reputasi dari pemilik Bank dan perusahaan terkait, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank, frekuensi dan materialitas eksposur pemberitaan negatif Bank, serta frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

Risiko Strategi

Risiko strategi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat atau pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat.

Penilaian risiko strategi meliputi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Risiko inheren terdiri dari kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi bisnis Bank, dan pencapaian rencana bisnis Bank.

Pengelolaan Modal

Peraturan Permodalan

Bank Indonesia (BI) menetapkan dan memonitor ketentuan dan persyaratan modal untuk Bank sebagai entitas individu. Bank diharuskan untuk mematuhi peraturan BI sebagai badan pengawas modal.

Bank menggunakan pendekatan Model Standar untuk mengukur risiko kredit, sedangkan untuk risiko operasional menggunakan pendekatan Indikator Dasar.

Perhitungan modal bank umum sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dikelompokkan menjadi modal inti (*tier 1*), modal pelengkap (*tier 2*), dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*).

39. RISK MANAGEMENT (continued)

Reputation Risk (continued)

Reputation is closely related with trust. Without reputation, there will be no trust since reputation is a crucial component in a banking industry. Reputation is one of the Bank's precious assets, nonetheless it is also the most difficult to guard. Reputation can be a competitive advantage, but also potential to be damaged due to development of news and communication, more tightened regulations and declining in customers' loyalty.

Reputational risk assessment includes inherent risk and quality of risk management implementation. Inherent risk consists of the influence of the reputation of the Bank's owner and related companies, violation of business ethics, the complexity of the Bank's products and business cooperation, materiality and frequency of the Bank's negative news, and the materiality and the frequency of customer complaints.

Strategic Risk

Strategic risks are risks which are caused by among others inappropriate or less responsive in application of the Bank's strategy and making business decisions.

Strategic risk assessment includes inherent risk and quality of risk management implementation. Inherent risk consists of compliance of strategy with the business environment, high risk and low-risk strategy, the Bank's business positioning, and the achievement of the Bank's business plan.

Capital Management

Regulatory Capital

Bank Indonesia (BI) establishes and monitors the terms and conditions for the Bank's capital as an individual entity. Banks are required to comply with regulatory capital of BI as a supervisory board.

The Bank is using the Standard Model approach for measuring credit risk, while for operational risk is measured using the Basic Indicator approach.

*The calculation of capital for commercial banks is in accordance with the Bank Indonesia regulation which are grouped into core capital (*tier 1*), supplementary capital (*tier 2*), and additional supplementary capital (*tier 3*).*

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Pengelolaan Modal (lanjutan)

Modal Inti (tier 1)

Bank wajib menyediakan modal inti (tier 1), paling kurang 6% (lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR), dan modal inti utama paling kurang 4,5% dari ATMR.

Modal inti terdiri dari:

- a. Modal inti utama, yang mencakup
 - Modal disetor
 - Cadangan tambahan modal
- b. Modal inti tambahan

Modal Pelengkap (tier 2)

Modal pelengkap (tier 2) meliputi:

- a. Instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya
- b. Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap
- c. Cadangan umum penyisihan penghapusan atas aset produktif yang wajib dibentuk

Berbagai batasan diterapkan untuk unsur-unsur dari modal dasar. Pengaruh pajak tangguhan telah dikecualikan dalam menentukan jumlah laba ditahan untuk modal tier 1, hanya 50 persen dari laba tahun berjalan sebelum pajak tangguhan yang termasuk dalam modal tier 1 dan kualifikasi modal tingkat 2 tidak dapat melebihi modal tier 1. Ada juga pembatasan pada jumlah cadangan penurunan kolektif yang dapat dimasukkan sebagai bagian dari modal tier 2.

Operasional/aktivitas perbankan dikategorikan sebagai pembukuan perdagangan (*trading book*) atau pembukuan perbankan (*banking book*) dan ATMR yang ditentukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan yang mencerminkan berbagai tingkat risiko yang melekat pada aset dan eksposur yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan. Seperti disebutkan di atas, aset tertimbang menurut risiko memperhitungkan risiko operasional.

Alokasi modal antara kegiatan operasional dan kegiatan khusus, untuk pengembangan usaha didorong oleh optimalisasi pengembalian yang dicapai pada modal yang dialokasikan. Jumlah modal yang dialokasikan untuk setiap operasi atau kegiatan didasarkan terutama pada peraturan modal, tetapi dalam beberapa kasus peraturan tidak mencerminkan sepenuhnya berbagai tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan yang berbeda. Dalam kasus seperti ini kebutuhan modal dapat mencerminkan profil risiko yang berbeda, sesuai dengan tingkat keseluruhan modal untuk mendukung operasional atau kegiatan tertentu yang tidak di bawah persyaratan minimum yang diperlukan untuk tujuan pemenuhan peraturan. Proses mengalokasikan modal untuk kegiatan operasional dan kegiatan khusus dilakukan secara independen dari mereka yang bertanggung jawab untuk operasi oleh Risiko Bank dan Kredit Bank, dan ditinjau apakah sudah sesuai atau belum oleh Komite Kredit Bank atau ALCO.

39. RISK MANAGEMENT (continued)

Capital Management (continued)

Core Capital (tier 1)

Banks are required to provide the core capital (tier 1), at least 6% (five percent) of risk weighted assets (RWA), and common equity tier 1 at least 4.5% of RWA.

Core capital consists of:

- a. Common equity tier 1, includes:
 - Paid in capital
 - Disclosed reserve
- b. Additional tier 1

Supplementary Capital (tier 2)

Supplementary capital shall include:

- a. Capital instruments in the form of shares or other equity instruments
- b. Addition paid in capital derived from the issuance of capital instruments classified as supplementary capital
- c. Common reserve allowance for earning assets which shall be established

Various limits are applied to elements of the capital base. The effect of deferred taxation has been excluded in determining the amount of retained earnings for tier 1 capital, only 50 percent of the profit for the year before deferred taxation being included in tier 1 capital; and qualifying tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. There are also restrictions on the amount of collective impairment allowances that may be included as part of tier 2 capital.

Banking operations are categorized as either trading book or banking book, and RWA are determined according to specified requirements that reflect the varying levels of risk attached to assets and exposures that were not recognized in the statements of financial position. As noted above, risk weighted asset in respect of operational risk is included in the measurement.

The allocation of capital between operation and specific activities is, to a large extent, driven by optimization of the return achieved on the capital allocated. The amount of capital allocated to each operation or activity is based primarily upon the regulatory capital, but in some cases the regulatory requirements do not reflect fully the varying degree of risk associated with different activities. In such cases the capital requirements may be flexed to reflect differing risk profiles, subject to the overall level of capital to support a particular operation or activity not falling below the minimum required for regulatory purposes. The process of allocating capital to operation and specific activities is undertaken independently of those responsible for the operation by Bank Risk and Bank Credit, and is subject to review by the Bank Credit Committee or ALCO as appropriate.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Pengelolaan Modal (lanjutan)

Meskipun memaksimalkan pengembalian modal yang disesuaikan dengan risiko adalah dasar utama yang digunakan dalam menentukan bagaimana modal dialokasikan didalam Bank untuk kegiatan operasional atau kegiatan tertentu, tetapi hal tersebut bukan satu-satunya dasar yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Namun juga memperhitungkan sinergi dengan kegiatan operasional dan kegiatan lainnya, ketersediaan manajemen dan sumber daya lainnya dan kesesuaian dari aktivitas dengan tujuan jangka panjang Bank. Kebijakan Bank dalam hal manajemen dan alokasi modal ditinjau secara teratur oleh Direksi.

40. INFORMASI LAINNYA

- a. Berdasarkan POJK No. 11 /POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang “Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum” dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 perihal “Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Asset (CEMA)*”, Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Perhitungan ATMR untuk risiko kredit diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011, perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.

Perhitungan ATMR untuk risiko operasional diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang “Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar”. Berdasarkan surat edaran tersebut, sejak 1 Januari 2011, Bank telah memperhitungkan ATMR untuk risiko operasional dengan perhitungan beban modal risiko operasional 15% dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga periode terakhir.

Perhitungan rasio kecukupan modal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
Untuk risiko kredit	3.421.127	1.972.624
Untuk risiko operasional	236.884	352.683
Modal inti	1.503.369	791.094
Modal pelengkap	21.421	16.922
Jumlah modal inti dan Pelengkap	1.524.790	808.016
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)		
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	41,68%	34,75%
Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	41,68%	34,75%
Rasio modal inti terhadap aset tertimbang menurut risiko	41,10%	34,02%

39. RISK MANAGEMENT (continued)

Capital Management (continued)

Although maximization of the return on risk-adjusted capital is the principal basis used in determining how capital is allocated within the Bank to particular operations or activities, it is not the sole basis used for decision-making. Synergies with other operations and activities, the availability of management and other resource, and the fit of the activity with the Bank's longer term strategic objectives are also taken into consideration. The Bank's policies regarding capital management and allocation are reviewed regularly by the Board of Directors.

40. OTHER INFORMATION

- a. In accordance with POJK No. 11/POJK.03/2016 dated January 29, 2016 regarding “Commercial Bank Minimum Capital Adequacy Requirement” and Bank Indonesia Circular Letter No. 14/37/DPNP dated December 27, 2012 regarding “Minimum Capital Adequacy Requirement and Fulfillment of Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)”, the Bank is required to fulfill minimum capital based on risk profile.

The calculation of RWA with credit risk is stipulated in Bank Indonesia Circular Letter No. 13/6/DPNP dated February 18, 2011 regarding “RWA with Credit Risk Calculation using Standard Approach”.

The calculation of RWA with operational risk is stipulated in Bank Indonesia Circular Letter No. 11/3/DPNP dated January 27, 2009 regarding “RWA with Operational Risk Calculation using Basic Indicator Approach”. Based on this circular letter, since January 1, 2011, bank has calculated RWA with operational risk in which capital charge with operational risk at 15% of average annual positive gross income for the last three periods.

The calculation of capital adequacy ratio as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

Risk Weighted Assets (RWA)
With credit charge
With operational charge
Core capital
Supplementary capital
Total core and Supplemenentary
Capital Adequacy Ratio (CAR)
With credit and operational risk
With credit, operational and market risk
Ratio of core capital to risk weighted assets

40. INFORMASI LAINNYA (lanjutan)

b. Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000 untuk masing-masing nasabah per masing-masing bank dengan kriteria suku bunga deposito tertentu.

Beban premi penjaminan Pemerintah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar, Rp9.911 dan Rp4.449 dan dibukukan pada akun beban bunga (Catatan 26).

c. Perjanjian-perjanjian Signifikan

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Piutang tanggal 11 Mei 2020 dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Akta Notaris R. Tendy Suwarman, SH. Nomor 12 beserta addendum Nomor 22 tanggal 15 Juni 2020.

Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 11 Mei 2020 dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Akta Notaris R. Tendy Suwarman, SH. Nomor 13.

Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 15 Juni 2020 dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Akta Notaris R. Tendy Suwarman, SH. Nomor 23.

Perjanjian tentang Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronik Artajasa dalam rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional tanggal 08 Juni 2018 dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik Nomor: 055/PKS/DIR-BB/VI/18 dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang.

Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Agustus 2018 dengan PT Sigma Cipta Caraka dengan tujuan penyediaan Jasa Manajemen Teknologi Informasi, Nomor: 069/PKS/DIR-BB/VII/2018 yang berlaku selama 5 tahun.

Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Mei 2020 dengan Koperasi Karya Gemilang Nusantara dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit), Nomor: 032/PKS/DIR-BB/V/2020 yang berakhir tanggal 11 Mei 2021.

Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Mei 2020 dengan PT Romora Martindo dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit), Nomor: 033/PKS/DIR-BB/V/2020 yang berakhir tanggal 11 Mei 2021.

Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2019 dengan PT Girana Pratama Mandiri dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit), Nomor: 056/PKS/DIR-BB/XI/2019 yang berakhir tanggal 31 Oktober 2020.

40. OTHER INFORMATION (continued)

b. Government Guarantee on Obligations of Banks

As of December 31, 2021 and 2020, based on Government Regulation No. 66/2008 dated October 13, 2008 regarding the amount of deposit guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000 per depositor per bank subject to certain criteria of interest rates of deposits.

The government guarantee premium incurred for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounting to, Rp9,911 and Rp4,449 and respectively, are recognized as part of interest expense (Note 26).

c. Significant Agreement

Accounts Receivable Sale and Purchase Agreement on 11 May 2020 with PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Deed of Notary R. Tendy Suwarman, SH. Number 12 along with addendum Number 22 dated June 15, 2020.

Accounts Receivable Transfer Agreement (Cessie) dated May 11, 2020 with PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Deed of Notary R. Tendy Suwarman, SH. Number 13.

Accounts Receivable Transfer Agreement (Cessie) dated June 15, 2020 with PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Deed of Notary R. Tendy Suwarman, SH. Number 23.

Agreement regarding Artajasa Electronic Transaction Service Membership in the context of Implementing National Payment Gates on June 8 2018 with PT Artajasa Electronic Payment Number: 055/PKS/DIR-BB/VI/18 with a period of 3 years and can be extended.

Agreement dated August 16, 2018 with PT Sigma Cipta Caraka with the aim of providing Information Technology Management Services, Number: 069/PKS/DIR-BB/VII/2018 which is valid for 5 years.

Agreement dated May 11, 2020 with Koperasi Karya Gemilang Nusantara with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number : 032/PKS/DIR-BB/V/2020, which expired on May 11, 2021.

Agreement dated May 8, 2018 with PT Romora Martindo with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number : 033/PKS/DIR-BB/V/2020 which expired on May 11, 2021.

Agreement dated November 1, 2019 with PT Girana Pratama Mandiri with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number : 056/PKS/DIR-BB/XI/2019 which expired on October 31, 2020.

40. INFORMASI LAINNYA (lanjutan)

c. Perjanjian-perjanjian Signifikan (lanjutan)

Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Januari 2020 dengan Law Firm Wijaya Sandi & CO dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit) Nomor: 001A/PKS/DIR-BB/I/2020 yang berakhir tanggal 15 Januari 2021.

Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Januari 2020 dengan Noesantara Law Firm dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit), Nomor: 003/PKS/DIR-BB/I/2020, yang berakhir tanggal 15 Januari 2021.

Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Oktober 2020 dengan Kantor Hukum dan Advokasi N. Suryana, SH dan Rekan dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit), Nomor: 120/PKS/DIR-BB/X/2020, yang berakhir tanggal 6 Oktober 2021.

Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Juli 2020 dengan Law Firm Gaw-Tu dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit), Nomor: 065/PKS/DIR-BB/VII/2020, yang berakhir tanggal 27 Juli 2021.

Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Oktober 2020 dengan Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit), Nomor: 121/PKS/DIR-BB/X/2020, yang berakhir tanggal 6 Oktober 2021.

Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Mei 2020 dengan PT Putra Banten Mulia dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit), Nomor: 031/PKS/DIR-BB/V/2020, yang berakhir tanggal 11 Mei 2021.

Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Desember 2019 dengan PT Unitec Indo Pratama dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit), Nomor: 070/PKS/DIR-BB/XII/2019, yang berakhir tanggal 4 Desember 2020.

Perjanjian Kerjasama tanggal 19 September 2019 dengan PT Usaha Mitra Sejahtera dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit), Nomor: 046/PKS/DIR-BB/IX/2019, yang berakhir tanggal 18 September 2020.

d. Dampak Covid – 19

Pada tanggal 01 Desember 2020 Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK No.48/POJK/03/2020 tentang peraturan otorisasi jasa keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019. Perihal dampak atas penyebaran Covid-19 dan Stimulus Perekonomian Nasional sedang dipelajari oleh manajemen Bank dan belum dapat diungkapkan dalam laporan keuangan.

40. OTHER INFORMATION (continued)

c. Significant Agreement (continued)

Agreement dated January 15, 2020 with Law Firm Wijaya Sandi & CO with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number : 001A/PKS/DIR-BB/I/2020 which expired on January 15, 2021.

Agreement dated January 15, 2020 with Noesantara Law Firm with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number : 003/PKS/DIR-BB/I/2020 which expired on January 15, 2021.

Agreement dated October 6, 2020 with Kantor Hukum dan Advokasi N. Suryana, SH dan Rekan with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number : 120/PKS/DIR-BB/X/2020 which expired on October 6, 2021.

Agreement dated July 27, 2020 with Law Firm Gaw-Tu with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number : 065/PKS/DIR-BB/VII/2020 which expired on July 27, 2021.

Agreement dated October 6, 2020 with Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number : 121/PKS/DIR-BB/X/2020 which expired on October 6, 2021.

Agreement dated May 11, 2020 with PT Putra Banten Mulia with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number : 031/PKS/DIR-BB/V/2020 which expired on May 11, 2021.

Agreement dated December 5, 2019 with PT Unitec Indo Pratama with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number : 070/PKS/DIR-BB/XII/2019 which expired on December 4, 2020.

Agreement dated September 19, 2019 with PT Usaha Mitra Sejahtera with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number : 046/PKS/DIR-BB/IX/2019 which expired on September 18, 2020.

d. Impact on Covid – 19

On December 01, 2020, the Financial Services Authority issued POJK No.48/POJK/03/2020 concerning financial service authorization regulations No.11/POJK.03/2020 regarding the national economic stimulus as a countercyclical policy impacting the spread of the 2019 corona virus disease. The spread of Covid-19 and the National Economic Stimulus are being studied by the Bank's management and cannot be disclosed in the financial statements.

41. DAMPAK PENERAPAN PSAK YANG BERLAKU EFEKTIF 1 JANUARI 2020

Dampak dari penerapan PSAK 71 terhadap laporan keuangan.

Dampak atas penerapan PSAK 71 pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, dimana dampak penerapan PSAK 71 tersebut dihitung oleh pihak ketiga (PT Colega Inti Pratama) tanggal 1 Maret 2021, yaitu sebagai berikut:

31 Des/ Dec 31, 2020				
	Saldo sebelum penerapan PSAK 71/ <i>Balance before the adoption of SFAS 71</i>	Penyesuaian PSAK 71/ <i>Adjustments to SFAS 71</i>	Saldo setelah penerapan PSAK 71/ <i>Balance after the application of SFAS 71</i>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	126.955	691.622	821.577	<i>Allowance for impairment losses</i>
Saldo rugi tahun lalu	(1.842.905)	(671.423)	(2.514.328)	<i>Net loss year retained earning</i>

Dampak dari penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan.

Dampak atas penerapan PSAK 73 pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, dimana dampak penerapan PSAK 73 tersebut dihitung oleh pihak ketiga (*Risk Management Guard*) tanggal 22 Maret 2021, yaitu sebagai berikut:

31 Des/ Dec 31, 2020				
	Saldo sebelum penerapan PSAK 73/ <i>Balance before the adoption of SFAS 73</i>	Penyesuaian PSAK 73/ <i>Adjustments to SFAS 73</i>	Saldo setelah penerapan PSAK 73/ <i>Balance after the application of SFAS 73</i>	
Biaya dibayar dimuka sewa	59.524	(20.870)	38.653	<i>Prepaid rent</i>
Liabilitas segera	36.325	(35.525)	800	<i>Immediate liability</i>
Liabilitas sewa	8.970	(55)	8.915	<i>Lease liabilities</i>
Beban depresiasi sewa guna usaha	21.234	864	22.098	<i>Right of use asset. depreciation expense</i>
Beban bunga sewa guna usaha	1.247	71	1.318	<i>Right of use asset interest expense.</i>
Aset tetap - Aset sewa guna usaha	46.215	(22.263)	23.952	<i>Fixed assets - Leased assets</i>

42. SALDO RUGI DAN RENCANA MANAJEMEN

Sejak tahun 2014, Bank mengalami rugi bersih berturut-turut. Akumulasi saldo rugi Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.657.404 dan Rp2.392.228.

Jumlah aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.849.611 naik Rp3.512.329 atau 39,69% dibandingkan dengan total aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.337.281. Kenaikan terutama disebabkan naiknya jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

41. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS 73

The impact of the application SFAS 71 on financial statement.

The impact of the application of SFAS 73 on the statement of financial position on December 31, 2021 in which the impact of the application of SFAS 73 is calculated by a third party (PT Colega Inti Pratama) on March 1, 2021. which is as follows:

The impact of the application SFAS 73 on financial statement.

The impact of the application of SFAS 73 on the statement of financial position on December 31, 2021, in which the impact of the application of SFAS 73 is calculated by a third party (*Risk Management Guard*) on March 22, 2021 which is as follows:

42. DEFICIT AND MANAGEMENT PLAN

Since 2014, the Company experienced a net loss in a row. The Bank's accumulated loss as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp2,657,404 and Rp2,392,228.

Total assets on December 31, 2021 amounting to Rp8,849,611 increased to Rp3,512,329 or 39.69% compared with a total assets on December 31, 2020 amounting to Rp5,337,281. The decline was mainly due to a increase in the number of placements with Bank Indonesia and Securities purchase under agreement to resell.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. SALDO RUGI DAN RENCANA MANAJEMEN (lanjutan)

Berdasarkan rencana bisnis Bank untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 tentang penyesuaian bisnis Bank, manajemen Bank telah menetapkan:

- a. Bank akan melanjutkan Penawaran Umum Terbatas VIII pada triwulan IV Tahun 2022 dengan target sebesar Rp600.000 sampai dengan Rp1.000.000.
- b. Manajemen Bank mengevaluasi proses operasi Bank secara keseluruhan serta mengurangi biaya operasional agar bisa menjadi lebih efisien serta manajemen menerapkan GCG di semua tingkatan.
- c. Manajemen Bank telah menyusun laporan action plan rencana perbaikan kinerja dalam proses penyehatan Bank tanggal 10 Februari 2022.

43. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah disetujui Direksi untuk diterbitkan tanggal 15 Maret 2022.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2021

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

42. DEFICIT AND MANAGEMENT PLAN (continued)

Based the Bank's business plan for 2022 to 2024 regarding the Bank's business adjustment, the Bank management has determined:

- a. The Bank will conduct a Limited Public Offering VIII in the fourth Quarter of 2022 with a target of Rp600,000 to Rp1,000,000.*
- b. The Management evaluate the Bank's overall operations process and reduce operational cost to be more efficient and the management adapted GCG in every level.*
- c. The Bank's management has prepared an action plan report on the performance improvement plan in the Bank restructuring process dated February 10, 2022.*

43. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements were approved and authorized for issue by the Directors on March 15, 2022.

2021

Laporan Tahunan
Annual Report



KANTOR PUSAT NON OPERASIONAL

Jl. Sudirman Lingkungan Kemang,
Ruko Sembilan No. 04, 05 & 06

Kelurahan Sumur Pecung,
Kecamatan Serang, Banten

Telp. 0254 – 791734

www.bankbanten.co.id

2021

Laporan Tahunan
Annual Report